Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☑ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA		1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA		2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA		3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA		4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN		5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Susunan DKM diumumkan pekan ini

JAKARTA (Bisnis): Perwira yang akan duduk menjadi anggota Dewan Kehormatan Militer (DKM) dipastikan jenderal berbintang tiga dan empat, sementara susunan keanggotaannya akan diumumkan pekan ini.

Gubernur Lemhanas Letjen TNI Agum Gumelar menyatakan yang menjadi anggota DKM nanti perwira tinggi berbintang tiga dan empat. "Namun nama-namanya belum dapat diumumkan, dan silakan tanya saja ke Menhankam/Pangab," tegasnya di sini akhir pekan lalu, usai mendampingi Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan AS William S Cohen.

Menurut Agum, untuk mengusut kasus penculikan itu dibutuhkan data yang komprehensif supaya keputusan yang diambil sesuai ketentuan. "Kalian sabar saja dan tidak usah terburu-buru. Pokoknya kita butuh data yang komplit."

Yang menjadi anggota, katanya, ditetapkan berbintang tiga dan empat mengingat kasus penculikan merupakan masalah yang dianggap penting dan membutuhkan konsentrasi tinggi.

"Jadi bukan karena yang diperiksa ada bintang tiga atau bintang empat. Itu lain masalah lagi," katanya, ketika ditanya apakah pengangkatan anggota DKM itu berkaitan dengan keterlibatan jenderal berbintang tiga. (s8)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Jenderal Subagyo Pimpin DKM?

Bukan karena Agum Berseteru dengan Prabowo

Jakarta, JP.-

Siapa yang akan memimpin Dewan Kehormatan Militer (DKM) untuk menyelidiki keterlibatan sejumlah perwira ABRI dalam kasus penculikan aktivis prodemokrasi? Kepastiannya masih akan diumumkan hari ini.

Namun, menurut sumber yang layak dipercaya, kepemimpinan dewan tersebut akan dipercayakan kepada KSAD Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo. Jika informasi ini benar, teka-teki bahwa ketua DKM untuk kasus penculikan aktivis ini dipegang Gubernur Lemhanas Letjen TNI Agum Gumelar terbukti salah.

Agum yang belakangan namanya makin populer itu juga tak mau membocorkan nama-nama yanag akan menjadi anggota DKM. Mantan Pangdam Wirabuana ini hanya mengisyaratkan, ketua DKM bisa jenderal bintang tiga atau empat. Tapi, kata dia, sebaiknya jenderal bintang empat.

Meski belum ada keterangan resmi dari para petinggi ABRI, beberapa sumber yang dekat dengan kalangan militer mengatakan bahwa itu dapat dipastikan bila tidak ada perubahan dalam detik-detik terakhir. Karena itu, hampir dapat dipastikan bahwa KSAD Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo akan memimpin DKM.

"Subagyo adalah salah satu jenderal paling senior di ABRI. Karena DKM ini juga akan mengusut keterlibatan perwira tinggi bintang tiga, maka ketuanya harus satu tingkat di atas bintang tiga. Di ABRI hanya ada dua jenderal, Subagyo dan Wiranto. Pangab tidak bisa jadi ketua DKM. Soalnya, laporan ketua DKM ini ke Pangab. *Masak* Pangab melapor ke Pangab," kata sumber yang tak mau disebutkan jati dirinya itu.

Dia juga menyebutkan sejumlah nama yang akan masuk sebagai anggota DKM. Mereka antara lain adalah Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono (Kassospol ABRI), Letjen TNI Agum Gumelar, dan perwira tinggi dari TNI Angkatan Laut.

Mengapa Agum yang selama ini santer disebut akan memimpin DKM tak jadi dipilih? Selain alasan kepangkatan, konon, ada pertimbangan lain. Diprediksikan, jika Agum yang menjadi ketua, dikhawatirkan konflik di tubuh ABRI makin transparan.

Dari bisik-bisik yang cukup keras, selama ini ada rivalitas yang cukup keras antara Agum dan Letjen TNI Prabowo Subianto yang menjadi Danjen Kopassus saat penculikan para aktivis terjadi. Karena itu, jika Agum yang menjadi ketua DKM, objektivitasnya bisa berkurang dan bukan tidak mungkin terjadi pembersihan orang-orang Prabowo.

Pembentukan DKM ini sebagai jawaban atas gencarnya tuntutan masyarakat dan dunia internasional agar masalah penculikan itu diusut tuntas.

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA		6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Prabowo, Muchdi Dan Chairawan Langgar Kode Kehormatan Perwira

Kasad, Ketua Dewan Kehormatan Perwira

Jakarta, 3 Agustus

Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto Senin (3/8) siang mengumumkan susunan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di Mabes ABRI Jl Merdeka Barat, Jakarta.

Ketua DKP tersebut adalah Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Subagyo HS dan sebagai Wakil Ketua adalah Kepala Staf Umum (Kasum) ABRI Letjen TNI Fachrul Razi. Sementara itu anggota-anggotanya masing-masing adalah: Irjen ABRI Laksdya TNI Suratmin, Kassospol ABRI Letjen TNI S. Bambang Yudhoyono, Gubernur Lemhannas Letjen TNI Agum Gumelar, Pangkostrad Letjen TNI Djamari Chaniago, Danjen AKABRI Laksdya TNI Achmad Sutjipto; sedangkan 2 anggota cadangan masing-masing adalah Wakasad Letjen TNI Sugiono dan Letjen TNI Arie Kumaat.

Pada kesempatan itu Menhankam/Pangab menjelaskan DKP tersebut untuk memeriksa tabiat perbuatan perwira yang melanggar kode kehormatan perwira sehubungan dengan terjadinya kasus orang hilang atau penculikan yang terjadi baru-baru ini.

Ditegaskannya yang nyata-nyata melanggar kode perwira tersebut masing-masing Letjen TNI Prabowo Subianto (sekarang Komandan Sesko ABRI), Mayjen TNI Muchdi PR (mantan Danjen Kopassus) dan Kol Inf. Chairawan (terakhir Dangrup 4/Kopassus). Pada kesempatan itu ditegaskan Menhankam, menyangkut kasus orang hilang dan penculikan tersebut ABRI memutuskan sistem peradilan yang berlaku untuk ABRI di gunakan melalui 2 proses hukum yaitu sistem DKP dan Mahkamah Militer.

Menurut Wiranto, sebanyak 10 orang yang akan diajukan ke Mahkamah Militer, yaitu 7 perwira dan 3 bintara. Dan jumlah tersebut tidak menutup kemungkinan untuk bertambah, sesuai dengan perkembangan. Hadir pada acara pengumuman DKP tersebut para Kepala Staf dan Kapolri serta Sekjen Dephankam, Irjen ABRI, Irjen Dephankam, Kasum ABRI, Kassospol ABRI dan Kapuspen Hankam/ABRI.

Seperti diketahui Letjen Prabowo, Mayjen Muchdi dan Kol. Chairawan telah dipindahkan dari posisinya yang semula semenjak bulan Mei 1998 yang lalu; tetapi tidak dijelaskan apa alasan sebenarnya pemindahan mereka tersebut.

Dewan serupa pernah dibentuk tahun 1993 yang lalu, setelah terjadinya peristiwa Santa Cruz, Dili, Timtim. Dalam suatu pertemuan mendadak yang diselenggarakan pada tanggal 28 Desember 1993 di Istana Merdeka, Presiden Soeharto memerintahkan kepada Kasad Jenderal TNI Edi Sudradjat untuk membentuk DKP (waktu itu namanya adalah DKM, Dewan Kehormatan Militer). Dewan tersebut diketuai oleh Mayjen TNI Feisal Tanjung, Komandan Seskoad di Bandung. DKM yang memeriksa sejumlah besar perwira. ((M-11/A-4/A-5)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA		1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA		2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA		3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA		4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN		5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Mengusut Prabowo Oke, Mengadili. Nanti Dulu



"Siapa takut". Mungkin begitu jawaban ABRI bila ditanya beranikah membawa Letjen TNI Prabowo, Mayjen TNI Muchdi P.R., dan Kolonel Chaerawan ke mahkamah militer. Para jenderal ABRI yang masuk DKP telah berjanji, bila terbukti melanggar pasal-pasal pidana, mereka pasti diadili. Sekarang, waktu yang akan menguji. Apakah tiga prajurit ABRI itu sampai ke mahkamah militer atau hanya berhenti sampai DKP.

DEWAN Kehormatan Perwira (DKP) telah terbentuk. Tiga perwira: Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi P.R., dan Kolonel Inf Chaerawan, secara resmi telah diajukan ke DKP. Ketiganya harus mempertanggungjawaban perbuatan mereka yang diduga melanggar kode kehormatan perwira di depan tim yang diketuai Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo.

Mengapa hanya Prabowo, Muchdi P.R., dan Kolonel Inf Chaerawan? Sebuah sumber menyebutkan, untuk kali pertama, memang tiga orang itu yang dijadikan sasaran. Tapi, dalam proses nanti, Prabowo diperkirakan akan "bernyanyi" tentang siapa saja yang terlibat atau paling tidak mengetahui operasi yang diduga didalangi Prabowo.

Siapa saja yang kira-kira bakal "digigit" Prabowo? Sumber tadi menyebutkan, nama Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoedin hampir pasti dilibatkan. Mantan Pangdam Jaya itu kabarnya sudah diampuni oleh Pangab Jenderal Wiranto. Tetapi, kelihatannya Prabowo tidak akan membiarkan begitu saja. Jadi, sangat mungkin jumlah "tersangka" bertambah, apalagi jika Prabowo lantas mengungkit-ungkit perselisihan lamanya dengan Wiranto.

Yang jadi pertanyaan, sampai sejauh mana sanksi DKP nanti? Dalam sejarah DKP (dulu pernah ada [illegible] sanksi ter-

Cruz pada 1996 yang ditangani DKM, jelas-jelas diungkapkan bahwa korban yang tewas lebih dari 50 orang. Ini tentu tidak bisa disebut sebuah kesalahan prosedur sebagaimana yang biasanya dipakai ABRI untuk menutupi kesalahan. Tetapi, apa yang terjadi? Sintong Panjaitan dan Rudolf Warouw yang bertanggung jawab hanya dikenai sanksi pemberhentian. Yang selebihnya tidak ada. Betapa mengherankannya, orang yang jelas terbukti memerintahkan pembunuhan terhadap 50 nyawa lebih dibebaskan melenggang (bahkan tetap diberi jabatan) tanpa harus bertanggung jawab.

Kalau ABRI ternyata masih kebal terhadap reformasi, mudah sekali dibayangkan bahwa DKP kali ini pun pasti akan mengambil keputusan yang itu-itu juga. Paling-paling, sanksinya hanya pemberhentian dari jabatan tanpa ada pengadilan. Setelah itu, biasanya mereka masih dicarikan jabatan di tempat lain.

Agak sulit, kiranya, mengharapkan pemeriksaan ini objektif dan transparan. Pangkalnya? Seperti kata Amien Rais, seluruh petinggi ABRI pasti terlibat. Kalau sudah demikian, membawa kasus ini ke pengadilan terbuka bisa menjadi blunder.

Karena itu, ada analisis bahwa pembentukan DKP merupakan upaya melokalisasi ma-

jawab bisa diamankan.

Itu, barangkali, yang membuat Mayjen TNI (pur) Samsudin gerah. Orang Kopassus yang satu ini dikenal sebagai pemicu gerakan keterbukaan di DPR melalui pernyataan-pernyataannya yang blak-blakan. Sebagai orang Kopassus, Samsudin mungkin tidak rela korpsnya dijadikan kambing hitam. Karena itu, dalam wawancaranya dengan *SCTV* Samsudin menegaskan bahwa seharusnya rekomendasi DKP hanya satu: bawa kasus ini ke pengadil-

an. Maksud Samsudin jelas. Dengan pengadilan terbuka, akan diketahui siapa saja yang bertanggung jawab.

Senada dengan Samsudin, anggota Komnas HAM Bambang Soeharto menilai, meski DKP sudah terbentuk, pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan personel ABRI tetap harus diproses melalui sidang mahkamah militer. "Pelanggaran pidana yang dilakukan militer, saya kira, harus diadili di mahkamah, tentu dengan asas praduga tak bersalah. Dan, si-

dang itu harus terbuka untuk umum sehingga proses peradilan tersebut bisa dipantau masyarakat," kata Bambang.

Akankah harapan itu terwujud? Kalau janji Subagyo kemarin dipercaya, mungkin saja harapan itu jadi kenyataan. Masalahnya sekarang, bisakah DKP transparan sehingga masyarakat tahu ada pelanggaran pidana yang dilakukan ketiga tersangka itu. Kalau transparansi tidak ada, tentu bisa dengan gampang Subagyo berbohong. **(ado/ mik/ilo)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Titip Nasib ke Prabowo



LETJEN TNI Prabowo Subianto yang dulu sering disebut-sebut sebagai *The Rising Star* akhirnya tersandung. Kali ini, sandungan yang dia hadapi begitu serius, sampai ada yang memperkirakan ia sulit bangkit kembali. Putra begawan ekonomi Prof Dr Sumitro Djojohadikusumo yang juga menantu Soeharto ini sekarang benar-benar dirundung malang. Ini akibat dugaan keterlibatannya dalam kasus penculikan para aktivis.

Peristiwa penculikan itu terjadi ketika Prabowo masih menjadi Dankopassus. Bahkan, sampai menjabat posisi Pangkostrad pun, masih terjadi beberapa penculikan. Semua pun menaruh curiga pada Prabowo. Lalu, mengapa atasan Prabowo yang saat itu memegang posisi Pangab Jenderal TNI Feisal Tanjung, KSAD Jenderal TNI R Hartono (termasuk Wiranto dan Subagyo), Kasum ABRI Letjen TNI Suyono, Direktur BIA Mayjen TNI Syamsir Siregar tidak ada yang mengingatkan.

Benarkah mereka tidak tahu, pura-pura tidak tahu, atau tidak berani mengingatkan? Mungkin saja penyelidikan DKP bisa mengungkapkan itu. Tetapi, agak sulit bagi masyarakat untuk mengetahuinya karena belum ada jaminan dari ABRI bahwa pemeriksaan itu akan transparan. Jadi, hanya lewat pengadilanlah pertanyaan itu bisa terjawab.

Tetapi, tentu saja banyak spekulasi yang beredar untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ada yang melihat bahwa Prabowo memang orang yang ambisius. Keinginannya menjadi orang besar sudah ada dalam pembawaannya. Ini yang membuat Prabowo merasa menjadi super di antara rekan-rekannya di ABRI, termasuk kurang "menganggap" atasannya. Di samping itu, faktor lain yang membuat dirinya merasa lebih besar adalah posisinya sebagai menantu Presiden Soeharto (waktu itu).

Posisinya sebagai menantu presiden membuat karier Prabowo di militer bak meteor. Tiga bintang di pundaknya diperoleh dalam waktu relatif cepat. Banyak kawan seangkatannya, lulusan Akabri 74, yang sekarang masih menyandang kolonel. Yang tertinggi berbintang dua, misalnya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoedin dan Mayjen TNI Riyamirzad (menantu Try Sutrisno).

Mungkin faktor itulah yang membuat atasannya maupun kawan-kawannya tidak berani mengingatkan setiap tindakan yang dilakukan Prabowo. Selain karena rikuh, Prabowo sudah telanjur dicap sebagai *the next leader*.

Ini yang membuat kawan-kawannya maupun atasannya menitipkan dirinya kepada Prabowo. Artinya, seluruh kawannya maupun atasannya menggantungkan nasib kepada Prabowo. Jadi, apa pun yang dilakukan Prabowo, tidak ada yang berani mengkritik, khawatir karier militernya terancam.

Kasus penculikan itu mungkin bisa menjadi salah satu bukti bahwa Prabowo dibiarkan saja melangkah sesukanya. Dan, kalau akhirnya ia tersandung dan jatuh, tentu mereka sudah cepat-cepat berpikir mengenai bagaimana menyelamatkan diri dan mencuci tangan. **(saf)**

Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA		1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA		2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA		3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA		4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN		5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Mereka yang Segera Diperiksa DKP

LETJEN TNI PRABOWO SUBIANTO

Ia adalah anak kandung begawan ekonomi Prof Dr Sumitro Djojohadikusumo. Kakeknya, Margono Djojohadikusumo, adalah salah seorang pendiri Bank Negara Indonesia 1946 dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang pertama.

Sejak lulus Akabri 1974, Prabowo langsung bergabung dalam pasukan baret merah dan kariernya terus melesat di jajaran elite TNI-AD ini. Lahir di Jakarta, 17 Oktober 1951, Prabowo menjadi orang nomor satu di Kopassus sejak 1 Desember 1995 dengan pangkat brigjen.

Selepas SMU, menantu mantan Presiden Soeharto ini sebenarnya diterima di tiga universitas di AS. Namun dia justru memilih masuk Akabri di Magelang dan dilantik menjadi perwira ABRI pada 1974.

Ketika Timor-Timur bergejolak pada 1976, ia diterjunkan ke sana bergabung dalam Tim Naggala X. Dia menjadi Komandan Tim Naggala 28 saat berpangkat letnan satu. Tim baret merah ini kemudian menjadi terkenal karena berhasil menembak mati Presiden Fretilin, Nicolao Lobato.

Pangkat Prabowo kemudian dinaikkan menjadi kapten dengan jabatan Perwira Operasi Grup 1 Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopasandha) — nama Kopassus waktu itu. Pada 1980, ia mengikuti pendidikan infantri di AS, dan menjadi lulusan terbaik (*distinguished graduate*). Tak berapa lama ia mengikuti pendidikan antiteror di satuan khusus Jerman Barat, GSG-9. Ia pun terpilih menjadi siswa terbaik.

Maka, setelah pulang ke Indonesia, atas perintah Panglima ABRI (ketika itu) Jenderal M Jusuf, ia beserta beberapa perwira lainnya ditunjuk sebagai pelaksana membentuk pasukan antiteror atau yang dikenal sebagai Detasemen 81 (Den 81).

Dua tahun kemudian, ia diangkat menjadi Wakil Komandan Den 81 Kopassus. Ketika itu sebagai Komandan Tim Candrasa VII. Pada 1985, pangkatnya dinaikkan menjadi mayor dan ia dipindahkan menjadi Wakil Komandan Batalyon Infantri 328 Kostrad. Pada tahun yang sama, dalam pendidikan kursus lanjutan perwira di AS, ia lulus dengan predikat *honor graduate advanced course*.

Meski prestasinya dinilai bagus, suami Siti "Titik" Hediati ini dianggap terlalu cepat naik pangkat. Untuk mencapai pangkat brigjen ia hanya butuh tempo 11 tahun — suatu proses yang menempatkan Prabowo sebagai salah seorang perwira paling awal mendapat bintang.

Tak lama setelah Prabowo di puncak Kopassus, bintangnya pun bertambah satu menjadi Mayjen. Menjelang SU MPR, kembali ia menambah satu bintang lagi menjadi Letjen dengan posisi Pangkostrad. Saat itu bintangnya benar-benar bersinar. Bahkan banyak yang meramalkan, Prabowo akan menjadi orang namor satu di ABRI. Jabatan Pangab seakan-akan tinggal menunggu waktu saja.

Namun, jatuhnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada 21 Mei lalu mengubah arah cerita 100 persen. Alur karier Prabowo pun di ujung tanduk. Pada 22 Mei 1998, ia dicopot sebagai Pangkostrad dan dipindahkan menjadi Komandan Seskoad di Bandung. Kini, ketika kasus penculikan aktivis yang melibatkan oknum Kopassus tersibak, Prabowo seperti membentur ganjalan paling besar dan sangat mungkin bakal menghentikan kariernya di dunia militer.

MAYJEN TNI MUCHDI PURWOPRANJONO

Posisinya di puncak pasukan elite TNI-AD Kopassus baru dia pegang April lalu. Pada 22 Mei 1998, ia sudah harus menyerahkan jabatan bergengsi itu ke tangan Mayor Jenderal Syahrir MS, Panglima Kodam IX Udayana. Sebelum menjadi Komandan Kopassus, Muchdi adalah Pangdam Tanjungpura. Muchdi disebut-sebut sangat dekat dengan Prabowo. Konon, Prabowo pulalah yang mengusulkan nama Muchdi untuk menggantikan dirinya sebagai pemegang tongkat komando di Kopassus.

KOLONEL CHAIRAWAN

Kolonel Chairawan dikenal sebagai sosok berpenampilan tenang. Lulusan Akabri 1978 ini adalah Komandan Grup-4 Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Grup-4 Kopassus adalah sebuah unit khusus Sandi Yudha yang bermarkas di Cijantung, Jakarta. Di bawah Grup-4 Kopassus terdapat Batalyon 41, Batalyon 42, dan Batalyon 43. Tugas pokok Grup-4 Kopassus adalah melaksanakan apa yang disebut *conditioning operations* (operasi penciptaan kondisi). Pelaksanaannya tergantung apakah memungkinkan diperoleh keuntungan strategis atau menciptakan dampak psikologis yang besar terhadap sasaran operasi.

Setelah Kopassus mengalami reorganisasi pada 1996, di bawah Grup-4 ini dibentuk sebuah detasemen yang disebut Detasemen Operasi Psikologis. Tugasnya melakukan operasi bantuan untuk mendukung misi operasi yang dilakukan pasukan Sandi Yudha atau pasukan Para Komando.

Anggota Detasemen Operasi Psikologis juga memungkinkan untuk melaksanakan tugas secara tersendiri. Untuk meningkatkan kemampuan Detasemen Operasi Psikologis ini telah dilaksanakan latihan bersama dengan anggota pasukan sejenis AS.

■ sap

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

'DKP Harus Jamin Pati yang Terlibat Diadili'

JAKARTA — Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk mengusut kasus orang hilang, di mata Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), masih diragukan. Terutama tentang jaminan yang diberikan ABRI bahwa perwira tinggi (Pati) yang tersangkut kasus penculikan ini akan benar-benar diadili.

"Sampai saat ini, jaminan semacam itu seringkali tak pernah terbukti dan sulit diyakini," kata MM Billah, anggota dewan penasihat Kontras kepada wartawan menanggapi DKP di Gedung YLBHI, kemarin.

Billah lalu menunjuk kasus pembentukan DKM dalam pada peristiwa Santa Cruz (1991) yang hanya menyeret tentara rendahan ke Mahmil. "Sementara perwira tingginya tetap bebas dari sanksi pidana," tambah Billah yang didampingi Koordinator Kontras Munir. Contoh lain, banyak aparat ABRI terlibat dalam kasus perburuhan, namun ABRI tak menindaknya, meski sudah berjanji menegakkan hukum dan menjamin keamanan rakyat.

Dengan demikian, Kontras berpandangan keberadaan DKP sebagai upaya untuk menggeser sasaran bidik yang sesungguhnya. "Kesannya, untuk memindahkan perhatian masyarakat agar terfokus ke DKP-nya. Padahal, yang lebih penting sebenarnya adalah proses hukum yang seharusnya berlaku yaitu mengusut tindak kriminal yang [mungkin] dilakukan oleh para perwira tinggi [Kopassus]," tambahnya.

Sementara Munir mempertanyakan, mengapa ABRI kebetulan untuk memahmilkan para perwira tersebut. Namun ia menyadari, tampaknya Pangab masih beranggapan bahwa mereka — para tersangka penculikan — adalah warga yang terhormat. "Pangab mencontohkan, bila di Inggris orang-orang semacam itu dipanggil *Sir*."

Kenyataan ini membuktikan gagalnya reformasi untuk menjadikan manusia Indonesia sama di depan hukum. "Prinsip hukum yang egalitarian dan tak adanya warga negara kelas satu tak berjalan," tambah Munir.

Kontras sendiri telah menyampaikan keberatan dengan pembentukan DKP/DKM ketika bertemu dengan Pangab Jendral TNI Wiranto pekan lalu. Kontras menilai DKP punya banyak kelemahan dari sisi hukum. Penilaian itu didasarkan pada tiga argumen.

Pertama, prinsipnya kasus-kasus pelanggaran HAM yang bersifat tindak kriminal, harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebab ini akan mempertinggi kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum yang berlaku.

Kedua, adanya politik diskriminasi. Itu karena adanya bagian-bagian dari masyarakat Indonesia, yang karena tingkat kepangkatannya tak bisa dituntut di depan peradilan. "Sehingga dia memiliki *previlage* tertentu," jelas Munir.

Lalu, ketiga, DKP mengambil fungsi peradilan. DKP mengintervensi terhadap kemerdekaan hakim untuk mengambil keputusan dalam satu kasus.

Kontras mencontohkan, bila misalnya DKP sudah menyatakan bahwa Prabowo, Muchdi, Chairawan (perwira yang akan diperiksa DKP — Red) bersalah, namun tak diungkapkan tingkat kesalahan sampai dimana dan tanpa pembuktian yang terbuka, maka cepat atau lambat akan mempengaruhi proses peradilan. "Akibatnya kemudian konstruksi peradilan akan mengikuti hasil-hasil DKP," tutur Munir.

Ketua PP Muhammadiyah Dr Amien Rais berharap, bila Prabowo benar-benar diperiksa DKP sebaiknya mengungkapkan seluruh fakta apa adanya. Menurut Amien hal itu penting selain Prabowo masih banyak pihak lain yang harus pula dimintai pertanggungjawaban.

"Jangan sampai ada potongan-potongan fakta yang disembunyikan. Karena saya tahu, selain Prabowo yang memang harus bertanggung jawab, masih ada pihak lain yang harus pula dikenai tindakan seperti itu," kata Amien seusai mengadakan diskusi dengan para anggota forum *Indonesian Executive Circle (IEC)*, di LKBN Antara, kemarin.

Amien mengatakan, selain mereka, mantan presiden Soeharto juga wajib diperiksa. Menurut Amien ini penting dalam upaya memberikan klarifikasi atas timbulnya berbagai masalah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

"Sepanjang pengetahuan saya, menurut ilmu tentara tidak ada seorang perwira, bahkan seorang jenderal berbintang tiga pun, yang bisa bertindak sendiri tanpa sepengetahuan atasannya. Dan dalam hal ini saya yakin pihak panglima tertingginya pun pasti mengetahui," katanya lagi.

Bagi pihak ABRI sendiri, lanjut Amien, setelah nanti Prabowo membeberkan seluruh kesaksiannya, maka sebagai konsekuensinya ABRI pun harus bisa menerima segala kenyataan dengan lapang dada. Oleh karena itu, pernyataan Pangab ABRI Jendaral Wiranto yang akan memberikan jaminan keselamatan total kepada mantan presiden Soeharto dan keluarganya seharusnya dipikir ulang.

"Terus terang pada persoalan itu saya agak berbeda pendapat dengan Jenderal Wiranto yang mengatakan ABRI harus mengamankan dan menjaga martabat mantan Presiden. Sikap saya, perlindungan terhadap dirinya adalah sebatas perlindungan fisik atau bukan diartikan untuk melindungi dirinya dari jangkauan hukum," katanya lagi.

Sedangkan anggota Komnas HAM Bambang W Soeharto hanya menyatakan bahwa pembentukan lembaga itu, menunjukkan iktikad besar ABRI untuk mengungkap kasus penculikan.

Namun, ia sendiri lebih cenderung agar semua pelaku diadili di Mahmil. "DKP/DKM memang saya kira perlu dibentuk untuk memilah mana yang perlu diadili dan mana yang perlu diberi sanksi administratif. Dan kalau ada masalah pidana tetap harus diadili Mahmil," tutur Bambang di kantor PBHI Jakarta, kemarin.

■ ttw/uba

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

ABRI Minta Maaf Atas Terjadinya Kerusuhan

Pangab: Prabowo, Muchdi Dan Chairawan Bisa Ke Mahmil

Jakarta, 4 Agustus

Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto menegaskan, walaupun Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi, dan Kolonel Inf Chairawan telah diproses melalui Dewan Kehormatan Perwira (DKP), tidak menutup kemungkinan para perwira tersebut diproses ke Mahkamah Militer kalau ada unsur pidananya.

''Seandainya di dalam Mahkamah Militer berkembang sehingga para perwira yang sudah diproses melalui DKP ternyata patut diduga telah memenuhi unsur pidana maka tidak ada seorang pun yang lolos dari masalah pidana,'' kata Wiranto menjawab pertanyaan wartawan usai mengumumkan pembentukan DKP di Jakarta, Senin (3/8).

Letjen TNI Prabowo Subianto dan Mayjen TNI Muchdi PR saat terjadi penculikan itu menjabat sebagai Danjen Kopassus. Saat ini Prabowo menjabat sebagai Dan Sesko ABRI sedangkan Muchdi menjabat sebagai Wairjen ABRI. Sedangkan Kolonel Inf Chairawan saat terjadinya penculikan menjabat sebagai Dan Grup-4/Kopassus.

DKP diketuai oleh Kasad Jenderal TNI Subagyo HS, wakil ketuanya Kasum ABRI Letjen TNI Fachrul Razi. Anggota DKP adalah Irjen Dephankam Letjen TNI Yusuf Kartanegara (bukan Irjen ABRI Laksdya TNI Soeratmin seperti dalam *Pembaruan*, SB Yudhoyono, Gubernur Lemhannas Letjen TNI Agum Gumelar, Pangkostrad Letjen TNI Djamari Chaniago, Komandan Jenderal AKABRI Laksdya TNI Achmad Sutjipto. Sedangkan Wakasad Letjen TNI Sugiono dan Letjen TNI Arie J Kumaat sebagai cadangan.

Lebih jauh Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo HS mengatakan, sanksi yang akan diterima oleh para perwira yang diproses melalui DKP ini tergantung dari besar kecilnya dan berat ringannya perwira tersebut berbuat kesalahan.

''Hukuman terberatnya diakhiri masa dinasnya dengan tidak hormat,'' kata Subagyo.

Dicopot Jabatannya

Apakah mereka selama dalam proses DKP akan di non-aktifkan? ''Itu ada sistemnya. Salah satu contoh dicopot jabatannya supaya tidak melibatkan institusinya. Satu contoh, Letjen Prabowo dicopot dari Dan Sesko,'' jawab Subagyo.

Ini agar semua saling menghormati dan tidak keluar dari sistem dan tatanan. Mengapa Letjen Prabowo diperiksa itu karena berkaitan dengan saat menjabat sebagai komandan Kopassus. Sehingga yang nanti diperiksa adalah sebagai Letjen Prabowo. Begitu juga untuk perwira yang lain.

Ketika ditanya apakah DKP bisa menyarankan kepada Pangab untuk diteruskan ke Mahkamah Militer, Subagyo menjawab, tergantung seberapa besar keterlibatan para perwira tersebut dalam kasus penculikan dan penyekapan ini.

Itu semua, tambah Subagyo, akan kelihatan dalam pasal-pasal yang dilanggarnya. Hasil tersebut yang akan jadi saran DKP kepada Pangab sebagai perwira penyerah perkara (papera), apakah nanti Pangab akan mengajukan ke Mahmil apa tidak sebagai papera.

Secara khusus Jenderal Subagyo meminta masyarakat jangan mengadakan spekulasi-spekulasi. DKP akan ungkap secara jujur dan kita tetap melakukan langkah-langkah yang profesional dan proporsional. Untuk itu jangan ada spekulasi yang nanti justru akan membuat opini yang salah.

''Mari kita sikapi yang bijaksana bahwa ABRI, TNI AD berusaha untuk membersihkan oknum-oknum yang ada di TNI AD/ABRI, sehingga diharapkan nanti bisa berbuat lebih baik dari yang semula,'' tambah Ketua DKP yang juga Kasad ini.

Ketika ditanya target dalam menyelesaikan tugas DKP, Subagyo menjawab itu akan dilaksanakan secepatnya. Pada prinsipnya secepatnya. Kalau pakai target jangan sampai membuat ruang gerak yang tidak leluasa dan terburu-buru.

''Sebab ketelitian dan perkembangan dalam pemeriksaaan memerlukan waktu namun itu sudah saya katakan secepatnya. Jangan bicara masalah hari,'' kata Subagyo.

Menjawab pertanyaan wartawan Jenderal Wiranto menggarisbawahi bahwa proses ini bebas dari masalah politik. Proses ini betul-betul merupakan tekad dan niat ABRI untuk mencapai ABRI yang baru dalam rangka reformasi, sehingga nanti bisa mengemban tugas yang lebih kompleks dengan kesiapan yang lebih prima.

ABRI Minta Maaf

Secara khusus Wiranto mengatakan bahwa ABRI akan secara jujur dan transparan menyelesaikan berbagai kasus seputar reformasi seperti masalah orang hilang, Trisakti, dan kerusuhan massal 13-15 Mei 1998.

''Untuk kasus 13-15 Mei kita berkehendak mengusut secara tun

Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
JAWA POS	SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
KOMPAS	SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	Suara Merdeka	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

• TAJUK RENCANA •

DKP dan Upaya Memulihkan Citra ABRI

— Terbersit perasaan prihatin namun sekaligus lega mendengar keputusan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto yang diumumkan kemarin. Tiga orang perwira ABRI akan diajukan ke Dewan Kehormatan Perwira (DKP) sehubungan dengan indikasi keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis politik yang sangat menghebohkan. Tiga perwira itu terdiri atas dua mantan Danjen Kopassus, Letjen TNI Prabowo Soebianto dan Mayjen TNI Muchdi PR, serta mantan Komandan Grup IV Intelijen Kopassus Kolonel Inf Chairawan. Kita prihatin karena kasus-kasus penculikan itu benar melibatkan perwira-perwira tinggi ABRI. Meskipun sebenarnya, ketika sejumlah prajurit Kopassus diajukan ke Mahkamah Militer, kita membayangkan pasti ada atasannya yang terlibat. Namun ketika Menhankam/Pangab mengumumkan hal itu kemarin, hati kita tergetar juga.

— Lega karena pemimpin ABRI bertindak tegas. Hukum dan etika militer ditegakkan. Memang penegakan etika adalah sesuatu yang lazim terjadi dalam organisasi mana pun. Tetapi di lingkungan ABRI, dalam catatan kita baru terjadi kali ini, terutama menyangkut perwira tinggi. Tidak disangkal jika semula ada yang ragu, apakah perkara itu akan berjalan secara lugas sesuai dengan hukum. Sebab, masalahnya menyangkut salah seorang perwira tinggi yang karena beberapa faktor mempunyai kedudukan lebih. Letjen TNI Prabowo Soebianto adalah menantu mantan presiden Soeharto. Keadaan itu langsung atau tidak langsung pasti berpengaruh terhadap kedudukan dan sikap lingkungannya. Buktinya, karirnya menanjak sangat cepat, jauh lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan-kenaikan pada jenjang yang lazim. Itu terlepas dari kualitas keprajuritan dan prestasinya yang menonjol.

— Lega, karena tindakan itu akan bisa memulihkan citra ABRI secara menyeluruh. Tidak hanya korps Kopassus yang selama ini telah menjadi kebanggaan bangsa. Kita yakin, yang terlibat dalam penculikan hanyalah anggota-anggota tertentu, tidak semua dari kesatuan Baret Merah. Karena itu, penindakan terhadap mereka yang bersalah, termasuk para pemimpin yang bertanggung jawab, adalah suatu keharusan. Tidak ada tindakan tegas malah akan merugikan kesatuan itu sendiri, sebab akan dirasa terjadi ketidakadilan. Tanpa penegakan etika dan hukum, dikawatirkan akan terjadi stigma di lingkungan korps itu sendiri. Prajurit adalah sosok yang memiliki integritas sangat tinggi. Mereka tentu bisa membedakan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan etika serta hukum militer dan yang tidak.

— Apalagi masalahnya telah mencuat sampai ke tingkat internasional. Tidak hanya karena salah seorang korban penculikan yang telah dibebaskan kemudian memberi kesaksian di berbagai negara Eropa dan AS, tetapi juga era kesejagatan menyebabkan apa pun yang terjadi di Tanah Air dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Bukan cuma karena Pius Lustrilanang menguraikan pengalamannya selama disekap itu, di berbagai forum di Belanda, Jerman, AS, di depan Kongres, Amnesti Internasional, dan lain-lain, sehingga masalah penculikan itu mendunia. Tetapi juga hubungan antarnegara dan antarbangsa yang makin terbuka memungkinkan perhatian terhadap masalah tersebut sangat luas dan intens. Penegakan disiplin oleh pemimpin ABRI diharapkan akan mampu mengubah pandangan-pandangan negatif dari dunia internasional itu.

— Hasil pemeriksaan DKP akan menentukan proses selanjutnya. Berdasarkan hasil itu, Menhankam/Pangab akan menentukan apakah para perwira tinggi itu akan dihadapkan kepada Mahkamah Militer atau tidak. Agar rakyat yakin benar terhadap tindakan pemimpin ABRI dan tahu secara jelas peristiwa yang sebenarnya, memang akan lebih tepat jika prosesnya diajukan ke Mahkamah Militer. Dari forum terbuka itu masyarakat akan bisa menilai secara langsung kebenaran masalahnya dan secara gamblang bisa menyaksikan proses ditegakkannya kebenaran dan keadilan. Dalam DKP, segala sesuatunya masih tertutup. Mungkin masyarakat bisa juga mengikuti hasil-hasilnya, tetapi tidak langsung. Misalnya lewat keterangan resmi yang diberikan oleh Menhankam/Pangab. Hal itu, bagaimanapun terbuka bagi kemungkinan timbulnya pandangan yang bias dari masyarakat.

— Hal lain yang kita harapkan, kedua jenderal dan perwira pertama itu akan bersikap koperatif terhadap DKP. Bersedia mengemukakan apa yang sebenarnya terjadi secara terbuka, jelas, dan terperinci, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Bagaimanapun pahit akibat yang bakal terjadi. Derita para korban penculikan dan merosotnya citra bangsa dan ABRI di mata internasional, bagaimanapun jauh lebih pahit lagi. Dalam skala lebih luas, proses yang terbuka akan berpengaruh terhadap kredibilitas pemerintahan Presiden Habibie. Komitmen para pemimpin ABRI adalah juga komitmen Pemerintah. Hal itu sangat fundamental sebagai bagian dari upaya memulihkan kepercayaan dari rakyat dan dunia internasional. Pulihnya kepercayaan itulah modal dasar dalam usaha mengentaskan bangsa ini dari krisis yang sekarang berjalan sangat lamban.

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA		1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA		2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA		3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA		4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN		5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Kasus Penculikan Aktivis Terus Bergulir

Prabowo Dibebastugaskan

JAKARTA (Media): Letjen TNI Prabowo Subianto dipastikan akan dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando (Sesko) ABRI menyusul terbentuknya Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang diketuai KSAD Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo.

Dua perwira lainnya juga mengalami nasib yang sama dengan Prabowo adalah mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi PR (Wairjen ABRI) dan Kolonel Inf Chairawan (Komandan Grup IV Kopassus). Prabowo, Muchdi, dan Chairawan dihadapkan ke DKP, sedangkan tujuh perwira dan tiga bintara lainnya dipastikan akan disidangkan di Mahkamah Militer, karena diduga terlibat dalam kasus penculikan para aktivis prodemokrasi.

"Pemberhentian terhadap perwira yang terkena DKP merupakan sistem yang berlaku di ABRI," ujar Ketua DKP Subagyo HS menjawab pers sesuai pengumuman pembentukan DKP oleh Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto di Mabes ABRI Jakarta, kemarin.

Adapun pengganti Prabowo sebagai Dan Sesko ABRI adalah Mayjen (Mar) Benny Balo, Wadan Sesko ABRI. Sementara untuk pengganti Mayjen TNI Muchdi PR sebagai Wairjen ABRI masih dalam penggodokan.

Dalam DKP yang diumumkan Pangab kemarin, Kasum ABRI Letjen TNI Fachrul Razi sebagai Wakil Ketua dengan anggota enam jenderal berbintang tiga, masing-masing Gubernur Lemhannas Letjen TNI Agum Gumelar, Irjen ABRI Laksdya TNI Soeratmin, Pangkostrad Letjen TNI Djamari Chaniago, Irjen Dephankam Letjen TNI Yusuf Kartanegara, Kassospol ABRI Letjen TNI Soesilo Bambang Yudhoyono, dan Komandan Jenderal (Danjen) Akabri Laksdya TNI Achmad Sutjipto. Sedangkan sebagai cadangan Wakasad Letjen TNI Sugiono dan Letjen TNI Arie Kumaat.

Menurut Subagyo, pembentukan DKP ini adalah tekad ABRI atau Angkatan Darat yang berusaha membersihkan TNI-AD dari oknum-oknum, sehingga diharapkan bisa berbuat lebih baik.

"DKP ini akan bekerja secepat mungkin, tetapi pada prinsipnya kami minta agar masyarakat jangan membuat ruang gerak yang tidak leluasa sehingga kerja DKP jadi terburu-buru," kata Subagyo.

Perlu teliti

Menurut jenderal berbintang empat itu, pemeriksaan DKP terhadap tiga perwira yang dinilai telah melanggar kode etik perwira ini memerlukan ketelitian sehingga perlu waktu yang cukup.

Ketelitian itu, kata Subagyo, di antaranya dukungan saksi dan segala macam sehingga jangan berbicara soal hari penyelesaiannya. "Jangan menghakimi orang tanpa didukung fakta," tandasnya.

Letjen TNI Prabowo, menantu mantan Presiden Soeharto adalah lulusan Akademi Militer tahun 1974. Putra dari begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo ini merupakan satu-satunya lulusan tahun 1974 yang menyandang bintang tiga. Prabowo satu angkatan dengan mantan Pangdam Jaya Mayjen TNI Syafrie Syamsuddin; Kas Kostrad Mayjen TNI Ryamizard, dan Kasdam IX Udayana Brigjen TNI M Simbolon. Sedangkan Angkatan 74 lainnya berbintang satu bahkan kolonel.

Di tangan Prabowo-lah Kopassus yang merupakan pasukan elite kebanggaan TNI-AD/ABRI dimekarkan menjadi pasukan besar hingga komandannya menjadi komandan jenderal dengan pangkat mayor jenderal. Sebelumnya Komandan Kopassus berpangkat brigadir jenderal.

Sedangkan Mayjen TNI Muchdi PR yang juga mantan Danjen Kopassus adalah lulusan Akademi Militer tahun 1970. Mantan Pangdam VI Tanjungpura ini memulai jabatannya sebagai Danjen Kopassus pada 28 Maret 1998.

Kasus penculikan mulai terungkap setelah salah seorang korban yang dilepaskan Pius Lustrilanang buka suara menceritakan kejadian yang dialaminya.

Sejak itu satu per satu korban mulai membuka suara. Namun masih ada 14 aktivis lain yang diduga hilang atau diculik, sampai sekarang belum diketahui nasibnya.

Danpuspom ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalal yang menjadi Ketua Tim Pencari Fakta dalam kasus tersebut langsung menahan 11 oknum Kopassus yang diduga terlibat dalam aksi penculikan tersebut. (Tim Media)

Hal. 1/ .....
Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☑ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Samsudin: Serahkan Saja Prabowo ke Mahmil

DEWAN Kehormatan Perwira (DKP) yang baru terbentuk dan dipimpin Kasad Jenderal Subagyo HS diharapkan mampu mengembalikan citra dan nama baik ABRI yang selama 32 tahun diacak-acak dan direkayasa oleh rezim Orde Baru.

"Kepercayaan dan nama baik ABRI dalam kasus ini benar-benar dipertaruhkan, juga nama baik Indonesia. Jadi tugas Pak Wiranto lah memperbaiki ABRI yang selama 32 tahun diacak-acak dan direkayasa Orde Baru. Semua itu harus dibenahi oleh Jenderal Wiranto, dan ini dimulai melalui DKP itu. Kalau menurut saya ABRI harus serius, sebab jika hasilnya tidak meyakinkan, tentu sia-sia saja," kata pengamat masalah militer Dr Salim Said saat dihubungi *Merdeka*, di Jakarta, kemarin.

Sedangkan pengamat militer lainnya Mayjen (Purn) Samsudin berpendapat, DKP harus memberikan saran kepada Menhankam/Pangab agar kasus ini langsung diserahkan saja ke mahkamah militer, mengingat beratnya bobot persoalan. Selain itu agar pengusutan dilakukan secara lebih *fair*.

Jika kasusnya tidak diserahkan ke Mahmil, lanjut Samsudin, akan menyulitkan ABRI. Kasus seperti ini, sambungnya, tidak cukup hanya ditangani DKP. "Kalau masalahnya seorang perwira memukul orang di jalanan mungkin cukup DKP. *Kan* Prabowo sendiri sudah bilang bertanggung jawab, maka hargai itu. Berarti itu dia minta di-*clear*-kan. Memang DKP, *kan* bukan lembaga pengadilan," paparnya.

Melanjutkan pernyataannya Salim Said menekankan, yang harus diselamatkan saat ini adalah citra Indonesia yang sangat buruk di mata internasional, terutama karena citra buruk itu seringkali dikaitkan dengan ABRI.

"Yang terjadi dan diributkan sekarang ini, adalah bagian dari cerita panjang rekayasa Orde Baru. Ini semua harus dijernihkan, supaya rakyat Indonesia dan internasional percaya terhadap ABRI," tandasnya.

Tentang ketegasan sikap Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto membentuk DKP, Salim Said mengemukakan, jika dipelajari sejarah ABRI sejak Indonesia merdeka, ABRI selalu tegas dan ketegasan yang berkaitan dengan masalah intern ABRI sendiri sudah sering terdengar.

"Cuma sejak Orde Baru saja tak terdengar lagi, sebab di zaman Soeharto yang mengambil keputusan di ABRI itu Soeharto sendiri. Pangab tidak bisa berbuat apa-apa karena di bawah Soeharto," ujarnya.

Ditanya bagaimana nantinya "nasib" oknum Kopassus yang akan diperiksa DKP, termasuk Letjen Prabowo Subianto, Salim Said mengatakan, tidak tahu. Sebab, biasanya semua hasil kerja DKP baru dapat diketahui setelah ada keputusan resmi ABRI.

"Setahu saya fungsi DKP itu memberikan saran kepada Pangab. Setahu saya ia tidak mengumumkan sendiri hasil kerjanya. Jadi yang akan mengumumkan adalah Pangab," katanya.

Samsudin kemudian menambahkan, penyerahan kasus dugaan keterlibatan oknum Kopassus ini ke Mahmil sangat penting, apalagi mengingat selama ini ABRI hanya dijadikan *bumper* Orde Baru. ABRI sering melegitimasi tindakan pemerintah yang benar-benar melanggar hukum.

"Tapi tolong juga masyarakat dalam mengkritik ABRI jangan berlebihan, jangan dikaitkan dengan dwi fungsi, sebab itu jelas ada dasar hukumnya. Dwi fungsi ABRI adalah keikutsertaan ABRI dalam pengambilan keputusan," katanya.

Ditambahkan, bukti-bukti yang kuat mengenai keterlibatan oknum Kopassus dalam penculikan sejumlah aktivis bisa ditemukan di Mahmil. (AG)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☑ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Subagyo Langsung Nonaktifkan Prabowo Cs

Mereka Bisa Dipidanakan

Sjafrie Sjamsoedin Tak Ikut Di-DKP-kan

Jakarta, JP.-

Akhirnya, Dewan Kehormatan Perwira itu terbentuk. Seperti prediksi *Jawa Pos* kemarin, KSAD Jenderal TNI Subagyo Hadi Siswoyo ditunjuk sebagai ketua, sedangkan Letjen TNI Fachrul Razi (Kasum ABRI) menjadi wakilnya. Seluruh anggota DKP yang berjumlah empat orang adalah letjen yang lebih senior daripada Prabowo Subianto yang sudah pasti akan diadili bersama-sama Mayjen TNI Muchdi Purwopranjono dan Kolonel Infanteri Chaerawan.

Ketiganya diperiksa DKP karena diduga bertanggung jawab terhadap penculikan sejumlah aktivis prodemokrasi. Ketika penculikan terjadi, Prabowo adalah Pangkostrad, Muchdi Danjen Kopassus, dan Chaerwan komandan Grup IV Kopassus.

Lapsus Lihat Hal. 3

Anggota DKP yang diumumkan langsung oleh Pangab Jenderal TNI Wiranto kemarin adalah Irjen Dephankam Letjen TNI Yusuf Kertanegara, Kassospol ABRI Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Gubernur Lemhanas Letjen TNI Agum Gumelar, Danjen Akabri Laksdya Achmad Sutjipto, dan Pangkostrad Letjen TNI Djamari Chaniago. Dua anggota cadangan ialah Wakasad Letjen Sugiono dan Letjen TNI Ari Kumaat.

Dilihat dari kewenangan yang diberikan pimpinan ABRI, terlihat bahwa DKP tidak berbeda dengan DKM yang pernah dibentuk untuk menyelidiki keterlibatan perwira tinggi ABRI dalam kerusuhan Santa Cruz 1989. Sebagaimana DKM, DKP nanti memberikan rekomendasi kepada Pangab.

Begitu diumumkan, langkah pertama yang dilakukan DKP kemarin adalah menonaktifkan Prabowo dari jabatannya sebagai Dansesko ABRI. Hal yang sama dilakukan terhadap Muchdi yang menjadi Wairjen ABRI dan Chaerwan yang menjadi komandan Grup IV Kopassus.

Mengapa menantu Soeharto itu dinonaktifkan? Subagyo yang dikenal dekat dengan Prabowo ini mengatakan, pemeriksaan terhadap diri Prabowo dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Bukan sebagai Dansesko ABRI.

Dengan begitu, ada rasa saling menghormati dan tidak merusak sistem. Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua DKP Letjen TNI Fachrul Razi. "Semua dinonaktifkan sampai perkara ini diputuskan," jelas Fachrul seraya menambahkan, pengganti Prabowo sebagai Dansesko ABRI belum diputuskan. Untuk sementara, tugas-tugas harian Prabowo dilaksanakan oleh Wadansesko ABRI.

Fachrul belum bisa memastikan kapan Prabowo diperiksa. Kejelasan ini baru akan didapat setelah DKP mengadakan pertemuan. Setelah itu, baru diputuskan, siapa yang akan diperiksa lebih dulu. Apakah dimulai dari pangkat tertinggi atau sebaliknya. "Tidak ada ketentuan harus dimulai dari pangkat terendah atau tertinggi. Yang jelas, kami akan bekerja secepatnya," janji Fachrul.

Tempat pemeriksaan akan diputuskan oleh ketua. Bisa di Mabes ABRI atau di Mabes AD. Dia juga berjanji, pemeriksaan nanti akan berjalan objektif.

Yang menjadi pertanyaan adalah tidak masuknya mantan Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoedin dalam daftar perwira yang di-DKP-kan. Padahal, jenderal tampan itu sebelumnya dikenal dekat dengan Prabowo dan disebut-sebut mengetahui penculikan dan penyekapan tersebut. Menanggapi soal ini, Fachrul mengatakan saat ini Sjafrie memang tidak diajukan ke DKP. "Tetapi, melihat perkembangan nanti. Semua bisa saja terlibat. Sabarlah," katanya.

Sementara itu, Wiranto mengatakan, untuk menuntaskan kasus penyekapan dan penculikan itu, ABRI juga menggelar mahkamah militer untuk mengusut sepuluh personel ABRI yang diduga terlibat dalam kasus ini. "Mereka terdiri dari tujuh perwira dan tiga bintara," ungkap Pangab.

Soal jumlah personel yang akan diperiksa ini, Wiranto mengatakan bisa saja jumlahnya bertambah. Ini tergantung pada temuan dan fakta baru selama persidangan. Pangab tidak menjelaskan nama kesatuan sepuluh personel ABRI ini. Tetapi, Danpuspom ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalaludin yang kemarin ikut mendampingi Pangab mengatakan bahwa mereka berasal dari Kopassus.

Pangab juga menjelaskan, ABRI bersungguh-sungguh dalam menuntaskan kasus ini. Karena itu, kalau tiga perwira yang diajukan ke DKP ternyata diketahui melanggar pasal-pasal pidana, mereka akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku. "Tentu, seandainya dari fakta di mahkamah militer ketahui bahwa para perwira sudah diproses di DKP itu memenuhi unsur pidana, maka tidak ada satu pun yang lolos dari hukum atau pasal-pasal pidana," tandas Pangab.

Berkali-kali Wiranto menjelaskan, pembentukan DKP dan rencana menggelar mahkamah militer ini merupakan cermin dari kesung-

Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☑ Suara Merdeka	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Letjen TNI Prabowo Diajukan ke DKP

• Bersama Muhdi dan Chaerawan
• Bisa Dibawa ke Mahkamah Militer

JAKARTA - Dua mantan Danjen Kopassus, Letjen TNI Prabowo Subianto dan Mayjen TNI Muhdi, serta Komandan Grup 4 Sandiyuda Kopassus, Kolonel Inf Chaerawan, diajukan ke Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dibentuk Pangab. Mereka dinilai melanggar kode kehormatan perwira dan disiplin ABRI berkaitan dengan kasus penculikan sejumlah aktivis, yang dikenal sebagai kasus orang hilang.

Pangab Jenderal TNI Wiranto mengumumkan pembentukan DKP sekaligus perwira tinggi yang akan diajukan untuk diperiksa. Pembentukan DKP itu merupakan wujud tekad ABRI untuk menuntaskan masalah yang menyangkut penculikan dan penyekapan, yang melibatkan beberapa prajurit ABRI yang patut diduga terlibat langsung atau tidak langsung.

''Dalam menyelesaikan masalah ini, ABRI mengacu pada sistem peradilan yang berlaku untuk ABRI. Karena itu selain pembentukan DKP, ABRI juga menempuh proses hukum di Mahkamah Militer,'' katanya.

DKP bertugas memeriksa tabiat atau perilaku perwira yang nyata-nyata melanggar kode kehormatan perwira dan disiplin keprajuritan ABRI. Dewan akan bersidang dan memberikan keputusan pertimbangan kepada Pangab.

DKP yang akan memeriksa para perwira yang terlibat masalah orang hilang diketuai KSAD, Wakil Ketua Kasum, serta anggota Irjen Dephankam, Kassospol, Gubernur Lemhanas, Pangkostrad, Danjen Akabri, dan Wakil KSAD. ''Dalam pelaksanaan akan dibantu para perwira menengah. Tapi intinya, tim terdiri atas perwira yang mempunyai pangkat sederajat atau lebih tinggi dengan yang akan diperiksa,'' lanjut Wiranto.

Mahkamah Militer

Selain menggelar DKP, akan digelar pula Mahmil yang bertugas melakukan proses peradilan bagi prajurit yang patut diduga melakukan tindakan yang memenuhi tuntutan pidana terhadap kasus orang hilang. Itu atas permintaan perwira penyerah perkara (perpera), dalam hal ini Pangab. ''Saya putuskan mereka masuk ke dalam Mahkamah Militer,'' tegasnya.

Yang akan diajukan ke Mahmil 10 prajurit. Antara lain tujuh perwira dan tiga bintara. ''Tentu dalam proses Mahmil memungkinkan ada temuan baru dan ungkapan baru yang membuat jumlah ini bisa berkembang. Saya harap masyarakat sabar menunggu hasil langkah ABRI menggelar proses peradilan ini,'' lanjutnya.

Wiranto juga tidak menutup kemungkinan ketiga perwira yang diajukan ke DKP itu diajukan pula ke Mahkamah Militer. ''Bila ternyata dalam proses peradilan militer nanti mereka nyata-nyata patut diduga melakukan tindak pidana, tidak akan ada yang lolos dari jerat hukum,'' tandasnya.

Minta Maaf

Di bagian lain Pangab mengatakan ABRI akan secara jujur dan transparan menangani kasus-kasus seputar reformasi. Seperti kasus orang hilang, kasus Trisakti, dan kerusuhan massa 13-15 Mei.

''Kami berkehendak mengusut semua kasus secara tuntas.''

Khusus untuk kerusuhan Mei, telah dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta bersama departemen lain. Itu sebagai iktikad ABRI untuk membuka kasus tersebut secara transparan, siapa pelaku dan aktor intelektualnya, juga kemungkinan adanya organisasi yang rapi. ABRI mengutuk dan akan membongkar segala tindak kekerasan yang berasal dari mana pun.

ABRI juga menyampaikan rasa simpati kepada masyarakat, prajurit ABRI, dan keluarganya yang menjadi korban berbagai peristiwa tersebut. ''ABRI juga tidak segan-segan meminta maaf, peristiwa itu tidak bisa dicegah dan dihindari,'' tuturnya. (tn-23g)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Yang Diajukan ke DKP Bukan Lawan Politik

ADA yang beranggapan bahwa yang diajukan ke Dewan Kehormatan Perwira (DKP) karena berbeda visi dengan pimpinan ABRI. Anggapan itu langsung ditepis Menhankam/ Pangab Jenderal Wiranto di Jakarta, kemarin.

Dia membantah keras bahwa para perwira yang akan diperiksa DKP adalah lawan politiknya. Menurutnya, lembaga yang dipimpin Kasad Jenderal Subagyo HS itu bebas dari masalah politik dan murni upaya ABRI untuk membersihkan dirinya.

Hal penting lainnya yang dikemukakan Jenderal Wiranto bahwa apabila dalam Mahkamah Militer nanti terbukti adanya tindak pidana yang dilakukan Letjen Prabowo Subianto, Mayjen Muchdi PR dan Kolonel Chairawan, maka mereka akan diajukan ke mahkamah militer meskipun sudah diperiksa DKP.

Seperti diketahui nama-nama para perwira yang diumumkan Jenderal Wiranto untuk diperiksa DKP adalah Letjen Prabowo Subianto, Mayjen Muchdi PR dan Kolonel Chairawan. Kemudian wartawan mempertanyakan kenapa hanya perwira Kopassus saja yang diajukan ke DKP.

"Di ABRI itu satu jiwa banyak raga. Artinya hidup bersatu, mati bersama. Itu sumpah kita. Jadi kalau kita berbeda pendapat di dalam mengaplikasikan suatu ilmu, itu bisa saja untuk memperkaya wawasan kita. Tapi kalau hati nurani berbeda, itu tunggu dulu," kata Pangab dalam jumpa pers di Dephankam, kemarin. Tampak mendampingi Pangab para kepala staf tiga angkatan dan Kapolri, Sekjen Dephankam, Kassospol dan Kasum ABRI.

"Jadi proses ini bebas dari masalah politik. Proses ini betul-betul merupakan tekad, niat dari ABRI untuk mencapai ABRI yang baru yang bisa mengemban tugas yang lebih *complicated* dengan kesiapan yang lebih prima. Maka jangan ada kalkulasi lain yang dilemparkan yang justru mempersulit niat ABRI membersihkan dirinya," katanya.

Menjelaskan tentang penuntasan masalah penculikan dan penyekapan yang melibatkan beberapa prajurit ABRI, Jenderal Wiranto mengatakan, ABRI akan menyelesaikannya secara tuntas. Caranya dengan mengacu pada sistem peradilan yang berlaku untuk ABRI. "Ada dua proses hukum, yakni DKP dan Mahkamah Militer," tambahnya.

Secara perlahan di hadapan puluhan wartawan dalam dan luar negeri, Jenderal Wiranto menjelaskan tentang DKP. Menurutnya, perwira mempunyai kode kehormatan dan itu berlaku di negara mana pun.

Menurut Wiranto, tugas DKP adalah untuk memeriksa tabiat atau perbuatan perwira yang nyata-nyata melanggar kode kehormatan perwira dan melanggar atau merugikan disiplin keprajuritan serta merugikan ABRI sendiri.

Setelah bekerja, DKP inilah yang akan bersidang dan memberikan keputusan pertimbangan kepada Panglima ABRI. Para pengurus DKP harus mempunyai pangkat sederajat atau lebih tinggi satu tingkat dengan yang akan diperiksa. Dalam hal ini, Jenderal Subagyo HS setingkat lebih tinggi dari Letjen Prabowo Subianto. Sementara seluruh anggotanya berpangkat bintang tiga.

Wiranto dalam kesempatan ini mengumumkan sembilan nama, ketua, wakil ketua dan anggota DKP yang sudah ditunggu-tunggu oleh wartawan selama dua minggu terakhir ini.

Mereka adalah Kasad Jenderal Subagyo HS (Ketua), Kasum ABRI Letjen Fachrul Razi (Wakil Ketua) dan para anggota masing-masing Irjen Dephankam Letjen Yusuf Kartanegara, Kassospol ABRI Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, Gubernur Lemhannas Letjen Agum Gumelar, Pangkostrad Letjen Djamari Chaniago dan Danjen Akabri Laksdya Achmad Sutjipto. Sementara cadangannya, Wakasad Letjen Sugiono dan Letjen Arie Kumaat.

Dengan nada tegas pula, tapi agak perlahan Wiranto mengumumkan nama tiga orang perwira yang diajukan ke DKP untuk mempertanggungjawabkan tabiat dan perbuatan yang telah melanggar kode kehormatan perwira dan disiplin keprajuritan serta merugikan ABRI. Mereka adalah Letjen Prabowo Subianto, Mayjen Muchdi PR dan Kolonel Chairawan.

Ketika ditanya tentang pertimbangan ketiga perwira itu tidak diajukan ke mahmil dan apa hukuman mereka hanya sebatas pemutusan karir militer, Wiranto mengatakan, bisa saja mereka diajukan ke mahmil.

Proses peradilan kedua, menurut Wiranto, adalah menggelar Mahmil yang tugasnya melakukan proses peradilan bagi prajurit ABRI yang diduga melakukan tindakan yang memenuhi tuntutan pidana terhadap kasus orang hilang.

"Ini atas permintaan Pepera, yaitu Pangab sebagai perwira penyerah perkara. Saya putuskan untuk mereka masuk mahmil. Dalam pelaksanaannya ini dipertanggungjawabkan kepada Babinkum ABRI. Mekanismenya ya kita lakukan konsekuen sesuai UU yang mengatur masalah ini, peradilan militer yang telah diundangkan," katanya.(PN)

Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐ Suara Merdeka	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Amien: Periksa Juga yang Bintang Lima

JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah yang juga tokoh reformasi, Amien Rais, mengatakan, bukan Prabowo saja yang harus bertanggung jawab atas kasus penculikan beberapa aktivis. Beberapa jenderal berbintang tiga, empat, dan jenderal berbintang lima juga harus diperiksa.

"Pangab ketika itu, Feisal Tanjung, juga pasti tahu. Makanya, saya minta Prabowo tidak menyembunyikan satu fakta pun. Sebab, saya dengar dari orang yang bisa dipercaya, ada beberapa jenderal berbintang tiga dan empat, bahkan berbintang lima, yang harus diperiksa," kata Amien Rais menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, kemarin, tentang akan diperiksanya Prabowo oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

Jika diperiksa, ia mengharapkan Prabowo mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus hilangnya beberapa aktivis. "Jangan ada yang dirahasiakan atau ada potongan-potongan kata yang disembunyikan, karena saya tahu Prabowo harus bertanggung jawab. Tetapi ada juga orang-orang seperti Prabowo yang harus turut bertanggung jawab," ujar Amien.

"Pak Harto misalnya Pak?" tanya wartawan. "Soeharto pasti dan sangat jelas sekali."

Apa mungkin Pak Harto diajukan ke pengadilan? "Itu yang kita inginkan. Apalagi dalam ilmu tentara, tidak ada orang berbintang tiga berjalan sendiri, tanpa diketahui oleh mereka yang berbintang empat atau atasannya langsung," jawab Amien Rais.

Apakah Pak Amien optimistis? "Saya optimistis, mudah-mudahan yang terpenting ABRI mau menerima kenyataan. Sebab, kalau nantinya ada orang yang selama ini bagai pahlawan ternyata pengkhianat, ya harus diterima. Dan bawa saja ke Mahmilub".

Ketika ditanya soal Pangab Jenderal Wiranto yang akan melindungi kehormatan Pak Harto, Amien Rais mengatakan, dalam hal itu dia berbeda pandangan dari Wiranto.

"Pak Wiranto dan ABRI mengamankan dan harus menjaga martabat mantan presiden. Tapi kan maksudnya mengamankan fisiknya. Namun dalam mengamankan dari jangkauan hukum, saya tak setuju. Walau Soeharto itu presiden dan ABRI yang berbintang lima, bahkan berbintang tujuh, jika terbukti salah ia harus diseret ke pengadilan atau diproses secara hukum. Saya berharap Pemerintah punya komitmen itu."

Citra AD

Secara terpisah mantan Kassospol ABRI Bambang Triantoro menyatakan yakin Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo mampu menjalankan tugas memeriksa Prabowo untuk mengungkapkan kasus hilangnya beberapa aktivis.

Menurut Triantoro, meskipun banyak orang melihat Subagyo pernah dekat dengan bekas Danjen Kopassus Letjen Prabowo Subianto, para perwira tinggi AD yakin Subagyo akan mampu menjalankan tugasnya. Sebab, dia harus mengembalikan citra ABRI, Angkatan Darat, dan Korps Baret Merah.

"Kita percaya Subagyo akan melakukan pemeriksaan dengan sejujur-jujurnya, karena dasarnya berkenaan dengan citra Angkatan Darat. Jangan karena membela satu orang lalu merusak citra kesatuan," kata Triantoro.

Bambang Triantoro mengharapkan masyarakat tidak buru-buru curiga terhadap Jenderal TNI Subagyo. Hubungan dekatnya dengan Prabowo tidak akan memaksa dia bertindak *kong kalikong*. "Subagyo pasti akan menjaga kehormatan AD dan tidak akan membela orang yang salah.

Subagyo akan membela martabat dan citra ABRI. Kita bisa curiga kalau Subagyo ikut terlibat dalam kasus itu. Jadi saya percaya KSAD akan bekerja dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya," tandasnya.

Dijelaskannya, karena anggota DKP tujuh orang, pertanyaannya pun beragam. Tugas DKP menyelidiki keterlibatan tiga perwira tinggi itu dalam penculikan terhadap aktivis LSM, bukan menjatuhkan hukuman. Yang berhak menjatuhkan hukuman adalah Mahkamah Militer.

Soal penunjukan KSAD Jenderal TNI Subagyo menjadi Ketua DKP, karena yang diperiksa adalah perwira tinggi AD. Jadi, barangkali penunjukan itu selain karena kemampuan juga karena tidak ada pilihan lain. (am-23c)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Prabowo, Muchdi Segera Diperiksa

■ Pangab Umumkan Pembentukan DKP

JAKARTA (Media): Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto kemarin mengumumkan pembentukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang bertugas memeriksa keterlibatan dua mantan Danjen Kopassus serta Komandan Grup IV Intelijen Kopassus dalam kasus penculikan sejumlah aktivis prodemokrasi beberapa waktu lalu.

DKP itu dipimpin KSAD Jenderal TNI Subagyo dengan Wakil Kasum ABRI Letjen TNI Fachrul Razi.

Pada pengumuman yang diliput secara luas oleh pers dalam dan luar negeri itu, Jenderal Wiranto mengatakan DKP akan memeriksa Letjen TNI Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus yang kini menjabat Dan Sesko ABRI, Mayjen TNI Muchdi, mantan Danjen Kopassus yang kini menjabat Wairjen ABRI, dan mantan Dan Grup IV Kopassus Kol Inf. Chairawan.

Jenderal Wiranto juga menegaskan selain ketiga perwira tinggi tersebut, ABRI juga mengajukan 10 prajurit lainnya yang terdiri atas tujuh perwira dan tiga bintara Kopassus ke Mahkamah Militer, karena mereka patut diduga terlibat dalam kasus penculikan para aktivis.

Menjawab pers, Kasum ABRI Letjen TNI Fachrul Razi mengatakan prajurit ABRI yang diajukan ke DKP itu sudah dinonaktifkan dari jabatannya, atau dengan kata lain sudah ditarik ke Mabes ABRI.

Yang akan diperiksa dalam DKP menyangkut Kode Etik Perwira, termasuk perbuatan Perwira yang melanggar kode etik atau tindakannya yang merugikan disiplin keprajuritan.

Mungkin bertambah

Pada bagian lain Jenderal Wiranto menegaskan kemungkinan jumlah prajurit ABRI yang diajukan ke Mahmil akan bertambah, jika dalam persidangan nanti ditemukan keterangan-keterangan baru mengenai keterlibatan oknum yang lain.

"Dalam proses Mahmil, jika ada informasi yang dapat diangkat ke permukaan atau ada temuan baru di luar informasi yang diterima, tidak menutup kemungkinan jumlahnya berkembang," katanya.

Oleh karena itu, kata Pangab, dengan digelarnya dua persidangan ini (DKP dan Mahmil), dia berharap masyarakat sabar menunggu hasil dari berbagai langkah ABRI untuk menggelar proses peradilan tersebut

"Saya mengharapkan jangan ada spekulasi-spekulasi baru yang dilemparkan, yang justru akan mengintervensi pelaksanaan peradilan ABRI yang dilaksanakan secara konsekuen," katanya.

Ketika ditanya tentang berapa lama DKP akan bertugas, Wiranto mengatakan, DKP makin cepat melaksanakan tugasnya akan makin baik.

Pangab juga menegaskan, pelaksanaan DKP bebas dari masalah politik, karena DKP merupakan tekad dan niat ABRI untuk menjadikan ABRI yang baru mampu melaksanakan tugas dengan baik dan lebih komprehensif.

"Jadi, jangan sampai ada interpretasi atau kalkulasi-kalkulasi lainnya yang dilemparkan yang bisa merusak niat baik ABRI," katanya.

Kesunggunan

Berbagai reaksi menyambut baik pengumuman ABRI membentuk DKP, namun sekaligus berharap agar dewan tersebut mengungkapkan semua fakta yang berkaitan dengan kasus penculikan para aktivis tersebut.

Pengamat politik Fachry Ali menilai pembentukan DKP merupakan bukti pimpinan ABRI memiliki komitmen dan kesungguhan menerapkan hukum terhadap setiap warga negara. "ABRI ingin membersihkan namanya dari tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan kasus orang hilang. Pembentukan DKP itu memperlihatkan tingkat keseriusan pimpinan ABRI untuk menegakkan citra ABRI," ujarnya.

Sedangkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Amien Rais berharap agar semua fakta yang berkaitan dengan keterlibatan oknum Kopassus dalam kasus penculikan, diungkapkan secara jujur dan benar. Sebab, lanjutnya, kalau ada fakta yang disembunyikan DKP, justru masyarakat semakin antipati terhadap ABRI.

Sementara Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir sangsi DKP yang dibentuk ABRI akan bisa mengajukan tiga pimpinan dan mantan pimpinan Kopassus itu ke mahkamah militer. (Tim Media)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

KSAD Pimpin DKP Periksa Prabowo dan Muchdi

JAKARTA — Menhankam/ Pangab Jenderal TNI Wiranto kemarin mengumumkan terbentuknya Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk mengusut kasus penculikan. Dewan ini segera akan memeriksa dua mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto dan Mayjen TNI Muchdi PR, serta mantan Dan Grup IV Kolonel Inf Chairawan. Ketiganya kini sudah dinonaktifkan.

Menurut Wiranto, mereka telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Kehormatan Perwira pada kasus orang hilang. Selain Prabowo, Muchdi, dan Chairawan, kata Wiranto, sepuluh orang anggota Kopassus lainnya akan diajukan ke Mahkamah Militer dalam waktu dekat. Mereka terdiri atas tujuh orang perwira dan tiga orang bintara.

DKP ini dipimpin oleh KSAD Jenderal TNI Subagyo HS dan Kasum ABRI Letjen TNI Fachrul Razi sebagai wakil. Anggotanya: Irjen Dephankam Letjen TNI M Yusuf Kartanegara, Gubernur Lemhannas Letjen TNI Agum Gumelar, Kassospol ABRI Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Pangkostrad Letjen TNI Djamari Chaniago, dan Danjen Akabri Laksdya TNI Sutjipto, serta Wakasad Letjen TNI Sugiyono dan Letjen TNI Arie J Kumaat sebagai cadangan.

Semua anggota DKP adalah perwira tinggi bintang tiga, karena menurut Wiranto pangkat pemeriksa (DKP) harus sederajat atau setingkat lebih tinggi dibanding yang akan diperiksa.

Dijelaskan Wiranto, dalam menyelesaikan kasus orang hilang ABRI mengacu pada sistem peradilan yang berlaku di ABRI. "Tepatnya terdapat dua proses hukum yang akan dilakukan yakni DKP dan Mahmil," katanya kepada ratusan wartawan dalam dan luar negeri di Mabes ABRI, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, kemarin.

DKP, jelas Wiranto, digelar untuk memeriksa para perwira berpangkat kolonel ke atas yang dianggap melanggar Kode kehormatan perwira 'Budi Bakti Wira Utama'. Sementara para prajurit yang berpangkat letkol ke bawah, lanjutnya, langsung diajukan ke Mahmil. Dia menambahkan bahwa para perwira yang akan diajukan ke DKP bisa saja diajukan ke Mahmil bila terbukti melakukan tindak pidana.

Seusai acara pertemuan pers, KSAD Subagyo mengatakan sejak sore kemarin DKP langsung mulai bekerja. Dia menepis pertanyaan bahwa dalam menjalankan tugasnya akan merasa canggung karena dia berasal dari Kopassus. "Saya ditunjuk sebagai Ketua DKP bukan untuk memberikan sanksi. Yang memberi sanksi nanti Pangab, DKP hanya memberi masukan-masukan," jelasnya.

Menurut Subagyo, sanksi terberat yang akan diberikan DKP kepada perwira yang diperiksa adalah dipecat dari ABRI dengan tidak hormat. Dia juga menjelaskan bahwa saat ini ketiga perwira yang akan diajukan ke DKP sudah dinonaktifkan.

Saat ini Prabowo sebagai Dan Sesko ABRI, Muchdi sebagai PATI Mabes ABRI. Menurut Wakil Ketua DKP Fachrul Razi, untuk melancarkan pemeriksaan ini, keduanya sudah dinonaktifkan dari jabatannya. Begitu juga Chairawan.

Tugas-tugas Prabowo sebagai Dansesko selama diperiksa, kata Fachrul, dijalankan oleh Wakil Dansesko Mayjen Marinir Benyamin Balukh sebagai pelaksana harian. Fachrul belum bisa menjelaskan siapa pengganti tetap menantu Soeharto itu. Sumber-sumber Republika di Mabes ABRI menyebutkan bahwa Mayjen TNI Johny Lumintang akan segera mengisi jabatan tersebut.

Seperti diketahui, Kopassus —pasukan elite TNI-AD— adalah satuan yang diduga melakukan penculikan terhadap sejumlah aktivis politik, beberapa waktu silam.

Wiranto membantah bahwa penyelesaian kasus ini banyak bermuatan politis karena yang diajukan hanya perwira dari Kopassus dan mereka adalah yang selama ini dikenal sebagai 'lawan' politiknya. "Proses ini sama sekali bebas dari masalah-masalah politik. Ini betul-betul merupakan perwujudan tekad, niat, dan semangat ABRI untuk membentuk ABRI baru dalam era reformasi ini," ujarnya seraya menambahkan bahwa di dalam tubuh ABRI tidak ada visi-visi politik yang berbeda.

Wiranto berharap kepada masyarakat agar langkah-langkah ABRI menyelesaikan kasus orang hilang itu tidak dikalkulasikan lain. "Saya mengharapkan jangan ada spekulasi-spekulasi baru yang dilemparkan, yang justru akan mengintervensi pelaksanaan peradilan ABRI yang kita laksanakan secara konsekuen ini," katanya.

Sementara Fachrul mengatakan bahwa pemeriksaan Prabowo akan dilakukan secepatnya. "Secepatnya akan kita lakukan. Mudah-mudahan bisa minggu ini kita periksa," katanya menjawab pertanyaan wartawan.

Tidak ada penjelasan mengapa Mabes ABRI menggunakan nama DKP dan bukan DKM seperti yang selama ini santer disebut. Namun, beberapa waktu lalu, Subagyo mengatakan bahwa lembaga DKP itu sebetulnya sudah ada di ABRI dan bisa langsung diaktifkan bila diperlukan.

"Di ABRI itu kan sudah ada lembaga DKP. Itu bisa langsung diaktifkan bila terjadi kasus yang melibatkan perwira ABRI," ujar Subagyo, seusai acara penandatanganan berita acara SK Bersama pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Mei, dua pekan silam. ■ bsa

SUSUNAN DKP

Ketua : KSAD Jenderal TNI Subagyo HS
Waka : Kasum ABRI Letjen TNI Fachrul Razi
Anggota : Irjen Dephankam Letjen TNI M Yusuf Kartanegara
Kassospol Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono
Gubernur Lemhannas Letjen TNI Agum Gumelar
Pangkostrad Letjen TNI Djamari Chaniago
Danjen Akabri Laksdya TNI Sutjipto
Cadangan:
Wakasad Letjen TNI Sugiyono
Letjen TNI Arie J Kumaat

Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☒ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

DKP akan periksa Prabowo

JAKARTA (Bisnis): Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto mengatakan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) akan memeriksa Letjen TNI Prabowo Subianto karena diduga terlibat dalam kasus penculikan aktivis prodemokrasi.

"Pemeriksaan akan dilakukan sesegera mungkin. Untuk itu saya harap masyarakat bersabar menunggu," kata Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Dephankam Jl. Merdeka Barat, Jakarta, kemarin.

Wiranto mengatakan DKP juga akan memeriksa Mayjen TNI Muchdi P.R. (mantan Danjen Kopassus) dan Kol. Inf. Chairawan (Dangrup IV Kopassus). Ketiga orang itu, tambahnya, melanggar kode etik perwira, disiplin militer, dan disiplin ABRI. "DKP akan memberikan pertimbangan pada Pangab mengenai tindakan yang akan diambil terhadap ketiga perwira tersebut," kata Wiranto.

Dia menambahkan seandainya perwira yang sudah diperiksa DKP ternyata terlibat dalam tindak pidana, dia tidak akan terbebas dari proses pengadilan di Mahmil.

Wiranto menjelaskan Ketua DKP adalah Kastaf TNI AD Jenderal TNI Subagyo HS dan Wakil Ketua adalah Kasum ABRI Letjen TNI Fachrul Razi. Anggota DKP adalah Irjen Dephankam Laksdya TNI Suratmin, Kassospol ABRI Letjen TNI Bambang Susilo Yudhoyono, Gubernur Lemhanas Letjen TNI Agum Gumelar, Pangkostrad Letjen TNI Djamari Chaniago, Danjen Akabri Laksdya TNI Achmad Sutjipto. Sementara dua anggota cadangan adalah Wakasad Letjen TNI Sugiono dan Letjen TNI Arie Kumaat.

Pangab mengatakan ABRI akan mengacu pada sistem peradilan yang berlaku untuk ABRI, yaitu melalui DKP dan Mahkamah Militer. Mahmil, lanjutnya, diperuntukkan bagi prajurit berpangkat Mayor ke bawah.

Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo HS usai konferensi pers mengatakan saat ini Prabowo, Muchdi, dan Chairawan dibebastugaskan karena pemeriksaan sudah dimulai. **(s8/04)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Prabowo Mulai Diperiksa

KSAD Pimpin Langsung Sidang DKP

JAKARTA (Media): Mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto dan Mayjen TNI Muchdi serta mantan Komandan Grup IV Kopassus Kolonel Inf Chairawan, kemarin mulai diperiksa Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dipimpin KSAD Jenderal TNI Subagyo.

Pemeriksaan yang dimulai pukul 09.00 WIB itu berlangsung di ruang rapat lantai dua Markas Besar TNI AD (Mabesad), Jl Merdeka Utara No 2, Jakarta Pusat.

Seluruh anggota DKP hadir. Selain Jenderal TNI Subagyo, hadir pula Wakil Ketua Letjen TNI Fachrul Razi, Sekretaris Letjen TNI Djamari Chaniago, dan lima anggota lainnya yakni Letjen TNI Agum Gumelar, Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen TNI Yusuf Kartanegara, Laksamana Madya TNI Soeratmin, dan Laksamana Madya TNI Achmad Sutjipto.

Seperti diketahui, Pangab Jenderal TNI Wiranto, Senin lalu membentuk DKP dengan tugas memeriksa keterlibatan ketiga pentolan Kopassus itu dalam kasus penculikan para aktivis prodemokrasi beberapa waktu lalu. Selama diperiksa, Prabowo dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Dan Sesko ABRI, Muchdi dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Wairjen ABRI, dan Chairawan dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Dan Grup IV Kopassus.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI I Dewa Putu Ray ketika ditemui di kantornya membenarkan adanya sidang DKP terhadap ketiga perwira yang diduga melanggar kode etik perwira itu.

"DKP sudah melaksanakan tugasnya. Kita tunggu saja hasilnya yang akan diumumkan oleh Ketua DKP," kata Putu.

Putu Rai juga menjelaskan, dalam pemeriksaan DKP, ketiga perwira itu akan ada pendamping. "Pendamping itu bisa dari ABRI, tapi bukan dari kesatuan. Saya tidak tahu siapa yang akan mendampingi mereka," katanya.

Mengenai istilah 'pendamping' tersebut apakah sama dengan 'pembela', Kadispenad mengatakan, "DKP itu bukan pengadilan, tetapi hanya untuk memeriksa apakah ada pelanggaran atau kesalahan dari ketiga perwira tersebut."

Ketika ditanya apakah pendamping berhak memberikan pembelaan, Putu Rai mengatakan, status pendamping bukan pembela seperti di dalam pengadilan, tetapi seperti penasihat hukum atau apa pun istilahnya yang diperuntukkan memberikan pengertian aspek hukum.

Ia menambahkan, pangkat dari pendamping tersebut tidak harus perwira tinggi, tetapi bergantung kebutuhan.

Putu Rai tidak mau memberikan penjelasan mengenai pangkat dari pendamping Prabowo, karena hal itu merupakan penunjukan langsung dari Pangab.

Ditanya apakah DKP bersidang tiap hari, Putu Rai mengatakan, jadwal persidangan ditentukan DKP sendiri.

Menjawab pertanyaan apakah DKP sama dengan DKM (Dewan Kehormatan Militer), Kadispenad mengatakan pada prinsipnya sama. Antara DKP dan DKM hanya beda nama, prinsipnya sama yakni menyidangkan perwira yang melanggar kode etik perwira.

Jujur dan terbuka

Menanggapi sidang DKP, mantan Wakasad Letjen TNI (Purn) Sahala Radjagukguk berharap agar Prabowo mau terbuka dan jujur mengatakan siapa yang memberikan perintah penculikan para aktivis itu.

"Karena bagaimanapun juga pasti ada perintah dari atasan yang lebih tinggi, sebab di tentara anak buah hanya menjalankan perintah," kata mantan Dubes RI di India itu kepada *Media*, kemarin malam.

Menurut Radjagukguk, nama korps baret merah sudah tercoreng dalam kasus penculikan ini. Oleh karena itu keterbukaan Prabowo di sidang DKP dapat membuka mata para prajurit Kopassus mengenai hal-hal di balik kasus penculikan ini. Sehingga setiap prajurit Kopassus akan tetap menjalankan perintah komandannya.

"Bila Prabowo tidak terbuka akan membawa pengaruh bagi para prajurit Kopassus dalam menjalankan perintah dari komandannya. Mereka akan menjadi ragu-ragu atau takut," tandas Radjagukguk.

Radjagukguk mengaku memberikan pernyataan ini sebagai *moral force* dan tidak ada muatan politiknya. "Saya hanya ingin menekankan di ABRI tidak ada anak buah yang bersalah, karena mereka ini hanya menjalankan perintah. Semua tanggung jawab ada di komandan," papar Radjagukguk.

Sedangkan mantan Pangkopkamtib Laksamana TNI (Pur) Sudomo menegaskan jika ditemukan unsur pidana, Prabowo, Muchdi, dan Chairawan bisa diajukan ke Mahkamah Militer.

Dia menegaskan, pembentukan DKP itu bukan merupakan akal-akalan agar kasus ini tidak dilanjutkan ke Mahkamah Militer. "Masyarakat tidak perlu khawatir. Kita percayakan kepada DKP. Apalagi ini menyangkut nama ABRI," tandas Sudomo.

Sudomo menambahkan, tidak ada seorang pun yang kebal hukum termasuk mantan Presiden Soeharto dan mantan Pangab Feisal Tanjung. "Tidak ada pengecualian dan tidak ada kebal hukum baik militer maupun sipil." (Wdh/Ida/Mia/Ant/D-12)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☑ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

DKP Belum Lakukan Pemeriksaan

WALAPUN Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Kasad Jenderal Subagyo HS sudah menjanjikan akan segera memulai tugasnya, tapi sampai kemarin, DKP belum memeriksa Letjen Prabowo Subianto, Mayjen Muchdi PR dan Kolonel Chairawan. Namun, tim DKP telah mengadakan pertemuan maraton selama delapan jam di Mabesad.

Subagyo HS mengakui, dewan yang dipimpinnya baru memulai pembenahan, belum pemeriksaan. Menurut Kasad, nanti akan diberitahukan kalau sudah dilakukan pemeriksaan meski pemeriksaannya tertutup.

Prabowo, Muchdi PR dan Chairawan diajukan ke DKP karena diduga ada keterlibatan dalam kasus penculikan para aktivis prodemokrasi menjelang Sidang Umum MPR bulan Pebruari lalu. (*Merdeka*, 4/8)

Rapat yang yang berlangsung di Mabesad sejak pukul 09.00 berakhir pukul 17.00 WIB. Semua tim DKP hadir yang terdiri dari Wakil Ketua Letjen Fachrul Razi, Sekertaris Letjen Djamari Chaniago, Letjen Susilo Bambang Yudoyono, Letjen Yusuf Kartanegara, Letjen Agum Gumelar dan Laksdya Achmad Sutjipto. Anggota cadangan juga hadir yaitu Letjen Sugiono dan Letjen Arie Kumaat.



Mayjen Muchdi PR



Letjen Prabowo Subianto



Kolonel Chairawan

Sebelum diperkirakan Prabowo langsung diperiksa tim DKP karena jabatannya sementara sudah dicopot sebagai Komandan Sekalah Staf dan Komando (Dan Sesko) ABRI. Pencopotan sementara ini untuk menghilangkan kesan bahwa yang diperiksa DKP bukan Dan Sesko ABRI tetapi Letjen Prabowo yang pernah memangku jabatan Komandan Komando Pasukan Khusus (Dan Kopassus) TNI AD. Pengamanan di sekitar ruang sidang, tempat pemeriksaan nanti memang cukup ketat. Apalagi ada rencana selama pemeriksaan hanya anggota DKP dan perwira menengah pembantu saja yang boleh masuk ke ruang sidang. Hasil dari pemeriksaan itu juga direkam dalam video tape.

Kadispenad Brigjen I Dewa Putu Rai membenarkan bahwa rapat DKP dilaksanakan di Mabesad. Namun, dia mengaku tidak berwenang menjawab pertanyaan soal DKP. Sebab, yang menyangkut kerja DKP langsung di bawah ketua dewan.

Ketika ditanya apa mereka yang diperiksa bisa didampingi perwira lainnya, disebut kemungkinan ada yang mendampingi. Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto sebelumnya mengatakan, apabila dalam pemeriksaan 10 anggota Kopassus di Mahkamah Militer nanti terbukti adanya tindak pidana yang dilakukan Letjen Prabowo Subianto, Mayjen Muchdi PR dan Kolonel Chairawan, maka mereka akan diajukan ke Mahkamah Militer meskipun sudah diajukan DKP. (PN)

Kelas: .....

Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

			Tanggal						Bulan		Tahun
S INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
RTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
A POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
PAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
IA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

dang Pertama DKP Maraton 8 Jam

TA — Sehari setelah dires-wan Kehormatan Perwira narin langsung bersidang etuanya Jenderal TNI Su-Sidang berjalan maraton pan jam sejak pukul 09.00 ng SUAD Mabesad kema-seluruh anggota hadir tak cadangannya.

idang yang membahas ka-ikan ini, tahap pertama tim neriksa berkas-berkas ter-jen TNI Prabowo Subianto,

NI Muchdi PR, dan Kolonel awan. Ruang Staf Umum Darat (SUAD) selama ini untuk pertemuan para staf gan AD.

esempatan terpisah, Ketua I Mayjen TNI Syamsu Dja-butkan 11 prajurit Kopassus njadi tersangka pada kasus ang. Namun, ia hanya me-inisial mereka yang kini te-huni tahanan POM, dan se-diajukan ke mahkamah mili-

eka adalah BB, UB, DH, NS, YS, FN, SK, SN, dan SG. kata Syamsu, akan diajukan tamah militer secepatnya.

i pertemuan di Mabesad, tidak jelasan pasti apakah Prabowo, dan Chairawan telah dihadir-lepan sidang pertama itu. Na-antara mobil para jenderal bin-a yang diparkir di halaman de-besad itu, tampak mobil To-nd Cruiser hijau muda berpelat D (Bandung) — para wartawan ga itu mobil Prabowo.

ispenad Brigjen TNI ID Putu mbenarkan adanya sidang DKP lemang DKP sudah mulai me-akan tugasnya. Tugasnya apa? sendiri tahu, yaitu memeriksa pa perwira ABRI yang diduga t dalam kasus orang hilang," a di Kantor Dispenad, kemarin.

Putu Rai menjelaskan bahwa semua anggota DKP termasuk dua anggota cadangannya datang pada sidang itu. Namun, dia mengaku tidak tahu persis apakah para perwira yang akan diperiksa sudah dihadirkan. Dia juga mengaku tidak mengetahui materi apa yang dibahas pada sidang tersebut.

"Semua keterangan pers yang menyangkut DKP ini hanya boleh diberikan oleh ketua dewan. Jadi saya tidak berhak memberikan keterangan, itu bukan wewenang saya. Apalagi saya kan tidak masuk dalam rangan itu."

Tentang digunakannya fasilitas Mabesad, Putu menjelaskan bahwa itu hanya kebetulan saja, karena ketua DKP adalah KSAD. "Jadi bisa saja tidak di sini karena ini kan DKP ABRI bukan DKP TNI-AD," katanya.

Putu berharap masyarakat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada DKP untuk menjalankan tugasnya. "Berikan kesempatan kepada mereka. Ini kan masih dalam proses."

Wartawan yang menunggu sidang tersebut hingga selesai tidak berhasil memperoleh keterangan dari KSAD Subagyo Hadisiswoyo. Jenderal bintang empat itu hanya terlihat keluar dari gedung sekitar pukul 17.00 WIB, berbicara sebentar dengan para anggota DKP dan kemudian meninggalkan Mabesad dengan mobil dinasnya.

Di tempat terpisah, Ketua TPF ABRI, Mayjen TNI Syamsu Djaluddin, menjelaskan bahwa tim yang dipimpinnya sebelumnya telah memeriksa Prabowo, Muchdi, dan Chairawan. Dia tidak menyebutkan kapan itu dilakukan. Namun, katanya, hasil pemeriksaan itu yang kemudian direkomendasikan kepada Pangab agar ketiganya diajukan ke DKP.

"Siapa bilang kami belum memeriksa mereka. Kami sudah memeriksa, tapi 'kan tidak harus dilaporkan kepada masyarakat luas," katanya kepada wartawan di Maspuspom, Jakarta, kemarin. Syamsu tak menjelaskan kapan dan di mana pemeriksaan Prabowo, Muchdi, dan Chairawan dilakukan.

Meski demikian, Syamsu tak mengelak ditanya tentang dugaan keterlibatan Muchdi sehingga harus terseret ke DKP. Menurut Syamsu, pada saat Muchdi menjabat Danjen Kopassus telah terjadi penculikan terhadap Andi Arief. "Seharusnya dia tahu ada kegiatan yang tidak benar. Sebagai seorang perwira harusnya melaporkannya. Artinya dia tidak terlibat langsung," katanya.

Mengenai sebelas prajurit Kopassus yang kini mendekam di rutan POM ABRI, Syamsu tak mau menyebutkan pangkatnya. Dia hanya menyatakan kekagumannya kepada Pangab yang dengan terang-terangan menyebutkan nama Letjen Prabowo, Mayjen Muchdi, dan Kolonel Chairawan terlibat pada kasus itu. "Kalau saya, tidak berani karena saya menghormati asas praduga tak bersalah," tuturnya.

Danpuspom ABRI itu juga menghargai kesaksian salah seorang korban, Hendrik Sirait, yang mengatakan bahwa ada keterlibatan Intel Kodam pada penculikannya. "Jadi kita bisa kembangkan pemeriksaan ke Inteldam," katanya. Jadi arahnya ke Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin? "Itu yang mengatakan Anda, bukan saya," tukasnya sambil tertawa. ■ bsa

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Sidang Pertama Periksa Chairawan

Tak Bisa Diumumkan Sepotong-Sepotong

Prabowo dan Muchdi Menyusul

Jakarta, JP.-

Baru sehari dibentuk, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) kemarin langsung bersidang di Mabes AD. Sidang yang berlangsung tertutup dan tidak boleh diliput wartawan itu dipimpin KSAD Jenderal TNI Subagyo Hadi Siswoyo.

Menurut sumber *Jawa Pos*, tersangka pertama yang diajukan ke sidang DKP adalah Kolonel Inf Chairawan. Letjen TNI Prabowo Subianto dan Mayjen TNI Muchdi P.R. akan dihadirkan dalam sidang berikutnya. Ketiga perwira tersebut kemarin juga sudah dibebastugaskan dari jabatan mereka, masing-masing sebagai komandan Grup IV Kopassus, Dansesko ABRI, dan Danjen Kopassus.

Sidang berlangsung sekitar enam jam, mulai pukul 11.00 WIB sampai 17.00 WIB. Seluruh anggota DKP hadir, yakni Kasum ABRI Letjen TNI Fachrur Rozi, Kassospol ABRI Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Gubernur Lemhanas Letjen TNI Agum Gumelar, Irjen Dephankam Letjen TNI Yusuf Kartanegara, Danjen Akabri Laksdya Achmad Sutjipto, Pangkostrad Letjen TNI Djamari Chaniago, serta dua nggota cadangan; Wakasad Letjen TNI Sugiyono dan Letjen TNI Arie J. Kumaat.

Sumber *Jawa Pos* menjelaskan, tersangka yang diajukan dalam sidang pertama adalah perwira berpangkat terendah. "Karena Chairawan berpangkat terendah, ya diajukan pertama. Sidang berikutnya baru menyusul perwira tinggi, seperti, Muchdi dan Prabowo Subianto," jelasnya.

Sumber tadi juga menyebutkan, sidang pemeriksaan Chairawan ini juga belum final karena perlu dilakukan *cross check* dengan perwira lainnya. Tentang berapa kali sidang akan dilakukan, sumber tadi menyatakan tidak bisa memastikan. "Itu bergantung pada situasinya nanti. Kalau semuanya beres, ya cepat," ujarnya.

Dalam sidang itu, Chairawan juga mendapatkan fasilitas pendamping, seorang perwira sarjana hukum. Hanya, posisi pendamping itu tidak seperti pembela dalam persidangan di pengadilan-pengadilan.

"Tapi, tugas pendamping ini hanya memberikan pelayanan bantuan kepada tersangka. Misalnya, tersangka kurang paham dengan pasal-pasal hukum yang akan menjeratnya, tersangka bisa menanyakan kepada pendamping," ujarnya. Pendamping ini, lanjutnya, hanya satu orang, yang ditunjuk oleh DKP.

Dijelaskan, suasana sidang pemeriksaan Chairawan juga cukup tegang. "Namanya sidang, ya serius dan menegangkan. Dan polanya, ya seperti persidangan biasa. Bedanya, sidang ini dipimpin jenderal-jenderal," katanya.

Tentang keterangan apa yang disampaikan Chair dalam persidangan DK sumber tadi tidak bersedi nyebutkan. "Itu rahasia. kalau sudah waktunya, bar mumkan hasilnya," ujarny

Sementara itu, Mayjen M mungkin akan diajukan k sidangan DKP lusa dan kutnya akan disusul Letje bowo. Menurut sumber proses persidangan tig sangka ini tidak bisa diu kan sepotong-sepotong. " baik wartawan ikuti terus pada saatnya akan diu kan," katanya.

Kadispen Mabes AD B TNI I Putu Ray ketika di konfirmasi wartawan te sidang DKP, menjelaskan pihaknya tidak tahu sama proses persidangan DKP memang tidak dilibatkan. mang KSAD yang mem tapi sayangnya, Kadisp tidak diikutkan, ya tidak ta apa," ujarnya.

Ia mengatakan, berila sempatan tim DKP untu laksanakan tugasnya seh bisa menjalankan persid dengan baik. Putu Ray han menjelaskan bahwa par sangka yang diajukan ke D memang diberi pendampin

TAK KOSONG

Sementara itu, jabatan str yang dilepas dua perwira yang kini menjadi tersangka penculikan ternyata tidak matis kosong. Misalnya, ja

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA		1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA		2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA		3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA		4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN		5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Barisan Nasional Mendesak DKP

"Periksa Saja Soeharto"

Jakarta, Rabu, Merdeka

Inilah sikap Barisan Nasional yang terdiri dari para jenderal purnawirwan terhadap upaya Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang diketuai Jenderal Subagyo HS untuk mengungkap tuntas keterlibatan para perwira tinggi ABRI dalam kasus penculikan sejumlah aktivis pro-demokrasi.

Barisan Nasional mendesak DKP supaya tak ragu-ragu memeriksa kemungkinan keterlibatan bekas presiden Soeharto dalam kasus penculikan para aktivis pro-demokrasi.

"Kami tidak tahu Soeharto terlibat atau tidak. Tapi kalau ada hubungannya dengan Prabowo (Letjen Prabowo Subianto-*red*) mungkin saja itu sepengetahuan Soeharto, karena dia *kan* menantunya. Barangkali dia melapor. Tapi ini semua harus dibuktikan dulu dalam penelitian di DKP," ujar juru bicara Barisan Nasional Letjen (Purn) Kemal Idris kepada *Merdeka* di Jakarta, kemarin.

Sedangkan sesepuh ABRI lainnya, Letjen (Purn) M Jasin menyatakan, DKP harus berani mengusut tuntas kasus ini sampai ke Pangtinya —saat itu Pangtinya Soeharto.

"Mungkin Prabowo mendapat *kerdipan* mata dari Soeharto. Sebab di tingkat atas main *kerdipan* itu sudah perintah, tidak perlu tertulis. Kalau pakai tertulis itu bodoh namanya," kata bekas Wakasad itu.

Jasin menambahkan, tidak cukup hanya memberikan sanksi non-aktif bagi perwira yang terbukti terlibat kasus penculikan sejumlah aktivis pro-demokrasi, tanpa mengusut tuntas kesalahannya.

"Tidak usah pilih kasih atau *ewuh pakewuh* hanya karena dia menantunya Soeharto. Kalau Pak Wiranto mau tegas, tentu harus mengambil tindakan. Langsung diperiksa saja, lalu diserahkan ke Mahkamah Militer," tandas Jasin yang mengaku enggan bergabung dengan Barisan Nasional dan lebih memilih sebagai *single fighter.*

"Saya melihat Prabowo kurang pengalaman dalam berpolitik, karena dia kira dengan begitu, Soeharto bisa kembali," paparnya.

Melanjutkan pernyataannya Letjen (Purn) Kemal Idris menekankan, masalah penculikan para aktivis ini menjadi perhatian serius Barisan Nasional.

"Kalau ada usaha untuk menutup-nutupi kita akan bereaksi, mudah-mudahan tidak ada yang ditutupi. Sebab, bagaimana pun nama angkatan bersenjata yang dipertaruhkan. Kalau ditutupi kita malu besar pernah menjadi anggota angkatan bersenjata," paparnya.

Dikatakan, sanksi terberat bagi perwira ABRI yang nyata-nyata terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik perwira adalah hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati.

"Sanksi terberat dijatuhi hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Nah, apa mereka —para anggota DKP— mau mengorbankan diri hanya untuk seseorang. Jadi kami harapkan mereka terbuka," paparnya.

Barisan Nasional juga berharap para perwira tinggi ABRI yang diperiksa DKP bersikap terbuka. "Mereka yang dituduh juga harus membuka diri. *Masak* mereka sendiri mau terlibat, sedangkan mereka hanya menjalankan perintah. Kalau tidak, artinya mereka mengorbankan diri buat orang lain," ujarnya.

Ditambahkan, Barisan Nasional sependapat dengan pernyataan Amien Rais yang mengatakan bahwa jenderal bintang lima pun harus diperiksa. "Memang biasanya Pangti ABRI tidak perlu harus mengetahui adanya sebuah operasi, yang harus tahu adalah Pangabnya waktu itu. Mungkin dia mengetahui masalah ini," ujar bekas Pangkostrad itu.

Menurut Kemal, sulit dimengerti jika Kopassus bertindak sendiri dalam melakukan operasi terhadap sejumlah aktivis prodemokrasi. "Kalau terbukti bertindak sendiri, mereka salah. Tapi saya kira dalam hal ini banyak yang terlibat. Saya kira Pangabnya pun mungkin tahu," paparnya.

Sementara itu Letjen (Purn) Sayidiman Suryohadiprodjo menyatakan keyakinannya DKP akan bersikap serius untuk menuntaskan kasus ini. "Mudahan-mudahan DKP bisa mengembalikan sikap atau etika perwira ABRI sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit," tandas bekas Gubernur Lemhanas itu.

Ditanya apakah keseriusan DKP tersebut termasuk sampai mengusut Soeharto yang waktu itu menjabat Pangti, Sayidiman menyatakan, masih harus dilihat dulu perkembangan pemeriksaan DKP.

Negara Hukum

Sedangkan Letjen (Purn) Hasnan Habib di sela-sela Lokakarya Nasional Mahasiswa di Universitas Trisakti, Jakarta, kemarin menyatakan, di negara lain seorang bekas presiden pun bisa diajukan ke Mahkamah Militer jika terbukti bersalah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, seperti menculik dan melakukan pembunuhan.

Kalau di sini, bagaimana? tanya wartawan

Harusnya sama. Bukankah negara kita negara hukum. Di negara hukum tak boleh ada satu orang pun yang kebal hukum. Bila bekas presiden Soeharto melanggar hukum pidana maka dia harus dituntut berdasarkan hukum.

Apakah bekas Presiden Soeharto sebagai Pangti bisa diperiksa oleh DKP dan diajukan ke Mahkamah Militer?

Kalau di negara lain, misalnya Argentina, seorang presiden itu bisa diajukan ke pengadilan. Bekas presiden itu dituntut dan dihukum penjara karena melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia seperti penculikan dan pembunuhan. Itu di sana.**(AG/BY)**

ELSA

Media:

- ☐ BISNIS
- ☐ JAKAR
- ☐ JAWA P
- ☐ KOMPA
- ☐ KD. RA
- ☐ MEDIA

Puspo

Sya Buka

Jakarta, Rab

Danpuspom laluddin mema Hendrawan ya pina bukan o atau dicari se tersebut disam mengklirkan berkembang.

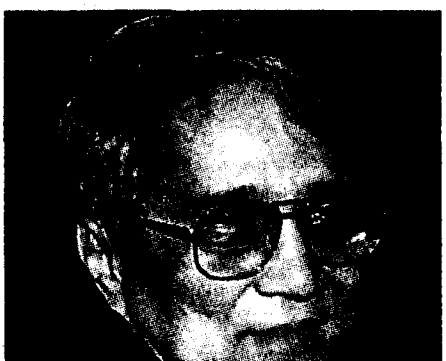
"Herman H Davao dipasti yang dicari sel lihat dia lulusar ngan, saya su orangnya. Kar lah lulusan Un kata Mayjen Sy jabat Ketua Tin ABRI di Jakar

Ketika ditany ada di Davao itu na mungkin sala bisa menjelask tidak tahu," ta

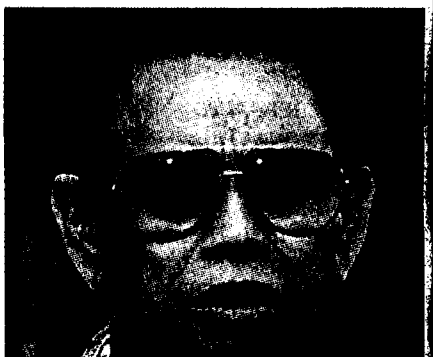
Disebutkan, di Davao— da lisnya mengata lah melakuka Masjid di Kaw tanggal 28 Feb disergap, kemu



Kemal Idris



Hasnan Habib



M Jasin

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐ Suara Merdeka	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

DKP Langsung Periksa Prabowo

• Rapat Berlangsung Tujuh Jam
• Liddle: Bukan Tekanan Amerika

JAKARTA- Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang diketuai KSAD Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo kemarin mengadakan rapat di Mabes TNI-AD serta memeriksa Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Mayjen TNI Muchdi Purwopranjoyo, dan Kolonel Inf Chairawan, sehubungan dengan kasus penculikan terhadap sejumlah aktivis dan orang hilang beberapa waktu lalu.

Penjagaan ekstraketat membuat wartawan yang menungguinya sejak pagi kesulitan mendekati tempat rapat, yang terletak di gedung dekat ruang kerja KSAD. Rapat yang berlangsung tertutup selama tujuh jam, mulai pukul 10.00 itu diikuti KSAD, Kasum ABRI Letjen TNI Fachrul Rozy selaku Sekretaris DKP, dan Letjen TNI Yusuf Kartanegara (Wakil Ketua).

Selain itu, semua anggota dewan tersebut juga hadir, yakni Letjen TNI Agum Gumelar (Gubernur Lemhannas), Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono (Kassospol), Letjen TNI Djamari Chaniago (Pangkostrad), Laksdya TNI Achmad Sutjipto (Danjen Akabri), Letjen TNI Sugiono (Wakasad), dan Letjen TNI Arie J Kumaat (Aster Kasum).

Sementara itu, pengamat politik Indonesia dari AS, William Liddle, mengatakan pembentukan DKP yang memeriksa Prabowo, Muchdi, dan Chairawan bukan karena tekanan Amerika Serikat, melainkan ABRI sendiri yang ingin membersihkan diri.

"Memang Cohen (Menteri Pertahanan AS) datang ke Jakarta. Tetapi soal DKP dan pemeriksaan terhadap Prabowo maupun perwira Kopassus lainnya tidak dipicu dari situ. Ini dari ABRI sendiri yang ingin membersihkan diri," katanya kepada *Antara* di New York, kemarin.

Liddle mengatakan, pernyataan Menhan Cohen di Jakarta bahwa Amerika mendesak agar Pemerintah Indonesia menyelidiki keterlibatan perwira-perwira tertentu dalam penculikan aktivis, mungkin saja berpengaruh. "Tetapi yang menentukan adalah keinginan pemimpin ABRI sendiri yang ingin nama baik korpsnya kembali pulih."

Wewenang KSAD

Menurut Kadispenad Brigjen TNI I Putu Dewa Rai, rapat kali ini berlangsung di Mabes TNI-AD. "Saya tak tahu apakah setelah ini tempat rapat masih di sini atau tidak," ujarnya kepada wartawan.

Ketika pers hendak bertanya lebih jauh, dia buru-buru mengatakan bahwa Dispen TNI-AD bukan dalam posisi yang berwenang menjelaskan hasil-hasil rapat DKP. "Proses dan hasil-hasilnya akan dijelaskan oleh Jenderal Subagyo."

Penjelasan ini sekaligus membantah anggapan seolah-olah Dispen TNI-AD diberi wewenang penuh untuk menjelaskan hasil-hasil rapat DKP. "Semua persoalan yang berkembang sehubungan dengan rapat ini akan disampaikan oleh Ketua DKP. Boleh jadi, langsung menghadirkan ketiga perwira tersebut, tetapi boleh jadi pula dipanggil satu per satu," jelasnya.

Putu menambahkan, ketiga perwira yang akan diperiksa itu memenuhi panggilan dengan para pendamping. Namun dia tak menjelaskan apa fungsi para pendamping. Apakah fungsinya seperti penasihat hukum, Putu Rai enggan menjelaskan.

"Saya kurang tahu apa fungsi para pendamping itu. Silakan tanya langsung kepada Ketua DKP. Tetapi sepengetahuan saya, mereka yang akan mendampingi para perwira tinggi yang disidang oleh DKP bisa dari perwira yang pangkatnya tidak sederajat dengan ketiga perwira itu. Bahkan bisa jadi berasal dari pamen."

Secara terpisah Kapuspen ABRI Mayjen TNI Syamsul Ma'arif membenarkan, Prabowo dan Muchdi telah dinonaktifkan dari jabatan terakhirnya, masing-masing sebagai Komandan Sesko dan Wakil Irjen ABRI.

"Pembebasan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pemeriksaan," katanya. Dia menambahkan, perintah untuk menonaktifkan tiga perwira itu tertuang dalam SK Menhankam/Pangab Nomor 547-B/1998 tanggal 1 Agustus 1998. Dengan SK tersebut, status Prabowo dan Muchdi kini hanya sebagai Pati Mabes ABRI.

Mungkin Berpengaruh

Liddle menambahkan, pernyataan Menteri Pertahanan Cohen itu bukan merupakan hal yang baru. "Beberapa pejabat AS seperti Menlu Albright dan Presiden Bill Clinton juga pernah menyatakan hal yang sama," kata pakar dari Universitas Ohio itu.

Bahkan, Asisten Menlu AS untuk Urusan HAM John Shattuck pernah mendesak agar Indonesia memeriksa perwira-perwira senior, yang menurut laporan CIA diduga terlibat dalam kasus penculikan, penembakan, serta pemerkosaan dan kerusuhan 13-14 Mei lalu.

Pejabat-pejabat AS itu, kata Liddle, didorong oleh masyarakat AS yang mendesak Pemerintah untuk menyelidiki apakah perwira-perwira yang terlibat itu pernah mendapat pendidikan dan latihan dalam suatu program kerja sama militer AS. "Rakyat AS tak ingin bantuan kerja sama militer dengan tentara asing digunakan untuk melanggar HAM dengan membunuh atau menganiaya rakyat mereka sendiri."

Rakyat AS, menurut Liddle, tahu betul bahwa sejumlah perwira Kopassus mendapat latihan militer, misalnya dalam mengatasi perang kota dan kontraterorisme di AS dalam program IMET.

"Rakyat AS ingin tahu apakah ada perwira-perwira Koppasus didikan AS itu terlibat. Sebab, kalau terlibat sangat tidak mengenakkan AS yang punya agenda menghentikan pelanggaran HAM oleh kekuatan militer," tegasnya.

Liddle mengakui, nama baik Kopassus sebagai pasukan elite sudah cemar atau meminjam istilah Prabowo "seperti comberan". Namun ia tidak setuju kalau korps tersebut dibubarkan.

"Semua negara memerlukan pasukan elite. Yang perlu dilakukan adalah bukan pembubaran,

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

DKP Mulai Periksa Prabowo, Muchdi Dan Chairawan

Jakarta, 5 Agustus

Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto mengatakan, ABRI tidak ragu-ragu untuk menindak prajurit yang salah.

Hal itu disampaikan Menhankam/Pangab saat menerima laporan kenaikan pangkat 4 perwira ABRI di Mabes ABRI Jakarta, Rabu (5/8) pagi. Perwira yang naik pangkat tersebut adalah Gubernur Akmil Mayjen TNI Irvan Edison, Wagub Akmil Brigjen TNI Iping Sumantri, Pangdiv II Mayjen TNI Wiliam T da Costa, dan Kasdiv II Brigjen TNI Rudjiono.

Dikatakan, kenaikan pangkat tersebut dinilai tepat karena ABRI masih melakukan reformasi. Kepada yang telah naik pangkatnya, Menhankam/Pangab mengharapkan agar mereka lebih peka mewaspadai dan mengamati situasi serta peka dalam mengantisipasinya.

Sementara itu Kapuspen ABRI Mayjen TNI Syamsul Ma'arif usai acara pelaporan kenaikan pangkat tersebut mengatakan, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) sudah mulai bekerja. Hal itu dikatakan menjawab pertanyaan apakah benar mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR, dan mantan Komandan Grup IV Kopassus Kol Inf Chairawan diperiksa kemarin.

Dikatakan, beri kesempatan untuk DKP melakukan tugasnya. Jika pertanyaan itu dijawab, katanya, pasti akan ditanya lagi sudah sejauh mana. Yang penting tegasnya, DKP sudah mulai bekerja.

Hasil penelitian DKP jika sudah selesai akan diserahkan kepada Menhankam/Pangab berupa saran, untuk tindakan selanjutnya.

Dilematis

Pakar Hukum Luhut MP Pangaribuan melihat pembentukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dalam menangani kasus perkembangan kasus penculikan boleh dikatakan ABRI dianggap telah melanggar hukum sedangkan DKP yang dikedepankan sekarang ini hanyalah berkaitan dengan kode etik, bukan menyangkut pidana.

"Karenanya kasus ini seharusnya langsung saja diajukan ke Mahmilti yang akan memeriksanya secara pidana dan transparan. Dengan penanganan DKP ini citra ABRI benar-benar dipertaruhkan," tutur Pangaribuan menanggapi pendirian DKP kepada *Pembaruan* Rabu (5/8) pagi di Jakarta.

Ia mengkhawatirkan dari hasil DKP ini nantinya akan memberikan kesan ABRI berada di luar jangkauan hukum, praktis masyarakat tidak akan percaya lagi kepada ABRI. Akibatnya di manamana masyarakat akan sering bentrok dengan ABRI di mana belakangan ini tendensi ke arah itu boleh dikatakan meningkat. Tentunya ABRI sangat tidak menghendaki situasi semacam ini.

Menurut mantan Direktur LBH Jakarta ini, gejolak-gejolak masyarakat tersebut hendaknya jangan dilihat sebagai letupan sesaat, tapi itu merupakan akumulasi dari kondisi selama ini. Semua itu memberikan pemikiran bahwa demikian besar tantangan bagi ABRI pada masa reformasi ini, tapi sebaliknya sebenarnya ini momentum yang baik bagi ABRI untuk mengubah persepsi bahwa ABRI tidak berada di luar jangkaun hukum, tinggal bagaimana ABRI memanfaatkannya.

Akan tetapi apabila tindakan ABRI dalam menghadapi masalahnya dengan pembentukan DKP hanya untuk seolah-olah sudah menindak sebagaimana kekhawatiran banyak kelompok masyarakat, maka sikap seperti itu jelas akan menjadi bumerang.

Apalagi, lanjut Pangaribuan kembali mengingatkan, bagi rakyat tindak pidana penculikan yang melibatkan perwira tinggi ABRI sudah jelas adanya. Belum lagi dengan berbagai pengakuan korban yang memperoleh penyiksaan selama dalam penyekapan dan bahkan sebagian aktivis belum diketahui nasibnya. "Kasus kejahatan ini benar-benar terlalu serius untuk tidak ditangani secara tuntas," tegas advokat kenamaan ini.

Bukan Profesi

Menjawab pertanyaan, Pangaribuan mengatakan pada dasarnya ia pun kurang setuju kasus yang menyangkut hak asasi ini ditangani oleh DKP.

DKP yang hanya berkaitan dengan kode etik menurutnya bukanlah lembaga yang tepat menangani masalah ini. Alasannya, kode etik merupakan bagian dari profesi sedangkan ABRI itu bukanlah profesi dalam arti konsep. Sebab unsur penting dari profesi menurut Pangaribuan harus independen, mandiri dalam menjalankan fungsinya. Sementara ABRI menganut garis komando, artinya melaksanakan tugas atas perintah orang lain sehingga tidak mandiri dalam arti yang luas. Jadi kode etik tidak tercermin dalam komunitas kehidupan ABRI, sehingga adalah tidak tepat memeriksanya dari aspek kode etik apabila melakukan penyimpangan, lain halnya dengan kalangan profesi seperti dokter, pengacara dan wartawan. "Karenanya kasus ini langsung saja ke Mahmilti," demikian Luhut Pangaribuan.

Bukan Tekanan AS

Pengamat politik Indonesia dari AS, William Liddle, mengatakan pembentukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang akan memeriksa Prabowo, Muchdi dan Chairawan, bukan karena tekanan dari Amerika Serikat, tetapi disebabkan ABRI sendiri yang ingin membersihkan dirinya.

"Memang Cohen (Menteri Pertahanan AS) datang ke Jakarta, tapi soal Dewan Kehormatan Perwira dan pemeriksaan atas Prabowo dan lain-lain perwira Kopassus tidak dipicu dari situ. Ini dari ABRI sendiri yang ingin membersihkan dirinya," kata Liddle kepada *Antara* di New York, Senin petang (Selasa pagi WIB).

Pakar politik dari Universitas Ohio itu diwawancarai sehubungan dengan terbentuknya DKP yang dipimpin KASAD Jenderal TNI Subagyo HS untuk memeriksa Letjen TNI Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus yang kini menjabat Dan Sesko ABRI, Mayjen TNI Muchdi PR, mantan Danjen Kopassus yang kini menjabat Wakil Irjen ABRI, dan mantan Komandan Grup IV Kopassus Kol Inf Chairawan. Kenga perwira itu telah dibebaskan dari jabatannya.

Lebih lanjut Liddle mengatakan pernyataan Cohen di Jakarta bah

Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☑ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

DKP mulai bekerja secara maraton

JAKARTA (Bisnis): Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dibentuk untuk memeriksa perwira yang diduga terlibat dalam kasus penculikan aktivis mulai bekerja secara maraton sejak kemarin pagi.

Tim yang diketuai KSAD Jenderal TNI Subagyo HS melakukan pemeriksaan di Kantor Mabes AD Jl. Merdeka Utara sejak pkl. 09.00. Belum jelas siapa saja yang diperiksa kemarin karena acara tersebut bersifat sangat tertutup.

Kadispen Mabes AD Brigjen TNI I.D. Putu Rai membenarkan adanya pemeriksaan di tempat tersebut, tetapi mengatakan tidak berhak memberi keterangan apapun mengenai hal itu.

Sebelumnya Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto mengatakan DKP akan memeriksa Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi (mantan Danjen Kopassus), dan Kol. Inf. Chairawan (Dan Grup IV Kopassus).

Sementara itu, Kapuspom ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalal mengatakan telah memanggil ketiga perwira tersebut sebelumnya sehingga dapat merekomendasikan kasus itu kepada DKP.

Mengenai proses persidangan di Mahkamah Militer terhadap sebelas tersangka lainnya, Syamsu berharap dapat segera dilaksanakan dan dapat mengungkap dengan jelas kasus penculikan aktivis prodemokrasi.

Syamsu mengatakan 11 prajurit tersebut berinisial BB, UB, DH, NS, SN, SG, DB, FS, YS, FM, dan SK. Dia belum bersedia menyebut pangkat dan nama kesatuan masing-masing prajurit karena ingin menerapkan asas praduga tak bersalah.

"Bila melihat keseriusan Pangab menangani masalah ini, saya yakin kasus penculikan akan terungkap," kata Syamsu kepada beberapa wartawan di kantornya, kemarin.

Dalam kesempatan tersebut dia juga mengungkapkan harapannya agar Hendrik Sirait yang diculik berkaitan dengan peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 mau memberikan keterangan. Bila Hendrik menginginkan jaminan keamanan, katanya, Kapuspom akan memberikan.

"Hendrik mungkin punya informasi tambahan, misalnya mengenai keterlibatan Kodam Jaya," kata Syamsu. Dia tidak menolak ketika wartawan menyebut kemungkinan Mayjen Sjafrie Sjamsuddin juga punya andil dalam penculikan itu.

Terus diusut

Menurut dia, Puspom akan terus bekerja sampai kasus ini selesai, bahkan masih akan mengusut sampai jenderal berbintang empat. Dalam ABRI, tambahnya, ada ketentuan bahwa penyidikan terhadap oknum ABRI yang melakukan tindakan pidana akan diperiksa Puspom dan Oditur Militer tanpa memandang pangkat.

Proses persidangan DKP tersebut, menurut Putu Rai, Ketua DKP akan melakukan perbagai penyelidikan termasuk meminta keterangan kepada tiga perwira. "Namun hingga saat ini, saya belum mendapat perintah untuk menjelaskan mengenai hasil yang terjadi dalam DKP tersebut."

Menurut Kadispenad, persidangan DKP itu bersifat resmi seperti layaknya sebuah persidangan. "Para perwira yang diminta keterangan tersebut, juga disertai seorang pendamping," katanya.

Ditanya apakah pendamping itu berfungsi sebagai pembela seperti di pengadilan, dia menyatakan, "Itu pendamping saja bukan pembela. Ini *kan* bukan pengadilan."

Sementara itu, Letjen TNI (Purn) Hasnan Habib mengatakan mantan Presiden Soeharto bisa juga diajukan ke pengadilan bila memang terbukti ada sangkut pautnya dengan aksi penculikan atau terbukti melakukan tindak pidana.

"Dia harus dituntut, tapi prosedurnya berbeda. Mungkin melalui Mahmil Luar Biasa. Tapi untuk tahap awal dia harus dipanggil sebagai saksi," kata Hasnan di sela-sela lokakarya mahasiswa bertema *Indonesia masa depan menuju civil society* yang diselenggarakan di Universitas Trisakti 3-6 Agustus.

Dihukum berat

Hasnan menjelaskan bila nanti ternyata Prabowo melakukan penculikan atas inisiatif sendiri, maka hukuman yang akan diterimanya akan berat sekali. Sebab, lanjutnya, dia tidak berhak melakukan tindakan terhadap warga sendiri yang jelas bukan musuh negara.

Hanya saja, kata Hasnan, tidak ada yang dapat menjamin kredibilitas dan obyektivitas DKP. Sebab, katanya, pemeriksaan dilakukan secara internal dan tidak terbuka. Karenanya dia berharap ketua DKP mengumumkan hasil temuannya secara terbuka kepada masyarakat.

"Bila perwira tinggi itu ternyata melakukan tindak pidana, dia harus dibawa ke pengadilan pidana. Hanya dengan cara itu nama baik ABRI dapat dipulihkan," ujarnya seraya menambahkan bahwa dia sudah dua kali bertemu perwira tinggi militer aktif yang mengatakan akan membawa Prabowo dkk ke Mahmil.

Di Bandung, kriminolog UI Mulyana W. Kusumah menilai DKP harus transparan dalam melakukan pemeriksaan. "Transparansi pemeriksaan terhadap Prabowo, Muchdi dan Chairawan ini akan mampu memulihkan kembali kredibilitas ABRI di mata masyarakat," ujarnya kepada pers seusai menjadi pembicara pada acara lokakarya *Profesionalisme dan Kemandirian Polri* di sini kemarin.

Dia menjelaskan keseriusan ABRI menangani kasus penculikan dan penyekapan sejumlah aktivis menunjukkan responsifitas ABRI terhadap tuntutan masyarakat yang disuarakan beberapa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), antara lain Kontras.

Sementara itu, Romli Atmasasmita, koordinator tim pakar hukum Departemen Kehakiman yang juga dosen Fisip Unpad di tempat sama menilai DKP merupakan langkah besar yang dilakukan ABRI.

"Tapi saya juga sangat setuju bila jalannya pemeriksaan serta hasil pemeriksaan DKP dipublikasikan ke masyarakat. Sekarang ini iklimnya *kan* keterbukaan."

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi I DPR Ny. Aisyah Aminy. Ia meminta Dewan Kehormatan Perwira (DKP) agar obyektif dan transparan dalam melaksanakan tugasnya.

"Kalau setelah dilakukan pemeriksanan terhadap para perwira itu ternyata menemukan unsur tindak pidana, tentunya terhadap yang bersangkutan harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar Aminy tadi malam.

Di Yogyakarta, Syamsu Rizal Panggabean, Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM, menilai sebaiknya para perwira tinggi ABRI yang diduga terlibat kasus penculikan para aktivis dibawa ke pengadilan sipil agar prosesnya bisa berjalan lebih *fair*. **(k11/k15/s8/04/et/ds)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Kasus Penculikan Aktivis

DKP Periksa Kopassus Cijantung

Jakarta, Kompas

Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dipimpin Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo, hari Rabu (5/8) mengadakan sejumlah pemeriksaan di Markas pasukan elite Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) dan Mako Grup IV Kopassus di Cijantung, Jakarta. Kedua tempat yang berada di satu lokasi tersebut selama ini diduga berkaitan erat sebagai tempat kejadian perkara (TKP) kasus penculikan dan penyekapan sejumlah aktivis.

Sementara itu, Ketua DKP Subagyo hari Rabu, secara terpisah di Cipayung, Jakarta, mengungkapkan, dewan yang dipimpinnya telah memulai tugasnya dengan melakukan pemeriksaan terhadap seorang perwira dari tiga perwira yang harus diperiksanya.

Tanpa menyebutkan nama perwira yang diperiksanya, Subagyo menegaskan, pada prinsipnya pemeriksaan dilakukan dari perwira dengan pangkat terbawah meningkat kepada perwira yang lebih tinggi pangkatnya. Dikatakan, perwira tersebut telah diperiksa DKP hari Selasa (4/8) lalu. Ketika ditegaskan apakah yang diperiksa adalah Kol (Inf) Chairawan, Subagyo hanya tersenyum lebar.

Dari tiga perwira tersebut, Komandan Sekolah Staf Komando (Dansesko) ABRI Letjen TNI Prabowo Subianto adalah perwira dengan pangkat tertinggi, disusul mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen TNI Muchdi PR, dan Komandan Grup IV Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) Kol (Inf) Chairawan.

Di belakang Mako Grup IV

Kehadiran tim DKP di Markas Kopassus tidak membawa perubahan suasana di lingkungan Kopassus. Pengamanan yang dilakukan di pos-pos jaga berjalan normal tanpa ada kekhususan. Biasanya, jika ada acara-acara khusus yang dilaksanakan di markas Baret Merah ini, petugas provost telah berjejer dari perempatan jalan Pasar Rebo hingga ke pintu gerbang utama Markas Kopassus.

Pukul 12.55 WIB rombongan DKP yang menumpangi sebuah bus kecil yang dikawal oleh sebuah mobil provost Kopassus di depannya dan sebuah mobil jip di belakangnya, nampak melintasi pos penjagaan Grup IV menuju ke sebuah tempat yang berada di bagian belakang Mako Grup IV. Dalam bus tersebut nampak Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo, Wakil Ketua DKP masing-masing Letjen TNI Fachrul Razi (Kasum ABRI) dan Letjen TNI Yusuf Kertanegara (Irjen Dephankam).

Anggota DKP Letjen TNI Agum Gumelar (Gubernur Lemhannas) duduk di sebelah kiri mendampingi Jenderal Subagyo. Di bagian lain bus tersebut juga tampak Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono (Kassospol ABRI), Letjen TNI Djamari Chaniago (Panglima Kostrad), Laksdya TNI Achmad Sutjipto (Danjen Akabri) serta para anggota cadangan DKP yakni Wakil KSAD Letjen TNI Sugiono, serta mantan Komandan Sesko ABRI Letjen TNI Arie J Kumaat. Juga hadir Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI I Dewa Putu Rai.

Kunjungan DKP pada salah satu bagian (gedung) Grup IV Kopassus tersebut berlangsung sekitar 20 menit. Dengan melintasi jalan bagian belakang kompleks, rombongan kembali menuju Mako Kopassus dan meninggalkan kompleks tersebut pada pukul 14.00 WIB dengan menggunakan mobil dinas masing-masing tanpa pengawalan yang mencolok.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pemeriksaan DKP tersebut. Namun menurut beberapa sumber *Kompas* di Kopassus yang enggan menyebutkan identitasnya, DKP telah melakukan pemeriksaan atau mendengarkan berbagai penjelasan dari sejumlah personel Kopassus serta melakukan peninjauan di berbagai sarana dan prasarana yang ada di kesatuan itu. Namun ia keberatan menyebutkan berapa jumlah sarana yang dikunjungi serta berapa orang personel yang didengarkan penjelasannya.

Belum ditentukan

Mengenai agenda pemeriksaan selanjutnya, Subagyo Hadisiswoyo tidak memberikan jawaban menyangkut urutannya dan kapan akan dilakukan. "Tentang pemeriksaan selanjutnya belum bisa ditentukan kapan." Dia berkali-kali mengatakan, semua tugas DKP masih dalam proses, antara lain mengumpulkan materi dan bahan-bahan lainnya.

Dikatakan, dalam melaksanakan tugasnya sebagai Ketua DKP, ia berpegang pada prinsip bahwa apa yang dilakukannya

LSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

ia:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	~~1998~~
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	~~Agustus~~	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

DKP Datangi Makopassus Cijantung

uchdi Diperiksa Pagi ini

JAKARTA — Mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi Purwoprandjono akan diajukan ke sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang digelar pagi ini. Menurut Ketua DKP, Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo, pemeriksaan para perwira yang diduga terlibat kasus penculikan tersebut, dilakukan berurutan, dari pangkat terendah, dimulai dari lasa lalu (4/8).

"Sidang pertama kemarin (Selasa —Red) sudah menghadirkan para terperiksa. Belum tiga-tiganya, dan tidak harus tiga-tiganya. Pada prinsipnya dari pangkat yang terbawah ke atas," ujar Subagyo kepada *Republika*, di Jakarta, kemarin.

Ketika ditanyakan apakah berarti Muchdi hari ini diperiksa, Subagyo tidak bersedia menjawab. Dia hanya tertawa sambil mengatakan: "Ya, *nggak* tahu lah. Anda bisa menebaknya sendiri."

Subagyo tidak membantah bahwa pada sidang DKP pertama, Selasa lalu, mantan Dan Grup IV/ Kopassus Kolonel Inf Chairawan sudah dihadirkan. Selain memeriksa alumi Akabri tahun 1980 itu, sidang yang berlangsung sekitar delapan jam itu juga menghadirkan beberapa saksi dan bukti-bukti.

DKP kemarin tidak melakukan sidang. Namun, dipimpin langsung Subagyo, mereka meninjau Markas Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur — tempat yang diduga digunakan untuk menyekap aktivis. Seluruh anggota DKP hadir pada pemeriksaan yang berlangsung dua jam, dimulai pukul 11.00 WIB.

Saat pemeriksaan pada sejumlah tempat di Makopassus, hanya Subagyo yang datang dengan kendaraan dinasnya. Wakil Ketua DKP Letjen TNI Fachrul Razi, Sekretaris DKP Letjen TNI Djamari Chaniago dan para anggota yaitu Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen TNI Agum Gumelar, Letjen TNI M Yusuf Kartanegara, Laksdya Sutjipto beserta dua anggota cadangan yaitu Letjen TNI Sugiyono dan Letjen TNI Arie J Kumaat keliling menggunakan bus. Mereka diantar oleh Danjen Kopassus Mayjen TNI Syahrir MS.

Menurut Subagyo, pengecekan di Makopassus itu dilakukan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. "Data itu untuk memperkuat agar pertimbangan atau saran yang akan diberikan kepada Pangab nanti lebih tepat. Ini (dilakukan) dengan melihat kenyataan-kenyataan atau bukti-bukti yang ada," kata KSAD.

Pada bagian lain, Subagyo menjelaskan ketiga perwira yang diajukan ke DKP itu tidak dikenakan tahanan rumah. "Tahanan rumah? Tidak. Seperti biasa saja. Seperti yang Anda ketahui, mereka sudah tidak menjabat lagi, dinonaktifkan," katanya.

Selama diperiksa, kata Subagyo, para perwira itu tetap mendapatkan hak-haknya yaitu didampingi pembela atau pendamping. Namun, dia tidak bersedia menyebutkan nama atau pangkat para pembela.

Subagyo membantah bahwa ada perbedaan perlakuan hukum antara tiga perwira yang diajukan ke DKP dengan tujuh perwira lainnya, yang beserta tiga bintara langsung diajukan ke Mahmil. "Tidak ada perbedaan. DKP itu ada prosesnya, itu berlaku untuk semua perwira," katanya.

DKP, kata Subagyo, pada prinsipnya digelar dalam rangka menilai secara tepat para perwira yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Keputusan yang dihasilkan, katanya, diambil melalui pertimbangan yang teliti, jeli dan tepat. Dia sekali lagi menegaskan bahwa keputusan DKP bukanlah sanksi atau hukuman kepada yang bersangkutan, tetapi masukan kepada Pangab.

"Dengan masukan yang tepat dari DKP, Pangab bisa menentukan apakah perwira tersebut diakhiri masa dinasnya dengan tidak hormat atau dinonstruktural artinya tidak mempunyai jabatan," tutur jenderal bintang empat ini.

Meski sama-sama berasal dari korps Baret Merah, Subagyo mengaku tidak terpengaruh dalam memeriksa para yuniornya itu. Dia bertekad akan melakukan tugasnya secara maksimal. Dia juga berharap agar masyarakat tidak terburu-buru menuntut hasilnya. "Ini kan baru sehari, sekarang baru hari kedua. Jangan buru-buru," katanya. ■ bsa

LSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

DKP Datangi Makopassus Cijantung

Muchdi Diperiksa Pagi ini

JAKARTA — Mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi Purwoprandjono akan diajukan ke sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang digelar pagi ini. Menurut Ketua DKP, Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo, pemeriksaan para perwira yang diduga terlibat kasus penculikan tersebut, dilakukan berurutan, dari pangkat terendah, dimulai Selasa lalu (4/8).

"Sidang pertama kemarin (Selasa —Red) sudah menghadirkan para terperiksa. Belum tiga-tiganya, 'kan tidak harus tiga-tiganya. Pada prinsipnya dari pangkat yang terbawah ke atas," ujar Subagyo kepada *Republika*, di Jakarta, kemarin.

Ketika ditanyakan apakah berarti Muchdi hari ini diperiksa, Subagyo tidak bersedia menjawab. Dia hanya tertawa sambil mengatakan: "Ya, *nggak* tahu saya. Anda bisa menebaknya sendiri."

Subagyo tidak membantah bahwa pada sidang DKP pertama, Selasa lalu, mantan Dan Grup IV/ Kopassus Kolonel Inf Chairawan sudah dihadirkan. Selain memeriksa alumi Akabri tahun 1980 itu, sidang yang berlangsung sekitar delapan jam itu juga menghadirkan beberapa saksi dan bukti-bukti.

DKP kemarin tidak melakukan sidang. Namun, dipimpin langsung Subagyo, mereka meninjau Markas Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur — tempat yang diduga digunakan untuk menyekap aktivis. Seluruh anggota DKP hadir pada pemeriksaan yang berlangsung dua jam, dimulai pukul 11.00 WIB.

Saat pemeriksaan pada sejumlah tempat di Makopassus, hanya Subagyo yang datang dengan kendaraan dinasnya. Wakil Ketua DKP Letjen TNI Fachrul Razi, Sekretaris DKP Letjen TNI Djamari Chaniago dan para anggota yaitu Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen TNI Agum Gumelar, Letjen TNI M Yusuf Kartanegara, Laksdya Sutjipto beserta dua anggota cadangan yaitu Letjen TNI Sugiyono dan Letjen TNI Arie J Kumaat keliling menggunakan bus. Mereka diantar oleh Danjen Kopassus Mayjen TNI Syahrir MS.

Menurut Subagyo, pengecekan di Makopassus itu dilakukan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. "Data itu untuk memperkuat agar pertimbangan atau saran yang akan diberikan kepada Pangab nanti lebih tepat. Ini (dilakukan) dengan melihat kenyataan-kenyataan atau bukti-bukti yang ada," kata KSAD.

Pada bagian lain, Subagyo menjelaskan ketiga perwira yang diajukan ke DKP itu tidak dikenakan tahanan rumah. "Tahanan rumah? Tidak. Seperti biasa saja. Seperti yang Anda ketahui, mereka sudah tidak menjabat lagi, dinonaktifkan," katanya.

Selama diperiksa, kata Subagyo, para perwira itu tetap mendapatkan hak-haknya yaitu didampingi pembela atau pendamping. Namun, dia tidak bersedia menyebutkan nama atau pangkat para pembela yang dihadirkan pada sidang itu. Dia hanya mengatakan, pembela itu dari Direktorat Hukum TNI-AD.

Subagyo membantah bahwa ada perbedaan perlakuan hukum antara tiga perwira yang diajukan ke DKP dengan tujuh perwira lainnya, yang beserta tiga bintara langsung diajukan ke Mahmil. "Tidak ada perbedaan. DKP itu ada prosesnya, itu berlaku untuk semua perwira," katanya.

DKP, kata Subagyo, pada prinsipnya digelar dalam rangka menilai secara tepat para perwira yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Keputusan yang dihasilkan, katanya, diambil melalui pertimbangan yang teliti, jeli dan tepat. Dia sekali lagi menegaskan bahwa keputusan DKP bukanlah sanksi atau hukuman kepada yang bersangkutan, tetapi masukan kepada Pangab.

"Dengan masukan yang tepat dari DKP, Pangab bisa menentukan apakah perwira tersebut diakhiri masa dinasnya dengan tidak hormat atau dinonstruktural artinya tidak mempunyai jabatan," tutur jenderal bintang empat ini.

Meski sama-sama berasal dari korps Baret Merah, Subagyo mengaku tidak terpengaruh dalam memeriksa para yuniornya itu. Dia bertekad akan melakukan tugasnya secara maksimal. Dia juga berharap agar masyarakat tidak terburu-buru menuntut hasilnya. "Ini kan baru sehari, sekarang baru hari kedua. Jangan buru-buru," katanya. ■ bsa

Kelas: .....

LSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

DKP Periksa Lokasi Penyekapan

Tempat Itu Biasa Disebut 'Kapal Selam'

JAKARTA (Media): Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang diketuai KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, kemarin melihat lokasi penyekapan para aktivis prodemokrasi di Grup IV Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur. Di kalangan pasukan elite Baret Merah, lokasi tersebut dikenal dengan nama 'kapal selam' karena berada di bawah tanah.

Sebelum ke lokasi penyekapan, Tim DKP pada pukul 09.00 WIB mengunjungi Markas Komando (Mako) Kopassus dan diterima langsung Danjen Kopassus Mayjen TNI Syahrir MS. Sekitar empat jam kemudian pada pukul 12.55 WIB rombongan dengan menggunakan bus meluncur ke lokasi penyekapan yang jaraknya sekitar 500 meter dari Markas Kopassus. Kendati hanya berjarak 500 meter perjalanan menuju 'kapal selam' meliuk-liuk dan melewati beberapa pos jaga.

Media yang berada di dekat lokasi 'kapal selam' menyaksikan seluruh anggota DKP hadir, seperti Letjen TNI Fachrul Razi, Letjen TNI Agum Gumelar, Letjen TNI Djamari Chaniago, Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Laksamana Madya TNI Achmad Sutjipto, Letjen TNI Yusuf Kartanegara, dan Letjen TNI Arie Kumaat. Tampak turut serta dalam rombongan tersebut Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI I Dewa Putu Rai.

Seperti diketahui, Pangab Jenderal TNI Wiranto pada Senin lalu mengumumkan pembentukan DKP dengan tujuan memeriksa mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto yang kini menjabat Dan Sesko ABRI, Mayjen TNI Muchdi yang kini menjabat Wairjen ABRI, serta mantan Dan Grup IV Kopassus Kol Inf Chairawan dalam kasus penculikan sejumlah aktivis prodemokrasi beberapa waktu lalu. Selama pemeriksaan, ketiga pentolan Kopassus tersebut dibebastugaskan dari jabatannya masing-masing.

Pemeriksaan ketiga perwira tersebut berlangsung tertutup. Juga ketika Tim DKP meninjau lokasi penyekapan. *Media* hanya bisa menyaksikan dari luar lokasi penyekapan.

Pemeriksaan lokasi tempat penyekapan itu berlangsung hanya sekitar 15 menit dan pukul 13.15 WIB rombongan kembali ke Mako Kopassus untuk memeriksa jajar pasukan.

Lokasi tempat penyekapan para aktivis demokrasi itu sebenarnya bukan tempat rahasia bagi jajaran anggota pasukan elite Baret Merah. Lokasi ini di kalangan anggota Kopassus dikenal dengan nama 'kapal selam' karena letaknya di bawah tanah. Tempat ini merupakan tempat hukuman bagi anggota Kopassus yang desersi atau nakal.

Adalah Danpuspom ABRI Mayjen TNI Syamsu yang pertama kali secara terbuka mengatakan lokasi penyekapan para aktivis adalah Markas Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur. Namun ketika ditanyakan apakah 12 korban penculikan lain yang sampai sekarang belum bebas juga disekap di lokasi tersebut, Danpuspom ABRI itu mengatakan tidak ditemukan korban lain di tempat penyekapan tersebut.

Beberapa korban penculikan seperti Pius Lustrilanang memperkirakan paling tidak lima korban penculikan telah tewas.

Berakhir

Sementara itu sumber *Media* memastikan karier militer mereka yang diperiksa DKP telah berakhir. Berakhirnya karier militer itu melalui tiga cara yakni masa pensiun dipercepat, diberhentikan secara terhormat, dan diberhentikan dengan tidak hormat.

"Jadi perwira yang terkena DKM atau DKP sudah pasti karier militernya berakhir, karena jelas mereka ini telah melanggar kode etik perwira atau salah prosedur," ucapnya.

Pada kesempatan terpisah, kemarin, Koordinator Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir mengirimkan surat kepada DKP. Isi surat tersebut di antaranya meminta agar semua proses yang berkaitan dengan penyelesaian kasus penculikan harus dapat mengungkap kejelasan nasib 14 korban penculikan yang sampai sekarang belum jelas nasibnya.

Sementara itu Loekman Soetrisno, Sosiolog UGM, ketika membacakan hasil rumusan 'Strategi dan Upaya Penyusunan Agenda Politik dalam Reformasi' di Yogyakarta kemarin mengatakan keterlibatan mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo, Mayjen TNI Muchdi, dan Kol Inf Chairawan dalam kasus penculikan para aktivis, membuktikan bahwa selama ini tindakan militer Indonesia tidak profesional.

Ia mengatakan, sikap tidak profesional itu ditunjukkan dengan kesibukan sekaligus kebiasaan campur tangan dalam kehidupan sosial politik dan pendekatan kekerasan dalam konflik-konflik sosial politik, seperti penculikan aktivis.

Tidak profesionalnya militer Indonesia itu, tambahnya, juga ditunjukkan dengan meruncingnya konflik intern di tubuh ABRI, seperti pertikaian antara Syarwan Hamid dan Soeyono.(Wdh/Was/TN/D-12)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Pangab: Tunggu Hasil DKP

Jakarta, 6 Agustus

Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto mengatakan, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) sudah mulai melaksanakan tugasnya sejak dibentuk Senin (3/8) lalu. Dalam melaksanakan tugasnya DKP selalu melaporkan perkembangan dan segala temuannya. Namun, saat ini ia belum bisa menyampaikan hasil kerja tim tersebut.

"DKP itu sudah mulai melaksanakan tugasnya. Kita tunggu saja hasilnya nanti...!" tutur Jenderal Wiranto menjawab pertanyaan wartawan mengenai perkembangan terbaru kerja Tim DKP seusai acara penyerahan bantuan kemanusiaan dari pemerintah Singapura kepada Indonesia yang disampaikan melalui Menteri Pendidikan /Pertahanan II Singapura RADM Teo Chee Hean kepada Menhankam/Pangab di *Base-ops* Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (6/8).

Ditanya lagi, bagaimana pendapatnya mengenai *statement* dari Kontras bahwa SK Menhankam /Pangab tentang DKP yang cacat hukum, Jenderal Wiranto hanya berujar, "Ooo... dia, mau *ngomong* apa, silakan!"

Tim DKP hari Kamis ini (6/8) kembali menggelar sidang lanjutannya di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jalan Medan Merdeka Utara/Veteran Raya Jakarta Pusat. Namun, belum diketahui siapa-siapa saja yang diperiksa atau dimintai keterangan, apakah Letjen TNI Prabowo Subianto atau Mayjen TNI Muchdi dan Letkol Inf Chairawan, demikian sumber *Pembaruan* di Mabes Angkatan Darat

Hari Rabu (5/8) kemarin, Tim DKP juga sudah melakukan tugasnya dengan mendatangani Markas Kopassus Cijantung, Jakarta Timur. Mulai sekitar pukul 11.00 hingga 15.00 WIB, Tim ini mencari temuan baru yang diharapkan bisa dijadikan sebagai masukan dalam memberikan saran-saran kepada Menhankam/Pangab nanti.

Pemeriksaan ke Markas Kopassus tersebut dipimpin Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo dan mengadakan sejumlah pemeriksaan di Markas Kopassus. Pada pemeriksaan itu turut wakil ketua DKP Kasum ABRI Letjen TNI Fachrul Razi, Irjen Dephankam Letjen TNI Yusuf Kartanegara, Gubernur Lemhanas Letjen TNI Agum Gumelar, Kassospol ABRI Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Panglima Kostrad Letjen TNI Djamari Chaniago, Danjen Akabri Laksdya TNI Achmad Sutjipto, Wakasad Letjen TNI Sugiono dan mantan Dansesko ABRI Letjen TNI Arie Kumaat.

Sementara itu, Kapuspen Hankam/ABRI Mayjen TNI Syamsul Ma'arif di sela-sela acara penyerahan bantuan kemanusiaan dari Singapura di Halim mengatakan, semua pihak hendaknya bersabar dan membiarkan dulu Tim DKP melaksanakan tugasnya dengan tenang. "Kita serahkan kepada Tim DKP untuk mendapatkan temuannya dan melaksanakan tugasnya dengan lancar. Sehingga ia bisa segera memberikan saran-sarannya kepada Menhankam/Pangab," ujar Syamsul.

Bambang Soeharto

Dari Bandung dilaporkan Bambang Soeharto dari Komnas HAM mengatakan, masyarakat tak perlu kuatir terhadap kehadiran Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menghankam) /Panglima ABRI (Pangab) Jenderal TNI Wiranto, Senin lalu (3/8).

Kehadiran DKP sama sekali tak bermaksud untuk mendeponir perkara atau tindak kriminal yang dilakukan oleh para perwira Komando Pasukan Khusus (Kopassus) berupa penculikan/penghilangan para aktivis demokrasi beberapa waktu lalu.

Ketua Tim Pemantauan Kampus pada Komisi Nasional Hakhak Asasi Manusia (Komnas HAM), Bambang W Soeharto mengemukakan ini dalam wawancara khusus dengan *Pembaruan* usai acara malam sambung rasa Keluarga Besar Kosgoro, di hotel Savoy Homann Bandung, Rabu (5/8) dini hari.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro itu mengungkapkan, ia pribadi, demikian pula Komnas HAM, setuju pembentukan DKP, sebab lembaga temporal itu memeriksa, menilai dan membuktikan, apakah para perwira Kopassus itu telah melanggar norma etik keperwiraan dan ke-ABRI-annya.

"Ini sama sekali tidak berarti bahwa para perwira yang berbuat tindak pidana cukup diperiksa oleh DKP. DKP hanya melihat, apakah para perwira itu masih patut atau tidak menjadi tentara," ujar Bambang.

Menjawab pertanyaan, Bambang menegaskan, kasus tragedi penembakan massal di Santa Cruz, Dili, Timor Timur pada 12 November 1991 berbeda dengan kasus penculikan belasan/puluhan aktivis demokrasi di Jakarta.

"Situasinya waktu itu kan situasi Orde Baru, sedangkan sekarang Orde Reformasi. Para pelaku di lapangan waktu itu dapat perintah dari tingkat tertentu," ungkap Bambang tersenyum.

Waktu itu Pangab juga membentuk Dewan Kehormatan Militer (DKM). Utuk menghindari terjadi preseden, maka dua perwira tinggi AD waktu itu dicopot (diberhentikan dari jabatan masing-masing). Karena itu, kehadiran DKP tak perlu dicurigai dan dituduh melindungi perwira Kopassus yang nyata-nyata melakukan pelanggaran hukum pidana. Lembaga semacam DKP sudah lazim dibentuk di negara-negara lain, yang bertugas membuktikan pelanggaran terhadap kode etik atau norma etik lembaga yang dilakukan anggota lembaga tersebut. Namun pelanggaran hukum pidana harus diselesaikan di pengadilan/Mahmil.

Menurut Bambang, kehadiran DKP dengan segala aktivitasnya tidak berkaitan/dikaitkan dengan aktor intelektual tragedi maha besar tanggal 13-15 Mei lalu di Jakarta, Tangerang dan Solo.

Pemeriksaan pelaku penculikan para aktivis demokrasi sama sekali terpisah dari pencarian otak utama kerusuhan, penjarahan, pembakaran dan pemerkosaan selama tiga hari tersebut, dan terpisah pula dari tragedi penembakan para mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta, yang menewaskan tiga mahasiswa.

"DKP tidak ada hubungan dengan Gabungan Tim Pencari Fakta (GTPF) yang dibentuk pemerintah beberapa waktu lalu. Tugas kami di GTPF hanya menyelidiki, memantau, menganalisis dan meberi saran-saran yang realistis khusus menyangkut peristiwa 13-15 Mei lalu. Sekarang kami masih menginventarisasi masalah. Sebentar lagi kami akan terjun langsung ke lapangan," ungkap anggota GTPF itu.

Di Sukabumi, anggota Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mayjen Pol (Pur) Drs Koesparmono Irsan mengatakan, pembentukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) adalah sangat tepat dan merupakan bukti keseriusan pemerintah melalui Panglima ABRI (Pangab) untuk penegakan hukum (militer) tanpa pandang bulu.

Koesparmono Irsan yang mantan Kapolda Jatim dan Deputy Operasi (Deops) Kapolri itu juga sangat setuju, kasus orang hilang yang diduga melibatkan sejumlah oknum Komando Pasukan Khusus (Kopassus) sampai ke meja Mahkamah Militer (Mahmil), karena tindakan penculikan masuk dalam kategori kriminal dan umumnya adalah pelanggaran HAM.

Hal itu dikatakan Koesparmono Irsan dalam percakapan dengan wartawan di sela-sela menghadiri wisuda Perwira siswa Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) tahun ajaran 1997/1998 di Secapa Polri, Sukabumi, Rabu (5/8).

"Kalau kita renungkan pernyataan dan tekad Pangab Jenderal TNI Wiranto saat mengumumkan pembetukan DKP, Senin (3/8) baru lalu dengan menunjuk Kasad Jenderal TNI Subagyo HS sebagai ketuanya, maka saya optimis dan sangat setuju kasus itu bisa dituntaskan lewat persidangan di meja hijau, Mahmil," kata Koesparmono. Hanya melalui proses hukum di Mahmil yang terbuka untuk umum yang bisa memuaskan kehendak rakyat terhadap penanganan serius atas kasus itu sendiri.

Dengan proses hukum di Mahmil sekaligus akan memberikan jawaban kepada masyarakat secara terbuka atas benar-tidaknya keterlibatan para Perwira Tinggi (Pati) di jajaran TNI-AD (Kopassus) dalam kasus penculikan dan hilangnya beberapa warga masyarakat untamanya para aktivis yang dianggap membahayakan keselamatan negara. Ini agar kasus tersebut tidak akan diungkit-ungkit lagi.

Menyinggung tentang adanya laporan dari Aceh tentang raibnya sekitar 600 orang aktivis di sana, menurut Koesparmono Irsan, Komnas HAM akan mengirimkan empat orang anggota tim Komnas HAM yang dipimpin langsung Baharuddin Lopa. Menurut rencana, tim Komnas HAM dijadualkan berangkat ke Aceh (Baharuddin Lopa, Suyono, Salim dan Koesparmono), Senin (17/8) mendatang.

Wajar

Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya), Taufik Imam Santoso SH mengakui bahwa pendapat pro-dan kontra tentang pemeriksaan ketiga perwira oleh Dewan Kehormatan Perwira merupakan hal yang wajar, karena ada kepentingan-kepentingan yang berbeda.

Menjawab pertanyaan Kamis (6/8), Taufik Imam Santoso SH mengakui bahwa cukup wajar bahwa Kontras serta aktivis yang diculik minta agar ketiga perwira itu langsung diajukan ke Mahkamah Militer, seperti yang akan dilakukan terhadap oknum Kopasus lainnya yang bukan perwira.

Tetapi Taufik Imam Santoso SH juga bisa mengerti jika para pengamat dari kalangan militer dan ABRI yang minta agar masyarakat mempercayai DKP, karena jika diketemukan bukti-bukti pelanggaran juga akan diserahkan ke Mahkamah Militer. (E-2/101/070/029)

ELSAM
Media:
BISNIS IND
JAKARTA
JAWA POS
KOMPAS
KD. RAKY
MEDIA IND

Kelas: .....

LSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

dia:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Muchdi Diperiksa Enam Jam

Edi: Bawa ke Mahkamah Militer

Prabowo Juga Datang, Pakai Range Rover 101

Jakarta, JP.-

Sidang kedua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) kemarin berlangsung. Seperti diduga sebelumnya, mereka memeriksa mantan Danjen Kopassus yang menjabat tidak sampai genap dua bulan Mayjen TNI Muchdi Pr. Pemeriksaan terhadap Muchdi ini berlangsung mulai pukul 09.00–14.10 WIB (empat jam sepuluh menit) di Mabesad, Jalan Merdeka Utara.

Sidang itu dipimpin Ketua Tim DKP Jenderal TNI Subagyo Hadi Siswoyo. Enam anggota DKP lain juga hadir. Mereka adalah Kassospol ABRI Letjen TNI Susilo Bambang Judhoyono, Kasum ABRI Letjen TNI Fachrul Razi, Irjen Dephankam Letjen TNI Yusuf Kartanegara, Gubernur Lemhanas Letjen TNI Agum Gumelar, Pangkostrad Letjen TNI Djamari Caniago, Danjen Akabri Laksdya Sucipto, dan Letjen TNI Ary J. Kumaat.

Yang menarik, setelah persidangan Muchdi Pr selesai, tiba-tiba Letjen TNI Prabowo Subianto yang tidak dijadwalkan akan diperiksa ternyata hadir. Prabowo tiba di Mabesad pukul 14.45 WIB dengan menggunakan mobil Range Rover nopol 101 warna hijau tentara.

Penampilan menantu mantan Presiden Soeharto ini sudah berbeda dibanding sebelum secara resmi dinyatakan akan diperiksa DKP dalam kasus penculikan para aktivis prodemokrasi. Ia datang di Mabesad tanpa tongkat komando. Tanda jabatan militer juga sudah tak menempel di dadanya lagi. Yang masih menempel hanya tanda pangkat tiga bintang di pundaknya.

Prabowo melenggang sendiri keluar dari mobilnya menuju tempat sidang tim DKP. Provos-provos yang menyaksikan kehadiran Prabowo pun tidak tampak sigap. Kecuali hanya dua provos jaga yang mempersilakan Prabowo masuk ruangan. Provos lain hanya duduk-duduk di tempat jaga.

Entah apa yang dibicarakan Prabowo dengan tim DKP ini. Wartawan tak bisa mendekat dan karena itu tak bisa mengetahui isi pembicaraan putra begawan ekonomi Prof Dr Sumitro Djojohadikusumo ini. Yang terang, pertemuan Prabowo dengan tim DKP ini cukup lama, sekitar setengah jam (mulai pukul 14.45 WIB–15.15 WIB).

Menurut sumber *Jawa Pos* yang ditemui setelah sidang tim DKP, Prabowo hadir bukan karena diperiksa seperti Muchdi. "Prabowo datang hanya dalam kepentingan dinas," ujar sumber tadi. Selain itu, ia telah diberi tahu bahwa sidang dirinya akan dilangsungkan Senin depan.

Lalu, apa saja yang dibicarakan Prabowo? "*Ya* rahasia *dong*. Yang jelas, kehadiran Bowo (panggilan Prabowo) hanya dalam kapasitas dinas. *Nggak* ada kaitannya dengan pemeriksaan," ujarnya.

Meski hanya urusan dinas, kata sumber tadi, Prabowo masih sempat berbincang-bincang dengan tim DKP, baik urusan dirinya maupun tentang urusan lain. Masih bisa *ketawa nggak*? "Ah... namanya manusia, *ya ketawa* juga *dong*. *Masak* disuruh *mrengut* (bersikap serem). Tapi, *udahlah*, *masak kayak gitu* juga *diurusin*," ujar sumber *Jawa Pos* tadi.

Mengenai hal yang berkaitan dengan persidangan tim DKP kemarin, sumber tadi membenarkan bahwa yang diperiksa memang hanya Muchdi. Pemeriksaan Muchdi dinilai cukup lancar dan tidak ada hambatan. Mantan Pangdam Tanjungpura ini memberikan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan yang disampaikan tim DKP. Tapi, macam apa saja model pertanyaannya, sumber tadi tidak bersedia menjelaskan. "Belum apa-apa sudah dibocorkan, *ya* jadi kacau," katanya.

Tapi, setelah menjalani pemeriksaan empat jam, tiba-tiba Muchdi keluar ruang sidang dan menuju mobilnya yang diparkir di halaman gedung sidang. Wajah Muchdi ketika keluar ruangan ini tampak tegang dengan jalan melenggang. Baju bagian punggungnya tampak basah. Bahkan, ia sempat garuk-garuk kepala.

Itulah yang dilakukan Muchdi ketika sempat keluar ruangan sidang beberapa menit. Ketika di luar ruangan ini, Muchdi memang langsung masuk di dalam mobil. Apa yang dilakukan sulit diketahui karena pers hanya bisa menyaksikan dari jarak 50 meter.

Setelah keluar dari mobil, Muchdi yang kelihatan agak lemas kembali masuk ruang sidang. Beberapa jam kemudian, Muchdi keluar lagi dengan membawa tas koper berisi berkas-berkas sambil tangan kirinya memegang *handphone*. Setelah masuk mobil, dia langsung tancap gas keluar dari gedung Mabesad tempat persidangan.

Setelah pemeriksaan pertama ini, apakah Muchdi akan dihadirkan kembali dalam persidangan selanjutnya? Sumber

Jawa Pos tadi mengatakan, masih sangat mungkin. "Itu tergantung dari hasil pemeriksaan tersangka berikutnya. Kalau sekarang belum bisa dijelaskan. Tapi, kemungkinan itu sangat besar karena memeriksa perkara besar ini tidak bisa hanya sesaat," ujarnya.

Tapi, dia menjelaskan, bahan-bahan dari jawaban yang disampaikan Muchdi kepada tim DKP untuk sementara dianggap cukup.

Lalu, sidang kapan dibuka lagi? "Sidang dibuka Senin depan. Jumat sampai Minggu libur," ujarnya.

Sementara itu, Mantan Menhankam Jenderal (Pur) Edi Sudradja mengatakan, kalau memang ketiga perwira tinggi yang kini di periksa DKP itu melanggar pasal pasal pidana, mereka harus di bawa ke mahkamah militer.

Ia mengingatkan, semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Inilah yang harus dipegang teguh. "Kalau melanggar UU, ya dia harus diajukan ke pengadilan," kata Edi usai menghadiri deklarasi terbentuknya Barisan Nasional di Jakarta kemarin.

Sekarang ini, kata Edi, ABRI sangat terpukul akibat kasus ini. Jika ABRI tidak bersungguh-sungguh membongkar, mengusut, mengajukan ke pengadilan, dan menghukum mereka yang bersalah, citra ABRI tidak akan pulih.

"Apalah artinya ABRI tanpa rakyat. Apalah artinya ABRI yang melukai rakyat," kata Edi yang kalah bersaing dengan Akbar Tanjung dalam pemilihan ketua umum Golkar beberapa waktu lalu.

Edi minta agar DKP bersungguh-sungguh menangani kasus penyekapan dan penculikan sejumlah aktivis ini. "Jika tidak, ABRI akan ditinggalkan rakyat," tegas Edi.

Menyoal keterangan mantan Pangab Jenderal (Pur) Feisal Tanjung yang mengatakan tidak tahu-menahu soal penculikan itu, Edi mengatakan bahwa operasi dalam angkatan bersenjata adalah suatu kegiatan yang terorganisasi dari atas sampai bawah. "Dengan asumsi seperti ini, mestinya Pangab tahu. Pemimpin harus bertanggung jawab atas kesatuannya dan anak buahnya, baik itu dilakukan maupun yang tidak," kata Edi.

Ditambahkan Edi, bisa jadi dalam pemeriksaan DKP nanti Prabowo mengatakan mendapat perintah dari Pangab dan Pangti. "Hal semacam itu terbuka kemungkinannya," tandasnya.

(saf/ilo)

ELSAM
Media:
BISNIS IN
JAKARTA
JAWA POS
KOMPAS
KD. RAK
MEDIA IN

AS mendesak agar pemerintah Indonesia menyelidiki keterlibatan perwira-perwira tertentu dalam penculikan aktivis, mungkin saja berpengaruh, tetapi yang menentukan adalah keinginan pemimpin ABRI sendiri yang ingin nama baiknya pulih kembali. "Pernyataan Cohen bukan hal yang baru. Beberapa pejabat AS, seperti Menlu Albright dan Presiden Clinton sendiri juga mengemukakan pernyataan yang sama," katanya.

Bahkan Asisten Menlu AS untuk urusan hak asasi manusia John Shattuck pernah mendesak agar Indonesia memeriksa perwira senior yang berdasarkan hasil laporan badan inteligen AS (CIA) diduga terlibat dalam kasus penculikan, penembakan, perkosaan dan kerusuhan bulan Mei.

Pejabat-pejabat AS tersebut, kata Liddle, didorong oleh rakyat AS yang mendesak pemerintah untuk menyelidiki apakah perwira-perwira yang terlibat itu pernah mendapat pendidikan dan latihan dalam suatu program kerjasama militer AS.

"Rakyat AS tidak ingin bantuan kerja sama militer dengan tentara asing digunakan untuk melanggar hak asasi manusia dengan membunuh atau menganiaya rakyat mereka sendiri," katanya.

Rakyat AS, menurut Liddle, tahu betul bahwa sejumlah perwira Kopassus mendapat latihan militer, misalnya dalam mengatasi perang kota dan kontra-terorisme di AS dalam program IMET. "Rakyat AS ingin tahu apakah ada perwira-perwira Koppasus dididikan AS itu terlibat. Sebab kalau terlibat sangat tidak mengenakkan AS yang punya agenda menghentikan pelanggaran hak asasi manusia oleh kekuatan militer," tegasnya.

Tak Perlu Dibubarkan

Liddle mengakui bahwa nama baik Kopassus sebagai pasukan elite sudah cemar atau meminjam istilah Prabowo "seperti comberan". Namun ia tidak setuju kalau Korps Pasukan Khusus itu dibubarkan.

"Di mana-mana negara tentu memerlukan pasukan elite. Yang perlu dilakukan adalah bukan pembubaran, tetapi pembersihan," kata pengamat politik yang sudah menulis sejumlah buku tentang masalah politik dan militer di Indonesia itu.

Nama Kopassus, menurut dia, harus dikembalikan kepada martabatnya sebagai pasukan elite yang betul-betul profesional. "Tugas pasukan khusus atau pasukan elite adalah menjaga rakyat dan negara dari ancaman luar, bukan justeru menembak dan menganiaya rakyatnya sendiri," ujarnya.

Menjawab pertanyaan apakah ia kaget mendengar pimpinan Kopassus ternyata diduga berada di belakang penculikan aktivis, dan kini sedang diperiksa dan dimintai tanggungjawabnya, Liddle mengaku sama sekali tidak terkejut.

"Saya yang menganati perkembangan militer Indonesia terutama sejak Orde Baru tidak heran kalau Kopassus ada dibalik penculikan dan penembakan aktivis. Dulu kan sering juga dikait-kaitkan dengan kasus Tanjung Priok atau kasus Santa Cruz di Timtim," katanya.

Liddle juga mengatakan Prabowo, Muchdi dan Chairawan, harus diajukan ke Mahkamah Militer, jika dalam pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) nanti terbukti terlibat dalam kasus penculikan dan penganiayaan terhadap para aktivis pro demokrasi.

"Kalau dalam pemeriksaan DKP mereka terbukti terlibat dalam penculikan dan penganiayaan, demi tegaknya hukum, ya harus ke pengadilan," katanya.

Ia mengatakan penculikan dan penganiayaan adalah kejahatan, bukan kesalahan prosedur atau pelanggaran disiplin keprajuritan. Karena masalah kriminal yang bisa memeriksa bersalah atau tidak adalah pengadilan. (I 6/SU)

ELSAM
Media:
BISNIS IN
JAKARTA
JAWA POS
KOMPAS
KD. RAK
MEDIA INI
D
WALAPU
hormatan Pe
Jenderal Subag
janjikan akan s
gasnya, tapi s
belum meme
wo Subianto, M
dan Kolonel Ch
tim DKP tel
temuan mar
jam di Mabes
SubagyoHSme
dipimpinnya
han, belum
Kasad, nanti
lau sudah dilak
meski pemeriksa
Prabowo, M
awan diajuka
ada keterlibatan
likan para akti
menjelang Si
lan Pebruari
Rapat yang ya
Mabesad sejak
khir pukul 1
DKP hadir y
Ketua Letjen
ertaris Letjen D
Letjen Susil
yono, Letjen
Letjen Agu
sdya Achmad

..... 17 .....
Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

dia:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Prabowo Kemungkinan Diperiksa Senin

Jakarta, 7 Agustus

Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, Mayjen TNI Muchdi Purwopranjono, hari Kamis (6/8), menjalani pemeriksaan Tim Dewan Kehormatan Perwira (DKP) selama lebih kurang lima jam di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta Pusat.

Sidang pemeriksaan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Kasad Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo selaku Ketua Tim.

Sidang pemeriksaan lanjutan yang tertutup itu rencananya akan diadakan kembali pada hari Senin (10/8) depan.

Dengan telah diperiksanya Mayjen Muchdi PR, berarti sejak dibentuk hari Senin (3/8), Tim DKP sudah dua kali melakukan pemeriksaan terhadap Pamen dan Pati dari Korps Baret Merah yang diduga terlibat dalam kasus penculikan/hilangnya sejumlah aktivis. Sebelumnya, Komandan Grup IV Kopassus Kolonel Inf Chairawan juga diperiksa hari Selasa (4/8). Sehingga ada kemungkinan pada sidang lanjutan Senin nanti Letjen TNI Prabowo Subianto, yang juga mantan Danjen Kopassus, yang akan dipanggil ke Mabes AD untuk dimintai keterangan secara lengkap.

Seluruh personel DKP hadir pada sidang lanjutan pemeriksaan hari Kamis itu. Yakni Wakil Ketua DKP Letjen TNI Fachrul Razi (Kasum ABRI) dan Letjen TNI Yusuf Kertanegara (Irjen Dephankam), serta para anggota Letjen TNI Agum Gumelar (Gubernur Lemhannas), Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono (Kassospol ABRI), Letjen TNI Djamari Chaniago (Panglima Kostrad), Laksdya TNI Achmad Sutjipto (Danjen Akabri), dan anggota cadangan Letjen TNI Arie J Kumaat (mantan Dan Sesko ABRI).

Ketika ditanyakan mengapa pemeriksaan begitu lama sampai lima jam, sumber *Pembaruan* di Mabes TNI Angkatan Darat mengatakan, "Lama atau tidaknya pemeriksaan itu tergantung kebutuhan. Bisa sebentar atau berjam-jam. Tentunya sampai semua keterangan yang diperlukan dirasakan cukup," ujarnya.

Yang pasti, Tim DKP akan bekerja secermat dan selengkap mungkin dalam menghimpun data. Sehingga nantinya bisa secara lengkap memberikan saran-saran kepada Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto.

Dalam pada itu, Mayjen TNI Muchdi PR kemarin sekitar pukul 08.00 WIB sudah datang di Mabes ad. Ia tiba dengan kendaraan dinasnya dengan juga berpakaian militer/dinas lengkap. Muchdi yang juga mantan Pangdam VI/Tanjungpura ini baru meninggalkan gedung tempat pelaksanaan sidang DKP sekitar pukul 14.00 WIB.

Meski sidang DKP ini tertutup, namun para wartawan dari media cetak maupun elektronik setiap harinya (mulai Selasa, 4/8) selalu rajin mendatangi Markas Besar TNI AD untuk mendapatkan perkembangan terbaru dari kerja Tim DKP tersebut. Sampai-sampai saat Tim melakukan tugasnya meninjau lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara (TKP) di Markas Kopassus Cijantung Jakarta Timur, hari Rabu (5/8) lalu, belasan wartawan malah ada yang tetap setia menunggu di Mabes ad hingga sore.

Membuka Diri

Di tempat terpisah, Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto mengharapkan, agar masyarakat sabar menunggu hasil proses peradilan kasus penculikan yang dilaksanakan oleh ABRI. Ia menjamin peradilan tersebut sesuai dengan hukum positf yang berlaku.

"Jadi tunggu saja. Sabar, ya...," kata Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto dalam acara Panen Raya Kedelai hasil Program Manunggal Pertanian ABRI, Kamis (6/8) di Subang. Hadir dalam acara tersebut antara lain, Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris, Menteri Pertanian Soleh Solahuddin dan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Purwadi.

Pangab menegaskan, ABRI sudah membuka diri dalam rangka semangat reformasi. Dalam hal ini, ABRI mencoba untuk memperbaiki diri dengan cara menyempurnakan apa yang kurang sempurna sehingga menjadi lebih baik.

Pemeriksaan DKP terhadap diri mantan Dansesko ABRI Letjen TNI Prabowo, menurut Pangab, dilakukan tanpa tekanan apapun dan dari manapun.

"Tak ada paksaan dari manapun dalam rangka instrospeksi dan memahami permasalahan," ujarnya.

Ketika ditanyakan tentang banyak yang menuduh ketidak- independenan DKP karena banyak orang-orang dekat yang duduk di dewan itu, Pangab menyatakan, pernyataan seperti itu boleh-boleh saja. "Orang punya pendapat silakan saja," katanya.

Mengenai siapa pengganti Prabowo di Sesko ABRI, Pangab mengatakan, sebagaimana lazimnya di ABRI, kalau komandan tidak ada, wakilnya yang melakukan tugas sehari-hari, yakni Wadansesko ABRI Mayjen TNI (Mar) Bennyamin Balokh.

(E-2/SU/YUN)

Kelas: .....

LSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

dia:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Muchdi Disidang DKP Enam Jam

JAKARTA — Mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi Purwoprandjono kemarin dihadapkan ke muka sidang tertutup Dewan Kehormatan Perwira (DKP) selama enam jam lebih. Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo Hadiswoyo memimpin langsung sidang yang dihadiri seluruh anggota termasuk anggota cadangan itu.

Muchdi mulai disidang sekitar pukul 09.00 WIB di ruang rapat Staf Umum Angkatan Darat (SUAD) Mabes TNI-AD, Jakarta. Sidang hari ketiga itu berakhir pukul 15.30 WIB. Pada sidang hari pertama, Selasa (4/8) lalu, mantan Dan Grup IV/Kopassus Kolonel Inf Chairawan juga telah disidangkan di ruangan yang sama.

Kepala Dinas Penerangan TNI-AD (Kadispenad) Brigjen TNI ID Putu Rai membenarkan bahwa DKP kemarin melakukan sidang di Mabesad. Namun, dia tidak bisa memastikan apakah Muchdi betul-betul sudah dihadirkan di sidang.

BAKHTIAR PHADAREP



Mayjen Muchdi Purwoprandjono

Muchdi, mantan Pangdam VI/Tanjungpura, sendiri datang ke Mabesad dengan mobil Mitsubishi Galant dinas berpelat nomor 3666-00. Berbeda dengan biasanya, di atas pelat nomor mobilnya tidak terpasang dua bintang sebagai lambang pangkat mayor jenderal seperti mobil dinas pejabat ABRI lainnya.

Usai sidang terhadap Muchdi, Wakil ketua DKP Letjen TNI Fachrul Razi beriringan dengan anggota DKP Letjen TNI Agum Gumelar, Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Laksdya TNI Sutjipto, dan anggota cadangan Letjen TNI Arie J Kumaat langsung meninggalkan ruang sidang. Sementara Muchdi masih berada di dalam ruang sidang bersama Subagyo, Sekretaris DKP Letjen Djamari Chaniago, dan anggota cadangan Letjen TNI Sugiyono.

Muchdi baru meninggalkan ruang sidang sekitar pukul 16.10 WIB. Alumni Akabri tahun 1971 yang kemarin mengenakan pakaian dinas harian itu tampak berjalan mantap menuju mobilnya. Di tangannya tampak beberapa lembar kertas. Ketika wartawan yang sudah menunggunya sejak pagi melambaikan tangan ke arahnya untuk mendapat keterangan, Muchdi tidak melayaninya.

Seperti diketahui, Muchdi dan Chairawan bersama mantan Danjen Kopassus lainnya, Letjen TNI Prabowo Subianto, adalah perwira-perwira yang diajukan ke DKP atas dugaan terlibat dalam kasus penculikan beberapa aktivis politik beberapa waktu silam. Dia menjadi orang nomor satu di korps elite Baret Merah itu selama sekitar dua bulan, dari Maret sampai Mei 1998.

Menurut keterangan Ketua TPF Mayjen Syamsu Djalal, Selasa lalu, Muchdi sebenarnya tidak terlibat langsung pada kasus itu. Keterlibatan Muchdi, katanya, hanyalah bahwa pada saat dia menjabat Danjen Kopassus terjadi penyekapan Andi Arief di markasnya. "Seharusnya dia tahu ada kegiatan yang tidak benar. Sebagai seorang perwira harusnya mengambil satu tindakan," kata Syamsu.

Belum ada keterangan kapan DKP akan menghadirkan Letjen TNI Prabowo Subianto di muka sidang. Hanya, menurut Subagyo, pada prinsipnya sidang dilakukan secara berurutan dari perwira dengan pangkat terendah. Besar kemungkinan Prabowo akan diperiksa pada sidang berikutnya, yang akan dilakukan Senin pekan depan.

Sementara itu, Ketua DKP kasus Liquica, Timtim, 1994 Mayjen TNI (Purn) Muzani Syukur menyatakan bahwa ada perbedaan mekanisme kerja DKP saat ini dengan DKP yang dipimpinnya. Saat dia memimpin DKP empat tahun silam, katanya, para perwira yang akan diajukan ke DKP belum ditentukan.

"Saya tidak tahu apakah memang ada perubahan aturan. Saat zaman saya, DKP sendiri yang mencari data-data dan kemudian menentukan perwira yang akan dihadapkan di DKP. Jadi, Pangab belum menentukan nama-nama seperti sekarang ini," kata Muzani kepada *Republika* di Jakarta, kemarin.

Muzani menampik kemungkinan bahwa penentuan perwira yang akan diajukan ke DKP sejak awal itu dilakukan karena ada muatan politisnya. "Saya tidak berpikir sejauh itu. Saya menduga ini karena data-data TPF memang sudah lengkap sehingga langsung ditentukan perwiranya," jelas Muzani.

Menghankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto secara terpisah di Subang, Jabar, kemarin kembali mengulang pernyataannya bahwa tak ada kaitannya antara DKP dan tekanan pihak asing.

Menurut Wiranto, dalam kasus tersebut ABRI memang instrospeksi sangat memahami permasalahannya. "Saya sejak awal sudah bilang, ABRI sudah membuka diri dan mempunyai tekad, semangat dalam rangka reformasi. Artinya apa? Mencoba untuk memperbarui, menyempurnakan apa yang kurang sempurna menjadi baik," ujar Wiranto pada acara 'Panen Raya Perdana Kedelai ABRI Manunggal Pertanian Kodam III Siliwangi' bertempat di Desa Sukamelang, Kec Subang, Kabupaten, Subang, Jabar, Kamis (6/8). Dalam acara tersebut, Jenderal Wiranto di dampingi Menaker Fahmi Idris, Mentan Soleh Solahudin, Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Purwadi, serta para perwira tinggi Mabes ABRI.

Ketika disinggung siapa penggganti Letjen Prabowo sebagai Dan Sesko ABRI, Wiranto mengatakan bahwa di jajaran ABRI jika seorang komandan tidak ada, maka wakilnya (Meyjen TNI Benyamin Balukh) otomatis mewakili sementara untuk mengatur kegiatan sehari-hari. ■ bsa/jok

Kelas: .....

LSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	(7)	13	19	25	31	Januari	Juli	(1998)
JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	(Agustus)	1999
JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☑ Suara Merdeka	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Pemeriksaan terhadap Prabowo Bukan Langkah Final

KASUS penculikan sejumlah aktivis akhirnya menyeret nama mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Soebianto dan penggantinya, Mayjen TNI Muchdi PR, serta Komandan Grup IV Kopassus Kol Chairawan. Ketiganya, Selasa lalu mulai diperiksa oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pimpinan KSAD Jenderal TNI Subagyo HS yang dibentuk 3 Agustus lalu.

Yang menjadi pertanyaan banyak pihak, akankah pemeriksaan berjalan secara objektif dan transparan? Akankah ketiganya juga diajukan ke Mahkamah Militer atau hanya dijatuhi hukuman administratif, sebagaimana halnya pemeriksaan terhadap perwira yang terlibat insiden Santa Cruz Dili 11 November 1991? Benarkah penculikan itu hanya prakarsa Prabowo seorang? Tak mungkinkah atasannya juga terlibat, termasuk Panglima Tertinggi yang saat itu dijabat Soeharto, yang juga mertuanya?

Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto memang pernah mengatakan, pemeriksaan DKP akan berjalan secara transparan dan jujur. Jika terdapat bukti adanya unsur pidana, mereka bisa diajukan ke Mahkamah Militer. Sebab, DKP memang hanya akan memeriksa dari segi pelanggaran etika dan disiplin.

Namun, benarkah pernyataan itu akan benar-benar menjadi kenyataan? Ini yang ditunggu-tunggu masyarakat luas. Pasalnya, dalam masa Orde Baru, pernyataan pejabat yang tak pernah menjadi kenyataan adalah hal yang lumrah. Janji sering tinggal janji, karena tak pernah terbukti.

Namun, Menkeh Prof Muladi cepat menukas, "Sekarang zamannya sudah berbeda, tidak sama dengan zamah Orde Baru. Sebaiknya kita tunggu saja hasilnya nanti."

Merusak Nama Bangsa

Tak hanya tokoh-tokoh kritis yang belum yakin betul akan kesungguhan ABRI untuk mengungkap kasus penculikan aktivis ini. Dari kalangan ABRI sendiri juga berharap, pemeriksaan harus dilakukan hingga tuntas. Pasalnya, kegiatan penculikan aktivis bukan saja mencoreng citra ABRI, tetapi juga merusak nama baik bangsa dan negara di mata internasional.

Mantan Kepala Staf Administrasi Hankam Letjen TNI (Purn) A Hasnan Habib, misalnya, meminta siapa saja yang melakukan tindak pidana harus dituntut atau dibawa ke pengadilan militer. "Ini penting, sebab hanya dengan cara itu nama ABRI yang sudah terpuruk sekarang ini dapat direhabilitasi," tegasnya.

Dia yakin, jika penyelesaian kasus penclulikan ini ditangani hingga tuntas, dapat dipastikan citra ABRI akan pulih kembali. Selain itu ABRI dapat menjalankan perannya selaku kekuatan nasional yang memiliki potensi mendukung terciptanya *civil society* (masyarakat madani). ABRI pun akan mampu melaksanakan perannya selaku kekuatan sospol secara baik, karena dipercaya masyarakat luas.

Tetapi, menurut dia, bukan hanya kasus penculikan sejumlah aktivis saja yang harus dituntaskan oleh ABRI sekarang ini. Dua kasus besar lain yang melibatkan ABRI juga harus diselesaikan. Yakni, kasus penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti dan kerusuhan 13-15 Mei lalu. Selain itu juga peristiwa Aceh, Lampung, Irian Jaya, Tajungpriok, dan peristiwa 27 Juli 1996.

"Mengingat banyaknya peristiwa, tidak mungkin ABRI mampu menyelesaikannya dalam waktu dekat. Diperlukan waktu yang cukup," tandasnya.

Hal senada disampaikan pengamat politik CSIS, Dr J Kristiadi. Dia berharap DKP mampu melahirkan ABRI baru yang memang punya kredibilitas seperti sebelum terjadi kasus orang hilang dan kasus-kasus lain. Salah satu caranya, ABRI membersihkan diri sendiri, sehingga bisa menjadi institusi yang bisa dipercaya.

"Sekarang ini kredibilitas ABRI sangat turun. Ini akan terangkat kembali, apabila pimpinan ABRI berani mengoreksi diri melalui DKP. Karena itu, sangat diharapkan koreksi ini tidak hanya parsial (sepotong-potong) untuk kasus orang hilang saja, tetapi juga harus dilakukan secara lebih mendasar. Peran ABRI dalam politik pun harus diredefinisi.

Akibat peranan ABRI yang selama ini lebih banyak "*nyospol*" (lebih banyak ke sosial politik daripada ke hankam), banyak godaan kekuasaan yang akhirnya membuat ABRI mengalami kejadian seperti sekarang ini. Karena itu, dampak pemeriksaan terhadap Prabowo dkk sangat positif, khususnya di mata luar negeri.

"Untuk itu, pemeriksaan terhadap Prabowo dan kawan-kawan jangan dijadikan sebagai langkah final, tetapi juga dilanjutkan ke pengadilan bila memang ada bukti-bukti cukup. Bahkan, tidak hanya Prabowo. Juga mengajukan semua pihak yang diketahui terlibat."

Disambut Baik

Mantan anggota Komisi I DPR Krissantono berpendapat, pembentukan DKP patut disambut baik. Upaya ini merupakan suatu yang positif dan menunjukkan suatu iktikad dari pimpinan ABRI untuk mengadakan reformasi internal. Yang menjadi harapan masyarakat sekarang ini adalah kredibilitas atau kepercayaan terhadap ABRI harus segera dipulihkan.

"Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat ini, DKP harus secara terbuka membeberkan setiap persoalan yang telah menjadi rahasia umum selama ini. Bukan sebaliknya, dengan cara menu-

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA		1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA		2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA		3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA		4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN		5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Seharian DKP Periksa Mayjen Muchdi PR

■ Tiga Mayat Mulai Diidentifikasi

JAKARTA (Media): Kemarin, giliran mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi PR diperiksa oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Pemeriksaan berlangsung seharian di Mabes TNI AD Jl Merdeka Utara Jakarta.

Mayjen Muchdi mulai diperiksa sekitar pukul 08.30 WIB. Semua anggota DKP yang diketuai KSAD Jenderal Subagyo HS hadir dalam pemeriksaan.

Tampak pula Kol Chairawan, mantan Dan Grup IV Kopassus, yang sudah diperiksa DKP. Muchdi, Chairawan, dan Prabowo, tiga perwira dicopot dari jabatan masing-masing dan diperiksa DKP sekaitan dengan dugaan keterlibatan mereka dalam kasus penculikan aktivis.

Muchdi tiba di Mabes AD pukul 08.00 WIB berpakaian dinas, mengendarai mobil Hankam bernomor 3666-05 langsung masuk ke kantor KSAD. Meski sidang DKP dilaksanakan tertutup, beberapa wartawan menunggu di tempat parkir mobil anggota DKP di sebelah gedung tempat pemeriksaan. Mereka akhirnya digiring ke kantor Dinas Penerangan Mabes AD.

"Pemeriksaan berlangsung seharian," ujar seorang perwira di Mabes AD. DKP telah memeriksa Dan Grup IV Kopassus Kol Inf Chairawan, Selasa (4/8), serta memeriksa tempat-tempat yang diduga terkait dengan kasus penculikan di Markas Kopassus, Cijantung, Rabu (5/8).

Hasil pemeriksaan belum diketahui. Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto meminta masyarakat untuk sabar menunggu hasil sidang DKP.

"Kita tunggu saja hasilnya. Setiap perkembangan pemeriksaan dan temuan hasilnya pasti dilaporkan kepada saya," ujar Wiranto menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta kemarin.

Mengomentari kerja DKP, mantan Menhankam Edi Sudradjat mengharapkan agar DKP menjalankan tugas sungguh-sungguh, karena menurut dia rakyat saat ini sudah dilukai dengan perbuatan yang diduga dilakukan ABRI.

"Citra ABRI saat ini sangat rusak, kalau DKP tidak sungguh-sungguh membongkar, mengusut, dan menghukum anggota ABRI yang bersalah maka citra ABRI akan hancur," tutur Edi Sudrajat di Jakarta kemarin.



■ Mayjen Muchdi PR ■ MEDIA/GINO F HADI

Dia optimistis kasus orang hilang dan penculikan yang sedang ditangani DKP dapat dibongkar sampai ke pucuk pimpinannya.

Soal tiga mayat

Danpuspom ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalal meminta agar penemuan mayat di Pulau Untung Jawa tidak dikaitkan dengan kasus hilangnya 14 aktivis korban penculikan. "Jangan dikaitkan, karena mayat yang ditemukan sudah menjadi kerangka, sedangkan hilangnya 14 aktivis masih baru."

Kemarin tim dokter forensik RSCM yang diketuai dr Herkutanto berhasil mengidentifikasi jenis baju yang melekat pada ketiga kerangka yang ditemukan di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Ketiganya laki-laki.

Menurut anggota tim, dr Abdul Munim Idries dan dr Herkutanto, kerangka pertama berusia 23-28 tahun, tinggi 160-165 cm. Korban berkaos putih lengan pendek dengan kerah hijau merah, merek Karen. Celana dalamnya biru tua merek Sony dan memakai celana jeans.

Kerangka kedua berusia 23-27 tahun, tinggi 165-170 cm, bercelana pendek merek Gionino Lehomo ukuran 28, celana dalam merek Bosini dan berikat pinggang merek Kimtong. Kerangka ketiga berusia 20-23 tahun, tinggi 155-160 cm. Dia hanya bercelana pendek compang-camping.

(Wdh/SA/LK/N-1)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

rabowo Datang dengan Range Rover 101

Subagyo: Yang Disalahkan Adalah yang Salah

Jumat, Merdeka

enderal berbintang empat dan bertubuh menjadi sorotan selama beberapa hari ni. Dialah Kasad Jenderal Subagyo HS dipercaya Menhankam/Pangab Jenderal sebagai Ketua Dewan Kehormatan Per-P).

ang diembannya memang cukup berat. i antara ketiga orang yang diperiksa itu anak buahnya langsung dan juga menan-Presiden Soeharto.

ana perasaan bekas Komandan Kopassus memeriksa Letjen Prabowo Subianto s Danjen Kopassus Muchdi PR serta n Grup 4 Kopassus Kolonel Chairawan? petikan hasil wawancara khusus *Merde-* Jenderal Subagyo HS, kemarin, beber-setelah dia memimpin sidang DKP di yang berlangsung selama tujuh jam. ersebut dihadiri seluruh anggota DKP angkat letnan jenderal.

pembina AD dan mengadili bekas pim-passus, apa tidak merusak semangat passus?

uskan, DKP tidak mengadili. DKP mem-ertimbangan kepada Pangab untuk diam-usan. Tidak mengadili.

reka kan diperiksa?

memeriksa kan tidak mesti mengadili. meriksa, apa itu mengadili. Kamu a sesuatu kan tidak mengadili juga.

rajurit selalu disalahkan sementara per-hanya di DKP, apa tidak menurunkan korps Kopassus?

alu disalahkan, yang disalahkan itu yang ahkan yang benar itu dihargai, malah prestasi, pujian dan penghargaan. Ja-u bahwa setiap prajurit yang menjalan-kan tugas itu disalahkan.

Bagaimana dengan mereka yang di Grup 4. Mungkin biasanya tidak disalahkan kalau mengambil orang. Tapi tiba-tiba disalahkan. Bagaimana ini?

Jadi begini, jangan gampang menghakimi salah atau tidaknya. Nanti berbahaya. Melihat sesuatu jangan sepotong-sepotong, kita harus melihat total. Artinya prosesnya bagaimana? Apakah itu perintahnya benar atau tidak? Kan harus begitu. Jadi jangan melihat sepotong bahwa ini begini.

Dalam DKP sebelumnya ada yang diajukan ke Mahmil dan dipecat. Apa nanti seperti itu?

Ya itu nanti, kan nanti. Kita bicara sekarang.

Benar Prabowo sudah diperiksa?

Saya katakan itu lagi diproses. Jangan nanti membuat opini yang kurang menguntungkan. Kita mesti saling menghormati dan menghargai. Tolong dalam saya menjalankan tugas dibantu. Saya juga membantu memberikan keterangan pada Anda, dan juga tolong opini yang diberikan kepada masyarakat tidak salah. Karena nanti kalau salah, diralatpun susah, jadi harus benar.

Garuk-garuk

Sementara itu dari tempat pemeriksaan di kantor Mabesad dilaporkan, seperti biasanya sidang dimulai pukul 09.00 WIB di salah satu ruangan khusus. Rapat yang dipimpin oleh Kasad ini berlangsung selama enam jam dan beragenda memeriksa bekas Danjen Kopassus Mayjen Muchdi.

Yang menarik, setelah persidangan Muchdi PR selesai, tiba-tiba Letjen Prabowo Subiyanto yang tidak dijadwalkan akan disidang, ternyata hadir. Prabowo tiba di Mabesad pukul 14.45 WIB dengan menggunakan mobil Range Rover Nopol 101 warna hijau tentara.

Prabowo kali ini muncul dengan penampilannya yang sudah berbeda ketika masih sebelum tertimpa musibah. Ketika kemarin tiba di Mabesad, tidak menggunakan tongkat komando lagi, termasuk tanda jabatan juga sudah tidak menempel di dadanya lagi. Yang masih menempel, hanya tanda pangkat dan tiga bintang di pundaknya.

Prabowo melenggang sendiri keluar dari mobilnya menuju tempat sidang tim DKP. Provos-provos yang menyaksikan kehadiran Prabowo pun tidak tampak sigap. Kecuali hanya ada dua provos jaga yang mempersilakan Prabowo masuk ruangan. Sedangkan provos lainnya hanya duduk-duduk di tempat jaga.

Entah apa yang dibicarakan Prabowo dengan tim DKP ini, tidak bisa diketahui. Tapi, pertemuan Prabowo dengan tim DKP ini cukup lama, karena menghabiskan waktu satu jam (mulai pukul 14.45 WIB-15.15 WIB).

Tapi menurut berbagai sumber, Prabowo baru dijadwalkan untuk diperiksa hari Senin mendatang dan kedatangannya hanya untuk kepentingan dinas saja.

Sementara beberapa jam sebelumnya, Muchdi yang telah menjalani pemeriksaan selama empat jam tiba-tiba keluar ruang sidang dan menuju mobilnya yang diparkir di halaman gedung sidang. Wajah Muchdi ketika keluar ruangan ini tampak agak tegang. Baju bagian punggungnya tampak basah. Bahkan sempat garuk-garuk kepala.

Ketika di luar ruangan ini, Muchdi memang langsung masuk di dalam mobil. Entah apa yang dilakukan, sulit diketahui karena pers hanya bisa menyaksikan dari jarak 50 meter. Baru setelah itu dia kembali kedalam.

Namun beberapa jam kemudian, Muchdi keluar lagi dengan membawa tas koper berisikan berkas-berkas sambil tangan kirinya memegang *handphone*. Setelah masuk mobil, dia langsung tancap gas keluar dari gedung Mabesad tempat persidangan.**(BY/PN/JP)**

Kelas: .....

ILSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

DKP terus bekerja secara intensif

JAKARTA (Bisnis): Memasuki hari ketiga Dewan Kehormatan Perwira (DKP) kemarin terus melakukan pemeriksaan terhadap perwira ABRI yang terlibat kasus penculikan aktivis. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jl. Veteran, Jakarta Pusat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun *Bisnis*, DKP yang dipimpin Jenderal TNI Subagyo HS bekerja secara intensif dan terus melakukan sidang secara maraton. Mayjen TNI Muchdi PR disebut-sebut diperiksa kemarin dan hari ini Letjen TNI Prabowo akan mendapat giliran diperiksa.

Sejak dibentuk Senin, DKP langsung bekerja maraton. Pada Selasa melakukan pemeriksaan sejak pagi hingga sore dan Rabu melakukan peninjauan ke Markas Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur.

Sementara itu, Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto belum memberikan keterangan tentang perkembangan DKP. Ketika ditanyakan apakah Prabowo juga diperiksa dalam kasus kerusuhan 13-14 Mei, dia mengatakan "Ya, *nggak dong*. Itu *kan* sudah ada Tim Pencari Fakta (TPF)-nya," ujarnya menjawab pertanyaan *Bisnis* usai menerima penyerahan bantuan kemanusiaan yang disampaikan Menteri Pendidikan/Pertahanan II Singapura RDAM Teo Chee Hean kepada Menhankam/Pangab, di sini, kemarin.

Bisa dicopot

Di tempat terpisah, Mantan Kassospol ABRI Letjen TNI (Purn) Bambang Triantoro menyatakan Letjen TNI Prabowo Subianto bisa dicopot dari dinas militernya serta dikenakan hukuman penjara bila terbukti melakukan tindakan pidana.

"Ya, bisa saja, bahkan dikenakan hukuman penjara juga bisa, kenapa tidak seperti kasus yang dialami Sintong Panjaitan [mantan Pangdam Udayana] yang dibebastugaskan dari jabatan aktif militernya," ujarnya ketika ditanya jika Prabowo terbukti apakah bisa dicopot dari jabatannya.

Bambang mengharapkan pelaksanaan tugas DKP harus tetap menjaga citra ABRI dan bersikap proporsional membongkar kasus itu. "Kalau penculikan itu dilakukan aparat keamanan, berarti bukan hanya aparat yang jelek tapi negara dan bangsa. Jadi, DKP harus membuktikan apakah tindakan itu perintah dari pemerintah atau inisiatif pribadi Prabowo," ujarnya setelah menghadiri deklarasi Barisan Nasional di sini, kemarin.

Deklarasi berdirinya Barisan Nasional dihadiri para mantan purnawirawan ABRI, cendekiawan, politisi, dan mahasiswa a.l. Ketua Umum PDI hasil Munas Megawati Soekarnoputri, mantan Menhankam Jenderal TNI (Purn) Edi Sudradjat, dan mantan gubernur DKI Ali Sadikin.

Di tempat yang sama, Edi Sudradjat meminta DKP mampu bekerja secara maksimal membongkar, mengusut dan menghukum para pelaku penculikan tanpa terkecuali termasuk Prabowo Subianto.

"Kalau DKP tidak sungguh-sungguh membongkar kasus ini citra ABRI tidak akan pulih dan pasti ditinggalkan rakyat. Jadi, apa artinya ABRI tanpa rakyat dan kalau melukai rakyat. Itu tidak ada artinya apa-apa. DKP harus bekerja maksimal membuktikan siapa pelaku sebenarnya," kata Edi.

Mantan Pangkostrad Letjen TNI (Purn) Kemal Idris menilai pembentukan DKP dalam melakukan pemeriksaan terhadap perwira ABRI tidak menyelesaikan masalah.

Pembentukan DKP itu, kata dia, hanya lembaga yang menangani pemeriksaan administratif dan tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi pidana. "Kalau mau menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku, ya... seharusnya diperiksa melalui peradilan militer bukan membentuk DKP."

Tergantung Pangab

Bambang Triantoro mengatakan meski DKP hanya berfungsi melakukan pemeriksaan administratif, namun tidak tertutup kemungkinan kasus itu dibawa ke peradilan militer bila ada bukti kuat.

Jadi, lanjut dia, yang berhak menjatuhkan sanksi atas penelitian dan temuan DKP itu adalah Pangab karena peranan DKP hanya melaporkan hasil temuannya, apakah seorang perwira itu bersalah atau tidak.

"Bila pemeriksaan DKP bisa membuktikan para perwira ABRI itu bukan hanya melanggar kode etik tapi juga melakukan tindakan pidana, usulan kepada Pangab adalah mereka harus dibawa ke pengadilan militer," katanya.

Terus diusut

Dalam perkembangan kasus orang hilang, Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir mengatakan masih mengusut mayat tak dikenal di Kepulauan Seribu yang ditemukan warga pertengahan Mei.

Data yang dimilikinya, katanya, dicocokan dengan empat jenazah yang digali di kawasan Kepulauan Seribu.

"Kami belum bisa menyebutkan, jika keempat jenazah itu adalah korban penculikan, tetapi kami yakin ABRI mengetahui keberadaan 14 aktivis yang hilang," ujar Munir usai mengikuti pemeriksaan keempat jenazah di RSCM, tadi malam.

Kontras, katanya, mencocokkan data yang dimiliki berupa tinggi badan, umur, dan berat badan para korban. "Tunggu saja, hasil pemeriksaannya, sekarang belum bisa disimpulkan." **(espos/cp/et/ln)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☑ Berita Buana	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Bertemu Ulama Jumat Malam, Prabowo Tetap Ceria

Jakarta, Buana

Meskipun diterpa masalah yang cukup berat, namun Letjen TNI Prabowo Subianto tetap menunjukkan sikap cerianya. Paling tidak, ini terlihat dari pertemuan silaturahmi sekitar tokoh ulama dan masyarakat dengan mantan Danjen Kopassus itu di rumahnya di Jakarta, Jumat (7/8) malam.

Ketua Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) Ahmad Sumargono mengakui dirinya ikut hadir dalam pertemuan silaturahmi itu. Namun, Sumargono membantah, jika pertemuan tersebut dikatakan pertemuan antara para ulama dengan Prabowo. "Sebab, ulama yang hadir semalam itu hanya Pak Yusuf Hasyim, selebihnya teman dan simpatisan Pak Prabowo saja. Dan itu kan tak lebih dari 20 orang. Kami hadir di sana benar-benar hanya untuk silaturahmi tanpa membicarakan hal-hal yang spesifik. Bahkan, yang terjadi semalam justru main lucu-lucuan antara kami dan Prabowo. Sehingga, suasana pun tampak ceria," ungkap Sumargono di Jakarta, Sabtu (8/8) pagi.

Pertemuan itu diawali shalat Isya berjamaah dan doa bersama. Menurut Sumargono, sebenarnya acara ini bukan atas undangan Prabowo, melainkan atas inisiatif Yusuf Hasyim bersama kawan-kawan dekatnya yang simpati kepada Prabowo. "Jadi, tak benar kami diundang Prabowo. Sebab, orang seperti Prabowo tidak mungkin melakukan itu. Saya datang karena Pak Yusuf Hasyim yang mengajak saya. Namun, yang pasti, pertemuan semalam itu kami hanya ngobrol-ngobrol biasa. Dan Prabowo tampak ramah dan ceria. Tak ada pembicaraan sedikitpun tentang kasus yang sedang menimpa dirinya," ujar Sumargono.

Penjagaan Ketat

Pemeriksaan terhadap Prabowo sendiri akan dilakukan Senin (10/8) besok. Diperkirakan, pemeriksaan ini akan dilakukan dengan penjagaan di lingkungan Mabes TNI-AD, tempat digelarnya pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terhadap perwira tinggi tersangka penculikan. Penjagaan yang makin ketat di Mabes TNI-AD sudah terlihat sejak beberapa hari lalu. Wartawan dilarang mendekati bangunan tempat pemeriksaan berlangsung.

Situasi ini terlihat dalam pemeriksaan DKP terhadap mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi Purwoprandjono pada hari kedua, Kamis (6/8).

Saat pemeriksaan selesai, pukul 15.30 WIB, beberapa wartawan berusaha mencegat keluarnya para anggota tim dan Mayjen TNI Muchdi. Namun, mereka kembali kecewa. Soalnya, para wartawan itu dihalau petugas. Seorang petugas menyatakan, mereka ditegur atasannya jika membiarkan wartawan mendekati ruang sidang. "Bahkan, beberapa provos kena marah karena ada wartawan yang berhasil mendekati ruang pemeriksaan," ujar petugas itu.

Meski sudah diperiksa, Selasa lalu, mantan Dan Grup IV Kopassus itu kemarin muncul kembali di Mabes TNI-AD. Tidak diketahui, apakah ia ikut diperiksa bersama Muchdi atau hanya sekadar hadir dalam persidangan. ❑ tif/rad

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Ketua DKP: Mereka Mengaku Menjalankan Tugas

JAKARTA — Para perwira Kopassus yang diajukan ke sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP), menurut Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo, mengaku menjalankan tugas saat melakukan penculikan.

"Dalam kasus orang hilang ini, kalau kita melihat bahwa ada orang yang diculik atau diambil, maka mereka menilainya tengah melaksanakan tugas," ujar Subagyo kepada wartawan di Mabesad, Jakarta, kemarin.

Sampai kemarin, dari tiga perwira yang diajukan ke DKP, Mayjen TNI Muchdi Purwoprandjono dan Kolonel Inf Chairawan telah diperiksa. Muchdi diperiksa Kamis (6/8) lalu, sedangkan Chairawan sehari sebelumnya. Seorang perwira lainnya, yaitu Letjen TNI Prabowo Subianto baru akan diperiksa pada sidang DKP Senin pekan depan.

Ditanyakan siapa yang diakui Muchdi dan Chairawan memerintah mereka, Subagyo menjawab, "Bukan begitu melihatnya. Kita lihat tingkatnya Chairawan ke bawah itu kan tingkat pelaksana. Itu nanti perintahnya dari mana? Saya belum bisa mengungkap banyak karena belum bertemu Prabowo."

DKP, menurut Subagyo, tidak melihat suatu masalah secara sepotong-sepotong tetapi secara total. Menurutnya, dewan akan merunut datangnya satu perintah sehingga bisa diketahui letak kesalahannya. "Apakah kesalahan prosedur, ketidakdisiplinan, atau memang tabiat dari perwira nanti bisa kita lihat."

Subagyo kemudian menjelaskan bahwa saat memberikan perintah, komandan bertanggung jawab hingga pelaksanaannya. Komandan, katanya, bertanggung jawab atas perintah, baik yang dilakukan atau yang tidak. "Andai anak buahnya melakukan kesalahan maka komandan yang bertanggung jawab karena itu perintahnya," jelasnya.

Namun, Subagyo buru-buru menambahkan bahwa Muchdi dan Chairawan tidak otomatis bebas dari tanggung jawab bila Prabowo nanti siap bertanggung jawab. "Tidak langsung otomatis seperti itu. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oknum yang melanggar pidana maka harus diselesaikan secara hukum. Kan, ada perkara yang tidak selalu komandan bisa meng-*cover*," ujarnya.

Subagyo kemudian menjelaskan bahwa tidak semua tuduhan yang ditanyakan DKP diakui oleh Muchdi dan Chairawan saat pemeriksaan. "Kecenderungannya ada yang diakui ada yang belum," kata Subagyo, yang juga Kepala Staf TNI-AD ini.

Tentang Muchdi, Subagyo menegaskan bahwa dia adalah pengganti Prabowo. "Dia pengganti. Kalau dia pengganti, apa yang dia lakukan dan apa yang semestinya dia lakukan tetapi tidak dilakukan, itu nanti kita lihat."

Ditanya adanya kesan di masyarakat bahwa para perwira sudah pasti bersalah, Subagyo menjawab: "Kalau perwira sampai dimasukkan ke DKP tentu ada hal-hal yang tidak terhormat. Salah atau tidak itu nanti hakim yang memutuskannya. DKP hanya melihat dan meneliti apakah para perwira itu masih pantas memegang statusnya."

Namun Subagyo mengatakan tidak selalu jalan keluarnya adalah Mahmil. "Kalian harus percaya pada aturannya. DKP ini bekerja sampai pada keputusannya kan ada aturan mainnya," kata Subagyo.

Dikonfirmasi apakah DKP juga memeriksa keterlibatan perwira pada rencana kudeta, Subagyo menjawab: " Waduh saya kok belum mendengar rencana kudeta. Saya tidak pernah mendengar ada rencana atau informasi tentang itu. Tolong, jangan sampai ini berkembang menjadi isu."

Subagyo sekali lagi menegaskan akan berusaha menjalankan tugas secara maksimal, meski sebagai mantan Dan Kopassus dia mengaku prihatin atas situasi di Korps Baret Merah itu. "Tidak saya saja, tidak hanya mantan komandannya saja, kita semua prihatin terhadap kondisi ini. Lebih-lebih ini menyangkut kesatuan yang sangat dibanggakan."

"Saya sama Kopassus cinta sampai mati. Tapi kalau terjadi yang seperti ini ada oknum-oknumnya, saya prihatin. Namun, bagaimanapun saya mengemban tugas. Itulah makanya saya berharap *support* informasi demi suksesnya tugas DKP. Saya berusaha menempatkan diri sesuai dengan tugas saya," kata Dan Kopassus sebelum Prabowo ini. ■ bsa

Kelas: .....

LSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA		1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA		2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA		3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA		4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN		5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

'Pemeriksaan DKP tak mengarah ke isyu kudeta'

JAKARTA (Bisnis): Kasad Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo mengatakan pemeriksaan yang dilakukan Dewan Kehormataan Perwira (DKP) terhadap Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kol (Inf) Chairawan, tidak berkaitan dengan penyelidikan isyu kudeta yang sempat beredar di masyarakat.

"Saya tidak pernah mendengar ada informasi tentang kudeta. Tidak ada sedikit pun yang mengarah itu. Jangan masalah ini jadi berkembang karena isyu atau praduga. Tolong hal ini diluruskan," kata Ketua DKP itu, seusai shalat Jumat di Mabes AD Jakarta, kepada wartawan kemarin.

Menurut dia, pemeriksaan terhadap ketiganya berkaitan dengan kasus aktivis hilang dan tak ada kaitannya dengan isyu kudeta.

Soebagyo mengatakan perwira yang dimasukkan ke DKP berarti melakukan hal-hal yang tidak hormat. Salah atau tidaknya mereka tergantung pada keputusan hakim, katanya.

Dia meminta masyarakat percaya kepada aturan yang diterapkan di DKP. Masalah teknis pemeriksaan, ujarnya, memang tertutup tapi perkembangan pemeriksaan dapat diberikan kepada masyarakat.

Jangan mengadili

"Saya harap kalian jangan sampai secara tidak langsung mengadili [Prabowo, Muchdi, dan Chairawan] sehingga secara tidak langsung memperlakukannya tidak sesuai dengan profesi dan status mereka," kata Kasad.

Dia mengingatkan sampai saat ini ketiga terperiksa itu masih mempunyai hak sesuai status dan kepangkatan mereka.

DKP, kata Soebagyo, berusaha bekerja seoptimal dan seobyektif mungkin sehingga bisa memberikan saran terbaik sehingga Pangab dapat membuat keputusan yang maksimal.

"Pasti ada yang tidak puas, tapi upaya itu dilakukan dengan sistem hukum dan tatanan prosedur yang ada di sini [ABRI]. Prosedur itu dilakukan seoptimal mungkin walaupun secara tertutup," ujarnya.

Pada intinya, katanya, pemeriksaan itu dilakukan untuk melihat apakah kode etik perwira dilanggar atau tidak, seberapa jauh dilanggar dan apakah masih pantas menjadi perwira, atau masih bisa dipertahankan.

Mengenai pemeriksaan yang dilakukan, kata Kasad, ada hal-hal yang sudah diakui ada pula yang belum. Namun, katanya, masalah ini harus dilihat pada dua sisi. Masyarakat, katanya, melihat terperiksa sebagai pelaku penculikan sementara pelaksananya menilai penculikan itu sebagai pelaksanaan tugas.

"Nanti dilihat secara total sehingga dapat diketahui di mana kesalahannya, apakah kesalahan prosedur, ketidakdisiplinan atau memang tabiat perwira dan pelaksana," ujarnya.

Soebagyo menjelaskan komandan bertanggungjawab dalam memerintahkan dan melaksanakannya, termasuk apa yang dilakukan dan tidak dilakukan anak buahnya terhadap perintahnya.

Dalam kasus penculikan, kata Pangab, tingkat Chairawan ke bawah adalah pelaksana. Yang menjadi masalah adalah dari mana perintah itu berasal. "Saya belum bisa mengungkap lebih banyak karena belum ketemu Prabowo."

Menurut dia, bila terbukti Prabowo yang memberikan perintah penculikan, maka dia harus bertanggungjawab. Namun bisa saja tindak pidana yang berkaitan dengan peristiwa itu tanpa sepengetahuan Prabowo, ujarnya.

Mengenai pernyataan Prabowo bahwa dia bertanggungjawab terhadap peristiwa penculikan itu, Kasad mengatakan bukan berarti anak buahnya yang melakukan tindak pidana otomatis bebas. Sebab, lanjutnya, bisa saja ada perbuatan oknum yang melanggar pidana, sehingga harus diselesaikan secara pidana.

Gagal diidentifikasi

Dalam perkembangan kasus orang hilang, koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Munir mengatakan keluarga korban gagal mengidentifikasi empat kerangka tidak dikenal yang ditemukan penduduk Kepulauan Seribu.

Kendati demikian, kata Munir, ada kesamaan tinggi dan bentuk badan korban dengan kerangka yang sempat dikubur masyarakat tersebut. "Tapi kami masih menunggu pemeriksaan akhir untuk mendapat kepastian," ujarnya.

Menurut Munir, Laboratorium Forensik FKUI akan melakukan serangkaian tes termasuk membuat rekayasa bentuk wajah, lebar bahu, dan bentuk tubuh berdasarkan kerangka yang ada. Tahap terakhir—bila ternyata rekayasa memang mengidentifikasikan dengan korban—akan dilakukan tes DNA. **(04)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☑ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Ketua DKP Subagyo:

Komandan Bertanggung Jawab Terhadap Pelaksanaan Tugas

Jakarta, 8 Agustus

Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo menegaskan, komandan yang memberikan perintah harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perintah yang dilakukan anak buahnya.

''Komandan ini *kan* bertanggung jawab yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan. Arti kata, termasuk anak buahnya yang melakukan itu menjadi tanggung jawabnya karena perintah dia,'' kata Subagyo kepada wartawan seusai Sholat Jumat di Mabesad Jakarta, Jumat (7/8).

Secara khusus jenderal berbintang empat yang menjabat Kasad ini mengatakan, jika seorang komandan memberikan perintah, maka dia juga bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Jenderal Subagyo menjelaskan, DKP masih akan terus melakukan pemeriksaan, untuk Letjen Prabowo akan dilakukan pada Senin (10/8) mendatang. ''Percayalah DKP bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga nantinya bisa memberikan saran atau keputusan DKP yang lebih mendalam dan akurat.''

Sebelumnya, Selasa (4/8) lalu, DKP telah memeriksa Kolonel Chairawan, Rabu (5/8) dilanjutkan dengan melakukan cek lapangan ke Makopassus Cijantung. Pemeriksaan terhadap Mayjen Muchdi dilakukan pada hari Kamis (6/8). Jumat (7/8) kemarin, tidak ada pemeriksaan.

Melaksanakan Tugas

Bagaimana kecenderungan dari hasil pemeriksaan sekarang ini? tanya wartawan. ''Kecenderungannya, ada yang diakui, ada yang belum. Kita melihat pada dua sisi. Selain ini, kasus orang hilang *kan*, orang menilai diculik/diambil. Tapi dari yang melaksanakan tugas, dia menilainya melaksanakan tugas. Di situlah nanti kita lihat,'' jawab Subagyo.

Dikatakan, salah satu contoh ada bawahan yang melaksanakan tugas, dipandang melaksanakan tugas. Nah nanti atasannya, tugas itu dari mana, kita lihat. Sehingga kita melihatnya tidak satu-satu potong. Itulah nanti kita lihat secara total sehingga kita bisa melihat di mana letaknya kesalahannya.

''Apakah kesalahan prosedur, apakah ketidakdisiplinan atau memang tabiat dari perwira atau pelaksana. Di situ nanti kita lihat kesalahannya ataupun yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dalam suatu operasi, perintah dan prosedur,'' kata Subagyo.

Menurut yang diperiksa, mereka melaksanakan tugas. Tugas itu dari siapa pak? ''Nanti dulu. *Gini* ya, berbeda yang kita maksud. Antara lain, pelaksana *kan* yang bawahan. Misalnya kita melihat tingkatannya Chairawan ke bawah itu, *kan* tingkat-tingkat pelaksana. Nah ini perintahnya dari mana. Saya belum bisa mengungkap banyak, karena belum ketemu Prabowo,'' jawab Subagyo.

Kemarin *kan* Prabowo juga datang Mabesad? ''Begini *lho*, *kan* diperiksa sebagai terperiksa, tapi ada yang sebagai saksi. Jadi prosedurnya begitu. Percayalah kepada DKP sedang memproses, untuk masalah teknis prosesnya itu memang aturannya tertutup tetapi pemberitaannya saya ceritakan,'' jawab Subagyo.

Secara khusus Subagyo meminta agar jangan sampai opini masyarakat keliru.

Sehingga kalau ada Prabowo ke sana, Muchdi ke sana, ya *kan* dia itu masih aktif dan mempunyai hak-haknya sesuai dengan status mereka termasuk kepangkatannya. Itulah, jangan sampai kalian nanti secara tidak langsung seperti mengadili sehingga memperlakukan yang tidak sesuai dengan profesinya dia.

Untuk Muchdi bagaimana hasil pemeriksaannya? ''Kita *kan* ngerti dia pengganti. Kalau dia pengganti dari itu, apa yang dia lakukan dan semestinya yang perlu dan harus dia lakukan serta yang tidak harus dilakukan. Saya kira kalian sudah mengerti,'' jawab Subagyo.

Dikatakan, DKP bertugas untuk menilai apa ada kehormatan perwira yang dilanggar sebab perwira itu mempunyai kode etik perwira, budi bhakti wira utama. *Lha* itu kehormatan-kehormatan dilanggar tidak, kalau dilanggar apa masih patut tidak menjadi perwira, seberapa dilanggarnya atau masih bisa dipertahankan karena memang potensial, karena memang keadaan atau juga tidak terlalu berat pelanggarannya.

''Nanti kalau urusannya pidana atau urusannya yang lain maka itu ada hukumnya, ada wadahnya,'' tambah Subagyo.

Apakah pemeriksaan tiga terperiksa ini selain kasus penculikan, apa ada kaitannya dengan rencana kudeta beberapa waktu lalu? ''Saya belum pernah mendengar rencana kudeta. Sekali lagi saya tidak pernah dengar informasi ada rencana itu. Jangan sampai ini nanti berkembang atau hanya isu atau praduga. Tidak ada sedikitpun yang mengarah ke situ,'' jawab Subagyo.

Atau karena ketidakloyalan kepada pimpinan? ''Nanti *kan* lihat. *Lha*, *wong* namanya tidak disiplinkan, sudah jelas itu. Intinya kalau perwira sampai dimasukkan ke DKP, kira-kira ada yang hal-hal tidak hormat. Itu saja. Kalau masalah salah atau tidak itu *kan* hakim yang memutuskan. Memang tidak selalu diteruskan ke Mahmil,'' jawab Subagyo.

Sebagai mantan Komandan Kopassus dan warga Kopassus, Subagyo menyatakan rasa prihatinnya. ''Kita prihatin terhadap kondisi ini, lebih-lebih menyakut satuan yang sangat dibanggakan. Saya terhadap Kopassus cinta sampai mati, tapi kalau terjadi yang seperti ini, ada oknum-oknum ini, saya sangat prihatin,'' tambahnya.

(M-11)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Subagyo: Prabowo Diperiksa Senin

"Tak Pernah Ada Rencana Kup"

Jakarta, Sabtu, Merdeka

Kasad Jenderal Subagyo Hadisiswoyo yang saat ini menjabat Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) membantah keras bahwa pemeriksaan atas Letjen Prabowo Subianto ada kaitannya dengan rencana kup. Menurutnya, tidak pernah ada rencana kup.

"Waduh *kok* saya belum pernah dengar masalah kup. Tidak pernah ada informasi atau rencana kup. Ini harus saya klirkan dan ini jangan sampai berkembang. Sebab itu hanya isu dan praduga. Tidak ada sedikit pun yang mengarah ke situ. Ini tolong diluruskan," kata Subagyo ketika dicegat seusai Sholat Jumat di Masjid Mabesad, kemarin.

Menurut catatan *Merdeka*, desas-desus itu berkembang bersamaan dengan isu ketika Prabowo hendak dicopot dari jabatan Pangkostrad yang prosesnya sangat alot hingga memunculkan Mayjen Johny Lumintang sebagai *caretaker*, sebelum diserahkan kepada Letjen Djamari Chaniago.

Akibatnya muncul *rumor* bahwa pemeriksaan DKP itu bukan hanya untuk memeriksa kaitan para perwira yang diperiksa dengan kasus penculikan, tapi ada kaitannya dengan ketidaksenangan mereka dengan pemerintah saat ini. Hal inilah yang kemudian dibantah oleh Jenderal Subagyo.

Mungkin ketidakloyalan mereka pada panglima? "Nanti *kan* bisa dilihat. Kalau orang sudah tidak disiplin *kan* sudah jelas itu. Bahkan lebih dari itu," jawabnya sambil menambahkan bahwa tidak ada pemeriksaan terhadap para perwira pada hari Jumat.

Meski demikian secara tegas jenderal bintang empat itu mengatakan, dirinya bersama delapan jenderal bintang tiga akan memeriksa Prabowo hari Senin mendatang (10/8) di Mabesad.

Dari pemeriksaan itu, bisa diketahui lebih rinci tentang siapa yang memberikan perintah dan apa alasannya. "Senin nanti *ya*, setelah itu. Kalau Anda tanya siapa, saya jawab hari Senin nanti saya memeriksa Prabowo," katanya.

Senin itu khusus untuk memeriksa masukan-masukan seperti dari TKP dan dari TPF ABRI yang bisa mendukung agar saran DKP lebih mendalam.

Bagaimana kecenderungan hasil pemeriksaan sementara?

Kecenderungan ada yang diakui mereka dan ada yang belum.

Apa tujuan dan bagaimana cara mereka menculik?

Kita harus melihat dua sisi. Kalau dari yang melaksanakan tugas, dia menilainya itu sebagai pelaksanaan tugas. Di situlah nanti kita lihat tugasnya itu dari mana, sehingga kita tidak melihat satu potong. Jadi kita lihat di mana letak kesalahan, apa itu prosedur, ketidakdisiplinan atau memang tabiat perwira atau pelaksana.

Bagaimana dengan tanggung jawab komandan?

Kalau komandan memberikan perintah tersebut, dia bertanggung jawab dalam memerintahkan dan pelaksanaan.

Menurut anak buah itu tugasnya dari mana? Apa dari Prabowo atau Muchdi?

Mereka itu harus dilihat dulu. Mereka yang saya maksud berbeda, antara lain pelaksana atau bawahan. Misalnya, kita lihat Chairawan ke bawah, itu *kan* tingkat pelaksana. Perintahnya *kan* darimana. Saya belum bisa mengungkapkan lebih banyak karena belum bertemu dengan Prabowo.

Tapi kemarin siang Prabowo mampir ke Mabesad?

Ada yang diperiksa sebagai terperiksa. Ada yang sebagai saksi atau yang diambil keterangan. Kalian tidak usah satu per satu begitu. Kalian percaya toh dengan DKP, kita sedang memproses. Jadi jangan sampai nanti Prabowo ke Sogo kalian urus. Pak Bagyo ke pelatnas kalian urus. Nanti dibilang *kok* tidak mengurus DKP. Itu bisa salah interpretasi.

Jadi bagaimana?

Kalaupun ada Prabowo ke sana atau Muchdi ke sini, mereka *kan* masih aktif. Masih mempunyai hak-hak sesuai status mereka, termasuk kepangkatannya. Jangan sampai secara tidak langsung mengadili, sehingga tidak sesuai dengan profesi mereka.

Apa saja yang sudah didapat dari Muchdi? Apa dia hanya sekedar menjalankan perintah?

Saya kira kita mengerti toh. Dia itu pengganti. Kalau dia pengganti, apa yang dia lakukan, dan semestinya harus dilakukan, tapi tidak dilakukan. Saya kira kalian mengerti.

Dalam proses pemeriksaan apa saja yang boleh mereka lakukan?

Mereka juga mempunyai hak-hak yang juga kita penuhi. Misalnya, menghadirkan pendamping. Bisa saja tidak usah pakai pendamping. Ini Dewan Kehormatan Perwira dan DKP itu bukan Dibikin Pusing Kepala ha..ha...

Bagaimana perasaan Anda sebagai bekas Dan Kopassus?

Saya kira bukan saya saja. Kita prihatin terhadap kondisi ini. Lebih-lebih menyangkut satuan yang sangat dibanggakan. Kepada Kopassus, saya cinta sampai mati. Tapi kalau terjadi seperti ini dengan oknum-oknumnya, saya sangat prihatin. Tapi bagaimanapun saya mengemban tugas.(PN)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

dia:			Tanggal						Bulan		Tah
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	199
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	199
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	200
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	200
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	200
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	200

Prabowo Tak Rencanakan Kudet

Ada Yang Tidak Dijalankan Muchdi

Ketua DKP: Tanggung Jawab Penculikan Tak Bisa Diambil Alih

Jakarta, JP.-

Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo Hadi Siswoyo membantah bahwa Letjen TNI Prabowo Subianto pernah merencanakan kudeta pada 20 Mei lalu. Karena itu, tidak benar jika pemeriksaan kasus penculikan aktivis prodemokrasi yang menyeret sejumlah oknum Kopassus juga dikaitkan dengan masalah tersebut.

Jenderal yang kini menjabat KSAD itu mengemukakan hal tersebut kepada wartawan di Mabes AD, Jakarta, kemarin. Bahkan, sebagai salah satu pemimpin ABRI, ia mengaku sama sekali tidak pernah mendengar rencana adanya kudeta pada detik-detik terakhir lengsernya Soeharto setelah berkuasa 32 tahun itu. Soeharto menyerahkan jabatan presiden ke B.J. Habibie pada 21 Mei 1998.

Menurut Bagyo –demikian KSAD itu biasa dipanggil–, ia juga belum pernah mendapatkan informasi berkaitan dengan rencana Prabowo mengambil alih kekuasaan secara paksa itu. "Ini perlu saya jelaskan secara transparan agar tidak berkembang isu yang lebih melebar. Kecuali kalau nanti bisa dibuktikan dalam pemeriksaan," tuturnya.

Prabowo memang salah satu pemimpin militer yang cemerlang dan kariernya sempat melejit bak meteor. Namun, karena itu pula, ia sering dianggap melakukan kegiatan yang berisiko tinggi serta membuat pihak lain ikut pasang kuda-kuda. Termasuk kabar tentang keberaniannya menekan Habibie untuk mengangkatnya sebagai Pangab.

Yang menarik, dalam kasus penculikan belasan aktivis itu, secara jantan ia berani bertanggung jawab penuh. "Tidak otomatis begitu. Kan nanti ada perbuatan oknum yang melanggar pidana harus tetap dipidanakan," ujar Subagyo Hadi Siswoyo kepada wartawan di Mabes AD Jakarta kemarin.

Menurut Bagyo, dalam peristiwa penculikan, pihak yang memerintah (Prabowo) memang harus bertanggung jawab. Tetapi, kalau dalam pelaksanaan perintah itu ada tindakan pidana yang dilakukan oknum, kata Bagyo, tidak selamanya Prabowo bisa meng-*cover* perbuatan oknumnya itu.

"Jadi, para pelaku di bawah Prabowo kalau tetap melanggar unsur pidana, ya akan dipidanakan. Tidak bisa distop," katanya. Penjelasan Bagyo ini disampaikan berkaitan dengan adanya dugaan jika Prabowo bersedia bertanggung jawab penuh atas penculikan itu, Muchdi Pr, Chairawan, dan yang lain bisa bebas. Dugaan itu dinilai KSAD tidak benar.

Ada yang bilang bahwa Prabowo melakukan penculikan karena mendapatkan dua perintah; dari Wiranto dan Feisal Tanjung? Bagyo pun hanya tersenyum. Tapi, ia akan mengecek dulu kebenaran informasi itu, khususnya dalam pemeriksaan Prabowo Senin nanti. Rencananya, pemeriksaan terhadap Prabowo memang dilakukan Senin depan.

Hal. 1/ .....
Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Prabowo, Muchdi 'responsible for kidnappings'

JAKARTA (JP): The chief of the Officers Honor Council, Gen. Subagyo Hadisiswoyo, revealed yesterday that Lt. Gen. Prabowo Subianto and Maj. Gen. Muchdi Purwopranjono either gave the instructions for abductions of political activists in the past year or were aware of their issuance.

Subagyo, who is also Army Chief of Staff, said testimony from other officers before the council showed the two former chiefs of the Army's Special Force (Kopassus) were responsible for the abductions.

"The testimony of the other officers showed Prabowo gave the instructions. He, therefore, must be held responsible," he said.

When pressed by reporters whether higher ranked Armed Forces (ABRI) officers had also been aware of the kidnappings, Subagyo said: "Just wait until Prabowo testifies Monday."

He explained several categories of mistakes an official might have committed in the abductions. "(The kidnappings) could be a procedural mistake, a mistake on the part of the leader (of an unit) or (they could have been committed because of) the character of the highest military official who gave the instruction.

"In this case, Chairawan and the other officers, who are lower in rank, were only carrying out the instructions of their commanders."

Col. Chairawan was a former chief of Kopassus' intelligence operations. He is the third highest ranked Kopassus officer, after Prabowo and Muchdi, under the investigation of the ABRI-initiated honor council. Ten other Kopassus soldiers will soon be court-martialled for the abductions.

On Muchdi's role in the kidnappings, Subagyo said the officer must have fully understood his authority and duties as a Kopassus commandant-general.

"He was the Kopassus commander. Surely he knew what he must or must not do."

The council started the investigation into the kidnappings Tuesday, a day after its establishment was announced by Armed Forces chief Gen. Wiranto. Chairawan and Muchdi had both been questioned, while Prabowo has so far appeared before the council as a witness.

Subagyo said, for the sake of obtaining accurate information about the kidnappings, the council would also hear from the Armed Forces fact-finding team and other teams established by various rights groups.

The council inspected on Wednesday several locations, believed to be the sites where the abductees were once held, at the Kopassus headquarters in Cijantung, East Jakarta.

Guilty

Subagyo made clear yesterday the council was not responsible for determining the officers' guilt, which was the authority of a military tribunal.

The council will submit the results of its investigation, along with recommendation for further action, to the Armed Forces commander.

He also called on the public to trust that the council would be independent in its investigation of the abductions.

"*Insya Allah* (God willing), the council will be objective in handling the case and issuing its recommendations," he said.

He promised that although the investigation was conducted in closed chambers, the council would not withhold information to the public when its findings were completed.

"The council is doing its best to provide the Armed Forces chief with accurate recommendations, so that he will make correct decision over the case," he said.

He also said the council followed the "rules of the game" while conducting the investigation, including meeting the officers' rights to present their own witnesses and to be assisted by an associate in the questioning.

He dismissed speculation the council also investigated a rumored coup attempt waged by the Kopassus troops the night after president Soeharto announced his resignation on May 21.

"No, it (the reported coup attempt) was not true. And the council does not focus its investigation on rumors. We are only probing the case of missing activists," he said.

Speaking as a former Kopassus chief, Subagyo said he regretted that the case had ruined the image of the Army's elite force.

"I love Kopassus but I am really concerned that several Kopassus officers had to be put under the honor council's investigation and others tried by the military tribunal," he said. **(imn)**

Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐ Suara Merdeka	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Subagyo: Muchdi Telah Beri Pengakuan

• Prabowo Diperiksa Senin Lusa
• Tak Berkaitan Kasus Kudeta

JAKARTA - Mayjen TNI Muchdi PR telah memberikan pengakuan dalam pemeriksaan yang dilakukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) menyangkut kasus penculikan terhadap sejumlah aktivis. Namun Ketua Tim DKP Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo yang ditanya wartawan usai salat Jumat di Mabes TNI AD, Jl Veteran Jakarta kemarin, belum menjelaskan hal-hal yang diakui oleh Muchdi tersebut.

"Yang bersangkutan telah memberikan pengakuan. Namun ada juga yang belum diakui dan pemeriksaan masih berjalan. Selain keterangan dari saksi, masukan yang diperoleh juga dicocokkan dengan hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP), serta dari Tim Pencari Fakta (TPF). Jangan buru-buru menghakimi. Yang jelas ada yang diakui ada yang belum. Itu akan kita cocokkan dengan fakta dan data. Jangan menghakimi tanpa fakta."

Muchdi belum bersedia memberikan penjelasan setelah menjalani pemeriksaan. Sedangkan Ketua TPF Mayjen Samsu Djalal, beberapa hari lalu mengatakan, Muchdi sebenarnya tidak terlibat langsung dalam kasus itu. Namun saat dia menjabat sebagai Danjen Kopassus terjadi penyekapan terhadap Andi Arief di markasnya. "Seharusnya dia tahu hal itu tidak benar dan sebagai perwira mestinya bertindak," ungkapnya.

Lebih lanjut Jenderal TNI Subagyo mengatakan, DKP akan melihat secara menyeluruh, dari petugas yang melaksanakan tugas sampai yang memerintahkan. "Tidak sepotong-sepotong, sehingga diketahui letak kesalahan. Apakah karena kekeliruan prosedur, tidak disiplin atau memang tabiat perwira pelaksana. Kita lihat apakah kekeliruan itu saat operasi atau suatu perintah atau prosedur."

Dicontohkan, Chairawan tingkatannya sebagai pelaksana. Karena itu perlu dicari dari mana perintah diperoleh. Hanya saja, menurut dia, karena belum memeriksa mantan Danjen Kopasus Letjen TNI Prabowo, belum bisa diungkapkan secara mendetail.

Ketika ditanya soal kehadiran Prabowo ke Mabes TNI AD, Subagyo menegaskan, dia adalah prajurit aktif. Dengan demikian, masih mempunyai hak-hak sesuai status dan kepangkatan.

"Itu yang mesti kalian ketahui sehingga tidak mengadili mereka (Prabowo, Muchdi, dan Kolonel Chairawan-Red) dan memperlakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan profesi dan statusnya."

Apakah Muchdi dan Chairawan lepas karena yang bertanggung jawab komandan, Subagyo menambahkan, sesuai dengan peristiwa yang bertanggung jawab dalam perintah adalah komandan. Namun jika nanti terdapat perkara pidana, jelas tidak bisa diambil alih.

Kode Etik

Dijelaskan, DKP dibentuk karena setiap perwira mempunyai kode etik perwira yang bernama "Budi Bhakti Wira Utama". Kalau kode etik itu dilanggar maka perlu dibentuk DKP dan tim itu yang melakukan penilaian.

"DKP memeriksa apakah masih pantas menjadi perwira atau tidak. Jika benar melanggar, seberapa jauh mereka melanggar. Masih bisa dipertahankan karena potensinya atau tidak."

Jika memang menyangkut masalah pidana, lanjut dia, tentu ada lembaga yang menangani, yaitu Mahkamah Militer. "Ini penting diketahui agar tidak keliru cara memahami. Kita akan menempatkan sesuatu secara proporsional."

Tidak Disiplin

Mengenai isu yang menyebut pemeriksaan ketiga perwira itu berkaitan dengan kasus kudeta, Subagyo membantah, dan mengatakan kasus itu menyangkut penculikan sejumlah aktivis. "Waduh... saya *nggak* pernah dengar rencana kudeta. Ini hanya isu. Tak ada sedikit pun pemeriksaan mengarah ke situ. Tolong dibetulkan," ujarnya.

Apakah hal itu karena tidak loyal terhadap atasan? Subagyo yang juga KSAD menegaskan, pemeriksaan berkaitan dengan tindakan tidak disiplin. Namun dia tidak menjelaskan bentuk-bentuk tindakan yang dinilai tidak disiplin tersebut.

"Tidak disiplin itu kan banyak. Tidak memasang kancing baju saja termasuk tidak disiplin. Tingkatannya kan ada. Nanti kita lihat hasil pemeriksaannya."

Seobjektif Mungkin

Menanggapi harapan para senior ABRI, Subagyo menegaskan, DKP berusaha semaksimal serta seobjektif mungkin.

Hasilnya akan disampaikan kepada Pangab Jenderal TNI Wiranto, sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan.

"Ya agar keputusanaya nanti maksimal, baik sebagai pimpinan, organisasi, maupun untuk kepentingan masyarakat," tegasnya.

Namun dia belum bisa menjelaskan hasilnya karena belum memeriksa Prabowo.

Dia mengaku kemarin tidak ada pemeriksaan. Pemeriksaan akan dilakukan Senin mendatang, dengan memanggil terperiksa mantan Danjen Kopassus.

Selaku mantan Dan Kopassus, Subagyo mengaku merasa prihatin atas kejadian yang dilakukan oknum-oknum tersebut.

Namun selaku mantan komandan dia tetap mencintai korps pasukan baret merah itu.

Menjawab pertanyaan apakah penyelesaian akhir di Mahmil? Subagyo menegaskan jalan keluarnya tidak selalu melalui lembaga pengadilan militer tersebut. Yang jelas, pembentukan DKP karena ada sesuatu yang tidak normal.

Soal kekhawatiran sebagian masyarakat mereka tidak dibawa ke Mahmil, dia mengatakan, semua harus dilakukan berdasarkan aturan. "DKP itu apa kerjanya, Pangab itu apa, dan Mahmil itu apa, semua sudah ngerti aturan itu." (di-10b)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA		1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA		2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA		3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA		4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN		5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Prabowo, Siapa Memerintahmu rabowo, Bagaima na Analisamu

Jakarta, Selasa, Merdeka

Hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terhadap bekas Danjen Kopassus Letjen Prabowo Subianto dalam kasus penculikan dan orang hilang, menguakkan sebuah fakta baru. Ternyata apa yang dilakukan menantu bekas Presiden Soeharto itu adalah menganalisa sebuah perintah BKO (Bawah Kendali Operasi).

Namun belum jelas benar apa yang dimaksud dengan BKO dalam kasus tersebut, dan bagaimana kaitannya dengan penculikan dan orang hilang. Kasad Jenderal Subagyo HS selaku Ketua DKP belum menjelaskannya secara rinci.

"Perintah itu untuk mem-BKO-kan. Nah itu yang lalu dianalisa. BKO itu artinya Bawah Kendali Operasi, dia (Prabowo, red) menganalisa," kata Jenderal Subagyo dalam keterangan persnya setelah memeriksa Prabowo dan Kolonel Chairawan di Mabesad, kemarin sore.

Sementara pangamat militer Mayjen (Pur) Samsudin kepada *Merdeka* menjelaskan, pengertian BKO ialah penyerahan suatu pasukan kepada satuan lain untuk kepentingan operasi. Pengendalian pasukan BKO berada di tangan komandan di wilayah pasukan tersebut ditugaskan. Misalnya pasukan dari Kodam Diponegoro di-BKO-kan ke Kodam Jaya, maka kendali pasukan itu berada di tangan Kodam Jaya. Tapi secara organik dia tetap di Kodam Diponegoro. "Dalam kasus ini, Kodam Diponegoro tidak punya kendali operasi," kata Mayjen Samsudin.

Dalam kasus penculikan dan orang hilang, lanjut Samsudin, yang perlu dipertanyakan ialah, kemana pasukan Kopassus di BKO-kan. Atau siapa yang memberi perintah BKO. Hal itu perlu jelas karena dari sana bisa dilacak siapa yang bertanggungjawab atas operasi penculikan itu.

Melanjutkan keterangannya, Subagyo yang didampingi Wakil Ketua Letjen Fachrul Razi (Kasum ABRI) dan Sekertaris DKP Letjen Djamari Chaniago (Pangkostrad), mengatakan berdasarkan pemeriksaan kemarin bisa dilihat bahwa Prabowo mendapatkan sebuah perintah yang kemudian dianalisanya.

"Perintah itu yang dianalisa. Tapi apakah analisa tersebut tepat atau tidak, ataupun pelaksanaanya ada penyimpangan atau tidak, disitulah nanti akan dibuktikan dengan perkuatan atau dukungan atau *cross chek* dari saksi-saksi maupun perwira lain," tutur Subagyo.

Dalam pemeriksaan yang berlangsung dari pukul 9 pagi sampai pukul 16.00 itu, Jenderal Subagyo mengatakan DKP bukan hanya memeriksa Prabowo dan Chairawan, tapi juga sejumlah saksi. Namun dia tidak mau menyebutkan siapa saja saksinya. "Pokoknya sejumlah perwira," tambahnya.

Tentang fokus pemeriksaan terhadap Prabowo, dia mengatakan DKP ingin melihat kenapa Letjen Prabowo sampai terlibat dalam kasus orang hilang.

"... Mengapa Letjen Prabowo melakukan kegiatan ini. Prinsipnya seperti itu, sehingga apa-apa yang dilakukan berkaitan dengan prosedur, disiplin dan tabiat, ini yang akan dijadikan pertimbangan. Nanti akan disampaikan kepada Pangab," ujarnya.

Ditanya apakah benar Prabowo kala itu menerima dua buah perintah yang berbeda, yaitu dari Pangab dan Kasad, dia menggelengkan kepalanya. "Tidak benar. Itu (perintah, red) dianalisa," tambahnya.

Apa bunyi perintahnya? "Perintahnya itu untuk mem-BKO-kan, nah lalu dianalisa. BKO itu Bawah Kendali Operasi, dia menganalisa. Itu sampai sekarang masih demikian. Sekarang lagi diproses," jawab Subagyo yang juga pernah menjadi Dan Kopassus itu.

Meski sudah menjelaskan, namun Subagyo tetap tutup mulut dan tidak mau mengungkapkan siapa yang memberi perintah BKO tersebut.

Secara berulang-ulang dia mengatakan bahwa informasi tersebut masih terus diproses.

"Kita jangan gampang memberikan keterangan yang belum mutlak kebenarannya. Proses tersebut harus diperkuat keterangan

cepat, tapi bukan buru-buru sehingga tidak menghakimi dengan salah dan tujuan kita bukan untuk menghakimi," tuturnya.

Apakah Letjen Prabowo mengakui menculik? "Sudah saya katakan, ini lagi proses. Keterangan tersebut harus diperkuat dengan keterangan lain, sehingga menjadi keterangan yang valid atau terpercaya," jawabnya.

Soal sidang DKP yang sempat ditunda selama dua jam dari pukul 11:00 sampai 13:00 WIB, Kasad mengatakan dirinya selaku ketua harus melakukan koordinasi dengan para anggota. Dan itu, lanjutnya merupakan hak dewan. "Untuk apa? Itu untuk mempertajam sidang-sidang berikutnya," tambahnya.

Sumber *Merdeka* yang layak dipercaya mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Prabowo langsung dilaporkan secara lisan oleh Kasad kepada Menhankam/ Pangab Jenderal Wiranto hari, kemarin sore.

Masih menurut sumber tersebut, ketika masuk ke ruang pemeriksaan, Prabowo terlihat cukup tenang, namun serius. Bekas Pangkostrad itu menunjukkan sikap yang hormat kepada para anggota DKP yang terdiri dari satu orang jenderal bintang empat dan delapan orang letnan jenderal.

Diungkapkannya bahwa keterangan yang diberikan Prabowo tidak seperti yang diperikirakan atau diharapkan DKP. Begitu juga dengan keterangan yang telah disampaikan bekas Danjen Kopassus Mayjen Muchdi dan Komandan Grup 4 Kopassus Kolonel Chairawan sebelumnya.

"Makanya perlu dihadirkan beberapa orang saksi untuk melakukan *cross cheking*. Kalau memang keterangannya sudah keluar semuanya, kan sebetulnya tidak dibutuhkan saksi," kata sumber yang tidak mau disebutkan nama maupun pangkatnya itu.**(PN/AG)**



Letjen Prabowo saat tiba di Mabesad untuk diperiksa Dewan Kehormatan Perwira, kemarin.

Kronologi Pemeriksaan

06.30 WIB — Kasad Jenderal Subagyo HS selaku Ketua DKP tiba di kantornya.

08.00 WIB — Sejumlah anggota DKP tiba di Mabesad. Seperti Sekretaris DKP Letjen Djamari Chaniago (Pangkostrad) disusul Letjen Yusuf Kartanegara (Irjen Dephankam).

08.20 WIB — Prabowo tiba di Mabesad Jl Medan Merdeka Barat melalui pintu utama dengan menggunakan mobil dinas Land Rover hijau dengan nopol 3303-01. Mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH), menantu bekas Presiden Soeharto itu tampak menenteng tas kecil berwarna coklat.

09.00 WIB — Sidang DKP dimulai dengan dipimpin Jenderal Subagyo HS dan dihadiri seluruh anggota.

09.30 WIB — Wartawan dalam dan luar negeri mulai berdatangan dan menunggu di depan Mabesad.

11.00 WIB — Sidang diskors, anggota DKP adakan rapat koordinasi di ruang kerja Kasad.

13.00 WIB — Rapat koordinasi selesai, Ketua DKP dan para anggota kembali ke ruang sidang di lantai dua. Sidang kembali dilanjutkan.

15.12 WIB — Sekitar 80 wartawan diizinkan masuk ke halaman parkir Mabesad.

15.50 WIB — Prabowo tampak melangkah keluar dari gedung utama Mabesad melalui pintu belakang dan langsung meninggalkan Mabesad dengan menggunakan kendaraan berbeda.

16.05 WIB — Ketua DKP Jenderal Subagyo dengan didampingi Wakil Ketua Letjen Fachrul Razi dan Sekretaris Letjen Djamari Chaniago mengadakan konferensi pers di halaman Mabesad.

16.15 WIB — Kolonel Chairawan juga meninggalkan gedung utama Mabesad melalui pintu belakang. Chairawan, menurut Subagyo juga diperiksa oleh DKP.(PN)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Ketua DKP: Sudah Ada yang Diakui

* Prabowo Diperiksa Senin

Jakarta, Kompas

Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo mengutarakan, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan bahwa ada tuntutan dan kenyataan yang sudah diakui para perwira yang diperiksa, tetapi ada juga yang belum. Namun Subagyo tidak menjelaskan persoalan apa yang sudah diakui dan belum tersebut.

Dikatakan, sidang pemeriksaan lanjutan DKP akan dilanjutkan hari Senin (10/8) dengan memeriksa mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD (Danjen Kopassus) Letjen TNI Prabowo Subianto tentang sejauh mana keterlibatannya dalam kasus penculikan dan penyekapan sejumlah aktivis.

"Kalau kalian tanya siapa yang akan DKP periksa hari Senin mendatang maka saya jawab DKP akan memeriksa Prabowo," kata Subagyo yang juga Kepala Staf TNI AD (KSAD), menjawab wartawan hari Jumat (7/8) di Markas Besar (Mabes) TNI AD.

Subagyo mengatakan, DKP tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap ketiga perwira ABRI, tetapi juga terhadap hal-hal yang berkaitan dengan mereka. "DKP bisa meminta hasil-hasil temuan dari Tim Pencari Fakta Gabungan ABRI. Hal ini dilakukan agar keputusan dari DKP bisa lebih mendalam atau lebih akurat dan terpercaya," kata Subagyo.

Ditambahkan, DKP akan terus berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas-tugasnya. "Karena itu saya mengimbau baik kepada media massa maupun masyarakat umumnya agar menghargai upaya ini tanpa harus mengadili dan menghukum mereka yang diperiksa DKP. Percayalah DKP akan berbuat sebaik mungkin, baik untuk satuan, organisasi ABRI maupun untuk kepentingan masyarakat. DKP punya kesungguhan untuk itu," katanya.

Tanggung jawab komandan

Menurut Subagyo, DKP melihat permasalahan orang hilang ini dari dua sisi, yakni dari pemberi perintah dan para pelaksana perintah tersebut. "Kita harus melihat dua sisi ini. Dari sini akan ketahuan apakah terjadi kesalahan prosedur, apakah ketidakdisiplinan sudah tabiat dari perwira atau pelaksana. Yang mana di antara kedua sisi ini, inilah tugas DKP untuk mengungkapnya," katanya.

Mengenai tanggung jawab seorang komandan, Subagyo mengatakan, komandan yang memberikan perintah tersebut akan bertanggung jawab soal perintah maupun pelaksanaan perintah itu. "Komandan ini bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan maupun yang tidak. Artinya anak buah yang melaksanakan perintah itu juga adalah tanggung jawabnya," tuturnya.

Dikatakan, DKP melihat Kolonel (Inf) Chairawan dan bawahannya adalah merupakan tingkat pelaksana. "Nah ini 'kan yang perintah dari mana. Saya belum bisa ungkap terlalu banyak karena belum bertemu dengan Prabowo," ujarnya.

Tentang Mayjen TNI Muchdi Purwopranjono, Subagyo mengatakan, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan karena Muchdi merupakan pengganti Danjen Kopassus. "Dia tentunya tahu yang bisa dilakukan atau yang tidak bisa dilakukan," katanya.

Menyinggung mengenai adanya permintaan dari sejumlah kalangan agar ketiga perwira ini diajukan ke Mahkamah Militer, Subagyo mengatakan, jika ada perwira yang diajukan ke DKP, maka bisa diperkirakan ada hal-hal yang tidak terhormat yang diperbuatnya, sedangkan untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang adalah hakim melalui pengadilan.

"Tidak selalu perwira yang diajukan ke DKP juga diseret ke pengadilan militer. Dari hasil pemeriksaan DKP inilah akan terlihat sejauh mana ada perbuatan dan pada tingkat mana terjadi pelanggaran pidana. Yang akan memutuskan itu semua adalah Menhankam/Pangab. DKP hanya memberikan masukan, pertimbangan dan saran," ujarnya.

DKP, kata Subagyo, hanya memeriksa kode etik perwira. Dalam DKP itu nantinya akan diperiksa, misalnya sejauh mana kehormatan tersebut dilanggar, dan apa pantas hal itu dilakukan perwira. **(ama)**

Kelas: .....

Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

dia:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

DKP tidak Arahkan Pemeriksaan pada Isu Kudeta

JAKARTA (Media): Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan Dewan Kehormataan Perwira (DKP) terhadap Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kol (Inf) Chairawan, tidak mengarah pada penyelidikan atas isu kudeta yang sempat santer beredar di masyarakat.

"Saya belum pernah mendengar adanya rencana atau informasi tentang kudeta. Tidak ada sedikit pun yang mengarah itu. Tolong hal ini diluruskan," kata Ketua DKP itu, menjawab wartawan, seusai salat Jumat di Mabes AD Jakarta kemarin.

Ketika ditanya tentang kemungkinan mereka tidak loyal kepada perintah atasannya, Jenderal TNI Subagyo HS mengatakan bahwa prajurit yang tidak disiplin juga berarti tidak loyal kepada atasannya.

Selain itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang juga mantan Pangdam Diponegoro itu juga mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi maupun perwira yang diajukan ke DKP akan dilanjutkan pada Senin (10/8), sehingga tidak ada pemeriksaan pada Jumat (7/8). Kolonel Chairawan dan Mayjen TNI Muchdi PR sudah diperiksa, sehingga Letjen TNI Prabowo Subianto yang kemungkinan besar diperiksa hari Senin.

Namun, Kadispenad Brigjen TNI I Dewa Putu Rai mengatakan, Kol Chairawan maupun Mayjen TNI Muchdi bisa juga diperiksa kembali sebelum Letjen TNI Prabowo Subianto, jika DKP masih memerlukan informasi tambahan.

Menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan Prabowo mendapatkan perintah dari mantan Pangab dan mantan KSAD dia hanya mengatakan hal itu akan terjawab saat dilaksanakan pemeriksaan Senin mendatang.

Tentang Mayjen Muchdi PR, KSAD mengatakan bahwa dia diperiksa sebagai pengganti Danjen Kopassus. "Dia tentunya tahu yang bisa dilakukan atau yang tidak bisa dilakukan," katanya.

Belum puas

Pada kesempatan terpisah, di Cipayung, kemarin, Jenderal Subagyo HS mengaku masih belum puas dengan pemeriksaan terhadap perwira-perwira yang diduga terlibat dalam penculikan aktivis.

"Sampai saat ini pemeriksaan tim belum sampai pada hasil yang diharapkan," ujarnya.

DKP sejak semula mengharapkan agar semua hal yang berhubungan dengan pemeriksaan dibeberkan dengan jelas dan perwira, namun hal ini belum bisa dilakukan para perwira yang diperiksa tersebut.

Hal itu menurut perkiraan Subagyo kemungkinan disebabkan beberapa faktor. Pertama hal itu sengaja mereka lakukan karena opini dan isu-isu yang berkembang sehingga membuat opini terkadang tidak benar.

"Kemungkinan lain, mereka masih bohong," kata Subagyo. Kemungkinan-kemungkinan seperti inilah yang membuat pemeriksaan tidak sesuai dengan harapan.

"Kami memeriksa tidak berdasarkan isu, tapi berdasarkan data-data dan fakta yang ada dan diketahui. Dan saya juga mengharapkan yang diperiksa memberikan penjelasan yang jujur," katanya.

Sejak diumumkan Menhankam/Pangab, DKP yang beranggotakan tujuh perwira tinggi ABRI telah memeriksa Kol Chairawan, Mayjen TNI Muchdi, dan meninjau lokasi penyekapan korban penculikan di Markas Kopassus, Cijantung.

(Edi/Wdh/Mia/N-1)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐	SATRA	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Dari Mana Perintah Penculikan?

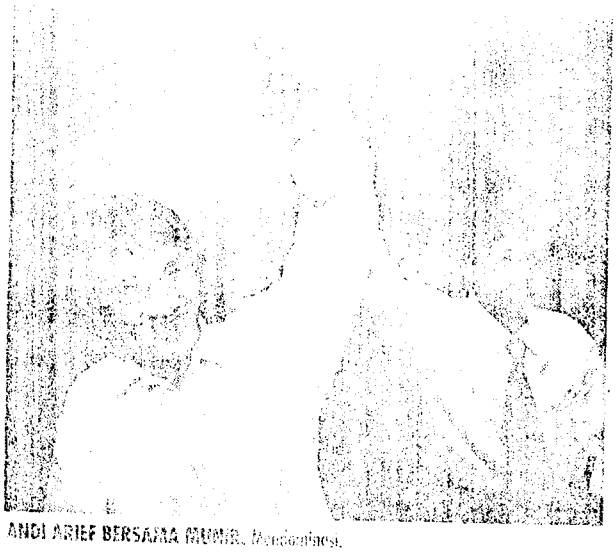
Panglima ABRI akan menggunakan dewan kehormatan yang dibentuk untuk menyidik kasus orang hilang. DKP atau DKP?



FOTO FOTO: TATAN AGUS YST

FOTO ORANG-ORANG HILANG. Belum ditemukan

BOGOR. Kelompok kerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Hari Jumat pekan lalu, Munir dan dua orangtua korban penculikan mengadakan dialog dengan Menhankam/Panglima Jenderal Wiranto. Dalam dialog yang didominasi pertanyaan Munir di seputar kasus orang hilang itu, ternyata Munir tak mendapat jawaban seperti yang diinginkannya.



ANDI ARIEF BERSAMA MUNIR. Mendampingi

Kepada para tamunya itu, Wiranto mengatakan tak tahu-menahu tentang 14 orang hilang yang sampai kini tak jelas di mana rimbanya. "Kami belum tahu keberadaan mereka," ucap Wiranto menjawab pertanyaan Munir. Wiranto juga tak mau menjawab ketika ditanya Munir, siapa yang memerintahkan penculikan itu. Jenderal bintang empat ini hanya menyatakan, "Kami sedang mencari tahu."

Kontras memang tak mengharapkan jawaban yang muluk-muluk dari Wiranto. Tapi, setidaknya, Kontras berharap Wiranto bisa memberikan jawaban yang lebih memuaskan. Misalnya, Wiranto bisa menyebutkan siapa yang memerintahkan penculikan itu. Atau, Wiranto bisa menyebutkan di mana para aktivis yang hilang itu berada. Atau, Wiranto bisa menyebutkan siapa yang menculik mereka.

Tapi, Wiranto tak mau menyebutkan itu semua. Ia hanya menyatakan, "Kami sedang mencari tahu." Wiranto juga menyatakan, ia akan membentuk dewan kehormatan yang akan menyidik kasus orang hilang itu. Dewan kehormatan ini, kata Wiranto, akan bekerja dalam waktu dua bulan. Dewan kehormatan ini, kata Wiranto, akan bekerja dalam waktu dua bulan.

ELSAM · Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Prabowo Diperiksa Tanpa Pengamanan Khusus

Jakarta, Senin, Merdeka

Hari ini, giliran mantan Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto rencananya diperiksa tim Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Pemeriksaan menurut jadwal akan dimulai pukul 09.00 WIB. Sidang dipimpin langsung Ketua tim DKP Kasad Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo dengan sekretaris Kasum ABRI Letjen TNI Fachrul Razi.

Kadispenad Brigjen TNI I Dewa Putu Ray yang dihubungi wartawan di Jakarta, kemarin, menjelaskan rencana pemeriksaan Prabowo Senin ini tak ada persiapan khusus.

Pemeriksaan, kata dia, dilakukan seperti biasa. Atau, sama halnya ketika tim DKP mengawali pekerjaannya memeriksa Kolonel Inf Chairawan Selasa lalu.

Termasuk pengamanan khusus, dia juga mengatakan tidak ada. "Lihat saja, nggak akan ada pengamanan khusus. Ya biasa-biasa sajalah," ujar alumni Akabri 71 ini.

Tidak adanya pengaman khusus ini, karena tempat pemeriksaan Prabowo dilakukan secara tertutup. Dan tempat sidangnyapun, di tempat khusus, di lingkungan Mabesad, sehingga ia tak khawatir akan ada persoalan khusus dengan pengamanan.

Maksudnya, kalau tidak ada pengamanan khusus khawatir ada sesuatu? "Nggak usah khawatir. Kalau khawatir apa yang dikhawatirkan. Semuanya kan sudah berjalan seperti biasa," katanya.

Selanjutnya anggota tim DKP, dipastikan akan hadir semua, seperti pada pemeriksaan Chairawan dan Muchdi Pr. Para anggota tim DKP ini terdiri atas Kassospol ABRI Letjen TNI Bambang S Yudhoyono, Gubernur Lemhannas Letjen TNI Agum Gumelar, Irjen Dephankam Letjen TNI Yusuf Kartanegara, Danjen Akabri Laksdya Ahmad Sutjipto dan Pangkostrad Letjen TNI Djamari Chaniago.

Selain itu ikut serta pula dua anggota cadangan masing-masing Wakasad Letjen TNI Sugiyono dan Letjen TNI Ary J Kumaat (Pati Mabes ABRI).

Prabowo dalam pemeriksaan kali ini akan mendapatkan fasilitas pendamping. Pendamping dalam pengertian disediakan seorang perwira yang membantu Prabowo dalam menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pasal-pasal hukum.

Pendamping ini, juga diberikan tim DKP kepada dua terperiksa terdahulu, yakni mantan Dangroup IV/Kopassus Kolonel Inf Chairawan dan mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi Pr. (JPNN)



Massa Partai Keadilan di lapangan Masjid Al Azhar Jakarta, kemarin.

Gagarin/Merdeka

Kelas: .....

SAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Dia:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

DKP

Beranikah ABRI Berterus Terang?

Kendati mendapat kritikan DKP terus melanjutkan kerjanya. Banyak orang menganggap hasil kerja DKP akan membuktikan keseriusan ABRI memperbaiki citranya. Berhasilkah ABRI menarik kembali simpati rakyat?

Hari-hari ini, ABRI mendapat ujian berat. Bukan di ajang pertempuran konvensional, tapi di gedung Mabesad. Di tempat ini, ABRI diuji untuk mempertahankan nama baik lewat pemeriksaan para perwiranya yang dituduh melakukan tindak penculikan aktivis.

Tiga perwira, dua mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto dan Mayjen TNI Muchdi PR, serta mantan Dan Grup IV Kolonel Inf Chairawan diperiksa Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dibentuk Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto awal pekan lalu. Menurut Wiranto, kesalahan utama mereka melakukan pelanggaran terhadap Kode Kehormatan Perwira pada kasus penculikan para aktivis.

DKP ini dipimpin oleh KSAD Jenderal TNI Subagyo HS dan Kasum ABRI Letjen TNI Fachrul Razi sebagai wakil. Anggotanya: Irjen Dephankam Letjen TNI M Yusuf Kartanegara, Gubernur Lemhannas Letjen TNI Agum Gumelar, Kassospol ABRI Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Pangkostrad Letjen TNI Djamari Chaniago, dan Danjen Akabri Laksdya TNI Sutjipto, serta Wakasad Letjen TNI Sugiyono dan Letjen TNI Arie J Kumaat sebagai cadangan.

Uniknya, selain Prabowo, Muchdi, dan Chairawan, tujuh perwira dari sepuluh orang anggota Kopassus lainnya tidak diajukan ke DKP, namun langsung ke Mahkamah Militer. Orang pun menganggap ada perbedaan penanganan karena adanya figur Prabowo.

Namun, kepada wartawan sesudah mengumumkan personil DKP, Wiranto menampik anggapan itu. Menurutnya, dalam menyelesaikan kasus orang hilang ABRI mengacu pada sistem peradilan yang berlaku di ABRI. "Tepatnya terdapat dua proses hukum yang akan dilakukan yakni DKP dan Mahmil," katanya.

DKP, jelas Wiranto, digelar untuk memeriksa para perwira berpangkat kolonel ke atas yang dianggap melanggar kode kehormatan perwira 'Budi Bakti Wira Utama'. Sementara para prajurit yang berpangkat letkol ke bawah, lanjutnya, langsung diajukan ke Mahmil. Dia menambahkan bahwa para perwira yang akan diajukan ke DKP bisa saja diajukan ke Mahmil [illegible]

membentuk negara hukum dipastikan akan gagal kita wujudkan," katanya.

Karena itu, bagi Munir lebih baik ABRI langsung memahmilkan seluruh perwira yang diduga terlibat dalam aksi penculikan para aktivis. Kalau pun akan dilakukan pemeriksaan oleh DKP, maka itu setelah mahkamah militer berlangsung. Alasan Munir, pembentukan DKP hanya berdasarkan surat keputusan Pangab yang salah satu prasyaratnya menyebut orang yang bisa diajukan ke DKP adalah mereka yang telah dijatuhkan hukuman minimal 3 bulan ke atas. Syarat lain, telah dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan atau skorsing oleh Mahkamah Militer.

Dorongan untuk mendahulukan pengadilan militer juga disampaikan mantan Dubes Indonesia di Amerika Letjen (Pur) Hasnan Habib. Dalam forum Lokakarya Mahasiswa Nasional yang diselenggarakan Universitas Trisakti, Selasa pekan lalu, Hasnan menegaskan penculikan merupakan tindak pidana. Karena itu, siapa pun yang melakukan tindak pidana harus dituntut secara pidana pula.

Pengamat politik Indonesia dari AS William Liddle setuju bila para perwira yang diajukan ke DKP harus diajukan pula ke Mahkamah Militer. Syaratnya, jika mereka terbukti terlibat langsung dalam kasus penculikan dan penganiayaan.

"Kalau dalam pemeriksaan DKP mereka terbukti terlibat dalam penculikan dan penganiayaan, demi tegaknya hukum, ya harus ke pengadilan," katanya seperti dikutip *Antara*.

Sama seperti Hasnan Habib, Liddle beragumentasi penculikan dan penganiayaan adalah kejahatan, bukan kesalahan prosedur atau pelanggaran disiplin keprajuritan. Karena masalah kriminal, yang bisa memeriksa bersalah atau tidak adalah pengadilan. Tidak cukup hanya terhenti pada DKP. Pemeriksaan terhadap Prabowo dan lainnya, menurut dia, adalah demi kehormatan ABRI sendiri. "Itu semua agar ABRI tidak dicemooh di dunia internasional," katanya.

Pengamat militer Dr Salim Said justru menganggap keberadaan DKP sudah tepat. Menurutnya, pembentukan DKP telah menunjukkan keseriusan ABRI menyelesaikan persoalan. Karenanya, ia berharap masyarakat memberi kepercayaan dan kesempatan kepada DKP untuk

Barangkali usulan korban penculikan yang juga aktivis Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) Andi Arief bisa jadi bahan diskusi. Menurutnya yang dibutuhkan saat ini bukan DKP, tapi sebuah dewan untuk merehabilitasi nama baik ABRI.

Lebih jauh ia menyebut dewan yang harus dibentuk itu bisa mengakomodir seluruh kasus tindak kekerasan militer selama 32 tahun Orde Baru berkuasa. "Seperti tindakan militer di Aceh, dalam peristiwa Lampung, Tanjung Priok, Haur Koneng, Timtim atau Papua dan sebagainya," tambahnya.

Dalam pandangan alumnus Fisipol UGM itu, bila yang dibentuk saat ini DKP khusus kasus penculikan, maka ini akan mubazir. "Bagaimana dengan kasus tindak kekerasan militer lainnya, apakah perlu dibentuk DKP baru. Ini kan tidak efektif. Padahal kegeraman dan kemarahan rakyat terhadap kekerasan militer sekarang sudah semakin meluas."

Persoalannya, sorotan masyarakat mungkin tidak lagi pada legal tidaknya keberadaan DKP. Namun, keseriusan ABRI untuk menuntaskan persoalan kasus penculikan para aktivis ini. Pasalnya, kasus ini masih menyimpan serangkaian misteri. Pertama, nasib 14 korban penculikan yang hingga kini belum diketahui. Kedua, menyangkut tudingan keterlibatan instansi lain dalam kasus penculikan sehingga bila harus dituntaskan, maka seluruh instansi yang terlibat juga harus diperiksa.

Ketiga, dan ini paling tidak jadi ukuran keseriusan ABRI berkait dengan pengakuan sementara dua perwira di depan DKP. Mereka mengaku bila aktivitas penculikan merupakan bagian dari menjalankan tugas. Bila demikian, siapa yang memerintah? Prabowo? atau ada atasannya yang juga memerintahkan. Siapa?

Bila memasuki wilayah ini, aspek politis jadi tak terelakkan. Seorang pengamat menyebut kasus ini memang lebih sarat muatan politisnya ketimbang unsur kriminalnya. Ia menyebut dalam bahasa militer, sebenarnya kasus ini bukan penculikan tapi perintah negara.

Kenyataan ini yang disadari Ketua DPA AA Baramuli, SH sehingga ia beranggapan pimpinan ABRI bisa melakukan deponir atau penyimpanan perkara atas kasus penculikan. Menurutnya, deponir ini dilakukan bila menyangkut masalah-masalah yang bisa merusak dan menyakibatkan kepentingan bangsa terancam. Oleh karenanya tidak bisa dikatakan bahwa semua kasus pidana itu harus masuk penjara. "Saya kira itu pikiran yang terlalu pendek."

Langkah deponir memang cenderung memung[illegible]

LSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

dia:			Tanggal	Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Prabowo Tak Rencanakan Kudeta

Ada Yang Tidak Dijalankan Muchdi

Ketua DKP: Tanggung Jawab Penculikan Tak Bisa Diambil Alih

Jakarta, JP.-

Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo Hadi Siswoyo membantah bahwa Letjen TNI Prabowo Subianto pernah merencanakan kudeta pada 20 Mei lalu. Karena itu, tidak benar jika pemeriksaan kasus penculikan aktivis prodemokrasi yang menyeret sejumlah oknum Kopassus juga dikaitkan dengan masalah tersebut.

Jenderal yang kini menjabat KSAD itu mengemukakan hal tersebut kepada wartawan di Mabes AD, Jakarta, kemarin. Bahkan, sebagai salah satu pemimpin ABRI, ia mengaku sama sekali tidak pernah mendengar rencana adanya kudeta pada detik-detik terakhir lengsernya Soeharto setelah berkuasa 32 tahun itu. Soeharto menyerahkan jabatan presiden ke B.J. Habibie pada 21 Mei 1998.

Menurut Bagyo –demikian KSAD itu biasa dipanggil–, ia juga belum pernah mendapatkan informasi berkaitan dengan rencana Prabowo mengambil alih kekuasaan secara paksa itu. "Ini perlu saya jelaskan secara transparan agar tidak berkembang isu yang lebih melebar. Kecuali kalau Prabowo dituduh tidak loyal terhadap atasannya, nanti bisa dibuktikan dalam pemeriksaan," tuturnya.

Prabowo memang salah satu pemimpin militer yang cemerlang dan kariernya sempat melejit bak meteor. Namun, karena itu pula, ia sering dianggap melakukan kegiatan yang berisiko tinggi serta membuat pihak lain ikut pasang kuda-kuda. Termasuk kabar tentang keberaniannya menekan Habibie untuk mengangkatnya sebagai Pangab.

Yang menarik, dalam kasus penculikan belasan aktivis itu, secara jantan ia berani bertanggung jawab penuh. "Tidak otomatis begitu. Kan nanti ada perbuatan oknum yang melanggar pidana harus tetap dipidanakan," ujar Subagyo Hadi Siswoyo kepada wartawan di Mabes AD Jakarta kemarin.

Menurut Bagyo, dalam peristiwa penculikan, pihak yang memerintah (Prabowo) memang harus bertanggung jawab. Tetapi, kalau dalam pelaksanaan perintah itu ada tindakan pidana yang dilakukan oknum, kata Bagyo, tidak selamanya Prabowo bisa meng-*cover* perbuatan oknumnya itu.

"Jadi, para pelaku di bawah Prabowo kalau tetap melanggar unsur pidana, ya akan dipidanakan. Tidak bisa distop," katanya. Penjelasan Bagyo ini disampaikan berkaitan dengan adanya dugaan jika Prabowo bersedia bertanggung jawab penuh atas penculikan itu, Muchdi Pr, Chairawan, dan yang lain bisa bebas. Dugaan itu dinilai KSAD tidak benar.

Ada yang bilang bahwa Prabowo melakukan penculikan karena mendapatkan dua perintah; dari Wiranto dan Feisal Tanjung? Bagyo pun hanya tersenyum. Tapi, ia akan mengecek dulu kebenaran informasi itu, khususnya dalam pemeriksaan Prabowo Senin nanti. Rencananya, pemeriksaan terhadap Prabowo memang dilakukan Senin depan.

Sabtu sampai Minggu libur karena, menurut dia, tidak ada keharusan idang dilakukan setiap hari.

Dalam kesempatan itu juga itanyakan alasan Prabowo menulik para aktivis untuk keamanan egara. Tetapi, Bagyo pun tidak isa menjawab karena belum bertemu langsung dengan Prabowo.

Lalu, hasil pemeriksaan dari Muchdi Pr apa? Posisi dia kan anya pengganti Danjen Kopassus? Menurut Bagyo, semua engerti kalau posisi Muchdi Pr ebagai pengganti di Danjen Kopassus. Meski dia (Muchdi) anya sebagai pengganti, katanya, arus tetap tahu apa yang harus kerjakan dan yang tidak perlu kerjakan. "Jadi, tanpa mempersoalkan Muchdi sebagai pengganti, Muchdi sendiri harus tetap engerti tugasnya sebagai Danjen Kopassus," katanya.

Dari hasil pemeriksaan terhadap Muchdi, lanjut Bagyo, ada beberapa pertanyaan yang sudah diakui kebenarannya oleh Muchdi. Tapi, ada juga yang belum. Belum diakuinya beberapa pertanyaan tim DKP itu, menurut KSAD, karena terkait dengan fakta-fakta yang ada.

Tapi, bisa juga tidak terkait dengan fakta atau memang Muchdi Pr benar-benar tidak menjalankan. Dalam posisi ini, kata Bagyo, tidak bisa langsung sadis memvonis Muchdi Pr atau yang lain. Sebab, menurut dia, sadis itu otomatis langsung menghakimi tanpa didukung fakta yang ada.

Apakah berdasarkan opini itu, ketiganya (Prabowo, Muchdi, dan Chairawan) sudah pasti bersalah? "Begini, Gampangnya, kalau sampai ada perwira dimasukkan ke Dewan Kehormatan Perwira (DKP), kira-kira kan bisa ditebak ada yang tidak beres *toh*," tuturnya.

Meski sudah bisa ditebak ada yang tidak beres, tidak otomatis langsung ke mahmil. Tapi, juga tidak otomatis hanya berhenti sampai di DKP. Dalam posisinya sebagai mantan Dan Kopassus, ia mengaku sangat prihatin melihat peristiwa yang dialami Kopassus ini.

"Tapi, mau bilang apa. Ini kan menjalankan tugas, tentu harus melaksanakan seobjektif mungkin. Dan, insya Allah, dalam menjalankan tugas ini saya bisa bersikap adil dalam membuat keputusan. Meski ada yang tidak puas, saya akan berusaha memuaskan semuanya," katanya.

Saat ditanya kemungkinan DKP sudah bisa memperoleh kesimpulan motivasi penculikan itu, Bagyo mengatakan, untuk mengetahui hal itu perlu dilihat dari dua sisi. Pertama, kalau penculik[an] dilakukan bawahan, karena m[elak]sanakan tugas. Ke[mu]dian kalau benar hanya melaksana[kan] tugas, tugas itu dari mana. Itu perlunya melihat dulu secara t[eli]ti. Dengan cara itu, menurut KS[AD] akan diketahui di mana le[tak] kesalahannya.

"Apakah karena kesalah[an] prosedur, kesalahan pimpin[an] atau memang tabiat pelak[u]nanya," ujarnya. Misalnya, [ia] menyebut nama Chairawan. Di[a] (Chairawan) mengakui benar-benar hanya sebagai pelaksana, tetapi yang masih perlu dikorek, perintah itu dari siapa. "Ini saya belum bisa mengungkap karena belum ketemu Prabowo. Baru Senin depan," katanya.

Lho, Prabowo saat pemeriksaan Muchdi Pr kan datang? Bagyo mengatakan, "Begini lho! Kan ada tersangka bisa dijadikan saksi. Tapi wartawan tidak usah tanya satu per satunya. Kalian harus percaya DKP karena proses pemeriksaan kan tertutup. Jadi, nggak perlu ngurus ke sana-sanalah. Nanti Prabowo ke Sogo (pusat perbelanjaan wah di Jakarta) diurus. Saya ke pelatnas bulutangkis diurus, kan nggak bener."

Ia mengatakan, kalau kenyataannya Prabowo dan Muchdi Pr bisa ke mana-mana, itu karena keduanya masih sebagai ABRI aktif. Apalagi, keduanya juga masih punya hak yang sama dengan status kepangkatannya. Jadi, di luar pemeriksaan, para tersangka itu boleh berhubungan....? "Lho, kalau berhubungan laki-laki perempuan kan tetap boleh ha..ha..ha. Pokoknya, hak-haknya kita penuhi, termasuk perlu saksi dan pendamping, ya akan kita penuhi," ujar Bagyo. **(saf)**

LSAM

dia:

BISNIS INI
JAKARTA
JAWA POS
KOMPAS
KD. RAKY
MEDIA IN

Kontr

Jakarta, K
Komisi
dan Korba
(Kontras)
hadir pad
kerja pe
(*Enforced*
sappearen
(*Torture*,
Komisi Ti
nusia PBE
nakan S
mendatan
akan mem
kembanga
kasus ora
lengkapi

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

"Mahmil Menunggu Kejelasan Nasib Korban"

Penganiayaan, Pembunuhan Berencana, Juga Kejahatan Politik

* Kalau Tersangka Penyuruhnya Tidak Ada Berarti Rekayasa

Jakarta, Senin, Merdeka

Perkembangan penuntasan kasus penculikan aktivis pro-demokrasi yang telah mencoreng kewibawaan Kopassus, sangat dinanti-nanti. Sementara, masih ada keluarga yang berharap agar sanaknya yang masih belum jelas nasibnya, cepat dikembalikan. Bagaimana sebaiknya proses hukum kasus ini dijalankan? Bagaimana akhir ceritanya nanti?

PERTAMA, harus diungkap secara tuntas dan bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya pengungkapan pelaku, tetapi juga motif dari tindakan hukumnya. Demikianlah harapan Koordinator Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munir terhadap penanganan kasus penculikan aktivis pro-demokrasi yang melibatkan anggota Kopassus.

Kedua, proses hukum itu harus dilakukan secara transparan. Yakni melalui mekanisme prosedural dan suatu proses peradilan. Berarti harus ditolak berbagai bentuk mekanisme yang menempatkan persoalan penculikan ini sebagai persoalan internal pemerintah semata-mata pemerintah. Misalnya, hanya melalui mekanisme DKP (Dewan Kehormatan Perwira).

Ketiga, penindakan hukum atas kasus ini harus memberikan kontribusi agar dihentikannya bentuk-bentuk tindakan serupa atau bentuk-bentuk kekerasan terhadap para aktivis.

"Jadi kita tidak hanya berkepentingan terhadap seseorang, dengan memenjarakan orang. Lebih penting lagi, bentuk-bentuk seperti itu tidak terjadi lagi dikemudian hari. Saya kira ketiga hal tersebut dapat diwujudkan sesuai hukum," kata Munir yang juga pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia (YLBHI) saat ditemui Merdeka, kemarin.

Terhadap tersangka 11 anggota Kopassus yang kini berada dalam tahanan, menurut Munir, sampai sekarang tuduhan kejahatannya belum ideal. Mahkamah militer (Mahmil) tidak boleh dimulai terlebih dahulu sebelum ada kejelasan nasib korban penculikan yang sampai saat ini belum kembali ke keluarganya.

Kalau ini belum dijelaskan, papar Munir, maka hukuman maksimal yang akan diancamkan kepada para tersangka itu pun belum bisa diketahui. Kalau sekarang hanya digantungkan kepada tuduhan penganiyayaan, karena mengandalkan saksi korban penculikan yang sudah dilepaskan.

"Tapi itu *nggak* bisa digunakan dasar, sebab masih ada 14 orang yang belum jelas nasibnya. Kalau 14 orang ini sudah jelas, mungkin ada yang meninggal, berarti itu *kan* pembunuhan berencana," kata alumnus Univversitas Brawijaya yang memiliki gaya khas, tertawa renyah.

Tentang korban penculikan belum jelas nasibnya, ucap Munir, kita tidak meyakini kalau ABRI tidak tahu. "Kita meyakini kalau ABRI itu tahu, tapi sampai hari ini ABRI belum mau berterusterang kepada masyarakat," katanya.

Maka, sebaiknnya ditemukan dulu para korban tersebut, baru dilangsungkan peradilan. Dia memberikan contoh, bila proses peradilan berjalan, tuduhannya hanyalah penganiayaan. "Maka yang harus bertanggungjawab kepada 14 orang korban penculikan itu siapa kalau mereka ditemukan meninggal? *Kan* tidak bisa diseret-seret lagi orang-orang itu ke pengadilan. Tapi yang lebih penting adalah memperoleh jawaban ke 14 orang hilang tersebut. Itulah standar bagi kita semua," paparnya.

Disamping itu, lanjut Munir, ABRI juga punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya secara politis. Yakni dengan menyatakan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat, sekaligus mengadili bentuk-bentuk kekerasan yang selama ini terjadi.

"Saya kira itu komitmen politik yang penting bagi kita. Kalau tidak ada komitmen dari ABRI untuk tidak lagi digunakannya bentuk-bentuk kekerasan terhadap masyarakat, maka tidak akan ada artinya," paparnya.

Jika kasus ini telah sampai ke mahkamah militer, menurut Munir, 11 anggota Kopassus yang menjadi terdakwa, tidak akan mungkin lepas dari jerat hukum. Mereka tidak mungkin bebas dari tanggungjawab hukum meski diketahui hanya menjalankan perintah atasan.

Sebab, seharusnya mereka bisa menolak menjalankan tugas itu jika diketahui melanggar hukum. Karena tetap menjalankan, maka akibat yang timbul dari tindakannya itu pun harus dipikul.

Yang penting, ucap Munir, adalah menyeret pemberi komando. Dan yang paling bertanggungjawab adalah yang memerintahkan. Sekarang yang jadi masalah adalah yang memerintahkan tidak diseret. Inilah yang dikatakan diskriminatif (karena kepangkatan orang dilindungi) atau diskriminasi penerapan hukum. Ini bertentangan dengan azas hukum.

"Kalau proses DKP itu *kan* untuk melegitimasi proses pelanggaran dasar-dasar negara hukum. Kalau mau lebih keras lagi bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD). Karena setiap warga negara berkedudukan sama didepan hukum, termasuk tidak dibedakan soal kepangkatan," ujarnya.

Kalau kemauan politiknya direkayasa sedemikian rupa, papar Munir, bisa saja 11 anggota Kopassus itu diadili tanpa adanya tersangka atau terdakwa penyuruh. Kalau demikian yang terjadi, inilah rekayasa untuk melokalisir persoalan dengan menempatkan cara operiter, bawahan yang harus bertanggungjawab.

Koordinator Kontras ini menegaskan, jalan terbaik untuk memproses kasus ini adalah melalui mahkamah militer (Mahmil). Suatu peradilan secara jujur dan terbuka.

"Ini akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum," tandas Munir. Namun jika dalam peradilan itu hanya menggunakan kaca mata hukum yang sangat politis dengan menerapkan aspek hukum secara diskriminatif dan dikenakan kepada terdakwa yang dibawa-bawa, justru ketidakpercayaan masyarakat yang akan muncul.

Para tersangka kasus ini, ungkap Munir, bisa juga dikategorikan tersangka kejahatan politik. "Karena sikapnya bukan sekedar kriminil, juga sangat politis," jelasnya. Jika kasus seperti itu jumlahnya sudah mencapai ribuan bisa dikategorikan kejahatan pembantaian politik.

"Menurut saya kejahatan terhadap kemanusiaan atau memakan jiwa manusia karena motif politik, itu tidak dipentingkan berapa jumlah korban statistiknya. Tapi kejahatan politiknya yang harus dipertanggungjawabkan semuanya. Ya, pakai logika Pol Pot," ujar Munir.

Sementara, Jaksa Agung HA Muhammad Ghalib menyatakan pengusutan terhadap bekas Pangkostrad Letjen Prabowo Subiyanto dan sejumlah oknum anggota Kopassus sudah berjalan baik dan sesuai prosedur hukum. Hal itu, menurut dia, dapat dilihat dari langkah Pangab Wiranto yang mengungkapkannya secara transparan.

Karenanya, tegas bekas Oditur Jenderal (Otjen) dan Kepala Babinkum ABRI ini, seluruh rakyat Indonesia dituntut bersatu untuk mengejar cita-cita penegakan hukum di negara ini. Penegasan ini dikemukakan Ghalib saat ditemui di Pusdiklat Kejaksaan Agung Ragunan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Jika kasus yang menyangkut oknum ABRI itu diajukan ke peradilan militer, menurut Ghalib, dia optimis persidangannya akan berlangsung fair. Sebab asas empat peradilan di Indonesia (peradilan agama, umum, militer dan tata usaha negara), menurutnya, menjunjung tinggi peradilan fair dan asas praduga tak bersalah.

Setuju jika Prabowo diajukan ke persidangan? Ghalib mengatakan bukan wewenangnya menjawab itu. Tapi dari sikap pimpinan ABRI, menurutnya, sudah jelas arahnya.

"Siapapun yang melanggar harus diproses secara hukum. Itu baru negara hukum namanya. Kalau kita masih membeda-bedakan atau tidak menengakkan hukum dengan baik kapan lagi hukum di negara ini bisa menegakkan rasa keadilan ini dengan sungguh-sungguh. Itulah yang sekarang dituntut masyarakat. Rasa keadilan," tambah Ghalib. **(WIN/MUN)**



ELSAM

Media:

- BISNIS IN
- JAKARTA
- JAWA PO
- KOMPAS
- KD. RAK
- MEDIA IN

"SAYA sa
kan keadaan
Lustrllanang
ban penculik
bali. Aktivis
hilang dicu
kapkan sang
an para kor
bisa kembali
"Yang say
Hendrawan
yang lain itu
Maret sudal
lokasi penyel
lau sudah k
dikembalikar
atau ke kant
pai sekarang
kantor polisi
katanya.
Apakah ad
wa mayat-m
di Lampung
atau di Filip
para aktivis
"Saya ko
itu benar r
Rasanya ti
dibunuh di
Kalaupun r
kira itu bis
ta," katany
Lagi pula
penculikn
bunuh mer
disinya sa
kalau kor
bunuh di se
Apalagi,

LSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☑	Suara Merdeka	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Prabowo Mengaku Diperintah Atasan

• Belum Jelas Siapa Memerintah
• Subagyo: Tergantung Analisis

JAKARTA- Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) Letjen TNI Prabowo Subianto mengaku dirinya menjalankan perintah atasan dalam kasus penculikan terhadap sejumlah aktivis prodemokrasi dan kasus orang hilang.

Untuk menindaklanjuti pengakuan ini, kata Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo HS, pihaknya akan memeriksa bagaimana Prabowo menganalisis perintah tersebut. Selain Prabowo, DKP kemarin juga memeriksa Komandan Grup IV Kopassus Kol Inf Chairawan dan beberapa saksi.

Jenderal Subagyo yang didampingi dua anggota DKP, Irjen Dephankam Letjen TNI Yusuf Kartanegara dan Kasum ABRI Letjen TNI Fachrul Rozi, mengatakan, acara pemeriksaan berjalan lancar. Pemeriksaan berlangsung selama sekitar tujuh jam, sejak pukul 09.00 hingga 16.00. Prabowo tiba di Mabes TNI AD pada pukul 08.20.

Dalam keterangan pers di halaman Mabes TNI AD seusai pemeriksaan, Subagyo yang juga KSAD mengatakan, Prabowo menerima perintah untuk mem-BKO (Bawah Kendali Operasi). Setelah itu, tergantung bagaimana cara dia menganalisis perintah tersebut.

"Begini, perintahnya untuk mem-BKO. Dia kemudian menganalisis. Sekarang masalah itu sedang diperiksa. Sampai sekarang soal itu lagi diproses," kata mantan Pangdam IV/Diponegoro tesebut.

Ditambahkannya, setiap perintah itu harus dianalisis. Dalam hal ini pihaknya sedang memeriksa apakah analisis Prabowo saat itu tepat atau tidak, dan apakah pelaksanaannya menyimpang atau tidak. "Di situlah nanti akan dibuktikan kepada DKP. Tentu akan diperkuat dengan dukungan data, atau *cross-check* dengan saksi atau perwira yang lain."

Perintah Siapa?

Namun Ketua DKP tidak mau menjelaskan siapa yang memberikan perintah mem-BKO kepada Prabowo: apakah Panglima ABRI (waktu itu Jenderal TNI Feisal Tanjung) atau KSAD (Subagyo sendiri). "Saya katakan, itu sedang diproses. Sekali lagi, sekarang sedang diproses, jangan gampang memberi keterangan yang belum mutlak kebenarannya."

Ketika wartawan menanyakan kemungkinan Prabowo mendapat perintah dari dirinya, Subagyo kembali mengatakan, perintah mem-BKO itu kini sedang dianalisis. "Kita ingin cepat, tapi bukan buru-buru, sehingga nantinya saran DKP kepada Pangab bisa menjadi pertimbangan yang baik," tambahnya.

Karena masih diproses, lanjutnya, setiap keterangan yang disampaikan harus diperkuat dengan data-data. Karena itu dia mengharapkan masyarakat memberi kesempatan kepada DKP untuk melaksanakan tugasnya secara tuntas.

Menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan perintah itu diberikan oleh Feisal Tanjung, atau mantan KSAD R Hartono, Jenderal Subagyo mengatakan hal itu tidak benar.

Apakah nanti ada jenderal lain yang dipanggil untuk diminta keterangannya? "Tidak ada, tetapi pemeriksaan ini akan dikembangkan dan dilanjutkan," jawabnya.

Bagaimana pengakuan Prabowo terhadap kasus orang hilang? Lagi-lagi Subagyo tak memberikan jawaban yang jelas. Dia hanya mengatakan, DKP perlu melihat mengapa Prabowo melakukan kegiatan ini. Sehingga akan diketahui, apakah hal-hal yang dilakukannya itu berkaitan dengan prosedur, disiplin, atau justru tabiat.

"Inilah yang akan menjadi pertimbangan nanti untuk disampaikan kepada Pangab. Tugas DKP kan memberikan pertimbangan kepada Pangab, sebelum memutuskan apa-apa."

Wartawan Terkecoh

Sejak pukul 07.15, puluhan wartawan dari dalam dan luar negeri sudah menunggu Letjen TNI Prabowo Subianto memasuki ruang sidang DKP. Menantu mantan presiden Soeharto itu memasuki halaman Mabes TNI AD dengan menggunakan jip Land Rover Discover No.3303-01 pukul 08.20.

Karena tak diizinkan memasuki halaman depan Mabes TNI AD, wartawan sejak pagi hingga pukul 15.45 hanya menunggu di luar pagar gedung itu. Ketika dibolehkan memasuki halaman depan, puluhan wartawan terlihat langsung mencari posisi yang kemungkinan besar dilalui Prabowo.

Saat jumpa pers dilaksanakan, sejumlah wartawan tetap memperhatikan kendaraan dinas Prabowo. Ketika jumpa pers selesai, kendaraan anggota DKP mulai meninggalkan halaman Mabes TNI AD, termasuk mobil dinas Prabowo. Tetapi wartawan tetap terkecoh, karena Prabowo tidak ada di dalam kendaraan dinasnya tersebut.

Dia diperkirakan meninggalkan gedung itu melalui pintu belakang atau pintu samping, atau meninggalkan halaman Mabes TNI AD dengan menggunakan kendaraan lainnya.

Mengenai lamanya pemeriksaan, sekitar tujuh jam, Subagyo membantah hal itu karena pemeriksaan berjalan alot.

Sebaliknya, DKP justru harus memperhatikan waktu-waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, pemeriksaan diskors selama waktu salat dan waktu makan.

Di samping itu, para anggota memerlukan waktu untuk melakukan koordinasi.

"Itu hak DKP untuk mempertajam sidang-sidang berikutnya," ujarnya.

Meski Prabowo, Chairawan, dan mantan Danjen Kopassus lainnya, Mayjen TNI Muchdi PR, telah diperiksa, DKP masih akan mengumpulkan keterangan untuk melengkapi informasi atau hal lain yang dibutuhkan.

Sehingga secepatnya dapat dihasilkan suatu kesimpulan un-

Hal. 17 .....
Kelas: .....

LSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

edia:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

rabowo Diperiksa Tujuh Jam

Menyangkut Prosedur, Disiplin, Tabiat

KARTA (Media): Mantan Dan-Kopassus Letjen TNI Prabowo ianto kemarin mulai diperiksa wan Kehormatan Perwira (DKP) am kaitan kasus penculikan se-lah aktivis prodemokrasi. Sela-sekitar tujuh jam jenderal ber-tang tiga itu diperiksa DKP yang impin langsung KSAD Jenderal I Subagyo.

emeriksaan di Mabes TNI-AD itu di-i sekitar pukul 09.00 WIB dan baru khir sekitar pukul 16.00 dengan masa sekitar dua jam untuk makan siang, dan konsolidasi DKP.

abowo tiba di Mabesad pada pukul WIB mengenakan pakaian dinas hari-turun dari mobil dinasnya Range Ro-Discovery warna hijau 3303-1, menan-ntan Presiden Soeharto itu menenteng iri sebuah koper kecil, tanpa tongkat ando seperti biasanya. Dia didampingi ng ajudannya menuju ruang peme-an.

tua DKP Jenderal TNI Subagyo da-lebih awal, disusul anggota DKP lain-berturut-turut Letjen TNI Djamari iago (Pangkostrad), Letjen TNI Yusuf negara (Irjen Dephankam), Letjen gum Gumelar (Gubernur Lemhan-Letjen TNI Susilo Bambang Yudho-(Kassospol), Laksdya TNI Sutjipto n Akabri), dan Wakil ketua DKP TNI Fachrul Razi (Kasum ABRI).

meriksaan Letjen TNI Prabowo agak wa. Berbeda dengan pemeriksaan n Danjen Kopassus Mayjen TNI di dan mantan Komandan Grup IV sus Kol Inf Chairawan, pemeriksaan wo juga menarik perhatian sejumlah masyarakat yang berkerumun di luar Mabesad ingin menonton.

Seperti diketahui, Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto membentuk DKP untuk memeriksa tiga pentolan pasukan elite TNI-AD Kopassus itu dalam kaitan kasus penculikan sejumlah aktivis prodemokrasi beberapa waktu lalu. Meski sejumlah korban penculikan sudah bebas, namun masih sekitar 14 korban yang belum diketahui nasib dan keberadaannya.

Danpuspom ABRI Mayjen TNI Syamsu mengatakan, para korban disekap di markas Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur.

Tiga hal

Seusai pemeriksaan, Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo kepada pers mengatakan pemeriksaan terhadap Prabowo terfokus pada tiga hal yakni prosedur, disiplin, dan tabiat.

"Hasil atas eksplorasi ketiga pokok persoalan itu yang nantinya akan disampaikan kepada Pangab guna dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan," ujarnya kepada pers dalam dan luar negeri.

Untuk itu, lanjut Subagyo yang juga mantan Dankopassus itu, untuk memperkuat keterangan yang disampaikan Prabowo, dalam pemeriksaan pihaknya juga menghadirkan mantan Dan Grup IV Kopassus Kol Inf Chairawan serta sejumlah saksi lainnya.

Ditanya apakah Prabowo mengakui dirinya yang memberi perintah penculikan, Subagyo mengatakan hal itu masih dalam proses. "Soal siapa yang memberi perintah dan siapa yang hanya melaksanakan perintah, itu masih dalam proses. Perintah itu yang dianalisis."

Untuk membuktikan benar tidaknya analisis itu, atau ada tidaknya penyimpangan pelaksanaan perintah, kata KSAD lagi, akan dibuktikan dengan adanya perkuatan maupun dukungan atau *cross check* dengan keterangan saksi serta perwira lainnya.

"Keterangan yang belum mutlak kebenarannya belum bisa diberikan, karena hal itu masih diproses dengan diperkuat keterangan-keterangan dari unsur lainnya," ujarnya sembari menambahkan, "Kita ingin cepat, tapi bukan buru-buru, sehingga nantinya saran Dewan Kehormatan Perwira kepada Pangab menjadi suatu pertimbangan yang baik."

Ditanya kemungkinan adanya jenderal lain yang dipanggil DKP untuk dimintai keterangan, Jenderal Subagyo menyatakan tidak ada.

"Jadi fokus pemeriksaan Prabowo itu pada perintah atau pada operasi lapangan," tanya wartawan.

Terhadap pertanyaan itu, mantan Pangdam IV/Diponegoro itu mengatakan pada apa yang dilakukan Danjen Kopassus. "Dalam pemeriksaan terhadap orang hilang, kita kan melihat, mengapa Letjen Prabowo melakukan itu. Pada dasarnya pokok-pokok pertanyaan adalah seperti itu, namun detailnya menyangkut prosedur, tabiat, dan disiplin," katanya lagi.

Selanjutnya Subagyo mengatakan dengan pemeriksaan terhadap Letjen TNI Prabowo, Mayjen TNI Muchdi, dan Kol Chairawan serta beberapa orang saksi pihaknya telah mendapatkan sejumlah keterangan.

Namun, lanjut dia, keterangan-keterangan itu masih dikumpulkan sehingga diharapkan pada waktu yang berikutnya bisa melengkapi keterangan-keterangan atau informasi yang dibutuhkan Dewan. "Dengan demikian, secepatnya nanti bisa dibuat kesimpulan untuk dijadikan saran kepada Pangab," ujarnya.

Menurut Subagyo, Dewan masih melanjutkan pemeriksaan terhadap terperiksa. "Kita masih melakukan serangkaian pemeriksaan baik terhadap para terperiksa, maupun para saksi," katanya.

Wartawan yang menunggu Prabowo keluar dari Mabesad terkecoh karena ternyata mantan Dan Sesko ABRI itu tidak ada dalam mobil dinasnya. Jenderal berbintang

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☑ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Kasus Penculikan Dan Orang Hilang

Pangab: Perwira Lebih Tinggi Lagi Bisa Diperiksa

Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto mengatakan untuk meneliti kasus penculikan dan orang hilang dan berkait dengan pem-BKO-an pasukan maka tidak menutup kemungkinan akan dimintai keterangan perwira yang lebih tinggi lagi. "Bisa yang bersangkutan, bisa yang lebih tinggi lagi, bisa dari komandan-komandan yang bersangkutan," kata Wiranto menanggapi hasil pemeriksaan terakhir terhadap Prabowo oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Senin (11/8) pagi.

Wiranto mengatakan bahwa ia akan menunggu saja hasil pemeriksaan lengkap Dewan Kehormatan Perwira (DKP) sehingga masalah Letjen Prabowo nanti semua bisa jelas. "Saya tidak bersedia memberikan pejelasan sepotong-sepotong berkaitan dengan masalah kasus Letjen TNI Prabowo Subianto tersebut."

Wiranto mengatakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan seusai membuka Rakornis Penerangan ABRI di Mabes ABRI Cilangkap, Selasa (11/8) pagi.

Ketika ditanya masalah BKO (Bawah Kendali Operasi) menurut Wiranto, BKO itu macam-macam dan tergantung levelnya. Satuan itu dalam rangka mem-BKO-kan satuan lainnya itu tergantung levelnya. Siapapun bisa memberikan BKO, ujarnya. Kalau ada satu komando atau satuan yang mendapat tugas-tugas tertentu dan akan menyusun suatu pengorganisasian untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Dalam tugas-tugas yang akan dilaksanakan tersebut, akan dibutuhkan perkuatan dari pasukan yang lain. Pasukan-pasukan yang lain itu kalau masuk dalam satuan itu namanya BKO, kata Wiranto.

"Jadi dia terlepas dari pada induk satuannya dan dia di bawah kendali operasi dari satuan baru yang dapat tugas itu," kata Wiranto. Terus siapa yang memerintah kepada Prabowo ? "*Lho* kalian jangan begitu. Nanti, itu belum selesai pemeriksaannya," jawab Wiranto.

Tidak Benar

rasi), itu dianalisis.

"Begini, perintahnya itu mem-BKO-kan, itu dianalisis. Dia menganalisis, yang itu hasil sampai sekarang dan lagi diproses," jawab Subagyo ketika jumpa pers kepada wartawan di halaman Mabesad Jakarta, Senin (10/8) sore seusai memimpin sidang DKP.

Jumpa pers yang dihadiri puluhan wartawan yang telah menunggu sejak pukul 08.00 WIB ini hanya berlangsung sekitar 10 menit. Dalam jumpa pers tersebut Subagyo didampingi Wakil Ketua DKP Letjen TNI Fachrul Razi, anggota DKP Letjen TNI Djamari Chaniago, dan Kadispenad Brigjen TNI I Dewa Putu Rai.

Pemeriksaan yang berlangsung secara tertutup dari pukul 09.00 WIB hingga 15.30 WIB ini menurut Wakil Ketua DKP Letjen TNI Fachrul Razi berlangsung dalam suasana terbuka dan terperiksa (Letjen Prabowo--**red**) juga memberikan keterangan apa adanya dan baik.

Seperti diberitakan *Pembaruan* Senin (10/8), Letjen Prabowo tiba di Mabesad pada pukul 08.18 WIB dengan mengenakan pakaian dinas harian (PDH) sambil menenteng kopor kecil. Saat memasuki pintu Mabes TNI Angkatan Darat ia disambut hormat oleh sejumlah prajurit yang sedang bertugas di tempat tersebut.

Sebelumnya, Ketua DKP yang juga Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Subagyo sudah tiba Mabesad pada pukul 06.30 WIB. Selang 1,5 jam tiba anggota DKP

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Langkah Penculikan Aktivis

tu Analisis Prabowo

Jakarta, Kompas

Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo mengutarakan, tidak pernah ada perintah yang dikeluarkan oleh pimpinan ABRI untuk melakukan penculikan dan penyekapan terhadap sejumlah aktivis. Apa yang dilakukan oleh mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) Letjen TNI Prabowo Subianto sehubungan dengan Kasus Orang Hilang (KOH), merupakan hasil analisisnya terhadap perintah Bawah Kendali Operasi (BKO) yang diterimanya.

Hal itu dikatakan Jenderal Subagyo menjawab wartawan, Senin (10/8), di Markas Besar TNI AD Jakarta, usai pemeriksaan DKP terhadap Letjen TNI Prabowo Subianto. Dalam secara jumpa pers yang berlangsung di halaman depan Mabes AD tersebut, Subagyo didampingi Wakil Ketua DKP Letjen TNI Fachrul Razi dan anggota DKP Letjen TNI Djamari Chaniago dan Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI I Dewa Putu Rai.

Walaupun tidak menjelaskan siapa yang mengeluarkan perintah BKO yang kemudian dianalisa oleh Letjen Prabowo — Jenderal Subagyo mengatakan, tidak benar jika Prabowo menerima perintah dari Panglima ABRI dan Kepala Staf TNI AD (KSAD), yang waktu itu dijabat oleh Jenderal TNI Feisal Tanjung dan Jenderal TNI Wiranto, untuk melakukan operasi penculikan. "Yang benar adalah, perintahnya itu adalah untuk mem-BKO-kan. Perintah BKO inilah yang dianalisis oleh Letjen Prabowo," tutur Subagyo, yang juga KSAD ini.

Menurut catatan *Kompas*, di lingkungan ABRI dikenal berbagai bentuk status bantuan terhadap suatu kekuatan/instansi tertentu, yakni apa yang disebut Bantuan Langsung (BL), Bawah Perintah (BP) serta BKO. Seluruh jenis bantuan itu berstatus sama, kecuali pada urusan administrasinya.

Pada BL dan BP misalnya, perintah untuk memberikan bantuan dapat dikeluarkan oleh komandan satuan yang akan diperbantukan tersebut. Sedangkan untuk urusan administrasi/logistiknya seluruhnya akan dibebankan kepada instansi yang dibantu.

Pada BKO, perintah untuk melakukan bantuan biasanya dikeluarkan oleh komandan setingkat lebih tinggi. Jika BKO ini diberikan kepada Kopassus sebagaimana yang dimaksud Jenderal Subagyo di atas, maka terdapat beberapa kemungkinan. Pertama, perintah BKO dikeluarkan Panglima ABRI (pada waktu itu). Kedua, BKO dikeluarkan oleh KSAD (pada waktu itu), dan kemungkinan lainnya, BKO dikeluarkan oleh Panglima Tertinggi ABRI. Hal ini yang tidak dijelaskan Jenderal Subagyo.

Berlangsung terbuka

Secara terpisah, Wakil Ketua DKP Letjen TNI Fachrul Razi kepada *Kompas* mengatakan, suasana selama berlangsungnya pemeriksaan terhadap Letjen Prabowo berlangsung terbuka. "Suasana terbuka. Si terperiksa (Letjen Prabowo — **Red**) juga memberikan keterangan apa adanya. Semuanya berlangsung baik," tutur Kasum ABRI ini.

Pemeriksaan DKP terhadap Letjen Prabowo Subianto dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Lebih dari seratus wartawan dalam dan luar negeri yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam kompleks Mabes AD terpaksa menunggu di luar pagar. Kehadiran sejumlah wartawan ini kemudian menarik perhatian dari para pengguna jalan dan ratusan warga masyarakat lainnya yang kemudian ikut bergabung dengan kerumunan wartawan tersebut.

Mantan Danjen Kopassus Letjen Prabowo Subianto tiba di Mabes AD pada pukul 08.20 WIB, mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) militer. Menantu mantan Presiden Soeharto ini datang dengan menumpang kendaraan Land Rover warna hijau metalik dengan pelat nomor Mabes ABRI 3303-01 yang di atasnya bertengger bintang tiga.

Putra dari begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo ini kelihatan sedikit gemuk. Pangkat bintang tiga dibahunya yang biasanya di kelilingi lingkaran merah, nampak sudah tidak ada. Hal itu menunjukkan bahwa lulusan Akabri 1974 ini sudah tidak memegang jabatan terakhirnya sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando (Sesko) ABRI.

Sebelum Prabowo tiba, sejak pukul 06.30 WIB, Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo HS (KSAD), Letjen TNI Djamari Chaniago (Panglima Kostrad) dan Letjen Yusuf Kertanegara (Irjen Dephankam) telah hadir lebih dulu. Menyusul kemudian berturut-turut Letjen TNI Lemhannas), Letjen TNI Bambang S Yudhoyono (Kassospol ABRI). Sedangkan Laksdya TNI TNI Achmad Sutjipto (Danjen Akabri) dan Letjen TNI Fachrul Razi (Kasum ABRI) nampak hadir 15 menit setelah kedatangan Prabowo.

Pemeriksaan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut baru berakhir pukul 15.00 WIB. Para wartawan kemudian diperbolehkan masuk ke halaman depan Mabes AD. Namun puluhan fotografer yang berusaha menemui Prabowo terpaksa kecewa karena Prabowo meninggalkan lokasi lewat jalan belakang dengan sebuah kendaraan sedan yang dikawal tiga kendaraan lainnya.

Menganalisis BKO

Menjawab pertanyaan wartawan mengenai apakah Letjen Prabowo melaksanakan perintah sendiri atau menerima perintah dari orang lain, Subagyo mengatakan, "Kasus orang hilang itu 'kan dilihat mengapa Letjen Prabowo melakukan kegiatan ini. Pada prinsipnya seperti itu. Dengan demikian, apa-apa yang dilakukan yang berkaitan dengan prosedur, disiplin serta tabiat inilah yang akan dijadikan pertimbangan nanti untuk disampaikan kepada Pangab," tuturnya.

Adanya perintah BKO ini, menurut Jenderal Subagyo, kemudian dianalisis oleh Prabowo. "Perintah itu dianalisa. Namun apakah analisa itu tepat atau tidak, atau bahkan dalam pelaksanaannya ada penyimpangan atau tidak, itu nanti akan dibuktikan dengan dukungan atau keterangan para saksi dan perwira lainnya," katanya. **(ama)**

Hal. 17 .....
Kelas: .....

ISAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Nama:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Subagyo: Prabowo terima perintah BKO

JAKARTA (Bisnis): Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo mengatakan tidak benar aksi penculikan aktivis dilakukan atas perintah atasan baik Panglima ABRI maupun KSAD yang menjabat saat itu kepada Letjen TNI Prabowo Subianto.

"Perintah atasan itu untuk mem-BKO-kan [Bawah Kendali Operasi]. Tidak benar, ada perintah atasan [untuk menculik aktivis]," ujarnya menjawab pertanyaan wartawan apakah Prabowo menerima perintah dari atasannya [Pangab atau KSAD] atau tidak.

Subagyo mengemukakan hal itu dalam konferensi pers di halaman depan Mabes AD Jl. Merdeka Utara, kemarin sore, usai memeriksa mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto.

Ketua DKP yang juga KSAD itu tidak menjabarkan lebih lanjut mengenai perintah BKO. "DKP masih memproses siapa yang memberi perintah BKO kepada Kopassus."

Dia juga tidak merinci apa yang dimaksudkan dengan BKO dalam kasus orang hilang tersebut. Apakah BKO berarti penugasan dilakukan oleh pimpinan Kopassus sendiri, atau anggota Kopassus diperbantukan kepada kesatuan lain.

"Perintah itu yang dianalisa, namun apakah analisa [terhadap perintah] tersebut tepat atau tidak, atau pelaksanaannya ada penyimpangan atau tidak, nanti akan dibuktikan dengan perkuatan-perkuatan ataupun dukungan-dukungan dari keterangan baik saksi maupun perwira lain. Semuanya masih dalam proses," tuturnya.

Subagyo menambahkan pemeriksaan terhadap Prabowo berkaitan dengan kasus orang hilang difokuskan kepada mengapa mantan Danjen Kopassus itu melakukan kegiatan tersebut.

"Pada prinsipnya seperti itu, sehingga apa-apa yang dilakukan yang berkaitan dengan prosedur, disiplin dan tabiat, inilah yang akan menjadi pertimbangan nanti yang diberikan kepada Pangab," katanya.

Dia menjelaskan DKP masih memproses hasil yang didapat dari pemeriksaan terhadap Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi Pr., Kol Inf Chaerawan, dan beberapa sumber lain. Proses itu, lanjutnya, masih harus diperkuat dengan keterangan dan unsur lain.

Ketua DKP mengungkapkan dalam pemeriksaan kemarin dihadirkan mantan Komandan Grup 4 Kol Inf Chaerawan dan beberapa saksi lain. Pemeriksaan masih akan dilanjutkan, katanya, namun waktunya belum ditentukan.

Kasum ABRI Letjen TNI Fachrur Razi, yang menjadi anggota DKP, menyatakan pemeriksaan terhadap Letjen TNI Prabowo berjalan lancar, terbuka, dan terus terang. Anggota DKP [Pangkostrad] Letjen TNI Djamari Chaniago menambahkan pemeriksaan berlangsung dari pk. 09.00 hingga sekitar pk. 16.00. **(04/is)**

Kelas: .....

PSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

la:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

KP: Prabowo tak Diperintah Menculik

ARTA — Dewan Kehormat-ra (DKP) kemarin memerik-n TNI Prabowo Subianto. meriksaan, Ketua DKP Jen-NI Subagyo Hadisiswoyo, kan bahwa Prabowo men-erintah hanya untuk mem-an (BKO: Bawah Kendali) namun kemudian dianali-iri menjadi sebuah tindakan kan.

tah mem-BKO-kan tersebut, Subagyo, datang dari atasan o kala itu, yakni Pangab Jen-NI Feisal Tanjung dan KSAD al TNI Wiranto. Penegasan itu secara tak langsung sekali-embantah bahwa kedua man-inggi ABRI tersebut telah me-ahkan penculikan kepada Pra-

a pemeriksaan Prabowo yang gsung sekitar tujuh jam itu — ukul 09.00 hingga pukul 16.00 — DKP juga menghadirkan Kolonel Inf Chairawan dan se-h saksi lainnya.

bowo tiba di tempat pemeriksa-ngan mengendarai Land Rover overy warna hijau gelap dengan or 3303-01. Mantan Danjen Ko-s yang pernah dijuluki *the rising* ini datang sekitar pukul 08.20 dengan memakai seragam mi-harian lengkap. Ditemani dua g prajurit, dia tampak melangkah ng sambil menenteng tas kecil, i ratusan wartawan dan masya-at berbaur menyaksikannya di besad.

ebelum Prabowo tiba, ketua dan erapa anggota DKP sudah me-gu sejak sebelum pukul 07.00 , yaitu Ketua DKP Subagyo HS AD), Letjen TNI Jamhari Cha-o (Pangkostrad), Letjen TNI n Gumelar (Gubernur Lemhan-Letjen Yusuf Kertanegara (Irjen hankam), Letjen TNI S Bam-Yudhoyono (Kassospol ABRI). angkan dua anggota DKP lain-, yaitu Laksdya TNI Ahmad Su-o (Danjen Akabri) dan Letjen Fachrul Razi (Kasum) tiba se-lima belas menit setelah keda-an Prabowo.

Menurut Subagyo, pemeriksaan kemarin sudah mengarah pada materi utama, yaitu penculikan sejumlah aktivis politik. Dalam hal ini DKP ingin mengetahui alasan menantu mantan Presiden Soeharto tersebut melakukan penculikan.

"Pada prinsipnya apa-apa yang dilakukan (Prabowo) yang berkaitan dengan kesalahan prosedur, disiplin, atau tabiat akan menjadi pertimbangan nanti untuk disampaikan kepada Pangab," jelas Subagyo.

Ditanya apakah saat melakukan penculikan Prabowo mendapat perintah dari atasannya, Subagyo menjawab bahwa yang menjadi perhatian DKP adalah analisis perintah yang dilakukan Prabowo itu sendiri. "Apakah analisis itu tepat atau tidak, apakah dalam pelaksanaannya menyimpang atau tidak. Di situlah nanti akan dibuktikan dengan perkuatan, dukungan, atau *cross check* dengan keterangan saksi atau perwira lain," lanjutnya.

Prabowo, kata Subagyo, mendapat perintah hanya untuk mem-BKO-kan (BKO: Bawah Kendali Operasi) namun kemudian dianalisa sendiri menjadi sebuah tindakan penculikan. Dengan ini, Subagyo sekaligus membantah bahwa mantan Pangab Jenderal TNI Feisal Tanjung dan mantan KSAD Jenderal TNI Wiranto telah memerintahkan penculikan kepada Prabowo.

Apakah analisis dengan tindakan penculikan itu salah? "Ini masih dalam proses. Sekali lagi ini masih dalam proses yang masih harus diperkuat dengan keterangan-keterangan lain. Jangan nanti gampang memberi keterangan yang belum mutlak kebenarannya," jawab Subagyo.

DKP, tegas Subagyo, ingin bekerja secara cepat tetapi tidak buru-buru. Sehingga, lanjutnya, keputusan yang dihasilkan dewan ini bisa menjadi pertimbangan yang tepat bagi Pangab untuk mengambil keputusan.

Meski sudah mengarah pada materi utama, Subagyo mengatakan bahwa tahapnya masih dalam rangka mengumpulkan keterangan-keterangan. Keterangan Prabowo dan Chairawan serta saksi-saksi tersebut, lanjutnya, akan dilengkapi pada sidang berikutnya. "Sehingga secepatnya nanti dapat disimpulkan untuk kemudian disarankan kepada Pangab," ujarnya.

Subagyo tidak bersedia menjelaskan siapa saksi yang diajukan pada sidang kemarin dan kapan DKP akan kembali menggelar sidang. Dia hanya berjanji akan mengumumkan perkembangan hasil kerja dewan yang dipimpinnya secara transparan.

Setelah pemeriksaan selesai, wartawan yang menunggu Prabowo tak menemukannya. Berbeda dengan saat masuk, Prabowo tampaknya keluar dari ruang sidang melalui pintu belakang dan berusaha menghindar dari wartawan. Saat beberapa wartawan melihat dan mencoba mengejar, dia berjalan menuju arah lain di dalam kompleks gedung Mabesad.

Dia berhasil meninggalkan Mabesad dengan mobil milik salah seorang staf Mabesad sekitar pukul 15.40 WIB. Sementara mobil yang dia bawa pagi harinya, baru meninggalkan kompleks Mabesad 20 menit kemudian tanpa Prabowo. ■ bsa

Kelas: .....

LSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

dia:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Prabowo Mulai Diperiksa

Jakarta, 10 Agustus

Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Letjen TNI Prabowo Subianto, Senin (10/8) pagi di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad) Jakarta mulai pukul 09.00 pagi diperiksa oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dipimpin oleh Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo.

Prabowo tiba di Mabesad pada pulul 08.18 WIB dengan mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) sambil menenteng koper kecil. Saat memasuki pintu Mabes TNI Angkatan Darat ia disambut hormat oleh sejumlah prajurit yang sedang bertugas di tempat tersebut.

Sebelumnya, Ketua DKP yang juga Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Subagyo sudah tiba di Mabesad pada pukul 06.30. Selang 1,5 jam tiba anggota DKP, Letjen TNI Djamari Chaniago (Pangkostrad), 5 menit kemudian tiba anggota DKP lainnya Letjen TNI Yusuf Kartanegara (Irjen Dephankam).

Kemudian secara berturut-turut datang anggota DKP lainnya yaitu Letjen TNI Agum Gumelar (Gubernur Lemhannas), Letjen TNI S Bambang Yudhoyono (Kassospol ABRI), Laksdya TNI Achmad Sutjipto (Danjen AKABRI), dan Wakil Ketua DKP Letjen TNI Fachrul Razi (Kasum ABRI).

Sebelumnya DKP telah memeriksa Kol Inf Chairawan yang mantan Komandan Grup 4 Kopassus pada Selasa (4/8) lalu dan hari berikutnya, Rabu (5/8) dilanjutkan pengecekan ke lapangan di Mako Kopassus Cijantung. Pemeriksaan atas mantan Danjen Kopassus, Mayjen TNI Muchdi PR juga telah dilakukan oleh DKP pada hari Kamis (6/8).

Jenderal TNI Subagyo HS, menanggapi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Kol Inf Chairawan dan Mayjen Muchdi PR menjelaskan, bahwa sebagian yang ditanyakan tim DKP diakui kedua orang itu, tapi sebagian belum.

''Mereka (Chairawan dan Muchdi - **Red.**) menyatakan bahwa dalam kasus ini bukan menculik tapi menjalankan perintah,'' kata Jenderal TNI Subagyo HS kepada wartawan di Mabesad Jumat lalu. Menurut Subagyo, kecenderungan hasil pemeriksaan ada yang diakui dan ada yang belum. ''Kita melihat dari dua sisi. Kasus orang hilang ada yang menilai diculik atau diambil. Tapi dari yang melaksanakan tugas, dia menilainya dari melaksanakan tugas. Di situlah nanti kita lihat,'' jawab Subagyo kepada wartawan Jumat (7/8) lalu.

Contohnya, menurut ketua DKP itu, dari yang melaksanakan tugas, dipandang melaksanakan tugas. ''Nanti alasannya tugas itu dari mana, kita lihat. Sehingga kita melihatnya tidak satu-satu potong. Itulah nanti kita lihat secara total sehingga kita bisa melihat di mana letak kesalahannya,'' kata Subagyo.

Ditambahkannya, apakah kesalahan prosedur atau apakah ketidak disiplinan atau memang tabiat dari perwira atau pelaksana. Di situ nanti kita lihat kesalahannya ataupun yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dalam suatu operasi dan prosedur.

Ketika ditanya wartawan, mereka melaksanakan tugas. Tugas itu dari siapa? Menurut Subagyo, melihat tingkatannya Chairawan ke bawah itu kan tingkat pelaksana yang bawahan. Perintahnya dari siapa menurut Subagyo belum terjawab karena dia belum bertemu Prabowo. (M-11)

..... / .....
Kelas: .....

LSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☑ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

▲ Dua Saksi Diperiksa

DKP Kedatangan "Tamu Istimewa"

Jakarta, Rabu, Merdeka

Dewan Kehormatan Perwira (DKP) kemarin hanya melakukan sidang singkat selama kurang lebih tiga jam, dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB. Sidang yang dipimpin langsung Ketua DKP Kasad Jenderal Subagyo HS itu berlangsung non-stop dan hanya memeriksa dua orang saksi perwira pertama Kopassus.

Pemeriksaan itu, menurut sumber *Merdeka* untuk kepentingan kelengkapan informasi atau keterangan yang sebelumnya sudah diberikan, terutama oleh Letjen Prabowo Subianto, Mayjen Muchdi dan Kolonel Chairawan. "Sekaligus memberikan keterangan untuk saling memperkuat keterangan sebelumnya," ujar sumber tersebut.

Menurut rencana Rabu ini (12/8), DKP juga akan memeriksa kembali dua orang terperiksa dan beberapa orang saksi. Namun sumber itu tak bersedia menyebutkan siapa kedua perwira itu. "Kita lihat saja nanti," tambahnya.

Kemarin, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) — tempat sidang DKP — itu juga kedatangan "tamu istimewa". Mereka adalah keluarga korban penculikan yang sampai saat ini belum jelas nasibnya. Empat keluarga dari 14 korban yang hilang itu datang untuk berdialog dengan DKP. Sayangnya, anggota DKP sudah selesai bersidang.

Mereka adalah keluarga dari Noval Alkatiri, Yani Afri, Ucok Munandar Siahaan dan Yadin Muhidin. Mereka didampingi bekas korban penculikan Raharjo Waluyo Jati, Feisol Reza, Aan Rusdianto dan anggota Kontras (Komite Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Sirapra'yuna dan Victor Dacosta.

Rombongan yang datang dengan menggunakan kendaraan pribadi dan taksi itu tiba pukul 12.30. Mereka tidak bisa bertemu langsung dengan anggota DKP yang setengah jam sebelumnya telah selesai menjalankan sidang di Gedung Utama Mabesad. Seluruh anggota DKP sudah meninggalkan Mabesad, kecuali sekretaris DKP, Letjen Djamari Chaniago (Pangkostrad).

Keluarga korban itu datang sambil membawa 12 foto korban penculikan dan hanya berdiri di pintu gerbang depan. Namun oleh pihak keamanan mereka diminta masuk ke markas melalui pintu belakang. Kehadiran mereka cukup mendapat perhatian warga setempat dan kendaraan yang lalu lalang di Jl Medan Merdeka Barat dan Jl Veteran.

Di ruang lapor tamu mereka ditemui oleh Komandan Detasemen Markas AD Kolonel Supardi yang menyatakan bahwa Kasad Jenderal Soebagyo HS tak bisa menemui, karena jadwalnya yang padat temasuk harus menemui tamu dari luar negeri.

Menurut Supardi apa-apa yang hendak disampaikan oleh pihak keluarga korban berkaitan tentang kasus penculikan lebih tepat jika disampaikan ke Puspom ABRI, karena semua data-data yang disampaikan ke Puspom akan sampai juga ke DKP dan di proses.

"Kami akan menyediakan kendaraan untuk mengantarkan saudara-saudara ke sana," kata Supardi.

"Kedatangan kami hanya minta kejelasan DKP bagaimana nasib anggota keluarga kami. Kami ingin dialog. Selama ini keluarga hanya disuruh menunggu, itu yang bikin *stres*," ujar B Siahaan, ayah dari Ucok Munandar Siahaan.(WR/PN)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☑ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA		1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA		2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA		3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA		4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN		5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Pangab: Perintah BKO dari perwira yang lebih tinggi

JAKARTA (Bisnis): Menhankam/ Pangab Jenderal TNI Wiranto mengatakan perintah Bawah Kendali Operasi (BKO) dikeluarkan oleh perwira yang pangkatnya lebih tinggi kepada pihak yang menerima perintah BKO tersebut.

"BKO itu macam-macam, tergantung levelnya. Satuan dalam mem-BKO-kan satuan lain tergantung levelnya, siapapun bisa memberikan BKO," kata Pangab menjawab pertanyaan wartawan di sini, kemarin.

Menurut Pangab, BKO terjadi jika ada satu komando atau kesatuan yang mendapat tugas tertentu, terkadang kesatuan tersebut meminta perkuatan pasukan dari satuan lain dalam melaksanakan tuganya.

"Kalau ada komando atau kesatuan yang mendapat tugas tertentu, ia akan menyusun suatu pengorganisasian untuk melaksanakan tugas itu. Dalam tugas itu, ia membutuhkan pasukan lain, pasukan lain inilah yang namanya BKO," katanya.

Pasukan yang di-BKO-kan itu, katanya, terlepas dari induk kesatuannya, kemudian mereka di bawah kendali operasi dari satuan baru yang mendapat tugas itu.

Ketika ditanyakan dalam konteks kasus Prabowo, Pangab mengatakan "Saya tidak mau menjelaskan sepotong-sepotong. Kita tunggu hasil DKP ini sehinga utuh semua bisa dijelaskan. Kalau hanya mengulas sepotong, bisa keliru," katanya.

Masalah BKO dalam kasus penculikan pertama kali dikemukakan kepada pers oleh Ketua DKP/KSAD Jenderal TNI Subagyo HS usai memeriksa Prabowo dan beberapa saksi di Mabes AD Senin.

KSAD menjelaskan Prabowo memperoleh perintah mem-BKO-kan yang kemudian dianalisis sendiri oleh Prabowo. Namun tidak diterangkan siapa pemberi perintah tersebut. Kendati demikian Subagyo membantah kemungkinan perintah itu datang dari Pangab atau KSAD yang waktu itu dijabat Feisal Tandjung dan Wiranto.

Tidak disinggung

Di tempat terpisah Kapuspom ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalal mengatakan saat memeriksa Prabowo, Puspom tidak menyinggung masalah BKO. Oleh karena itu, ujarnya, Puspom tidak tahu menahu mengenai masalah itu.

"Puspom hanya memeriksa Letjen TNI Prabowo dari segi tindak pidana yang dilakukannya berkaitan dengan kasus penculikan, bukan dengan ada tidaknya BKO. Tugas dan wewenang Puspom memang demikian," kata Syamsu kepada wartawan usai menerima aktivis Hendrik D. Sirait yang diculik sehubungan kasus 27 Juli 1996.

Dia menambahkan sampai kini Puspom belum dapat memberikan keterangan mengenai 14 korban lain. Kendati demikian, lanjutnya, berbagai upaya pencarian terus dilakukan termasuk mencek tiga kerangka yang ditemukan di Kepulauan Seribu yang diduga sebagai kerangka korban penculikan.

Keterangan yang diberikan Hendrik, kata Syamsu, akan dipakai untuk menelusuri lebih lanjut aksi penculikan dan untuk melihat keterlibatan oknum lain seperti yang berasal dari Intel Kodam.

Dengan adanya informasi baru tersebut, ujar Syamsu, mantan Pangdam Jaya Mayjen Sutiyoso dan Mayjen Sjafrie Sjamsuddin bisa saja dipanggil untuk dimintai keterangan. Apalagi, lanjutnya, Sutiyoso pernah mengatakan bersedia dipanggil.

Sementara itu, keluarga korban penculikan yang mendatangi Mabes AD gagal bertemu Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo HS. Mereka berharap KSAD dapat memberikan keterangan mengenai nasib keluarga masing-masing.

Mereka akhirnya diterima Aspam KSAD Mayjen TNI M. Noor Aman. Pertemuan itu tertutup, dan wartawan tidak diperkenankan memasuki ruangan pertemuan. (04)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☑ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Pangab: DKP Bisa Memeriksa Atasan Prabowo

JAKARTA — Menhankam/ Pangab Jenderal TNI Wiranto menjelaskan, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) bisa saja memeriksa perwira di atas mantan Danjen Kopassus, Letjen TNI Prabowo Subianto, berkaitan dengan kasus orang hilang. Itu, katanya, karena siapa pun komandan satuan bisa melakukan Bawah Kendali Operasi (BKO) kepada satuan lainnya.

"Bisa yang bersangkutan, bisa yang lebih tinggi lagi, bisa dari komandan-komandan yang bersangkutan," ujar Wiranto menjawab pertanyaan apakah perwira yang lebih tinggi bisa diperiksa DKP, seusai membuka Rakernis Penerangan ABRI di Mabes ABRI Cilangkap, Jakarta, kemarin.

Sebagai Danjen Kopassus saat terjadi penculikan terhadap sejumlah aktivis, atasan Prabowo adalah Jenderal Feisal Tanjung sebagai Pangab dan Wiranto sebagai Kepala Staf TNI-AD (KSAD). Secara administratif dia juga mempunyai atasan Presiden Soeharto sebagai Panglima Tertinggi ABRI.

Seperti diberitakan di harian ini kemarin, Ketua DKP Jenderal Subagyo Hadisiswoyo menyatakan bahwa Prabowo tidak mendapat perintah Pangab (Jenderal Feisal Tanjung) dan KSAD (Jenderal Wiranto) untuk menculik sejumlah aktivis. Dia, katanya, hanya mendapat perintah untuk mem-BKO-kan pasukannya yang kemudian dianalisis sendiri menjadi sebuah tindakan penculikan.

Dijelaskan Wiranto, BKO dilakukan bila ada satu komando atau kesatuan yang mendapat tugas-tugas tertentu. Satuan tersebut, katanya, kemudian akan menyusun pengorganisasian untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Dan itu, lanjutnya, bisa dilakukan di tingkat satuan manapun.

"Dalam melaksanakan tugas-tugas itu satuan tersebut akan membutuhkan perkuatan dari pasukan-pasukan yang lain. Nah, pasukan-pasukan lain itulah yang kalau masuk ke kesatuan tadi namanya 'Bawah Kendali Operasi' atau BKO. Dia terlepas dari induk satuannya dan kemudian berada di bawah kendali satuan baru yang mendapat tugas itu," jelas Wiranto.

Ditanya siapa yang berhak memberi perintah BKO, Wiranto menjawab, "Lho, bukan begitu. Kamu itu *nggak* jelas tapi pura-pura tahu. Itu nanti [akan diketahui]."

Wiranto kemudian segera menambahkan, "Yang mengeluarkan BKO itu macam-macam, tergantung levelnya. Kalau satuan peleton ya komandan peleton. Satuan itu dalam rangka mem-BKO-kan satuan lainnya tergantung levelnya. Siapa pun bisa memberikan BKO. Siapa pun!"

Menanggapi pertanyaan tentang BKO ini, Wiranto tampak sedikit jengkel. "Saya tidak akan menjelaskan sepotong-sepotong, silakan tunggu hasil DKP ini sehingga secara utuh bisa dijelaskan. Kalau mengulas sepotong, bisa keliru. Saya ingatkan ini," katanya.

Ditanyakan apakah benar Prabowo salah menganalisis perintah BKO ini, Wiranto menjawab dengan nada tinggi, "Kamu tanya Prabowo sendiri, kok tanya saya!"

Perkembangan pemeriksaan DKP atas Prabowo juga mendapat tanggapan Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras). Kordinator Kontras, Munir SH, menilai sangatlah janggal bila KSAD Subagyo mengatakan bahwa tindak pidana penculikan dilakukan atas dasar penafsiran dari sebuah perintah. Sepanjang yang diketahuinya, lanjut Munir, sebuah perintah di ABRI sifatnya harus jelas dan tidak pernah memberikan peluang untuk ditafsirkan.

"Melihat pemeriksaan DKP, Kontras menganggap hasilnya terlihat satu arah saja. Orang luar dibiarkan begitu saja untuk menafsirkan apa isi dan hasil pemeriksaan. Dan sebagai jalan keluar terbaiknya, kami sangat mengharapkan bila Prabowo diperiksa di depan Mahkamah Militer saja," kata Munir, di kantor YLBHI, Jakarta, kemarin.

Munir mengatakan Kontras menganggap DKP hanyalah sekadar rapat internal ABRI untuk mengambil keputusan terhadap suatu persoalan. "Dengan melihat gelagat itu, maka kami sekarang menutut kepada DKP agar mengambil tiga tindakan. Pertama, harus bisa segera menjelaskan mengenai keberadaan nasib 14 korban penculikan. Kedua, merekomendir sebuah tindakan atau sanksi yang akan dijatuhkan kepada para perwira yang kini duduk sebagai tersangka. Ketiga, DKP harus bisa segera mencari jawab mengenai ada dan tidaknya keterlibatan perwira yang lebih atas dalam kasus penculikan," tegas Munir.

DKP sendiri kemarin tidak melakukan sidang. Namun, anggota DKP selain Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono dan Letjen TNI Agum Gumelar mengadakan pertemuan tertutup di Mabesad. Tidak diperoleh keterangan apakah mereka memang melakukan sidang.

Pada saat mereka mengadakan pertemuan, perwakilan 12 keluarga korban yang masih belum jelas nasibnya mendatangi Mabesad.

Tampak hadir di Mabesad kemarin antara lain keluarga Yani Avri, keluarga Noval Alkatiri, keluarga Deddy Hamdun dan ditemani dua anggota Kontras. Keinginan mereka untuk menemui anggota DKP tidak terpenuhi. Mereka hanya ditemui Komandan Detasemen Markas Kolonel CPM Supardi.

■ bsa/ttw/uba

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA		1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA		2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA		3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA		4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN		5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Soal Korban yang Masih Disekap:

Pangab Harus Penuhi Janji

Serambi-Jakarta

Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) DPR-RI, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan kelompok-kelompok mahasiswa Aceh kemarin mendesak Panglima ABRI supaya segera merealisir janjinya untuk melepaskan korban-korban penculikan atau tahanan-tahanan tak bersalah yang diduga masih disekap dalam camp-camp militer di Aceh.

Seperti diberitakan kemarin, sejumlah istri maupun anggota keluarga dari korban-korban penculikan sepanjang 1998 di Pidie, belakangan mulai gelisah. Mereka meminta sebelum pasukan ditarik, korban yang masih hidup segera dilepas.

Salah satu pernyataan ataa janji Pangab di Lhokseumawe 7 Agustus lalu adalah berupaya membebaskan tapol dan napol Aceh pada 17 Agustus 1998. Kecuali bagi yang terlibat kriminal berat.

FPP DPR-RI kepada pers di gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta kemarin menyatakan, "kasus Aceh" bukan salah prosedur, ekses, kasuistis, indisipliner oknum, tidak ada perintah, bukan kebijakan, dan rupa-rupa ungkapan apologetik lainnya. "Sebab, kenyataannya, bentuk-bentuk pelanggaran HAM dan hukum di Aceh berlangsung selama kurang lebih delapan tahun mulai akhir 1989 sampai pertengahan Mei 1998, dan tidak ada upaya serta sikap tegas institusi-institusi dan Pimpinan Militer untuk menghentikannya, kecuali berhenti karena ada reformasi," kata Wakil Sekretaris FPP DPR H Lukman Hakiem dan Wakil Ketua FPP HM Djufrie Asmoredjo.

Pernyataan ini tertuang dalam laporan hasil Tim Pencari Fakta (TPF) DPR ke Aceh dari FPP. FPP menyertakan dua orang anggotanya, Dr H Muchtar Aziz dan H Ghazali Abbas Adan. TPF sendiri dipimpin Wakil Ketua DPR bidang Korpol Hari Sabarno beranggotakan delapan orang dari semua fraksi Dewan.

Ghazali Abbas mengatakan, FPP DPR menaruh hormat dan penghargaan setinggi-tingginya atas keputusan pemerintah mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh.

"Meskipun DOM di Aceh telah dicabut, tapi bagi FPP DPR tetap meminta pemerintah untuk melakukan beberapa hal, antara lain pelaku dan aktor intelektualnya harus diusut tuntas dan transparan serta diadili sesuai hukum yang berlaku, karena selama operasi militer di Aceh telah terjadi pelanggaran hukum dan HAM," kata Abbas.

Tuntutan FPP lainnya adalah agar pemerintah menyantuni para janda dan yatim piatu korban, membangun kembali rumah-rumah yang dibakar, mengobati korban yang masih sakit-sakitan akibat penyiksaan dan secepatnya melepaskan semua yang masih disekap, baik napol maupun tapol.

Dari data dan fakta yang diperolehnya, FPP berkesimpulan bahwa selama operasi militer di Aceh telah terjadi pelanggaran hukum dan HAM terhadap warga negara dalam bentuk penangkapan/penculikan, penyekapan di kamp-kamp militer, penganiayaan, pembunuhan, penyanderaan disertai penyiksaan, pemerkosaan, penjarahan harta benda dan pembakaran rumah.

FPP, kata Lukman Hakiem, banyak menerima laporan/pengaduan masyarakat secara lisan maupun tulisan, bahwa di beberapa kabupaten di Aceh seperti Aceh Timur, Aceh Utara dan Pidie banyak terjadi kasus orang hilang dan ditemukannya mayat-mayat bekas tindak kekerasan di pinggir-pinggir jalan, di samping masjid, dalam jurang serta sungai.

Kontras

Di Banda Aceh, Koordinator Badan Pekerja Kontras Aceh Iqbal farabi SH, juga menyatakan, pihaknya akan memprioritaskan pada upaya mencari korban-korban hidup yang masih disekap. "Hari ini (Rabu 12/8), Koordinator Badan Pekerja Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan-*red*) Pusat Munir SH akan tiba di Banda Aceh. Dan, kami sudah merencanakan memprioritaskan upaya pembebasan korban penculikan yang dilapor masih ada di sejumlah tempat," kata Iqbal.

Korban-korban yang diduga masih dalam penyekapan, menurut laporan pihak-pihak keluarga ke DPRD dan LSM-LSM, adalah yang "diculik" dalam tahun 1998 (bahkan sampai bulan Mei 1998). Mereka, disinyalir masih hidup dan kini disekap di beberapa tempat di Aceh Utara, Aceh Timur, dan Pidie.

Dalam "Surat Terbuka"-nya, Kontras Aceh kemarin juga menyatakan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan operasi militer di Aceh adalah persoalan HAM secara internasional yang memerlukan penanganan serius semua pihak. Ini sama sekali bukan hanya persoalan intern bangsa Indonesia.

Kontras Aceh memandang bahwa pencabutan status Daerah Operasi Militer tersebut bukanlah titik akhir, melainkan adalah merupakan tonggak awal kerja-kerja penegakan HAM di Aceh.

Karena itu, Kontras akan mengajukan kasus-kasus tersebut ke Pengadilan Militer dan/atau Pengadilan Sipil secara pidana dan/atau perdata sesuai dengan kewenangan mengadilinya masing-masing.

Bertekad untuk tidak hanya berhenti pada pelaku (*dader*), melainkan akan melakukan kerja-kerja penuntutan dan upaya pengadilan terhadap semua pihak yang secara hukum turut bertanggungjawab., meliputi pihak yang bersama-sama membantu (*koneksitas*), meminta pemberlakuan DOM di Aceh, terlebih institusi dan/atau individu yang secara struktural berperan sebagai pengambil kebijakan dalam pelaksanaan operasi militer di Aceh sehingga turut bertanggungjawab terhadap terjadinya kejahatan pelanggaran HAM tersebut.

Kontras memandang bahwa Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi ABRI

ggungjawab terhadap terjadi-
jahatan pelanggaran HAM
berlangsung operasi mi-
Aceh. Karena itu menun-
Mahkamah Internasional
uk mengadili Soeharto, Presi-
epublik Indonesia pada
pemberlakuan Daerah
rasi Militer di Aceh sebagai
jahat perang yang bertang-
wab terhadap penyiksaan,
kosaan, pembantaian dan
langan orang secara paksa
forced disappearances) secara
ssal di Aceh selam kurun
pemberlakuan Daerah
si Militer di Aceh.

KARMA

Komite Aksi Reformasi Maha-
wa Aceh (KARMA) juga mende-
mpinan ABRI untuk sece-
a membebaskan orang-or-
g yang masih ditahan di camp-
m militer. Selain itu, KARMA
nta aparat penegak hukum
secara sungguh-sungguh
mengabadikan dirinya untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat yang menjadi saksi korban maupun saksi mata beserta keluarganya yang telah mengungkapkan fakta dan bukti pelanggaran HAM dan Hukum di Aceh sebagai ekses dari operasi militer.

Pernyataan KARMA itu disampaikan saat beraduensi kepada FPP DPR RI, kemarin di Jakarta. Delegasi KARMA diterima pimpinan FPP Zarkasih Noer yang didampingi Ghazali Abbas Adan dan Dr Muchtar Aziz yang juga anggota TPF bentukan DPR RI untuk kasus Aceh.

Selain menyampaikan keprihatinan atas tragedi yang terjadi di Aceh, dalam kesempatan itu KARMA juga meminta pemerintah untuk mengusut tuntas dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan Hukum sesuai ketentuan dan rasa keadilan masyarakat.

Tindakan ini perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, dengan cara pemulihan nama baik keluarga korban; menyantuni janda-janda yang suaminya meninggal tak wajar dan wanita-wanita korban perkosaan; pemerintah menanggung biaya hidup dan pendidikan anak-anak yatim yang ayahnya meninggal tak wajar; pemerintah mengembalikan/mengganti harta benda milik masyarakat yang dirampas oknum aparat selama operasi militer; pemerintah menanggung biaya pengobatan korban pelanggaran HAM dan Hukum yang cacat fisik maupun mental.

Koordinator KARMA M Taufiq Abda menyatakan, sedianya kehadiran mereka di DPR RI untuk bertemu Wakil Ketua DPR/MPR Hari Sabarno yang juga Ketua TPF kasus Aceh. "Namun dengan alasan yang tidak jelas kami tidak dapat bertemu yang bersangkutan. Padahal surat kami ajukan secara resmi," kata Taufiq dalam nada kecewa.

Gagal bertemu Hari Sabarno KARMA berniat bertemu FKI dan FABRI. "Tapi juga gagal, ujar Taufiq lagi. Akhirnya, hanya FPP yang bersedia menerima delegasi mahasiswa dari 24 perguruan tinggi di Aceh itu.

Dalam kesempatan itu, KARMA menyebutkan, akibat oeprasi militer telah menciptakan kemunduran perekonomian masyarakat dan sekaligus mengganggu stabilitas mentalitas rakyat.

"Kami mengharapkan di masa mendatang tidak ada lagi darah yang tumpah, tidak ada lagi air mata duka, dan tidak ada lagi dendam," kata Taufiq mengutip isi pernyataan KARMA. **(son/fik/war/li)**

ELSAM P L T

Media:

- BISNIS INDO
- JAKARTA PO
- JAWA POS
- KOMPAS
- KD. RAKYAT
- MEDIA INDO

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA		1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA		2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA		3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA		4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN		5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Wiranto Tolak Ungkap yang Perintah Prabowo

Jakarta, Kompas

Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI (Menhankam/Pangab) Jenderal TNI Wiranto berharap semua pihak menunggu hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tentang siapa yang memberikan perintah Bawah Kendali Operasi (BKO) kepada mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD (Danjen Kopassus) Letjen TNI Prabowo Subianto sehubungan dengan Kasus Orang Hilang (KOH).

"Saya tidak mau menjelaskan potong-sepotong. Kita tunggu saja hasil pemeriksaan DKP," kata Wiranto menjawab wartawan, hari Selasa (11/8), usai membuka Rapat Koordinasi Teknis Penerangan ABRI 1998 di Markas Besar (Mabes) ABRI, Cilangkap.

Sehari sebelumnya, Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo mengutarakan, pimpinan ABRI tidak pernah mengeluarkan perintah kepada Kopassus untuk melakukan penculikan dan penyekapan terhadap sejumlah aktivis. Apa yang dilakukan Prabowo sehubungan dengan kasus orang hilang merupakan hasil analisisnya terhadap perintah Bawah Kendali Operasi (BKO).

Siapa pun bisa

Menurut Wiranto, yang dimaksud BKO adalah jika ada satu komando atau kesatuan yang mendapat tugas-tugas tertentu, satuan itu akan menyusun pengorganisasian untuk melaksanakan tugas-tugas itu. "Dalam tugas yang akan dilaksanakan itu, satuan ini membutuhkan penguatan dari satuan-satuan tugas yang lain. Pasukan-pasukan yang lain inilah kalau masuk dalam kesatuan tadi — namanya BKO. Jadi dia terlepas dari induk satuannya, kemudian berada di bawah kendali operasi satuan baru tempatnya bergabung," paparnya.

Ditanya siapa yang berhak memberikan perintah BKO kepada Prabowo, Wiranto mengatakan, yang mengeluarkan perintah BKO tergantung tingkatannya. "Itu tergantung tingkatannya. Siapa pun bisa memberikan BKO," katanya.

Ditanya lagi siapa yang bisa memberikan perintah BKO kepada Kopassus, Wiranto mengatakan, "Nanti kita tunggu hasil hasil pemeriksaaan selengkapnya dari DKP. Kalau kamu hanya mengelola sepotong bisa keliru. Jangan bicara BKO terputus dari keseluruhan masalah." Menjawab pertanyaan apakah itu berarti ada perwira yang lebih tinggi lagi yang memberikan perintah BKO sehingga perwira itu akan diperiksa DKP, Wiranto mengatakan, "Bisa perwira yang bersangkutan, bisa perwira yang lebih tinggi lagi, bisa juga dari komandan-komandan yang bersangkutan. Nanti tunggu hasil DKP," katanya.

Ilustrasi Mokodongan

Mengenai BKO ini, Staf Ahli Bidang Ideologi Politik Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Mayjen TNI Abdul Wahab Mokodongan, secara terpisah, Selasa, memberikan ilustrasi. Dalam struktur ABRI, katanya, memang ada prosedur bantuan yang diberikan untuk kesatuan lain yang disebut BKO itu.

"Misalnya, ada pimpinan, sebut saja D, memberikan perintah pada satuan A agar sebagian dari pasukan yang ada pada satuannya di-BKO-kan atau ditugaskan bergabung ke satuan B." Ini berarti, semua pengendalian operasi dikendalikan satuan B.

"Sebagian orang dari satuan A itu sekarang menjadi tanggung jawab si B. Mau diapakan saja terserah si B. Jika nanti ada orang-orang satuan A di bawah kendali B berbuat sesuatu, maka hal itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab B yang diberi kendali BKO oleh pimpinan D," katanya.

Menurut Mokodongan, ada beberapa kemungkinan proses keluarnya perintah BKO itu. Pertama, karena satuan B tidak mampu mengatasi masalah, sementara masalah yang harus diselesaikan itu sangat mendesak dan harus segera diselesaikan. Kedua, karena satuan B tidak dapat melakukan tugasnya berhubung jumlah anggotanya tidak cukup atau secara profesional tidak mampu melaksanakan tugas.

Ia menambahkan, selain atas perintah pimpinan D, proses BKO bisa saja tidak diketahui pimpinan D itu. "Misalnya, karena mendesak, maka atas nama D, staf-staf di lingkungan D memerintahkan BKO. Coba A, keluarkan satu regu untuk B," katanya.

Menurut prosedur, kata Mokodongan, staf yang memerintahkan BKO itu seharusnya segera melapor pada pimpinan D, sehingga pimpinan mengetahui proses BKO tersebut. "Tapi ada juga yang bertindak di luar sistem, staf memerintahkan BKO tanpa sepengetahuan pimpinannya. Itu bisa saja terjadi," ujarnya.

Korban penculikan

Sementara itu, korban penculikan dan keluarga korban penculikan, Selasa, mendatangi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di Markas Besar Angkatan Darat (Mabes AD) di Jakarta. Namun mereka tidak berhasil bertemu dengan Ketua atau anggota DKP. Meski demikian, para korban dan keluarga korban akan tetap menuntut untuk bisa bertemu DKP.

Kepada wartawan, korban penculikan Rahafjo Waluyo Jati dan adik kandung Noval Alkatiri, Ny Eri, menjelaskan, mereka sejauh ini melihat DKP lebih memprioritaskan pekerjaannya pada mengungkap siapa yang bersalah dan kesalahan apa yang telah dilakukan sejumlah perwira tinggi ABRI, sedangkan kejelasan nasib 12 korban penculikan lainnya terkesan diabaikan.

Kedatangan rombongan korban dan keluarga korban yang seluruhnya berjumlah 11 orang ke Mabes AD, akhirnya diterima Asisten Pengamanan (Aspam) KSAD, Mayjen TNI M Noor Aman. Namun Aspam KSAD tidak bisa menjawab pertanyaan korban maupun keluarga korban mengenai bagaimana agenda kerja DKP, ataupun mungkinkah bagi korban dan keluarga korban bertemu DKP. Menurut Jati, Aspam KSAD itu menyatakan akan menyampaikan pertanyaan itu pada Ketua DKP. **(ama/uu/oki)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Prabowo Mengaku Salah

Siap Mempertanggungjawabkannya

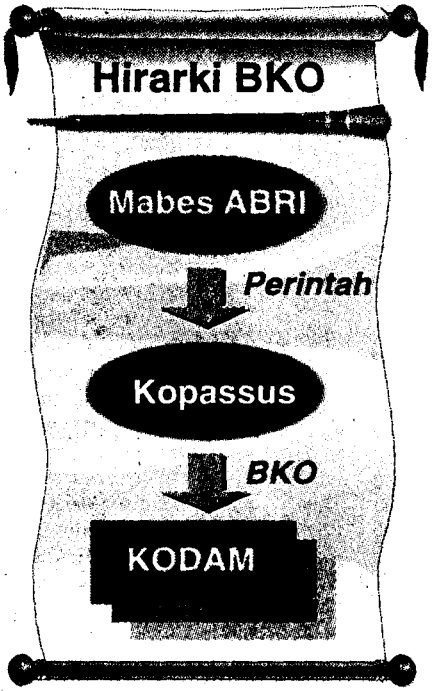
JAKARTA (Media): Mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto telah mengaku salah dan siap mempertanggungjawabkannya. Kesalahan yang dilakukan menantu mantan Presiden Soeharto itu terutama dalam menganalisis perintah Bawah Kendali Operasi (BKO).

Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo mengungkapkan hal tersebut menjawab pers kemarin di Jakarta seusai memeriksa Letjen TNI Prabowo di Mabes TNI-AD Jakarta. Selama lebih dari dua jam, DKP kemarin kembali memeriksa tiga pentolan pasukan elite TNI-AD Kopassus masing-masing Prabowo, mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi, dan mantan Komandan Grup IV Kol Inf Chairawan. Hadir dalam sidang tersebut semua anggota DKP yakni Letjen TNI Fachrul Razi, Letjen TNI Agum Gumelar, Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen TNI Djamari Chaniago, Letjen TNI Yusuf Kartanegara dan Laksamana Madya TNI Achmad Sutjipto.

Seperti diketahui, Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto membentuk DKP untuk meneliti keterlibatan mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi, dan Komandan Grup IV Kopassus Kol Inf Chairawan dalam kasus penculikan sejumlah aktivis prodemokrasi beberapa waktu lalu.

Selama menjalani pemeriksaan Prabowo dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Dan Sesko ABRI, Mayjen TNI Muchdi dibebastugaskan dari Wairjen ABRI, serta Kol Chairawan dari Dan Grup IV Kopassus.

"Prabowo mengakui kesalahannya dan dia sudah menyatakan kesiapannya untuk mempertanggungjawabkannya. Hal seperti itu adalah



kan elite TNI-AD Kopassus yang di-BKO-kan itu membawa misi tertentu dari yang memberikan perintah, Subagyo menegaskan yang salah adalah Letjen TNI Prabowo Subianto.

"Siapa yang memberikan perintah BKO, yang akhirnya salah dianalisis oleh Prabowo itu?" kejar wartawan.

"Sudah saya katakan bahwa perintah itu bukan berasal dari Pangab dan Pangti," tegas Jenderal Subagyo tanpa menjelaskan siapa yang memberi perintah BKO itu.

Mengenai pemeriksaan ulang terhadap Prabowo dan Muchdi, Subagyo mengatakan hal itu karena DKP ingin melengkapi keterangan yang sudah didapat. DKP masih melakukan pemeriksaan, seperti masalah letak kesalahan, tingkat ketidakdisiplinan, salah penjabaran dan penafsirannya, jujur dan ketidakjujurannya.

Menurut Subagyo, DKP akan melakukan sidang/rapat paripurna untuk mengolah berbagai bahan yang diperoleh. Dengan demikian akan dapat disimpulkan bentuk pelanggaran yang terjadi, jenis pelanggaran, hal

lama ini mengatakan DKP bisa saja memeriksa perwira yang pangkatnya lebih tinggi dari Prabowo, Ketua DKP itu menegaskan, setiap perwira ABRI yang salah tentu harus bisa diperiksa.

"Pangab tidak salah, karena tidak mengeluarkan perintah itu," katanya. Ketika ditanya kemungkinan mantan KSAD diperiksa, Jenderal Subagyo mengatakan, "Akan kita lihat dan jangan mudah menyalahkan."

Ketua DKP itu kembali menegaskan, bahwa kesalahan yang dilakukan Prabowo adalah dalam bentuk penganalisaan, sehingga 'penuangannya' juga menjadi salah.

Ditanya saksi yang diperiksa Selasa lalu, Subagyo mengatakan, pada hari itu DKP memeriksa seorang kapten yang membuat surat perintah penangkapan para aktivis serta seorang perwira yang menginterogasi para aktivis selama disekap di Cijantung.

Jangan apriori

Pada kesempatan terpisah Ketua DKP minta agar masyarakat tidak apriori terhadap DKP. Hal itu dikemukakan karena adanya kesan DKP dibentuk untuk menyelamatkan perwira. "Tugas DKP bukan untuk menghakimi tiga perwira tersebut. Namun, melihat, meneliti, dan menemukan kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan disiplin. Karena itu jangan apriori terhadap DKP," tegas Subagyo ketika ditemui di lapangan tenis Hotel Century Park, kemarin.

Ketika ditanya kemungkinan mantan Pangdam Jaya yang kini Gubernur DKI Sutiyoso dan mantan Pangdam Jaya Mayjen TNI Syafrie Syamsuddin akan dipanggil untuk diperiksa, Subagyo menyatakan, sampai saat ini belum ada indikasi untuk memanggil mereka.

Subagyo menjelaskan, untuk menghakimi anggota ABRI yang melakukan pelanggaran akan diproses di Mahkamah Militer. Namun, Subagyo menolak menjawab ketika ditanya apakah kasus penculikan tersebut akan dilanjutkan ke Mahmil. "Kita jangan mengira-ngira," kilahnya.

Sementara itu, Menko Polkam Feisal Tanjung ketika ditanya tanggapannya mengenai pernyataan Menhankam/Pangab Jenderal

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Perintah BKO bukan dari Pangti dan Pangab

Prabowo Mengaku Salah

JAKARTA — Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo menyatakan bahwa Letjen TNI Prabowo Subianto mengaku salah dalam menganalisis perintah Bawah Kendali Operasi (BKO) pada kasus orang hilang. "Dan dia (Prabowo) bersedia bertanggung jawab," tutur Subagyo menjawab pertanyaan wartawan di Markas Besar TNI-AD (Mabesad), Jakarta, kemarin.

Pengakuan dan kesediaan bertanggung jawab mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus itu, menurut Subagyo, diungkapkan di depan sidang DKP, kemarin. "Itu kan suatu sikap keperwiraan, yang memang ada salah dan ada pertanggungjawaban," ujar Subagyo.

Ketua DKP kemudian mengulang penjelasannya Senin (10/8) lalu bahwa Prabowo salah menganalis perintah BKO yang diberikan kepadanya. Perintah BKO tersebut, kata Subagyo, diterjemahkan oleh Prabowo dengan mengeluarkan perintah lagi yang ternyata membuat dia salah.

Ditanyakan siapa yang memberi perintah BKO kepada Prabowo, Subagyo menjawab, "Sudah saya katakan, yang jelas bukan dari Pangti (Panglima Tertinggi ABRI) dan bukan dari Pangab (Panglima ABRI). Yang salah itu Prabowo."

Menurut Subagyo, atasan Prabowo bisa saja dimintai keterangan bila terbukti salah atau ada keterkaitan dengan kasus orang hilang. Namun, sekali lagi dia menegaskan bahwa Pangab dan Pangti ABRI tidak salah.

"Kesalahannya pada analisis tersebut. Kalau analisisnya salah (tentu) penanganannya menjadi salah. Di situlah terjadi kesalahannya," lanjut jenderal bintang empat ini.

Ditanyakan apakah berarti mantan Kepala Staf TNI-AD (KSAD) saat Prabowo menjadi Danjen Kopassus yang bersalah dan akan segera dimintai keterangan oleh DKP, Subagyo menjawab, "Nanti kita lihat, nanti kita lihat. Jangan gampang menyalahkan orang karena ini bukan hakim."

Saat Prabowo menjadi Danjen Kopassus ke-15, KSAD dijabat oleh Jenderal TNI R Hartono dan Jenderal TNI Wiranto (saat ini Pangab). Penculikan Deddy Hamdun, Yani Avri, Sony, beberapa aktivis PRD serta beberapa aktivis yang diduga terlibat peristiwa 27 Juli 1996 terjadi saat KSAD dijabat Hartono. Sementara penculikan Pius Lustrilanang, Desmond J Mahesa, dan beberapa aktivis lainnya menjelang Sidang Umum MPR 1998 terjadi saat Wiranto menjadi KSAD.

Selain menghadirkan Prabowo, kata Subagyo, DKP kemarin kembali memeriksa kembali mantan Danjen Kopassus lainnya, Mayjen TNI Muchdi Purwoprandjono dan Kolonel Inf Chairawan. Keduanya, katanya, masih disodori pertanyaan seputar masalah kehormatan perwira yang berkisar kedisiplinan, prosedur, dan tabiat atau keprawiraannya untuk kemudian dimintai pertanggungjawaban.

Subagyo tidak bersedia menjelaskan secara rinci hasil kerja timnya sampai kemarin. "Ini lagi proses. Kita masih cari mana yang salah, mana ketidakdisiplinan, mana analisis atau penjabaran tugas yang salah. Dan (bisa saja) berkembang menjadi jujur apa *nggak*," jelasnya.

Hari ini, DKP kembali akan menggelar sidang. Menurut Subagyo, hari ini akan diperkuat keterangan-keterangan, pengakuan terperiksa dengan hasil pengecekan di lapangan. DKP, lanjutnya, juga akan menentukan langkah-langkah selanjutnya.

Sejauh ini, kata Subagyo, DKP telah meminta keterangan beberapa saksi. "Saksi-saksi yang kita panggil antara lain ada kapten, ada yang membuat surat, juga ada hasil TPF yang mengecek ke lokasi untuk menambah kelengkapan dari proses ini," ujarnya.

Keterangan para saksi itu, kata Subagyo, akan dijadikan masukan bagi DKP sehingga saran yang dihasilkan untuk Pangab nanti bisa lebih tepat.

"Kita lihat apa-apa yang dilakukan, pelanggaran apa yang dilakukan, mana yang dilakukan, dan hal mana yang meringankan atau memberatkan sehingga mempertajam saran atau rekomendasi kepada Pangab."

Subagyo tidak bersedia menjawab pertanyaan apakah hari ini adalah sidang terakhir DKP. "Kalau saya menganggap masih perlu dilakukan sidang, ya dilakukan sidang," katanya. ■ bsa

Kelas: .....

LSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

dia:		Tanggal	Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☑ Berita Buana	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Soal 14 Aktivis yang Diculik

Kapuspen ABRI: Belum Ada Kepastian Nasib Mereka

Jakarta, Buana

Kapuspen ABRI Mayjen TNI Syamsul Ma'arif menyatakan, sampai saat ini, belum ada kepastian tentang nasib ke-14 aktivis yang hilang, "Belum adanya keterangan tentang keberadaan mereka membuat ABRI tak mau terburu-buru menyatakan bahwa para aktivis itu sudah meninggal dunia," ujar Kapuspen ABRI, di Jakarta, Selasa (18/8) malam.

Sementara itu, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (Kontras) Munir merasa yakin bahwa sebagian aktivis yang diculik masih ada yang disekap oknum ABRI. Hal itu disampaikan Munir kepada *Buana* di Jakarta, Selasa (18/8).

Menurutnya, agar informasi soal keberadaan para aktivis yang diculik itu tidak simpang siur, ABRI sebaiknya segera mengumumkan secara resmi hasil temuan Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

Soalnya, simpang siur nasib korban penculikan itu membuat keluarga korban semakin menderita, karena terus berharap. "Selama ABRI belum membuat pernyataan resmi soal keberadaan aktivis itu, Kontras tetap yakin mereka masih hidup dan masih disekap suatu kelompok tertentu. Agar keluarga korban tak terlalu lama berharap, kami mohon DKP agar segera mengumumkan temuan mereka dan ABRI secepatnya memberikan keterangan resmi soal nasib para aktivis itu. Jangan bekerja lamban dan berlarut-larut, sebab ini menyangkut nyawa manusia," ujar Munir.

Pernyataan Munir ini sekaligus membantah pemberitaan *Berita Buana* (18/8) yang berjudul '14 Aktivis yang Diculik Telah Meninggal'. "Kami sangat menyesalkan tindakan memuat berita tanpa mengkonfirmasi kepada sumber itu," ungkap Munir.

Terus Mencari

Kapuspen ABRI Mayjen TNI Syamsul Ma'arif, menyatakan "Hingga kini, kami tak dapat menanggapi hal itu. ABRI masih berusaha mencari dan selalu menerima informasi dari masyarakat."

Menurut Syamsul, masih terlalu dini menyatakan bahwa ke-14 aktivis itu telah meninggal, karena ABRI masih terus mencari mereka. ABRI juga terus melakukan pengecekan atas informasi-informasi yang masuk dari masyarakat. "ABRI sama sekali tidak berniat menutup-nutupi kasus penculikan ini," lanjut Syamsul.

Kapuspen menambahkan, dalam upaya untuk membongkar dan mengungkap bagaimana nasib ke-14 aktivis yang hilang itu, ABRI telah mengerahkan aparat keamanannya, bukan dari Puspom ABRI saja, tapi juga dari kepolisian.

Sementara itu, Ketua Umum PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia) Hendardi, kuasa Hukum Pius Lustrilanang, mengatakan, dari 14 aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang hilang, lima di antaranya diyakini sudah meninggal. Data ini ia peroleh setelah berbicara dengan Pius.

"Pius mengaku kepada saya bahwa ia diculik dan dimasukkan suatu ruangan untuk disiksa bersama aktivis lainnya. Ia juga melihat lima orang aktivis tersebut sudah dikeluarkan. Tapi, kenyataannya, sampai Pius dibebaskan dan kembali ke rumah, mereks malah belum jelas nasibnya" ungkap Hendardi.

"Dengan demikian, secara logika, mereka sudah mati. Jika keberadaan mereka sampai sekarang belum jelas, mestinya mereka segar bugar," tambah Hendardi sambil berharap agar kasus ini segera dituntaskan. ❑ **bar/rad/gan**

Hal. 1/ .....
Kelas: .....

SAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

dia:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☑	Suara Merdeka	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

DKP Isyaratkan Prabowo Cs Dimahmilkan

JAKARTA -Pemeriksaan terhadap Letjen Prabowo, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kol Chairawan oleh Dewan Kehormatan Perwira (P) dalam kasus penculikan sejumlah aktivis rin dinyatakan selesai .

Pemeriksaan terhadap tiga perwira sudah tun dah tidak ada pemeriksaan lagi setelah ini," Sekretaris Tim DKP Djamari Chaniago yang Pangkostrad, kepada wartawan, setelah g DKP. Pemeriksaan dilakukan sejak pukul 0 sampai 13.30. Dengan selesainya pemerik- itu berarti DKP pimpinan Jenderal TNI Sub- HS mampu merampungkan tugasnya dalam kan.

Sementara itu, Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto saat ditemui setelah pemeriksaan tidak bersedia memberikan keterangan. "Saya tidak ada tanggapan, bagaimana pimpinan saya, itulah yang terbaik. Semua saya serahkan kepada pimpinan. Saya kira, pimpinan pasti berbuat yang terbaik untuk ABRI. Pokoknya, saya yakin pimpinan tidak mungkin berbuat yang tidak baik untuk ABRI," katanya.

Hal yang sama juga dikemukakan Kol Inf Chairawan, mantan Komandan Grup IV Kopassus. Dia menyatakan, sebagai prajurit Kopassus, semuanya diserahkan kepada pimpinan ABRI. Dia yakin pimpinan akan mengambil keputusan yang paling baik bagi ABRI. Namun mantan pucuk pimpinan pasukan Sandi Yudha itu enggan menjelaskan hasil pemeriksaan DKP.

Menurut Djamari Chaniago, setelah ini Tim DKP akan melakukan rapat merumuskan hasil pemeriksaan. Hasilnya akan direkomendasikan kepada Pangab. "Soal keputusannya sanksi apa yang akan dijatuhkan menjadi wewenang Pangab. Kami hanya memberikan rekomendasi atas dasar hasil pemeriksaan tim selama ini. Itu yang perlu Anda ketahui," tandas Djamari.

Bentuk Rekomendasi

Bentuk rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pangab, menurut dia dengan mengutip pernyataan KSAD, bisa berupa sanksi administrasi atau saran untuk diproses melalui Mahkamah Militer (Mahmil).

Namun, dia mengisyaratkan, rekomendasi yang bakal disampaikan kepada Pangab meliputi sanksi administrasi dan ke Mahmil. "Bisa kedua-duanya disarankan kepada Pangab," ujarnya.

Namun, lanjut dia, juga bisa disarankan salah satunya. Untuk merumuskan saran-saran kepada Pangab, DKP dalam beberapa hari ini akan melakukan pembahasan dan pendalaman materi hasil pemeriksaan.

"Hari ini (kemarin-Red) sidang DKP sudah selesai. Kemudian hari ini sampai nanti keputusan Pangab diumumkan, DKP akan melakukan pendalaman dan penyimpulan sebagai saran kepada Pangab."

Dalam pemeriksaan terakhir, menurut Djamari, tidak ada yang menonjol. Sebab, pemeriksaan hanya menyelesaikan tahap akhir. Dalam pemeriksaan kemarin tidak lagi membahas proses BKO (bawah kendali operasi) yang dilakukan oleh Prabowo berkaitan dengan mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) R Hartono.

"Pemeriksaan ini hanya menyelesaikan tahap akhir," tegasnya lagi. Hal itu diungkapkannya saat menjawab pertanyaan wartawan sehubungan dengan kabar, BKO yang terima Prabowo berkaitan dengan R Hartono yang saat itu menjadi KSAD.

"Tidak ada bahasan ke arah itu," ujarnya.

Apalagi, menurut Sekretaris DKP, Prabowo sudah mengaku salah menganalisis BKO tersebut. Dengan demikian, pada pemeriksaan terakhir tidak lagi membahas masalah-masalah proses awal. Sebab, kesalahan bukan dari yang memberi BKO, tetapi salah menganalisis BKO. (di,mon-11t)

ELSAM

Media:

- BISNIS IN
- JAKARTA
- JAWA PO
- KOMPAS
- KD. RAK
- MEDIA IN



Jakarta, K

Pemeriks
hormatan
hadap ma
deral Pasul
(Danjen Ko
Prabowo S
TNI Mucho
Komandan
Kolonel (In
Selasa (18/
sai. Hasil
penculikan
para aktivis
hari menda
kan bersam
kepada Me
Jenderal TN
"Hari ini,
melakukan

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☑ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Perintah BKO dari Perwira yang Lebih Tinggi Pangkat

Serambi-Jakarta

Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto mengatakan, perintah Bawah Kendali Operasi (BKO) dikeluarkan perwira yang lebih tinggi pangkatnya kepada pihak yang menerima perintah BKO tersebut.

"BKO itu macam-macam, tergantung levelnya. Satuan dalam mem-BKO-kan satuan lain tergantung levelnya, siapa pun bisa memberikan BKO," kata Pangab menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Selasa (11/8).

Menurut Pangab, BKO terjadi jika ada satu komando atau kesatuan yang mendapat tugas-tugas tertentu, terkadang kesatuan tersebut meminta perkuatan pasukan dari satuan lain dalam melaksanakan tugas tersebut.

"Kalau ada satu komando atau satu kesatuan yang mendapat tugas-tugas tertentu, ia akan menyusun suatu pengorganisasian untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Dalam tugas-tugas yang akan dilaksanakan itu, ia membutuhkan perkuatan dari pasukan yang lain, pasukan yang lain inilah yang kalau masuk ke kesatuan tadi namanya BKO," katanya.

Pasukan yang di-BKO-kan itu, kata Pangab, terlepas dari induk kesatuannya, kemudian mereka dibawah kendali operasi dari satuan baru yang mendapat tugas itu.

"Di dalam konteks kasus Prabowo, Pak?" tanya wartawan.

"Saya tidak mau menjelaskan sepotong-sepotong, kita tunggu nanti hasil DKP ini, sehingga nanti utuh semuanya bisa dijelaskan," jawab Jenderal Wiranto.

Masalah tentang BKO diajukan wartawan berkaitan dengan munculnya masalah itu dalam proses pemeriksaaan DKP terhadap mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto di Mabes AD, Senin (10/8).

KSAD Jenderal TNI Subagyo HS seusai sidang itu, menjelaskan kepada pers bahwa Prabowo memperoleh perintah mem-BKO-kan yang kemudian dianalisa sendiri oleh menantu mantan Presiden RI kedua itu, namun tidak dijelaskan siapa yang memberikan perintah BKO tersebut.

Walaupun tidak menjelaskan siapa yang memberikan perintah BKO tersebut, Subagyo membantah kemungkinan perintah tersebut datang dari Pangab atau KSAD, yang waktu itu masing-masing dijabat Feisal Tanjung dan Wiranto, untuk melakukan operasi penculikan.

Pada waktu hampir bersamaan, kemarin, puluhan keluarga aktivis korban penculikan mendatangi DKP di Mabes AD Jakarta untuk menanyakan nasib korban penculikan.

Menurut catatan Kontras, aktivis yang hilang hingga kini masih 14 orang. Sedangkan yang mendatangi DKP di Mabes AD antara lain keluarga Yani Afri, Dedy Hamdun, Noval Alkatiri, dan keluarga Herman Hendrawan.**(tim)**

Hal. 1/ .....
Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Sidang DKP Hanya Periksa Dokumen

Agum: Jika Ada Unsur Pidana, Bisa Dimahmilkan

Keluarga Korban Siap Beri Keterangan DKP

Jakarta, JP.-

Tidak seperti biasanya, sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) kemarin berjalan lebih singkat. Sidang yang biasa berakhir sampai sore hari itu pada pukul 12.30 WIB sudah selesai. Dua anggota DKP, yakni Gubernur Lemhanas Letjen TNI Agum Gumelar dan Kassospol ABRI Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono tidak tampak dalam jajaran anggota yang menghadiri sidang. Dengan begitu, sidang yang digelar di Mabes Angkatan Darat (AD) ini hanya diikuti Danjen Kopassus Laksdya Achmad Sutiyoso, Irjen Dephankam Yusuf Kartanegara, Kasum ABRI Letjen TNI Fachrul Razi, pati Mabes ABRI Letjen TNI Ary Kumaat, dan Pangkostrad Letjen TNI Djamari Chaniago. Saat sidang berlangsung, Agum berada di Malang dan Yudhoyono memberikan ceramah di Lemhanas.

Tidak ada keterangan resmi soal hasil sidang DKP kemarin. Begitu melangkah keluar dari ruang sidang, para anggota DKP ini langsung menuju mobil masing-masing yang diparkir di depan Mabes AD. Toyota Crown dan Land Cruiser yang mereka pakai langsung meninggalkan Mabes AD.

Sumber *Jawa Pos* yang dekat dengan kalangan militer menyebutkan, sidang kemarin hanya membahas hasil-hasil pemeriksaan terhadap Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kolonel Inf Chairawan. Namun, sumber lain mengatakan, sidang itu juga memeriksa berbagai dokumen yang terkait dengan kasus penculikan dan penyekapan sejumlah aktivis gerakan prodemokrasi.

Hari ini juga dilanjutkan sidang DKP dengan pemeriksaan dokumen-dokumen tambahan yang terkait. Termasuk kemungkinan sidang kali ini akan menganalisis keterangan tiga terperiksa.

Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo H.S. yang biasa memberikan penjelasan singkat kemarin tampak menghindar dari wartawan.

Begitu beberapa anggota DKP meninggalkan Mabes AD, rombongan keluarga orang-orang hilang tiba di Mabes AD. Rombongan di bawah koordinasi Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) ini sebenarnya ingin bertemu dengan DKP. Sayangnya, keinginan mereka tidak terpenuhi karena para anggota DKP telah meninggalkan Mabes AD.

"Kami ingin menyatakan bahwa DKP bukanlah wadah penyelesaian kasus penculikan. Jika dalam proses pemeriksaan nanti ada bukti para perwira yang diperiksa melanggar pasal-pasal pidana, mereka harus dibawa ke mahkamah militer," kata Koordinator Kontras Bidang Hukum Sira Prayuna yang ditemui di depan pagar Mabes AD.

Pria yang akrab disapa Unan ini juga menegaskan, para keluarga korban penculikan siap memberikan keterangan kepada DKP bila diminta. Meski begitu, ia mengatakan, keterangan dari korban penculikan maupun keluarganya kepada Puspom ABRI telah cukup. DKP bisa meminta data-data dan keterangan para korban dan keluarga korban dari Puspom.

Para anggota keluarga korban yang kemarin mendatangi DKP adalah keluarga Yadin Muhidin, Muhammad Yusuf, Noval Said, Yani Afri, Herman Hendrawan, Suyat, Ucok Munandar Siahaan, Hendra Hambali, Deddy Omar Hamdun, Petrus Bima Anugrah, Sonny, dan Ismail. Begitu tiba di Mabes AD, mereka langsung berdiri di depan pagar dan menenteng foto keluarga mereka yang menjadi korban penculikan dan sampai sekarang belum diketahui nasibnya itu. Meski tidak sempat bertemu dengan DKP, mereka diterima Kolonel CPM Supardi dari Mabes AD.

BISA DIMAHMILKAN

Gubernur Lemhanas Letjen TNI Agum Gumelar menandaskan, bila dalam pemeriksaan terhadap mantan Dansesko ABRI Letjen TNI Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi PR., dan Kolonel Inf Chairawan nantinya ditemukan unsur pidana, tidak ada pilihan lain kecuali memahmilkan mereka.

"Ini yang sedang kita gali saat ini," kata Agum dalam Lokakarya Pengembangan Studi di Ubaya bagi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 1998/1999 di Hotel Asida, Batu, kemarin. Sebagai negara hukum, siapa pun manusianya dan apa pun bajunya, kalau melakukan pelanggaran, ya harus diproses sesuai hukum. "Perwira yang di-DKP-kan bukan berarti tidak bisa dimahmilkan!" tambahnya.

Sebab itu, laki-laki asal Solo ini menolak pendapat sementara kalangan yang memelesetkan singkatan DKP (Dewan Kehormatan Militer) sebagai "Dewan Keamanan Perwira". "Tolonglah, jangan berburuk sangka. Lihat saja hasilnya. Dengan DKP, bukan berarti perwira akan diselamatkan," ujar Agum yang kemarin sesekali menyelipkan lelucon dalam ceramahnya.

DKP, kata pembina Srimulat ini, bertugas memeriksa perwira yang dinilai melakukan tindakan tidak sesuai dengan kode etik perwira berdasarkan data. Proses yang dilakukan DKP merupakan upaya untuk mencari kebenaran sinyalemen.

Ditanya tentang objektivitas DKP, Agum menjamin bahwa ABRI akan berusaha untuk *fair*. "Percayalah, ABRI tidak akan *nutup-nutupi*. Apa lagi dengan tekat membuat ABRI yang solid," tandas ayah dua anak ini. Dia sendiri tidak akan membiarkan kasus tersebut ditutup-tutupi. Dengan berseloroh, Agum mengatakan, "Tenang sajalah, Belanda masih jauh." Tak pelak, ucapannya itu langsung disambut *geer* peserta lokakarya.

Kapan para perwira yang diperiksa DKP itu bakal dipanggil kembali? Agum hanya mengatakan, hal itu bergantung pada hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dan saat ini sedang diolah.

Tentang saksi yang akan dipanggil oleh dewan yang diketuai KSAD Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo itu, Agum menjelaskan bahwa ada beberapa orang yang akan dimintai keterangan untuk di-*cross check*-kan. Saat ini sudah ada beberapa yang ditahan di POM. Kendati demikian, laki-laki yang mengaku perokok berat ini menegaskan bahwa di antara para saksi itu tidak ada nama Jenderal TNI Feisal Tanjung.

Dia tidak bersedia menjelaskan apakah dalam pemeriksaan DKP itu Mayjen TNI Muchdi Pr. (mantan Danjen Kopassus) akan dijadikan kambing hitam. "Bisa sabar *nggak sih* menunggu hasilnya?" ujarnya dengan tertawa kecil.

Mengenai 14 orang hilang karena penculikan yang hingga saat ini belum jelas nasibnya, Agum meminta agar kasus tersebut dipercayakan kepada ABRI. "Saya yakinkan, percayakan semuanya kepada ABRI yang akan mengusut ini semua. Doa restu diharapkan agar kasus tersebut bisa diungkapkan." **(ilo/saf/ami)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☑ Suara Merdeka	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Prabowo Akui Salah Tafsir

JAKARTA -Mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto mengakui telah membuat kesalahan dalam menafsirkan Bawah Kendali Operasi (BKO) dan siap mempertanggungjawabkannya.

"Prabowo mengakui ada kesalahan dan dia sudah menyatakan siap mempertanggungjawabkannya. Hal seperti itu adalah sikap keperwiraan dan setiap kesalahan memang harus dipertanggungjawabkan," kata Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo kemarin sore, setelah memeriksa Prabowo.

Ditanya tentang bentuk kesalahan yang diakui Prabowo, Subagyo yang juga KSAD itu mengatakan, kesalahannya ada dalam penganalisisan. "Kesalahannya dalam pem-BKO-an. Semestinya dikeluarkan surat perintah. Dengan kata lain telah terjadi salah penganalisisan terhadap BKO," tegasnya.

"Siapa yang memberikan perintah BKO, yang salah dianalisis itu?" tanya wartawan.

"Sudah saya katakan, perintah itu bukan berasal dari Pangab dan Pangti," tegasnya.

Ditanyakan kemungkinan pasukan Kopassus yang di-BKO-kan itu membawa misi tertentu dari yang memberikan perintah, dia menegaskan, yang salah Letjen TNI Prabowo Subianto.

Perwira Lain

Ditanya mengenai pernyataan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto yang menyebutkan, DKP bisa saja memeriksa perwira tinggi ABRI yang pangkatnya lebih tinggi dari Prabowo, dia menegaskan, setiap perwira ABRI yang salah atau ada keterkaitannya tentu harus bisa diperiksa.

"Pangab tidak salah, karena tidak mengeluarkan perintah itu," ujarnya. Menurutnya, semua akan dilihat dan jangan mudah menyalahkan. Ia pun kembali menegaskan, kesalahannya dalam kasus penculikan aktivis ada dalam bentuk penganalisisan, sehingga penuangannya juga menjadi salah.

Dalam sidang DKP, pemeriksaan berkisar pada masalah disiplin, prosedur, kejujuran, tabiat, dan sikap keperwiraan terperiksa. "Saya mohon wartawan jangan salah dalam memberitakannya."

Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kolonel Inf Chairawan kemarin kembali diperiksa DKP pukul 09.00-11.30 WIB. Pemeriksaan berlangsung tertutup dan wartawan melihat Prabowo Subianto memasuki Mabesad pukul 08.25 WIB.

Anggota DKP, seperti Letjen TNI S Bambang Yudhoyono, Letjen TNI Jusuf Kertanegara, Letjen TNI Djamari Chaniago, Letjen TNI Agum Gumelar, Laksdya TNI Achmad Sutjipto, dan Wakil Ketua DKP Letjen TNI Fachrul Razi, juga memasuki ruang sidang dari pintu depan Mabesad.

Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo menegaskan, pemeriksaan kembali Letjen TNI Prabowo Subianto dan Mayjen TNI Muchdi PR (keduanya mantan Danjen Kopassus) merupakan hal biasa. "DKP ingin melakukan pemeriksaan tambahan untuk melengkapi keterangan yang sudah didapatkan dan hasilnya akan disampaikan kepada Pangab berupa saran/rekomendasi."

Kata Subagyo, DKP masih melakukan pemeriksaan, seperti masalah letak kesalahan, tingkat ketidakdisiplinan, salah penjabaran dan penafsiran, jujur dan ketidakjujurannya. "Kalau tiap hari menyampaikan perkembangan yang belum tuntas, akan kurang menguntungkan. Setelah selesai diadakan rapat dan pemeriksaan, sehingga akan bisa ditentukan langkah berikutnya," tegasnya.

Prabowo Subianto dan Muchdi PR kembali dipanggil ke DKP, karena ada keterangan tambahan yang diminta. DKP juga sudah memeriksa sejumlah saksi, seperti saksi berpangkat kapten untuk mendapat dukungan yang memperkuat. Saksi pembuat surat dan POM yang sudah mengecek lokasi. Semua itu dimaksudkan untuk menambah kelengkapan dan kelancaran proses.

Sidang Paripurna

Hari ini DKP akan melakukan sidang/rapat paripurna. Setelah mengumpulkan keterangan yang diperoleh melalui pemeriksaan terhadap terperiksa, saksi dan barang bukti, akan menyimpulkan bentuk pelanggaran yang terjadi, dan jenis pelanggaran. Juga hal yang memberatkan dan yang meringankan untuk mempertajam saran/rekomendasi yang akan diberikan kepada Pangab.

Apakah sidang DKP hari ini bisa dikatakan sebagai sidang terakhir?

Sambil tersenyum, Subagyo mengatakan sulit menentukan sidang hari ini sebagai yang terakhir. Sebab, masalahnya tergantung pada keadaan.

"Jika masih diperlukan keterangan tambahan, bisa dilakukan sidang kembali dengan memanggil saksi-saksi atau diadakan rapat lagi."

Wartawan yang menunggu di halaman depan Mabesad sejak pukul 07.30 WIB hingga pukul 17.00 WIB sempat melihat Dankodiklat Mayjen TNI Luhut Panjaitan, Danpuspom ABRI Mayjen TNI Syamsu D, Danjen Kopassus Mayjen TNI Syahril MS dan Pangkostrad Letjen TNI Djamari Chaniago meninggalkan ruangan Mabesad dari pintu depan. Ketika hal itu ditanyakan, Subagyo mengatakan, selaku pembina TNI AD ia setiap bulan secara rutin mengumpulkan seluruh pangkotama, pimpinan di lingkungan TNI AD, dan Danpuspom untuk menerima pembinaan.

Secara terpisah, mantan Pangkostrad Letjen TNI (Purn) Kemal Idris mengatakan, jika memang Prabowo terbukti melakukan penculikan, penyekapan dan penghilangan sejumlah aktivis, ia harus diajukan ke Mahmil dan tak bisa ditutup-tutupi. "Pemeriksaan harus dilakukan sampai tuntas. Kalau sampai ada kesan ditutup-tutupi dan tidak tuntas, ABRI akan terpuruk," tandasnya.

Ditanya siapa yang berhak memberi perintah kepada Prabowo untuk melakukan penculikan, ia mengatakan bisa saja diberikan oleh atasannya langsung.(ant,am-11k)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA		1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA		2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA		3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☑ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA		4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN		5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo HS:

Prabowo Akui Salah Analisis Perintah

Jakarta, Kompas

Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo mengatakan, dalam sidang pemeriksaan DKP, Rabu (12/8), mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD (Danjen Kopassus) Letjen TNI Prabowo Subianto mengakui telah membuat kesalahan analisis terhadap perintah Bawah Kendali Operasi (BKO). Selanjutnya, Prabowo telah menyatakan siap mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut.

"Prabowo mengakui ada kesalahannya. Dan dia sudah menyatakan kesiapannya untuk mempertanggungjawabkannya. Hal seperti itu 'kan suatu sikap keperwiraan. Dan memang, ada salah ada pertanggungjawaban," kata Jenderal Subagyo menjawab wartawan di Markas Besar TNI AD (Mabes AD) Jakarta.

Dikatakan, DKP telah melaksanakan pemeriksaan lanjutan terhadap dua mantan Danjen Kopassus, yakni Mayjen TNI Muchdi PR dan Letjen TNI Prabowo Subianto. "Sejak awal saya sudah katakan bahwa Prabowo telah mengakui melakukan kesalahan menganalisis. Untuk itu DKP memeriksa hal-hal yang berkisar pada disiplin, prosedur, kejujuran ataupun tabiat keperwiraannya. Ini 'kan dinanya, diuji kemudian untuk dimintai pertanggungjawaban," papar Subagyo, yang juga mantan Komandan Kopassus ini.

Menjawab pertanyaan mengenai siapa yang mengeluarkan perintah BKO yang kemudian salah dianalisis oleh Letjen Prabowo, Ketua DKP menegaskan, yang jelas bukan dari Panglima Tertinggi (Pangti) ataupun dari Panglima ABRI (Pangab). "Sudah saya katakan yang jelas perintahnya bukan dari Pangti maupun Pangab," katanya.

Sedangkan menjawab pertanyaan apakah perintah BKO itu keluar dari KSAD waktu itu, Subagyo mengatakan, "Nanti kita lihat. Kita jangan menyalahkan. Kita 'kan bukan hakim," tuturnya.

"Kesalahan Prabowo adalah dalam pem-BKO-an, semestinya dikeluarkan surat perintah, dan ini yang kemudian ternyata menjadikannya salah. Dengan kata lain, telah terjadi salah analisis terhadap BKO. Kesalahannya ada dalam bentuk analisis, sehingga penuangannya juga menjadi salah, sedangkan dalam sidang DKP, yang diperiksa berkisar pada masalah disiplin, prosedur, kejujuran, tabiat dan sikap keperwiraan terperiksa. Saya mohon wartawan jangan salah dalam memberitakannya." kata Subagyo.

Diperiksa kembali

Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kolonel (Inf) Chairawan kembali diperiksa DKP. Pemeriksaan dimulai pukul 09.00-11.30 WIB. Prabowo sendiri datang sekitar pukul 08.25 WIB. Sedangkan anggota DKP, seperti Letjen TNI S Bambang Yudhoyono, Letjen TNI Jusuf Kertanegara, Letjen TNI Djamari Chaniago, Letjen TNI Agum Gumelar, Laksdya TNI Achmad Sutjipto, dan Wakil Ketua DKP Letjen TNI Fachrul Razi, juga memasuki ruang sidang dari pintu depan Mabes AD.

Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo menegaskan, pemeriksaan kembali Letjen TNI Prabowo Subianto dan Mayjen TNI Muchdi PR (keduanya mantan Danjen Kopassus) merupakan hal biasa. "DKP ingin melakukan pemeriksaan tambahan untuk melengkapi keterangan yang sudah didapatkan dan hasilnya akan disampaikan kepada Pangab berupa saran atau rekomendasi," katanya.

Menurut Subagyo, hari ini (13/8) DKP akan melanjutkan pemeriksaan mengenai apa saja yang dilakukan, pelanggaran, hal-hal apa yang dilakukan para terperiksa serta hal-hal apa saja yang akan memberatkan dan meringankan. Ditambahkan, rapat hari ini bukan akhir pemeriksaan DKP. "Kalau masih diperlukan, sidang akan dilanjutkan. Saya tidak katakan terakhir. Hasilnya tergantung rapat," katanya.

Sementara itu, secara terpisah Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Hankam/ABRI Mayjen TNI Syamsul Ma'arif mengatakan, BKO adalah suatu status di mana suatu satuan di bawah kendali satuan lain yang bukan satuan organiknya. "Hubungan antara yang di BKO-kan dengan yang menerima BKO untuk melaksanakan operasi tetap tidak keluar dari tugas pokok," katanya.

Dikatakan juga, berkaitan dengan kasus orang hilang, munculnya istilah BKO merupakan rangkaian yang saling terkait dengan keseluruhan fakta-fakta lainnya. "DKP masih terus melakukan pemeriksaan. Banyak hal yang perlu diungkap misalnya sejauh mana kesalahan prosedur pemberian status BKO, bagaimana koordinasi antara unit yang di BKO-kan dengan satuan yang menerima BKO, dan berbagai masalah lainnya," paparnya.

Tanggung jawab atasan

Sementara itu, mantan Pangkostrad Letjen TNI (Purn) Kemal Idris, dalam percakapan dengan *Kompas*, Rabu, mengatakan, apa pun nama perintah yang diberikan, apakah itu BKO (Bawah Komando Operasi) atau lainnya, yang pasti kesalahan suatu operasi adalah tanggung jawab atasan.

"BKO atau apa pun namanya itu, bagi saya nama-nama seperti itu tidak saya mengerti. Untuk saya sederhana saja. Suatu gerakan itu direncanakan, lalu dibicarakan, dan kemudian diputuskan. Kalau ada yang kurang jelas, ya harus ditanyakan oleh penanggung jawab operasi," ujarnya.

Menurut Kemal, sebuah rencana akan dilaksanakan oleh pasukan-pasukan sesuai fungsi masing-masing. Bila salah seorang komandan pasukan tidak mengerti perintah yang harus dilakukan, maka ia harus bertanya kepada atasannya. "Ia tidak boleh menganalisis sendiri. Karena kalau analisis dia tidak sesuai dengan yang dimiliki komandannya, maka siapa yang salah? Ya salah bawahan," katanya.

Lebih jauh Kemal menambahkan, bisa saja bawahan melakukan analisis sendiri dalam sebuah operasi, namun analisis tersebut harus dikonsultasikan kepada atasannya. Bila atasan menyetujuinya, maka hal itu bukan tanggung jawab bawahan lagi.

Mengenai kasus orang hilang, Kemal juga menyesalkan reaksi ABRI yang dinilainya lambat. "Kalau tidak ada reaksi dari rakyat yang begitu kuat, mereka (ABRI) akan diam. Karena ada reaksi, baru ada (penyelidikan). Tapi itu pun baru bisa terjadi setelah Soeharto turun," katanya.

Dengan demikian, kata Kemal, pihaknya merasa berbagai macam peristiwa yang mempermalukan ABRI di zaman Orde Baru itu ada kaitannya dengan mantan Presiden Soeharto, karena kedudukannya sebagai Panglima Tertinggi.

Sedangkan Direktur LBH Surabaya Indro Sugianto, secara terpisah menilai, ABRI harus menjelaskan siapa yang memberikan perintah BKO kepada Letjen TNI Prabowo Subianto ketika menjadi Danjen Kopassus. Hal itu menunjukkan bahwa ABRI punya niat baik menyelesaikan kasus penculikan itu secara tuntas sesuai harapan rakyat. **(ama/myr/vik/jl/ano)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☑ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Prabowo mengakui kesalahan

JAKARTA (Bisnis): Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo HS mengatakan mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto mengakui kesalahan dalam melakukan analisis dalam menjalankan perintah Bawah Kendali Operasi (BKO) sehingga melakukan penculikan aktivis.

"Yang salah itu *kan* Prabowo. Kesalahannya itu BKO. Dia mengeluarkan surat perintah. Itu yang bisa menjadikan dia salah," tegasnya seusai memeriksa Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR dan pertemuan dengan Pangdam seluruh Indonesia, di sini, kemarin,.

Pemeriksaan Prabowo dan Muchdi PR yang berlangsung mulai pk. 09.00 hingga 12.00 WIB di Mabes Angkatan Darat Jl. Veteran Jakarta Pusat, itu dihadiri seluruh anggota DKP.

Menurut Subagyo, Prabowo mengakui kasalahannya, namun dia juga siap mempertanggungjawabkan kesalahan itu. "Itu *kan* suatu sikap keperwiraan. Memang ada salah, tapi ada pertanggungjawaban."

Prabowo, kata Kasad, bersalah dalam menganalisis perintah BKO. "Ini kesalahan ada pada analisis perintah."

Ketika ditanya siapa yang memberikan tugas BKO kepada Prabowo, Subagyo tidak memberikan jawaban.

Menurut dia, Panglima ABRI saat itu Jenderal TNI Feisal Tanjung dan Panglima Tertinggi saat itu Jenderal Besar (Purn.) Soeharto tidak pernah mengeluarkan perintah penculikan aktivis.

Ditanya apakah perintah BKO itu datang dari mantan KSAD Jenderal TNI (Purn.) R. Hartono, Subagyo menyatakan, "Kalau salah atau ada keterkaitan bisa saja perwira yang lebih tinggi diperiksa. Dan sudah saya katakan Pangab [Feisal Tanjung] tidak salah, tidak mengeluarkan perintah."

Kalau soal Hartono, menurut dia, akan segera dilihat dan dicari buktinya. "Kita lihat dulu, dan jangan mudah menyalahkan karena kita bukan hakim." **(s8)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☑ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Pengusutan DKP bakal Melebar

Pangab Luruskan soal BKO

JAKARTA (Media): Pengusutan kasus penculikan yang kini ditangani Dewan Kehormatan Perwira (DKP) diperkirakan bakal mengarah ke perwira-perwira yang berpangkat lebih tinggi dari Letjen TNI Prabowo Subianto, menyusul mencuatnya masalah Bawah Kendali Operasi (BKO) dalam pemeriksaan dewan tersebut.

Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto kemarin menjelaskan perintah BKO, yang lazim berlaku di lingkungan militer, bisa dikeluarkan oleh perwira yang lebih tinggi pangkatnya.

"BKO itu macam-macam, tergantung levelnya. Satuan dalam mem-BKO-kan satuan lain tergantung levelnya, siapa pun bisa memberikan BKO," kata Pangab menjawab pertanyaan wartawan seusai memberikan pengarahan di depan peserta Rakernispen di Mabes ABRI Cilangkap, kemarin.

Pertanyaan mengenai BKO diajukan wartawan berkaitan dengan munculnya masalah itu dalam pemeriksaan DKP terhadap mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto di Mabes AD, Senin (10/8). Seusai sidang tersebut, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS yang juga Ketua DKP menjelaskan kepada pers bahwa Prabowo memperoleh perintah mem-BKO-kan yang kemudian dianalisis sendiri oleh menantu mantan Presiden Soeharto itu.

Jenderal Subagyo tidak menjelaskan siapa yang memberikan perintah BKO tersebut. Namun ia membantah kemungkinan perintah tersebut datang dari Pangab atau KSAD saat itu.

Ketika kasus-kasus penculikan mulai mencuat ke permukaan dengan hilangnya salah seorang aktivis PPP, Dedi Hamdun, pada kampanye Pemilu 1997, jabatan Pangab dan KSAD masing-masing diduduki Jenderal Feisal Tanjung dan Jenderal Hartono.

DKP tengah memeriksa mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi, dan mantan Komandan Grup IV Kol Inf Chairawan. Ketiga pentolan pasukan elite TNI-AD itu diduga terlibat dalam kasus penculikan sejumlah aktivis prodemokrasi.

Meski sebagian sudah dibebaskan, sekitar 14 korban penculikan sampai sekarang belum diketahui nasib dan keberadaannya. Danpuspom ABRI Mayjen TNI Syamsu mengatakan, para korban disekap di markas Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, namun ketika dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan lagi para korban di tempat penyekapan.

DKP diketuai Jenderal TNI Subagyo, Wakil ketua DKP Letjen TNI Fachrul Razi (Kasum ABRI) dengan anggota Letjen TNI Djamari Chaniago (Pangkostrad), Letjen TNI Yusuf Kartanegara (Irjen Dephankam), Letjen TNI Agum Gumelar (Gubernur Lemhannas), Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono (Kassospol), Laksdya TNI Achmad Sutjipto (Danjen Akabri).

Kepada pers kemarin Jenderal TNI Wiranto menjelaskan tentang prosedur perintah BKO yang lazim berlaku di lingkungan militer. Menurut Wiranto, BKO bisa dikeluarkan oleh perwira yang lebih tinggi pangkatnya kepada pihak yang menerima perintah BKO tersebut.

Lepas dari induk

Dikatakan, BKO terjadi jika ada satu komando atau kesatuan mendapat tugas-tugas tertentu, terkadang kesatuan tersebut meminta perkuatan pasukan dari satuan lain dalam melaksanakan tugas tersebut.

"Kalau ada satu komando atau satu kesatuan yang mendapat tugas-tugas tertentu, ia akan menyusun suatu pengorganisasian untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Dalam tugas-tugas yang akan dilaksanakan itu, ia membutuhkan perkuatan dari pasukan yang lain. Pasukan yang lain inilah yang kalau masuk ke kesatuan tadi namanya BKO," katanya.

Pasukan yang di-BKO-kan itu, kata Pangab, terlepas dari induk kesatuannya, kemudian mereka di bawah kendali operasi dari satuan baru yang mendapat tugas itu.

"Di dalam konteks kasus Prabowo, Pak?" tanya wartawan.

"Saya tidak mau menjelaskan sepotong-sepotong. Kita tunggu hasil DKP sehingga nanti utuh semuanya bisa dijelaskan," kata Wiranto. Dia mengingatkan pers agar hati-hati menulis soal BKO. "Kalau tidak jelas ya jangan ditulis. Saya menjelaskan BKO secara umum, tidak ada kaitannya dengan kasus yang sekarang sedang berkembang," ujarnya.

Setelah sehari sebelumnya memeriksa Prabowo selama sekitar tujuh jam, kemarin DKP memeriksa dua saksi dan barang bukti.

Menurut sumber *Media* di Mabes TNI AD, sidang DKP kemarin hanya berlangsung sekitar tiga jam dari pukul 09.00 hingga pukul 12.00 WIB. Sumber tersebut tidak bersedia memberi penjelasan secara rinci mengenai dua saksi yang diperiksa itu. Sedangkan barang bukti yang diperiksa berupa kain hitam penutup muka dan sejumlah benda-benda lain yang berkaitan dengan kasus penculikan tersebut.(Edi/Wdh/D-12)

Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Prabowo Sudah Mengaku Salah

Perintah BKO Bukan dari Pangti dan Pangab

Subagyo: Keterlibatan Hartono Masih Dicek Lagi

Jakarta, JP.-

Dewan Kehormatan Perwira (DKP) kemarin memeriksa kembali dua mantan Danjen Kopassus, Letjen TNI Prabowo Subianto dan Mayjen TNI Muchdi Pr. Pemeriksaan lanjutan itu terpaksa dilakukan karena DKP ingin mendapatkan keterangan yang meyakinkan tentang kesalahan yang dilakukan kedua perwira tersebut dalam kasus penculikan dan penyekapan para aktivis prodemokrasi.

Mengapa harus diperiksa lagi? Menurut Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo, pemeriksaan itu terpaksa dilakukan lagi karena keterangan yang disampaikan kedua perwira tersebut sebelumnya kurang meyakinkan. Karena itu, pihaknya perlu melakukan *cross check* dengan keterangan-keterangan tambahan yang diperoleh dari para saksi dan barang-barang bukti yang ditemukan DKP.

Berdasarkan pemeriksaan ulang DKP terhadap kedua perwira (Prabowo dan Muchdi Pr) itu, kata KSAD yang juga dikenal pernah dekat dengan Prabowo ini, menantu Presiden Soeharto itu akhirnya mengakui secara terus terang kesalahannya. Dan, Prabowo secara jantan siap bertanggung jawab atas risiko apa pun dari kesalahan yang dia lakukan," ujar Subagyo di Mabesad Jakarta kemarin.

Ada yang menarik dalam pemeriksaan lanjutan terhadap Prabowo dan Muchdi Pr kemarin. Kalau sebelum ini keduanya datang ke Mabesad lewat pintu depan, kemarin keduanya sama-sama lewat pintu belakang. Mobil kedua perwira itu pun disembunyikan di sudut gedung Mabesad sehingga tidak diketahui wartawan.

Kedatangan mereka baru diketahui para kuli disket dari seorang provos yang mengatakan bahwa Prabowo dan Muchdi Pr datang lewat pintu belakang pukul 08.20 WIB. Karena itu, para wartawan membagi tugas –menjaga pintu depan dan belakang– untuk bisa mendapatkan keterangan dari kedua perwira tersebut.

Ternyata, Prabowo yang pernah dijuluki *the rising star* di ABRI dan Munchdi Pr yang pernah menjadi Kasdam V/Brawijaya dan Pangdam Tanjungpura itu tahu kalau *disanggong* wartawan di pintu depan dan belakang. Mereka pun akhirnya mengecoh para kuli disket lagi, lewat pintu samping. "Wah.., lagi-lagi *ketipu* kita," ujar para wartawan spontan.

Subagyo menjelaskan, dalam pemeriksaan kemarin, DKP menanyakan berbagai persoalan yang berkaitan dengan penculikan. Pertanyaan-pertanyaan DKP diarahkan untuk mengetahui letak kesalahan Prabowo, termasuk kejujurannya dalam memberikan keterangan. Apakah kesalahannya itu akibat tabiat Prabowo atau karena kesalahan prosedur?

Ternyata, menurut KSAD, Prabowo sudah mau mengakui kesalahannya dan siap bertanggung jawab. Keberanian Prabowo bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan itu, ujar alumnus Akabri '70 ini, membuktikan bahwa menantu Soeharto itu seorang perwira yang satria.

Apakah kesalahan itu dilakukan Probowo atau Kopassus sebagai institusi yang membawa misi khusus? KSAD mengatakan, kalau dicari kesalahannya, sudah pasti yang salah Prabowo. Sebab, perintah BKO itu disalahartikan sendiri oleh putra begawan ekonomi Prof Dr Sumitro Djojohadikusumo tersebut.

Lantas, dari mana perintah BKO itu? Subagyo menegaskan bahwa yang pasti bukan dari Pangti (Soeharto waktu itu) dan Pangab (Feisal Tanjung sampai ke Wiranto). Feisal Tanjung yang kemarin ditanya wartawan di Istana Negara sebelum sidang kabinet membantah dirinya ikut bersalah. Feisal justru meminta wartawan untuk menanyakan kepada Prabowo sendiri, mengapa sampai terjadi penculikan.

Kalau bukan Pangti dan Pangab yang memberikan perintah BKO kepada Prabowo, apakah KSAD yang saat itu dijabat Jenderal TNI R Hartono ikut terlibat? "Nanti kita lihat. Jangan gampang menyalahkan. Ini kan bukan hakim. Yang sudah pasti, ada kesalahan analisis sehingga penanganannya di lapangan menjadi tambah salah," ujar KSAD.

Penjelasan Subagyo ini sekaligus untuk meluruskan kembali keterangan Pangab Jenderal TNI Wiranto tentang kemungkinan adanya perwira lain yang pangkatnya lebih tinggi daripada Prabowo diperiksa. Ketika ditanya apakah perwira yang berpangkat lebih tinggi itu Hartono, Subagyo hanya mengatakan, "Nanti kita lihat dulu."

Saat Prabowo menjadi Danjen Kopassus, R Hartono memang menjadi KSAD. Konon, saat itu, keduanya memiliki konspirasi

politik. Bahkan, pemekaran tugas dan wewenang Kopassus dilakukan oleh Hartono yang juga dikenal dekat dengan keluarga mantan Presiden Soeharto lewat putri sulungnya, Ny Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut. Tentang hal ini, Subagyo mengatakan akan mengklarifikasi dugaan adanya konspirasi ini.

Subagyo menambahkan, DKP besok (hari ini) akan bersidang kembali. Sidang ini akan diikuti semua anggota DKP secara lengkap. Agenda utamanya, menganalisis hasil pengakuan para tersangka. Misalnya, tim DKP ingin mengetahui di mana letak kesalahan yang sesungguhnya.

Selain itu, katanya, tim DKP ingin tahu di mana kesalahan yang memberatkan dan hal mana saja yang bisa meringankan. Kesimpulan ini perlu diambil tim DKP, menurut Subagyo, agar saran yang diberikan kepada Pangab sebagai pengambil keputusan bisa tajam.

Meski hari ini sudah masuk dalam sidang analisis hasil pemeriksaan, masih akan ada sidang-sidang lanjutan lagi. Karena itu, KSAD mengimbau wartawan agar tetap bersabar dan tidak terburu-buru membuat penafsiran sendiri. Alasan dia, karena masih ada sidang lagi sehingga kemungkinan materinya berkembang sangat besar.

Ia mengakui, dalam sidang-sidang sebelumnya sudah berhasil mendatangkan para saksi, termasuk yang membuat surat perintah sampai pada tim TPF yang mengecek ke lokasi. Tapi, katanya, kemungkinan masih mendatangkan saksi sangat besar. "Maka, tunggu saja perkembangannya nanti karena sekarang masih dalam proses," ujarnya.

Subagyo setelah memimpin sidang tim DKP juga memimpin rapat rutin bulanan dengan seluruh jajaran Pangdam, Pangkotama, Danpuspom, dan seluruh pimpinan di jajaran TNI AD. Pertemuan ini, katanya, sifatnya bukan politis, tetapi lebih pada aspek pembinaan.

Sementara itu, mantan Kassospol ABRI Letjen (Pur) Bambang Triantoro mengatakan bahwa Prabowo dan Kopassus sebenarnya hanya bagian dari operasi. "Jadi, ada institusi lain yang terlibat dalam kasus penculikan itu," katanya di Jakarta tadi malam.

Bambang lantas menyebutkan, institusi lain yang dimaksud itu, antara lain, kodam dan BIA. Karena itu, ketua umum YKPK itu minta agar Prabowo mengungkapkan satuan-satuan lain yang terlibat dalam penculikan tersebut.

Bahwa sementara ini baru Prabowo dan dua perwira Kopassus lain yang diperiksa DKP, menurut Bambang, itu lantaran tahapannya memang baru sampai di situ. Namun, suatu saat nanti bisa saja mengarah ke yang lain.

Menjawab pertanyaan apakah Pangab waktu itu ikut terlibat, Bambang mengatakan, bisa saja Pangab memberikan perintah waktu itu. "Tapi, bukan perintah penculikan," ujarnya.

DKP, lanjut Bambang, juga bisa memanggil Pangab yang menjabat saat penculikan itu terjadi. Tapi, status Pangab dalam hal ini bukan sebagai terperiksa. "Pangab hanya sebagai saksi," katanya. **(ilo/saf/uf)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Prabowo dan Muchdi akan diperiksa lagi

JAKARTA (Bisnis): Ketua Dewan Kehormatan Perwira Jenderal TNI Subagyo HS mengatakan pihaknya akan memanggil kembali ketiga perwira yang telah diperiksa untuk menyempurnakan rekomendsi hasil pemeriksaan DKP yang akan disampaikan kepada Pangab.

"Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi Prandjono dan Kolonel Inf. Chairawan akan kembali dipanggil untuk menghadap Dewan Kehormatan Perwira (DKP) setelah tanggal 17 Agustus," ujar KSAD Jenderal TNI Subagyo Hadi Siswoyo di Mabes AD, kemarin.

Di tempat yang sama, Sekretaris Dewan Kehormatan Perwira Letjen TNI Djamari Chaniago menyatakan sidang Dewan Kehormatan Perwira akan dilanjutkan kembali setelah tanggal 17 Agustus 1998 dengan agenda a.l. menghadirkan ketiga terperiksa.

DKP, katanya, memang mengadakan sidang pada Kamis, namun hanya melakukan evaluasi atas sidang-sidang terdahulu. Kemudian diputuskan pertemuan berikutnya dilakukan minggu depan, ujar Pangkostrad Letjen TNI Djamari Chaniago.

Para anggota DKP yang tampak hadir kemarin adalah Gubernur Akabri Laksamana Madya Achmad Sutjipto, Kasum ABRI Letjen TNI Fachrur Razi, Kassospol ABRI Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, dan Gubernur Lemhanas Letjen TNI Agum Gumelar.

Ketika ditanyakan siapa yang memberi perintah BKO, Subagyo menyatakan perintah tersebut bukan datang dari Pangab maupun Pangti ABRI.

Dalam sidang tersebut, katanya, belum membahas mengenai siapa yang telah memberikan perintah BKO kepada Prabowo. "Kalian jangan menafsirkan siapa orangnya. Nanti saja setelah ada bukti dari proses pemeriksaan selanjutnya, saya kasih tahu kepada kalian," ujarnya, ketika ditanya mengenai kemungkinan keterlibatan mantan Kasad Jenderal TNI (Purn.) Wiranto.

Tahapan pemeriksaan saat ini, menurut dia, baru proses pengumpulan data, belum sampai kepada kesimpulan final yang akan disampaikan kepada Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto. "Setelah 17 Agustus nanti baru sidang dan kelihatan final. Kalau tadi hanya kesimpulan dan *sharing* pendapat atas temuan fakta," ujarnya.

Di Yogyakarta, Mantan Pangkostrad Letjen TNI Purn. Kemal Idris menilai bila Letjen TNI Prabowo mengaku bersalah dalam kasus penculikan para aktivis, maka dia bisa diajukan ke Mahmil dan menerima hukuman penjara atau bahkan hukuman mati.

"Dia [Probowo] *kan* sudah mengakui. Harus dituntut selanjutnya dong," ujarnya ketika ditanya pers di sela semiloka bertema *Mencari platform gerakan reformasi menuju persatuan dan kesatuan bangsa*, di Yogyakarta, kemarin. **(k8/k15/s8/ds/is)**

Hal. 1/ .....
Kelas: .....

LSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Prabowo Cs Akan Diperiksa Lagi

Kemal Idris: Kalau Dimahmilkan Bisa Diancam Hukuman Mati

Jakarta, JP.-

Pengakuan bersalah Letjen TNI Prabowo Subianto dalam kasus penculikan para aktivis prodemokrasi kemarin langsung dibahas Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Hasilnya? Mereka masih merasa perlu mengkaji lebih mendalam pengakuan menantu mantan Presiden Soeharto ini dalam sidang-sidang kemajuan dalam pemeriksaan kedua terhadap Prabowo. Misalnya, ia berani berterus terang mengakui kesalahannya. Meski demikian, kesalahan menantu Soeharto itu masih perlu dianalisis lagi secara rinci.

"Analisa itu penting agar tidak memberikan kesan langsung menghakimi. Kalau *toh* dihakimi, itu berdasarkan bukit-bukti yang kuat. Untuk memberikan bukti-bukti tambahan itu, sekarang masih diproses terus," ujar mantan Pangdam IV/Diponegoro ini.

Alumnus Akabri '70 yang juga teman Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Djoko Subroto ini menjelaskan, proses sidang tim DKP untuk sementara libur hingga 17 Agustus.

Jadi, pada tanggal 14, 15, 16, dan 17 Agustus, tim DKP cuti, tidak bersidang. Sidang, katanya, akan dilanjutkan pada 18 Agustus. Pada sidang mendatang, akan diperiksa lagi Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi Pr, dan Kolonel Inf Chairawan.

Ketika ditanya bagaimana sebenarnya prosedur BKO, misalnya benarkah pasukan Kopassus di-BKO-kan ke Kodam untuk membantu melakukan penculikan, Subagyo tidak mau menjawab. "Soal itu nanti akan saya jelaskan setelah sidang semuanya selesai," ujar Subagyo yang dulu pernah menjadi salah satu anak emas mantan Presiden Soeharto ini.

Ketika ditanya dugaan keterlibatan mantan KSAD (R Hartono) dalam kasus penculikan itu, Subagyo mengatakan, sampai sidang kemarin, belum disinggung masalah itu. Sidang kemarin, katanya, hanya mengevaluasi hasil pemeriksaan tiga terperiksa, khususnya pengakuan kesalahan yang dilakukan Prabowo.

Kasus Prabowo Sangat Berbahaya

Salah satu anggota tim DKP Pangkostrad Letjen TNI Djamari Caniago setelah sidang kepada wartawan mengatakan, meski Prabowo sudah mengakui kesalahannya, tim DKP belum bisa menjatuhkan sanksi apa pun. Sanksi ini, katanya, akan dibicarakan kemudian. Sebab, sidang-sidang berikutnya masih memerlukan kajian ulang.

Menurut dia, masih diperlukan beberapa kali lagi persidangan DKP. Sebab, masih akan dilakukan lagi pemeriksaan terhadap tiga terperiksa karena penjelasan mereka dinilai belum cukup.

Adakah perwira lebih tinggi yang akan diperiksa tim DKP? Menurut alumnus Akabri '71 ini, kemungkinan keterlibatan perwira yang lebih tinggi daripada Prabowo masih akan diselidiki lagi. Kemungkinan itu bisa terjawab setelah tanggal 17 Agustus.

Sementara itu, Wakil Ketua DPA Achmad Tirtosudiro menyatakan, terlalu berbahaya jika dalam kasus pemeriksaan Prabowo cs ada spekulasi-spekulasi politik lebih jauh. Menurut dia, kasus Prabowo cs sangat serius bagi bangsa dan negara ini.

Oleh karena itu, dia minta masyarakat tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan-kesimpulan tanpa fakta yang jelas. "Dalam soal yang seserius ini, kita tidak berani spekulasi-spekulasi bahwa si A terlibat atau si B yang memberikan perintah BKO," ujar Achmad.

Purnawirawan jenderal bintang tiga ini mengatakan, masyarakat sedang menunggu hasil akhir tim DKP. Disebutkan, kasus Prabowo cs menyangkut masalah yang sangat berat dan serius bagi bangsa dan negara. Bahkan, juga bagi kalangan dunia internasional.

Karena itu, dia tidak sependapat dengan sementara orang yang berspekulasi bahwa mantan KSAD Jenderal (pur) Hartono terlibat. Atau, ada yang menyebut Soeharto sebagai Pangti juga harus diperiksa.

"Kita tunggu saja hasilnya yang lebih positif. Terlalu berbahaya (spekulasi) dalam masalah yang seserius ini. Ini menyangkut (masalah) yang sangat berat. Berbahaya karena bisa punya pengaruh yang besar jika terbukti salah spekulasi tersebut."

Menurut pejabat ketua umum ICMI ini, kasus Prabowo cs bisa saja tidak hanya menyangkut soal penculikan, tapi juga masalah lain, seperti kerusuhan 13-14 Mei lalu.

"Itu semua bukan masalah-masalah yang kecil. Lebih baik cari fakta-fakta atau indikasi yang cukup jelas. Sekali lagi, terlalu serius untuk kita mendahului dan mengadakan spekulasi tentang berbagai kemungkinan."

BISA DIHUKUM MATI

Pangakuan salah Letjen TNI Prabowo Subianto dalam kasus penculikan para aktivis prodemokrasi membawa konsekuensi harus ditindaklanjuti dengan mengajukan perwira tinggi ABRI ini ke mahkamah militer. Penculikan disertai penyekapan dan penganiayaan dengan cara diseterum dan disiksa jelas merupakan tindak pidana dan tidak bisa hanya dinyatakan sebagai kesalahan prosedur.

"Kalau Prabowo sudah mengakui kesalahannya, *ya* nanti harus ditindaklanjuti dengan tuntutan berikutnya. Ajukan dia ke mahmil. Ini merupakan jalan terbaik bagi ABRI untuk mengembalikan kepercayaan dari masyarakat. *Ya*, tidak bisa Prabowo hanya mengaku salah begitu saja. Harus ada jeratan hukumnya," tandas mantan Pangkostrad Letjen TNI (Pur) TNI Kemal Idris, kemarin.

Ditemui wartawan di sela-sela semiloka *Mencari Platform Bersama Gerakan Reformasi Menuju Kesatuan dan Persatuan Bangsa* di kampus UGM, Kemal mengatakan, kalau Prabowo kemudian diajukan ke mahkamah militer, bisa dipastikan karier militer putra begawan ekonomi Prof Sumitro Djojohadikusumo ini habis. Melihat kesalahan Prabowo, hukuman yang bakal dijatuhkan sudah selayaknya bakal cukup berat.

"Hukumannya akan tergantung dari tingkat kesalahan dia. Misalnya, hukuman penjara sekian tahun atau bahkan bisa hukuman mati. Kalau tidak salah, di militer itu, kalau hukumannya lebih dari tiga tahun penjara, maka yang bersangkutan harus dikeluarkan dengan tidak hormat alias dipecat. Kalau begitu, *ya* jelas kariernya sudah habis," kata Kemal yang belum lama ini bersama para jenderal tua mendirikan Barisan Nasional.

Ditanya adakah kemungkinan perintah operasi penculikan kepada Prabowo itu datang dari yang lebih atas, Kemal mengatakan bisa saja terjadi. "Bisa saja perintah itu datang dari Soeharto, bisa dari Pangab Feisal Tanjung waktu itu, atau bisa juga dari KSAD Hartono waktu itu. Pengakuan Prabowo ini memang harus diurut, sampai sejauh mana kemungkinan perintah itu datang dari para jenderal di atas Prabowo."

Apakah operasi penculikan para aktivis ini resmi dari ABRI atau dari Prabowo sendiri? Kemal mengatakan dirinya tidak bisa mengatakan resmi atau tidak resmi atau operasi itu merupakan tindakan tersendiri. Dikatakan, BKO bisa dikeluarkan dan dibicarakan dalam staf, lalu komandan mengambil keputusan, dan keluarlah perintah operasi. Kalau daerahnya besar, pasukan

dibagi. Misalnya, pasukan A di daerah ini dan pasukan B di sana.

Prabowo mengatakan ada kesalahan dalam mengevaluasi perintah. Bagaimana itu? "*Ya* dia sendiri yang salah. Dia tidak menanyakan lebih lanjut perintah operasi itu. Kalau itu benar terjadi, maka itu kecerobohan Prabowo. Padahal, kalau memang Soeharto terlibat, dia juga dituntut *dong*."

(dib/iwa/wan)

LSAM Pus
LE
TH
dia:
BISNIS INDONI
JAKARTA POS
JAWA POS
KOMPAS
KD. RAKYAT
MEDIA INDON

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Nasib Prabowo ibahas Pekan Depan

■ Subagyo:Temuan DKP Makin Maju

JAKARTA (Media): Nasib mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto yang kini tengah diperiksa Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dalam kasus penculikan sejumlah aktivis prodemokrasi akan ditentukan setelah tanggal 17 Agustus ini.

Begitu juga nasib dua pentolan Kopassus lainnya yakni mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi dan mantan Dan Grup IV Kopassus Kolonel Inf Chairawan. Sampai kemarin DKP masih mengadakan rapat membahas hasil-hasil yang telah dicapai. Namun belum ada rekomendasi kepada Pangab berkaitan dengan ketiga pentolan pasukan elite TNI-AD tersebut.

Bahkan menurut Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo, DKP akan memanggil ketiga terperiksa kembali setelah tanggal 17 Agustus 1998 untuk dimintai keterangan tambahan.

Seperti diberitakan, Menhankam/ Pangab Jenderal TNI Wiranto membentuk DKP untuk meneliti keterlibatan ketiga perwira Kopassus tersebut dalam kasus penculikan sejumlah aktivis prodemokrasi beberapa waktu lalu.

DKP terdiri dari ketua Jenderal TNI Subagyo, wakil Letjen TNI Fachrul Razi, sekretaris Letjen TNI Djamari Chaniago, dan anggota Letjen TNI Yusuf Kertanegara, Letjen TNI Agum Gumelar, Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, dan Laksamana Madya TNI Achmad Sutjipto. Kemarin DKP mengadakan rapat intern dari pukul 13.00 sampai pukul 16.00.

Mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto telah mengaku salah mengakui salah dan bagaimana salahnya itu akan lebih diperdalam lagi. "Kesimpulan sementara Prabowo menganalisis BKO (bawah kendali operasi) salah, sehingga terjadi penculikan. Soal siapa yang memberikan perintah BKO ini akan dirinci lagi oleh DKP dan sedang diproses," katanya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris DKP Letjen TNI Djamari Chaniago. "Hasil rekomendasi DKP akan ditentukan setelah tanggal 17," jelasnya.


Prabowo Subianto
■ MEDIA/GINO F HADI

Berbagai kemajuan

Pada bagian lain Jenderal Subagyo mengatakan dalam melakukan tugas DKP mendapatkan berbagai kemajuan. Namun ketiga terperiksa, Letjen TNI Prabowo, Mayjen TNI Muchdi, dan Kol Chairawan akan diperiksa kembali setelah 17 Agustus 1998.

"Hasil pemeriksaan DKP akan dipertajam kembali sebelum disampaikan sebagai rekomendasi kepada Pangab. Hasilnya akan disampaikan juga kepada kalian, termasuk hasil tahapan pemeriksaannya, supaya tidak salah dalam memberitakan," kata Jenderal Subagyo.

Ketika wartawan menanyakan tentang kemungkinan diperiksanya perwira tinggi ABRI lainnya yang memberikan BKO kepada Prabowo, Jenderal TNI Subagyo mengatakan masalah itu masih terus diteliti.

Menanggapi pertanyaan wartawan tentang kemungkinan pemeriksaan DKP dikembangkan dengan memeriksa Pati lainnya, dia juga menyebutkan kemungkinan ke arah itu tergantung hasil pemeriksaan DKP.

Ditanya, apakah Prabowo juga mengakui dirinyalah yang memberikan perintah pencu-

Sulit dilupakan

Bagaimana sosok Prabowo di mata para mantan komandannya? Di mata Letjen TNI Yunus Yosfiah, mantan komandannya ketika bertugas di Timor Timur, Prabowo adalah sosok pribadi yang baik dan memiliki antusiasme yang tinggi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya.

"Waktu itu Prabowo menjadi anak buah saya, ia masih bujangan. Pangkatnya Letnan Dua," kata Yunus, yang kini menjabat Menteri Penerangan itu belum lama ini mengomentari sosok Prabowo.

Menurut Yunus, Prabowo memiliki kepandaian yang menonjol dibanding rekan-rekan seangkatannya. "Intelegensianya cukup tinggi," ujarnya.

Selama satu tahun di Timtim, tambah Yunus yang juga pernah di Kopassus, Prabowo tidak pernah melakukan perbuatan menyimpang dari garis komando. "Saya tidak tahu setelah itu, sebab hanya setahun itu ia menjadi anak buah saya."

Sementara itu Pangdam Jaya Mayjen TNI Djadja Suparman menegaskan secara proaktif pihaknya sudah melakukan penge-

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

edia:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

DKP Masih akan Periksa

Prabowo, Muchdi dan Chairawan

Jakarta, Kompas

Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo mengatakan, DKP masih akan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) Letjen TNI Prabowo Subianto dan Mayjen TNI Muchdi PR serta Komandan Grup IV Kopassus Kolonel (Inf) Chairawan.

"Maksud DKP menghadirkan kembali ketiganya itu untuk melakukan pendalaman terhadap hasil pemeriksaan DKP selama ini agar saran yang nantinya akan diserahkan kepada Menhankam/Pangab akan lebih baik," kata Subagyo menjawab wartawan usai sidang lanjutan DKP hari Kamis (13/8) siang di Markas Besar TNI AD (Mabes AD) Jakarta.

Sidang DKP berlangsung tiga jam. Tampak hadir antara lain Letjen TNI Agum Gumelar, Letjen TNI Yusuf Kertanegara, Letjen TNI Fachrul Razi, Letjen TNI Bambang S Yudhoyono, Letjen TNI Djamari Chaniago dan Laksdya TNI Achmad Sutjipto. Selain itu, DKP juga menghadirkan Asisten Operasi Kasum ABRI Mayjen TNI Johnny Lumintang.

Subagyo mengatakan, sidang pemeriksaan DKP kemarin adalah untuk evaluasi beberapa sidang sebelumnya. "Dari evaluasi itu kita menentukan apa yang akan dilakukan DKP pada sidang berikutnya," katanya.

Sidang berikutnya akan dilaksanakan setelah 17 Agustus 1998, karena menurut Subagyo, selama 14-16 Agustus para pejabat anggota DKP sangat sibuk dengan kegiatan lain.

Pulihkan citra

Agum Gumelar yang dihubungi secara terpisah mengatakan, tak dapat disangkal bahwa terungkapnya Kasus Orang Hilang (KOH) yang kemudian diduga besar pelakunya adalah oknum anggota Kopassus telah merusak citra ABRI di mata rakyat. "Betul itu. Cara ABRI yakni harus melakukan perbaikan ke dalam," katanya.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) ini mengatakan, pimpinan ABRI harus memberikan tindakan tegas terhadap mereka yang berbuat salah. "ABRI harus berani menindak prajuritnya yang telah mencoreng nama baiknya. Persoalan tindakan apa yang akan diambil tentunya itu harus sesuai prosedur hukum. Ini akan membersihkan ABRI dari hal-hal yang tidak benar," katanya.

Tentang adanya kesalahan analisis mengenai perintah BKO yang dilakukan Prabowo, Agum mengatakan, "Prabowo memang harus begitu. Kalau salah harus diakui salah. Soal apakah kesalahan itu adalah pidana atau hanya sebatas pelanggaran prosedur, saya kira nanti ditentukan Mahkamah Militer," katanya.

Jika hanya berupa kesalahan prosedur, kata Agum, di ABRI dasarnya adalah apakah perintah operasi berjalan tidak baik di lapangan. "Kalau hal ini tidak berjalan, itu namanya kesalahan prosedur. Tapi jika tanpa perintah, seorang prajurit melakukan tindakan melanggar hukum, itu namanya pidana," tutur Agum.

"Kesalahan analisis seperti yang dilakukan Prabowo ini, itu namanya kesalahan prosedur," katanya. **(ama)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA		1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA		2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA		3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA		4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN		5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

DKP belum Jelaskan Jumlah yang Diculik

JAKARTA — Meski Letjen TNI Prabowo Subianto telah mengaku salah dalam kasus orang hilang, jumlah aktivis yang diculiknya belum juga jelas. Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo tidak bersedia menjawab pertanyaan tentang itu.

"Bukan, bukan persoalan begitu. Yang penting dia telah mengakui salahnya di mana. Apa-apa saja nanti kesalahannya akan lebih diperdalam lagi," ujar Subagyo pada wartawan di Markas Besar TNI-AD (Mabesad), Jakarta, kemarin.

Kepada wartawan Senin (10/8) lalu, Subagyo menegaskan bahwa Prabowo telah salah menganalisis perintah Bawah Kendali Operasi (BKO) yang diberikan kepadanya. Penjelasan mantan Komandan Kopassus itu kemudian dipertegas Rabu (13/8) lalu bahwa Prabowo telah mengaku salah menganalis perintah, yang kemudian berkembang menjadi tindakan penculikan.

Sumber-sumber *Republika* menyebutkan bahwa dalam beberapa kesempatan, Prabowo memang mengaku menculik. Namun, dia melakukan tindakan itu hanya terhadap Ketua SMID, Andi Arief, dan beberapa aktivis PRD lainnya. Itu pun, karena Prabowo menyebut Andi dan teman-temannya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (D-PO) ABRI. Sedangkan penculikan terhadap Pius Lustrilanang, Desmond J Mahesa, serta 12 orang lainnya yang hingga kini belum kembali, Prabowo mengaku tidak tahu.

Subagyo kemarin juga belum bersedia menjawab pertanyaan siapa yang memberi perintah BKO kepada Prabowo saat menjabat Danjen Kopassus.

Ketika ditanyakan apakah penerima pasukan pada perintah BKO itu adalah para Pangdam di seluruh Indonesia, Subagyo menjawab: "Nanti dulu, nanti dulu. Nanti daripada saya hanya menjelaskan hanya sepotong, lebih baik setelah itu saya berikan. Okey?."

Sementara itu Ketua Solidaritas Masyarakat Indonesia untuk Demokrasi (SMID) Andi Arief, yang menjadi korban penculikan menyatakan tidak masuk akal bila Prabowo salah menganalisa perintah. "Kalau kesalahan itu terjadi dalam tingkat analisis perintah BKO, kenapa penculikan itu terjadi berbulan-bulan," kata Andi, di Bandarlampung kemarin. ■ bsa/oed

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☑ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

▲ Subagyo: Yang Penting Dia Akui Salahnya

Ada Hal Baru Dalam Kasus Penculikan

Jakarta, Jumat, Merdeka

Ada hal baru yang ditemukan dalam pengusutan kasus penculikan para aktivis yang ditangani DKP (Dewan Kehormatan Perwira). Yaitu, perintah yang diberikan kepada Letjen Prabowo ketika menjabat Danjen Kopassus ternyata tidak ada kaitannya dengan upaya pengamanan Sidang Umum MPR 1-11 Maret 1998.

Namun Ketua DKP Jenderal Subagyo HS tetap tidak mau menjelaskan apa isi perintah itu sebenarnya, yang kemudian dianalisa Prabowo.

"Bukan, bukan itu (perintah mengamankan SU MPR-*red*). Sudah saya katakan dia menganalisa tugas, lalu salah, sehingga mengakibatkan hal seperti ini," ujar Kasad Jenderal Subagyo ketika dicegat wartawan di Mabesad, kemarin.

Perwira sekaliber Prabowo *kok* bisa salah? "Saya sudah katakan, nanti lebih rinci lagi. Waktu pertama kali bersidang *kan* belum menemukan kemajuan seperti ini. Sekarang ada kemajuan. Ini *kan* lagi proses. Janganlah membuat opini seperti menghakimi," jawabnya.

Selain itu juga diperoleh informasi bahwa belum diketahui berapa kali penculikan sempat melibatkan Letjen Prabowo semasa dia menjabat sebagai Danjen Kopassus. Bahkan Subagyo yang berkali-kali ditanya soal itu mengatakan, saat ini bukan itu yang menjadi masalah.

"Bukan persoalan begitu. Yang penting dia mengakui salahnya di mana, apa-apa saja nanti yang akan diperdalam lagi," kata Kasad.

Masalah ini, lanjutnya, akan diperdalam setelah tanggal 17 Agustus dengan memanggil dan memeriksa tiga terperiksa, yaitu Letjen Prabowo, Mayjen Muchdi PR dan Kolonel Chairawan. Mereka akan kembali diperiksa dengan sejumlah penajaman.

"Setelah tanggal 17 Agustus akan diadakan sidang lagi. Karena hari-hari ini dari tanggal 14 sampai 17 kegiatan para pejabat penuh," kata jenderal bintang empat itu.

Yang paling menarik dari kejadian kemarin adalah ketika mobil dinas Kasad dicegat oleh puluhan wartawan di depan pintu gerbang utama Mabesad. Hal ini dilakukan karena para wartawan menganggap keterangan yang diberikan Sekretaris DKP Letjen Djamari Chaniago (Pangkostrad) kurang lengkap.

Ceritanya, sekitar pukul 16.40 WIB, Kasad sudah berada di samping mobil dinasnya yang diparkir di depan pintu masuk. Sekitar 50 wartawan dalam dan luar negeri terlihat ceria melihat Jenderal Subagyo sempat tersenyum. "Pak beri keterangan *dong*. Kurang jelas nih," teriak seorang wartawan. Yang diteriaki hanya tersenyum dan kemudian masuk ke dalam mobil.

Melihat gelagat rayuan itu tidak berhasil para wartawan langsung mendekati pintu masuk utama. Sementara itu sekitar 10 wartawan foto sudah berdiri sekitar satu meter di depan pintu gerbang. Ternyata mobil dinas berplat nomor 1-00 itu terus melaju menuju pintu gerbang.

Tanpa disangka-sangka, ternyata para wartawan foto tidak bergeming dan terus menutupi jalan mobil itu. Petugas berseperda motor yang mengawal kendaraan itu juga tidak kuasa menghalangi. Tentu saja secara mendadak, supir mobil merek Toyota Crown warna hijau itu langsung menginjak rem dan berhenti secara mendadak.

Dari dalam, Jenderal Subagyo menurunkan kacanya dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Masih tersenyum, bekas Komandan Kopassus itu turun dari kendaraannya. Salah seorang petugas sempat juga menggerutu, "Wartawan bagaimana sih? *Masak* mobil jenderal dicegat," katanya pelan.

Dengan nada santai namun tegas, Subagyo kepada wartawan lalu mengatakan bahwa rapat evaluasi yang dipimpinnya selama empat jam itu membahas hasil dari pemeriksaan yang sudah dilakukan selama tujuh hari ini. Hasilnya, DKP akan memperdalam hasil sementara yang diperoleh untuk kemudian disampaikan kepada Pangab.

"Baru setelah tanggal 17, dewan akan menyidang tiga terperiksa lagi, sehingga diharapkan hasilnya mendalam dan menjadi pedoman bagi Pangab," tuturnya.(PN)



Ruslan/Merdeka

Subagyo dikerumuni wartawan di Mabesad, kemarin.

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☑ Merdeka	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Prabowo Kembali Diperiksa setelah Tanggal 17 Agustus

JAKARTA -Walaupun telah mengadakan sidang internal mulai pukul 13.00 sampai 16.00 WIB kemarin, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) belum menghasilkan suatu saran/rekomendasi kepada Pangab. Untuk itu, ketiga perwira terperiksa, Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kolonel (Inf) Chairawan, akan kembali diperiksa setelah 17 Agustus 1998 untuk dimintai keterangan.

"DKP dalam melakukan tugasnya mendapatkan berbagai kemajuan. Ketiga terperiksa akan diperiksa kembali setelah 17 Agustus 1998," kata Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo kepada wartawan seusai sidang di Markas Besar (Mabes) AD, kemarin sore.

Dia menyatakan, alasan pemeriksaan dan sidang DKP setelah 17 Agustus 1998 antara lain karena kesibukan anggota pada 14, 15, 16, dan 17 Agustus berkaitan dengan peringatan HUT Kemerdekaan. "Hasil pemeriksaan DKP akan dipertajam kembali, sebelum disampaikan sebagai rekomendasi kepada Pangab. Hasilnya akan disampaikan juga kepada kalian, termasuk hasil tahapan pemeriksaannya, supaya tidak salah dalam memberitakan," tambah dia.

Ketika wartawan menanyakan kemungkinan perwira tinggi ABRI lain yang memberikan BKO kepada Letjen TNI Prabowo Subianto juga diperiksa, Subagyo menyebutkan masalah itu masih terus diteliti. "Kemungkinan ke arah itu tergantung pada hasil pemeriksaan."

Dia menyebutkan, Prabowo Subianto sudah mengakui kesalahannya dalam menganalisis tugas atau bawah kendali operasi (BKO). Namun ketika wartawan menanyakan kemungkinan Prabowo sudah mengakui ada yang memberikan perintah penculikan aktivis, Ketua DKP mengatakan persoalannya bukan seperti itu. "Yang penting dia sudah mengakui kesalahannya di mana dan apa-apa saja," tegasnya.

Kemajuan Berarti

Ketika wartawan menanyakan kemungkinan Prabowo melakukan tindakan seperti itu dalam rangka mengamankan SU MPR, dia menyebutkan Prabowo salah menganalisis tugas. Setelah memeriksa Prabowo Subianto, Muchdi PR, dan Chairawan, sidang DKP mendapatkan kemajuan berarti dalam melakukan tugas.

Hari pertama kerja DKP tidak ada kemajuan seperti ini, namun berikutnya selalu ada kemajuan hasil pemeriksaan. Pihaknya kemarin melakukan rapat internal untuk menentukan dan memperdalam hasil pemeriksaan guna dijadikan bahan pertimbangan kepada Pangab dalam mengambil keputusan. Agar rekomendasi makin tajam dan dalam, pihaknya akan kembali menyidangkan ketiga terperiksa setelah 17 Agustus 1998.

Sidang dipimpin Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo, dan dihadiri seluruh anggota. Sebelumnya, Sekretaris DKP Letjen TNI Djamari Chaniago mengatakan rekomendasi akan dihasilkan setelah 17 Agustus 1998. Menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan Prabowo direkomendasikan menjadi tersangka, dia mengatakan belum mengetahui.(di-11g)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☑ MEDIA INDONESIA	☐	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Prabowo Mungkin ke Mahmil

Rekomendasi DKP kepada Pangab

JAKARTA (Media): Dewan Kehormatan Perwira (DKP) kemungkinan besar akan memberikan rekomendasi agar mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR, dan mantan Komandan Grup IV Kopassus Kolonel Inf Chairawan diajukan ke Mahkamah Militer dalam kasus penculikan para aktivis prodemokrasi.

"Namun rekomendasi ini kan hanya berupa saran kepada Pangab. Jadi apakah saran itu diterima atau tidak merupakan hak Pangab," ujar Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo yang juga Kepala Staf TNI AD (KSAD) itu kepada wartawan kemarin seusai salat Jumat di Mabes TNI AD Jakarta.

Subagyo menegaskan, rekomendasi DKP terhadap ketiga perwira pasukan elite TNI-AD itu sudah jelas, yakni sanksi administratif dan Mahmil.

Karena itu dia minta agar tidak perlu mengira-ngira lagi rekomendasi DKP karena sudah jelas. Menurutnya, pemeriksaan lanjutan terhadap ketiga perwira itu setelah tanggal 17 Agustus adalah untuk pendalaman. Setelah itu barulah DKP memberikan dua saran tersebut kepada Pangab.

Seperti diberitakan, Prabowo dalam pemeriksaan DKP mengaku salah menganalisa perintah Bawah Kendali Operasi (BKO) sehingga terjadi penculikan. Namun sampai saat ini belum diketahui siapa memerintah Prabowo dan apa isi dari BKO tersebut.

Seperti diketahui, Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto beberapa waktu lalu membentuk DKP untuk meneliti keterlibatan ketiga pentolan Kopassus dalam kasus penculikan para aktivis prodemokrasi. DKP diketuai Jenderal TNI Subagyo dengan Wakil Letjen TNI Fachrul Razi, Sekretaris Letjen TNI Djamari Chaniago dan anggota di antaranya Letjen TNI Agum Gumelar, Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono.

Sutiyoso: Itu ngawur

Pada kesempatan terpisah mantan Pangdam Jaya Mayjen TNI Sutiyoso mengatakan dirinya tidak pernah menerima pasukan dalam status BKO dari Kopassus baik dalam operasi Sidang Umum MPR maupun opersi lainnya.

Jenderal berbintang dua ini juga menyatakan *ngawur* kalau Pangab sampai tidak tahu bila Danjen Kopassus telah mem-BKO-kan pasukannya.

"Pengalaman saya di militer mengajarkan bahwa BKO itu harus dapat perintah dari Panglima, kalau tidak itu *ngawur*," katanya menjawab pertanyaan pers seusai diterima Mendagri di Jakarta, kemarin.

Sutiyoso yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI berani memastikan bahwa Pangab mengetahui adanya BKO itu karena hal itu telah diatur dalam aturan kemiliteran.

"Memang yang dapat mengetahui adanya BKO itu tidak harus perwira yang lebih tinggi, yang sederajat pun juga bisa tahu. Misalnya, Kopassus dan Pangdam, itu *kan* sejajar. Artinya dalam satu level Kotama. Tetapi yang pasti, Panglimanya harus mengerti. *Masak* BKO pasukan di rumah sendiri kok *nggak* ngerti, karena apa pun yang terjadi, panglima harus bertanggung jawab," ujarnya.

Ditanya apakah ketika menjabat Pangdam Jaya pernah menerima BKO dari Kopassus, dia mengatakan tidak. "Secara kategoris saya tegaskan bahwa saya tidak pernah menerima BKO dari Kopassus. Sama sekali tidak pernah," tegasnya, sembari menambahkan, "Kalau ada mesti tertulis."

Kendati dia menyatakan secara tegas tidak pernah menerima BKO dari Kopassus, tetapi Sutiyoso tidak tahu apakah penggantinya menerima atau tidak. "Saya tegaskan, ketika saya jadi Pangdam ke-13, tidak ada BKO dari Kopassus. Tetapi setelah itu, saya tidak ngerti," katanya.

Ketika ditanya dalam operasi Sidang Umum MPR apakah Kodam membutuhkan Kopassus, dia mengatakan pasukan yang terlibat adalah marinir. "Waktu itu ada pasukan dengan status Bawah Perintah (BP), tetapi ada juga yang BKO dari TNI-AU dengan helikopternya," ujarnya.

"Dalam kasus penculikan?" kejar wartawan. "*Nggak* ada BKO dari Kopassus saat itu," jawab Sutiyoso.

Dari Yogyakarta dilaporkan Ketua DPP Barisan Nasional Kemal Idris mengatakan tidak tertutup kemungkinan Prabowo hanya menjalankan perintah penculikan para aktivis prodemokrasi itu. "Yang memberi perintah penculikan itu bisa Pangab atau Pangti," katanya. (Edi/Wdh/AU/D-12)



■ DOK-MEDIA

■ Prabowo

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Pemeriksaan DKP Jangan Abaikan Korban yang Masih Hilang

Jakarta, Kompas

Pemeriksaan yang dilakukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) jangan sampai mengabaikan persoalan nasib 14 orang yang belum diketahui keberadaannya. Motivasi politik yang melatarbelakangi penculikan juga harus diungkapkan. Kedua hal itu kini menjadi pertanyaan masyarakat internasional.

Demikian dikatakan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Clementino dos Reis Amaral dan Direktur Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Hendardi yang dihubungi *Kompas*, Jumat (14/8).

Amaral mengatakan, Komnas HAM berharap, Menhankam/ Pangab Jenderal TNI Wiranto segera mendesak pihak yang bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada publik di mana orang-orang yang belum kembali itu, apakah masih hidup atau mati. Perwira yang diperiksa harus juga ditanya di mana keberadaan korban yang masih hilang.

Hendardi mengatakan, pemeriksaan DKP hendaknya tidak mengalihkan persoalan motif politik dan nasib orang hilang yang belum kembali dari kasus penculikan. Kecenderungan itu tampak dari pemeriksaan yang tertutup, dan pemberian penjelasan yang tidak sepenuhnya dipahami masyarakat.

"Masyarakat *nggak* paham, apa itu BKO yang dianalisis secara salah. Masyarakat menuntut di mana korban lainnya, kalau masih hidup kembalikan kepada keluarganya, kalau sudah mati di mana kuburnya," tegas Hendardi.

Hendardi memperkirakan, mereka yang diperiksa seharusnya mengetahui keberadaan korban yang belum kembali karena mereka mengetahui tempat penyekapan. Namun, karena pemeriksaan bersifat tertutup, masyarakat tidak dapat mengetahui perkembangan keberadaan para korban tersebut.

Amaral menambahkan, pengungkapan korban penculikan tersebut penting karena menyangkut nama baik bangsa Indonesia. Masalah itu tidak hanya menjadi masalah nasional, tetapi internasional. Banyak wartawan asing maupun organisasi HAM internasional mempertanyakan nasib korban penculikan yang belum kembali. Ia berharap, pengungkapan nasib para korban tersebut, baik masih hidup atau sudah mati, dapat segera diungkap. **(bb)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☑ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Rekomendasi DKP

Bawa Prabowo Dkk ke Mahkamah Militer

Jakarta, Kompas

Dewan Kehormatan Perwira (DKP) merekomendasikan kepada Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto untuk menjatuhkan sanksi administratif atau membawa mantan Komandan Jenderal Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto dan Mayjen TNI Muchdi PR, serta Komandan Grup IV Kopassus Kolonel (Inf) Chairawan, ke Mahkamah Militer (Mahmil).

Penegasan itu diberikan Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo hari Jumat (14/8) di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes AD) Jakarta.

"Bentuk rekomendasi ini sejak awal sebetulnya sudah jelas. Keputusannya nanti ada pada Pangab. DKP memberikan rekomendasi ini berdasarkan keseluruhan hasil pemeriksaan," kata Subagyo, yang juga Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Ia menambahkan, rekomendasi itu berupa saran. Bisa diterima, bisa juga tidak.

DKP dibentuk 3 Agustus 1998 untuk melakukan pemeriksaan terhadap para perwira Kopassus sehubungan kasus penculikan dan penyekapan sejumlah aktivis. Pada saat itu, Pangab Wiranto mengatakan, merupakan tekad ABRI dalam era reformasi ini, mengutamakan kejujuran. Tugas DKP adalah memeriksa tabiat atau perbuatan perwira yang nyata-nyata melanggar. kode kehormatan perwira serta disiplin keprajuritan dan ABRI.

Mengenai kemungkinan apakah para perwira yang diperiksa DKP akan menghadapi Mahmil, saat itu Wiranto menegaskan bahwa semuanya tergantung proses pemeriksaan DKP. "Seandainya di dalam Mahmil ditemukan bahwa para perwira yang sudah diproses melalui DKP ternyata patut diduga memenuhi unsur pidana, maka tidak ada seorang pun yang lolos dari itu," tegas Wiranto.

Bentuk pemberian sanksi administratif di lingkungan ABRI bisa berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi lain yang lebih ringan adalah ditugaskaryakan pada sebuah instansi, dan tidak dipecat namun tidak memiliki posisi/jabatan tertentu di lingkungan ABRI. Namun, jika ternyata dalam proses pemeriksaan terdapat indikasi bahwa perwira ABRI itu ada yang melakukan perbuatan tindak pidana, maka yang bersangkutan akan diproses lebih lanjut ke Mahmil. **(ama)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☑ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

DKP akan sarankan Mahmil

JAKARTA (Bisnis): Dewan Kehormatan Perwira (DKP) akan merekomendasikan kepada Panglima ABRI sanksi administratif dan pengajuan Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kol Inf Chairawan ke Mahkamah Militer bila terbukti ada unsur pidana dalam kasus penculikan aktivis prodemokrasi.

"Rekomendasi yang diserahkan DKP kepada Menhankam/Pangab nanti selain berupa pelanggaran administratif juga pengajuan ke Mahkamah Militer. Soal apakah diterima atau tidak nanti sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pangab," kata Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo usai salat Jumat di Mabes AD Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan rekomendasi pemberian sanksi kepada tiga perwira ABRI itu didasarkan atas temuan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan selama ini.

"Semuanya *kan* sudah jelas. Bila ada perwira yang masuk DKP tentunya ada hal-hal yang dianggap tidak menjalani perintah yang berkaitan dengan keperwiraannya."

Menjawab apakah Pangab punya kewenangan mendeponir rekomendasi DKP, Subagyo HS yang juga KSAD itu menjelaskan, "Rekomendasi DKP itu *kan* hanya bersifat saran. *Ya,* namanya juga saran *kan* bisa diterima bisa tidak."

Sementara itu, mantan KSAD Jenderal TNI (Purn.) Rudini mengatakan para perwira yang terlibat dalam kasus penculikan sejumlah aktivis dapat saja diajukan ke Mahkamah Militer, bila memang mendapatkan rekomendasi dari DKP.

"Namun biasanya, perwira yang telah diperiksa di DKP tidak dapat diajukan ke Mahmil. Tapi kalau memang hasil rekomendasi DKP mengharuskan untuk diajukan ke Mahmil dapat saja diajukan," katanya usai deklarasi Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB), di sini kemarin. **(s8/espos)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☑ Suara Merdeka	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Prabowo Bisa Diajukan ke Mahmil

• Bila Terbukti Lakukan Tindak Pidana
• Sutiyoso Mengaku Tidak Terima BKO

JAKARTA - Dewan Kehormatan Perwira (DKP) bisa merekomendasikan kepada Pangab Jenderal TNI Wiranto untuk menjatuhkan sanksi administrasif kepada Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kolonel (Inf) Chairawan berkenaan dengan dugaan keterlibatan mereka dalam kasus penculikan sejumlah aktivis.

Lebih dari itu, DKP juga bisa merekomendasikan kepada Pangab untuk mengajukan tiga perwira itu ke Mahkamah Militer (Mahmil), bila ditemukan bukti-bukti ketiganya melakukan tindak pidana.

Hal itu disampaikan Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo HS kepada wartawan di Jakarta kemarin, menjawab pertanyaan wartawan soal hasil sementara pemeriksaan DKP terhadap ketiga perwira tersebut. Pemeriksaan akan dilanjutkan lagi setelah tanggal 17 Agustus.

Namun Subagyo menegaskan, rekomendasi itu hanya merupakan saran kepada Pangab. Soal keputusan untuk diajukan ke Mahmil atau tidak, itu menjadi wewenang penuh Pangab.

Menurut pengalaman, apakah saran DKP bisa diterima Pangab? Subagyo mengelak memberi jawaban, dan hanya mengatakan, "Baru sekali jadi DKP, belum tahu nanti bagaimana," ujarnya mengelak.

Tak Terima BKO

Sementara itu secara terpisah di Jakarta kemarin, Mayjen TNI (Purn) Sutiyoso kepada wartawan menyatakan ketika menjadi Pangdam Jaya tidak pernah menerima BKO (Bawah Kendali Operasi) pasukan dari Kopassus.

"Waktu itu sama sekali saya tidak pernah menerima BKO dari Kopassus. Sama sekali tidak," ujar Sutiyoso, yang kini menjabat Gubernur DKI, setelah menghadap Mendagri Syarwan Hamid.

Kalau ada BKO dari pasukan Kopassus, menurut dia, tentu ada perintah resmi dan secara tertulis. "Tidak ada BKO. Itu jelas tidak ada," tegasnya.

Menurut dia, ada dua cara dalam memperbantukan pasukan. Yakni BKO dan BP (Bawah Perintah).

"BKO paling enak, misalnya Pangdam ada BKO. Kopassus datang, maka terima bersih. Artinya, masalah logistik dan administrasinya saya tidak *ngurus*. Itu yang *ngurus* Kepassus sendiri," ujarnya.

Lain halnya dengan BP. Karena pasukan yang diberi bantuan menanggung logistik dan mengurusi administrasinya. "Kalau saya menggunakan satuan lain, akan menanggung logistik dan administrasi."

Apakah BKO mesti dari yang lebih tinggi? Tidak harus, lanjut Sutiyoso. Pasukan sederajat juga bisa, misalnya Kopassus dengan Kodam. "Namun yang pasti, panglimanya *ngerti*," katanya.

Hendrik Diperiksa

Sementara itu, Hendrik Dikson Sirait yang mengaku pernah diculik, Jumat siang kemarin selama tiga jam dimintai keterangan secara detail oleh penyidik dari Puspom ABRI. Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) itu berkaitan dengan pengalamannya selama menjadi korban penculikan dan penyekapan di Jl Kramat 7 Jakarta Pusat.

Alasan pemeriksaan terhadap Hendrik dilakukan di PBHI dan bukan di Mabes Puspom ABRI di Jl Merdeka Timur Jakarta Pusat, karena Hendrik masih trauma berat akibat penderitaannya selama disekap. Selain itu, agar Hendrik dapat merasa aman secara psikologis dalam menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Karena sejauh ini yang dilaporkan sebagai pelaku penculikan adalah institusi militer, sehingga jika pemeriksaan dilakukan di Puspom ABRI dikhawatirkan akan menghambat pembuatan berita acara pemeriksan (BAP).

Pemeriksaan kali ini berkisar antara lain tentang pengalaman serta penyiksaan yang dialaminya selama diculik. Untuk mempercepat pemeriksaan, Hendrik juga menyatakan kesediaannya mendampingi Puspom ABRI apabila akan melakukan peninjauan dan pemeriksaan langsung ke tempat penyekapan di Jl Kramat 7 Jakarta Pusat. (di,mon-29k)

Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Peluang Meringankan Hukuman Prabowo

SEJAUH mana peranan bekas Danjen Kopassus Letjen Prabowo dalam penculikan aktivis sampai kini belum terlalu jelas. Tentu saja kejelasan itu akan diperoleh di pengadilan, kalau saja dia diajukan ke Mahmil. Namun, terungkapnya keterlibatan anak buah semasa dia menjabat Danjen Kopassus menyebabkan Prabowo sulit mengelak.

Ini masih ditambah dengan rekomendasi DKP (Dewan Kehormatan Perwira) kepada Pangab, agar tiga perwira dari Kopassus yaitu Prabowo, Mayjen Muchdi dan Kolonel Chairawan dimahmilkan dan dijatuhi sanksi administratif.

Apakah saran itu akan diterima oleh Pangab? Menurut Ketua DKP Jenderal Subagyo Hadisiswoyo, rekomendasi itu bisa diterima, bisa juga tidak.

"Ada kemungkinan sanksi pidana, bisa juga sanksi administrasi. Tapi itu haknya Pangab," kata Subagyo.

Dan dengan begitu tugas DKP sudah selesai. Tapi jangan lupa, Pangab juga Ankumnya Prabowo. Dengan memahami itu, orang tahu ada banyak kelonggaran yang diperoleh seorang tersangka yang militer. Oleh banyak kalangan, lembaga Ankum dianggap bisa melindungi prajurit yang bersalah.

Contoh Kasus

Masih ingat kasus Santa Cruz, Dili, Timor Timur beberapa tahun lalu? Ada beberapa anggota ABRI yang diajukan ke Mahmil dan dihukum, tapi yang lainnya seperti Pangdam Mayjen Sintong Panjaitan, Pangkolakops Brigjen Warouw dan Komandan Korem Kolonel JP Sepang terkesan lolos dari hukuman.

Mereka tidak pernah diajukan ke Mahmil, walaupun memang menerima hukuman disiplin. Dengan demikian tak jelas betul mereka bersalah atau tidak. Walaupun tidak transparan, dalam hal ini orang bisa memastikan bahwa di sini peran Ankum sangat besar.

Apalagi setelah itu mereka malahan memperoleh jabatan yang bergengsi. Sintong naik pangkat menjadi Letjen, menjabat Sesdalopbang dan kemarin bahkan menerima penghargaan Bintang Mahaputra Utama.

Akan halnya JP Sepang, walaupun menerima hukuman disiplin, dia diangkat menjadi Kepala Dinas LLAJ DKI Jakarta. Sebelum datangnya krisis ekonomi, kedudukan Sepang dinilai merupakan salah satu jabatan 'basah' di Pemda.

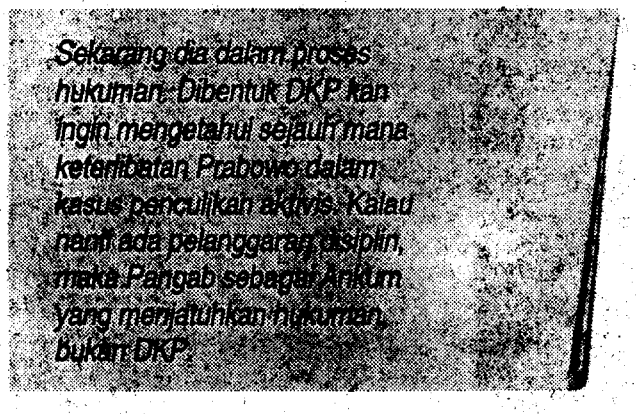
Di lihat dari kasus tersebut, terasa ada benarnya anggapan bahwa Ankum cenderung melindungi dan bukan menghukum anak buah yang bersalah.

Tapi sangkaan itu ditepis oleh Brigjen (Pur) ASS Tambunan, dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Militer. Berbicara dengan *Merdeka* di kantornya, Tambunan mengatakan bahwa Ankum dalam menjatuhkan hukuman kepada bawahan juga berdasarkan Undang-undang, jadi tidak boleh seenak komandannya saja.

"Pembentukan DKP bisa disebut 'peradilan' sementara disiplin militer, yakni memeriksa apakah terjadi pelanggaran disiplin militer. Kemudian, pemeriksaan bisa mengarah ke hal-hal lain, apakah ada terjadi tindak pidana atau tidak. Sehingga dengan demikian, nanti akan menuju ke beberapa jurusan," kata Tambunan.

Sehingga nanti, lanjut pengajar mata kuliah Hukum Militer itu, meminta pendapat dari Oditur Jenderal ABRI mengenai segi-segi hukumnya, karena oditur nanti yang membahasnya lebih lanjut.

Kemudian, oditur akan menyampaikan pendapatnya kepada Pangab, apakah ini bisa diajukan ke Mahmil atau tidak. Kalau diputuskan bisa, maka di situ juga dipilah-pilah, untuk tindak pidana mana saja dia perlu dituntut. Jadi Pangablah memutuskan sebagai perwira pengerah perkara (Papera), dialah nanti yang memutuskan, apakah perkara di ajukan ke Mahkamah Militer atau tidak.



Prabowo bisa menerima hukuman paling ringan, kena hukuman disiplin militer. Itu kalau unsur-unsur pidananya tak terbukti.

Tapi melihat berbagai pemberitaan, apalagi sudah ada rekomendasi dari Ketua DKP, kemungkinan besar sudah menjurus ke tindak pidana sehingga proses selanjutnya mudah ditebak.

Dia bisa diajukan ke mahkamah militer atau dijatuhi sanksi administratif sesuai rekomendasi DKP. Artinya dia bisa dipecat, diturunkan pangkatnya atau dikenai berbagai tindakan lain. Dalam hal ini Pangab berperan besar menentukannya.

Bagaimana prosesnya?

Kalau nanti diputuskan ada indikasi Letjen Prabowo melakukan tindak pidana yang harus diselesaikan oleh pengadilan, maka kalau dia masih sebagai militer diajukan ke Mahkamah Militer.

Adakah kemungkinanan Prabowo diajukan ke Mahkamah Militer?

Susah menjawabnya sekarang, karena saya hanya mengikuti berita di media massa. Kalau belum jelas begini, kalau saya menganalisa nanti jawabannya berandai-andai. Jadi kita tunggu saja setelah rekomendasi DKP diterima Pangab.

Setelah itu, hasilnya dianalisis oleh Pangab dan konsultasi dengan Oditur Jenderal ABRI. Atas dasar konsultasi itu nantinya Pangablah yang menentukan diadili tidaknya Prabowo.

Dalam kasus Prabowo ini, siapakah Ankumnya?

Ankum itu sebagai atasan yang berhak menghukum, dalam hal Letjen Prabowo, Ankumnya adalah

juga sebagai Papera, sehingga berwenang menyerahkan persoalan ini Mahkamah Militer kalau dikehendaki. Di sini Pangab sebagai Ankum, juga sebagai Papera

Mengapa tidak Ankumnya saja langsung menghukum Prabowo?

Sekarang dia dalam proses hukuman. Dibentuk DKP kan ingin mengetahui sejauh mana keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan aktivis. Kalau nanti ada pelanggaran disiplin, maka Pangab sebagai Ankum yang menjatuhkan hukuman, bukan DKP.

Dalam menjatuhkan hukuman sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI. Hukumannya terserah dia, ada tiga kemungkinan, pertama, hukuman berat, kedua, penahanan ringan paling lama 14 hari, ketiga, penahanan berat paling lama 21 hari. Tetapi kalau diserahkan ke Mahmil, maka hakim militer bisa menjatuhkan penurunan pangkat, atau pemecatan dari militer.

DKP dianggap kurang terbuka?

Memang betul. DKP tidak transparan, tidak sama dengan peradilan Militer. DKP, penyelidikannya kepada disiplin perwira, selalu saja tidak transparan, karena ada kode etik. Sama halnya seorang dokter diperiksa Ikatan Dokter Indonesia (IDI), tidak transparan juga karena masih intern. Ini juga begitu, waktu di DKP diperiksa pelanggaran kode etik, karena itu DKP "pengadilan" kode etik yang memang tidak terbuka. Hasilnya bisa dibuka untuk umum, namun di situ tetap ada hal-hal yang tertutup. Pangab sangat berperan dalam kasus ini, karena dia Ankum tertinggi di ABRI, dan Papera tertinggi.

Kalau tanpa DKP, Ankum langsung menjatuhkan hukuman?

Kalau persolan sederhana bisa, tapi persoalan penculikan ini masih kompleks, maka perlu ada DKP, karena ada masalah teknis militer.

Biasanya kalau sudah dibentuk DKP maka bisa disebut kasusnya bukan hanya pelanggaran disiplin, tapi sudah pelanggaran disiplin *plus*. Apakah sudah sampai ke tindak pidana, itu tergantung nanti. Ini menyebabkan, tidak bisa cuma Ankum saja yang menjatuhkan hukuman, tapi harus melalui proses peradilan militer.

Contoh sederhana, seorang prajurit mabuk-mabuk, lalu ketangkap, kemudian diperiksa. Kalau dilihat ada indikasi tindak pidana sewaktu mabuk-mabukan, maka diserahkan ke Mahkamah Militer, kalau tidak maka hanya hukuman disiplin dari Ankum saja.

Apakah Ankum ini efektif?

Sangat efektif. Apa lagi lembaga Ankum ini dimiliki oleh rata-rata satuan militer di dunia.

Apa landasan hukum Ankum?

Landasan hukum Ankum adalah Undang-undang. Menghukum itu merupakan hak negara. Jadi dilimpahkan kepada orang lain harus melalui Undang-undang, tidak boleh seenak komandannya saja. UU itu adalah UU disiplin itu.

Status Pelaku

Jadi, Tambunan tetap berpendapat bahwa lembaga Ankum bukan alat untuk melindungi prajurit yang bersalah, melainkan mekanisme efektif untuk mengeliminasi tindak kejahatan yang dilakukan oleh tentara.

Sementara itu Soegih Arto, bekas Jaksa Agung mengutarakan hal senada dengan Tambunan yang menilai wewenang atasan hanya dalam bidang disiplin. Dalam kasus yang memiliki unsur pidana, baru diproses di Mahkamah Militer.

Mengenai soal peradilan militer sendiri, Soegih Arto berdasarkan pengalamannya di luar negeri menceriterakan, ada beberapa negara yang menganut pengertian bahwa diserahkannya seorang tersangka ke Mahkamah Militer atau pengadilan sipil tergantung kepada jenis pelanggaran pidana yang dilakukannya.

Jadi tidak tergantung kepada status pelakunya, apakah dia sipil atau militer. Seorang tentara yang melakukan tindak pidana sipil (pelanggaran terhadap hukum sipil) akan diajukan ke pengadilan sipil. Tapi kalau dia melakukan desersi atau pelanggaran disiplin militer lainnya, maka dihadapkan ke Mahmil.

Ini berlainan dengan sistem di Indonesia. Di sini, status tersangka, apakah dia militer atau sipil, sangat menentukan ke mana diajukanya perkara tersebut. Kalau militer, diajukan ke Mahkamah Militer, kalau sipil diajukan ke pengadilan sipil.

"Jadi di beberapa negara ke mana diajukan orang tersebut tergantung pidananya, sedangkan di Indonesia tergantung status orangnya," ujar Soegih Arto yang pernah jadi duta besar RI di India.

■ JGM

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☑ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

DKP Akan Rekomendasikan Prabowo, Muchdi Dan Chairawan Ke Mahmil

Jakarta, 15 Agustus

Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo HS mengatakan, setelah memeriksa Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi, dan Kolonel Inf Chairawan, serta menghadirkan beberapa saksi, maka DKP kemungkinan besar akan merekomendasikan agar mereka diberikan sanksi administrasi dan diajukan ke Mahkamah Militer (Mahmil).

"Itu rekomendasi yang akan kami sampaikan kepada Pangab untuk dijadikan pertimbangan," kata Subagyo kepada wartawan seusai sholat Jumat di Mabesad Jakarta, Jumat (14/8).

Sehari sebelumnya, Subagyo mengatakan, penuntasan pemeriksaan terhadap Prabowo Subianto, Muchdi, dan Chairawan, baru akan dilanjutkan setelah 17 Agustus untuk pendalaman.

Seberapa besar kemungkinan para terperiksa di DKP akan di-Mahmilkan? "Itu wewenang Pangab. Kalau di sini kan sudah jelas, sanksinya juga jelas. Rekomendasinya itu tidak perlu dikira-kira lagi karena semuanya sudah jelas," jawab Subagyo.

Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto ketika mengumumkan pembentukan DKP di Mabes ABRI Jakarta, Senin (3/8) lalu menegaskan, walaupun Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi, dan Kolonel Inf Chairawan telah diproses melalui DKP, tidak menutup kemungkinan para perwira tersebut diproses ke Mahkamah Militer kalau ada unsur pidananya.

"Seandainya di dalam Mahkamah Militer berkembang sehingga para perwira yang sudah diproses melalui DKP ternyata patut diduga telah memenuhi unsur pidana maka tidak ada seorang pun yang lolos dari masalah pidana," kata Wiranto.

Dinonaktifkan

Letjen TNI Prabowo Subianto dan Mayjen TNI Muchdi saat terjadi penculikan dan penyekapan sejumlah aktivis itu menjabat sebagai Danjen Kopassus. Sedangkan Kolonel Inf Chairawan saat itu menjabat sebagai Dan Grup-4/Kopassus. Untuk kelancaran proses pemeriksaan maka ketiga terperiksa ini dinonaktifkan dari jabatan yang dipegangnya.

DKP diketuai oleh Kasad Jenderal TNI Subagyo HS, Wakil Ketuanya Kasum ABRI Letjen TNI Fachrul Razi, Sekretaris DKP Pangkostrad Letjen TNI Djamari Chaniago. Anggota DKP adalah Irjen Dephankam Letjen TNI Yusuf Kartanegara, Kasosspol ABRI Letjen TNI SB Yudhoyono, Gubernur Lemhannas Letjen TNI Agum Gumelar, Komandan Jenderal Akabri Laksdya TNI Achmad Sutjipto. Sedangkan Wakasad Letjen TNI Sugiono dan Letjen TNI Arie J Kumaat sebagai cadangan.

Sembilan hari setelah dibentuk dan secara intensif melakukan pemeriksaan kepada tiga terperiksa, Ketua DKP Jenderal Subagyo mengatakan, Letjen TNI Prabowo Subianto telah mengakui ada kesalahan dan dia menyatakan siap bertanggung jawab. Ini merupakan sikap keperwiraan seorang perwira.

"Saya katakan, dia dalam menganalisa salah," kata Subagyo kepada wartawan di Mabesad Jakarta, Rabu (12/8) sore.

Dalam sidang tersebut, kata Subagyo, karena ini Dewan Kehormatan Perwira maka para perwira terperiksa dilihat keperwiraannya, tingkat kehormatannya, dan diharapkan juga kejujurannya.

Ketika ditanya perintah yang salah dianalisa itu dari siapa?

"Sudah saya katakan, yang jelas bukan dari Pangti dan dari Pangab. Saya sudah katakan, Pangab tidak salah, tidak mengeluarkan," jawab jenderal berbintang empat ini.

Indikasi

Sementara itu Menteri Kehakiman Muladi sebelum menerima Gubernur Aceh, mengatakan Jumat kepada wartawan, bila dari pemeriksaan dewan kehormatan perwira (DKP) terhadap mantan Danjen Kopassus Letjen Prabowo, ada ditemukan indikasi tindak pidana, maka sepatutnya diteruskan prosesnya ke mahkamah militer.

"Kalau dalam pemeriksaan DKP itu ada warna pidana, tidak mustahil mengarah ke mahkamah militer," ujar Muladi.

Menurut dia, DKP itu sama seperti majelis kode etik yang berlaku bagi profesi-profesi tertentu, seperti dokter.

Dia melihat fungsi DKP mirip dengan majelis kode etik untuk menemukan apakah dalam masalah bersangkutan terjadi malpraktik atau tidak.

Bertolak dari pemeriksaan DKP itu akan diketahui apakah ada perintah, dan apakah pelaksanaan perintah itu dilakukan di bawah standar yang berlaku bagi profesi bersangkutan.

Pertanyaan berikutnya, lanjut Menkeh, apakah ada kerugian yang timbul akibat pelaksanaan perintah yang dilakukan di bawah standar. Kemudian bisa terus diselidiki apakah dalam kerugian itu terdapat tidak pidana.

"Kalau itu kriminal berarti ada jembatan ke mahkamah militer," jelas Menkeh. (M-11/M-7)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☑ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo HS:

Soal Mahmil Tergantung Panglima ABRI

JAKARTA — Meski pemeriksaan belum tuntas, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) setidaknya telah mempunyai gambaran rekomendasi yang akan disampaikan ke Panglima ABRI. "Arah rekomendasinya *kan* sudah jelas, administrasi dan urusan ke Mahmil. *Kan gitu*," kata Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo HS di Jakarta kemarin.

Namun, ia menegaskan soal apakah rekomendasi diterima atau tidak, semuanya tergantung Panglima ABRI. "Kemungkinan sanksi pidana itu haknya Pangab. Kita hanya memberi rekomendasi," paparnya ketika dicegat wartawan seusai shalat Jumat, kemarin.

Karena itu ia tak mau menjawab ketika ditanya kemungkinan para perwira tersebut diajukan ke Mahkamah Militer. "Besar dan kecilnya [dimahmilkan], itu *kan* urusan Pangab. Kalau dari sini *kan* sudah jelas, sanksi sudah jelas," katanya. Mengenai kemungkinan ada saksi lain di luar yang sudah diperiksa, ia hanya menjawab singkat, "Kalau sudah cukup, ditutup."

Sejak kemarin pemeriksaan terhadap tiga perwira ABRI (Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi, dan Kolonel Inf. Chairawan) dihentikan. Pemeriksaan akan dimulai lagi pada 18 Agustus 1998. Pemeriksaan lanjutan itu dimaksudkan untuk lebih memperdalam temuan yang sudah didapatkan.

Sementara itu, mantan KSAD Jenderal (Pur) Rudini berpendapat kemungkinan salah menganalisis bisa terjadi pada komandan Kopassus. Menurutnya, perwira jenderal bisa mendapatkan *mission type order*, seperti 'kendalikan ketertiban dan keamanan di Jakarta'.

"Caranya? Dia menganalisis sendiri. Kalau analisisnya *nggebugin* orang, *ya* salah," kata Rudini. Dijelaskannya, biasanya tidak ada BKO (Bawah Kendali Operasi) yang memberikan perintah spesifik. Dari sinilah bisa saja analisis itu salah.

Kesalahan itu, jelasnya, bisa dimintakan pertanggungjawabannya kepada Panglima ABRI yang memberi perintah BKO. "Kalau sudah berjalan satu hari, mestinya sudah tahu kalau ada kesalahan. Hari kedua harus distop," katanya.

Namun, lanjutnya, bisa juga Pangab tidak mengetahuinya, karena tidak ada laporan harian ke Pangab melalui asisten operasional.

Khusus BKO kepada Kopassus, Rudini menyatakan itu datang dari Pangab, bukan dari Kodam. "Kopassus itu di bawah Pangab. Demikian pula Kostrad. Yang mem-BKO-kan sebagian Kopassus ke Kodam itu Pangab," ungkapnya.

Jawaban itu menepis anggapan bahwa yang mem-BKO-kan Kopassus adalah Pangdam Jaya. Ia pun menegaskan bahwa KSAD tak mungkin mem-BKO-kan korps tersebut. "Kalau Pangab mengaku tidak tahu, berarti itu tidak benar?" tanya wartawan. "Simpulkan sendiri," kata Rudini sembari tertawa.

Tentang kemungkinan para perwira dikenai hukum militer, Rudini menyatakan itu mungkin saja terjadi. "Militer jika berbuat salah, pertama akan kena UU disiplin. Sesudah itu [bila] melakukan tindak pidana, Mahmil," tegasnya.

Sementara itu, mantan Pangdam Jaya Mayjen TNI Sutiyoso mengaku tidak pernah menerima BKO. "Kalau di-BKO-kan pasti saya terima perintah tertulis," jelasnya. Kalau ada BKO, kata Gubernur DKI ini, tentu panglima yang paling tahu karena panglima harus bertanggung jawab.

"Setelah itu saya tidak tahu," ungkapnya. Ia menyebut dua kemungkinan kesalahan para perwira. "Mungkin memang diperintah atasan, atau memang *ngawur*," ucapnya. ■ ian

Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☑	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agust	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Ke Mahmil Pasti Terbongkar

Misteri BKO: Siapa ke Siapa

SELASA pagi ini (18/8), sesuai janji Jenderal Subagyo HS, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) kembali memulai sidangnya. Untuk kesekian kali mereka akan memeriksa dua orang bekas Danjen Kopassus yakni Letjen Prabowo Subianto dan Mayjen Muchdi PR, serta bekas Dan Grup 4 Kolonel Chairawan.

Perkembangan belakangan dari hasil pemeriksaan DKP selama ini adalah munculnya "teori" BKO (Bawah Kendali Operasi) dan kemungkinan dua rekomendasi DKP ke Panglima ABRI (Pangab): sanksi administrasi atau Mahkamah Militer (Mahmil).

Yang menarik, masih menyorot soal misteri BKO yang belum terpecahkan hingga kini: itu dari siapa ke siapa, atau melalui siapa?

Dari statemen yang ada tampak jelas: Kasad, Pangab sampai ke Pangti (waktu kasus penculikan itu terjadi) dibatah memberikan instruksi BKO ke Prabowo. Bahkan, Kodam Jaya juga membantah pernah menerima perintah BKO. Jadi dari siapa ke siapa perintah BKO itu ada, masih menjadi misteri hingga kini.

Bagi bekas Kassospol ABRI Letjen (Purn) Bambang Triantoro, soal itu akan "beres sendiri" bila Letjen Prabowo Subianto benar-benar diajukan ke Mahmil.

Dia yakin betul seluruh "jaringan" berkait dengan kasus orang hilang akan terbongkar. Apalagi dalam Mahmil tak ada batasan pangkat, karena siapapun bisa dipanggil untuk memberi kesaksian.

"Soal itu akan lebih baik di Mahmil daripada DKP. Di Mahmil ruang lingkupnya lebih luas. Bisa banyak yang lebih diungkapkan lebih dari itu," kata bekas Kassospol ABRI Letjen (Purn) Bambang Triantoro dalam perbincangan dengan *Merdeka* semalam.

Dalam proses Mahmil, menurut dia, majelis hakim bisa bertanya apa saja dan tak memandang kepangkatan. "Bisa dilacak dari siapa perintah BKO itu. Pokoknya asal usul perintah itu. Apa ini direstui Pangti (panglima tinggi) atau tidak? Saya harapkan bertambah banyak informasi dari para saksi dan pelaku termasuk atasan Prabowo sendiri," katanya.

Penilaian hampir serupa juga dilontarkan bekas Menhankam/ Pangab Edi Sudrajat. DKP bagi dia tak akan bisa menuntaskan persoalan terhadap anggota ABRI yang melakukan pelanggaran pidana. Sebab DKP hanya menangani urusan organisasi.

"Tapi kalau sudah menyangkut pidana, persoalannya akan selesai di Pengadilan. Mestinya mereka di Mahmilkan saja. Kalau temuan DKP ada masalah pidananya harus didorong mengadili mereka ke Mahmil," tegas Edi Sudrajat.

Menurut dia, DKP hanya sebatas intern organisasi dan urusannya hanya untuk administrasi kemiliteran. "Apakah mereka masih disitu atau tidak. Masalahnya itu. Tapi pidananya belum diutik-utik. Inilah yang perlu diajukan ke Mahmil," tandasnya lagi.

Melihat perkembangan dari DKP dan ABRI sendiri, Bambang Triantoro mengharapkan agar Pangab sebagai pejabat yang berwenang memutuskan untuk memproses ketiga perwira itu ke Mahmil.

"Mahmil ini nanti tujuannya tidak lain hanyalah untuk memulihkan nama baik ABRI. Sebab dengan penculikan itu sudah jelas dunia internasional mengecam Indopnesia," katanya.

Sementara itu bekas Kepala BIA (Badan Intelejen ABRI), Arie Sudewo ketika ditanya soal peramasalahan kemungkinan ada jenderal lain yang terlibat dalam kasus orang hilang, dia menegaskan, semua tindakan yang dilaksanakannya tugas tersebut sering dikembangkan secara teknis dan taktis.

"Kalau saya menerima tugas, pasti saya kembangkan baik secara teknis maupun taktis. Mungkin saja ketika dalam pelaksanaan dilapangan pelanggaran pidana atau HAM terjadi. Itu bisa saja terjadi. Tapi yang bertanggungjawab adalah orang yang memberi perintah. Tidak ada prajurit yang salah. Filosofis itu harus tetap ditegakan," tandasnya.

Bagaimana kalau "si pemberi perintah" itupun tak jelas hingga kini? Sebut saja ada perintah, namanya BKO, tapi dari siapa ke siapa tetap belum diungkap. Harapan akan kejelasan itu mudah-mudahan bisa didapatkan dari pemeriksaan Prabowo, Muchdi dan Chairawan hari ini....**(PN/MAN)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☑ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Pemeriksaan Prabowo, Muchdi Dan Chairawan Selesai

Rekomendasi DKP Ke Pangab Akan Disampaikan Minggu Ini

Jakarta, 19 Agustus

Sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memeriksa mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto dan Mayjen TNI Muchdi serta mantan Dan Grup IV/Kopassus Kolonel Inf Chairawan atas keterlibatan mereka dalam penculikan dan penyekapan sejumlah aktivis sudah selesai.

''Hari ini sudah selesai sidangnya dan dalam minggu ini juga diharapkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pangab sudah bisa diumumkan,'' kata Sekretaris DKP Letjen TNI Djamari Chaniago kepada wartawan di Mabesad Jakarta, hari Selasa (18/8).

Pada sidang terakhir untuk pemeriksaan ketiga terperiksa ini berlangsung paling lama. Sidang yang dimulai pada pukul 09.00 WIB baru berakhir pukul 16,15 WIB dan Ketua DKP, Jenderal TNI Subagyo, yang biasanya memberikan keterangan tentang hasil-hasilnya tidak bersedia bertemu dengan wartawan dan tugas tersebut didelegasikan kepada Sekretaris DKP Letjen Djamari Chaniago.

Secara khusus, Kadispenad Brigjen TNI I Dewa Putu Rai mendatangai para wartawan yang tetap menunggu Ketua DKP Jenderal Subagyo di luar pintu gerbang Mabesad Jakarta meskipun sudah mendapat keterangan dari Sekretaris DKP Letjen Djamari Chaniago.

''Melalui sekretaris sudah disampaikan bagaimana hasil sidang DKP hari ini. Tolong beri kesempatan kepada DKP untuk bekerja sampai selesai,'' pinta Kadispenad.

Ketika Kadispenad memberikan penjelasan tersebut, tepat pukul 17.25 WIB mobil yang ditumpangi oleh Ketua DKP Jenderal Subagyo melintas di pintu gerbang tersebut. Subagyo yang ada di dalamnya membuka jendela mobilnya sambil melambaikan tangan kepada para wartawan yang menungguinya.

DKP diketuai oleh Kasad Jenderal TNI Subagyo HS, Wakil Ketuanya Kasum ABRI Letjen TNI Fachrul Razi, Sekretaris DKP Pangkostrad Letjen TNI Djamari Chaniago. Anggota DKP adalah Irjen Dephankam Letjen TNI Yusuf Kartanegara, Kassospol ABRI Letjen TNI SB Yudhoyono, Gubernur Lemhannas Letjen TNI Agum Gumelar, dan Komandan Jenderal AKABRI Laksdya TNI Achmad Sutjipto. Sedangkan Wakasad Letjen TNI Sugiono dan Letjen TNI Arie J Kumaat sebagai cadangan.

''Saya hanya bisa menyampaikan bahwa dalam beberapa hari ini pengumumannya akan disampaikan langsung oleh Ketua DKP. Dalam beberapa hari ini DKP akan melakukan pendalaman dan penyimpulan, yang nantinya akan diajukan kepada Pangab,'' ulang Djamari.

Ketika ditanya saran yang akan disampaikan tersebut dan hasil sementara yang dicapai oleh DKP sampai hari ini, mantan Pangdam III/Siliwangi ini menjawab, belum tahu. Juga belum ada hasil sementara.

Indikasinya apakah akan di-mahmil-kan atau diberikan sanksi administrasi, artinya yang paling kuat arahnya saran dari DKP apa? ''Kemungkinannya ada saja dari dua itu, seperti yang disampaikan oleh Ketua DKP. Bisa kedua-duanya, bisa salah satu,'' jawab Letjen Djamari.

Sanksi Dan Mahmil

Sebelumnya, Ketua DKP Jenderal Subagyo mengatakan, setelah memeriksa Letjen Prabowo, Mayjen TNI Muchdi dan Kolonel Chairawan serta menghadirkan beberapa saksi, maka DKP kemungkinan besar akan merekomendasikan agar mereka diberikan sanksi administrasi dan diajukan ke Mahkamah Militer.

''Itu rekomendasi yang akan kami sampaikan kepada Pangab untuk dijadikan pertimbangan,'' kata Subagyo seusai sholat Jumat di Mabesad Jakarta, hari Jumat (14/8) pekan lalu.

Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto ketika mengumumkan pembentukan DKP di Mabes ABRI Jakarta, Senin (3/8) lalu menegaskan, walaupun Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi, dan Kolonel Inf Chairawan telah diproses melalui DKP, tidak menutup kemungkinan para perwira tersebut diproses ke Mahkamah Militer kalau ada unsur pidananya.

''Seandainya didalam Mahkamah Militer berkembang sehingga para perwira yang sudah diproses melalui DKP ternyata patut diduga telah memenuhi unsur pidana maka tidak ada seorang pun yang lolos dari masalah pidana,'' kata Wiranto. (*Pembaruan, 4/8*) (M-11)

Hal. 1/ .....
Kelas: .....

SAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Ja:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Selesai, Pemeriksaan oleh DKP

Jakarta, Kompas

Pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terhadap mantan Komandan Jenderal Pasukan Khusus TNI AD (Danjen Kopassus) Letjen TNI Prabowo Subianto dan Mayjen TNI Muchdi PR, serta mantan Komandan Grup IV Kopassus Kolonel (Inf) Chairawan, hari Selasa (18/8), dinyatakan selesai. Hasil pemeriksaan kasus penculikan dan penyekapan para aktivis itu dalam beberapa hari mendatang akan dirumuskan bersama untuk diserahkan kepada Menhankam/ Pangab Jenderal TNI Wiranto.

"Hari ini, DKP telah selesai melakukan sidang pemeriksaan ketiga perwira. Dalam beberapa hari ini akan ada rapat internal DKP untuk merumuskan rekomendasi yang akan diajukan kepada Panglima ABRI," kata Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo menjawab *Kompas*, Selasa (18/8), di Jakarta.

Sejak dibentuk 3 Agustus 1998, katanya, DKP telah melaksanakan berbagai bentuk kegiatan secara maraton, sehingga pemeriksaan dapat tuntas secepat mungkin. Serangkaian pemeriksaan itu, antara lain, meninjau tempat kejadian perkara (TKP) di Markas Komando Kopassus Cijantung, Jakarta, mendengarkan hasil Tim Pencari Fakta Gabungan (TPFG), pemeriksaan terhadap tiga orang perwira, dan mendengarkan keterangan dari perwira/tamtama dan bintara yang terkait dengan kasus tersebut.

"DKP melihat serangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan ini dirasakan sudah cukup untuk mengumpulkan bukti dan fakta. Lalu, DKP akan melaksanakan rapat-rapat internal untuk melakukan pendalaman dan penyimpulan, yang nantinya akan berupa rekomendasi untuk Pangab," tutur Subagyo, yang juga Kepala Staf TNI AD (KSAD) ini.

Subagyo belum bisa mengungkapkan bentuk rekomendasi yang akan diajukan kepada Pangab. "Bentuk rekomendasi yang akan disampaikan belum bisa ditentukan, karena masih harus dilakukan sidang pendalaman. Kemungkinan rekomendasi berupa sanksi administratif atau sidang di Mahkamah Militer, atau keduaduanya," katanya.

"Hasil DKP selama persidangan dan rekomendasinya akan diutarakan dalam beberapa hari mendatang. Semuanya akan kita sampaikan dalam bentuk keterangan pers," ujarnya.

Secara terpisah, Sekretaris DKP Letjen TNI Djamari Chaniago kepada wartawan mengatakan, soal bentuk rekomendasi yang paling memungkinkan untuk disampaikan kepada Pangab tergantung keputusan yang akan diambil Ketua DKP. Panglima Kostrad ini juga belum bisa mengatakan secara jelas kapan waktunya Ketua DKP menyerahkan rekomendasi itu kepada Pangab. "Yang pasti, dalam beberapa hari mendatang," katanya.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI I Dewa Putu Rai juga mengemukakan hal yang sama. Ia menambahkan, "Semua wartawan akan diundang dalam jumpa pers yang akan dilaksanakan minggu ini."**(ama)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Sidang DKP Selesai, Prabowo Dimahmilkan

Belum Ada Perintah Cekal

Keterlibatan R Hartono Tak Terungkap

Jakarta, JP.-

Akhirnya Tim DKP (Dewan Kehormatan Perwira) berhasil merampungkan tugasnya, memeriksa tiga perwira yang diduga terlibat kasus penculikan para aktivis prodemokrasi, dalam waktu yang cukup singkat. Pemeriksaan dianggap sudah final. Hanya tinggal rapat-rapat ringan untuk membuat saran terbaik yang akan disampaikan kepada Pangab dalam mengambil keputusan.

Sekretaris Tim DKP yang juga Pangkostrad Letjen TNI Djamari Caniago menjelaskan, tiga terperiksa, masing-masing Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi Pr, dan Kolonel Inf Chairawan, bisa dimahmilkan.

"Kemungkinan tiga terperiksa dimahmilkan sangat bisa. Itu seperti yang disampaikan ketua (KSAD Jenderal TNI Subagyo Hadi Siswoyo) bahwa Prabowo, Muchdi, dan Chairawan bisa dimahmilkan," ujar Djamari kepada wartawan seusai sidang DKP di Mabesad, Jakarta, kemarin. Menurut dia, saran resmi yang disampaikan kepada Pangab memang belum ada. Tapi dalam beberapa hari lagi, tim DKP akan mengumumkan hasilnya kepada Pangab. "Apakah nanti keputusan itu mengajukan saran sanksi administratif dan dimahmilkan Prabowo cs, lebih baik tunggu beberapa hari lagi," ujar alumnus Akabri '70 itu. Waktu beberapa hari ini akan dimanfaatkan tim DKP untuk melakukan pendalaman dan membuat kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap tiga terperiksa. Kalau sudah mendapat kesimpulan yang pasti, tinggal diumumkan," kata mantan Pangdam III/Siliwangi ini.

Pada pemeriksaan terakhir tim DKP juga menghadirkan tiga terperiksa: Prabowo, Muchdi, dan Chairawan. Mereka hanya masih perlu ditanya beberapa persoalan penting untuk mencocokkan kembali hasil yang sudah dikumpulkan oleh tim DKP. Ternyata, hasil sidang kemarin, menurut Djamari, sudah cukup untuk membuat kesimpulan setelah seluruh pertanyaan yang diajukan bisa dijawab.

Soal kemungkinan keterlibatan mantan KSAD Jenderal TNI (pur) R Hartono dalam kasus penculikan, menurut sumber *Jawa Pos*, ternyata tidak terungkap dalam pemeriksaan terakhir kemarin. Dugaan kuat, perintah BKO (bawah kendali operasi) yang kemudian dianalisis keliru oleh Prabowo itu datang dari yang bersangkutan sendiri.

Sudahkah hal itu ditanyakan kepada Prabowo? "Ya sudah... sudah dan dijawab," ujar sumber tadi. Hanya, lanjut dia, tidak etis kalau jawaban Prabowo disampaikan terbuka karena tim DKP masih menelaah lagi hasil pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan kemarin, Prabowo juga berhasil lepas dari liputan pers. Juru foto yang sudah antre menunggu kedatangan Prabowo tidak berhasil memotretnya karena putra ekonom Prof Dr Sumitro Djojohadikusumo ini datang lewat pintu belakang. Pulangnya pun melalui jalan yang sama.

Sementara itu, Kadispen AD Brigjen TNI I Dewa Putu Rayi menjelaskan kepada wartawan, meski Prabowo dinyatakan bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan DKP, yang bersangkutan tetap dibebaskan untuk pergi ke mana-mana. Yang sudah dilakukan pemimpin ABRI hanya melepas jabatan Prabowo cs.

Mungkinkah mereka dicekal agar tidak kabur ke luar negeri? "Sampai sekarang, belum ada perintah cekal kepada tiga terperiksa," katanya. **(saf)**

Kelas: .....

LSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

dia:		Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

▲ Sidang DKP Selesai

Sudah Ada yang Siap Membela Prabowo

Jakarta, Rabu, Merdeka

Sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) selesai sudah. Dalam waktu beberapa hari ini, Ketua DKP Jenderal Subagyo HS secara resmi akan mengumumkan rekomendasi apa yang akan diberikan kepada Pangab setelah selama dua minggu memeriksa tiga perwira terperiksa, yaitu Letjen Prabowo Subianto, Mayjen Muchdi PR dan Kolonel Chairawan.

Meski Subagyo sudah pernah mengungkapkan bahwa rekomendasi itu berupa sanksi administratif dan proses di Mahkamah Militer, namun secara resmi hal tersebut belum akan diumumkan hingga akhir pekan ini.

"Hari ini sidang DKP sudah selesai. Alhamdullilah. Dalam beberapa hari ini Ketua DKP akan menyampaikan saran kepada Pangab. Dan, dari hari ini sampai pada hari pengumuman, akan dilakukan pendalaman dan penyimpulan sebagai saran yang akan diajukan kepada Pangab terhadap ketiga perwira terperiksa," kata Sekretaris DKP Letjen Djamari Chaniago di Mabesad, kemarin.

Menurutnya, DKP dalam sidang terakhir memeriksa kembali ketiga terperiksa. Namun menurut Pangkostrad itu, dalam pemeriksaan kali ini tidak ada yang menonjol. "Hanya menyelesaikan tahap akhir dari suatu pemeriksaan," ujarnya singkat.

Di tempat terpisah, bekas instruktur bidang intelijen Prabowo Subianto dan Muchdi, yaitu Letkol (Purn) Rudolf Edward Baringbing SH menyatakan siap membela kedua bekas muridnya itu apabila diminta dan mereka benar-benar diajukan ke Mahkamah Militer.

Meski demikian, dia mengaku sampai saat ini belum dikontak oleh kedua perwira tinggi tersebut. "Mungkin dia (Prabowo *red*) sudah lupa dengan saya. Tapi kalau saya diminta, selaku pengacara saya bersedia untuk membela. Saya siap membela," tuturnya dalam perbincangan dengan *Merdeka* di Jakarta, kemarin siang.

Biasanya, lanjut Baringbing, Mabes ABRI menyediakan tim pengacara bagi para perwira yang diajukan ke Mahmil.

Berikut ini hasil petikan wawancara dengan Baringbing yang pernah mengajar di Pusat Pendidikan Intelijen ABRI dan saat ini membuka kantor pengacara.



Prabowo Subianto

Apa kasus Prabowo ini murni operasi intelijen?

Kenapa tidak. Pelakunya orang intel semua kok. Grup 4 itu khusus melaksanakan itu dan tugasnya memang itu. Intelijen ada tiga fungsinya, intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Penyelidikan dilakukan BIA yang tugasnya mengumpulkan keterangan, setelah itu diolah dan dianalisa lalu disampaikan kepada *user* (Pangab). Ini namanya *intelijen cycle*, baru ada intelijen pengamanan. Sementara penggalangan, juga *action* penuh dan dilakukan secara temporer, tidak terus menerus.

Melihat fungsi Kopassus, kita harus melihat tugas pokok mereka dan itu ditentukan Skep dalam bentuk organisasi. Jadi bukan harus ada perintah lagi, dia satuan besar *kok*. Apalagi dipimpin seorang Mayjen. Jadi saya tanda tanya, *kok* Prabowo mengatakan dia salah menganalisa. Apanya yang salah? Karena analisa itu datangnya dari sana, yang melakukan penyelidikan.

Operasi intelijen jenis apa yang dilakukan Prabowo?

Itu *counter intelligence* yang mereka lakukan. Itu dilakukan karena situasi yang dihadapi berdasarkan laporan dari BIA yang diberikan kepada Pangab. Saya ini bicara berdasarkan teori dan prosedur. Yang pasti perintah intelijen itu jenis *briefing*, lisan. Kenapa tidak tertulis, karena yang melaksanakan itu paling berapa orang. Satu tim paling empat sampai enam orang. Dan, operasinya sangat tertutup, klandestin. Jadi tidak pernah ada perintah operasi intelijen dibuat tertulis.(PN)

Kelas: .....

Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

dia:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Berakhir, Pemeriksaan DKP terhadap Prabowo

JAKARTA (Media): Setelah dua minggu bekerja keras, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dipimpin KSAD Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo, kemarin selesai memeriksa tiga pentolan Kopassus. Ketiganya, Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi, dan Kolonel Inf Chairawan, diduga terlibat dalam kasus penculikan para aktivis prodemokrasi.

Kendati Prabowo dkk sudah tidak akan lagi diperiksa, namun belum diketahui secara pasti rekomendasi apa yang akan disampaikan DKP kepada Pangab. Ketua DKP Subagyo Jumat lalu mengisyaratkan DKP akan menyarankan agar ketiga pentolan Kopassus itu di-Mahmil-kan.

"Kita hanya bisa menyarankan kepada Pangab agar ketiga perwira terperiksa diberi sanksi administrasi, dibawa ke mahkamah militer atau kedua-duanya," ujar Sekretaris DKP Letjen TNI Djamari Chaniago seusai sidang DKP kemarin sore di Mabes TNI-AD, Jakarta.

Menurut mantan Pangdam Siliwangi itu, Prabowo, Muchdi, dan Chairawan diperiksa bersama-sama. Pemeriksaan itu yang terakhir kalinya.

Yang akan dikerjakan oleh DKP pada hari-hari ini, menurut Djamari, DKP akan menggelar sidang-sidang intern untuk melakukan pendalaman dan penyimpulan. "Sehingga bisa dihasilkan suatu rekomendasi terbaik kepada Pangab," ujarnya.

Ketika ditanya dari kedua kemungkinan itu mana yang paling mungkin, Djamari enggan memberikan jawaban. "Sekali lagi saya katakan rekomendasi itu belum diputuskan, karena sidangnya baru saja selesai."

Sementara itu Kadispenad Brigjen TNI I Dewa Putu Rai menyatakan dalam pekan ini keputusan itu sudah dapat diumumkan. "Mungkin sebelum Jumat pekan ini, kalian (wartawan) akan kita undang untuk mendengarkan keputusan dari DKP yang akan disampaikan langsung oleh Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo," tegasnya.

Pemeriksaan terakhir terhadap tiga pentolan Kopassus itu dimulai sekitar pukul 09.00 dan baru berakhir sekitar pukul 13.00. Sedangkan sidangnya sendiri baru bubar sekitar pukul 16.00. Prabowo, Muchdi, dan Chairawan tiba di Mabesad sekitar pukul 08.30.

Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo, seperti biasa, datang lebih awal, sekitar pukul 07.30. Sementara itu, anggota DKP lainnya seperti Letjen TNI Yusuf Kertanegara (Irjen Dephankam), Letjen TNI Djamari Chaniago (Pangkostrad), Letjen TNI Agum Gumelar (Gubernur Lemhanas), Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono (Kassospol), Laksdya TNI Achmad Sutjipto (Danjen Akabri), dan Wakil Ketua DKP Letjen TNI Fachrul Razi (Kasum ABRI), tiba secara hampir bersamaan.

Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto membentuk DKP untuk memeriksa tiga pentolan Kopassus itu dalam kaitan kasus penculikan sejumlah aktivis prodemokrasi beberapa waktu lalu. Pembentukan DKP itu diumumkan 3 Agustus, sidang pertama digelar 4 Agustus dengan memeriksa Komandan Grup IV Kopassus Kolonel Inf Chairawan.

Penyusupan

Di tempat terpisah, Irwan Effendi, 25, dilaporkan hilang kepada Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) setelah menyusup ke Istana Negara pada upacara peringatan detik-detik Proklamasi 17 Agustus lalu.

Koordinator Kontras Munir menuturkan hal itu kepada *Media* kemarin setelah menerima laporan dari istri Irwan. Menurut pelapor pada 17 Agustus pagi suaminya pamit akan menemui Presiden Habibie untuk menyampaikan pokok pikiran mengenai demokrasi.

"Saya ingin bertemu Habibie untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran mengenai demokrasi. Jika saya tidak kembali tolong saya dicari, karena mungkin saya ditahan," ujar Munir menirukan pesan Irwan, warga Pondok Aren, Jakarta Selatan, kepada istrinya.

Munir juga memastikan bahwa 12 orang yang hilang diculik masih hidup, tidak seperti yang diberitakan sebuah koran sore ibu kota, kemarin. (Edi/Wdh/Was/D-12)

Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal							Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31		Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26			Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27			Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28			April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29			Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6	12	18	24	30			Juni	Desember	2003

DKP Rapat Internal Tiga Jam

Kontras Nilai Puspom Terlalu Lamban

Tangani Kasus Orang Hilang

Jakarta, JP.-

DKP (Dewan Kehormatan Perwira) kemarin mengadakan rapat internal sekitar tiga jam. Rapat yang dipimpin langsung Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo itu dihadiri seluruh personel DKP.

Rapat internal yang dilaksanakan untuk pendalaman dan pengambilan keputusan DKP terhadap ketiga terperiksa (Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kolonel Inf Chairawan), itu dilaksanakan tertutup. Para wartawan tidak berhasil mendapatkan keterangan hasil rapat DKP.

Para personel DKP yang tampak adalah Letjen TNI Fachrul Razi (Kasum ABRI), Letjen TNI Djamari Chaniago (Pangkostrad), Letjen TNI Bambang Yudhoyono (Kassospol ABRI), Letjen TNI Agum Gumelar (gubernur Lemhanas), Laksdya TNI Achmad Sutjipto (Danjen Akabri), dan Letjen TNI Yusuf Kertanegara (Irjen Dephankam).

Begitu rapat internal selesai, anggota DKP langsung meninggalkan Mabes AD dan tidak bersedia menjawab pertanyaan wartawan. Selain itu, keterangan dari Ketua DKP Jenderal Subagyo juga gagal diperoleh.

Kadispen AD Brigjen TNI I Dewa Putu Rai menjelaskan, sebenarnya DKP tidak ingin berlama-lama dalam menuntaskan pekerjaannya, namun juga tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan agar bisa diambil suatu keputusan komprehensif. "DKP ingin memberikan rekomendasi yang terbaik kepada Pangab," katanya.

PUSPOM LAMBAN

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) beranggapan bahwa Puspom ABRI sangat lamban dalam pengusutan kasus 14 korban penculikan yang sampai kini masih misterius.

Hal itu terbukti ketika DKP (Dewan Kehormatan Perwira) memeriksa Letjen TNI Prabowo cs, Puspom ABRI justru tidak memeriksa mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi Pr, Letjen TNI Prabowo, dan mantan Pangab Jenderal (pur) Feisal Tanjung.

"Padahal, kami telah menyampaikan rekomendasi pada TPF ABRI itu agar para perwira tinggi tersebut diperiksa karena diduga kuat sebagai pihak pelaku dan penanggung jawab operasi penculikan para aktivis itu," kata Koordinator Kontras Munir SH kepada wartawan di Jakarta kemarin.

Menurut Munir, status hukum Dewan Kehormatan Perwira (DKP) bukanlah lembaga penyidikan. Karena itu, proses DKP tidak dapat menghentikan ataupun mengakibatkan hilangnya kewajiban penyidik melakukan langkah-langkah penyidikan.

"DKP haruslah ditempatkan sebagai proses pengumpulan bukti awal internal dalam tubuh ABRI. Yang hasil-hasilnya harus diperiksa kembali dan ditindaklanjuti oleh penyidik, dalam hal ini Puspom ABRI," ujarnya.

Sejauh ini Puspom ABRI menyatakan bahwa tersangka penculikan dan tempat penyekapan telah diketahui dan mereka telah dilepaskan. Tapi, sampai saat ini tidak pernah dijelaskan secara rinci tentang kapan pelepasan dilakukan, bagaimana keadaan korban ketika dilepaskan, dan diserahkan kepada siapa pelepasan itu.

Karena itu, kata Munir, posisi orang hilang tidak jelas sampai saat ini. Dengan demikian, kredibilitas ABRI akurasinya diragukan. Puspom saat ini hanya menunggu proses-proses yang berlangsung di DKP, padahal dua lembaga itu berbeda.

Di sisi lain, lanjut Munir, Pangab Jenderal TNI Wiranto menyatakan tidak tahu-menahu tentang nasib dan keberadaan para korban penculikan. Hal ini sangat berdampak negatif pada kredibilitas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan ABRI, khususnya Puspom ABRI.

Masih belum jelasnya nasib 14 orang korban penculikan itu, kata Munir, semakin memperkuat dugaan Kontras bahwa pihak ABRI maupun Puspom ABRI mengetahui keberadaan mereka. Tetapi, pihak ABRI dan Puspom ABRI belum cukup jujur dan terbuka mengungkapkan permasalahan tersebut. **(mik)**

Kelas: .....

Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

dia:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐	Berita Buana	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Prabowo agar Segera Diperiksa sebagai Tersangka

Jakarta, Buana

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI agar segera memeriksa Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen Muchdi, dan beberapa perwira militer sebagai tersangka dalam kasus penculikan.

Dalam suratnya kepada Kepala Puspom ABRI Mayjen Sjamsu D, Rabu (19/8), Kontras menyatakan, saat ini pihak Puspom ABRI selaku penyidik tidak melanjutkan pemeriksaan lanjutan terhadap mereka yang diduga melakukan tindakan penculikan. Hal itu terutama terjadi sejak langkah pembentukan Dewan Kehormatan Militer (DKP) yang dilanjutkan dengan pemeriksaan beberapa perwira tinggi ABRI.

"Saya melihat belum ada kemajuan dari Puspom dalam menyelidiki kasus penculikan. Sampai saat ini, pihak Puspom belum juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa perwira tinggi ABRI, antara lain Prabowo, Muchdi, Feisal Tanjung, dan sebagainya yang diduga kuat sebagai pelaku dan penanggung jawab operasi penculikan," ujar Koordinator Badan Pekerja Kontras Munir di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Kontras menjelaskan, secara hukum, DKP bukanlah lembaga penyidikan, sehingga proses pemeriksaan yang tengah dilakukan DKP tidak dapat menghentikan ataupun mengakibatkan hilangnya kewajiban penyidik, yaitu Puspom ABRI, melakukan langkah-langkah penyidikan. Sebaliknya, DKP seharusnya ditempatkan, sebagai proses pengumpulan bukti awal di internal ABRI yang hasilnya harus diperiksa kembali dan ditindaklanjuti Puspom selaku penyidik.

"Saya melihat posisi Puspom telah diintervensi oleh keputusan-keputusan politis ABRI. Seharusnya, Puspom ABRI menempatkan institusinya sebagai lembaga penyidik serta menjalankan fungsinya untuk terus melakukan pengusutan terhadap mereka yang terlibat dalam kasus penculikan sesuai dengan hukum," kata Munir, yang didampingi Divisi Legal Kontras Sirra Prayuna.

Kontras juga mengungkapkan, ketidakjelasan nasib 14 orang korban penculikan semakin memperkuat dugaan bahwa pihak ABRI atau Puspom mengetahui keberadaan mereka. Namun, tutur Munir, pihak ABRI dan Puspom ABRI belum jujur dan terbuka mengungkap kasus tersebut. Karena itu, Kontras mendesak Puspom ABRI agar segera mengumumkan kepada masyarakat tentang nasib 14 orang korban penculikan yang belum jelas nasibnya serta langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengungkapkan nasib mereka.

Diungkapkan Munir, pihaknya juga melihat adanya kerancuan antara pernyataan Pangab dan Puspom ABRI beberapa waktu lalu yang bisa berdampak negatif terhadap kredibilitas penyelidikan yang dilakukan ABRI, khususnya Puspom.

Menurut Munir, pihak Puspom ABRI pernah menyatakan bahwa tempat penyekapan telah diketahui dan korban penculikan telah dilepaskan. Namun demikian, hingga kini belum dijelaskan kapan dan bagaimana keadaan korban saat dilepaskan, serta kepada siapa dilepaskan.

Di sisi lain, Pangab Jenderal TNI Wiranto menyatakan, pihaknya tak tahumenahu tentang nasib dan keberadaan korban penculikan. "Akibatnya, akurasi penyidikan bisa diragukan," tandas Munir.

Penculikan Aceh

Di tempat yang sama, Kontras juga melaporkan ditemukannya empat pria yang dicampakkan dari sebuah mobil jeep jenis Land Rover di tengah jalan raya Banda Aceh-Medan antara kawasan Syamtalira Bayu Geudong, Aceh Utara, Rabu (12/8) malam. Empat pria yang hanya mengenakan celana dalam dengan kondisi yang mengenaskan dan tanpa identitas itu diduga merupakan bagian dari 32 orang korban penculikan Kopassus 1988 yang dilepaskan menjelang penarikan pasukan nonorganik dari Aceh.

Seperti dilaporkan Kontras, seorang di antaranya tewas setelah disambar sebuah mobil saat hendak lari menyeberang jalan beberapa jam setelah diberi makan penduduk setempat. Sedangkan, tiga korban lainnya kini tengah dalam perawatan intensif. Peristiwa penuh misteri tersebut disaksikan sejumlah warga desa Bunot Bayu serta warga Geudong dan telah dilaporkan ke Polsek Bayu.

Dari tubuh korban tewas itu, tampak keanehan yang menguatkan dugaan bahwa ia adalah korban penculikan. Antara lain, sebagian giginya rontok akibat ditimpa benda keras dan bukan merupakan luka baru. ❑ han

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☑	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Puspom ABRI Harus Periksa Prabowo

Jakarta, Kamis, Merdeka

Puspom ABRI selaku penyidik kasus penculikan orang hilang, seharusnya melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap bekas Danjen Kopassus Letjen Prabowo Subianto dan perwira tinggi lainnya yang diduga melakukan tindak penculikan terhadap sejumlah aktivis.

"Tapi setelah dibentuk DKP, Puspom ABRI belum melakukan penyidikan terhadap para perwira tinggi ABRI itu," ujar Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir di Jakarta, kemarin.

Alasannya, menurut dia, karena secara hukum DKP (Dewan Kehormatan Perwira) bukanlah lembaga penyidikan. Sehingga proses penyidikan yang dilakukan Puspom ABRI tidak dapat dihentikan, apalagi sampai mengakibatkan hilangnya kewajiban Puspom sebagai penyidik.

Sebaliknya, DKP adalah tempat proses pengumpulan bukti awalan internal dalam tubuh ABRI. Seluruh hasil yang mereka peroleh, harus diperiksa kembali dan ditindaklanjuti oleh Puspom ABRI sebagai penyidik.

Melihat langkah penyidikan kasus penculikan saat ini, menurut dia, tidak lagi berpedoman pada fakta-fakta yang diperoleh dari kesaksian para korban dan niat untuk mengungkap kasus penculikan ini. Tapi, lebih didasari pada alasan-alasan yang bersifat politis dari pemerintah dan ABRI sendiri, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

"Selain itu, Puspom sebagai penyidik tidak lagi melakukan tugasnya sebagai penyidik. Tapi hanya menunggu proses yang tengah dilakukan DKP, padahal Puspom adalah lembaga berbeda yang tetap harus memeriksa para tersangka," tegas Munir.

riksa mereka.

"Kalau memang ada masalah kepangkatan dalam hal penyidikan, kenapa Danpuspom tidak diangkat saja sebagai Jenderal secara luar biasa untuk memeriksa kasus ini," ujar Munir.

Dengan adanya fakta-fakta ini, menurut dia, belum ada kemajuan yang dilakukan Puspom dalam menyidik dan mengungkap kasus ini. Apalagi sampai saat ini, Puspom belum menempatkan para perwira yang telah diperiksa DKP sebagai tersangka. Terhentinya proses penyidikan Puspom, juga menunjukkan lembaga itu telah terintervensi oleh kebijakan di tubuh ABRI sendiri.

"Penyidikan kasus ini, paling awal seharusnya bergerak dan diungkap melalui proses faktual. Sementara proses politis di ABRI, menjadi bagian dari pertanggungjawaban ABRI sendiri, bukannya menilai kasus itu secara politis," tegas Munir.

Satu hal lain yang disayangkan pihak Kontras adalah pernyataan Danpuspom ABRI Mayjen Syamsu D kepada pihak keluarga pada 8 Juli mengenai adanya keterangan tersangka yang mengatakan ke-14 korban yang raib telah dilepaskan setelah mereka mengetahui tempat penyekapannya.

"Tapi pihak Puspom tidak pernah menjelaskan secara detail, kapan mereka dilepaskan, bagaimana kondisi korban ketika dilepas dan diserahkan kepada siapa," ujarnya.**(EKA/WR)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Hasil DKP Diumumkan Senin

Jakarta, Kompas

Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo mengatakan, Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto akan mengumumkan hasil DKP hari Senin (24/8). Subagyo mengatakan ini menjawab pers usai menerima anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Mabes AD, Jakarta, Kamis (20/8).

Di tempat terpisah, Wiranto tidak banyak berkomentar saat ditanya pers usai mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan mengenai kapan hasil DKP diumumkan. Dia mengatakan, hasilnya akan diumumkan minggu depan, tanpa menyebut tanggal pasti. "Minggu depan, minggu depan," katanya.

Subagyo, yang juga Kepala Staf TNI AD, menjelaskan, DKP saat ini sedang menyusun redaksional hasil pemeriksaan terhadap tiga perwira, yakni Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi Purwopranjono, dan Kolonel (Inf) Chairawan.

Menjawab pertanyaan apakah hasil DKP menyangkut kemungkinan pengajuan ketiga perwira itu ke Mahkamah Militer, Subagyo mengatakan, semua terserah kepada Pangab. Tapi Subagyo mengatakan, DKP akan tetap memberikan saran, baik yang menyangkut sanksi administratif maupun yang bersangkut paut dengan Mahkamah Militer.

"Namun semuanya tergantung kepada Pangab. Pangab akan langsung mengumumkannya Senin, didampingi oleh seluruh kepala staf dan anggota DKP," kata Subagyo.

Kepastian diumumkannya hasil DKP juga diperoleh dari Sekretaris Menko Polkam R Karyono ketika Pangab Jenderal Wiranto melapor kepada Menko Polkam Feisal Tanjung bahwa hasil DKP akan diumumkan Senin (24/8). Karyono mengatakan itu kepada pers usai Rakor Polkam.

Rakor Polkam Tingkat Menteri itu memang membahas kasus orang hilang. ABRI dikatakan telah menangani kasus orang hilang dengan sungguh-sungguh dan kini tengah menantikan hasil DKP. Rakor Polkam yang dipimpin Feisal Tanjung kali ini ditandai dengan perginya satu persatu pejabat secara diam-diam.

Rakor dihadiri antara lain Mendagri Syarwan Hamid, Menlu Ali Alatas, Wiranto, Menkeh Muladi, Menpen Muhammad Yunus, Kapolri Letjen (Pol) Roesmanhadi, Kepala Bakin Letjen (Purn) Moetojib, dan Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib.

Rakor juga membahas Peraturan Pengganti Undang-udang (Perpu) No 2/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dijelaskan, diterbitkannya Perpu bukan untuk membatasi kemerdekaan mengemukakan pendapat, namun untuk menjaga dan menjamin kelangsungannya, yakni agar berjalan tertib serta terhindar dari ekses yang meresahkan masyarakat. **(pep)**

Hal. 17 .....
Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
JAWA POS	SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
KOMPAS	SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA		6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Hasil Pemeriksaan DKP Diumumkan, Senin

Jakarta, 21 Agustus

Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo HS mengatakan, Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto Senin (24/8) mendatang akan mengumumkan hasil pemeriksaan DKP terhadap tiga terperiksa, Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi, dan Kolonel Inf Chairawan.

"DKP saat ini sedang menyusun redaksional hasil pemeriksaan terhadap tiga perwira terperiksa tersebut," kata Subagyo kepada wartawan di Mabesad, Jakarta, Kamis (20/8). Direncanakan pada Jumat ini hasil DKP akan diserahkan kepada Pangab.

Sebelumnya, usai Rakor Polkam di kantor Menko Polkam Jakarta, Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto mengatakan, sampai saat ini rekomendasi dari DKP belum masuk dan baru minggu depan akan diumumkan.

"Pengumumannya minggu depan. Saya ditunggu ini, ada tamu," kata Wiranto berulang kali sambil berjalan menuju kantornya.

Masalah DKP ini juga dilaporkan oleh Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto kepada Menko Polkam Feisal Tanjung ketika berlangsung Rakor Polkam. Pengumuman hasil kerja DKP dilaporkan Pangab akan diumumkan Senin mendatang, kata Sesmenko Polkam Mayjen TNI (Purn) R Karyono.

Ketika ditanya, apakah hasil DKP yang akan diserahkan kepada Pangab itu juga termasuk kemungkinannya pengajuan ketiga perwira terperiksa ke Mahmil, Subagyo menjawab, semua terserah Pangab. DKP akan memberikan saran, baik menyangkut sanksi administratif maupun yang berkaitan dengan pengajuan ke Mahkamah Militer.

"Namun, itu semua keputusannya tergantung Pangab," tandas Jenderal Subagyo.

Keluarga Aktivis

Kamis siang keluarga 14 aktivis yang sampai saat ini belum kembali, mendatangi Mabes TNI AD Jakarta untuk bertemu dengan Ketua DKP Jenderal Subagyo. Karena Subagyo tidak ada di tempat, kedatangan mereka diterima oleh Aspam Kasad, Mayjen TNI Nooraman, didampingi Kadispenad Brigjen TNI I Dewa Putu Rai dan Dan Denma Kolonel Art Supardi.

Menurut Kadispenad, kedatangan ke-14 keluarga aktivis itu bermaksud menanyakan keberadaan dan nasib keluarga mereka yang sampai saat ini belum kembali.

Selain keluarga 14 aktivis, tampak juga datang ke Mabesad korban penculikan Andi Arief dan Faisal Reza.

"Kami sangat bisa memahami apa yang dirasakan oleh keluarga yang anggotanya sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Kami terus berusaha mencari keberadaan para aktivis yang hilang tersebut," kata Kadispenad menirukan apa yang disampaikan oleh Aspam Kasad, Mayjen Nooraman, ketika bertemu dengan keluarga aktivis yang belum kembali. (M-11/E-2)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

'Prabowo bisa di-Mahmil-kan & kena sanksi administratif'

JAKARTA (Bisnis): Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo HS menegaskan Letjen TNI Prabowo Subianto bisa diajukan ke Mahkamah Militer sekaligus kena sanksi administratif dalam kasus penculikan aktivis.

"Bisa dua-duanya. Serba mungkin, kalian tunggu saja, sampai Senin," ujarnya di sini kemarin, ketika ditanya apakah tiga perwira tersebut akan diajukan ke Mahmil atau hanya sanksi administratif.

Menurut Subagyo, hasil pemeriksaan terhadap tiga perwira terperiksa dalam kasus penculikan sejumlah aktivis kemarin telah diserahkan kepada Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto.

Jenderal TNI Subagyo menegaskan berkas pemeriksaan itu sudah selesai dan final, namun keputusan apapun yang akan diambil mengenai nasib Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR dan Kolonel TNI Chairawan tetap tergantung Menhankam/Pangab.

"Saya sudah serahkan kepada Pangab tadi pagi. Besok Senin [24 Agustus] baru diumumkan. Kalian tunggu saja sampai Senin," katanya.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu tidak bersedia memberikan keterangan mengenai bentuk saran yang akan diberikan kepada Menhankam/Pangab. "Pokoknya kalian tunggu saja sampai Senin," katanya, usai mengikuti Rapat Pimpinan (Rapim) ABRI yang dihadiri seluruh Kepala Staf, Panglima Kodam, Pangkostrad, Danjen Kopassus dan Kapolda se-Indonesia, di sini, kemarin.

Menurut Subagyo, DKP telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap ketiga perwira terperiksa. "Saya berharap keputusannya sudah final. Sekarang semuanya sudah berada di tangan Menhankam/Pangab. Tanya saja sama beliau," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris DKP Letjen TNI Djamari Chaniago. Menurut dia, hasil pemeriksaan memang telah disampaikan kepada Menhankam/Pangab, namun belum dapat diumumkan.

Dia menegaskan hasil yang telah disampaikan itu merupakan fakta berdasarkan pengakuan dan temuan yang didapat selama pemeriksaan. "Kita berharap keputusan ini dapat menyelesaikan masalah. Semuanya sudah final dan tergantung Menhankam/Pangab," ujar Pangkostrad itu.

Ditanya siapa yang memberikan perintah Bawah Kendali Operasi (BKO) kepada Letjen TNI Prabowo Subianto, dia mengatakan, "Saya belum bisa menjelaskan. Tanya saja kepada Pak Bagyo."

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DKP Letjen TNI Fahrul Razi menegaskan berkas yang disampaikan kepada Menhankam/Pangab berupa rekomendasi dan saran yang harus diambil untuk menyelesaikan kasus penculikan itu.

"Hanya berupa rekomendasi, sebab yang berhak menentukan keputusan terhadap setiap pelanggaran adalah Pangab," katanya.

Ditangani Puspom

Sekjen Dephankam Letjen TNI Soejono menegaskan jika Pangab memutuskan untuk mengajukan Prabowo dkk ke Mahmil maka penyidikan akan dilakukan oleh Puspom ABRI sebagai penyidik militer.

"Di ABRI itu yang penting fungsi dan misi. Tidak lihat pangkatnya, jadi Puspom sebagai penyidik tetap bertindak sebagai penyidik meskipun yang diperiksa lebih tinggi pangkatnya, tidak ada masalah," tegasnya.

Jika Prabowo dkk dipecat dari dinas kemiliteran, lanjut Soejono, maka mereka tidak dapat diadili di Mahmil tetapi di pengadilan biasa. "Sebaiknya kita tunggu saja Senin." **(s8/cp)**

Kelas: .....

LSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Pekan Depan, Pengumuman Sanksi bagi Prabowo

JAKARTA (Media): Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto mengisyaratkan pekan depan akan mengumumkan sanksi yang akan dijatuhkan kepada tiga perwira terperiksa, masing-masing Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kolonel Inf Chairawan. Sumber di Mabes ABRI mengatakan pengumuman itu akan dilakukan Senin pekan depan.

Kepada wartawan seusai mengikuti Rakor Polkam yang dipimpin Menko Polkam Feisal Tanjung, Wiranto juga menyatakan sampai kemarin (20/8) dia belum menerima rekomendasi dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang bertugas memeriksa Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kol Inf Chairawan berkaitan dengan kasus penculikan beberapa aktivis prodemokrasi.

Sedangkan Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP), Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo, mengatakan rekomendasi DKP hasil pemeriksaan terhadap tiga perwira terperiksa telah selesai disusun. Saran itu akan disampaikan kepada Menhankam/Pangab Jumat (21/8). Menurut rencana, Wiranto akan mengumumkan langsung keputusan yang diambil Mabes ABRI terhadap ketiga terperiksa.

Subagyo, yang juga menjabat sebagai KSAD, mengakui beberapa hari ini DKP memang melakukan rapat internal untuk pendalaman dan penyusunan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pangab. Saran DKP itu disusun Sekretaris DKP, Letjen TNI Djamari Chaniago. Keputusan komprehensif yang diambil dengan memperhatikan hasil pemeriksaan terhadap terperiksa dan saksi, barang-barang bukti, dan hasil peninjauan ke lapangan.

Jenderal Wiranto tidak bersedia memberikan banyak komentar ketika ditanya soal hukuman yang akan diganjarkan kepada tiga perwira terperiksa. Dalam tata cara kemiliteran, keputusan yang akan dijatuhkan pada ketiga perwira dari pasukan elite TNI AD itu sepenuhnya memang berada di tangan Pangab. DKP hanya bertugas memeriksa dan memberikan rekomendasi. Isinya bisa berupa sanksi administratif ataupun diajukan ke Mahkamah Militer jika ditemukan unsur pidana.

Sejumlah wartawan media cetak dan elektronik yang sudah menunggu di teras kantor Menko Polkam selama satu jam lebih tampak tidak puas dengan jawaban Pangab. Mereka terus mencecar dengan pertanyaan seputar DKP. Namun Pangab tetap menjawab dengan kalimat yang sama, "Minggu depan."

Menurut siaran pers kantor Menko Polkam, Jenderal Wiranto telah melaporkan perkembangan pemeriksaan terhadap tiga perwira terperiksa. "Rakor juga membahas kasus orang hilang. ABRI telah menangani masalah ini dengan sungguh-sungguh. Kita menantikan hasil DKP," tulisan siaran pers tersebut.

Sikap bungkam juga ditunjukkan Jenderal Subagyo. Dia hanya mengatakan pada prinsipnya, jangan sampai Ketua DKP yang menyampaikan. Sebab, jika sampai berbeda dengan keputusan yang akan diambil, maka hasilnya akan kurang menguntungkan. Dia malah minta wartawan menanyakan langsung soal ini kepada Pangab, termasuk masalah sebaiknya Prabowo diajukan ke Mahmil agar kejadian yang sebenarnya bisa diungkapkan. Subagyo juga tidak bersedia menjelaskan masalah kasus 14 aktivis yang masih belum jelas nasib dan keberadaannya. (Edi/Lin/U-4)

Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Prabowo Dicopot, Chairawan Dimahmilkan?

Nasib Tiga Perwira Kopassus Diputuskan Pangab Hari Ini

Dicopot dari ABRI Sudah Cukup Berat

Jakarta, JP.-

Nasib mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi Pr, dan mantan Dangroup IV/ Kopassus Kolonel Inf Chairawan ditentukan hari ini. Menhankam/ Pangab Jenderal TNI Wiranto akan mengumumkan sendiri keputusan sanksi yang akan dijatuhkan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) itu.

Prabowo yang pernah disebut-sebut sebagai *the rising star* di ABRI memang tersandung kasus penculikan para aktivis yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto. Setelah sejumlah oknum Kopassus dinyatakan terlibat kasus yang mendapat sorotan internasional itu, ia bersama dua perwira lain harus ikut bertanggung jawab.

Lalu, sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada Prabowo, Muhdi Pr, dan Chairawan? Yang sudah terungkap dari penjelasan Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo menyebutkan, rekomendasi yang diajukan ke Pangab adalah sanksi administratif atau dimahmilkan. Kepastian ini akan jelas dalam pengumuman Pangab di Mabes ABRI, Merdeka Barat, pukul 12.00 WIB.

Menurut sumber *Jawa Pos*, kemungkinan besar Prabowo dan Muchdi tidak dijatuhi sanksi administratif. Sebab, sanksi administratif itu sifatnya sekadar menurunkan atau melepas jabatannya dan menurunkan pangkatnya satu tingkat. Misalnya, dari Letjen menjadi Mayjen atau dari Mayjen (seperti Muchdi) menjadi Brigjen. Tetapi, status ABRI-nya masih utuh.

Sumber tadi menilai, kemungkinan sanksi yang pas adalah membebastugaskan Prabowo dan Muchdi. Sebab, sanksi pembebastugasan itu berarti melepaskan jabatan dan mencopot kepangkatan sekaligus mengeluarkan dua perwira tinggi itu menjadi warga biasa, bukan ABRI lagi.

Misalnya, dimahmilkan pun, kata sumber tadi, sanksi yang akan dijatuhkan kepada Prabowo dan Muhdi Pr akan tetap berupa pembebastugasan kedua perwira tadi. Kriteria pembebastugasan ini, kerangkanya, masih dalam bentuk melepaskan jabatan, mencopot pangkat, dan melepaskan status ke-ABRI-an dua perwira itu.

Soal kemungkinan di mahmil akan terkena sanksi pidana, misalnya sampai dipenjara sekian tahun, sumber tadi menilai tipis. Sebab, dugaan kesalahan Prabowo dan Muchdi Pr adalah salah menerjemahkan perintah BKO.

Yang sangat mungkin dijatuhi sanksi dimahmilkan Pangab, menurut dugaan sumber tadi, adalah Kolonel Inf Chairawan. Sebab, mantan Dangroup IV/ Kopassus ini manjadi pelaksana di lapangan.

Pelaksana ini, kata dia, dijatuhi hukuman oleh Pangab, yaitu dimahmilkan dengan tuduhan tindak pidana. Ada kemungkinan, sanksi yang akan dijatuhkan pada Chairawan melalui mahmil nanti, selain jabatan, pangkat, dan status ke-ABRI-annya dicopot, adalah masih kena hukuman kurungan penjara.

Apakah sanksi yang dijatuhkan kepada Prabowo dan Muchdi -kalau benar tidak sampai dimahmilkan- tidak terlalu ringan? Sumber tersebut menilai, sanksi pembebastugasan dengan risiko pangkat, jabatan, dan status ABRI-nya dilepas itu cukup berat. Memang, ia menilai dimahmilkan lebih berat, tetapi akhirnya hukumannya pun bisa sama dengan dibebastugaskan tidak melalui mahmil.

Tapi, kemungkinan Prabowo dan Muchdi tetap dimahmilkan pun, kata dia, masih ada. Hanya, kalau Prabowo dan Muchdi tidak terbukti melakukan kesalahan tindak pidana (langsung menculik), sanksinya akan tetap sama, seperti dibebastugaskan.

Tetapi, sumber tersebut menilai, kemungkinan sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Muchdi dan Prabowo dinilai kecil. Sebab, masyarakat akan protes karena status Prabowo dan Muchdi akan tetap di ABRI. Tapi, kalau sudah dibebastugaskan, itu berarti tidak ada lagi nama Prabowo dan Muchdi Pr di ABRI. (saf)

Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☑ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

▲"Tidak Ada Move untuk Membelanya"

Nasib Prabowo Ditentukan Hari Ini

Jakarta, Senin, Merdeka

Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto, hari ini akan mengumumkan secara resmi keputusan ABRI terhadap tiga terperiksa, yaitu Letjen Prabowo Subianto, Mayjen Muchdi PR dan Kolonel Chairawan. Keputusan itu diambil setelah mendapat masukan dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dipimpin Kasad Jenderal Subagyo HS.

Acara yang menurut rencana akan diadakan di Gedung Urip Sumohardjo, Mabes ABRI Jl Medan Merdeka Barat pukul 12.30 WIB itu juga akan dihadiri oleh seluruh anggota DKP yang terdiri dari sembilan orang jenderal itu.

Namun masih belum diperoleh informasi apakah hanya Jenderal Wiranto yang akan memberikan keterangan atau Ketua DKP Subagyo juga akan mengumumkan rekomendasi dan hasil pemeriksaan yang dilakukan DKP selama dua minggu lebih itu.

Kapuspen ABRI Mayjen Syamsul Ma'arif yang dihubungi *Merdeka*, tadi malam membenarkan bahwa kemungkinan besar Jenderal Wiranto akan mengadakan komperensi pers. "Tapi lihat saja besok lah," katanya.

Meski demikian, jenderal bintang dua itu sempat menepis sejumlah spekulasi yang berkembang seputar hasil rekomendasi DKP dan keputusan Pangab Jenderal Wiranto. Antara lain tentang keragu-raguan pimpinan ABRI untuk mengeluarkan putusan agar para terperiksa diajukan ke mahkamah militer. Keragu-raguan itu muncul dengan pertimbangan bahwa masalah tidak akan cepat selesai apabila diproses di mahkamah militer.

Menanggapi hal itu, Syamsul Ma'arif mengatakan, ABRI tidak bicara soal keragu-raguan. "Tapi ABRI akan mempertimbangkan segala faktor, termasuk faktor yang bisa menjurus kepada kemungkinan terjadinya disintegrasi. Jadi semua faktor akan dipertimbangkan," tambahnya.

Oleh karena itu, lanjut Kapuspen, apa yang sedang dan akan dilakukan ABRI ada batas maksimalnya. Hal itu harus dijaga tanpa mengorbankan integritas bangsa dan kekompakan untuk masa depan. "Jadi ada pertimbangan sendiri bukan keraguan dari pimpinan," kata Syamsul.

Namun ketika ditanya batas-batas maksimal dan kaitannya dengan integritas serta kekompakan masa depan, Kapuspen ABRI enggan untuk menjelaskan lebih lanjut. Dia hanya mengatakan bahwa dugaan tentang keraguan tersebut tidak benar.



Prabowo Subianto

Disinggung tentang munculnya dugaan bahwa keputusan nanti akan menyelamatkan Prabowo dan para terperiksa lainnya, seperti tidak akan membawa mereka ke mahmil, dia mengatakan, ABRI tetap akan menegakkan kode etik.

"Saya kira tidak ada *move* untuk membela Prabowo seperti yang Anda katakan tadi. Tapi ABRI akan menegakkan kode etiknya. Tidak ada istilah membela ini dan itu," katanya.

ABRI, lanjutnya, sangat mengharapkan agar masyarakat bisa menghargai dan mengerti sikap ABRI yang ingin membersihkan dirinya. "Memang apa yang diinginkan rakyat itu bisa menjadi salah satu ukuran. Tapi ABRI pun punya ukuran bahwa ia berani untuk menunjukkan yang benar itu benar dan yang salah itu salah," kata Syamsul.

Menurutnya, apapun keputusan yang akan diambil ABRI nanti bukan hanya berdasarkan dorongan masyarakat. Tapi ABRI menyadari harus ada reformasi dan pelurusan di tubuhnya. "Jadi ABRI bertindak bukan karena tekanan dari pihak manapun. Ini bukan hal yang mudah buat ABRI. Tapi ini bukan tekanan dari pihak manapun juga," ungkapnya.(PN)

Kelas: .....

Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

		Tanggal						Bulan		Tahun
SNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
KARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
AWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
OMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
D. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
EDIA INDONESIA	☑ Suara Buana	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Mahmil Perjelas Kesalahan

Jakarta, Buana

Mahkamah militer (mahmil) menjadi satu-satu alternatif yang tepat untuk mengetahui dengan jelas kesalahan Letjen TNI Prabowo, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kol Inf Chairawan dalam kasus penculikan dan penganiayaan aktivis prodemokrasi.

Sebab, Prabowo bukan penentu kebijakan, melainkan hanya pelaksana. Kemungkinannya hanya dua. Ia salah menafsirkan perintah atau penculikan itu memang diperintahkan atasannya. Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Karya Justitia Indonesia (LBH-GKJI) J Budi Haryanto SH SE mengemukakan analisis ini disela-sela kesibukannya mengikuti Munaslub IPHI di Jakarta, Sabtu (22/8) malam.

Pendapat serupa juga dikemukakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (DPP-LKBH) Yan Juanda Saputra SH. Menurutnya, kalau kesalahan yang dituduhkan terhadap Prabowo ternyata tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, Prabowo patut dikasihani.

Budi Haryanto mengatakan, Prabowo adalah seorang mantan Dan Kopassus, Pangkostrad, dan Dan Sesko ABRI. Di atas Prabowo, masih ada Menhankam/Pangab dan Presiden selaku Pangti ABRI. Maka, pengadilan militer menjadi efektif untuk mengungkapkan siapa sebenarnya yang paling bersalah.

Budi menambahkan, mengajukan kasus Prabowo ke mahmil sangat tepat, sebab pada pemeriksaan DKP yang bersangkutan sudah mengaku bersalah. Untuk mengetahui berat-ringannya pelanggaran, forumnya adalah pengadilan militer.

Masyarakat pasti mengharapkan kasus Prabowo diungkap sampai tuntas. ☐ ray

Hal. 1/ .....
Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal							Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA		1	7	13	19	25	31		Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA		2	8	14	20	26			Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA		3	9	15	21	27			Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA		4	10	16	22	28			April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN		5	11	17	23	29			Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30			Juni	Desember	2003

Pangab Habisi Prabowo Dkk

Pecat dari ABRI, Nonjobkan Chairawan dan Muchdi

Jakarta, JP.-

Tamat sudah riwayat mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto di ABRI. Menantu mantan Presiden Soeharto yang pernah disebut *the rising star* karena karier militernya yang melejit itu dipecat dari kesatuan ABRI. Ia dianggap bersalah dalam kasus penculikan para aktivis prodemokrasi.

Keputusan tentang nasib Prabowo itu diumumkan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto di Mabes ABRI Merdeka Barat, Jakarta, kemarin. Ikut mendampingi Pangab, Ketua DKP (Dewan Kehormatan Perwira) KSAD Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo, Kassospol ABRI Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Gubernur Lemhanas Letjen TNI Agum Gumelar, Kasum ABRI Letjen TNI Fachrur Rozi, dan beberapa perwira tinggi.

Detik-detik pengumuman sanksi terhadap Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi Pr, dan Kolonel Inf Chairawan itu sangat menegangkan. Sebab, semua perwira tinggi maupun puluhan wartawan dalam negeri dan asing dikondisikan untuk menunggu beberapa jam dalam posisi tidak menentu. Sebab, keputusan pemberian sanksi kepada Prabowo cs itu baru dirapatkan menjelang detik-detik pengumuman.

Ternyata, keputusannya amat tegas: Mengakhiri karier militer Prabowo. Sedangkan mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi Pr dan mantan Dangroup IV/Kopassus Kolonel Inf Chairawan dibebastugaskan dari jabatan struktural ABRI. Artinya, mereka masih tetap berstatus sebagai ABRI, tapi tidak diberi jabatan apa pun sampai masa pensiun.

Sanksi yang dijatuhkan kepada Muchdi Pr dan Chairawan ini mirip dengan yang diterima mantan Pangkolaop Timtim Brigjen Warouw dan Pangdam IX/Udayana Mayjen Sintong Panjaitan.

Kelas: .....

LSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Jadi, Apa Kesalahan Prabowo

APA komentar para sesepuh dan senior ABRI mengenai pemberhentian Letjen Prabowo Subianto dari dinas ABRI karena keterlibatannya dalam kasus penculikan sejumlah aktivis.

Terhadap masalah ini Barisan Nasional menyatakan, keputusan DKP terkesan masih setengah-setengah karena sanksi yang diberikan kepada Prabowo hanyalah pemberhentian dari dinas aktif ABRI, bukan pemecatan.

"Bagaimana ya, keputusannya dia dipecat atau dipensiunkan, ini menjadi pertanyaan Barisan Nasional. Diberhentikan dengan dipecat itu berbeda, kalau salah, *ya* dipecat saja. *Kok* malah dipensiunkan. Kalau diberhentikan (dipensiunkan-*red*) bisa diberhentikan dengan hormat. Ini *kan* seolah-olah dia dipensiunkan dengan hormat," kata juru bicara Barisan Nasional Letjen (Purn) Kemal Idris kepada *Merdeka* di Jakarta, tadi malam.

Sesepuh ABRI lainnya Letjen (Pur) M Jassin menyatakan heran mengapa Prabowo Cs tidak langsung diserahkan ke Mahmil. "Kok tidak di-Mahmil-kan, dia harus di-Mahmil-kan karena korbannya kan menyangkut jiwa manusia. Kok dibebaskan begitu saja, padahal persoalannya besar bukan berkaitan dengan menjalankan tugas, jadi dia seharusnya masuk penjara," kata bekas Pangdam di Jawa Timur itu.

Ditambahkan, kemungkinan Soeharto ikut campur tangan dalam DKP bisa saja terjadi. "Mungkin saja ada permintaan dari Soeharto, tapi itu *kan* tidak dibenarkan. Jadi sebenarnya jangan *ewuh pakewuh*, sebab hukum berlaku untuk siapapun," kata Jassin lagi.

Di sisi lain dia berpendapat, para keluarga korban sangat dimungkinkan melakukan tuntutan terhadap Prabowo Cs, apalagi korbannya sangat banyak. "Keluarga korban sangat mungkin melakukan tuntutan baru kepada Prabowo, *kan* bukan satu orang saja yang jadi korban. Tidak adil kalau Prabowo hanya diberhentikan," ujar bekas Wakasad itu.

Selanjutnya menurut Kemal Idris, kalau pun Prabowo diberhentikan dengan hormat dari dinas aktif ABRI, maka harus jelas apa kesalahannya. "Kami jadi bertanya mengapa bukan dipecat, kalau terlibat dalam suatu perkara pidana. *Kok* diberhentikan dengan hormat," ujar bekas Pangkostrad itu.

Apakah DKP mendapatkan tekanan atau permintaan dari mereka Prabowo yakni Soeharto? "Mungkin juga ada tekanan dari Soeharto. Saya tidak tahu. Memang aneh juga hukumannya. Menurut saya itu ada udang di balik batu. Kami tidak bisa mengerti, kalau kita *kan* salah, ya salah. Kalau tidak, ya tidak, kok setengah-setengah. Buat kami ini aneh.

Tidak Puas

Sementara itu salah seorang korban penculikan, Andi Arief yang dihubungi *Merdeka* di Lampung, tadi malam mengatakan, sejak awal sudah menduga Prabowo, Muchdi PR dan Chairawan tidak akan diajukan ke Mahmil. Karena, menurutnya, hal tersebut sudah menjadi tradisi militer Orde Baru yang tidak pernah mengirimkan jenderalnya ke Mahmil.

Mungkin .....

Menurutnya, yang diinginkan rakyat saat ini adalah pengadilan terbuka bagi ketiga perwira tersebut bukan hanya sekedar sanksi administratif. Selain itu dampak dari keputusan DKP ini juga berlaku bagi pemerintahan Habibie yang menjadi tidak populer di hadapan rakyat dan dunia internasional.

"Dari sini *kan* jadi semakin jelas kalau pemerintahan Habibie hanya melakukan reformasi kosmetikal saja, atau hanya sebagai lipstik semata," tambah Andi.

Menurut Andi, pengadilan 10 orang prajurit Kopassus di luar Prabowo, Muchdi dan Chairawan hanya akan menjadi pengadilan dagelan saja. "Itu hanya menunjukkan seakan-akan ada kesungguhan dari ABRI untuk menuntaskan masalah penculikan," katanya.

Ketidakpuasan atas keputusan tersebut juga ditunjukkan oleh Koordinator Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munir.

Menurutnya, pengambilan keputusan oleh ABRI hanya membatasi pada perangkat sanksi administratif tidak searah dengan komitmen ABRI yang pernah disampaikan, yaitu ABRI akan mengusut tuntas kasus penculikan para aktivis tersebut.

"Jadi Kontras tidak melihat adanya langkah maju dari ABRI, untuk melakukan proses penegakan hukum secara transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan pernyataan Pangab. Dan, kami sudah menduga sebelumnya kalau ketiga perwira itu tidak dimahmilkan," kata Munir.

Sedangkan Ketua FPP DPR Zarkasih Nur mengatakan, keputusan yang menyangkut Prabowo tidak tuntas, sehingga tak memuaskan rakyat. Supaya tuntas, Prabowo harus dibawa ke Mahmil. Kalau hanya dipecat, rakyat tetap bertanya-tanya.

Menurutnya, tidak sekedar Prabowo yang dibawa ke mahmil, tapi juga atas dan bawahannya yang ikut terlibat harus diseret ke Mahmil. "Saya lihat ada rekayasa di balik keputusan ini, sehingga membuat rakyat ragu," tambahnya.

Kalau putusannya hanya memberhentikan Prabowo dari dinas ABRI, bagaimana nasib orang-orang yang hilang, masih hidup atau sudah mati? Dia berharap, tindak kriminal yang melanggar HAM itu dituntaskan di pengadilan negeri.

"Jika pimpinan ABRI tidak memahmilkan Prabowo, aparat hukum bisa membawa kasus

Hal. 1/ .....
Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☑	Berita Buana	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

SELAMAT SIANG

Mahmil tak Bisa Lagi Adili Prabowo?

MENHANKAM/Pangab Jenderal TNI Wiranto dalam pernyataannya, Senin (24/8), mengumumkan, mengakhiri masa dinas mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto di ABRI. Berarti, status Prabowo saat ini adalah warga sipil. Sedangkan, mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi dan mantan Dan Grup IV Kolonel Inf Chairawan tidak dipecat, namun tak boleh menjabat apa pun dalam struktur ABRI.

Lantas, bagaimana nasib tuntutan hukum terhadap semua tindakan penculikan aktivis politik yang diakui Prabowo itu? Bagaimana dengan hukuman terhadap Muchdi dan Chairawan?

Pangab menjelaskan, "ABRI tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan tiga perwira tersebut ke Mahkamah Militer (Mahmil), jika dalam proses persidangan 10 anggota ABRI (Kopassus) lainnya di Mahmil ternyata membuktikan adanya indikasi tersebut. Tindakan ini berdasarkan saran dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP)."

Dalam penjelasan yang hanya tujuh menit itu, Pangab mengakui alasan dijatuhkannya sanksi tersebut adalah keterlibatan oknum Kopassus dalam kasus penculikan sejumlah aktivis LSM dan pelanggaran HAM beberapa waktu lalu. Ditambahkannya, dasar keputusan itu juga melihat pada dua sisi, yakni kesalahan yang dibuat ketiga perwira itu dan sumbangsihnya selama aktif berdinas pada bangsa dan negara. "Tidak ada tekanan dari siapa pun dalam membuat keputusan yang diambil pimpinan ABRI ini. Jadi, kita tak inginkan spekulasi yang macam-macam," lanjutnya.

Ketua DKP Kasad Jenderal TNI Subagyo HS mengatakan, diakhirinya dinas aktif Prabowo berarti pensiunnya dipercepat dengan hormat dan tinggal menunggu SK dari Pangab saja, yang menegaskan keputusan tersebut. Soal Prabowo ke Mahmil, Kasad mengatakan, ada aturannya. Kalau keterangan dari sepuluh anggota ABRI yang sedang di Mahmil terbukti mengarah ke Prabowo, ia bisa diajukan ke Mahmil.

Banyak pihak memuji sikap ABRI yang berusaha keras menyingkap kasus penculikan itu. Bahkan, sejumlah mantan jenderal menyebutnya sebagai 'usaha berani, walau menyakitkan' dari ABRI untuk memulihkan citranya dari berbagai prasangka buruk. Mantan Kassospol ABRI Letjen (Purn) Bambang Triantoro mengaku merinding, ketika mendengar beberapa perwira TNI-AD bertindak 'tidak ksatria'. Tetapi, ada pula yang meragukan bahwa pembentukan DKP itu akan menuntaskan kasus ini hingga berujung pada vonis pengadilan. Dikhawatirkan, sama seperti kasus Dili, pembentukan DKP itu membuat Prabowo paling-paling hanya akan dikenakan tindakan administratif.

Pihak Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (Kontras) sempat melayangkan surat kepada DKP. Surat itu menyatakan keberatan atas pembentukan dewan itu, sebelum para terperiksa diajukan ke Mahmil terlebih dahulu. "Pembentukan DKP itu bakal menghilangkan kemungkinan untuk menyeret mereka ke Mahmil," ujar koordinator Kontras, Munir SH.

Benar, setelah Pangab men-sipil-kan Prabowo, pertanyaan terbesar saat ini adalah soal pengadilan jenis apa yang bisa mengadili kesalahannya? Untuk membuktikan, kebenaran tindak penculikan yang dilakukan Prabowo. Atau sebaliknya, malah di pengadilan itu akan terungkap bahwa Prabowo sama sekali tak bersalah.

Masyarakat pasti banyak yang bertanya dengan status sipil itu. Tentu pengadilan militer tak lagi berhak mengadili Prabowo? Sebaliknya, jika dibawa ke Pengadilan Negeri (sipil), apa tindak pidana yang dilakukan seseorang saat menjabat sebagai militer bisa diadili di pengadilan sipil? Seperti yang ditegaskan Pangab supaya tak terjadi spekulasi macam-macam di tengah-tengah masyarakat, tentu perlu ditegaskan soal ini. Apalagi, dengan adanya pernyataan bahwa jika 10 anggota ABRI (Kopassus?) yang diadili di Mahmil memberatkan Prabowo (Muchdi dan Chairawan), baru ketiganya diajukan ke Mahmil.

Berarti, jika ke-10 anggota ABRI yang disidang di pengadilan militer itu tak memberatkan Prabowo, tentu takkan ada pengadilan militer untuk mengungkap secara tuntas kasus ini. Lantas, bagaimana dengan pernyataan Kasad tentang kesalahan Prabowo dalam menafsirkan perintah Bawah Kendali Operasi (BKO) tersebut? Jika Prabowo tak diadili, tentu akan sulit untuk mengungkapkan siapa pemberi BKO. Sebab, tak mungkin pemberi BKO itu (pasti pangkatnya di atas Prabowo) secara langsung diberikan kepada 10 anggota ABRI yang akan dimahmilkan tersebut?

Pujian berdatangan dari dalam dan luar negeri atas pernyataan Pangab soal tekad pimpinan ABRI untuk menindak oknum yang melakukan pelanggaran hukum. Diyakini, sikap tegas pimpinan ABRI ini akan menjadi momen besar untuk memulihkan citra ABRI yang kini tercoreng dengan serangkaian kasus yang menimbulkan korban rakyat sipil. Sekarang, semua berpulang pada pimpinan ABRI. ❑

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☑ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Ada desakan Prabowo ke Mahmil

JAKARTA (Bisnis): Berbagai kalangan mendesak Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto agar mengajukan mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto ke Mahkamah Militer, sementara sepuluh anggota Kopassus yang ditahan Puspom ABRI terus diinterograsi.

Letjen TNI (Purn.) Hasnan Habib mengatakan pemberhentian Prabowo dari ABRI belum dapat dijadikan acuan dan indikator kalau kasus penculikan selesai sesuai yang diharapkan masyarakat.

"Tim penyidik harus mencari data yang lengkap mengenai unsur tindak pidana yang dilakukan Prabowo," katanya, di sela-sela sarasehan yang digelar CSIS, di sini, kemarin.

Menurut Hasnan, kendati status Prabowo sudah tidak lagi anggota ABRI, kasusnya tetap dapat diajukan ke Mahmil. "Sesuai UU dapat saja diajukan ke Mahmil. Sebab kejahatan yang dilakukan terjadi ketika masih aktif. Dan peraturannya harus diajukan ke Mahmil," katanya.

Langkah yang diambil Menhankam/Pangab tersebut, menurut Hasnan, merupakan bentuk dari upaya ABRI dalam melakukan reformasi internal. "Wiranto berupaya mengembalikan kepercayaan ABRI di mata masyarakat. Namun itu tidak akan terjadi kalau pelaku penculikan dan yang memerintah tidak diajukan ke Mahmil," tegasnya. **(s8/cp/ln)**

Hal. 17 .....
Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Membunuh Satu Matahari

Bernama Prabowo

Pangab Jenderal TNI Wiranto tahu pasti: tidak boleh ada dua matahari di satu hari. Tidak boleh ada dua nakhoda dalam satu biduk. Karenanya, salah satu harus kalah atau dikalahkan. Dan, itulah yang benar-benar dilakukan Wiranto. Ia membunuh satu matahari di ABRI yang sangat potensial menyainginya: Letjen TNI Prabowo Subianto.



BANYAK yang tidak menyangka Wiranto akan senekat itu. Tanpa ragu-ragu, ia menghabisi Prabowo dengan memecatnya (katanya secara terhormat) dari ABRI. Dua kawan akrab Prabowo: Mayjen TNI Muchdi Purwopranjono dan Kol Chairawan, dikeluarkan dari struktur ABRI, kendati tidak dipecat.

Wiranto tampaknya tidak punya pilihan lain, kecuali menyikat Prabowo. Kalau tidak, menantu Soeharto ini akan menjadi kerikil tajam di sepatu Wiranto dan sangat potensial merongrong terus kepemimpinannya. Pada akhirnya, tidak mustahil Wiranto akan tersungkur tersandung batu Prabowo.

Kesempatan emas tidak akan datang dua kali. Itu yang ada di benak Wiranto. Senyampang kesempatan menghantam Prabowo ada, hal itu tidak boleh terlewatkan begitu saja. Prabowo pun KO. Wiranto menang telak.

Selesaikah episode ini? Tunggu dulu. Dengan keputusan itu, posisi Wiranto memang makin mantap dan tidak tertandingi. Konsolidasi di tubuh ABRI juga terlihat makin mulus. Dengan demikian, program-program Wiranto untuk membuat ABRI lebih profesional sekaligus membersihkan citra ABRI dari kesalahan-kesalahan di masa lalu yang memalukan diperkirakan akan lebih lancar.

Tetapi, benarkah demikian? Segampang itukah Prabowo menyerah? Betulkah ia tidak akan membalas dendam dengan sisa-sisa kekuatannya? Semuanya masih menjadi pertanyaan besar.

Ada banyak persoalan yang menghadang Wiranto. Salah satunya, tuntutan masyarakat agar Prabowo dimahmilkan tampaknya tidak bisa diabaikan oleh Wiranto. Ada kemungkinan dalam forum pengadilan itulah Prabowo akan blak-blakan dan akan "menggigit" atasan-atasannya. Inilah ujian bagi Wiranto. Akankah ia siap jika Prabowo mengungkapkan semuanya? Siapkah ia seandainya dalam pengadilan nanti terbukti ada tokoh di atas Prabowo yang terlibat dan berarti yang bersangkutan harus diperiksa? Ini juga persoalan besar yang merisaukan Wiranto.

Tuntutan masyarakat dan tokoh-tokoh militer senior juga sangat kuat agar Prabowo segera dimahmilkan. Menurut pengamat ABRI Mayjen (Pur) Syamsudin, sanksi di ABRI itu hanya ada dua: diberhentikan dengan hormat dan secara tidak hormat. Prabowo mestinya layak mendapat sanksi yang kedua, diberhentikan secara tidak hormat dan langsung diajukan ke mahmil. "Bukti-bukti untuk menyeret Prabowo ke mahmil sudah cukup kuat," kata mantan Pangdam X/Lambung Mangkurat yang juga orang Kopassus ini.

Pangab masih menyiratkan dalam pernyataannya, Prabowo bisa dimahmilkan jika ada data-data kuat dari sebelas tersangka yang sedang diadili bahwa mereka mendapat perintah dari Prabowo.

Lalu, mengapa Wiranto tidak tegas saja. Apa ia masih menghitung-hitung (sisa-sisa) kekuatan Prabowo? "Omong kosong kalau Prabowo masih punya kekuatan untuk melakukan perlawanan," sergah Syamsudin.

Menurut dia, kalau Prabowo mempunyai kekuatan riil, mestinya ia bisa melakukan sesuatu saat peralihan kekuasaan dari Soeharto ke Habibie, Mei lalu.

Risiko itu, menurut Syamsudin, mestinya harus siap dihadapi Wiranto. "Biarkan Prabowo *'nyanyi'* di pengadilan. Siapa yang disebut Prabowo ikut terlibat penculikan, biarkan saja. Itu *kan* keadilan. Buka saja semua biar urusannya selesai. Kalau bisa membawa Prabowo ke mahmil, itu kredit poin baru bagi ABRI," tuturnya.

Yang juga jadi pertanyaan, akankah Prabowo punya kemampuan untuk merongrong kekuasaan Wiranto dari luar struktur ABRI, misalnya, dengan mempengaruhi orang-orangnya yang masih ada di ABRI? Banyak yang menyangsikan juga.

Memang, ada yang menyebut-nyebut Prabowo ini sedikit banyak mempunyai kapasitas seperti Benny Moerdani, yang mampu terus mempengaruhi ABRI melalui orang-orangnya, kendati secara formal ia sudah dihabisi Soeharto.

Tetapi, hal itu dibantah banyak pengamat. Dalam bincang-bincang dengan *Jawa Pos* beberapa waktu lalu, pengamat politik Dr Nurcholish Madjid (yang mengutip pernyataan salah seorang tokoh Islam yang dikabarkan dekat dengan Benny Moerdani) mengatakan bahwa Prabowo ternyata jauh di bawah Moerdani. Manuver politiknya ketika menemui Habibie dan mengatakan siap membantu asal diberi jabatan sebagai Pangab (malam sebelum penyerahan kekuasaan Soeharto) menunjukkan bahwa Prabowo belum canggih dalam berpolitik. Kecil kemungkinan ia bisa merongrong Wiranto dari luar struktur.

Selesaikah persoalan Wiranto? Tentu belum. ABRI tidak bisa membersihkan citranya hanya dengan menyelesaikan kasus Prabowo. Sebab, masih ada persoalan-persoalan masa lampau yang kini juga diusik masyarakat. Misalnya, kasus Aceh yang memakan ratusan, bahkan ribuan korban. **(saf/ado/adb)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☑ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Prabowo Lakukan Tindak Pidana

Jakarta, Kompas

Keputusan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto yang menerapkan sanksi administratif terhadap Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto, dinilai tidak memuaskan. Penculikan merupakan kasus pidana, sehingga apabila Prabowo telah mengakui menculik sembilan orang aktivis, maka seharusnya ia diajukan ke mahkamah militer.

Demikian antara lain rangkuman pendapat Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, pengamat politik dan militer Letjen TNI (Purn) Hasnan Habib, serta Ketua Yayasan Kerukunan Persaudaraan Kebangsaan (YKPK) Letjen TNI (Purn) Bambang Triantoro, yang dihubungi secara terpisah, Selasa (25/8), di Jakarta.

Menurut Amien, Prabowo harus dibawa ke mahmilub (mahkamah militer luar biasa). "Mahkamah militer adalah sebuah keharusan. Kalau tidak, saya khawatir citra ABRI akan terpuruk di mata rakyat. ABRI sekarang sedang coreng-moreng karena peristiwa Aceh, Trisakti, penjarahan, pemerkosaan, dan lain-lain. Jadi supaya tidak berlarut-larut, sebaiknya pimpinan ABRI membawa Prabowo dan teman-temannya ke mahmilub, terbuka untuk publik," kata Amien.

Sehingga, lanjut Amien, "Siapa yang menyuruh Prabowo atau mungkin juga Prabowo pernah disuruh seorang jenderal untuk memusnahkan seorang tokoh politik dan lainnya, itu bisa terbuka. Nanti ketahuan pula jenderal mana saja yang harus bertanggung jawab terhadap luluh lantaknya bangsa kita ini."

Secara moral ia mengimbau kepada Presiden Habibie dan pimpinan ABRI untuk berpedoman, "Semakin ABRI jujur ksatria membuka boroknya, semakin tinggi reputasinya. Jika pimpinan ABRI zig-zag dan membeli waktu, siapa tahu rakyat lupa, citranya bisa lebih negatif. Saya cinta ABRI dan bangsa ini. Pak Harto pun perlu dicari ada kaitannya atau tidak."

Tindak pidana

Senada dengan Amien, secara tegas Hasnan Habib mengatakan, kasus penculikan merupakan tindak pidana."Saya membaca surat kabar bahwa Prabowo mengaku bahwa ia telah menculik sembilan orang," ujar Hasnan disela-sela Sarasehan Nasional "Visi Baru" di Center for Strategic and International Studies (CSIS). Jika telah mengakui terlibat dalam penculikan, lanjutnya, maka Prabowo telah melakukan tindak pidana.

"Kalau yang dilakukan oleh komandan seperti itu, *it must be something seriuosly wrong* (pasti ada sesuatu yang salah, —**Red**) dalam mental dan jiwa komandan dan pasukan itu. Apalagi, terlihat seolah-olah nasib negara kita tergantung dari kesatuan elite ini," ujar Hasnan lagi.

Hasnan mengatakan, sebenarnya ia lebih senang jika kasus tersebut langsung saja dibawa ke mahmil, demi penegakan hukum. Ditambahkan, walaupun Prabowo sekarang telah menjadi orang sipil, ia tetap dapat diajukan ke Mahmil karena itu adalah peradilan sehubungan dengan koneksi dengan orang lain. Ia mencontohkan jika seorang militer bersekongkol dengan seorang sipil untuk melakukan tindak pidana, orang sipil tersebut dapat juga diajukan ke Mahmil.

Bambang Triantoro juga senada mengenai hal itu. Dikatakan, dengan mengajukan Prabowo ke mahmil maka hal-hal yang membingungkan dalam keputusan Pangab dapat dijernihkan. "Keputusan yang paling tepat adalah mengajukannya ke mahmil, sehingga dapat diungkap apa yang terjadi sebenarnya. Dari situ bisa dinilai, apakah itu merupakan kebijakan orang yang bersangkutan, atau merupakan kebijakan negara," kata Bambang.

(gg/uu/myr)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☑ Suara Merdeka	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

"Langsung Mahmilkan Prabowo"

JAKARTA - Sanksi yang dijatuhkan Pangab terhadap tiga perwira terperiksa dalam kasus penculikan orang hilang mendapat tanggapan Letjen (Purn) Hasnan Habib dan Ketua Umum DPP Golkar Ir Akbar Tanjung.

Menurut Hasnan Habib, bila Pangab ingin melakukan penegakan hukum, yang merupakan tuntutan reformasi, seyogianya Prabowo langsung dimahmilkan. Sebab, bila dia benar-benar mengaku menculik 9 aktivis, berarti mantan Danjen Kopassus itu telah melakukan suatu tindak pidana.

"Hanya saja, apakah seorang anggota ABRI harus dimahmilkan atau tidak, itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif Pangab. Jika Pangab melihat pengadilan justru akan memberikan keadaan yang lebih jelek, maka dia mempunyai wewenang untuk menyatakan tidak usah dituntut," kata Hasnan Habib kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Sebagaimana diberitakan kemarin, mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto akhirnya diberhentikan dari keanggotaan ABRI. Keputusan pencopotan Prabowo yang diumumkan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto itu sesuai dengan saran Dewan Kehormatan Militer (DKP) yang memeriksanya sehubungan dengan kasus penculikan sejumlah aktivis.

Sedangkan dua perwira lain, Mayjen TNI Muchdi PR dan Kol (Inf) Chairawan, dilepas dari jabatannya secara struktural di ABRI, namun masih tetap anggota ABRI. Meski demikian tidak menutup kemungkinan ketiganya akan diserahkan ke mahkamah militer (mahmil), jika dari hasil pemeriksaan mahmil terhadap 10 tersangka yang lain membuktikan mereka terlibat tindak pidana.

Mengenai pernyataan Pangab bahwa terhadap ketiga perwira itu tidak tertutup kemungkinan dituntut ke pengadilan, tergantung hasil pemeriksaan terhadap 10 anggota Kopassus yang lain, Hasnan menyatakan keheranannya. "Bagaimana mungkin anak buah dituntut, sedangkan induknya seperti tidak tahu," paparnya.

Sekali lagi Hasnan menegaskan, demi penegakan hukum, memang seyogianya Prabowo langsung dimahmilkan. Untuk itu harus melalui proses penyidikan oleh POM ABRI atau Oditur Jenderal Militer. Dari sana nanti akan terungkap ada atau tidaknya bukti yang memperlihatkan dia terlibat tindak pidana.

Menurut Hasnan, kendati status Prabowo sekarang adalah sebagai warga sipil, tetap tidak tertutup kemungkinan dia dimahmilkan. Sebab, seorang sipil murni pun bisa dimahmilkan, bila dia terbukti melakukan tindak pidana bersengkongkol dengan militer. Terlebih Prabowo adalah sipil mantan anggota ABRI.

Kehendak Masyarakat

Sementara itu Ketua Umum DPP Golkar Ir Akbar Tanjung mengemukakan, bila nanti kasus penculikan sudah dibawa ke mahkamah militer, semuanya akan menjadi terbuka dan dapat diikuti oleh masyarakat. "Sekarang ini kan semangat keterbukaan sedang kita bangun," katanya.

Dengan dibawanya kasus ini ke mahmil, diharapkan pula berbagai tempat yang digunakan untuk penyekapan dan operasi penculikan dapat pula diketahui. Dalam hal ini Akbar Tanjung juga berharap para anggota Kopassus yang diperiksa dapat menyampaikan hal-hal yang sebenarnya tanpa khawatir mendapat tekanan. "Mestinya mereka secara kesatria mempertanggungjawabkan perbuatannya," tandasnya.

Dari Bandung dilaporkan, suasana kompleks Markas Besar Sekolah Staf Komando Angkatan Bersenjata RI (Sesko ABRI) di Jl Martanegara, berkesan *addhem ayem* saja, seperti tak terpengaruh oleh berita pemecatan Letjen TNI Prabowo Subianto yang kebetulan jabatan terakhirnya adalah komandan sesko tersebut.

Bahkan kemarin, di Mabes berlangsung acara kunjungan para siswa College Army (semacam Sesko ABRI) dari Singapura. Suasana penyambutan para tamu pun berjalan sangat lancar, seakan-akan tak terganggu oleh adanya peristiwa pemecatan Prabowo selaku orang pertama di lembaga tersebut.

Namun saat *Suara Merdeka* mau meminta komentar kepada Kepala Penerangan Sesko ABRI Letkol JB Suparno, yang kebetulan tengah mengantar tamu, ia menolak memberikan keterangan.

Apakah Bapak kaget dengan keputusan itu? "Wah saya *nggak* ada komentar," jawabnya. (tn,nas,bn-29k)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐ Suara Merdeka	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Prabowo Akhirnya Dicopot dari ABRI

• Tetap Bisa Diajukan ke Mahmil
• Kontras Kecewa dan Kurang Puas

JAKARTA -Mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto akhirnya diberhentikan dari keanggotaan ABRI. Keputusan pencopotan Prabowo yang diumumkan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto kemarin sesuai dengan hasil saran Dewan Kehormatan Militer (DKP) yang memeriksanya sehubungan dengan kasus penculikan sejumlah aktivis.

Sedangkan dua perwira lain yaitu Mayjen TNI Muchdi PR dan Kol (Inf) Chairawan dilepas dari jabatannya secara struktural di ABRI, namun masih tetap anggota ABRI. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan ketiganya akan diserahkan ke mahkamah militer (mahmil), jika dari hasil pemeriksaan mahmil terhadap 10 tersangka lain membuktikan mereka terlibat tindak pidana.

Atas keputusan Pangab tersebut, Komite untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) yang sejak awal gigih mengungkap penculikan sejumlah aktivis merasa kecewa dan kurang puas. Keputusan itu dinilai tidak sesuai dengan komitmen ABRI untuk menyelesaikan kasus penculikan aktivis secara final sampai ke mahmil. "Keputusan itu mempertebal pesimisme masyarakat bahwa ABRI akan menghentikan politik kekerasaan," tegas Koordinator Kontras Munir SH di kantor YLBHI, kemarin.

Menurut Wiranto, DKP memang hanya memeriksa ketiga perwira tersebut secara administratif. Sehingga sanksi yang dijatuhkan DKP adalah sanksi administratif. "Meski begitu, tidak menutup kemungkinan mereka diajukan ke mahmil, jika dalam proses persidangan terhadap 10 anggota terperiksa (semuanya juga anggota Kopassus) yang lain nyata-nyata membuktikan ke arah itu," ujarnya kepada wartawan usai mengumumkan keputusan tersebut.

Menjadi Sipil

Dengan keputusan itu, tandas Pangab, Prabowo sudah tidak dinas aktif di ABRI. Atau menjadi orang sipil karena tidak dalam struktur ABRI. "Artinya, dalam struktur ABRI mulai dari jenderal sampai perajurit terendah itu mempunyai jabatan. Diakhiri masa dinas itu artinya pensiun. Tidak lagi dalam ABRI secara aktif. Bahasanya begitu," ujarnya.

Sedangkan Muchdi PR dan Chairawan, lanjut dia, masih aktif di ABRI, tetapi tidak akan diberi jabatan struktural, termasuk kenaikan pangkat. Dalam kasus penculikan sejumlah aktivis, mahmil nantinya akan mengadili 10 perajurit Kopassus yang kini tengah diperiksa di Puspom ABRI. Dari persidangan itu akan terbuka pengakuan mereka tentang siapa yang memberi instruksi.

"Semua nanti akan terbuka di mahmil dari pengakuan mereka langsung yang melaksanakan tugas itu. Misalnya, apa misinya, siapa yang memberi perintah, satu per satu akan menjelaskan. Saya disuruh siapa dan bagaimana, nanti akan terungkap."

Karena keputusan yang dijatuhkan kepada Prabowo dkk tersebut baru merupakan tindakan adimisnistratif, Pangab mengharapkan masyarakat tetap mengacu pada asas praduga tak bersalah. "Tunggu saja nanti hasilnya di mahmil. Kita sudah menjatuhkan sanksi administrasi."

Menurutnya, apa yang diputuskan itu untuk kepentingan ABRI, bangsa, dan negara. Tidak ada tekanan dari siapa pun atau pihak mana pun dalam mengambil keputusan. Yang jelas, keputusan ini untuk kepentingan ABRI sendiri, bangsa dan negara.

Kata Pangab, DKP yang dibentuk akhir Juli lalu dipimpin KSAD Jenderal TNI Subagyo HS telah memeriksa Prabowo, Muchdi PR, dan Chairawan selama sekitar tiga pekan sampai 21 Agustus 1998.

"Saya menilai DKP bekerja dengan baik. Untuk itu disampaikan penghargaan. Pada 21 Agustus kami telah menerima saran dari DKP tentang tindakan terhadap tiga terperiksa."

Culik Sembilan Orang

Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo HS menambahkan, pelepasan Prawobo dari dinas ABRI termasuk pemberhentian dengan hormat. "Definitifnya menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) Pangab. Tunggu saja," ujarnya.

Dalam pemeriksaan, lanjut dia, ketiga perwira tersebut mengakui menculik 9 aktivis dan seluruhnya masih dalam keadaan hidup. Namun sejauh mana keterlibatan mereka dalam kasus penculikan itu, sebaiknya menunggu persidangan mahmil. "Dari mahmil arahnya jelas. Karena itu harus menunggu, apakah tiga perwira itu terlibat atau tidak. DKP menyarankan tindakan adminsitratif."

Sama dengan Pangab, dia juga menyatakan langkah mengajukan tiga perwira tersebut ke mahmil bisa saja.

Ketika diminta tanggapan atas pernyataan Andi Arief agar Prabowo melepaskan 14 orang yang masih dalam pencarian dengan kompensasi Prabowo dibebaskan, Soebagyo mengatakan, "Mereka tidak mengerti itu."

Berikut komentar pengamat:

Munir: Keputusan Pangab menunjukkan pimpinan ABRI sama sekali mengabaikan tuntutan rasa keadilan untuk mengungkap kasus penculikan secara tuntas. Saya tidak melihat langkah maju

ABRI dalam proses penegakan hukum secara transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan pernyataan Pangab beberapa waktu lalu.

Kontras tetap pada posisi semula, mendesak Puspom ABRI untuk segera menjalankan fungsinya memeriksa tiga perwira tersebut sebagai tersangka. Keputusan Pangab hendaknya tidak menghalangi proses penegakan hukum dalam menindaklanjuti hasil-hasil pemeriksaan awal.

Hendardi (Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI):

Dengan hasil-hasil DKP, saya menilai, masalah penculikan dan penghilangan paksa telah dianggap semata-mata sebagai perbuatan oknum pelaksana operasional dengan kekeliruan prosedur, tanpa dapat menjangkau penyelidikan atas latar belakang politik ataupun otak intelektualnya.

Bambang Triantoro (mantan Kassospol ABRI):

Sanksi administratif bukan berarti kemungkinan membawa ketiga perwira tinggi itu ke mahmil sudah tertutup. Selama dua tahun ke depan tetap terbuka kemungkinan mereka bertiga diminta pertanggungjawabannya di pengadilan militer.

Tetapi karena sanksi administratif ada yang kembali menjadi orang sipil, dia dapat dituntut ke pengadilan negeri oleh pihak-pihak yang menjadi korban. Tidak seorang pun di negara hukum ini yang kebal terhadap hukum.

Dr Indria Samego (pengamat politik):

Ketiga perwira itu tetap harus diajukan ke pengadilan militer agar penyelesaian kasus penculikan bisa tuntas sampai ke finalnya. Namun, keputusan Pangab membebastugaskan ketiga perwira sudah merupakan hukuman berat. Tapi akan lebih baik kalau dibawa ke mahmil.

Dr HM Amien Rais (Ketua Umum PAN):

Hasi temuan DKP yang sementara berujung dengan keputusan Pangab harus ditindaklanjuti. Bila tidak diselesaikan sampai final, bisa berakibat lebih buruk terhadap citra ABRI yang memang sudah jelek. Kalau makin buruk akan sulit diperbaiki nantinya.

Perwira yang telah menjatuhkan citra ABRI hendaknya membuka bukti-bukti seperti apa adanya dalam setiap persidangan. Jangan sampai ada sepotong informasi pun yang disembunyikan. (di,wid,tn-11k)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Puspom ABRI Akan Periksa Prabowo



Pembaruan/Charles Ulag

PENDUKUNG MEGAWATI – Sekitar 200 orang simpatisan yang tergabung dalam Komite Pendukung Megawati (KPM), Selasa (25/8) siang melakukan aksi unjuk rasa di Dephankam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Aksi mereka menuntut agar kasus penculikan diusut tuntas dan dalang penculik agar diseret ke pengadilan.

Jakarta, 26 Agustus

Komandan Puspom ABRI, Mayjen TNI Syamsu, mengatakan, Puspom ABRI dalam waktu dekat akan memanggil dan memeriksa Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto berkaitan dengan penculikan sembilan aktivis. Hasil pemeriksaan itu nantinya akan dijadikan bahan untuk disampaikan kepada Mahkamah Militer.

"Puspom ABRI sebenarnya telah melakukan pemeriksaan tahap pertama terhadap ketiga perwira yang diperiksa oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP), tetapi itu untuk masukan DKP. Kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk melengkapi berkas yang akan diajukan ke Mahmil," kata Syamsu kepada wartawan di Jakarta, hari Selasa (25/8).

Sebelumnya, Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo mengatakan, Prabowo mengaku telah menculik sembilan aktivis. Hal itu dikatakan seusai mendampingi Pangab Jenderal TNI Wiranto mengumumkan sanksi yang diberikan kepada Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi dan Kolonel Inf Chairawan.

Setelah mendengarkan saran dari DKP, Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto di Mabes ABRI Merdeka Barat, Jakarta, hari Senin (24/8) mengumumkan sanksi administratif kepada Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kolonel Inf Chairawan.

Mantan Komandan Jenderal Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata RI. Sementara Mayjen TNI Muchdi PR yang juga mantan Danjen Kopassus dan Kolonel Inf Chairawan yang mantan Dan Grup IV/Kopassus dibebaskan dari semua tugas dan jabatan struktural ABRI.

Ketiga perwira tersebut diberi sanksi administratif berkaitan dengan kasus penculikan dan penyekapan sejumlah aktivis beberapa waktu lalu.

Untuk selanjutnya, tidak tertutup kemungkinan mereka bertiga dibawa ke Mahkamah Militer (*Pembaruan, 24/8*). Menurut ketentuan yang berlaku, meskipun sudah berstatus purnawirawan, tetapi sampai dua tahun sesudah menjadi warga negara biasa, seseorang anggota ABRI masih bisa diajukan ke Mahmil.

Kapan Prabowo akan dipanggil dan diperiksa oleh Puspom ABRI? "Sebentar lagi lah. Sebab saat ini kita sedang memeriksa anak buahnya dan itu masih terus berjalan.

(Bersambung ke hal 2

Nanti dia segera kita panggil," jawab Syamsu.

Ketika ditanya apakah Prabowo ketika diperiksa oleh Puspom ABRI sebelumnya telah mengaku melakukan penculikan terhadap sejumlah aktivis, Syamsu mengatakan, bahwa itu pernah terungkap di sini tanpa menjelaskan siapa yang mengungkapkan hal tersebut.

Dikatakan, hasil pemeriksaan DKP selanjutnya akan menjadi bahan bagi Puspom ABRI untuk melaksanakan kelanjutan penyidikan. Belum diajukannya para oknum Kopassus yang menjadi tersangka ini ke Mahmil, karena hasil pemeriksaannya belum selesai.

Menurut Syamsu, pengakuan Prabowo bahwa jumlah yang diculik itu sembilan orang, merupakan informasi baru bagi Puspom ABRI. Karena, sebelumnya hanya diperoleh pengakuan dari para tersangka yang ditahan di Puspom ABRI sebanyak empat orang.

"Sekarang kan Prabowo mengakui sembilan, makanya kita perlu mendalami lagi. Kita minta kalau ada masukan lain segera diberikan, misalnya dari para saksi korban," tambahnya.

Kejahatan Berat

Sementara itu, Menteri Kehakiman Muladi menyatakan, tidak tertutup kemungkinan Prabowo dibawa ke Pengadilan Militer jika terbukti melakukan tindak pidana. Hal itu dikatakan menjawab pertanyaan wartawan sebelum Sidang Kabinet Bidang Polkam, di Bina Graha, Jakarta, Rabu pagi.

Menurut Menkeh, penculikan adalah kejahatan yang sangat berat dari segi HAM maupun dari segi hukum. Orang tidak berani berspekulasi dalam masalah-masalah seperti ini. "Yang dihadapi adalah rakyat sehingga harus transparan dan hal yang sama juga akan dilakukan terhadap penyelewengan di bidang perbankan yaitu harus ada tindakan keras," katanya.

Mengenai hal yang sama, Jaksa Agung M Ghalib menyatakan, karena kasusnya terjadi ketika masih sebagai militer, maka seandainya Prabowo terbukti bersalah akan diadili dalam pengadilan Militer Tinggi. Pengadilan Militer Tinggi memang untuk Pamen ke atas.

Sedangkan untuk yang berpangkat Kapten ke bawah adalah Pengadilan Militer. Dalam Pengadilan Militer Tinggi itu, apabila oditurnya tidak setingkat pangkatnya dengan yang diadili maka Pangab selaku Jaksa Agung ABRI menaikkan pangkat secara lokal Oditur yang bertugas dalam Pengadilan Militer Tinggi itu.

Mengenai pemeriksaan terhadap perwira tinggi dilakukan oleh POM ABRI dengan pengangkatan sebagai penyidik oleh Pangab. Dengan demikian, untuk tugas penyidik ini yang bersangkutan tidak perlu dinaikkan pangkatnya dan boleh rendah dari yang diperiksa karena POM ABRI memang mempunyai tugas untuk melakukan penyidikan.

Rasa Keadilan

Sementara itu Letjen TNI (Purn) Saiful Sulun dalam komentarnya yang dikirim melalui faksimili kepada *Pembaruan* Selasa petang mengatakan, bahwa keputusan Pangab mengenai Letjen Prabowo merupakan sanksi yang amat ringan serta jauh dari rasa keadilan.

Menurutnya, penjelasan bahwa Prabowo dapat di-Mahmil-kan kelak, bila hasil pemerikasaan terhadap 10 prajurit Kopassus di Mahmil ada hubungannya dengan mereka, menimbulkan kesan seolah-olah ada diskriminasi hukum. "Hukum sepertinya hanya berlaku bagi si kecil/lemah," katanya lagi.

Pada sisi lain, menurut Saiful Sulun, keputusan oleh Pangab tersebut akan menimbulkan preseden yang buruk. Karena, di ABRI selalu dikatakan bahwa tidak ada prajurit yang salah, yang salah adalah perwiranya. Dengan peristiwa ini, maka itu bisa menimbulkan rasa tidak percaya bawahan terhadap atasan. Dan ini menurut jenderal bintang tiga tersebut, sangat berbahaya dan akan menyulitkan pelaksanaan tugas-tugas ABRI. Saiful Sulun yang pernah menjabat Wakil Ketua DPR/MPR dari Fraksi ABRI itu mengatakan, bahwa suatu sanksi yang oleh masyarakat dinilai jauh dari rasa keadilan akan menjadi beban bagi ABRI dan menyulitkan ABRI dalam upaya meningkatkan citranya di mata masyarakat sini dan di dunia internasional.

Pantas Ke Mahmil

Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya Taufik Imam Santoso SH maupun sosiolog Universitas Airlangga Surabaya, Drs Bagong Suyanto mengatakan cukup wajar bahwa Kontras serta aktivis yang diculik minta agar Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi Pr dan Kol Inf Chairawan, diajukan ke Mahkamah Militer.

"Di mata hukum, sebenarnya semua prajurit memiliki kedudukan yang sama, apakah itu tamtama, bintara atau perwira. Tetapi selama ini untuk perwira tinggi hanya dikenakan pelanggaran kode etik dan tidak berlanjut sampai ke persidangan mahkamah militer," kata Taufik Imam Santoso SH kepada *Pembaruan*, hari Rabu (26/8).

Sementara itu Sosiolog Universitas Airlangga Surabaya, Bagong Suyanto mengatakan, pemerintah sekarang harus berani menanggung beban dosa politik makro peninggalan rezim Orde Baru yang lebih menitikberatkan pada politik kekerasan dan politik kekuasaan, serta berusaha untuk tidak mengulangi lagi dosa-dosa politik itu pada masa mendatang.

Bagong Suyanto mengakui dapat mengerti jika Kontras tetap menuntut agar ketiga perwira itu diadili di Mahkamah Militer karena lebih transparan. (M-11/A-5/M-5/029)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Ada yang Inginkan Prabowo Tak Diadili di Mahkamah Militer

Jakarta, Kamis, Merdeka

Berbeda dengan pendapat berbagai kalangan yang menghendaki bekas Danjen Kopassus Prabowo Subianto, Mayjen Muchdi PR, dan Kol Chairawan diadili di Mahkamah Militer dalam kasus penculikan, bekas instruktur intelijen Prabowo dan Muchdi yaitu Rudolf Baringbing mengatakan bahwa sebaiknya kedua perwira tinggi itu tidak dibawa ke Mahkamah Militer.

Alasannya, di persidangan militer itu nanti, berbagai rahasia negara yang berkaitan dengan intelijen bisa terbongkar semuanya. "Konsekuensinya tinggi sekali. Minimal bisa membongkar rahasia negara. Saya pikir apa yang sudah terbuka saat ini, ya segitu saja lah. Tidak usah ditambah-tambah lagi," kata Baringbing yang pernah menyatakan siap menjadi pengacara Prabowo apabila diproses di Mahmil.

Melanjutkan penjelasannya, Baringbing mengungkapkan bahwa menghadirkan seorang perwira tinggi yang telah menjalankan operasi intelijen di hadapan mahmil merupakan suatu kesalahan. "Nanti malah terungkap semua nantinya. Bisa ditelanjangi kita semua. Saya melihat dari segi untung dan ruginya," katanya.

Menurutnya, apa yang telah diputuskan Jenderal Wiranto sudah cukup baik. Namun dia mengaku tidak tahu apa putusan itu merupakan putasan yang benar. "Karena banyak yang benar belum tentu itu baik. Saya kira Prabowo akan menerima ini dengan lapang dada," ujarnya.

Bagaiman kalau akhirnya dimahmilkan? "Saya kira Prabowo akan mengatakan bahwa dia melaksanakan tugas negara walaupun misalnya perintah itu datangnya dari presiden yang lama," kata Baringbing.

Dalam mahmil nanti, bisa saja ada temuan-temuan baru yang melibatkan para petinggi ABRI yang saat ini masih aktif. "Tapi kalau sampai tingkat Soeharto, saya kira tidak. Tidak akan sampai ke sana," ujarnya.

Sementara ditempat terpisah bekas Menhankam Edi Sudrajat menilai pemeriksaan yang dilakukan DKP berkaitan dengan kasus penculikan aktivis pro demokrasi oleh Prabowo Cs masih setengah-setengah. Meski keputusan sanksi administratif bagi ketiga perwira tinggi tersebut sudah benar, tetapi kenapa mereka tidak langsung diajukan ke Mahmil.(PN/AG)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Prabowo Tak Merasa Bersalah

Hashim Tolak Jawab Kakaknya Korban Politik

Jakarta, JP.-

Pembelaan untuk Prabowo Subianto akhirnya muncul juga. Kali ini yang menyampaikan pembelaan itu adik kandungnya sendiri, Hashim Djojohadikusumo. "Kakak saya tetap merasa tak berbuat salah," katanya usai penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah dan ketua umum Kadin Indonesia di Bappenas kemarin.

Diceritakan juga, selama ini, Prabowo tetap bersikap tenang dan menyerahkan jiwanya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan, Hashim mengaku kagum dan bangga punya seorang kakak seperti mantan Danjen Kopassus itu. "Saya bangga, bangga sekali," ujar Presdir PT Semen Cibinong itu.

Tak tanggung-tanggung, putra begawan ekonomi Indonesia Prof Dr Sumitro Djojohadikusumo ini menyebut kata kagum sampai tujuh kali. "Saya bangga, saya kagum. Saya kira dia luar biasa," kata Hashim berulang-ulang.

Prabowo yang sempat disebut *the rising star* di ABRI itu memang sedang tergelincir oleh kasus penculikan para aktivis. Kariernya habis karena mendapat sanksi diberhentikan dengan hormat oleh Pangab Jenderal TNI Wiranto. Sampai kini, banyak pihak yang mendesak agar dia diseret ke mahmil untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Apakah ia tetap tak merasa bersalah dalam kasus penculikan karena hal itu dilakukan dalam rangka menjalankan tugas? Hashim tak merincinya. Bos Grup Tirtamas ini hanya mengatakan bahwa kepercayaannya kepada Tuhan yang membuat Prabowo tegar dalam menghadapi keputusan DKP yang memeriksanya.

"Itu yang penting, yang membikin kakak saya tenang," tambahnya. Terus terang, lanjut Hashim, Prabowo merupakan orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan.

Dan, upaya mendekatkan diri kepada Tuhan itulah yang penting dan dilakukan Prabowo sekarang. "Yang penting bagi beliau (Prabowo, Red) berserah kepada Tuhan Yang Mahakuasa. Beliau merasa tidak berbuat salah," katanya, lantas menghindar dari "serbuan" wartawan.

Ketika ditanya apakah Prabowo menjadi korban kepentingan politik, Hashim langsung berkilah bahwa ia tidak mau menjawab lagi pertanyaan soal Prabowo.

[illegible] (Dubes) Kadin Indonesia untuk mempromosikan investasi Indonesia di wilayah Eropa.

Sementara itu, anggota Komnas HAM yang juga mantan Dan Grup IV Kopassus, Mayjen (pur) Syamsudin, menegaskan bahwa ABRI harus menuntaskan persoalan Prabowo cs secara hukum. Tidak perlu harus menunggu sebelas orang tersangka dari Kopassus yang kini menjadi tahanan Puspom ABRI.

"Kalau tidak dituntaskan sekarang, persoalannya akan mengambang. Masyarakat akan selalu tidak puas. Karena itu, selesaikan secara hukum, kemudian akan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) kemarin.

Menurut Syamsudin, dalam jangka panjang ABRI hendaknya lebih membuka diri untuk mendukung masyarakat madani, yakni demokrasi, keadilan sosial, dan *law enforcement*. Supremasi hukum hendaknya dijunjung tinggi. Pada masa lalu, hukum tidak responsif. Sebab, hukum dipakai penguasa sebagai alat legitimasi kekuasaan.

Selain itu, lanjut Syamsudin, perlu restrukturisasi dan refungsionalisasi ABRI, yang antara lain, perangkat-perangkat yang membentuk watak prajurit ABRI.

Syamsudin mengatakan bahwa DKP memang untuk meneliti pelanggaran kode etik perwira dan pelanggaran sumpah jabatan. Pembentukan DKP tidak untuk mencari seberapa jauh serta ada atau tidaknya pelanggaran pidana.

"Kemudian, DKP itu memberikan saran ke Pangab. Dan, Pangab akan melakukan tindakan administratif, seperti, skorsing, teguran, diberhentikan dengan hormat, atau diberhentikan dengan tidak hormat. Kalau kemudian ada indikasi pelanggaran pidana, kata Syamsudin, maka dicari melalui saksi. Termasuk saksi korban." **(asa/mik)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☑ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

KSAD Soal Sanksi bagi Atasan Prabowo

'Kita Lihat di Mahmil'

JAKARTA — KSAD Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo menegaskan bahwa Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk kasus orang hilang yang dipimpinnya tidak melindungi atasan Letjen TNI Prabowo Subianto. Menurutnya, aturan pemberian sanksi dua tingkat ke atas kepada perwira yang melakukan kesalahan bukanlah aturan baku.

"DKP bukan melindungi atasan Prabowo. Nanti itu bisa kita lihat di Mahkamah Militer," ujar Subagyo kepada wartawan di Mabesad, Jakarta, kemarin.

Subagyo menjelaskan tidak dilaksanakannya pemberian sanksi dua tingkat ke atas itu belum bisa dijelaskan sekarang. Karena, katanya, hal itu akan dilihat dari hasil persidangan di Mahmil. "Sekarang ini 'kan lagi proses. Nanti dilihat siapa pelaksananya, siapa yang melakukan ini, bagaimana melaksanakannya. Itu proses yang di sana sudah ada lembaganya, yaitu Mahmil."

Tidak diberikannya sanksi kepada atasan Prabowo oleh Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto memang menjadi pertanyaan. Dalam kasus sebelumnya seperti Insiden Santa Cruz 1991, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Sintong Panjaitan pun terkena sanksi karena kesalahan yang dilakukan perwira di bawahnya.

Dalam pandangan pengamat militer, Letjen (Purn) ZA Maulani, tidak diberlakukannya sanksi tersebut dimungkinkan karena dua sebab. Pertama, katanya, memang DKP tidak melihat kaitan antara kesalahan yang dibuat Prabowo dengan atasannya. Dan kedua, lanjutnya, pimpinan ABRI melihat bila itu dilakukan maka akan terjadi perpecahan bangsa karena akan melibatkan banyak pimpinan ABRI.

"Pengadilan nanti yang akan membuktikan apakah memang tidak ada kaitan antara Prabowo dengan atasannya. Di situ pula bisa ditentukan apakah atasannya memang harus dikenai sanksi," ujar Maulani pada *Republika*, semalam.

Dijelaskan Maulani, latar belakang pemberian sanksi dua tingkat ke atas itu adalah berlatar belakang pengawasan. Bila kesalahan yang dilakukan seorang perwira itu saat menjalankan perintah, katanya, maka dua tingkat atasannya harus diberi sanksi. Tapi bila bukan saat menjalankan perintah, jelasnya, hanya satu tingkat ke atas yang diberi sanksi karena dianggap tidak bisa mengawasi bawahannya.

Pendapat Maulani tentang adanya kemungkinan dua sebab tidak diberlakukannya sanksi dua tingkat ke atas itu senada dengan pernyataan Subagyo. "Tidak selalu biasanya itu baik. Atau tidak selalu biasanya itu benar. Semua (keputusan DKP) itu telah dikaji sehingga keputusannya seperti yang disampaikan Menhankam/Pangab itu," katanya.

Subagyo kemudian berharap agar masyarakat bersabar menunggu sidang mahmil terhadap 11 oknum Kopassus. Dia kembali menegaskan tiga perwira yang sudah diberi sanksi administratif — Prabowo, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kol Inf Chairawan — tidak tertutup kemungkinan diajukan ke Mahmil.

Ditanya upaya mengembalikan citra Kopassus yang menurun akibat kasus penculikan, Subagyo menjawab: "Akan kita benahi personelnya, sistem latihannya, dan penampilannya baik secara fisik perseorangannya maupun satuannya."

Tentang pendapat agar Kopassus dirampingkan kembali, dia berujar: "Nanti kita lihat. Apa itu terlalu besar atau tidak itu jangan gegabah. Pertama kita introspeksi, bersihkan penampilan agar mereka taat asas, taat aturan, dan berkualitas. Masalah perampingan dikaji dulu." ■ bsa

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal					Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐ Kontan	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Menanti Mahmil Itu

Putusan DKP saja dianggap tidak cukup

Setelah diberhentikan berdasarkan rekomendasi DKP, Prabowo Subianto bakal diperiksa Pom ABRI untuk kasus penculikan. Bagaimana dengan rangkaian kasus penembakan mahasiswa Trisakti dan kasus kerusuhan Mei lalu?

Ardian Taufik Gesuri, Mega Christina

Kehormatan di atas segalagalanya. Itulah etika yang dijunjung tinggi para perwira ABRI. Maka, ketika akhirnya Prabowo Subianto "divonis" melanggar etika kehormatan perwira, ia bagaikan bintang yang padam dan terlempar dari orbit tata surya. "Inilah keputusan yang terbaik bagi angkatan bersenjata, kendati merupakan pil pahit yang harus ditelan," ujar Sekjen Departemen Hankam Letjen Soeyono.



Setelah hampir tiga pekan memeriksa tiga perwira top dari pasukan elite Kopassus —Letjen Prabowo Subianto, Mayjen Muchdi Pr., dan Kolonel Chairawan— Dewan Kehormatan Perwira (DKP) menyampaikan rekomendasinya kepada Jenderal Wiranto. Dan Panglima ABRI itu, Senin lalu, menjatuhkan sanksi administratif kepada tiga terperiksa tadi. Yakni, Prabowo yang mantu bekas Presiden Soeharto dan anak begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo itu diberhentikan dari dinasnya alias dipensiun, sedangkan Muchdi dan Chairawan dicopot dari tugas dan jabatan strukturalnya.

Sebelumnya, banyak yang meragukan Wiranto bakal mengambil keputusan setegas itu. Sebab, banyak yang mengakui Prabowo, 47 tahun, adalah perwira yang melesat kariernya, disegani plus ditakuti, dan punya banyak pengikut. Bahkan, disebut-sebut Prabowo adalah rival Wiranto, seolah-olah ada komando dalam komando. Prabowo dikabarkan amat gusar, dan kontan memprotesnya pada Presiden Habibie, ketika ia dicopot dari jabatannya sebagai Panglima Kostrad hanya sehari setelah mertuanya turun dari kursi presiden. Akibatnya, suasana Jakarta ketika itu begitu mencekam, seperti mau ada kudeta saja.

Ternyata, Wiranto berani juga melepaskan perwira-perwira terbaiknya itu. "Tindakan tegas sangat perlu bila sudah menyangkut nama baik ABRI," kata Soeyono. Maklumlah, kredibilitas ABRI coreng-moreng gara-gara kasus penculikan dan penjarahan tempo hari. Maka, langkah itu pun diambil untuk menunjukkan keseriusan ABRI menangani masalah di dalam tubuhnya dan sekaligus berupaya memulihkan kepercayaan dari dalam dan luar negeri.

Cuma, masalahnya, keputusan ala DKP itu justru mengundang pelbagai pertanyaan dari berbagai kalangan masyarakat. Yang pertama, Wiranto tidak menjelaskan apa saja yang dilakukan Prabowo dan kelompoknya sehingga ia dipensiun. Yang kedua, putusan Wiranto itu seperti vonis yang mendahului mahkamah. Padahal, harapan banyak pihak, lewat mahkamah lah kesalahan mereka bisa dibongkar tuntas.

Memang, sebelumnya Ketua DKP Jenderal Subagyo mengatakan, Prabowo melanggar kodet etik perwira. Di hadapan DKP, Prabowo mengaku menculik sembilan orang. "Prabowo sudah mengakui dirinya salah menganalisis perintah BKO," kata Kepala Staf AD yang juga bekas atasan Prabowo itu. BKO atau Bawah Kendali Operasi merupakan permintaan atau perintah dari pimpinan yang lebih tinggi untuk bergabung dengan satuan lain di suatu wilayah yang sedang rawan-rawannya.

Nah, BKO itu dari siapa? Ini bisa dari atasannya saat itu, yakni Pangab Jenderal Feisal Tanjung atau Kasad Jenderal Hartono. Tapi, perintah itu bisa pula datang dari Panglima Tertinggi ABRI, Jenderal Besar (purn) Soeharto. Yang terang, BKO itu berkaitan dengan tugas pengamanan Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998. Tujuannya juga jelas: mengamankan kursi Presiden Soeharto. Karena itulah ada yang menduga, Prabowo tak bakal dimahmilkan untuk melindungi tokoh yang memberi perintah itu. Kalau dimahmilkan juga malah makin membongkar borok di seluruh penjuru tubuh ABRI. Padahal, katanya, ABRI sudah siap untuk mereformasi diri.

Prabowo masuk daftar tunggu pemeriksaan

Wiranto sendiri menjelaskan tidak tertutup kemungkinan Prabowo dan dua rekannya itu dimahmilkan. Hanya, prosesnya, itu menunggu dulu dihadapkannya 10 anggota Kopassus yang kini kasusnya sedang di berkas Puspom ABRI. Nah, di depan mahkamah militer kelak, besar kemungkinan mereka tetap loyal dan melindungi para seniornya. Dan untuk itu mereka siap pasang badan.



Hatta, masih bergumpal-gumpal pertanyaan yang melasak-lasak. Misalnya, Prabowo mengaku menculik sembilan orang, sementara 10 tersangka itu bilang cuma empat yang mereka culik. Padahal, menurut catatan Kontras, yang mengadvokasi kasus penculikan aktivis ini, ada 20-an yang jadi korban penculikan. Jadi, tentang di mana 14 korban pencu-

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	(31)	Januari	Juli	(1998)
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

"Tolong Beri Kesempatan Prabowo di Pengadilan"

Sikap kesatria Prabowo Subianto nampaknya akan mendapatkan tindak lanjut lagi. Yakni, penuntasan menurut jalur hukum yang sedang didebatkan itu. Artinya, ruang sidang Mahkamah Militer (Mahmil) siap menunggu peradilan terhadap bekas Danjen Kopassus ini. Hal yang sama berlaku pada Muchdi dan Chairawan.

"SEPENGATAHUAN saya kemungkinan besar Prabowo diajukan ke Mahmil. Sebab dari apa yang saya tahu sudah mengarah kesana," tutur Mayjen (Pur) Soegiri, yang juga anggota Komnas HAM saat dihubungi *Merdeka* di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, dia menambahkan, kepastiannya tetap menunggu hasil persidangan 11 anggota Kopassus di Mahkamah Militer II 08 Jakarta (Mahmil II-08 Jakarta) Sebab dari peradilan ini akan terungkap siapa yang memerintahkan mereka melakukan penculikan aktivis pro-demokrasi. Disamping itu temuan DKP bisa dijadikan sebagai pelengkap.

Yang pasti, menurut Soegiri, mengenai penculikan tidak diatur dalam KUHP Militer. Karena dalam KUHP Militer itu hanya mengatur soal intelejen (mata-mata), maupun soal pelanggaran perintah. Soal penculikan tersebut diatur dalam Pasal 328 KUHP. Orang sipil, papar tokoh senior Komnas HAM dan bekas hakim Agung yang dikenal ahli dalam menganalisa berbagai kasus berkaitan dengan ABRI ini, bisa diadili di Mahmil bila ada surat perintah Menteri Kehakiman.

Anggota Komnas HAM lainnya, Mayjen (Pur) Syamsuddin juga berharap agar Prabowo, Muchdi dan Chairawan diajukan ke Mahmil. Dewan Kehormatan Perwira (DKP), menurutnya, bukan sebagai suatu lembaga yang bisa memutus perkara melainkan hanya untuk penjatuhan sanksi administratif. Mereka hanya menghukum yang menyangkut kode etik seperti bila ada anggota ABRI yang melanggar Pancasila, UUD 1945, melakukan kekerasan, pelecehan seksual dan lain sebagainya.

Tegasnya penghukuman DKP ada empat kemungkinan yaitu berupa tegoran, skorsing, memberhentikan dengan hormat dan memberhentikan dengan tidak hormat. Jadi penghukuman DKP terhadap Prabowo dan kawan-kawan itu memang sudah maksimal.

Pangab Wiranto telah mengatakan tidak tertutup kemungkinan untuk mengajukan Prabowo ke Mahmil. Dan Puspom Mayjen Syamsu Djalal, lanjutnya, juga telah memberikan sinyalemen ke arah sana.

Sementara banyak juga yang mempertanyakan apakah pengakuan Prabowo telah memerintahkan penculikan terhadap sembilan orang aktivis yang diculik dan kesaksian Pius Lustrilanang tidak cukup.'

Soal penculikannya, apakah betul modusnya demi kepentingan keamanan nasional dan Pangab mengetahuinya?

Dengan tegas Syamsuddin mengatakan dirinya tidak memprediksi ke arah sana. Dan dia yakin, operasi penculikan tersebut tanpa sepengetahuan Menhankam/Pangab.

"Itu mungkin murni dari Prabowo. Dia mungkin terobsesi kepada satu masalah. Saya yakin Panglima Tertinggi tidak mengetahui operasi ini. Pak Faisal dan Wirantao tidak terlibat. Saya kenal mereka. Kalau ada yang meminta pertanggungjawaban mereka siap bertanggung jawab. Saya kenal pak Wiranto orang baik. Sebab saya 10 tahun kumpul dengan dia. Mereka bukan tipe yang melarikan diri dari tanggung jawab. Saya yakin betul mereka tidak tahu," papar Syamsuddin.

Menjawab pertanyaan soal adanya keraguan bahwa Pangab tidak berwenang memecat Prabowo, Syamsuddin mengaku, soal hukumnya dia kurang jelas. "Tapi memang ada yang berpendapat demikian. Sayangnya saya tidak mendalami soal itu," katanya.

Jadi kasus ini akhirnya akan ke pengadilan? "Saya harap begitulah. Kita semua berharap begitu. Karena dengan ke Mahmil akan lebih fair, jelas, berapa takaran keterlibatan mereka ini," ungkap Syamsuddin. "Dan Prabowo mengatakan saya bertanggung jawab. Artinya apa? Dia bertanggung jawab sampai dimanapun. Dengan begitu hormati dia dan tolong diberi kesempatan di pengadilan. Yang saya katakan menghormati dia dalam konteks pernyataan Prabowo yang menyatakan saya siap itu, harus kita puji. Sekarang tinggal membuktikan. Kalau dia bersalah nanti berarti dia akan terima putusan," papar Syamsuddin yang di tahun 1973-1974 pernah menjabat Komandan Group I Kopassus.

Yang paling penting sekarang, menurutnya, justru bagaimana ABRI mensikapi ini. Misalnya untuk jangka pendek apakah ABRI akan memperbaiki keadaan dan citra. Kalau iya, tuntaskan masalah ini melalui pengadilan secara hukum. Sedang jangka panjangnnya dukunglah masyarakat madani.

Mengenai Bawah Kendali Operasi (BKO), Syamsuddin menjelaskan, artinya bukan menyangkut perintah operasi. Tapi BKO itu menentukan status kesatuan yang ditempatkan di kesatuan lain. Misalnya tempatkan anggota Kopassus di kesatuan di Kodam Jaya. "Itu saja, bukan urusan operasi. Misalnya, Kopassus menempatkan pasukan 30 orang di Kodam Jaya."

Karena itu mengenai BKO tidak bisa dianalisa lagi. Sebab artinya semata-mata menempatkan pasukan tok. Tidak ada yang perlu dianalisa. Kecuali kalau perintah operasi, bisa dianalisa. "Saya juga enggak mengerti yang dimaksud seseorang dengan pernyataaan salah BKO itu apa," ucap Syamsuddin.

Tentang sanksi administratif yang dijatuhkan DKP terhadap Prabowo Cs, kata Syamsuddin, bukan hasil kompromistis. Tapi sudah barang tentu ada yang tidak puas. Perasaan tidak puas itu kemudian diarahkan kemungkinan mengajukannya ke pengadilan. (MUN)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Lagi, Korban Penculikan Melapor ke Puspom ABRI

JAKARTA (Media): Satu lagi korban penculikan yang dilakukan aparat militer membeberkan pengalamannya di hadapan Dan Puspom ABRI Mayjen TNI Syamsu, di Markas Puspom ABRI Jakarta, kemarin.

Hendrik Dikson Sirait, 26, aktivis Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Reformasi (PIJAR), didampingi kuasa hukumnya Hendardi, Rachlan Nassidik, dan Dwiyanto Prihartono dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), melaporkan secara resmi kasus penculikan itu.

Hendrik mengaku diculik awal Agustus 1996 saat sedang berdiri di bawah jembatan penyeberangan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seusai menyaksikan sidang gugatan PDI Perjuangan Megawati.

"Saya diculik tiga lelaki. Mereka langsung memukul wajah saya," tutur Hendrik. Saat itu, katanya, ada dua anggota ABRI berseragam yang berniat melindunginya. Tapi setelah berbicara dengan penyerang, mereka malah berbalik ikut memukuli dia.

"Setelah itu saya dimasukkan ke bagian belakang sebuah mobil dengan posisi terlentang. Wajah saya ditutupi tas," ungkap Hendrik. Kurang lebih 20 menit perjalanan mereka sampai di sebuah tempat. Saat turun dari mobil, wajahnya ditutupi kaus yang dipakainya. Di sana dia lalu dimasukkan ke sel. Tak lama kemudian ia dipanggil dan dibawa ke sebuah ruangan pemeriksaan. Di sana sudah menunggu lima orang yang langsung menghajarnya.

"Saya dipukul dan ditendang berulang-ulang hingga jatuh bangun. Setelah puas, mereka menyuruh saya melepaskan pakaian kecuali celana dalam. Lalu dimulailah pemeriksaan," tuturnya.

Dalam pemeriksaan dia lebih banyak ditanya soal kasus 27 Juli 1996. "Saya dipaksa mengaku anggota PRD dan dalang kasus 27 Juli. Saya juga disuruh mengakui motivasi aktif di gerakan karena ingin jadi Menteri Dalam Negeri."

Menurut Hendrik, selama penyiksaan bukan saja dipukul dan ditendang tetapi juga disundut rokok dan ibu jari serta telinganya disetrum. Penyiksaan terjadi selama pemeriksaan yang dilakukan dua hari.

"Pada saat pemeriksaan itulah saya sempat melihat tulisan "Inteldam" di mesin ketik mereka. Dan ketika dipindahkan ke Polda Metro Jaya, mata saya tidak ditutup sehingga sempat melihat papan nama jalan di depan gang markas mereka yang bertuliskan Kramat VII," kata Hendrik.

Menanggapi laporan tersebut, Dan Puspom Mayjen TNI Syamsu menyatakan kasus Sirait ini sangat mudah diusut dibandingkan kasus penculikan sebelumnya. "Yang jelas Pangab tidak pernah memerintahkan menculik aktivis. Karena itu, patut diduga ada oknum-oknum lain yang terlibat," tandasnya.

Mendatangi Mabes AD

Sementara itu, kemarin, 11 keluarga orang hilang mendatangi Mabes AD untuk mendesak Dewan Kehormatan Perwira (DKP) menanyakan nasib ke-14 orang yang masih tidak menentu kepada para tersangka penculikan.



SIRAIT MENGADU: Komandan Puspom ABRI Mayjen Syamsu menyambut Hendrik Dikson Sirait, kemarin. Hendrik diculik empat pria tak dikenal pada 1 Agustus 1996, setelah menghadiri sidang gugatan PDI Megawati di PN Jakarta Pusat. ■ MEDIA / AGUS MULYAWAN

Ke-11 keluarga itu, antara lain, keluarga Yani Avri, Noval Alkatiri, Ucok Siahaan, dan Yidin Muhidin. Mereka gagal bertemu Ketua DKP Jenderal Subagyo HS dan diterima Asisten Pengamanan KSAD Mayor Jenderal Nur Aman.

"Kedatangan kami untuk mendesak DKP agar kepada tersangka penculikan ditanyakan juga nasib ke-14 keluarga kami," kata juru bicara korban, Rahardjo Waluyo Djati. Mereka berharap mendapatkan jawaban yang memuaskan. (Wdh/Was/U-1)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Pius Akan Gugat Prabowo

Semarang, 30 Agustus

Pius Lustrilanang akan menggugat Prabowo cs, sebagai pelaku penculikan atas dirinya. Gugatan terhadap mantan Danjen Kopassus yang sudah diberhentikan tersebut akan dilakukan melalui persidangan umum, bukan persidangan militer.

Hal itu ditegaskan kuasa hukum Pius yang juga Sekjen Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Trimedya Panjaitan SH kepada wartawan di sela-sela seminar ''Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sebuah Agenda Reformasi Total'' yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat SPI dan Fakultas Hukum Unika Soegijapranata di kampus Bendhan Dhuwur Semarang, Sabtu (29/8).

Dikatakan Trimedya, dasar dari gugatan tersebut adalah pengakuan Prabowo sendiri dalam Dewan Kehormatan Prajurit (DKP) bahwa ia (Prabowo) telah melakukan penculikan terhadap sembilan aktivis. Pius memilih proses peradilan biasa, gugatan tersebut tidak akan menunggu hingga Prabowo cs diajukan ke Mahkamah Militer. ''Kami meragukan independensi militer. Lihat saja kasus Trisakti, akhirnya mereka ditahkan juga,'' tegas Trimedya. Keraguan akan independensi tersebut, menurutnya sebab ada fanatisme korps militer, sehingga melalui pidana biasa, kemungkinan berat sebelah bisa dihindari.

Adapun keterangan Prabowo di DKP, keterangan para saksi, selain juga bukti-bukti tertulis, menurutnya sudah memenuhi kualifikasi bukti-bukti pidana. Yaitu menghilangkan hak asasi seseorang. Sementara gugatan perdata, Pius mengalami perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian materiil yang riil, karena tidak bisa bekerja.

Sementara saksi-saksi, Trimedya yakin aktivis yang juga diculik, seperti Desmond, Andi Arief dan Haryanto Taslam bersedia, karena mereka pun mendukung testimoni Pius beberapa waktu lalu.

Delik Aduan

Menanggapi rencana tersebut, pakar sosiologi hukum Universitas Diponegoro Prof Satjipto Rahardjo SH menyatakan, bila benar Pius akan menggugat Prabowo cs, maka hal tersebut bukan perkara kejahatan namun berupa delik aduan, yaitu laporan telah terjadi suatu dugaan. Pengakuan Prabowo itu bisa digunakan sebagai petunjuk permulaan. Namun bila akan digunakan sebagai bukti, Polri harus yakin betul, karena nantinya Polri sendiri yang harus bertanggungjawab.

Ketika ditanyá, bukankah saat ini Polri masih ada dalam tubuh ABRI, sehingga bisa saja, pengaduan Prabowo itu digunakan sebagai bukti awal, dan bukan sekadar petunjuk, Satjipto menyatakan, pada jalur pidana umum, Polri keluar dari ke-ABRI-annya, karena Polri adalah aparat sistem peradilan pidana, meskipun ada dalam satu tubuh ABRI. Hal inilah yang menyebabkan kondisi Polri saat ini *complicated.*

''Pada jalur pidana umum, Polri keluar dari ke-ABRI-anya, karena dia aparat sistem peradilan pidana. Kondisi sekarang lucu, karena dia bagian dari ABRI, maka menjadikannya *complicated,*'' jelas Satjipto..

Namun demikian, bila Polri menerima laporan adanya dugaan kejahatan, maka sebagai alat negara yang harus melayani masyarakat, maka Polri harus menerima laporan tersebut. Soal diproses lebih lanjut atau tidak, itu terserah Polri menurut pandangan profesionalismenya.

(135/STH)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Soeprapto Beri Kesaksian Apa Adanya

Soal Pertemuannya dengan Wilogo di Timika

Surabaya, JP.-

Kesaksian mantan Wagub Ekbang Jatim, Soeprapto sama sekali tak berpaling dengan ceritanya yang dimuat di media massa saat dimintai keterangan di Mapolresta Surabaya Selatan, kemarin. Soeprapto bercerita apa adanya saat bertemu Pembantu Walikota Selatan, Drs R Wilogo yang sampai kini keberadaannya masih misterius.



Soeprapto

"Keterangannya tak berbeda dengan yang dimuat di media massa," ujar Kasatserse Polresta Surabaya Selatan, Lettu Pol Bambang Suryanto yang mendampingi Kapolresta Surabaya Selatan, Letkol Pol Arief Soemarwoto kepada wartawan. Ada 14 sampai 15 pertanyaan yang diajukan Serma Pol Yadiyono dalam pemeriksaan yang berlangsung selama dua jam mulai pukul 09.00 WIB itu. Dan semua pertanyaan dijawab dengan sempurna oleh Soeprapto.

Dalam kesaksiannya, Soprapto mengaku bertemu Wilogo saat hendak naik bus, yang akan mengangkut penumpang di atas pesawat dalam perjalanan terbang dari Timikia ke Ujungpandang. Ketika itu, Soeprapto ingin memeluk sosok pria yang menghilang setelah terlibat dalam kasus tanah ganjaran di Wiyung itu.

Namun sayang, keinginan Soeprapto itu tak disambut oleh Wilogo, yang menolak dengan mengisyaratkan meletakkan jari telunjuknya di depan bibir. Kontan saja, Soeprapto menyadari jika lelaki yang kini jadi target operasi (TO) polisi itu, dalam keadaan tidak bebas.

Sesampai di Bandara Hasanuddin, Soeprapto berusaha mengintai Wilogo dari jauh. Tapi sampai penumpang yang terakhir habis, sosok orang yang ditunggu itu tak *nongol*. "Keterangan Pak Prapto ini tetap bisa dikembangkan. Kita akan mem-*follow up*-inya," kata Arief.

Bahkan hingga kemarin tim dari Polda Jatim yang diterjunkan di Ujungpandang belum ditarik. Dari Polresta Selatan sendiri yang menugaskan Lettu Supardi Askito. "Keterangan Pak Prapto akan kita gabung dengan laporan anak buah saya tadi," ujarnya. **(amu/kum)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA		1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA		2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA		3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA		4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☒ SUARA PEMBARUAN		5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Kodam Jaya Siap Dimintai Keterangan Soal Kasus Penculikan Hendrik Sirait

Jakarta, 14 Agustus

Pangdam Jaya Mayjen TNI Djadja Suparman menyatakan, pihaknya siap untuk dimintai keterangan oleh Puspom Jaya, sehubungan dengan kasus penculikan Hendrik Sirait.

Hal tersebut disampaikan Pangdam Jaya menjawab pertanyaan wartawan usai upacara HUT ke-32 Resimen Artileri Pertahanan Udara (Menarhanud) I Kodam Jaya, Kamis (13/8) di Tanjungpriok, Jakarta.

Berdasarkan laporan Hendrik Sirait kepada Puspom ABRI Selasa (11/8) yang diterima Danpuspom ABRI, Mayjen TNI Syamsu, penculikan terhadap Hendrik disebut-sebut melibatkan Intelijen Kodam (Inteldam) Jaya (*Pembaruan* 12/8).

Djadja menyatakan, ia belum dapat berkomentar banyak kepada wartawan tentang kasus itu, karena pihaknya belum menerima apa yang dilaporkan Hendrik ke Puspom ABRI.

"Saya belum jelas apa yang dilaporkan, karena saudara Sirait melapor ke Danpuspom. Jadi, saya belum bisa beri komentar," ujarnya.

Namun, diakui Djadja, pihaknya bersikap proaktif untuk mengecek ke dalam untuk membandingkan dengan apa yang dilaporkan. Tapi, ia menyatakan, belum melihat apa yang disampaikan Hendrik Sirait.

"Rasa-rasanya apa yang disampaikan, kalimat-kalimatnya belum cocok dengan hasil pemeriksaan. Kita tinggal menunggu apa yang dilaporkan," jelasnya.

Pangdam menyatakan, Danpuspom hingga saat ini belum meminta keterangan dari Kodam Jaya.

Ia menyatakan, pihaknya siap untuk memberikan keterangan jika diminta Puspom ABRI.

Seluruh Kekuatan

Sementara itu, mengenai antisipasi Kodam Jaya terhadap isu akan terjadinya kerusuhan menjelang peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus, Djadja Suparman menyatakan, Kodam Jaya akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mem-*back-up* Polda Metro Jaya.

Mengenai provokasi penyebar isu tentang terjadinya isu tersebut, Pangdam mengatakan, hingga saat ini Kodam Jaya belum menemukan pelakunya dan masih mencarinya.

"Masalah itu masih memerlukan penanganan di antaranya mencari banyak kesaksian. Kita juga memerlukan bantuan masyarakat agar melapor jika mengetahuinya," ujar jenderal berbintang dua itu.(SU/T-4)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☑ Suara Merdeka	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Pius Akan Gugat Prabowo

• Lewat Pengaduan Pidana Biasa
• Said Aqil: Pemerkosaan Bukan Isu

SEMARANG - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pengacara Indonesia, Tri Medya Panjaitan SH, menyatakan Pius Lustrilanang berencana menggugat Prabowo Subianto sehubungan dengan keterlibatannya dalam penculikan para aktivis.

Untuk memperkuat gugatan, lanjut dia, para korban penculikan seperti Andi Arief, Desmond J Mahesa, dan Haryanto Taslam mau membantu memberikan keterangan secara jujur mengenai peristiwa yang pernah mereka alami.

"Para korban itu mengalami kejadian yang sama, dilakukan di tempat dan oleh orang yang sama," kata Tri Medya, yang juga ketua kuasa hukum Pius, di Universits Katolik Soegijaparanata Semarang, Sabtu.

Penculikan tersebut, ujar dia, sangat melanggar hak asasi manusia dan secara langsung menghilangkan kemerdekaan para korban. Itu yang membuat Pius akan menggugat Prabowo, yang telah mengakui bertanggung jawab atas peristiwa penculikan.

Gugatan itu akan dilakukan lewat pengaduan pidana biasa, sehingga kelak tidak seperti persidangan Tragedi Trisaksi. "Persidangan nanti kami perkirakan lebih jujur," tuturnya.

Tumpang Tindih

Guru Besar Sosiologi Hukum Undip Prof Dr Satjipto Rahardjo SH menilai ada tumpang tindih, akibat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) berupa sanksi pemecatan terhadap mantan Pangkostrad dan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto. "DKP itu jalannya lain. Bukan jalan peradilan, melainkan jalan kode etik jabatan," kata Satjipto di sela-sela acara seminar sehari di Unika Soegijapranata, kemarin.

Dia mengungkapkan, DKP analog dengan dewan kehormatan (DK) suatu profesi. "Seperti di profesi-profesi lain, misalnya kedokteran. Maka yang dipersoalkan berkaitan dengan tanggung jawabnya terhadap tugas profesi. Bukan tanggung jawab secara peradilan."

Dia mencontohkan, untuk pelanggaran malpraktek suatu profesi, misalnya, tuntutan bisa dilakukan baik melalui pengadilan maupun pengenaan sanksi dari dewan kehormatan. "Jadi sama sekali tidak mengadili dan menghukum. Tergantung pada mana yang bisa dipakai," katanya.

Dia menilai, secara kode etik kasus Prabowo bisa dilaporkan di luar DKP atau secara pidana umum biasa. Jadi prosedurnya, korban melapor ke aparat kepolisian disertai saksi dan bukti yang kuat.

Prof Tjip mengemukakan, sekalipun kasus yang menimpa Pius dan kawan-kawan itu bukan delik aduan, laporan pihak korban sangat diperlukan oleh kepolisian. "Laporan itu nanti oleh polisi diproses. Hasilnya bisa diajukan ke pengadilan. Tapi bisa juga tidak diajukan, bila bukti dirasa tidak kuat."

Satjipto mengatakan dalam pemrosesan perkara itu bisa jadi muncul tumpang tindih, karena kasus yang dilaporkan ke kepolisian menyangkut masalah ABRI. "Padahal kepolisian itu kan juga ABRI. Jadi independensinya juga masih dipertanyakan."

Undang PBB

Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PHBI) Hendardi mengemukakan kerusuhan pada Mei lalu tak akan pernah terungkap jika tak ada pihak ketiga yang ikut serta menguak.

Karena itu, kata dia, PBHI mendesak Pemerintah membuka akses untuk mengundang PBB sebagai pihak independen guna membantu mengungkap peristiwa yang diduga dilakukan oleh sebuah sistem kekuasaaan.

"Jika tidak, kasus kerusuhan, pemerkosaan, beserta seluruh dampaknya tak akan pernah terungkap tuntas," tandas Hendardi di sela-sela seminar sehari "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sebuah Agenda Reformasi Total" di Unika Soegijapranata, kemarin.

Dia mengungkapkan, akhir-akhir ini ada upaya membelokkan isu kerusuhan dan pemerkosaan. Hal itu merupakan salah satu usaha Pemerintah untuk mengecilkan fakta dalam peristiwa tersebut. Terbukti, Kapolri Letjen Pol Roesmanhadi dan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah menyatakan pemerkosaan tersebut hanya isu.

Dia menegaskan, mencari bukti - apalagi korban - kasus pemerkosaan bukan perkara mudah. Terlebih, korban adalah golongan minoritas yang tidak mempunyai akses hukum dan politik. "Bukti terjadi pemerkosaan sudah sangat jelas, tak bisa ditutup-tutupi," tandasnya.

Sehingga, tandas dia, kerja Tim Relawan Romo Sandiawan dan sejumlah LSM patut mendapat penghargaan, bukan sebaliknya. Dia justru meragukan langkah kerja Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Pemerintah.

"Bagaimana mungkin sistem kekuasaan yang terlibat dalam kasus Mei lalu, kini menjadi tim pencari fakta. Ini kan aneh dan rancu," seloroh Hendardi. Maka, dia menyarankan LSM yang tergabung di dalamnya segera menarik diri, jangan sampai terkooptasi oleh kekuasaan.

Dia menyatakan, sejak terjadi tragedi 27 Juli 1996 silam, Pemerintah — bukan oknum — telah melakukan pelanggaran HAM yang sangat luar biasa. Bahkan, pelanggaran terus berlanjut tanpa ada satu lembaga pemerintahan sekalipun yang bisa mencegah.

Penculikan dan penghilangan nyawa orang merupakan salah satu bentuk pelanggaran tersebut. Dia mengatakan, hal itu dilakukan secara formal oleh sebuah jaringan - birokrasi dan militer - dalam sistem kekuasaan. Karena itulah dia pesimistis terhadap kemurnian Pemerintah.

"Jika Pemerintah mempunyai kemauan mengusut tuntas kasus itu, seharusnya berani mengundang lembaga independen. Lebih baik PBB, daripada detektif asing yang belum jelas komitmennya terhadap persoalan HAM."

Bukan Isu

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Dr KH Said Aqil Siradj di Gereja Katedral, Semarang, meminta Kapolri dan Menteri Penerangan mencabut pernyataan mereka soal pemerkosaan.

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Vonis Prabowo Belum Mengungkap Misteri

MENHANKAM/Pangab Jenderal TNI Wiranto Senin siang (24/8/98) mengumumkan keputusan sebagai tindaklanjut rekomendasi tim Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terhadap tiga terperiksa yaitu Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR dan Kol. Inf. Chairawan. Pengumuman tersebut disambut dengan reaksi bermacam-macam tetapi umumnya mempertanyakan apakah keputusan itu sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Seperti diberitakan, Letjen Prabowo diputuskan diberhentikan dari dinas militer. Sedangkan Mayjen Muchdi dan Kol. Chairawan tidak lagi menjabat jabatan struktural tetapi masih dalam dinas aktif.

Atas keputusan tersebut ada dua hal perlu dicatat. *Pertama*, keputusan Menhankam/Pangab itu belum bersifat final. Secara teknis, Panglima ABRI tidak bisa memecat perwira yang berpangkat Kolonel ke atas, karena merupakan wewenang Presiden RI. Jadi yang dilakukan adalah mempercepat pensiun seseorang. *Kedua*, rekomendasi DKP sepenuhnya hanya diberikan menyangkut *mis-conduct* seorang perwira sedangkan tindakan yang menyangkut penghilangan nyawa dan penculikan seseorang adalah soal lain. Seperti dijelaskan Jenderal Wiranto, masih terbuka kemungkinan ketiga perwira tersebut diajukan ke Mahkamah Militer (Mahmil) bila persidangan terhadap 10 oknum Kopassus menunjukkan indikasi keterlibatan mereka.

Ada tiga kemungkinan yang masih terbuka di waktu yang akan datang. *Pertama*, meskipun Letjen Prabowo sudah diberhentikan dari dinas militer sampai dua tahun setelah tanggal pemberhentian, ia masih bisa diajukan ke Mahmil. Demikian juga kedua perwira lainnya itu. *Kedua*, setelah kesepuluh oknum Kopassus diajukan ke Mahmil dan mereka menyatakan bertindak sendiri, bukan atas perintah atasannya, maka ketiganya sudah barang tentu tidak bisa dibawa ke Mahmil, berarti bebas. *Ketiga*, pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan penculikan dan penyekapan serta Kejaksaan bisa mengajukan tuntutan terutama kepada Letjen Prabowo yang sudah berstatus sipil. Dan yang mengadili adalah Pengadilan Negeri.

PERTANYAAN yang muncul di masyarakat semenjak DKP mulai bekerja adalah, apakah rekomendasi yang akan diberikan oleh Dewan menghasilkan keputusan Menhankam/Pangab yang mampu membuka misteri otak penculikan para aktivis pro-demokrasi? Apakah nasib ke 14 aktivis lain yang sampai sekarang tidak diketahui bagaimana keadaannya, bisa terungkap? Bila kedua pertanyaan di atas dijawab dengan suatu langkah yang sesuai, maka berarti salah satu dari tiga ''pekerjaan rumah'' yang merupakan beban moral ABRI bisa dituntaskan. Tetapi bila jawaban atas kedua hal itu tidak mampu diberikan, maka ABRI masih mempunyai utang yang akan terus ''ditagih'' oleh masyarakat.

Seperti berulang kali kita kutip di sini, Menhankam/Pangab telah menjanjikan untuk menuntaskan tiga ''PR'' yang kita tulis di atas, yaitu penembakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti, penculikan para aktivis serta kasus kerusuhan 13 dan 14 Mei 1998.

Kita harapkan bahwa keputusan yang diambil oleh Menhankam/Pangab atas dasar rekomendasi DKP itu merupakan bagian dari usaha untuk mewujudkan janji mengungkap masalah penculikan tersebut.

Pada satu segi, kita bisa mengerti kekecewaan banyak kalangan atas keputusan Menhankam/Pangab tersebut. Dari keterangan yang diberikan oleh Kepala Staf TNI-AD (Kasad) Jenderal TNI Subagyo HS hampir setiap hari selesai sidang DKP, masyarakat mendapat semacam keterangan tambahan mengenai berbagai hal yang bisa ditafsirkan sebagai ''kesalahan'' yang dibuat ketiga perwira dimaksud. Misalnya saja masalah BKO (Bawah Kendali Operasi), bahwa komandan bertanggungjawab atas perintah yang diberikan dan siapa yang memerintahkan penculikan. Dengan demikian, sudah terbentuk suatu pendapat umum di kalangan masyarakat bahwa mereka bertiga baik secara langsung atau tidak, terkait dengan masalah penculikan.

KEPUTUSAN Menhankam/Pangab maupun rekomendasi DKP belum menyentuh hal-hal yang dianggap masih gelap oleh masyarakat. Siapakah yang memerintahkan BKO Kopassus? Di-BKO-kan ke mana pasukan tersebut sehingga akhirnya melakukan penculikan dan penyekapan? Siapa atasan Letjen Prabowo yang mengetahui atau malahan telah memerintahkan operasi? Sedangkan pertanyaan yang banyak didesakkan oleh berbagai organisasi kemanusiaan di dalam dan luar negeri adalah, bagaimana nasib 14 orang yang diculik dan sampai sekarang belum diketahui serta bagaimana tanggung jawab ABRI atas hal itu.

Kita harus ingat bahwa pada sisi yang lain, ABRI selama masa Orde Baru menjadi alat untuk ''mengamankan'' apa yang menjadi kebijakan penguasa. Secara kategoris, tugas-tugas ABRI menjadi begitu luas dan mendalam sehingga sulit bagi kita memilah secara jernih mana tugas ABRI sesungguhnya dan mana tugas-tugas yang sebetulnya dilakukan untuk kepentingan pimpinan Orba yaitu Presiden Soeharto. Kita percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Letjen Prabowo dan kedua perwira lainnya, dan bahkan para anggota Kopassus yang sebentar lagi akan dibawa ke Mahmil merupakan bagian dari usaha ''mengamankan'' pimpinan nasional waktu itu.

Sebab itu kita yakin bahwa pada waktunya nanti, suatu proses pengadilan akan mampu menyingkap peran-peran yang dimainkan oleh ketiga perwira tersebut dalam skenario besar yang disusun oleh pimpinan nasional waktu itu termasuk di antaranya kasus penculikan dan penyekapan para aktivis. Jadi membawa mereka ke pengadilan atau Mahmil pada waktunya nanti justru akan memperjelas apakah mereka hanya orang yang melaksanakan perintah atau justru ada orang yang paling bersalah dalam kasus ini.

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Ta
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	(25)	31	Januari	Juli	(9
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	(Agustus)	19
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	20
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	20
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	20
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6	12	18	24	30		Juni	Desember	20

Letjen Prabowo Dipensiun

JAKARTA — Karier militer Letjen TNI Prabowo Subianto berakhir sudah. Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto memutuskan mantan Danjen Kopassus itu diakhiri masa dinasnya di ABRI dalam kaitannya dengan kasus penculikan sejumlah aktivis beberapa waktu lalu.

"Letnan Jenderal Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia," ujar Wiranto di depan sekitar seratus wartawan dalam dan luar negeri di Markas Besar ABRI, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, kemarin.

Wiranto juga mengumumkan sanksi terhadap dua perwira lain, yaitu Mayjen TNI Muchdi Purwoprandjono dan Kolonel Inf Chairawan dalam kasus yang sama. Kedua perwira itu, katanya, dibebaskan dari semua tugas dan jabatan struktural di ABRI.

Menurut Wiranto, sanksi terhadap ketiga perwira Kopassus itu merupakan sanksi administratif dan bukan tindakan hukum sesuai UU Pidana militer. Ketika ditanyakan mengapa mereka tidak langsung diajukan ke pengadilan militer, Pangab menjelaskan, "Kita mengacu asas praduga tak bersalah, semua itu nanti tergantung Dahmil. Di Mahmil, yang langsung dijalankan misi itu satu per satu dan menjelaskan, dia disuruh siapa." Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan akan dilanjutkan ke pengadilan militer jika dalam proses perundangan Mahmil terhadap seputar anggota terperiksa yang lain nyatanya membuktikan ke arah itu," kata Wiranto menyebut 10 perwira perbintara Kopassus yang langsung akan diajukan ke Mahmil.

Usai membacakan keputusan, Wiranto dengan tim Dewan Kehormatan Perwira (dipimpin langsung oleh KSAD) bergegas meninggalkan tempat, namun wartawan terus memburu hingga Pangab dan tim DKP menuju gedung tempat ruang kerja Menhankam/Pangab.

"Apa pengertian dari diakhiri dinasnya di ABRI?" tanya wartawan pada Wiranto. "Pengertiannya dia sudah menjadi sipil dan tidak lagi menjabat struktural di ABRI, tetapi dipensiunkan. Istilah hukumnya seperti itu," jawab Wiranto.

Hal yang sama disampaikan Ketua DKP Jenderal Subagyo yang menyatakan bahwa Prabowo akan mendapat hak-haknya sebagai pensiunan.

Sedangkan Muchdi dan Chairawan, kata Wiranto, masih berdinas dalam lingkungan ABRI tetapi tidak akan diberi jabatan. Ditanyakan sampai kapan, Wiranto menjawab, "Sampai nanti pensiun."

Wiranto menambahkan keputusan tersebut diambil tanpa tekanan dari mana pun sehingga diharapkan tidak berkembang spekulasi tentangnya. Yang jelas, lanjutnya, keputusan diambil untuk kepentingan ABRI sendiri, bangsa, dan negara.

Sebelumnya, ketiga perwira tersebut telah diperiksa DKP selama hampir tiga pekan. DKP kemudian menyerahkan saran kepada Pangab tentang sanksi yang akan diberikan kepada mereka, Jumat pekan lalu.

Sanksi terhadap mereka, menurut Wiranto, diambil berdasarkan berbagai pertimbangan. Selain aspek kesalahan yang telah dibuat oleh para perwira terperiksa, katanya, juga dipertimbangkan jasa mereka selama menjalankan tugas.

"Yang meringankan adalah kita tidak menutup mata atas apa yang telah dilakukan para perwira tersebut selama mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Banyak jasa dan prestasi yang mereka buat."

Subagyo menjelaskan bahwa keputusan Pangab tersebut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan DKP. "Kalau pemeriksaan 10 anggota Kopassus itu menyangkut yang tiga (Prabowo, Muchdi, dan Chairawan) maka akan dibawa ke Mahmil." Meski telah dipensiunkan, menurut Subagyo, bila diperkarakan Prabowo tetap diproses di Mahmil. Karena, katanya, tindakan penculikan diambil saat Prabowo masih menjabat di lingkungan ABRI.

Menanggapi sanksi terhadap tiga perwira tersebut, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan tidak puas. Kontras melihat sanksi administratif itu menunjukkan bahwa tiga perwira itu hanya melanggar kode etik perwira, antara lain, berupa berbohong, bertindak tidak satria, tidak patuh pada pimpinan, atau bertindak di luar batas kepatutan.

"Tapi sanksi itu belum termasuk hukuman untuk tindak pidananya, seperti penculikan dan penghilangan kebebasan orang," kata MM Billah, anggota dewan penasihat Kontras, di Jakarta, kemarin. "Makanya, kami tetap mendesak Puspom ABRI untuk menyidik tiga perwira sebagai tersangka, karena mereka sampai saat ini belum diperiksa," tambah Munir — koordinator Badan Pekerja Kontras — yang bersama Ketua Penasihat Kontras Mulyana W Kusumo — mendampingi Billah dalam temu pers kemarin.

Billah memang satu kesulitan b untuk memahmi Prabowo, sebagai ini.

Ia menduga Pra tu truf berupa pe formasi yang bis ABRI, khususny masa depan. "Kem atan tawar Prabow ungkapan secara rasi penculikan y nya. Bila itu dilak banyak sekali jend jelas Billah.

Atas kemungl melihat pernyata lama ini bahwa pan hanya di b nunjukkan ba ingin membang pan dan meng yang sudah-s ngan tidak m wo.

Kendati ka kian, Kontras berarti tak juru menjadi lang Kontras, ting kap tuntas ini katkan di mata bahwa Mu sanksi aspek dasi ada yang laku. aspekahan Kerupa. bas jelas Kukum b ada. ontras segera ulikan

Kelas: .....

Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

		Tanggal	Bulan		Tahun
NIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
KARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
WA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
MPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
DIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Prabowo Dipecat

Jakarta, 24 Agustus

Mantan Komandan Jenderal Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata RI. Sementara Mayjen TNI Muchdi PR yang juga mantan Danjen Kopassus dan Kol Inf Chairawan yang mantan Komandan Grup IV Kopassus dibebaskan dari semua tugas dan jabatan struktural ABRI.

Ketiga perwira ABRI tersebut diberi sanksi administratif berkaitan dengan kasus penculikan dan penyekapan sejumlah aktivis beberapa waktu lalu.

Untuk selanjutnya, tidak menutup kemungkinan mereka bertiga dibawa ke sidang Mahkamah Militer.

Keputusan tersebut dikemukakan oleh Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto di Mabes ABRI Jakarta, sekitar pukul 13.40 WIB. Pada kesempatan itu Wiranto didampingi oleh Kasad Jenderal TNI Subagyo HS selaku Ketua Tim DPK dan juga para personel tim DKP lainnya, serta Kasau Marsekal Madya TNI Hanafie Asnan dan sejumlah Pati ABRI/Dephankam lainnya.

Menurut Menhankam/Pangab, terhadap ketiga perwira ABRI tersebut tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan ke sidang Mahkamah Militer jika dalam proses persidangan Mahkamah Militer terhadap 10 anggota terperiksa yang lain nyata-nyata terbukti arah itu.

Menurut Pangab keputusan yang diambil tanpa tekanan dari siapapun dan dari pihak manapun. Yang jelas, keputusan ini diambil untuk kepentingan ABRI sendiri, bangsa dan negara.

Pangab mengatakan, keputusan tersebut didasarkan melalui pertimbangan dari beberapa aspek. Yakni, apa kesalahan yang telah dibuat oleh para perwira tersebut di samping tidak menutup pada apa yang telah dilakukan mereka. Banyak jasa, yang juga telah dibuat oleh para perwira itu selama ini.

Menjawab pertanyaan wartawan, Kasad Jenderal TNI Subagyo HS mengemukakan salah seorang dari ketiga perwira ABRI tersebut mengaku telah menculik 9 orang aktivis. Sementara aktivis lainnya yang sampai saat ini hilang, mereka menyatakan tidak tahu-menahu.

Letjen TNI Prabowo Subianto terakhir menjabat sebagai Komandan Sesko ABRI, tetapi pemberhentiannya dikaitkan dengan jabatan sebelumnya yaitu sebagai Danjen Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI-AD.

DKP diumumkan susunanya oleh Menhankam/Pangab pada 3 Agustus yang lalu. Ketika itu menjawab pertanyaan pers, Jenderal TNI Wiranto mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa ketiga perwira TNI-AD dibawa ke Mahkamah Militer (Mahmil) bila terbukti ada unsur pidananya.

(E-2/A-4/M-11)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA		1	7	13	19	(25)	31	Januari	Juli	(1998)
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA		2	8	14	20	26		Februari	(Agustus)	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA		3	9	15	21	27		Maret	September	2000
(☐) KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA		4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN		5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

rabowo Diberhentikan

* Muchdi dan Chairawan Bebas Tugas

Jakarta, Kompas

Letjen TNI Prabowo Subianto (46) diberhentikan dari dinas kemiliteran. Keputusan itu diumumkan Menteri Pertahanan/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto di Mabes ABRI Jakarta, Senin (24/8), setelah mempelajari masukan dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

Selain memberhentikan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD (Danjen Kopassus) Letjen TNI Prabowo Subianto, Jenderal Wiranto juga membebaskan mantan Danjen Kopassus (28 Maret 1998-22 Mei 1998) Mayjen TNI Muchdi Purwopranjono (49) dan mantan Komandan Grup IV Kopassus Kolonel (Inf) Chairawan, dari semua tugas dan jabatan struktural di ABRI.

Menurut Jenderal Wiranto, tidak tertutup kemungkinan bagi ketiga perwira itu untuk diajukan ke Mahkamah Militer (Mahmil).

Di hadapan wartawan dalam dan luar negeri di Markas Besar (Mabes) ABRI Jakarta, kemarin, Wiranto mengemukakan, "Keputusan ini saya ambil tanpa tekanan dari siapa pun ataupun dari pihak mana pun. Jangan sampai nanti ada spekulasi bahwa saya mengambil keputusan ini karena ada tekanan dari sana-sini. Tidak ada itu."

Dalam acara jumpa pers itu, Wiranto menolak melakukan tanya-jawab seputar keputusannya itu, termasuk soal nasib 14 aktivis korban penculikan lainnya yang belum diketahui keberadaannya.

Namun, ketika wartawan mencegatnya di halaman samping gedung pertemuan, Wiranto sempat menjawab bahwa dengan diakhirinya masa dinas, berarti Prabowo sudah menjadi sipil. "Pengertiannya dia sudah menjadi sipil dan tidak lagi menjabat struktural di ABRI, tapi dipensiunkan. Istilah hukumnya seperti itu," kata Wiranto.

Sedangkan Mayjen TNI Muchdi dan Kolonel Chairawan, menurut Wiranto, keduanya masih aktif sebagai perwira ABRI. "Muchdi dan Chairawan masih tetap berdinas di ABRI tetapi tidak diberi jabatan," kata Wiranto sambil menambahkan bahwa kemungkinan mengajukan ke Mahmil tetap terbuka.

Selesai membacakan keputusannya, Wiranto dan para anggota DKP langsung meninggalkan ruangan pertemuan lewat pintu belakang. Tidak dijelaskan alasan yang jelas serta kesalahan ketiga perwira Kopassus ini sehingga diberhentikan dan dinonaktifkan dari ABRI.

Saat mengumumkan tindakan administratif terhadap ketiga perwira Kopassus sehubungan dengan kasus penculikan dan penyekapan sejumlah aktivis pro-demokrasi itu, Wiranto didampingi antara lain Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo, KSAU Marsdya TNI Hanafie Hasnan dan seluruh anggota DKP.

Cendana dijaga ketat

Menyusul pengumuman Panglima ABRI itu, penjagaan keamanan di sekitar Jalan Cendana, Jakarta Pusat, menjadi lebih ketat, khususnya di lokasi tempat tinggal keluarga mantan Presiden Soeharto dan Prabowo. Di ujung Jalan Tanjung - Teuku Umar tampak sebuah mobil patroli dan sejumlah aparat Kodam Jaya berjaga-jaga. Sejumlah pasukan berseragam lengkap juga tampak siaga di Jalan Suwiryo. Sedangkan sejumlah aparat bersenjata laras panjang berjalan kaki di jalan-jalan sekitar Cendana.

Aparat berpakaian batik juga berjaga-jaga di mulut Jalan Cendana yang ditutup untuk umum. Beberapa wartawan yang berniat melihat suasana sekitar rumah Prabowo dicegat di mulut jalan dan dilarang melintasi jalan itu, sekalipun dengan berjalan kaki.

Menurut seorang petugas, rumah Prabowo sudah sejak pagi tidak berpenghuni. "Mungkin Bapak ada di Bandung atau di Mabes," kata petugas tersebut. Wartawan yang mulai berkumpul di ujung Jalan Cendana diminta membubarkan diri oleh petugas.

Kemungkinan Mahmil

Dalam penjelasannya, Menhankam/Pangab Wiranto mengatakan, selain mempertimbangkan saran dalam bentuk rekomendasi dari DKP, keputusan yang diambilnya ini juga didasarkan atas pertimbangan dari beberapa aspek. Yakni, kesalahan yang telah dilakukan, serta jasa-jasa dari ketiga perwira tersebut selama bertugas di ABRI.

"Kita tidak menutup mata terhadap apa yang telah dilakukan ketiga perwira itu selama tugas mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Banyak jasa dan prestasi yang telah dibuat oleh perwira tersebut. Kedua hal inilah yang menjadi pertimbangan bagi saya untuk memutuskan," tuturnya.

Tapi yang jelas, kata Wiranto, keputusan ini diambilnya untuk kepentingan ABRI, bangsa dan negara. "Keputusan ini sesuai dengan tujuan dan jiwa dari DKP dan merupakan keputusan administratif. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan para perwira ini untuk diajukan ke Mahmil," katanya.

Wiranto juga mengatakan, jika dalam proses persidangan Mahmil terhadap 10 anggota Kopassus yang lain, nyata-nyata bisa membuktikan bahwa ketiga perwira ini melakukan tindak pidana, maka mereka akan diajukan ke Mahmil.

Secara terpisah, Ketua DKP Subagyo mengatakan, keputusan administratif yang diambil Menhankam/Pangab Wiranto sama dengan yang direkomendasikan DKP. Subagyo, yang juga Kepala Staf TNI AD (KSAD) ini, mengatakan, sejak dibentuk tanggal 3 Agustus, DKP telah melakukan sejumlah sidang pemeriksaan, meninjau TKP, mendengarkan kesaksian dari sejumlah saksi dan perwira lainnya serta mendengarkan masukan dari Tim Pencari Fakta Gabungan (TPFG) ABRI. Selanjutnya, pada 21 Agustus DKP memberikan rekomendasinya kepada Menhankam/Pangab.

"DKP telah menyelesaikan tugas dengan baik. Apa yang kita sarankan kepada Menhankam/Pangab sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan ketiga perwira. Apakah kemudian ketiga perwira akan diajukan ke Mahkamah Militer, itu tergantung Menhankam/ Pangab," tutur Subagyo.

Hal yang sama juga diutarakan anggota DKP Letjen TNI Agum Gumelar. Menurut Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) ini, keputusan yang telah diambil Wiranto sama seperti yang direkomendasikan DKP. Agum menambahkan, masyarakat sebaiknya bersabar menunggu hasil pemeriksaan dan persidangan Mahkamah Militer terhadap 10 orang anggota Kopassus lainnya.

Atas pertanyaan wartawan, Agum juga membenarkan bahwa pada persidangan DKP, Prabowo mengaku telah menculik sembilan orang. **(ama/wis/gg)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Prabowo diberhentikan

JAKARTA (Bisnis): Letjen TNI Prabowo Subianto diberhentikan dari ABRI, sementara Mayjen TNI Muchdi PR dan Kol. Inf. Chairawan dibebastugaskan dari jabatan struktural di ABRI karena terlibat dalam aksi penculikan aktivis prodemokrasi.

"Keputusan tersebut diambil tanpa tekanan dari siapapun dan dari pihak manapun. Yang jelas diambil untuk kepentingan ABRI sendiri, bangsa dan negara," kata Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto di Mabes ABRI kemarin.

Wiranto menjelaskan dua pertimbangan yang dijadikan dasar pemberian sanksi administratif tersebut.

Pertama, kesalahan yang diperbuat ketiga perwira.

Kedua, ada aspek yang meringankan seperti jasa dan prestasi.

"ABRI tidak menutup mata terhadap apa yang mereka lakukan selama tugasnya mengabdi pada nusa dan bangsa. Banyak prestasi yang telah mereka perbuat," kata Wiranto.

Wiranto menambahkan tidak tertutup kemungkinan melanjutkan proses pemeriksaan, bila proses persidangan terhadap sepuluh anggota Kopassus yang diajukan ke Mahmil membuktikan adanya tindak pidana.

Di tempat yang sama, Ketua DKP/Kasad Jenderal TNI Subagyo HS mengatakan surat keputusan Pangab tentang sanksi itu belum dikeluarkan. Belum dapat dipastikan kapan sanksi mulai berlaku, ujarnya.

Subagyo menjelaskan dalam pemeriksaan DKP, Prabowo mengakui menculik sembilan aktivis, namun Kasad tidak menjelaskan lebih rinci.

Gubernur Lemhanas Letjen TNI Agum Gumelar yang juga anggota DKP menegaskan keputusan Pangab bukan untuk memuaskan keinginan masyarakat yang umumnya menuntut mereka diajukan ke Mahmil.

"Itulah keputusan Pangab dan ini bukan masalah puas atau tidak puas," tandas Agum Gumelar.

Menurut Agum, DKP hanya memeriksa ketiga perwira Kopassus itu menyangkut sikap, tabiat dan kode etik perwira. Tidak menyinggung persoalan tindak pidana, ujarnya.

Menanggapi pernyataan Pangab, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Munir mengatakan pihaknya tetap mendesak Pangab menjelaskan nasib 14 korban yang masih hilang.

Sementara itu, anggota Komnas HAM Bambang W. Soeharto meminta Pangab menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat mengenai kesalahan yang dilakukan ketiga perwira sehingga mereka dijatuhi sanksi seperti itu.

Pengamat politik Kastorius Sinaga mengatakan putusan DKP merupakan langkah konsolidasi ABRI menjadi solid. "Faktor instabilitas dalam tubuh ABRI sudah dihilangkan, tidak tertutup kemungkinan ABRI akan membongkar kasus Priok, Lampung, Aceh dan Dilli." **(s8/04/et/cp)**

Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☑ Berita Buana	6 12 18 (24) 30	Juni	Desember	2003

Letjen Prabowo Dipecat dari ABRI



Jakarta, Buana

Akhirnya, mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto, yang diduga sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus penculikan aktivis prodemokrasi, diakhiri masa dinas tugasnya atau dipecat) dari ABRI. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan menantu mantan Presiden Soeharto ini akan diseret ke Pengadilan Tinggi Militer. Pengumuman ini disampaikan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto di Jakarta, Senin (24/8) siang pukul 13.35 WIB.

Nasib Prabowo tergantung dari pemeriksaan 10 anggota Kopassus yang terlibat penculikan akhivis dan kini sedang diproses menuju Pengadilan Militer. Jika, ke-10 orang tersebut memberatkan Prabowo, maka jenderal berbintang tiga itu akan langsung diseret ke Pengadilan Tinggi Militer.

Saat menyampaikan pengumuman itu Pangab didampingi seluruh anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Sedangkan kepada dua perwira Kopassus lainnya, Pangab mengeluarkan keputusan berbeda dibandingkan dengan Prabowo. Kepada mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi dikenakan sanksi, bebas tugas dari seluruh jabatan struktural ABRI. Begitu juga dengan mantan Dan Grup IV Kopassus Kolonel TNI Chairawan. Artinya, keduanya tidak dipecat dan tetap menjadi anggota ABRI.

Dalam penjelasannya Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo menandaskan, Prabowo sudah mengakui pihaknya menculik sembilan aktivis. Tapi, Prabowo tidak mengetahui, apakah mereka masih hidup atau sudah tewas. "DKP menyarankan kepada Pangab untuk melakukan tindakan administratif kepada tiga perwira Kopassus tersebut," ujar Subagyo.

Keputusan itu dikeluarkan berdasarkan rekomendasi Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo. Prabowo diperiksa DKP dalam kaitannya dengan penculikan sejumlah aktivis prodemokrasi dan kemungkinan terlibat dalam penembakan mahasiswa Trisakti serta kerusuhan terencana pada 13-14 Mei lalu. Guna meneliti hal itu, pada 3 Agustus lalu Pangab membentuk DKP. Dan hasilnya baru bisa diumumkan Senin ini.

Setelah DKP bekerja, Subagyo menjelaskan, dalam kasus penculikan dan kerusuhan telah terjadi salah analisis bawah kendali operasi (BKO). Menurut Ketua DKP yang juga Kasad ini, Prabowo keliru dalam menafsirkan perintah BKO. Hanya, yang belum jelas, siapa pemberi BKO itu. Ketua DKP dan Pangab juga tidak memberitahu siapa yang memberi BKO. Menurut sumber di militer, BKO itu langsung dari Pangab dan tidak mungkin dari Kasad. Dan Pangab waktu itu dijabat Feisal Tanjung, yang kini menjadi Menko Polkam.

Meskipun Pangab sudah mengumumkan keputusan kepada Prabowo, namun ABRI belum juga mengumumkan nasib 14 aktivis yang hingga kini masih hilang. Ketidakjelasan nasib ke-14 aktivis ini melahirkan kecaman dari para pengamat. Prabowo diduga bertanggung jawab atas penculikan dan penghilangan nyawa aktivis, yang sampai sekarang belum jelas nasibnya. Bagi Direktur Eksekutif PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia) Hendardi, keputusan terhadap kasus Prabowo memiliki risiko, mengingat kasus penculikan tersebut sudah menjadi isu internasional. Dalam pandangan Hendardi, kalaupun Prabowo dibawa ke mahmil, persoalannya belum tentu selesai. "Mahmil itu kan pengadilan mereka sendiri," katanya memberi alasan. Menurut Hendardi, agar kasus itu tuntas, harus dilibatkan pihak ketiga, misalnya PBB.

Sedangkan menurut pakar politik Universitas Indonesia Budyatna, yang menimbulkan tanda tanya adalah belum terungkapnya nasib 14 aktivis yang hilang. Bagi Budyatna, ini terasa aneh, karena sudah cukup banyak anggota Kopassus yang ditangkap, di luar tiga perwira yang diperiksa DKP. Logikanya, dengan tertangkapnya sejumlah anggota Kopassus itu, ke-14 orang hilang ini seharusnya sudah dapat diumumkan berada di mana.

"Saya yakin ini karena pertimbangan waktu. Tampaknya, saat ini bukan *timing* yang tepat. Kalau diumumkan sekarang, barangkali dikhawatirkan bakal menimbulkan gejolak sosial," ujarnya..

Timing yang tepat, diperkirakan Budyatna, adalah saat para pelakunya masuk ke mahmil. Saat itu, ketika kasusnya dibuka, semua orang akan memaklumi. Sebab, pelakunya sedang diadili. Kalau sekarang, reaksi masyarakat akan menimbulkan gejolak sebab yang bersalah masih bebas berkeliaran.

Yang jadi problem, kata Budyatan, jika Prabowo diadili di mahmil. Sebagai manusia, tentu dia tidak mau dikorbankan sendiri. Karena itu, di pengadilan nanti dia akan 'nyanyi', yang bisa merugikan korpsnya. "Inilah yang membuat Pangab masih saja ragu-ragu untuk menyeret para pelakunya ke mahmil," paparnya. ❑ **tim *buana***

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

dia:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

▲ Bila Datanya Akurat

Sutiyoso dan Sjafrie Bisa Diperiksa

Jakarta, Rabu, Merdeka

Pengembangan pengusutan terhadap kasus penculikan Hendrik Dikson Sirait dan aktivis lain akan diarahkan pada pemeriksaan sejumlah aparat dari berbagai instansi militer yang belum tersentuh sampai saat ini. Apalagi Puspom ABRI memang telah mencium adanya keterlibatan oknum aparat tersebut.

Hal ini ditegaskan Komandan Puspom ABRI Mayjen Syamsu Djalaluddin usai menerima kedatangan Hendrik yang didampingi penguasa hukumnya Hendardi di Markas Puspom ABRI, kemarin.

"Berbagai keterangan yang antara lain diperoleh dari laporan Hendrik nanti akan membuka adanya keterlibatan aparat dari sejumlah instansi yang diduga terlibat kasus ini," ujar Syamsu yang juga Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) ABRI ini.

Bahkan, menurut dia, tak tertutup pula kemungkinan dilakukannya pemeriksaan terhadap bekas Pangdam Jaya Sutiyoso dan Sjafrie Sjamsoeddin. Karena sebagai pengendali keamanan Jakarta, keduanya bertanggungjawab terhadap Kerusuhan 27 Juli dan penculikan aktivis.

"Tapi kita lihat saja laporan Hendrik dan hasil pengusutan. Kalau memang terbukti, mereka akan diperiksa. Apalagi Sutiyoso pernah mengatakan bersedia diperiksa jika memang terbukti," ujar Syamsu.

Dalam kasus Hendrik Dikson Sirait sendiri, menurut dia, tidak sulit untuk menemukan siapa pelakunya karena keterangan yang pernah disampaikannya kepada media massa telah cukup jelas. Tapi proses penyelidikan untuk menghimpun bukti-bukti yang otentik tetap harus dilakukan.

"Kita tetap harus memegang asas praduga tak bersalah. Makanya, pengusutan atas kasus ini tetap harus dilakukan untuk laporan yang lebih akurat," ujar Syamsu.

Menurut dia, kasus penculikan Hendrik yang disebut-sebut melibatkan Inteldam Jaya sebenarnya bukan masalah baru lagi. Karena berbagai masalah yang sebelumnya sering dikaitkan dengan instansi ini, sudah sering terdengar. Tapi belum pernah ada laporan resmi yang dapat dijadikan masukan untuk segera ditindaklanjuti Puspom ABRI.

Dengan adanya berbagai tambahan informasi dari Hendrik, akan diketahui sejauhmana terdapat keterlibatan oknum aparat lain dalam kasus penghilangan orang.(EKA)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	(25)	31	Januari	Juli	(1998)
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	(Agustus)	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Letjen Prabowo Dipensiun

JAKARTA — Karier militer Letjen TNI Prabowo Subianto berakhir sudah. Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto memutuskan mantan Danjen Kopassus itu diakhiri masa dinasnya di ABRI dalam kaitannya dengan kasus penculikan sejumlah aktivis beberapa waktu lalu.

"Letnan Jenderal Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia," ujar Wiranto di depan sekitar seratus wartawan dalam dan luar negeri di Markas Besar ABRI, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, kemarin.

Wiranto juga mengumumkan sanksi terhadap dua perwira lain, yaitu Mayjen TNI Muchdi Purwoprandjono dan Kolonel Inf Chairawan dalam kasus yang sama. Kedua perwira itu, katanya, dibebaskan dari semua tugas dan jabatan struktural di ABRI.

Menurut Wiranto, sanksi terhadap ketiga perwira Kopassus itu merupakan sanksi administratif dan bukan tindakan hukum sesuai UU Pidana Militer. Ketika ditanyakan mengapa mereka tidak langsung diajukan ke pengadilan militer, Pangab menjelaskan, "Kita mengacu asas praduga tak bersalah, semua itu nanti tergantung Mahmil. Di Mahmil, yang langsung melaksanakan misi itu satu per satu akan menjelaskan, dia disuruh siapa." Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan akan dilanjutkan ke pengadilan militer jika dalam proses perundangan Mahmil terhadap seputar anggota terperiksa yang lain nyata-nyata membuktikan ke arah itu," kata Wiranto menyebut 10 perwira antara Kopassus yang langsung akan diajukan ke Mahmil.

Usai membacakan keputusan, Wiranto dengan tim Dewan Kehormatan Perwira (dipimpin langsung oleh KSAD) bergegas meninggalkan tempat, namun wartawan terus memburu hingga Pangab dan tim DKP menuju gedung tempat ruang kerja Menhankam/Pangab.

"Apa pengertian dari diakhiri dinasnya di ABRI?" tanya wartawan pada Wiranto. "Pengertiannya dia sudah menjadi sipil dan tidak lagi menjabat struktural di ABRI, tetapi dipensiunkan. Istilah hukumnya seperti itu," jawab Wiranto.

Hal yang sama disampaikan Ketua DKP Jenderal Subagyo yang menyatakan bahwa Prabowo akan mendapat hak-haknya sebagai pensiunan.

Sedangkan Muchdi dan Chairawan, kata Wiranto, masih berdinas dalam lingkungan ABRI tetapi tidak akan diberi jabatan. Ditanyakan sampai kapan, Wiranto menjawab, "Sampai nanti pensiun."

Wiranto menambahkan keputusan tersebut diambil tanpa tekanan dari mana pun sehingga diharapkan tidak berkembang spekulasi tentangnya. Yang jelas, lanjutnya, keputusan diambil untuk kepentingan ABRI sendiri, bangsa, dan negara.

Sebelumnya, ketiga perwira tersebut telah diperiksa DKP selama hampir tiga pekan. DKP kemudian menyerahkan saran kepada Pangab tentang sanksi yang akan diberikan kepada mereka, Jumat pekan lalu.

Sanksi terhadap mereka, menurut Wiranto, diambil berdasarkan berbagai pertimbangan. Selain aspek kesalahan yang telah dibuat oleh para perwira terperiksa, katanya, juga dipertimbangkan jasa mereka selama menjalankan tugas.

"Yang meringankan adalah kita tidak menutup mata atas apa yang telah dilakukan para perwira tersebut selama mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Banyak jasa dan prestasi yang mereka buat."

Subagyo menjelaskan bahwa keputusan Pangab tersebut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan DKP. "Kalau pemeriksaan 10 anggota Kopassus itu menyangkut yang tiga (Prabowo, Muchdi, dan Chairawan) maka akan dibawa ke Mahmil." Meski telah dipensiunkan, menurut Subagyo, bila diperkarakan Prabowo tetap diproses di Mahmil. Karena, katanya, tindakan penculikan diambil saat Prabowo masih menjabat di lingkungan ABRI.

Menanggapi sanksi terhadap tiga perwira tersebut, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan tidak puas. Kontras melihat sanksi administratif itu menunjukkan bahwa tiga perwira itu hanya melanggar kode etik perwira, antara lain, berupa berbohong, bertindak tidak satria, tidak patuh pada pimpinan, atau bertindak di luar batas kepatutan.

"Tapi sanksi itu belum termasuk hukuman untuk tindak pidananya, seperti penculikan dan penghilangan kebebasan orang," kata MM Billah, anggota dewan penasihat Kontras, di Jakarta, kemarin. "Makanya, kami tetap mendesak Puspom ABRI untuk menyidik tiga perwira sebagai tersangka, karena mereka sampai saat ini belum diperiksa," tambah Munir — koordinator Badan Pekerja Kontras — yang bersama Ketua Penasihat Kontras Mulyana W Kusumo — mendampingi Billah dalam temu pers kemarin.

Billah memang melihat adanya satu kesulitan besar bagi ABRI untuk memahmilkan Letjen TNI Prabowo, sebagai tersangka kasus ini.

Ia menduga Prabowo punya kartu truf berupa pengungkapan informasi yang bisa menyulitkan ABRI, khususnya TNI AD, di masa depan. "Kemungkinan kekuatan tawar Prabowo adalah pengungkapan secara *gamblang* operasi penculikan yang dilakukannya. Bila itu dilakukan, maka akan banyak sekali jenderal yang kena," jelas Billah.

Atas kemungkinan itu, Billah melihat pernyataan Pangab belum lama ini bahwa ABRI di masa depan hanya di belakang saja, menunjukkan bahwa ABRI lebih ingin membangun citra di masa depan dan mengeliminasi peristiwa yang sudah-sudah, termasuk dengan tidak memahmilkan Prabowo.

Kendati mempunyai tesis demikian, Kontras menilai itu bukan berarti tak memahmilkan Prabowo menjadi langkah terbaik. Menurut Kontras, justru dengan mengungkap tuntas kasus ini, akan meningkatkan citra ABRI dan bangsa ini di mata internasional.

Mulyana menambahkan bahwa sanksi administratif dan rekomendasi DKP tak memenuhi tiga aspek yang mendasar. Pertama, tak ada aspek penjeraan terhadap pelaku. Kedua, tak ada aspek pencegahan bagi terulangnya kejadian serupa. Ketiga, tak ada landasan yang jelas bagi pertanggungjawaban hukum atas tindakan kriminal yang ada.

Pada kesempatan itu, Kontras juga mendesak agar Pangab segera melepaskan 14 korban penculikan

yang sampai saat ini belum kembali ke keluarganya. Pasalnya, berdasarkan keterangan korban penculikan yang sudah dilepas, ke-14 orang ini disekap bersama mereka.

Dalam keterangan pers kemarin, Ketua-DKP Jendral TNI Subayo mengaku belum tahu nasib ke-14 orang itu. "Saya tidak tahu karena mereka (tiga perwira terperiksa) memang tidak mengakui. Mereka [dalam pemeriksaan] hanya mengaku menculik sembilan orang," kata Subagyo.

Ketidakpuasan atas keputusan Pangab juga dikemukakan oleh kalangan DPR. Para wakil rakyat berpendapat karena kasus penculikan itu tergolong tindak pidana, maka aparat kepolisian militer harus lebih proaktif untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan negeri.

Ketua FPP DPR Zarkasih Nur, Wakil Ketua FKP Korbid Polkam Abu Hasan Sazili, dan anggota FKP Eki Sjachruddin mengemukakan hal itu kepada wartawan di DPR, kemarin. "Keputusannya tidak tuntas sehingga tidak memuaskan rakyat.

Supaya tuntas, Prabowo harus dibawa ke Mahmil. Kalau hanya dipecat, rakyat tetap bertanya-tanya," tegas Zarkasih.

Menurut Zarkasih, Prabowo bukan satu-satunya yang harus dibawa ke Mahmil. Tapi, juga atasan dan bawahannya yang ikut terlibat harus diseret ke Mahmil. "Saya lihat ada rekayasa di balik keputusan ini sehingga membuat rakyat ragu," katanya. "Jika pimpinan ABRI tidak memahmilkan Prabowo, aparat hukum bisa membawa kasus itu ke pengadilan negeri. Ini bukan delik aduan, sehingga polisi dapat membawa kasus itu ke pengadilan."

Abu Hasan Sazili mengatakan masyarakat masih bertanya-tanya atas keputusan Pangab tersebut. Namun begitu, dia mengajak semua pihak untuk menghormati keputusan itu tanpa menutup kemungkinan terus melakukan pengungkapan terhadap seluruh kasus orang hilang.

Ia mengatakan kalau pihak kepolisian mendapat bukti adanya tindak kriminal dalam kasus tersebut, Prabowo harus mendapat perlakuan yang sama sebagaimana warga sipil lainnya. Dalam pengertian membawa atau melimpahkan kasus itu ke pengadilan negeri.

■ bsa/ttw/bap/pov

ROBY/



PRABOWO DIPENSIUN: Menhankam Pangab Jenderal TNI ... pingi ketua Dewan Kehormatan Perwira Jenderal TNI Subagyo H... DKP lainnya kemarin mengumumkan sanksi administrasi ter... terperiksa. Pangab mengumumkan mengakhiri masa dinas Let... Subianto di ABRI dan membebas tugaskan Mayjen TNI Muc... Inf Chairawan dari jabatan struktural ABRI.

LSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal	Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

▲ Hari Ini Hendrik Sirait Ketemu Mayjen Syamsu

Penyelidikan Mengarah ke Inteldam Jaya

Jakarta, Selasa, Merdeka

Dalam kasus orang hilang, tampaknya Tim Pencari Fakta (TPF) ABRI bakal mengarahkan penyelidikannya ke Intel Kodam (Inteldam) Jaya. Hal itu terlihat dari rencana Ketua TPF Mayjen Syamsu Djalaluddin yang akan mendengar keterangan Hendrik Dikson Sirait siang ini (Selasa, 11/8).

Kedatangan Hendrik ke Puspom ABRI, menurut Mayjen Syamsu yang juga Danpuspom ABRI itu, adalah atas kemauan Hendrik sendiri. Imbauan agar korban penculikan ini memberikan keterangan atau informasi ke Puspom, disampaikan Syamsu melalui media massa.

"Kami gembira sekali saat Hendrik menyatakan akan memberikan informasi mengenai penculiknya kepada kami. Karena data dan keterangan yang dia berikan akan sangat berguna untuk perkembangan pengusutan atas kasus orang hilang ini," tutur Danpuspom kepada *Merdeka* di ruang kerjanya, kemarin.

Fokus pengusutan terhadap kasus penculikan yang menimpa Hendrik pada Agustus 1996 lalu itu, akan diarahkan pada dugaan keterlibatan oknum Intel Kodam Jaya. Apalagi, sejak lama Puspom ABRI telah mendengar kabar mengenai dugaan keterlibatan Inteldam dalam berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat.

"Berbagai masalah yang berhubungan dengan Inteldam, sebenarnya telah kita dengar sejak lama. Sayangnya, tidak ada satu pun anggota masyarakat yang berani melaporkan hal ini, sehingga kami tidak punya laporan resmi dan bukti untuk mengusut dan menindak kalau mereka memang benar-benar bersalah. Inilah saat yang tepat untuk mengusutnya," tegas jenderal berbintang dua itu.

Informasi yang telah dibeberkan Hendrik melalui media massa, menurutnya, juga akan menjadi bagian dari data yang digunakan untuk mengembangkan kasus ini.

Bukan tidak mungkin, perkembangan pengusutan kasus Hendrik ini juga akan diarahkan pada dugaan keterlibatan Pangdam Jaya saat itu. Namun pada tahap awal pengusutan, menurutnya, akan lebih difokuskan pada dugaan keterlibatan oknum Inteldam Jaya dalam kasus yang dihadapi Hendrik maupun kasus orang hilang lainnya.

"Tapi jangan berandai-andai dulu, semuanya harus dengan bukti yang konkret. Kita harus tetap menganut asas praduga tak bersalah, meski kemungkinan itu tetap ada dan kalau memang terbukti ada keterlibatan Pangdam saat itu, hukum harus tetap ditegakkan," ujar Syamsu.

Diakuinya, tidak mungkin seorang pimpinan atau komandan sampai tidak mengetahui penyimpangan yang terjadi di instansi yang dipimpinnya. Apalagi, jika penyimpangan itu berlangsung dalam waktu cukup lama.

"Seorang komandan itu harus benar-benar bertanggung jawab atas instansi yang dipimpinnya. Dia harus bertanggung jawab terhadap berbagai permasalahan dan penyimpangan yang dilakukan anak buahnya," tegas Syamsu lagi.

Sebelumnya diberitakan, kasus penculikan yang dialami Hendrik Sirait merupakan kasus penculikan kesekian kalinya yang dihadapi para aktivis. Setelah peristiwa ini lewat dua tahun, Hendrik baru berani membeberkannya kepada pers.(EKA)

Kelas: .....

LSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

dia:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Hendrik Sirait Melapor ke Puspom ABRI

Jakarta, JP.-

Hendrik Dikson Sirait, korban pen'culikan dan penyiksaan yang berkaitan dengan kasus 27 Juli 1996, kemarin melaporkan kasusnya ke Puspom ABRI. Ia didampingi penasihat hukumnya, Hendardi dan R Dwi Sasonggko dari PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia). Mereka diterima langsung Danpuspom Mayjen TNI Sjamsu Djalaludin.

"Penculikan yang saya alami ini hanyalah ekses dari peristiwa politik yang lebih besar, yaitu peristiwa 27 Juli. Saya dan para korban penculikan lain hanyalah sasaran antara. Sasaran utamanya adalah Megawati Soekarnoputri, ketua umum DPP PDI yang tidak diakui pemerintah," kata Hendrik kepada Sjamsu yang duduk di sampingnya.

Pada kesempatan itu, Hendrik juga mengaku terus terang bahwa dirinya telah diinterogasi secara kejam untuk menceritakan hubungan dirinya dengan Megawati Soekarnoputri. Oleh karena itu, kata Hendrik, kesaksiannya dapat membantu pengungkapan peristiwa 27 Juli 1996.

Kepada Sjamsu, Hendrik juga menyatakan bahwa kesaksian yang diberikannya merupakan bagian dari kampanye perjuangan menegakkan HAM di Indonesia. Dia juga menyatakan agar kasus ini jadi pelajaran ABRI.

"Saya juga berkeinginan kasus penculikan ini menjadi bahan introspeksi ABRI, terutama agar ABRI berani melakukan terobosan menghentikan tradisi kekerasan yang dilakukan terhadap masyarakat sipil," ujar mahasiswa FISIP Unas Jakarta semester akhir ini. Meski hanya berlangsung setengah jam, pengakuannya itu diliput puluhan wartawan dalam dan luar negeri.

Danpuspom ABRI Mayjen TNI Sjamsu Djalaludin berjanji akan terus mengusut kasus penculikan Hendrik. Namun, Sjamsu menolak penilaian bahwa penculikan itu terjadi karena keputusan pimpinan ABRI.

"Saya sudah sering mengatakan dalam kaitannya dengan kasus penculikan bahwa pimpinan ABRI tidak pernah memerintahkan penculikan. Itu pasti. Perbuatan itu merupakan ulah oknum ABRI saja," kata Sjamsu.

Ketika ditanya apakah puspom akan mengaitkan laporan Hendrik dengan kasus 27 Juli 1996, Sjamsu menolak berkomentar. Menurut dia, puspom hanya akan memeriksa anggota ABRI yang melanggar prosedur dan disiplin. Namun, berangkat dari kasus penculikan Hendrik, Danpuspom berjanji terus mengembangkan pemeriksaan, termasuk menyangkut perintah penculikan.

Ketika ditanya apakah pengembangan pemeriksaan bisa menjangkau pemberi komando penculikan saat itu, misalnya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoedin, Pangdam Jaya saat itu, Sjamsu balik bertanya, "Siapa yang memberi komando? Apa kalian bisa menunjukkan?" Kemudian, Sjamsu pergi meninggalkan ruangan.

Sebelum dimintai keterangan di Puspom ABRI, Hendrik pernah menyampaikan testimoninya pada Komisi HAM PBB di Jeneva. Dalam testimoni itu, Hendrik mengatakan bahwa pada 1 Agustus 1996, ia bersama tiga temannya menghadiri sidang gugatan Megawati Soekarnoputri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sepulang dari sidang di PN Jakarta Pusat itulah, peristiwa penculikan terhadap Hendrik terjadi. Ia lantas dibawa ke sebuah tempat yang akhirnya dia ketahui kantor Intel Pomdam Jaya, Kramat 7, Jakarta.**(mik)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal					Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

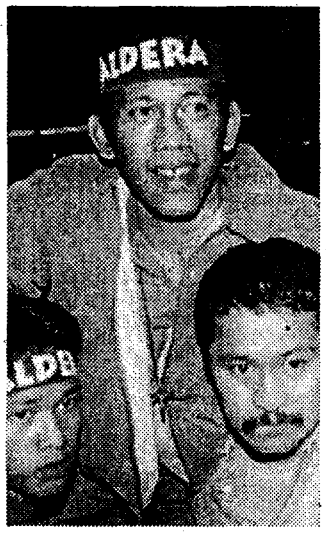
Pius Menohok, Mendidik Tidak Takut

DI tengah maraknya tuntutan agar Prabowo Subianto diadili melalui Mahmil, Pius Lustrilanang membuat tohokan mengejutkan. Dia akan menggugat menantu bekas Presiden Soeharto itu ke pengadilan negeri.

Sebagai salah seorang korban penculikan dan tindak kekerasan, Pius mengatakan tindakan itu dilakukannya bertujuan untuk mendidik masyarakat Indonesia agar jangan ragu-ragu dalam mengajukan gugatan, kepada pemerintah sekalipun.

Hal itu diungkapkan Pius tadi malam ketika dihubungi *Merdeka* di Semarang. Pius, korban pertama yang memberikan *testimony* pada saat rezim Soeharto masih berkuasa, juga mengatakan masyarakat harus tahu bahwa mereka mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan.

"Ini sekaligus mendidik masyarakat Indonesia agar tidak perlu takut-takut untuk menggugat pemerintah dan Prabowo yang saat itu memang sebagai pejabat negara," kata aktivis Aldera itu.



Pius Lustrilanang

Prabowo, dalam kasus penculikan aktivis ini rencananya memang akan diadili di Mahmil. Dengan nada santai Pius mengatakan hal itu tidak akan mematikan langkahnya untuk menggugat bekas Danjen Kopassus itu melalui peradilan umum.

"Saya juga sudah tahu hal itu. Tapi apapun yang terjadi, meskipun dikatakan peluangnya kecil, tapi saya tetap akan berusaha untuk menyeretnya ke pengadilan," tambahnya dengan nada serius.

Karena, lanjutnya apa yang telah dilakukan Menhankam/Pangab dan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) hanya menjatuhkan sanksi administasi kepada Prabowo Subianto dan dua terperiksa lainnya.

Sementara itu kuasa hukum Pius, Hendardi mengatakan bahwa upaya tersebut akan dilakukan melalui gugatan perdata. Walaupun tindakan penculikan yang dilakukan Prabowo adalah tindakan pidana tetapi atas dasar itu sudah bisa dilakukan gugatan perdata yang menyangkut ganti rugi selama terjadinya penculikan terhadap diri Pius.

"Namun berapa besar jumlah ganti ruginya belum bisa kita ungkapkan saat ini. Gugatan tersebut sedang bicarakan lebih matang lagi. Itu masih dalam proses gagasan jadi belum kita daftarkan ke pangadilan negeri," tegas Hendardi ketika dihubungi *Merdeka* secara terpisah tadi malam.

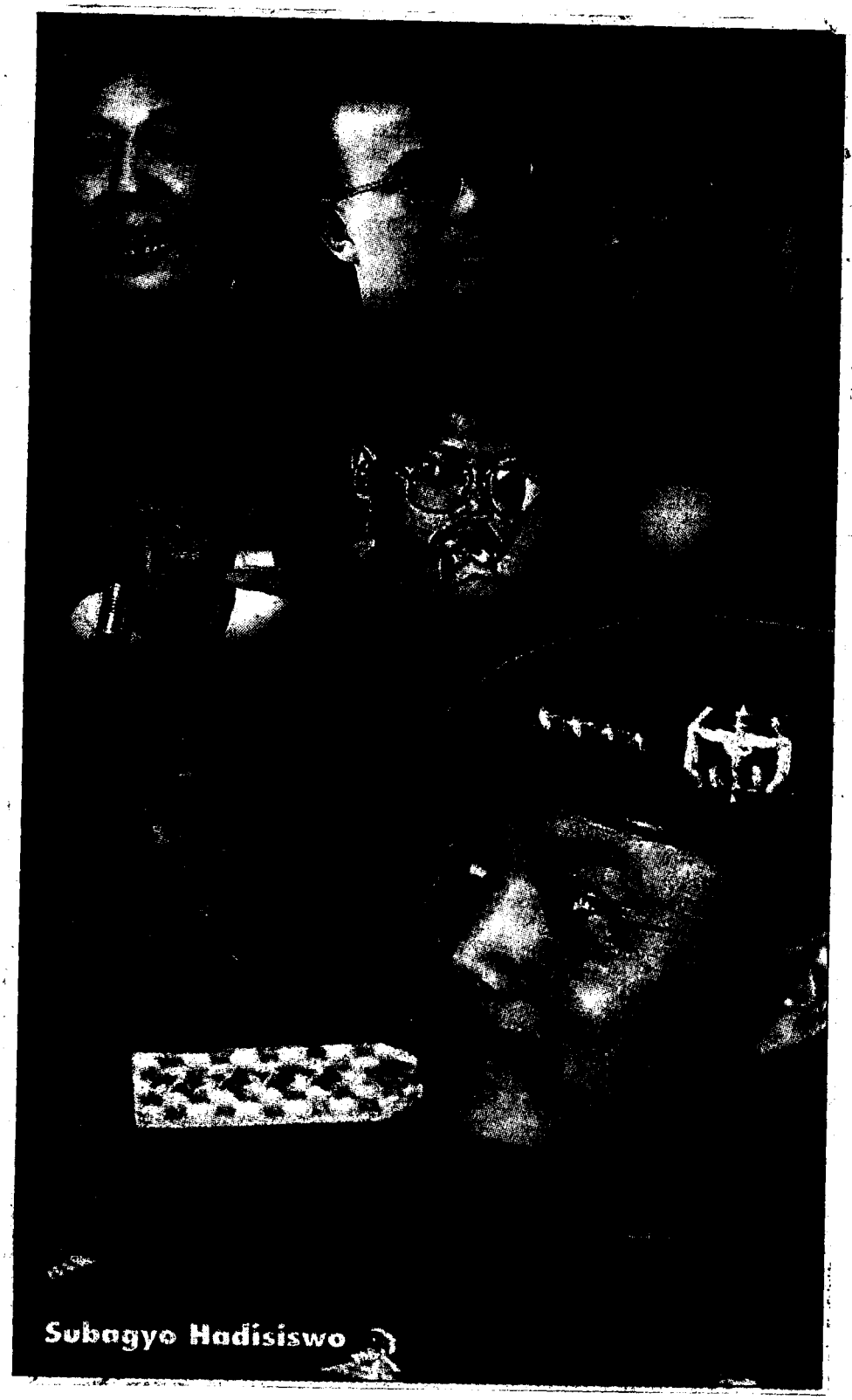
Diakui Hendardi, sebenarnya mereka tidak ingin mengecilkan motif politik dan dalang di balik kasus penculikan tersebut. Yang paling diutamakan untuk menyikapi kasus tersebut adalah mendesak agar Prabowo diseret ke Mahmil. Walaupun dia sadar, sekalipun melalui mahmil belum tentu mampu menjawab latar belakang politik dan menyeret dalangnya.

"Tetapi paling tidak proses peradilan tersebut bisa diakses oleh publik. Karena proses DKP yang berlangsung saat ini tidak bisa diakses oleh publik. Pengadilan militer itu penting apalagi Prabowo sudah mengaku kalau dia menculik sembilan orang," lanjutnya.

Ketika ditanya jika dilihat dari kemungkinan yang ada saat ini apakah pihak ABRI akan menyeret Prabowo Cs ke Mahmil, menurut Handardi dia meragukan hal itu.

Karena menurutnya saat ini ABRI masih bersikap memproteks penilaian publik atas sistem kerja militer selama Orde Baru.

"Jadi saya meragukan pimpinan ABRI akan menyeret Prabowo Cs ke Mahmil. Sebab Prabowo sebagai pimpinan Kopassus akan memperlihatkan secara telanjang bahwa institusi ABRI terlibat kegiatan semacam itu," kata Ketua Persatuan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indo


Subagyo Hadisiswo

Hal. 1/ .....
Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Ketua DKP Jenderal Subagyo HS:

Prabowo Menculik Sembilan Aktivis"

PANGLIMA ABRI/Menhankam Jenderal Wiranto mengumumkan sanksi administratif yang dijatuhkannya terhadap Letjen Prabowo Subianto, Mayjen Muchdi PR, dan Kol Inf Chairawan, dalam kasus penculikan aktivis.

Pengumuman ini disampaikan Pangab di Ruang Urip Sumohardjo, Mabes ABRI Jalan Merdeka Barat, didampingi Ketua DKP (Dewan Kehormatan Perwira) Jenderal Subagyo HS dan seluruh anggota, Senin pukul 13.30 WIB, kemarin.

Sanksi tersebut ialah sebagai berikut:

* Letjen Prabowo Subianto, **diakhiri masa dinasnya dari ABRI terhitung sejak Senin kemarin. Kini status Prabowo sipil, memperoleh pensiun karena dia diberhentikan dengan hormat.**
* Mayjen Muchdi PR, **dibebaskan dari semua tugas dan jabatan struktural ABRI. Dia masih ABRI aktif, tanpa jabatan.**
* Kolonel Inf Chairawan, **Dibebaskan dari tugas dan jabatan struktural ABRI. Dia masih ABRI aktif, tanpa jabatan.**

Tanpa Tekanan

Dalam penjelasannya, Pangab mengatakan bahwa keputusan dan sanksi tersebut diambil tanpa ada tekanan dari siapapun dan dari pihak manapun.

Sanksi itu bersifat administratif. Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk **dilanjutkan ke Mahkamah Militer** jika dalam proses persidangan Mahkamah Militer (Mahmil) atas 10 anggota (Kopassus, red) terperiksa, ada bukti keterlibatan Prabowo, Muchdi, dan Chairawan.

Sementara itu Ketua DKP Jenderal Subagyo mengungkapkan ada 9 orang aktivis yang diakui oleh Prabowo Subianto telah diculik. Namun para aktivis tersebut telah bebas dan masih hidup. Kasad tidak mau menyebutkan siapa nama para aktivis tersebut.

Berdasarkan catatan *Merdeka*, sembilan orang aktivis yang menjadi korban penculikan dan sudah kembali adalah:

Pius Lustrilanang, Desmond J Mahesa, Haryanto Taslam, Faisol Reza, Rahardjo Waluyo Djati, Nezar Patria, Mugianto, Aan Rusdiyanto, dan Andi Arief.**(PN)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003



Puspom Undang Hendrik Sirait

Syamsu: Herman Davao Bukan Herman yang Dicari

Jakarta, Rabu, Merdeka

Danpuspom Mayjen Syamsu Djalaluddin memastikan bahwa Herman Hendrawan yang ada di Davao, Filipina bukan orang yang dimaksud atau dicari selama ini. Kepastian tersebut disampaikan Puspom untuk mengklirkan persoalan yang berkembang.

"Herman Hendrawan yang di Davao dipastikan bukan Herman yang dicari selama ini. Begitu saya lihat dia lulusan Universitas Parahyangan, saya sudah duga ini bukan orangnya. Karena yang dicari adalah lulusan Universitas Airlangga," kata Mayjen Syamsu yang juga menjabat Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) ABRI di Jakarta, kemarin.

Ketika ditanya apakah Herman yang ada di Davao itu sempat diculik, karena mungkin salah culik, Syamsu tidak bisa menjelaskan. "Ah soal itu saya tidak tahu," tambahnya.

Disebutkan, Herman —yang ada di Davao— dalam pengakuan tertulisnya mengatakan, dia diculik setelah melakukan Sholat di sebuah Masjid di kawasan Tanjung Priok tanggal 28 Februari 1998 lalu. Dia disergap, kemudian dimasukkan ke dalam mobil sedan Corolla oleh tiga orang berbadan tegap.

"Dia mengaku matanya ditutup dan dibawa *mutar-mutar* Jakarta oleh para penculik tersebut. Pokoknya dia harus ikut dan para penculik tidak menyampaikan alasannya. Beberapa jam kemudian dia dilepas," kata Danpuspom.

Sehubungan dengan kasus ini, Mayjen Syamsu mengatakan, tadinya dia sudah hendak bertolak ke Davao dan bertemu langsung dengan Herman. Tapi niat itu diurungkan setelah mengetahui bahwa itu bukan orang yang dimaksud.

"Rencananya saya mau jemput sendiri ke Filipina, terbang saja ke sana. Tapi ya itu tadi, tidak jadi karena ternyata orangnya lain," tutur Syamsu tersenyum.

Sementara itu kepada Hendrik Diskon Sirait yang Senin lalu memberikan kesaksian di kantor PBHI dan di hadapan anggota Komnas HAM, Mayjen Syamsu meminta supaya dia juga bisa datang ke Puspom ABRI guna memberikan kesaksian. "Ya istilahnya silaturrahmi dengan kami lah," tambahnya.

Tujuannya menurut dia, agar pihak TPF ABRI mengetahui secara jelas sejauh mana keterlibatan oknum Inteldam Jaya yang bermarkas di Kramat VII dalam kasus ini. "Biar kita tahu bagaimana peran mereka, mungkin ada kaitannya," tambahnya.

Ketika ditanya bagaimana kalau nanti Hendrik meminta surat panggilan resmi, dengan cepat Danpuspom mengatakan, sebaiknya kita tidak usah mempersulit masalah yang sebenarnya mudah diselesaikan.

Di tempat terpisah Pangdam Jaya Mayjen Djaja Suparman mengatakan, jika oknum Inteldam Jaya terbukti terlibat dan bersalah dalam kasus penculikan Hendrik Dikson Sirait, maka pihaknya akan melakukan tindakan sesuai prosedur dan hukum yang berlaku.

Hal itu diungkapkan Pangdam Jaya menanggapi pernyataan Hendrik Dikson Sirait, salah seorang aktivis Aldera (Aliansi Demokrasi Rakyat) yang mengaku diculik oknum Inteldam Jaya Agustus 1996 lalu.

Namun, Pangdam Jaya mengaku belum menerima laporan yang jelas dan rinci mengenai kasus penculikan yang satu ini. Sehingga, pihaknya merasa perlu melakukan pengecekan ulang.

"Saya belum jelas mengenai masalah ini, bahkan saya baru tahu kalau ada pengakuan korban penculikan yang serupa itu. Tapi kami mengecek kebenarannya, juga menindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku," ujar Djaja kepada *Merdeka* saat melakukan kunjungan ke Pusat Pertokoan Mangga Dua dan Glodok Jakarta Barat, kemarin. **(PN/EKA)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Kesaksian Hendrik Dikson Sirait

Oknum Inteldam Jaya Ikut Menculik

Jakarta, Selasa, Merdeka

Lagi, korban penculikan memberikan kesaksian (*testimony*). Sang korban, Hendrik Dikson Sirait, adalah aktivis Aldera (Aliansi Demokrasi Rakyat). Di kantor PBHI Jakarta, kemarin, dia mengungkapkan banyak hal berkaitan penculikan dirinya yang terjadi Agustus 1996 lalu.

Dalam kesaksiannya, Hendrik mengungkapkan bahwa bukan hanya oknum Kopassus yang terlibat dalam aksi penculikan para aktivis pro-demokrasi. Oknum Intel Kodam (Inteldam) Jaya yang bermarkas di Jl Kramat VII Jakpus juga terlibat kasus yang menggegerkan itu.

Menurut Hendrik, dia berani menyebutkan hal itu dengan jelas karena pada saat dia meninggalkan markas tersebut, matanya tidak ditutup.

"Jadi saya bisa melihat di mesin tik kantor tersebut tertulis Inteldam. Dan ketika akan dipindahkan ke Polda Metro Jaya, saya sempat melihat keluar mobil di situ tertulis Jalan Kramat VII," katanya.

Hendrik juga menyebutkan pangkat tiga orang yang memeriksa dia sebelum meninggalkan markas tersebut. Menurutnya, satu orang berpangkat Letnan Kolonel, satu orang berpangkat Letnan Dua sedangkan satu orang lagi berpangkat Sersan Kepala.

"Untuk yang berpangkat Letkol saya lupa namanya karena memang susah diingat. Yang berpangkat Letda namanya juga sulit diingat tetapi sepertinya memakai nama baptis Katolik. Sedangkan yang berpangkat Serka bernama Rahmat," katanya lagi.

Disebutkan Hendrik, dia disekap di sel markas Inteldam Jaya selama 6 hari sejak tanggal 1 hingga 6 Agustus 1996, kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya hingga 27 Agustus 1996. Sejak saat itu dia dilepas dengan status penangguhan penahanan.

Hendrik mengaku, dia "diambil" di bawah jembatan penyeberangan depan Gadjah Mada Plaza setelah mengikuti persidangan kasus PDI berkaitan dengan peristiwa Sabtu kelabu 27 Juli 1996.

Waktu itu, lanjutnya, dia sempat melihat satu orang yang berdiri di sebelah kanan dan dua orang di sebelah kirinya memandang dia dengan pandangan mencurigakan.

"Tidak berapa lama salah seorang dari mereka menga saya terlempar ke tembok di belakang saya. Sedangkan dua orang lainnya membantu mengeroyok saya," tutur Hendrik yang pada saat memberikan kesaksian tersebut didampingi oleh Ketua PBHI Hendardi dan anggota Komnas HAM Bambang W Suharto.

Dikatakan, pada saat itu sempat datang petugas berseragam, kemudian diantara mereka terjadi pembicaraan dan keduanya malah ikut mengeroyok dan diamankan di sebuah gedung. Selanjutnya, dia dimasukkan ke dalam sebuah mobil dengan posisi telentang, mata ditutup dengan tas.

"Sesampai di markas mereka, saya diturunkan tetapi mata ditutup dengan kaos yang saya kenakan, kemudian saya dimasukkan ke sel. Setelah itu saya dibawa ke suatu ruangan untuk diinterogasi oleh 5 orang. Dengan hanya memakai celana dalam mereka menganiaya saya, seperti ditendang, dipukul, sekujur tubuh disundut dengan rokok dan disetrum. penyiksaan itu saya alami selama dua hari," paparnya.

Dituduh Dalang 27 Juli

Dalam interogasi tersebut para penculik memposisikan Hendrik sebagai dalang dari peristiwa 27 Juli. Dia dipaksa untuk mengaku bahwa dia yang pertama menggerakkan massa melakukan kerusuhan 27 Juli 1996. Selain itu ada 3 pertanyaan penting yang mereka tanyakan sekaligus mereka jawab sendiri dan dia hanya mengiyakan saja.

"Saya dipaksa untuk mengaku bahwa saya punya rencana pasca 27 Juli 1996. Saya kemudian dianiaya lagi karena saya tidak bisa mengarang cerita pasca 27 Juli 1996. Saya sebutkan tiga rencana khayalan saya yang seram-seram. Baru pada rencana ketiga bahwa saya akan membom gedung Bursa Efek Jakarta, mereka puas," katanya.

Selain itu Hendrik juga dipaksa untuk mengakui bahwa dia ikut bergabung dalam gerakan karena keinginannya untuk jadi Mendagri. Pertanyaan-pertanyaan lain juga berkaitan dengan PDI, beberapa nama aktivis seperti Budiman Sudjatmiko, Bambang Widjojanto dan bebarapa nama lainnya.

Sementara itu Bambang W Suharto mengatakan, penculikan apapun bentuknya sudah

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Prabowo Bisa Dimahmilkan dan Digugat Secara Perdata

JAKARTA (Media): Pakar Hukum Pidana UI Loebby Loqman menyatakan mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto bisa diajukan ke pengadilan sipil mengingat statusnya telah menjadi warga negara sipil. Namun pengacara Luhut MP Pangaribuan menilai status Prabowo yang kala kasus penculikan aktivis terjadi masih sebagai pejabat militer harus diajukan ke Mahkamah Militer.

Dengan statusnya sebagai warga sipil, maka seharusnya polisi langsung bekerja dan menyelidiki apakah benar dia melakukan penculikan. ''Ini dilakukan berdasarkan asas koneksitas,'' tutur Loebby melalui telepon pada *Media*.

Ia menambahkan bahwa Prabowo juga bisa diadukan secara perdata oleh para korban maupun keluarga korban dalam kasus penculikan.

Sementara itu, pengacara Luhut MP Pangaribuan menilai lain. Dia mengatakan bahwa asas koneksitas dalam kasus ini tidak berlaku, karena Prabowo waktu itu berstatus militer.

''Karena dia mengadakan penculikan dalam rangka tugas militer, maka dia harus masuk ke pengadilan militer, walau sudah disipilkan oleh Pangab Wiranto,'' tegas Luhut.

Ia memaparkan berdasarkan hukum di Indonesia bahwa seorang militer jika melakukan tindak pidana sipil, maka dia bisa diajukan ke pangadilan negeri. Tetapi jika dia melakukan tindak pidana militer maka dia harus diajukan ke pengadilan militer.

''Saat itu Prabowo melakukan tindak pidana militer,'' tutur Luhut yang pernah menjabat sebagai direktur LBH Jakarta.

Senada dengan Loebby, Luhut juga menilai jika Mantan Danjen Kopassus bisa diadukan dengan delik perdata, dan baik korban maupun keluarga korban bisa melakukannya.

Mengenai 10 orang yang akan diajukan ke Mahkamah Militer dan akan menjadi dasar kesaksian untuk mengajukan Prabowo ke Mahmil, Luhut menilai bahwa keputusan Pangab yang menyatakan bahwa Prabowo merupakan otak penculikan itu benar.

''Kalau ada orang yang melakukan kejahatan secara bersama-sama tentu ada otaknya yang menyuruh melakukan. Otak ini bisa terbukti setelah si saksi memberikan keterangan. Dalam hukum Indonesia asas itu tidak bisa dibalik,'' ujar Luhut kemudian.

(Was/C-2)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
JAWA POS	SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
KOMPAS	SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
KEDAULATAN RAKYAT	SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA		6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Pengusutan Berbagai Tragedi Tak Tuntas

Jakarta, *Pembaruan*

Advokat senior Adnan Buyung Nasution berpendapat, mandeknya pengusutan berbagai tragedi seperti penembakan empat mahasiswa Trisakti, penculikan aktivis, pembantaian di Banyuwangi mengindikasikan adanya sesuatu yang tidak beres di pemerintahan Presiden BJ Habibie.

Berbagai tregedi memilukan dapat dikatakan sudah merusak kehidupan berbangsa dan bernegara namun terkesan tidak ditangani dengan tuntas sehingga mengesankan bahwa hukum dan keadilan sudah hilang di negeri ini.

Hal tersebut dikatakan Adnan Buyung Nasution yang akrab dengan panggilan bang Buyung kepada *Pembaruan* di Jakarta, Selasa (27/10). Menurut Buyung yang ditemui di sela-sela diskusi terbatas mengenai APEC dan Demokrasi, kasus Trisakti, kerusuhan 13-15, penculikan aktivis, pembantaian di Banyuwangi dan sejumlah pelanggaran HAM lainnya harus diusut tuntas.

Pemerintah harus sungguh-sungguh menyusun rencana dan strategi yang jelas mengenai pengusutan berbagai tragedi di negeri ini. "Jika langkah itu tidak dilakukan berarti pemerintahan menutup-nutupi kejahatan, ada yang tidak beres," tambahnya.

Berkaitan dengan kasus penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti, 12 Mei, secara khusus pendiri YLBHI itu mendesak Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto memeriksa mantan Pangdam Jaya Syafrie Samsoedin.

Sebagai Pangdam Jaya maupun selaku Pangkoops Jaya yang bertewajiban mengamankan ketertiban di Jakarta saat itu, Sjafrie jelas harus bertanggung jawab atas terjadinya pembunuhan empat mahasiswa tersebut.

"Selain Sjafrie, mantan Kapolda Jaya Meyjen Pol Hamaminata, dan para perwira yang seharusnya bertanggung-jawab ketika itu harus diperiksa. Saya juga menyerukan agar keluarga besar Universitas Trisakti dan orang tua keempat mahasiswa yang jadi korban penembakan membentuk Komisi Aksi Bersama untuk mengampanyekan pentingnya pengusutan kasus Trisakti," kata salah satu pendiri YLBHI, Adnan Buyung Nasution.

Tangis

Sementara itu, keluarga korban penculikan meyatakan kekecewaanya terhadap sikap Komandan Puspom ABRI, Mayjen TNI Djasri Marin yang tidak peka menanggapi tekanan batin keluarga korban. Kekecewaan tersebut dikemukakan langsung di hadapan Kapuspom ABRI di ruang tunggu Puspom ABRI, Selasa petang.

Sebelumnya, keluarga korban penculikan seperti ibu kandung Yani Afri, Ny Tuti, ayah Ucuk Siahaan, Paian Siahaan dan Said Alkatiri, ayah kandung Noval Akkatiri terlibat perdebatan dengan Kapuspom mengenai kelanjutan pengusutan nasib 13 korban penculikan. Kapuspom dalam penjelasannya pihaknya belum bisa memastikan keberadaan ke 13 korban penculikan.

Menyinggung pertanyaan keluarga korban mengenai pemeriksaan terhadap 11 tersangka penculik berkaitan dengan nasib ke 13 korban penculikan yang masih misterius, Djasri mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap para tersangka itu tidak berkaitan dengan ke 13 orang hilang. Penjelasan Djasri langsung dibantah keluarga korban penculikan karena pada kenyataanya sejumlah korban penculikan yang telah kembali menyatakan bertemu dengan korban penculikan yang masih hilang di tempat penyekapan.

Djasri berulangkali mengatakan, pihaknya pada prinsipnya akan terus berupaya memastikan keberadaan ke 13 orang hilang itu. Namun hingga kini ia mengaku belum mempunyai keterangan mengenai keberadaan ke 13 orang tersebut.

Menanggapi keterangan tersebut, ibu kandung Yani Afri, Ny Tuti dengan emosi mengatakan, Kapuspom hendaknya memahami derita batin keluarga korban. "Saya hanya butuh kepastian, jika anak saya sudah mati ya sebutkan di mana kuburannya, jika masih hidup ya segera kembalikan kepada kami," katanya.

Setelah terlibat dalam perdebatan yang emosional sekitar 15 menit, Kapuspom kemudian meninggalkan ruang tunggu meninggalkan keluarga korban hilang.

Sesaat kemudian, pecah tangis keluarga korban hilang yang merasa kecewa mendengarkan penjelasan Kapuspom. (M-11/A-14)



Endang Muchtar

PENGUMUMAN DKP: Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto mengumumkan pembentukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di Jakarta, kemarin. Pembentukan DKP tersebut antara lain akan memeriksa dua mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto dan Mayjen TNI Muchdi P.R. dan perwira lainnya yang diduga terlibat dalam kasus penculikan orang hilang.







Pembaruan/Charles Ulag/Dok

DKP – Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto Senin (3/8) siang di Mabes ABRI mengumumkan pembentukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang akan memeriksa kasus penculikan para aktivis. DKP dipimpin Kepala Staf TNI-AD, Jenderal TNI Subagyo HS. Ketiga perwira yang akan diperiksa DKP, Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR (keduanya berjabatan tangan), serta Kolonel Inf. Chairawan (kiri bawah).

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Karier Militer Prabowo Tamat

■ Dia Menculik Sembilan Aktivis

JAKARTA (Media): Letjen TNI Prabowo Subianto diberhentikan dari jajaran ABRI menyusul keputusan Pangab Jenderal TNI Wiranto yang mengakhiri masa dinas jenderal berbintang tiga itu. Sedangkan Mayjen TNI Muchdi dan Kol Chairawan dibebaskan dari semua tugas dan jabatan struktural dalam ABRI.

Keputusan Pangab Jenderal TNI Wiranto itu dibacakan kemarin dalam sebuah konferensi pers setelah Pangab mendapat rekomendasi dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Sebelumnya DKP telah memeriksa ketiga pentolan pasukan elite TNI-AD Kopassus masing-masing mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo, Mayjen TNI Muchdi PR, dan mantan Dan Grup IV Kol Inf Chairawan berkaitan dengan kasus penculikan terhadap sejumlah aktivis prodemokrasi.

Ketika membacakan keputusan tersebut Jenderal Wiranto didampingi Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo yang juga KSAD serta semua anggota DKP lainnya yakni Letjen TNI Fachrul Razi (Kasum ABRI), Letjen TNI Agum Gumelar (Gubernur Lemhannas), Laksdya TNI Soeratmin (Irjen ABRI), Letjen TNI Djamari Chaniago (Pangkostrad), Letjen TNI Yusuf Kartanegara (Irjen Dephankam), Letjen TNI Soesilo Bambang Yudhoyono (Kassospol ABRI), Laksdya TNI Achmad Sutjipto (Komandan Jenderal/Danjen) Akabri, serta Letjen TNI Sugiono (Wakasad).

Menurut Pangab, alasan dijatuhkannya sanksi tersebut karena ketiga perwira itu terbukti terlibat dalam kasus penculikan sejumlah aktivis LSM dan pelanggaran HAM beberapa waktu yang lalu.

Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo HS mengatakan, Letjen TNI Prabowo yang terakhir menjabat sebagai Dan Sesko ABRI itu mengaku telah memberikan perintah menculik sembilan aktivis dan semuanya sudah dibebaskan.

Mengenai nasib 12 aktivis lagi yang sampai sekarang belum ditemukan dan belum diketahui apakah masih hidup atau sudah mati, Subagyo mengakui tidak tahu. "Yang 12 itu kita tidak tahu siapa yang menculik. Kasusnya sedang diselidiki Puspom ABRI," tegas Subagyo.

Jenderal Wiranto menjelaskan, hukuman yang dijatuhkan kepada tiga pentolan Kopassus itu adalah sanksi administratif. Namun, lanjut jenderal berbintang empat itu, kendati ketiga perwira terperiksa telah mendapatkan sanksi administratif, tidak tertutup kemungkinan dibawa ke Mahkamah Militer.

Menurut Wiranto, sanksi administratif itu merupakan keputusan optimal yang bisa dia ambil dalam kapasitas sebagai Pangab. Sebab menurut dia, DKP tidak berwenang memberikan rekomendasi yang bersifat pidana.

Wiranto menjelaskan pihaknya melihat dua sisi yakni kesalahan yang dibuat dan sumbangsih mereka selama aktif berdinas pada bangsa dan negara. "Perlu juga saya tegaskan bahwa keputusan yang diambil ini tidak berada dalam tekanan siapa pun. Ini perlu saya tegaskan untuk mencegah timbulnya spekulasi yang macam-macam," ujarnya.

"Jadi kapan Prabowo cs dimahmilkan," kejar wartawan.

Menjawab pertanyaan ini, Wiranto mengatakan ketiganya akan dimahmilkan jika 10 anggota terperiksa oleh Mahmil memberikan penguatan bahwa ketiganya melakukan pelanggaran pidana.

"Jadi nanti dalam proses persidangan ke-10 anggota terperiksa di Mahmil itu kan terungkap siapa yang memberikan perintah, siapa yang bertanggung jawab. Nah, dari keterangan-keterangan itu bisa dikembangkan apakah Prabowo, Muchdi, dan Chairawan melakukan kesalahan pidana militer atau tidak," katanya.

Usai membacakan keputusan, Wiranto dengan tim DKP bergegas meninggalkan tempat, namun pers terus memburu. "Apa pengertian dari diakhiri dinasnya di ABRI?" tanya wartawan.

"Pengertiannya dia sudah menjadi sipil dan tidak lagi menjabat struktural di ABRI, tetapi dipensiunkan. Istilah hukumnya seperti itu," kata Wiranto.

"Lalu bagaimana dengan hak pensiunnya," kejar wartawan.

Menurut Wiranto, Prabowo akan mendapatkan hak pensiun penuh.

"Kalau Mayjen Muchdi dan Kolonel Chairawan?" tanya wartawan lagi.

"Muchdi dan Chairawan masih tetap berdinas di ABRI tetapi tidak diberi jabatan," kata Wiranto.

Subagyo mengatakan, diakhirinya dinas aktif Prabowo berarti pensiunnya dipercepat dengan hormat dan tinggal menunggu SK dari Pangab. (Edi/Wdh/D-12)

Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Korban Penculikan Kasus 27 Juli Bersaksi Hari Ini

Jakarta, Senin, Merdeka

Benarkah Kopassus bukan satu-satunya pelaku aksi penculikan terhadap aktivis? Soal tuduhan keterlibatan satuan di luar pasukan elit TNI Angkatan Darat dalam penculikan itu, akan dibeberkan oleh Hendrik Sirait yang menjadi salah seorang korban penculikan.

Hendrik menurut rencana akan memberikan kesaksian di kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), dengan disaksikan Komnas HAM dan para wartawan.

"Dia akan bercerita yang dialami, saat menjalani siksaan dalam sekapan penculik. Ia tahu persis dari kesatuan mana penculiknya itu. Penculiknya itu adalah dari ABRI di luar Kopassus," kata Hendardi, direktur PBHI, kepada wartawan di Jakarta, tadi malam.

Seperti korban-korban penculikan lainnya, Hendrik juga mengalami berbagai siksaan saat berada dalam sekapan penculik. Namun kondisinya kini sudah pulih, sehingga sebagian besar bukti-bukti penyiksaan itu sudah tak begitu kelihatan.

Hendrik diculik oknum aparat militer, karena dia dituduh terlibat dalam kerusuhan 27 Juli 1996. Dalam "tragedi berdarah" di kantor DPP PDI jalan Diponegoro 58 Jakarta itu, Hendrik didakwa sebagai salah satu dalangnya. Benarkah Hendrik termasuk dalang kasus perebutan kantor DPP PDI itu? Jawabannya, akan dijelaskan sendiri oleh Hendrik.

Sementara Hendardi meski sudah tahu banyak tentang pengalaman Hendrik selama dalam sekapan penculik, namun dia belum bersedia mengungkapkan seluruhnya. Pasalnya, ia sudah menyerahkan agar kejadian tersebut korbannya sendiri yang menceritakannya.

"Kalau yang bercerita korbannya sendiri, kan semua bisa lebih jelas," tuturnya.

Namun dari pengalaman yang bakal dipaparkan korban itu, kata dia, dapat disimpulkan bahwa aksi penculikan ternyata sudah menjadi kebiasaan di era Orde Baru.

Sejak dilepas penculiknya, Hendrik memang langsung mengungsikannya ke luar negeri. Dalam pelariannya itu ia bertemu dengan korban penculikkan lainnya, Pius Lustrilanang. Lalu, kedua koban bersatu dan melakukan berbagai kegiatan unjuk rasa di luar negeri, antara lain di negara-negara Eropa, seperti Inggris, Belanda, Jerman dan bahkan sampai ke Australia.

Bahkan pada pertengahan Februari lalu, Hendrik dan Hendardi ikut hadir dalam sidang hak-hak asasi manusia PBB di Jenewa. Dalam sidang itu, Hendrik juga diberikan kesempatan menceritakan pengalaman pribadinya, selama berada dalam dekapan penculik. (JPNN)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA		1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA		2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA		3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA		4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN		5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Kodam Jaya Dituduh Terlibat Penculikan

Terungkap dalam Kesaksian Hendrik Sirait

Jakarta, JP.-

Siapa saja satuan ABRI yang terlibat penculikan selain oknum Kopassus? Kodam Jaya pun dituduh terlibat. Tuduhan ini muncul setelah ada pengakuan dan kesaksian korban penculikan Hendrik Sirait di kantor PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia) kemarin.

Hendrik saat memberikan kesaksian itu didampingi Direktur PBHI Hendardi dan anggota Komnas HAM Bambang Soeharto. Hendrik, 26 tahun, mengaku diculik pada 1 Agustus 1996. "Saya diculik oleh intel Dam Jaya, lokasinya di Jalan Kramat Raya 7. Saya mengetahui alamat itu sewaktu saya diperiksa dan ketika keluar dari kantor Jalan Kramat Raya 7," katanya.

Aktivis yang kini menjadi koordinator Aldera wilayah Jakarta ini menambahkan, "Saya tahu kesatuannya karena mesin ketiknya bertuliskan Intel Dam. Ketika saya dipindahkan ke Polda Metro Jaya, mereka juga tidak menutup mata saya lagi sehingga ketika saya keluar bisa membaca alamat kantor tersebut."

Hendrik yang oleh teman-temannya dipanggil "Iblis" ini mengaku sempat mengenali para penculik. Disebutkannya, tim pemeriksa saat dia disekap ada yang berpangkat letkol, letda, dan serka. Hendrik yang dibebaskan pada 27 Agustus 1996 itu mengatakan, dia hanya mengenali nama yang berpangkat serka, yakni Rachmat dan Letda Babtis.

Seperti halnya para korban penculikan lainnya, Hendrik mengaku sangat berat menceritakan kembali pengalaman pahit yang pernah dialaminya itu. Tapi, karena teman-temannya di PBHI meminta, akhirnya ia bersedia menyampaikan kesaksian di depan wartawan.

Sebelum ini, Hendrik juga pernah menceritakan pengalamannya di Komisi HAM PBB bersama dengan Pius Lustrilanang beberapa bulan lalu. "Terus terang, sampai sekarang saya ini masih takut dan trauma dengan orang yang berbadan besar," ujarnya.

Penculikan terhadap Hendrik ini memang tak satu paket dengan korban lainnya, seperti Faisol Reza, Pius Lustrilanang, Desmond J. Mahesa, ataupun 14 korban penculikan yang kini belum diketahui nasibnya. "Tapi, motif saya diculik jelas sekali, yakni karena ada unsur politis dan berkaitan erat dengan peristiwa 27 Juli," katanya. **(mik/ado)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Sekretaris FKP Syamsul Muarif:

Perlu Diusut Terus Siapa Yang Perintahkan Prabowo

Jakarta, 13 Agustus

Sekretaris FKP Syamsul Mu'arif mengatakan, kesalahan analisis perintah Bawah Kendali Operasi (BKO) menyebabkan masalahnya akan terhenti pada tanggung jawab Prabowo dan bukan salah yang memerintah atau atasan yang mem-BKO-kan.

Hal itu dikemukakannya menjawab pertanyaan *Pembaruan* Kamis pagi sehubungan keterangan Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo Rabu bahwa bahwa Letjen TNI Prabowo Subianto mengakui salah menganalisis perintah BKO dan dalam hal itu dia menyatakan bertanggungjawab.

Namun demikian, katanya, tentu akan menjadi pertanyaan apakah kesalahan ini tidak pernah dilaporkan kepada atasan yang memberikan BKO. Sebab, kalau ada kesalahan tentu seharusnya dilaporkan ke atas.

Kalau dilaporkan tentu juga perlu diketahui bagaimana tanggapan atasan yang memberikan perintah. Masalah ini memang perlu diusut terus, katanya.

Sebelumnya Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo mengatakan, hasil pemeriksaan Tim DKP sampai saat ini, Letjen TNI Prabowo Subianto telah mengakui ada kesalahan dan dia menyatakan siap bertanggung jawab. Ini merupakan sikap keperwiraan seorang perwira.

''Saya katakan, dia dalam menganalisis, salah,'' kata Subagyo kepada wartawan seusai melakukan sidang DKP dengan menghadirkan terperiksa Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi, dan Kolonel Inf Chairawan di Mabesad Jakarta, Rabu (12/8) sore.

Selama dua setengah jam mulai pukul 09.00 WIB, ketiga terperiksa diperiksa tim DKP yang dipimpin Jenderal Subagyo. Tidak seperti sebelumnya di mana Letjen Prabowo datang ke Mabesad Jakarta lewat pintu utama, kemarin ketika datang lewat pintu samping. Sehingga banyak fotografer dan kameramen yang kaget begitu melihat mobil Land Rover warna hijau dengan nomor 3303-01 dengan tiga bintang sudah parkir di halaman Mabesad.

Dalam sidang tersebut, kata Subagyo, karena ini Dewan Kehormatan Perwira maka para perwira terperiksa dilihat keperwiraannya, tingkat kehormatannya dan diharapkan juga kejujurannya.

Pangab Tidak Salah

Ketika ditanya apakah Kopassus yang di BKO-kan itu membawa misi khusus sehingga terjadi kesalahan analisis, Subagyo menjawab bahwa yang salah itu Prabowo. Salahnya, mestinya BKO, kan, tapi dia mengeluarkan surat perintah yang bisa menjadikan salah.

Ketika ditanya perintah yang salah dianalisis itu dari siapa? ''Sudah saya katakan, yang jelas bukan dari Pangti dan dari Pangab. Saya sudah katakan, Pangab tidak salah, tidak mengeluarkan,'' jawab Subagyo.

Terus Kasad bagaimana? ''Nanti kita lihat, jangan gampang menyalahkan, karena kita bukan hakim. Tadi saya katakan supaya tidak salah paham bahwa ini kesalahan analisis. Dalam analisis salah sehingga penuangannya jadi salah,'' tambahnya.

Tunggu Sampai Tuntas

Ketika ditanya perintahnya itu bagaimana, Subagyo menjawab, kalau nanti ini sepotong-sepotong perkembangannya dijelaskan padahal masih memerlukan bukti-bukti bisa menjadi salah paham. Tunggu sampai tuntas dengan kelengkapan prosesnya sehingga ini bisa menghasilkan yang sebaik-baiknya.

Secara khusus Jenderal (TNI) Subagyo meminta agar sabar menunggu sebab besok (red. Kamis ini) akan ada sidang DKP untuk menentukan langkah-langkah berikutnya.

Untuk memperkuat hasilnya sebab sebelumnya sudah ada saksi-saksi yang dipanggil, ada kapten, ada yang membuat surat dan juga dari TPF mengecek ke lokasi untuk menambah kelengkapan dari suatu proses.

Menurut Pangab Jenderal Wiranto, DKP bisa memeriksa perwira yang lebih tinggi dari Prabowo, apakah ini juga akan dilakukan?

''Ya, kalau salah atau ada keterkaitannya, ya bisa saja,'' jawab Subagyo.

(W-7/M-11)


ALDER
PIUS LUSTRILANANG
ANDI ARIF
HENDRIK DIKSON
DESMOND
PIUS LUSTRILANANG :
Danjen Kopassus tak akan bertindak
tanpa perintah Pangab.
Pasti ada juga payung politiknya.
Prabowo akan disertai perwira pendamping

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☑ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Pius Berniat Gugat Prabowo

SEMARANG (ANTARA): Ketua Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pengacara Indonesia, Tri Medya Panjaitan, menyatakan Pius Lustrilanang, secara serius berniat menggugat Prabowo Subianto sehubungan dengan keterlibatannya dalam penculikan para aktivis. Pius, aktivis Aldera, merupakan salah satu korban penculikan.

"Untuk memperkuat gugatan itu maka para korban penculikan yang dilakukan oknum Kopassus seperti Andi Arif, Desmon, dan Haryanto Taslan mau membantunya memberikan keterangan secara jujur tentang peristiwa yang pernah dialaminya sewaktu diculik," katanya di Universits Katolik Soegijaparanata Semarang, di Semarang, Sabtu.

"Sebab korban itu mengalami kejadian yang sama dan dilakukan baik oleh orang maupun tempat yang sama," ujarnya.

Penculikan itu, menurutnya, sudah sangat melanggar hak asasi manusia dan secara langsung sudah menghilangkan kemerdekaan para korban. Sehingga dia yakin kalau Pius pasti akan menggugat Prabowo sebagai Komandan Kopassus yang telah mengaku bertanggung jawab.

Tri Medya sebagai ketua kuasa hukum Pius mengatakan gugatan itu akan dilakukan lewat aduan pidana biasa, sehingga tidak akan bernasib seperti persidangan kasus Trisakti.

Sementara itu Guru Besar Psikologi Hukum Undip Prof Satjipto Rahardjo, mengatakan, untuk menggugat Prabowo lewat gugatan pidana biasa tersebut tidak menjadi masalah.

Menurutnya, bukti pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) itu bukan suatu kejahatan, namun hanya merupakan laporan aduan saja. Untuk memasukkan gugatan itu dalam pidana biasa maka polisi harus mempunyai bukti sendiri yang kuat.

Pius adalah orang pertama yang membeberkan secara berani dan terbuka tentang kasus penculikan yang menimpa dirinya. Pembeberan Pius itu kemudian membuka tabir tentang penculikan yang ternyata dilakukan oleh sejumlah anggota Kopassus atas perintah Prabowo yang ketika itu masih menjabat sebagai Komandan Kopassus.

Setelah Pius membuka mulut korban lain yang semula takut berbicara karena ancaman dari penculiknya ramai-ramai berbicara kepada pers dan Komnas HAM.

Pengakuan para korban itulah yang kemudian menjadi alasan pembentukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang mengusut Letjen Prabowo, Mayjen Muchdi (mantan Komandan Kopassus), dan Kolonel Chairawan, Dan Grup IV Kopassus.

Sesuai usul DKP Pangab Jenderal Wiranto akhirnya mengambil keputusan memberhentikan Prabowo dari dinas kemiliteran. Sedangkan Muchdi dan Chairawan tetap aktif di ABRI tetapi tidak diberi jabatan struktural.

Keputusan Pangab itu menimbulkan pro dan kontra luas di masyarakat. Banyak kalangan yang menyesalkan sanksi administratif terhadap Prabowo karena menutup sejumlah informasi penting di balik penculikan. Misalnya, siapakah yang menyuruh Prabowo. (I-1)



■ Pius Lustrilanang ■ AFP

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

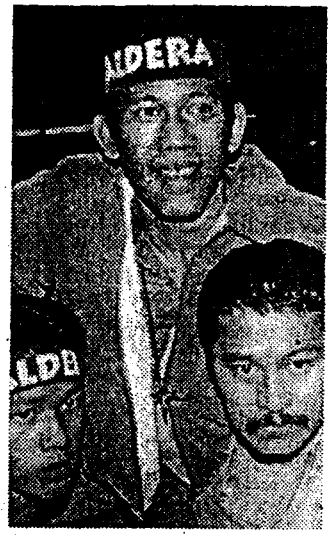
Pius Menohok, Mendidik Tidak Takut

DI tengah maraknya tuntutan agar Prabowo Subianto diadili melalui Mahmil, Pius Lustrilanang membuat tohokan mengejutkan. Dia akan menggugat menantu bekas Presiden Soeharto itu ke pengadilan negeri.

Sebagai salah seorang korban penculikan dan tindak kekerasan, Pius mengatakan tindakan itu dilakukannya bertujuan untuk mendidik masyarakat Indonesia agar jangan ragu-ragu dalam mengajukan gugatan, kepada pemerintah sekalipun.

Hal itu diungkapkan Pius tadi malam ketika dihubungi *Merdeka* di Semarang. Pius, korban pertama yang memberikan *testimony* pada saat rezim Soeharto masih berkuasa, juga mengatakan masyarakat harus tahu bahwa mereka mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan.

"Ini sekaligus mendidik masyarakat Indonesia agar tidak perlu takut-takut untuk menggugat pemerintah dan Prabowo yang saat itu memang sebagai pejabat negara," kata aktivis Aldera itu.



Pius Lustrilanang

Prabowo, dalam kasus penculikan aktivis ini rencananya memang akan diadili di Mahmil. Dengan nada santai Pius mengatakan hal itu tidak akan mematikan langkahnya untuk menggugat bekas Danjen Kopassus itu melalui peradilan umum.

"Saya juga sudah tahu hal itu. Tapi apapun yang terjadi, meskipun dikatakan peluangnya kecil, tapi saya tetap akan berusaha untuk menyeretnya ke pengadilan," tambahnya dengan nada serius.

Karena, lanjutnya apa yang telah dilakukan Menhankam/Pangab dan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) hanya menjatuhkan sanksi administasi kepada Prabowo Subianto dan dua terperiksa lainnya.

Sementara itu kuasa hukum Pius, Hendardi mengatakan bahwa upaya tersebut akan dilakukan melalui gugatan perdata. Walaupun tindakan penculikan yang dilakukan Prabowo adalah tindakan pidana tetapi atas dasar itu sudah bisa dilakukan gugatan perdata yang menyangkut ganti rugi selama terjadinya penculikan terhadap diri Pius.

"Namun berapa besar jumlah ganti ruginya belum bisa kita ungkapkan saat ini. Gugatan tersebut sedang bicarakan lebih matang lagi. Itu masih dalam proses gagasan jadi belum kita daftarkan ke pangadilan negeri," tegas Hendardi ketika dihubungi *Merdeka* secara terpisah tadi malam.

Diakui Hendardi, sebenarnya mereka tidak ingin mengecilkan motif politik dan dalang di balik kasus penculikan tersebut. Yang paling diutamakan untuk menyikapi kasus tersebut adalah mendesak agar Prabowo diseret ke Mahmil. Walaupun dia sadar, sekalipun melalui mahmil belum tentu mampu menjawab latar belakang politik dan menyeret dalangnya.

"Tetapi paling tidak proses peradilan tersebut bisa diakses oleh publik. Karena proses DKP yang berlangsung saat ini tidak bisa diakses oleh publik. Pengadilan militer itu penting apalagi Prabowo sudah mengaku kalau dia menculik sembilan orang," lanjutnya.

Ketika ditanya jika dilihat dari kemungkinan yang ada saat ini apakah pihak ABRI akan menyeret Prabowo Cs ke Mahmil, menurut Handardi dia meragukan hal itu.

Karena menurutnya saat ini ABRI masih bersikap memproteks penilaian publik atas sistem kerja militer selama Orde Baru.

"Jadi saya meragukan pimpinan ABRI akan menyeret Prabowo Cs ke Mahmil. Sebab Prabowo sebagai pimpinan Kopassus akan memperlihatkan secara telanjang bahwa institusi ABRI terlibat kegiatan semacam itu," kata Ketua Persatuan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indo-

Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

dia:		Tanggal	Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Jaringan Prabowo Bisa Dibongkar di Mahmil

Kontras Sambut Positif Rekomendasi DKP

Bambang: Apa Aksi Penculikan Direstui Pangti?

...karta, JP.-

...pabila Letjen TNI Prabowo Subianto benar-...ar diajukan ke mahkamah militer (mahmil), ...a jadi seluruh jaringan yang terkait dengan ...sus orang hilang akan terbuka. Apalagi dalam ...ang mahmil tidak ada batasan pangkat karena ...pa pun bisa dipanggil untuk memberikan ...aksian.

"Saya berharap kasus penculikan itu bisa ...ongkar semuanya. Sebab, kemungkinan untuk ...di mahmil lebih baik daripada DKP (Dewan ...hormatan Perwira). Di mahmil ruang ling-...nya lebih luas. Seorang tersangka mempunyai ...ang untuk mengungkapkan sesuatu lebih ...yak," kata mantan Kassospol ABRI Letjen ...) Bambang Triantoro di Jakarta kemarin.

...enurut dia, dalam proses persidangan mahmil, ...elis hakim juga bisa menanyakan apa saja dan ...k memandang kepangkatan. Dalam sidang, ...m bisa bertanya tentang perintah BKO (bawah ...dali operasi) dan siapa yang memerintahkan. ...okoknya, asal-usul perintah itu bisa terbongkar ...m sidang mahmil. Apa perintah BKO itu ...tui Pangti (panglima tertinggi ABRI, dalam ...ni presiden) atau tidak? Saya harapkan ...mbah banyak informasi dari para saksi dan ...u, termasuk atasan Prabowo sebagai saksi," ...Bambang.

...lihat perkembangan dari DKP dan pimpinan ... Bambang mengharapkan Pangab sebagai ...at yang berwenang memutuskan untuk ...proses ketiga perwira itu ke mahmil.

...juan sidang mahmil, tidak lain, hanyalah ...lihkan nama baik ABRI. Sebab, dengan ada-nya kasus penculikan itu, jelas dunia internasional mengecam Indonesia," ujarnya.

Bambang menjelaskan bahwa tugas DKP memang hanya memberikan rekomendasi kepada Pangab. Namun, dalam rekomendasi itu, juga dilampirkan sejumlah pertimbangan.

Seperti diketahui, pekan lalu setelah melakukan pemeriksaan akhir, DKP memberikan rekomendasi agar Letjen Prabowo (mantan Pangkostrad) diajukan ke sidang mahmil.

"Makanya, Pangab juga bisa mempertimbangkan apa yang akan diputuskan. Menurut saya, yang tepat *ya* diteruskan ke mahmil. Dari sana, bisa dikembangkan apa-apa saja yang belum terkuak selama sidang DKP," kata Bambang.

Dalam mahmil nanti, kata dia, tentu akan lebih banyak saksi yang bisa dihadirkan untuk memberikan keterangan. Misalnya, anak buah Prabowo yang mendapat perintah penculikan di Kopassus dan atasan Prabowo yang memberikan perintah langsung itu.

"Tapi, hak memutuskan ke mahmil atau tidak tetap ada pada Pangab. Bisa saja Pangab berkesimpulan bahwa Prabowo tidak perlu dimahmilkan. Kalau Pangab mengambil keputusan tidak ke mahmil, saya rasa, Pangab mengambil risiko. Sebab, semua orang akan mempersoalkan kasus tersebut. Pangab harus berani mempertanggungjawabkannya. Itu ada konsekuensi politiknya."

Sementara itu, Koordinator Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Munir SH menyambut gembira rekomendasi DKP tersebut. Padahal, Munir sebelumnya adalah salah satu tokoh yang paling menentang dibentuknya DKP pimpinan KSAD Jenderal TNI Subagyo Hadi Siswoyo.

"Saya kira, kalau memang ada *track* yang benar. Artinya, dia tidak mengambil alih fungsi-fungsi peradilan. Untuk itu, Pangab harus segera menindaklanjuti proses pemeriksaan sebagai tersangka," kata Munir.

Keterkejutannya itu terjadi karena dalam surat petunjuk Pangab tentang DKP terungkap bahwa tugas DKP justru akan membawa masalah ini tidak ke peradilan.

"Kemudian waktu kita mengirim surat ke DKP, kita minta DKP untuk tidak menjalankan fungsinya sesuai SK Pangab, tapi mencari motif penculikan dan mencari jalan bagaimana tentang nasib 14 orang yang belum ketemu."

Ketika ditanya apa kira-kira yang akan diputuskan Pangab, dia mengatakan bahwa saat ini Pangab tidak mempunyai pilihan. "Itu bukan soal mau atau tidak mau. Tidak ada pilihan. Saya kira, tentara tidak akan dirugikan karena proses mengembalikan kepercayaan masyarakat."

Sementara itu, Menhankam/ Pangab Jenderal TNI Wiranto menjamin bahwa DKP mampu menyelesaikan tugas memeriksa Prabowo cs secara objektif. "Sebagai perwira, mereka sudah disumpah. Mereka harus melaksanakan tugas sebaik-baiknya, secara objektif, transparan, dan jujur."

Ia menegaskan hal itu untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap objektivitas DKP dalam memeriksa keterlibatan mantan Danjen Kopassus itu dalam kasus penculikan para aktivis. Demikian juga dalam mengusut dugaan keterlibatan Mayjen TNI Muchdi Pr dan Kolonel Chairawan.

ISAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

dia:		Tanggal	Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐ DETAK	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Memeriksa Kehormatan Perwira

Seperti tak mau kalah dengan isu dan desakan yang terus berkembang, Dewan Kehormatan Perwira yang pekan lalu dibentuk Mabes ABRI, segera saja tancap gas. Hari Senin (3/6) pembentukannya diumumkan Pangab Jenderal TNI Wiranto, keesokan harinya DKP langsung menggelar sidang pertama, dengan memeriksa mantan Komandan Grup IV Sandi Yudha Kopassus, Kolonel (Inf) Chairawan di Markas besar Angkatan Darat (Mabesad) JL. Medan Merdeka Utara. Dua hari kemudian, di tempat yang sama, DKP melakukan pemeriksaan terhadap mantan Danjen Kopassus, Mayjen TNI Muchdi PR. Sidang pemeriksaan terhadap Muchdi berlangsung nyaris sehari penuh. Senin (10/08) sidang DKP menghadirkan Letjen TNI Prabowo Subianto.

Seandainya sidang-sidang DKP bersifat terbuka, tentu saja akan menjadi sebuah tontonan yang menarik. Bayangkan, satu orang perwira menengah dan dua orang perwira tinggi yang pernah malang melintang di korp Baret Merah disidang *bak* terdakwa. Mereka dicecar dengan *seabreg* pertanyaan untuk mengetahui keterlibatannya dalam kasus penculikan. Menurut penuturan mantan anggota Dewan Kehormatan Militer (DKM) kasus Santa Cruz, Dilli, Timor-Timur(1991) Letjen TNI(Purn) Suparman Achmad, seorang perwira yang diperiksa DKP/DKM biasanya tidak akan bisa berbohong. Sekali berbohong, berarti ia melanggar disiplin tentara. "Makanya masyarakat tidak perlu curiga terhadap DKP,"ujar Wakil Ketua DPA/Ketua Komisi Hankam DPA itu kepada DeTAK.

Apa yang diungkapkan mantan Ketua Fraksi ABRI DPR RI itu boleh jadi benar. Di hadapan sidang DKP, tiga perwira itu mungkin tidak akan berani berbohong. Namun, persoalannya bukan terletak disitu. Harus diakui, DKP adalah sebuah instrumen ekstra juridisial yang tugas utamanya menyelidiki ada tidaknya pelangaran kode etik perwira. Di lingkup ABRI kode etik itu dikenal dengan nama Budi Bhakti Wira Utama. Kalau terbukti melakukan pelanggaran, mereka bakal terkena sanksi administratif. Bentuknya macam-macam. Bisa dicopot dari jabatannya, diturunkan pangkatnya ataupun dipecat dari dinas kemiliteran.

Jelas, sanksi seperti ini bukan sanksi juridis. Inilah yang melandasi keberatan beberapa orang terhadap keberadaan DKP. Dalam pandangan koordinator Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Munir S.H, keberadaan DKP hanya akan menutup kemungkinan ketiga perwira itu diseret ke Mahkamah Militer (Mahmil). Pendapat Munir ini didukung oleh pengacara senior Adnan Buyung Nasution. "Menurut saya, pembentukan DKP ini memang dilatarbelakangi motif untuk tidak membawa para perwira itu ke pengadilan militer,"ujarnya kepada DeTAK.

Tapi menurut pengalaman Suparman, selain menyelidiki ada tidaknya pelanggaran kode etik perwira, DKP juga berwenang menyelidiki ada tidaknya unsur pidana yang dilakukan oleh perwira. Jika ditemukan unsur pidana, katanya, DKP akan merekomendasikan kepada Pangab agar perwira tersebut dibawa ke Mahmil.

Namun dalam amatan Adnan Buyung Nasution, belum pernah ada presidennya dalam sejarah, seorang perwira yang diperiksa di DKP/DKM kemudian di bawa ke Mahmil. "Karena itu harapannya tipis sekali para perwira yang disidang DKP sekarang akan dimahmilkan,"katanya.

Buyung lantas mengambil contoh hasil kerja DKM kasus Santa Cruz tahun 1991. Enam perwira yang terlibat dalam kasus ini semuanya diganjar sangsi administratif. Ada yang dipecat dari dinas kemiliteran, ada juga yang dicopot jabatan strukturalnya di jajaran TNI AD tapi masih dalam dinas aktif. Diantara perwira itu adalah Mayjen TNI Sintong Panjaitan (Pangdam Udayana) dan Brigjen TNI RS Warouw (mantan Pangkolakops).

Tidak pernah ada penjelasan resmi mengapa fakta sejarah berbicara seperti itu. Tapi menurut analisis Buyung, hal itu bisa terjadi lantaran penyelesaian melalui pengadilan militer dianggap akan merugikan nama baik ABRI maupun martabat para perwira. Apalagi dalam kasus penculikan ini melibatkan seorang perwira berbintang tiga (Prabowo). Dalam sejarah ABRI, belum pernah ada seorang berpangkat Letjen aktif dibawa ke pangadilan.

Kehormatan perwira memang perlu dipelihara. Tapi bukan berarti para perwira itu bebas dari jangkauan hukum. Karena itulah demi tegaknya *rule of law*, Buyung berpendapat seharusnya ketiga perwira itu langsung diadili di Mahmil. Hanya melalui sidang Mahmil yang terbuka bagi publik, katanya, keadilan dalam penaganan kasus ini akan tercapai. "Kalalu tidak, namanya pilih kasih. Para pelaku penculikan yang akan diadili di Mahmil nanti akan merasa kok saya yang hanya terkena hukuman pidana sementara yang memerintahkan saya tidak dihukum,"tambah Buyung.

Agak berbeda dengan Buyung, Munir berpendapat DKP bisa saja dibentuk. Akan tetapi sebelum ketiga perwira itu dibawa ke DKP, mereka seharusnya diadili terlebih dulu di Mahkamah militer. "Putusan Mahmil adalah salah satu bahan untuk menentukan putusan di DKP, bukan sebaliknya," kata Munir kepada DeTAK.

Pendapat Munir ini dilandasi Surat Keputusan Pangab N0 838/111/1995 tentang Petunjuk Administrasi Dewan Kehormatan Perwira. Dalam Bab II angka 7 huruf a.3 dan c.2 disebutkan bahwa salah satu dasar seorang perwira bisa diseret ke DKP adalah jika ia dikenakan hukuman pidana di atas tiga (3) bulan dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang ia tidak dapat lagi dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan. Kontras, kata Munir, telah mengirim surat protes kepada Pangab ikhwal adanya cacat hukum dalam pembentukan DKP. Namun, surat tersebut tidak ditanggapi. Ketika para wartawan mengkonfirmasikan masalah ini kepada Pangab pekan lalu, Wiranto hanya berkata, "Mereka boleh ngomong apa saja."

Cacat hukum atau tidak, yang jelas DKP telah terbentuk. Dan langsung bekerja. Dari hasil pemeriksaan terhadap Kolonel Chairawan dan Mayjen TNI Muchdi, Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo mengatakan kedua perwira ini mengaku sekedar melaksanakan tugas. Hanya saja, Subagyo belum bersedia mengungkap siapa or memberikan order penculik "Perintahnya dari mana. Saya b ungkap banyak, karena belum Prabowo," ujarnya kepada wartawan Jumat (7/8). Jika hirark militer diikuti, bisa diduga pe itu Prabowo. Lantaran tatkala berlangsung, dialah yang meng Kopassus.

Meski begitu, bukan berarti rintah itu datang dari Prabowo dalam kasus ini Prabowo jug melaksanakaan perintah atasan mau obyektif, atasannya itu diperiksa. Tidak mungkin do bertindak sendiri kalau tidak a dari atasannya,"ujar Ketua Pela (Komite Indonesia Untuk Solid Islam), H. Ahmad Sumargono y dekat dengan Prabowo. Sep Sumargono, sebagian besar Indonesia kini hanya bisa be tebakan.

Apapun hasil DKP nanti, penyelesaian kasus ini terletak Pangab. Sebab, semua hasil pe DKP akan direkomendasik Pangab. Untuk selanjutnya, Pa menentukan nasib ketiga p Masyarakat boleh berharap kep Wiranto. Apalagi, sedari awal janji untuk tidak menutup-nut saian kasus ini. Memang, saa ABRI sedang dipertaruhkan. Ji DKP tidak memenuhi tuntut bisa dipastikan citra itu kian te



ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 (7) 13 19 25 31	Januari	Juli	(1998)
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	(Agustus)	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☑ Suara Merdeka	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

"Tak Mungkin DKP Transparan"

"**KERJA** Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tak mungkin transparan. Sebab, DKP hanya memeriksa hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran etika dan disiplin sebagaimana dimaksud oleh UU No 2/1988," kata Mayjen TNI (purn) Sugiri, mantan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Peradilan Militer.

Berbeda dari kerja Mahkamah Militer (Mahmil), yang proses pemeriksaannya dilakukan secara terbuka untuk umum. Siapa pun bisa mengikutinya, kecuali untuk hal-hal yang berkait dengan masalah kesusilaan.

Namun demikian, tambah dia, tidak berarti hasil pemeriksaan tidak objektif. Bisa samasama objektif. Hanya objek pemeriksaan DKP menyangkut masalah internal, sehingga tak ada keharusan terbuka untuk umum.

Menurutnya, sebagaimana di instansi-instansi lain, DKP dibentuk dimaksudkan untuk mempertahankan atau menegakkan etika dan disiplin para anggotanya. Namun kalau dari pemeriksaan DKP ditemukan unsur pidana, masalahnya bisa diajukan ke Mahmil. Untuk itu menjadi kewenangan Pangab, yang nantinya akan bertindak selaku perwira penyerah perkara. Sebab yang diperikwa perwira.

"Jadi, DKP di sini hanya memberikan masukan dan pertimbangan. Untuk bisa diajukan ke Mahmil adalah wewenang Pangab," ujarnya. Sesuai dengan ketentuan, jika yang diperiksa semacam Letjen TNI Prabowo, maka sebelumnya Pangab/Perwira Penyerah Perkara akan meminta pertimbangan dari Oditur Jenderal. Apakah kasus itu sudah memenuhi syarat hukum untuk diajukan ke Mahmil atau belum.

Tak Sependapat

Karena sistem kerja DKP yang tak mungkin transpran itulah, Munir Said Salim Thayib, ketua badang pekerja Komite untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) sejak awal tak sependapat dengan pembentukan DKP untuk memeriksa Prabowo dkk. Prabowo, menurutnya, harus diajukan ke Mahmil seperti 11 anggota Kopassus lainnya, yang diduga sebagai pelaku penculikan aktivis.

Bahkan tak hanya itu, Kontras juga menilai DKP cacat hukum. Alasannya, karena menyalahi prosedur pembentukan seperti ditentukan dalam Surat Keputusan (Skep) Pangab 838/III/1995. Menurut Skep itu, tandas Munir, DKP dibentuk untuk menindaklanjuti putusan peradilan Mahmil dan bukan sebaliknya. Bahkan, disebutkan DKP tidak bisa mengoreksi putusan Mahmil.

Hanya karena sudah telanjur dibentuk, menurut Munir, maka DKP harus bisa membatasi materi pemeriksaannya. Selain itu, hasil pemeriksaan DKP sebagai lembaga ekstra yuridisial tidak boleh menghalangi proses hukum terhadap mereka yang terlibat kasus penculikan aktivis.

Pemeriksaan DKP sebaiknya dibatasi pada mencari kepastian keberadaan 14 aktivis yang masih hilang.

Jika tidak dibatasi, Munir dan MM Billa dari Kontras merasa khawatir, keputusan DKP yang keluar lebih dahulu sebelum ada putusan Mahmil justru hanya akan membatasi ruang pengungkapan kasus penculikan. Misalnya tentang kemungkinan ada institusi lain dalam tubuh ABRI dan aktor intelektual lain yang terlibat. "Artinya, menutup ruang bagi pengungkapan kasus ini sampai tuntas."

Tuntas di sini, maksudnya adalah ABRI harus bisa menjelaskan kebedaraan 14 aktivis yang belum kembali, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Bisa menyeret seluruh pelaku dan aktor intelektualnya ke pengadilan. Secara institusional ABRI harus melakukan refleksi total terhadap peran-peran politiknya, yang ternyata sampai harus menggunakan tindak kekerasaan.

Pendek kata, peran Dwifungsi ABRI harus ditinjau kembali.(**Widhy Purnama**-11)

LSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

dia:		Tanggal	Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☑ Lova Mendrofa	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Munir: DKP Cacat Hukum

JAKARTA- Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dianggap memiliki cacat hukum, karena prosedur pembentukannya melanggar Surat Keputusan (Skep) Pangab Nomor 05/Skep/838/III/1995 tertanggal 27 November 1995 tentang naskah sementara DKP ABRI. Dalam Skep itu disebutkan, lembaga ini dibentuk setelah Mahkamah Militer (Mahmil) mengeluarkan putusan peradilan, bukan sebaliknya yang terjadi saat ini.

Penilaian tersebut ditegaskan Munir, ketua badan Pekerja Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (Kontras) kepada para wartawan di kantor YLBHI, Jakarta. Karena cacat hukum, kata dia, DKP harus bersikap membatasi diri dalam pemeriksaan terhadap para perwira ABRI yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam kasus penculikan sejumlah aktivis prodemokrasi, sambil menunggu putusan peradilan dari Mahmil.

"DKP tetap harus mempertanyakan nasib 14 korban penculikan yang belum jelas nasibnya sampai sekarang. Selain itu, hasil kerja mereka tidak boleh berakibat menghalangi proses hukum terhadap perwira tinggi yang terlibat, serta tidak menutup kemungkinan memeriksa perwira lain di luar Kopassus. Misalnya Pangdam Jaya, Pangab, dan Badan Intelijen ABRI, pada saat terjadi penculikan," kata Munir yang didampingi Ketua Dewan Eksekutif YLBHI Bambang Widjojanto SH dan MM Billa.

Kontras telah mengirimkan surat terbuka kepada Pangab Jenderal TNI Wiranto menyangkut pembentukan DKP yang tidak memenuhi sejumlah ketentuan dalam Skep Pangab 838/1995 itu. Kontras juga mempertanyakan pemeriksaan terhadap Komandan Grup IV Kopassus Kol Inf Chairawan, mengingat dia bukan perwira tinggi.

Senin lalu, Pangab Jenderal Wiranto mengumumkan pembentukan DKP sebagai wujud tekad ABRI untuk menuntaskan kasus penculikan dan orang hilang yang melibatkan beberapa prajurit yang patut diduga terlibat langsung atau tak langsung.

Dalam hal ini, DKP akan memeriksa dua mantan Danjen Kopassus, yakni Letjen TNI Prabowo Subianto (Komandan Sesko ABRI) dan Mayjen TNI Muchdi Purwopranjoyo (Wakil Irjen ABRI), serta Komandan Grup IV Kopassus Kol Inf Chairawan. Selama diperiksa, mereka diskors dari jabatannya.

Materi Pelanggaran

Menurut Munir, dalam ayat a.3 Skep Pangab 838/1995 itu disebutkan tiga materi pelanggaran yang dapat diperiksa DKP, yakni pelanggaran terhadap ideologi negara, melakukan tindakan yang melanggar kehormatan perwira, dan mereka yang dikenakan hukuman lebih dari tiga bulan. Asumsinya, yang bersangkutan sudah dikenai hukuman pidana dari Mahmil.

Skep tersebut juga menjadi rujukan bagi Skep Kapolri 480/IV/1996 tentang pembentukan DKP di lingkungan Polri. Sebagaimana dalam Skep Pangab, dalam Skep Kapolri pun ada ayat yang menyebutkan DKP tidak berwenang mengoreksi putusan peradilan Mahmil. Justru sebaliknya putusan Mahmil menjadi bahan pertimbangan DKP.

MM Billa menambahkan, berdasarkan Skep Pangab tersebut, persidangan DKP harus melibatkan tujuh perwira aktif, tiga di antaranya berpangkat lebih tinggi dari yang diperiksa.

"Ketetapan ini mengandung unsur diskriminatif, karena hanya menguntungkan perwira yang paling tinggi. Bagaimana jika yang diperiksa itu jenderal berbintang empat, kan tidak ada tiga perwira yang pangkatnya lebih tinggi," katanya.

Dengan adanya pembentukan DKP sebelum ada putusan Mahmil dikhawatirkan akan membatasi kemungkinan pemeriksaan terhadap perwira tinggi lainnya yang diduga terlibat dalam kasus penculikan ini. "Selain format pembentukannya terbatas, DKP juga bersifat tertutup," tambah Billa.

Herman Hendrawan

Sementara itu utusan Kontras yang baru kembali dari Davao Filipina, Dadang Tri Sasongko, membenarkan bahwa Herman Hendrawan yang berada di Konjen Davao memang bukan aktivis yang dicari sebagai orang hilang korban penculikan.

"Namun, Herman ini juga menjadi korban penculikan dua bulan lalu. Ia diculik di Tanjungpriok dan dilepaskan di Jalan Rajawali, Bandung. Wajah, kacamata, kumis, serta gayanya memang mirip Herman yang kita cari. Tetapi fisik secara keseluruhan dan cara bicaranya sama sekali berbeda."

Saat ini, ujarnya, Herman yang bukan aktivis ini mengalami depresi yang sangat berat, sehingga sangat tertutup jika diajak bicara.

"Kami menduga, itu akibat tindakan represif yang hebat, sehingga secara psikis dia kacau," kata Dadang.

Dadang mengaku tak bisa mengorek banyak keterangan dari "Herman Davao" yang belum mampu melepaskan diri dari situasi traumatik. Namun dia yakin suatu saat Herman nanti akan bercerita. Untuk itu, Kontras akan meneruskan penyelidikan terhadapnya di Davao melalui jalan lain, di antaranya mengirim utusan ke rumah keluarganya di Tasikmalaya.

"Sejumlah LSM di Filipina juga sudah berjanji akan membantu mencari informasi dari General Santos, tempat Herman bersembunyi selama dua bulan. Sebab, tetap tidak tertutup kemungkinan adanya keterkaitan Herman dengan yang lain," kata Dadang. (wid-48k)

Hal. 1/ .....
Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☑ Suara Merdeka	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

ABRI Ditawari Barter Prabowo dengan 14 Korban Penculikan

JAKARTA- Ketua Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Andi Arief, menawarkan barter kepada pimpinan ABRI, yakni menukarkan 14 korban penculikan yang belum jelas nasibnya hingga kini. dengan para tersangka kasus penculikan aktivis, termasuk Letjen TNI Prabowo Subianto.

"Jadi, ABRI harus menyerahkan ke-14 orang itu dalam keadaan apa pun, sedangkan para tersangka tidak dimahmilkan," ujarnya, setelah bersama beberapa anggota Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (Kontras), mendampingi sejumlah keluarga korban penculikan, datang ke Mabes ABRI kemarin.

Mereka bermaksud menemui Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo. Namun maksud mereka tidak terpenuhi, karena Subagyo yang juga KSAD sedang tidak di ruang kerjanya. Akhirnya rombongan diterima Asisten Pengamanan KSAD, Mayjen TNI Nuraman, serta Kadispen ABRI Brigjen TNI Putu Rai.

Dalam percakapan dengan dua pejabat Mabes ABRI itulah, Andi Arief menyampaikan usulannya dan memperoleh jawaban dari Putu Rai. "Usulan itu akan segera kami sampaikan kepada Jenderal Subagyo. Untuk sementara ini kami terima sebagai masukan," ujarnya.

Sementara itu, nasib dua mantan Danjen Kopassus, Letjen TNI Prabowo Subianto dan Mayjen TNI Muchdi PR, serta Komandan Grup IV Kopassus yang dinonaktifkan, Kol Inf Chairawan, akan ditentukan Pangab Jenderal TNI Wiranto pekan depan.

Setelah mengikuti Rakor Polkam di Jakarta kemarin, Jenderal Wiranto mengatakan, tentu saja keputusan tersebut baru bisa dikeluarkan setelah dia menerima hasil pemeriksaan DKP terhadap tiga perwira dalam kasus penculikan sejumlah aktivis prodemokrasi ini.

Tetapi sampai kemarin Pangab mengaku belum menerima hasil pemeriksaan tim DKP. Karena itu, dia belum bisa memberikan keputusan terhadap Prabowo dkk. "Saya belum terima rekomendasi DPK. Jadi, masih kita tunggu hasil pemeriksaannya."

Tuntutan Terendah

Andi Arief yang juga termasuk korban penculikan mengatakan, bagi para keluarga korban, kepastian nasib ke-14 orang itu adalah jauh lebih penting dibandingkan dengan harapan menyeret para tersangka pelaku penculikan ke Mahkamah Militer (Mahmil).

Menurut dia, kalau nasib 14 rekannya itu tak bisa diungkap, itu akan menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap ABRI. "Makanya, bukan tidak mungkin jika kami sampai pada tuntutan terendah, yakni ABRI mengembalikan 14 korban yang masih hilang. Sebab, sejauh ini kami semua yakin mereka masih hidup. Sedangkan terhadap para tersangka yang sudah selesai diperiksa, tidak apalah kalau tidak jadi dimahmilkan," katanya.

Keinginan untuk bertemu Jenderal Subagyo, menurut dia, karena keluarga korban ingin mengetahui hasil pemeriksaan DKP terhadap Prabowo dkk, terutama terkait dengan nasib 14 orang tersebut. Pihak keluarga korban memiliki dugaan, masalah tersebut juga termasuk materi yang ditanyakan dalam pemeriksaan.

Karena gagal bertemu, mereka akan kembali untuk menemui Subagyo Selasa (25/8) mendatang. "Kami akan terus mendesak ABRI untuk memberikan penjelasan tentang nasib 14 korban yang belum jelas, termasuk anak saya Noval. Tersangkanya sudah ada, semestinya nasib mereka bisa diketahui," kata Ny Baby, ibu Noval Alkatiri.

Koordinator Pokja Kontras Munir Salim Said Thayib SH mengemukakan, tetap berkeyakinan ke-14 korban itu masih hidup. "Jika ABRI mengatakan mereka sudah dilepaskan, harus ada penjelasan terperinci tentang waktu dan tempat pelepasannya. Kalau pun ternyata ada yang mati, ABRI harus memberi tahu kuburannya."

Kadispen ABRI Brigjen TNI Putu Rai tidak bisa memberikan penjelasan mengenai hasil-hasil pemeriksaan DKP terhadap Prabowo, Muchdi, dan Chairawan. Seperti diketahui, DKP baru saja merampungkan pemeriksaannya terhadap ketiga perwira itu. Pemeriksaan itu membutuhkan waktu sekitar dua minggu.

Hingga kemarin, tim DKP masih melakukan pendalaman dan perumusan materi. Hasil pemeriksaan itu selanjutnya akan direkomendasikan kepada Pangab, untuk menjadi pertimbangan dalam memutuskan nasib Prabowo dkk. Rekomendasi ini bisa berupa sanksi administrasi atau diajukan ke Mahmil.

Sebelumnya Sekretaris DKP Letjen TNI Djamari Chaniago mengatakan, dalam minggu ini hasil pemeriksaan tim akan diumumkan dan secepatnya disampaikan ke Pangab. (wid,di-48t)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KEDAULATAN RAKYAT	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Kontras: Sidang Penculikan segera Digelar

JAKARTA —Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munir SH mengatakan, para tersangka penculikan akan segera disidangkan tanpa menunggu kejelasan nasib 14 orang korban yang belum ditemukan.

''Tampaknya Puspom akan segera melakukan persidangan para tersangka tersebut tanpa harus menunggu kejelasan nasib 14 orang yang sampai saat ini belum ditemukan,'' katanya di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, berdasarkan hasil pembicaraan dengan pihak Puspom ABRI, Puspom belum sungguh-sungguh menanggapi permintaan para saksi korban yang bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan syarat diberi akses agar bisa bertemu dengan para tersangka.

''Padahal kalau para korban tersebut bisa dipertemukan dengan tersangka, diharapkan dapat mengungkap keberadaan ke-14 orang yang belum diketemukan,'' jelas Munir.

Menanggapi hal tersebut, pihak Kontras berpendapat, jika persidangan telah dimulai sementara nasib 14 orang belum jelas, maka persidangan itu dilakukan untuk menyelamatkan tersangka dari pertanggungjawaban maksimal dari tindakan tersebut.

''Sampai sekarang akibat maksimal dari tindak penculikan itu belum diketahui,'' katanya, lalu menjelaskan bahwa dalam prosedural hukum orang tidak dapat dihukum dua kali untuk kasus yang sama.

Dia menjelaskan, jika para tersangka hanya didakwa telah menghilangkan kemerdekaan dan penganiayaan, maka hilanglah kesempatan mereka untuk didakwa telah melakukan pembunuhan kalau ternyata di antara 14 orang itu ada yang terbunuh.

Oleh karena itu, katanya, jangan sampai proses peradilan itu menyelamatkan tersangka dari tuntutan maksimal dari tindakan mereka.

''Kalaupun akan dipaksakan mestinya Puspom mengambil sikap terlebih dahulu terhadap nasib 14 orang tersebut, karena Kontras yakin Puspom mengetahui nasib mereka,'' lanjut Munir.

Ketika ditanya mengenai tindakan Kontras apabila persidangan itu tetap akan dilangsungkan tanpa kejelasan nasib mereka yang belum ditemukan, Munir menyatakan, pihaknya akan tetap mendesak Puspom untuk mencari kejelasan nasib mereka.

''Kita akan tetap mendesak pihak Puspom untuk menjelaskan nasib 14 orang itu,'' Kata Munir.

Ke Jenewa

Usaha untuk mengusut kasus penculikan dan orang terus berlanjut. Kemarin, Komisi untuk Orang Hilang Dan Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan bahwa pihaknya akan mengirimkan delegasi untuk ikut hadir di dalam sidang ke-55 kelompok kerja mengenai penghilangan paksa PBB di Jenewa.

''Kami memang akan mengirimkan delegasi ke sidang tersebut. Dan rencana kami diwakili oleh tiga orang, yakni Bambang Widjojanto SH (anggota Badan Penasihat Kontras), DT Utomo Rahadjo (Ketua IKOHI/Ikatan Orang Hilang Indonesia dan ayah dari korban penculikan Petrus Bima Anugerah) dan Mugiyanto selaku korban penghilangan paksa yang kini telah dibebaskan, '' kata koordinator Kontras, Munir SH, di kantor YLBHI, Jakarta, kemarin.

Munir mengatakan di dalam agenda konferensi yang akan dilansungkan dari 29 Septemmber hingga 2 Oktober 1998 itu, pihaknya memang telah diminta untuk ikut serta dalam acara dengar pendapat mengenai kasus penghilangan orang secara paksa yang terjadi di Indonesia. ■uba/ant

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
JAWA POS	SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
KOMPAS	SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
KEDAULATAN RAKYAT	SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA		6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

PBHI Tanyakan Berkas Perkara Penculikan

JAKARTA (Media): Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Hendardi mempertanyakan berkas perkara kasus penculikan yang rencananya akan dilimpahkan pada 20 Oktober ini, tetapi ternyata sampai saat ini belum ada kabar.

"Kami pertanyakan, karena kelambatan ini dapat menggiring persepsi masyarakat bahwa kasus penculikan seperti diulur-ulur. Bahkan masyarakat sendiri sampai saat ini belum tahu siapa 11 oknum Kopassus tersebut," ujar Hendardi.

Bahkan, lanjut Hendardi, ada yang mempertanyakan ada atau tidak 11 oknum Kopassus itu sebagai tersangka, sebab tidak pernah ditampilkan jati dirinya oleh Puspom ABRI.

Hendardi juga mendesak agar mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo yang telah diberhentikan dari dinas militer untuk segera di-Mahmilkan, karena sudah cukup indikasi dari hasil pengakuan di DKP bahwa dia memerintahkan penculikan sembilan aktivis.

Hendardi meminta janji mantan Danpuspom ABRI Mayjen TNI Syamsu seyogianya bisa direalisasi oleh Danpuspom yang baru. Jangan sampai ada kesan bahwa perkara ini diulur-ulur atau dipetieskan.

Oleh karena sekarang ini banyak berbagai pembelokan isu yang mulai tampak dilakukan oleh negara, seperti kasus semacam Banyuwangi, Winters, dan lain-lain.

Mengenai Pius yang sudah menandatangani BAP, bagi PBHI yang penting bahwa Pius datang ke sana untuk memberi kesaksian bukan untuk bertamu. Pantas saja kesaksian itu ditandatangani dan sebagai langkah agar perkara ini diselesaikan dalam sidang pengadilan.

"Kendati ini bukan satu-satunya jalan untuk mengungkap motif politik maupun dalang pelaku penculikan, tetapi setidak-tidaknya ada langkah maju," ucap Hendardi.

Untuk itu, kata Hendardi, Puspom harus serius menangani masalah penculikan ini dengan secepatnya melimpahkan kasus ini ke pengadilan, karena kasus ini sudah telanjur menjadi perhatian publik dan sudah pasti dibutuhkan pertanggungjawaban kepada publik atas progres dari penanganan kasus ini.

Sementara itu Kababinkum ABRI Mayjen Timor P Manurung dan Oditur Jenderal ABRI Mayjen TNI Chalid Karim dalam kesempatan yang berbeda menyebutkan bahwa pihaknya pada Selasa, belum menerima berkas acara pemeriksaan (BAP) sebelas oknum anggota ABRI —yang diduga terlibat kasus penculikan aktivis— dari Puspom ABRI.

Menanggapi pertanyaan wartawan di Gedung MPR/DPR, kedua jenderal berbintang dua itu juga menyebutkan bahwa rencana penyerahan BAP itu pada 21 Oktober 1998 juga tidak ada, karena sampai sekarang hal itu belum ada pemberitahuan dari Puspom ABRI. Awalnya memang direncanakan untuk diserahkan, namun mungkin ada perbaikan-perbaikan sehingga penyerahannya tertunda, kata Mayor Jenderal Timor P Manurung. (Wdh/D-5)

Kelas: .....

LSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

edia:		Tanggal	Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Hasil DKP sangat menentukan

liter di negara manapun, menurut Hasnan Habib, punyai otonomi yang besar. eran, panglima besar dari ga ini mempunyai kebe-, termasuk yang berkaitan n hukum.

ntan Dubes RI untuk AS menjadi pengamat militer itu mbahkan di dalam tubuh I ada hukum disiplin dan hu-pidana yang sama dengan sip-ka anggota militer itu melang-siplin, jelasnya, maka ditun-erdasarkan hukum disiplin er. Bila yang bersangkutan kukan tindak pidana maka kan melalui sistem peradilan er.

la perbuatan anggota ABRI pai merusak nama serta ber-n dengan integritas seorang ira tinggi [tidak hanya terkait plin], menurut Hasnan, maka alah itu dimasukan ke sidang g dilakukan dewan kehor-an.

alam dewan kehormatan, ka-dia, tersangka diperiksa dan erikan kesempatan sangat lu-membela diri, mengeluarkan dapatnya atau menjelaskan daan sebenarnya. Selanjutnya, asnya, anggota Dewan akan engambil kesimpulan dan me-ampaikan rekomendasi kepada nglima ABRI.

Bila sidang Dewan menyebut-n hanya melanggar prosudur, siplin, kehormatan integritas rwira dan merusak nama ABRI, nurut Hasnan, maka rekomen-si hukuman hanya terkait de-an pelanggarannya itu seperti nurunan pangkat, teguran keras au dikeluarkan dari anggota BRI.

Sebaliknya, bila anggota Dewan engambil kesimpulan bukan ha-a tindakan indisipliner dan me-nggar kehormatan tapi ada as-k pidana, maka dewan bisa me-komendasikan untuk melanjut-n penuntutan berdasarkan pi-na.

Untuk menyidik tindak pidana lanjutnya, tugasnya diserah-kepada polisi militer dan odi-yang bertugas menyiapkan utan ke lembaga peradilan.

Menanggapi kemungkinan ter-tnya mantan Presiden Soehar-alam kasus penculikan, Has-menilai tidak ada seorang di negara ini yang kebal hu-



Hasnan Habib



Rais Abin

ada prinsip yakni setiap komandan bertanggung jawab segala yang dikerjakan dan tidak dikerjakan anak buahnya. Ketika Letjen Prabowo Subianto mengatakan bahwa dia bersedia bertanggung jawab, menurut dia, masalahnya bukan terletak pada bersedia atau tidak, namun masalah keharusan.

"Apalagi ada kolonel yang terlibat. Jika komandan tidak mengetahui apa yang dikerjakan perwira yang cukup tinggi dengan menggunakan sarana lembaga berarti dia tidak becus menjadi komandan," jelasnya.

Dia menambahkan pemeriksaan oleh dewan kehormatan memang tidak secara terbuka. Dalam kasus Sintong Panjaitan [kasus Dili] yang diberhentikan, disebutkan dia tidak terlibat. Namun, Hasnan mengingatkan dia merupakan pimpinan di wilayah tersebut dan dia yang mempunyai tanggung jawab sebagai pemegang komando.

DKP menentukan

Rais Abin, mantan Dubes RI untuk Singapura dan Malaysia, menilai hasil dari Dwan Kehormatan Perwira (DKP) sangat menentukan. Bila pelanggarannya tidak hanya menyangkut etika keperwiraan dan terbukti melecehkan hak asasi manusia, menurut dia, DKP menyerahkan perkara ke Mahmil untuk ditindaklanjuti.

Soal kredibilitas DKP, veteran yang pernah menjadi komandan pasukan PBB untuk Timur Tengah selama 4,5 tahun ini mengingatlebih tinggi pangkatnya dariyang diperiksa, menurut dia, bila menyimak ketentuan itu keberadaan DKP kali ini tidak sah. "Tapi tergantung apakah SK tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan."

Sebetulnya, menurut Rais, di setiap tingkat bisa diadakan Dewan kehormatan Militer (DKM), bukan hanya hanya untuk perwira tinggi. "Mungkin ada perbedaan sedikit antara DKM dengan DKP. DKM bisa menyangkut pada kesalahan operasi militer, sedangkan DKP hanya menyangkut etika."

Berkoar-koar

Rais mengingatkan berpatok pada asas praduga tidak bersalah, bila bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat, maka akan sulit untuk membawa ke mahkamah militer.

"Kasus ini bisa masuk ke Mahmil bila yang di bawah [bawahan Prabowo] berkoar-koar bahwa mereka diperintah oleh 'dia'. Saya melihat ada kemungkinan [kasus] ini akan merembet. Berarti bukan hanya tiga [perwira] ini saja yang kena".

Bila hal itu yang terjadi, menurut dia, akan terkait pada pimpinan yang lebih tinggi. "Jika Feisal Tandjung [mantan Menhankam] mengatakan tidak tahu apapun, saya kira tidak logis."

Rais menambahkan hal terpenting yang perlu diusut adalah motivasi Prabowo yang kemungkinan sangat beragam, seperti ambisi pribadi, ambisi yang disulut Soeharto jadi makan rakyat."

Bagaimanapun, tandasnya, kasus ini harus diselesaikan dengan penjatuhan hukuman. Jika tidak, menurut dia, berarti tidak ada pemurnian kembali citra ABRI. "Secara kasar, dibutuhkan sangat adanya kambing hitam ini untuk memurnikan kembali citra ABRI".

Saat ini yang menentukan tingkat pelanggaran adalah panitera. Lembaga itu yang menyampaikan hasil penyelidikannya ke oditur militer serta mempertimbangkan apakah bahan tersebut cukup untuk diajukan ke Mahmil.

Menyinggung hukuman yang pantas selain pembebastugasan, menurut Rais, hasil dari DKP akan menentukan orang akan di-Mahmilkan atau tidak. Sekali masalahnya masuk ke Mahmil, menurut dia, tidak mungkin kalau tidak bersalah.

"Saya kira ke-11 prajurit Koppassus itu sudah diinterogasi dengan intensif sekali sehingga disebut siapa pemberi perintah. Dan saya kira apakah mungkin Kol. Inf. Chairawan berbuat sendiri?"

Bagaimanapun, kata dia, pihaknya merasa senang karena sudah sampai ke DKP. Berarti, jelasnya, ada usaha untuk pemurnian kembali citra ABRI. "Tetapi yang jelas hendaknya kita belajar dari pengalaman ini, terutama perwira-perwira muda."

Yang menjadi masalah di ABRI, menurut dia, karena adanya pengabdian terhadap perwira yang lebih senior.

Hal itu dimulai dari perbuatan Soeharto terhadap Soekarno, kemudian ketika menggeser Abdulharis Nasution karena dinilai terlalu kritis. "Di situ terlihat penurunan penghargaan terhadap yang lebih tua."

Dia mengingatkan masyarakat hendaknya tidak melupakan bahwa karier Menhankam/Pangab jenderal Wiranto, Kasad Jenderal Subagyo, Menko Polkam Feisal Tanjung dan Prabowo merupakan karier utang budi. "Mana ada dalam empat tahun, dari Pangdam bisa menjadi Pangab? Kalau dalam perang besar, terbukti di lapangan. Kalau [kenaikan pangkat] ini pertempuran apa yang ada di sini."

Di Rusia, katanya, kehadiran perwira senior tidak pernah langsung dilepas namun tetap diberi jabatan sebagai staf penasehat.

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Prabowo Diperiksa tanpa Pengamanan Khusus

Objektivitas Subagyo Diuji, Akankah Agum "Balas Dendam"?

Hartas: Prabowo Pasti Bersalah

Jakarta, JP.-

Hari ini, giliran mantan Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto diperiksa tim DKP. Pemeriksaan terhadap menantu mantan presiden Soeharto yang diduga ikut bertanggung jawab terhadap kasus penculikan para aktivis prodemokrasi ini sekaligus menjadi ujian bagi Ketua Tim DKP Jenderal TNI Subagyo.

Beranikah KSAD membuat kesimpulan yang objektif terhadap Prabowo? Pertanyaan ini muncul karena di antara dua jenderal ini memiliki sejarah khusus. Subagyo dulu dikenal sangat dekat dengan Soeharto, sedangkan Prabowo adalah menantu mantan presiden yang berkuasa selama 32 tahun itu. Subagyo juga termasuk orang yang ikut mengader Prabowo. Saat ia menjadi Dan Kopassus, Prabowo adalah wakilnya.

Subagyo yang ditanya wartawan tentang munculnya keraguan akan objektivitas pemeriksaan terhadap Prabowo ini menyatakan akan bertindak adil. "Prabowo memang orang Kopassus. Saya juga mantan Dan Kopassus. Tetapi, karena ini tugas, saya pun harus bertindak adil dan objektif," ujarnya dalam sebuah kesempatan berbincang-bincang dengan beberapa wartawan di Jakarta baru baru ini.

Menurut dia, dalam menjalankan tugas, tim DKP maupun dirinya tidak akan melihat siapa itu Prabowo, atau dari mana asalnya. Tetapi yang harus dilakukan, katanya, bagaimana tim DKP bisa melaksanakan tugas itu dengan baik.

Kalau Subagyo dipertanyakan objektivitasnya karena punya hubungan baik dengan Prabowo, lain halnya dengan mantan Dan Kopassus yang kini menjadi Gubernur Lemhannas Letjen TNI Agum Gumelar. Karena antara Prabowo dan Agum dikabarkan pernah berseteru dalam kasus PDI yang mengakibatkan menantu Ahmad Taher ini "dirumahkan" dua tahun, akankah ia menggunakan forum ini sebagai ajang balas dendam?

Berbagai pertanyaan itu memang tak bisa dijawab sekarang. Objektivitas pemeriksaan terhadap sejumlah perwira yang diduga bertanggung jawab terhadap penculikan para aktivis ini baru bisa dilihat setelah tim DKP mengumumkan hasilnya.

Yang jelas, Kadispenad Brigjen TNI I Made Putu Ray yang dihubungi *Jawa Pos* di Jakarta kemarin menjelaskan, rencana pemeriksaan Prabowo hari ini tidak ada persiapan khusus. Pemeriksaan, katanya, dilakukan seperti biasanya, ketika tim DKP mengawali pekerjaannya memeriksa Kolonel Inf Chairawan pada Selasa lalu.

Ia juga menegaskan tidak akan ada pengamanan khusus dalam pemeriksaan jenderal yang kariernya melesat bak meteor dan dikenal sangat ambisius ini.

"Lihat saja besok (hari ini), nggak akan ada pengamanan khusus. Ya, biasa-biasa sajalah," ujar alumnus Akabri 1971 ini.

Mengapa tak ada pengamanan khusus? Menurut Putu Ray, hal ini disebabkan pemeriksaan Prabowo oleh tim DKP akan dilakukan secara tertutup. Tempat sidangnya pun di tempat khusus, di lingkungan Mabesad sehingga ia tidak khawatir akan ada persoalan khusus dengan pengamanan.

Maksudnya, kalau tidak ada pengamanan khusus khawatir ada sesuatu...? "*Nggak* usah khawatir. Kalau khawatir, apa yang dikhawatirkan. Semuanya *kan* sudah berjalan seperti biasa," katanya.

Pemeriksaan Prabowo ini, menurut jadwal, akan dimulai pada pukul 09.00 WIB. Sidang dipimpin langsung Ketua Tim DKP KSAD Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo dengan Sekretaris Kasum ABRI Letjen TNI Fachrul Razi. Anggota tim DKP dipastikan akan hadir seperti saat memeriksa Chairawan dan Muchdi Pr.

Para anggota tim DKP ini terdiri atas Kassospol ABRI Letjen TNI Susilo Bambang Judoyono, Gubernur Lemhannas Letjen TNI Agum Gumelar, Irjen Dephankam Letjen TNI Yusuf Kartanegara, Danjen Akabri Laksdya Ahmad Sutjipto, Pangkostrad Letjen TNI Jamari Chaniago, dan dua nggota cadangan masing-masing Wakasad Letjen TNI Sugiyono dan Letjen TNI Ary J. Kumaat (pati Mabes ABRI).

Seperti yang pernah disampaikan ketua tim DKP, Prabowo dalam pemeriksaan kali ini akan mendapatkan fasilitas pendamping. Pendamping ini bertugas membantu Prabowo menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pasal-pasal hukum. Pendamping ini juga diberikan tim DKP kepada dua terperiksa terdahulu, yakni mantan Dangroup IV/ Kopassus Kolonel Inf Chairawan dan mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi Pr.

PASTI BERSALAH

Meski belum ada kesimpulan dari Tim DKP (Dewan Kehormatan Perwira), mantan Kassospol ABRI Letjen (Pur) Harsudiono Hartas yakin bahwa Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi Pr, dan Kol Inf Chairawan bersalah dalam kasus penculikan para aktivis prodemokrasi. Namun, seberapa jauh tingkat kesalahan mereka, itu bergantung pada hasil pemeriksaan DKP.

Mengapa Hartas begitu yakin? Ia lantas mengungkapkan logika sederhana. Menurut dia, tidak mungkin sampai dibentuk DKP untuk memeriksa kalau memang mereka tidak bersalah. Apalagi, ketiganya sudah mempunyai pangkat cukup tinggi di kalangan militer. Ibaratnya, tak ada akibat tanpa sebab-sebab tertentu.

Sementara itu, Menhankam/ Pangab Jenderal TNI Wiranto kepada wartawan di Solo kemarin mengatakan bahwa pihaknya belum menerima hasil laporan dari DKP. "Belum ada laporan dari DKP," katanya singkat, seusai mengikuti acara pemberian modal

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

edia:			Tanggal					Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25 31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26	Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27	Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28	April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29	Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30	Juni	Desember	2003

DKP Periksa Mayjen TNI Muchdi PR

*. Edi Sudradjat: Rakyat Sudah Dilukai

Jakarta, Kompas

Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dipimpin Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo di Markas Besar (Mabes) TNI AD Jalan Merdeka Utara Jakarta, Kamis (6/8), melakukan pemeriksaan sekitar lima jam terhadap mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen TNI Muchdi Purwopranjono.

Dengan demikian, hanya dalam waktu singkat setelah pembentukannya Senin (3/8) lalu, DKP melakukan gerak cepat dengan memeriksa Komandan Grup IV Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) Kolonel (Inf) Chairawan hari Selasa (4/8), dan meninjau lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara (TKP) di Markas Kopassus serta Mako Grup IV Kopassus di Cijantung Jakarta Timur hari Rabu (5/8).

Para anggota DKP nampak mulai berdatangan ke Mabes TNI AD sejak pukul 08.30 WIB. Di antaranya tampak Wakil Ketua DKP masing-masing Letjen TNI Fachrul Razi (Kasum ABRI) dan Letjen TNI Yusuf Kertanegara (Irjen Dephankam), anggota DKP Letjen TNI Agum Gumelar (Gubernur Lemhannas), Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono (Kassospol ABRI), Letjen TNI Djamari Chaniago (Panglima Kostrad), Laksdya TNI Achmad Sutjipto (Danjen Akabri) dan anggota cadangan DKP, mantan Komandan Sesko ABRI Letjen TNI Arie J Kumaat.

Mayjen TNI Muchdi PR datang ke Mabes TNI AD sekitar pukul 08.00 WIB dengan pakaian dinas lengkap dan menumpangi sebuah mobil Mitsubishi Galant V6 yang merupakan mobil dinas Hankam bernomor 3666-05 dan masuk ke gedung utama. Sidang pemeriksaan DKP dimulai pukul 09.00 WIB

Meski sidang DKP dilaksanakan tertutup, beberapa wartawan tampak setia menunggu di tempat parkir mobil anggota DKP yang berada di sebelah gedung tempat pemeriksa, namun mereka akhirnya digiring ke kantor Dinas Penerangan Mabes AD. Beberapa di antaranya menunggu di seberang jalan Mabes TNI AD.

Pukul 12.25 WIB, mantan komandan Baret Merah ke-16 ini tampak keluar dari gedung utama menuju ke mobil yang diparkir di samping kiri depan gedung tersebut. Lima menit kemudian Mayjen Muchdi keluar lagi dari dalam mobil dinasnya dan masuk kembali ke gedung utama. Ia meninggalkan gedung tempat pelaksanaan sidang DKP tersebut pukul 14.05 WIB. Bila dihitung sejak waktu kedatangannya, Muchdi melewatkan waktu sekitar lima jam di Mabesad.

Sekitar pukul 14.45 WIB, sebuah mobil Range Rover warna hitam metalik milik Letjen TNI Prabowo Subianto dengan pelat nomor Mabes ABRI 1-01, tampak masuk ke Mabes TNI AD. Mobil tersebut keluar sekitar 30 menit kemudian.

Pukul 15.35 WIB, seluruh anggota DKP tampak meninggalkan Mabes TNI AD. Kasum ABRI Letjen TNI Fachrul Razi tampak keluar paling awal berturut-turut kemudian diikuti oleh Letjen TNI Agum Gumelar, Letjen TNI SB Yudhoyono, Laksdya TNI Achmad Sutjipto, Letjen TNI Yusuf Kertanegara kemudian Letjen TNI Arie J Kumaat. Pangkostrad Letjen TNI Djamari Chaniago terakhir meninggalkan Mabes TNI AD sekitar pukul 16.30 WIB.

Secara terpisah, Menhankam/ Pangab Jenderal TNI Wiranto, usai acara panen perdana kedelai ABRI Manunggal Pertanian di Desa Sukamelang, Kabupaten Subang, Kamis, mengatakan, masyarakat diharap sabar menunggu hasil penyelidikan yang sedang dilakukan DKP. Proses peradilan yang dilaksanakan oleh ABRI itu tetap sesuai dengan hukum positif yang berlaku. "Jadi tunggu saja, sejak awal saya mengatakan sabar, masyarakat agar sabar menunggu hasil dari proses peradilan yang dilaksanakan oleh ABRI," katanya.

Rakyat dilukai

Secara terpisah, mantan Menhankam Edi Sudradjat mengatakan, rakyat mengharapkan agar DKP bekerja secara sungguh-sungguh. Persoalannya, rakyat sudah dilukai dan citra ABRI sangat rusak dan terpuruk.

"Kalau dia (DKP) tidak sungguh-sungguh membongkar, mengusut, serta menghukumnya, maka citra ABRI tidak akan pulih. Apa artinya ABRI tanpa rakyat, apa artinya ABRI kalau dia melukai rakyat," kata Edi ditanya pers di Jakarta, Kamis (6/8) saat hadir dalam acara pembentukan Barisan Nasional.

Menjawab pertanyaan apakah dirinya yakin serta optimis DKP akan mampu membongkar siapa yang bersalah sampai ke pucuk pimpinannya, Edi mengatakan, "Kita harus sungguh-sungguh, kalau tidak ABRI akan ditinggalkan rakyat."

Menanggapi pertanyaan tentang mantan Komandan Jenderal Kopassus Letjen Prabowo Subianto, Edi mengatakan, Prabowo harus diusut dan ditindak.

(ama/mar/pep)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☑ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Amien: Soeharto perlu diperiksa DKP

JAKARTA (Bisnis): Ketua PP Muhammdiyah M. Amien Rais menyatakan selain mantan Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, mantan Presiden Soeharto juga harus bertanggung jawab dan diperiksa oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) guna mengungkapkan kasus penculikan aktivis.

"Kita harapkan perwira seperti Prabowo tidak menyembunyikan dan membalikkan fakta sedikit pun. Karena selain Prabowo yang harus bertanggungjawab tentunya masih ada lagi sejumlah jenderal perlu dimintai keterangan termasuk mantan Presiden RI Soeharto sebagai Pangti ABRI," katanya menjawab wartawan menanggapi pembentukan DKP, di sini, kemarin.

Amien menyatakan yakin bahwa 'dalang' semua kejadian dan peristiwa penculikan aktivis dan tokoh LSM tidak lepas dari perintah dan instruksi Soeharto selaku Panglima Pertinggi ABRI.

"Kalau didasari logika ilmu tentara, seorang jenderal berbintang tiga tidak akan melaksanakan perintah sendiri, mesti atasannya juga tahu," kata dia.

Ditanya apakah mantan Pangab Feisal Tanjung juga bisa diduga terlibat, Amien menyatakan, "Ya, bisa saja. Karena itu saya minta agar Prabowo jangan sampai menyembunyikan sepotong fakta pun karena saya dengar akan ada sejumlah jenderal berbintang tiga, empat dan lima yang akan diseret juga."

Ketika ditanya apakah pembentukan DKP ini bisa menyelesaikan masalah, Amien menyatakan, "Saya selalu optimis[tis], mudah-mudahan dengan terbentuknya DKP masalah yang dihadapi bisa diatasi," kata dia.

ABRI, lanjutnya, harus menerima kenyataan karena selama ini selalu dianggap pahlawan ternyata ada penghianat bangsa yang harus diseret ke pengadilan militer.

Menjawab pertanyaan apakah mungkin pengadilan militer mengadili Soeharto sementara Pangab Wiranto pernah menyatakan ABRI akan melindungi Soeharto, Amien mengatakan, "Kalau memang Soeharto itu bersalah tanpa harus dilihat pangkatnya apakah beliau bintang lima atau jenderal besar sekalipun, proses hukum harus tetap ditegakkan."

Sidang terbuka

Sementara itu, anggota Komnas HAM Bambang W. Soeharto mengatakan bila ada pelanggaran pidana yang dilakukan perwira tinggi lebih baik persidangan dilakukan secara terbuka melalui Mahmil.

Kendati demikian dia memandang perlu adanya DKP untuk memilah-milah masalah sanksi kemiliteran dan sanksi pidana. "Kalau dalam kasus Santa Cruz pemeriksaan DKP bersifat tertutup, untuk kasus sekarang ini saya rasa kita bisa mempertanyakan hasil DKP. Situasinya sekarang berbeda." **(espos/04)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA		1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA		2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA		3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA		4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN		5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Seharusnya Langsung ke Mahmil

Jakarta, Kompas

Desmond J Mahesa - salah seorang korban penculikan - merasa heran dengan keputusan Panglima ABRI. Ia malah menduga, jangan-jangan ada kekuatan yang luar biasa, yang tidak bisa disentuh publik. Buktinya, ketiga perwira tinggi itu tidak langsung dibawa ke Mahkamah Militer (Mahmil).

"Sebagai korban, saya melihat *kok* bisa begini? Kita sulit *dong* untuk maju karena kesalahan masa lalu ditutupi untuk kepentingan kelompok. Seharusnya, ketiga perwira tinggi itu langsung dibawa ke Mahmil. Institusi ABRI sempat terpuruk 'kan karena tidak adanya keterbukaan dan kejujuran," tegasnya ketika dihubungi di Jakarta, Senin (24/8).

"Kita mungkin terlalu banyak berharap selama ini akan adanya kejujuran. Makanya, ke depan jangan berharap terlalu banyak," ujar Desmond lagi dengan nada pesimis, ketika ditanya tanggapannya tentang keputusan Panglima ABRI.

Nada pesimis juga terlontar dari ayah kandung Petrus Bimo Anugerah, DT Utomo Rahardjo, yang sampai saat ini terus berharap ada kepastian mengenai nasib anaknya yang telah hilang sejak akhir Maret lalu. Ia mengaku tidak terlalu emosional mendengar putusan Panglima ABRI itu. Namun Utomo makin tidak terlalu percaya terhadap hukum.

"Kita mengharapkan kepastiannya. Yang penting buat kami bukan DKP (Dewan Kehormatan Perwira) atau apa pun. Yang penting, soal nasib anak saya dan yang senasib itu dijawab," tuturnya.

Sebab itu, Utomo menyatakan akan terus mempertanyakan hal itu kepada Panglima ABRI dan Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI. "Mohonlah juga kepada yang sepuluh (anggota Kopassus yang tengah diperiksa Puspom ABRI) itu. Kalau diperiksa, ya bisa memberikan jawaban di mana anak-anak kami itu," tuturnya.

Koordinator Badan Pekerja Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Munir, menyatakan, tidak melihat adanya langkah maju ABRI dalam proses penegakan hukum secara transparan dan bertanggung jawab.

Karena itu, Kontras mendesak Puspom ABRI untuk segera menjalankan fungsinya sebagai institusi penyidik yang wajib memeriksa ketiga Pati itu sebagai tersangka. Panglima ABRI juga diharapkan tidak menghalangi proses penegakan hukum dalam menindaklanjuti hasil-hasil pemeriksaan awal.

Yang lebih mendesak bagi Kontras adalah agar Pangab segera melepaskan korban penculikan yang sampai saat ini belum kembali ke keluarganya. "Tindakan menculik, menghilangkan orang, dan merampas kemerdekaan orang bukan hanya masalah intern ABRI, melainkan menyangkut keselamatan dan kemerdekaan orang lain. Karena itu, Puspom ABRI harus segera memeriksa pidananya untuk dilanjutkan ke Mahmil. Kalau itu tidak dilakukan, ABRI tidak melakukan reformasi sebagaimana yang diklaimnya sendiri," tandas MM Billah dari Dewan Penasihat Kontras.

Menurut Munir, sembilan orang yang diakui Prabowo telah diculik tampaknya menunjuk pada sembilan korban penculikan yang kini telah kembali. Itu menunjukkan adanya upaya untuk tidak mengakui bahwa 12 orang lainnya adalah korban penculikan juga.

Mengecewakan

Abdul Hakim Garuda Nusantara, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), juga meng-harapkan agar Puspom ABRI segera memeriksa Prabowo. Hal senada diucapkan pengajar FH-UI Dr Kastorius Sinaga, J Kristiadi dari CSIS, praktisi hukum Luhut MP Pangaribuan, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) RO Tambunan, mantan Sekjen Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (Ismahi) Asep Wahyuwijaya, anggota Komnas HAM Mayjen (Purn) Samsudin dan Albert Hasibuan, serta Ketua F-PP DPR Zarkasih Nur dan Wakil Ketua F-KP DPR Abu Hasan Sazili. Mereka dihubungi secara terpisah, Senin.

Sinaga berpendapat, keputusan Pangab itu merupakan langkah awal untuk memuaskan tuntutan masyarakat. Namun melihat adanya indikasi yuridis seperti diungkap para korban, yang sekaligus mencerminkan adanya pelanggaran HAM, maka penyelesaian secara yuridis memang sangat diperlukan.

Tambunan menilai, sikap pimpinan ABRI belum menunjukkan adanya keinginan ABRI menuntaskan masalah. "Seharusnya, pimpinan ABRI langsung menyerahkan berkas ketiga perwira tinggi itu ke Oditurat Militer. Yang sekarang terjadi masih belum menyentuh rasa keadilan rakyat," kata Tambunan.

Pangaribuan menyatakan, harapan masyarakat dalam pemeriksaan oleh DKP bukan hanya pemecatan Prabowo. "Tapi persoalan ini lebih ke penegakan hukum. Harus ada penjelasan soal peran Prabowo dalam kasus ini. Perlu ada klarifikasi yang jelas dan tuntas soal peran ketiga perwira ABRI itu," katanya.

Samsudin yang pernah bertugas di lingkungan Kopassus malah berpendapat, keputusan mengakhiri dinas kemiliteran Prabowo justru akan menimbulkan kesulitan bagi proses hukum secara militer. "Bisakah orang sipil di-Mahmil-kan?" tanyanya.

(Tim Kompas)

Hal. 1/.....
Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Kemal: Sanksi Itu Terlalu Ringan

Jakarta, JP.-

Sudah cukup adilkah sanksi untuk Prabowo Subianto dan kawan-kawan? Sejumlah jenderal purnawirawan ABRI menyatakan terlalu ringan. Yang menyatakan demikian, antara lain, Mantan Pangkostrad Letjen TNI (Pur) Kemal Idris dan mantan Kassospol ABRI Letjen TNI (Pur) Bambang Triantoro.

Menurut Kemal, sanksi tersebut tak sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuat Prabowo, Mayjen Muchdi Pr, dan Kolonel Chairawan. "Jika tidak ditindaklanjuti, keputusan Pangab yang hanya menjatuhkan sanksi demikian bisa mencoreng nama ABRI. Sebagai mantan ABRI, saya ikut malu dengan aib yang telah mereka perbuat," ucapnya.

Kemal menginginkan Pangab menindaklanjuti sanksi itu dengan membawa Prabowo ke mahmil. Hal senada diungkapkan Bambang Triantoro. Ia mengatakan, meski sudah ada sanksi administratif, ketiga perwira tersebut harus diseret ke mahmil. Bahkan, tak tertutup kemungkinan mereka diadili di pengadilan negeri, jika ada keluarga korban penculikan menuntut mereka.

"Suara" Kemal Idris lebih galak lagi. Menurut dia, Prabowo mestinya tak sekadar dipensiunkan atau disipilkan. Tapi, mestinya ia dipecat dengan tidak hormat dan dimahmilkan. "Sebab, lewat mahmil, akan diketahui siapa-siapa pejabat yang terlibat kasus penculikan itu," tandas Kemal.

Kemal juga menyayangkan, pemeriksaan DKP terhadap ketiga perwira tersebut ternyata belum mengungkap nasib empat belas aktivis prodemokrasi yang hingga kini belum ditemukan. "Dengan adanya pengakuan Prabowo, Muchdi, dan Chairawan, logikanya, nasib keempat belas aktivis yang belum ditemukan itu bisa terungkap. Tetapi, kenapa hal itu justru tidak dilakukan," tanyanya.

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☑ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Dr Salim Said:

Pemberhentian Prabowo Menjadi Yurisprudensi ✓

Jakarta, 25 Agustus

Keputusan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto hari Senin (24/8) memberhentikan mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto dari dinas militer adalah sebuah yurisprudensi atau preseden.

Kalau pimpinan ABRI selanjutnya tidak juga merespons positif tuntutan masyarakat akan kasus-kasus lainnya, maka justru orang akan bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik keputusan pemecatan itu?, demikian pendapat pakar militer Dr Salim Said.

"Apakah keputusan itu memang untuk mentargetkan Prabowo, atau menjadikan Prabowo sebagai target, untuk disingkirkan? Pertanyaan itu akan muncul kalau pimpinan ABRI hanya berhenti pada penuntasan kasus penculikan saja," tutur Salim Said ketika dihubungi *Pembaruan*, Selasa (25/8) pagi.

Ia menganggap keputusan sebagai sebuah preseden karena menurutnya, keputusan itu tercipta setelah ada tuntutan dari masyarakat untuk menuntaskan kasus penculikan, yang lalu ditindaklanjuti dengan dibentuknya Tim DKP (Dewan Kehormatan Perwira), di mana tim ini kemudian memberikan saran dan Pangab lalu mengambil keputusan.

Sementara saat ini juga ada tuntutan-tuntutan masyarakat kepada ABRI untuk menuntaskan kasus-kasus lainnya. Sehingga kalau pimpinan ABRI hanya berhenti pada kasus penculikan dan tidak merespons positif terhadap kasus-kasus lainnya, maka tentu saja orang akan bertanya ada apa di balik keputusan itu.

"Mengapa keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan dituntaskan, sedang kasus-kasus lainnya tidak?" tutur Salim Said yang menjadi Analis Politik Senior pada Biro Konsultasi BRRC (Banking Reform & Reconstruction Corporation).

Dikatakannya juga, melihat dari proses awalnya keputusan pemecatan Prabowo itu juga tidak bisa dipisahkan atau tetap ada sangkutpautnya dengan gerakan-gerakan pembela hak asasi (LSM) yang sejak semula menuntut keras untuk dituntaskannya kasus penculikan itu. Sehingga kalau mereka pun hanya berhenti pada kasus itu, maka orang juga akan bertanya-tanya mengapa gerakan LSM/hak asasi tidak membela orang-orang Islam yang menjadi korban pada kasus-kasus lain Para korban itu kan juga warga negara Indonesia yang harus mendapat keadilan dan dibela hak-hak asasinya.

Salim Said mengakui, memang dalam setiap keputusan pengadilan atau administrastif itu pasti akan membuat orang puas atau tidak puas. Tapi dalam keputusan Menhankam/Pangab kemarin itu ia melihatnya justru jauh ke depan dalam kerangka yang lebih luas, dengan mengatakan keputusan itu sebagai yurisprudensi. Jadi saat ini, menurutnya, dua pihak baik Menhankam/Pangab dan para advokat hak asasi akan tertantang untuk juga mau dan mampu menuntaskan berbagai kasus lain di Tanah Air yang melibatkan para personel ABRI. Sebab kemarin sudah ada preseden yang tercipta. (E-2)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Ketua F-PP: Sanksi itu tak Cerminkan Rasa Keadilan

JAKARTA (Media): Kalangan DPR, praktisi hukum maupun Kontras belum puas dengan keputusan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto yang hanya memberi sanksi administratif kepada Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kolonel Inf Chairawan berkaitan dengan kasus penculikan sejumlah aktivis prodemokrasi beberapa waktu lalu.

Mereka yang diwawancarai adalah Ketua F-PP DPR Zarkasih Nur, Sekretaris F-PP DPR Bachtiar Chamsyah, dan Koordinator Kontras Munir. Sedangkan Wakil ketua F-KP DPR bidang Umum Chaerudin Harahap, Prof Sutandyo, dan Letjen TNI Soeyono menilai putusan tersebut sudah maksimal dan terbaik bagi ABRI.

Mereka mengemukakan pendapatnya secara terpisah kemarin menanggapi keputusan Pangab terhadap tiga pentolan pasukan elite TNI-AD Kopassus dalam kasus penculikan para aktivis. Kemarin, Pangab Jenderal TNI Wiranto memberi sanksi mengakhiri masa dinas Letjen TNI Prabowo dalam jajaran ABRI. Sementara Mayjen TNI Muchdi dan Kol Chairawan dibebaskan dari semua tugas dan jabatan struktural ABRI.

Ketua F-PP DPR RI Zarkasih Nur mengatakan putusan tersebut sama sekali tidak tuntas dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Putusan baru dipandang adil jika kasus tersebut dibawa ke Mahkamah Militer.

"Kalau sekadar seperti itu pasti masyarakat tidak puas. Karena itu putusan setiap kasus harus tuntas agar tidak menimbulkan tanda tanya baru lagi," kata Zarkasih Nur.

Menurut dia, jika kesalahan Prabowo tersebut secara militer tidak bisa dibawa ke mahkamah militer, maka para korban penculikan maupun keluarga korban dapat membawa Prabowo ke pengadilan negeri dan memperkarakannya baik secara pidana maupun perdata.

Sedangkan Sekretaris F-PP DPR Bachtiar Chamsyah menyatakan kaget terhadap keputusan Pangab tersebut. Terlepas dari berat ringannya hukuman itu, yang pasti, masyarakat tidak puas.

Menurut Bachtiar, sejak semula F-PP menginginkan agar kasus penculikan yang melibatkan satuan elite TNI AD ini digelar ke peradilan militer atau Mahkamah Militer. Keinginan F-PP ini semata-mata agar masalahnya menjadi taransparan dan tidak terkesan ditutup-tutupi. Sebab, selama ini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat beraneka ragam. Ada yang mengaitkannya dengan Pangti ABRI. Pangab, dan pimpinan TNI AD.

Sudah tepat

Sebaliknya Wakil Ketua F-KP DPR bidang Umum Chaeruddin Harahap menilai keputusan Pangab itu sudah tepat. Dia tidak sependapat jika disebut sanksi itu terlalu ringan.

Dikatakan, bagi seorang perwira seperti Prabowo, secara moral sanksi hukuman administratif sudah berat. lebih-lebih harus mengakhiri tugas dari dinas aktif militer.

Pendapat senada dikemukakan anggota Komnas HAM Prof Dr Soetandyo Wignyosubroto. Menurut dia keputusan Pangab tersebut sudah maksimal.

"Untuk hasil DKP, saya kira, itu sudah maksimum sekali. Itu sudah berat sekali, apalagi bagi Jenderal Prabowo yang sejak kecil mencita-citakan hidup di lingkungan dan menjadi militer," katanya.

Sedangkan Sekjen Dephankam Letjen TNI Soeyono mengatakan keputusan Pangab itu merupakan yang terbaik bagi ABRI.

"Sebenarnya bagi ABRI ini sangat disayangkan, karena ABRI kehilangan perwira-perwira terbaiknya. Namun, tindakan tegas sangat perlu bila sudah menyangkut nama baik ABRI," ujar mantan Kasum ABRI itu.

Keputusan ini, katanya, juga untuk memperlihatkan kepada masyarakat dunia bahwa ABRI serius menangani kesalahan intern. Sedangkan untuk dalam negeri menjadi indikator pemulihan kepercayaan kepada ABRI.

Sedangkan Koordinator Kontras Munir tidak puas dengan keputusan Pangab itu dan tetap menuntut tindakan pidana terhadap Prabowo Cs.

"Putusan ini membuat pesimis masyarakat. Tidak ada langkah maju dari ABRI dalam menangani tindakan kekerasan. ABRI harus membuktikan itikad baiknya membawa mereka ke Mahmil," tandasnya.(Man/Was/Ant/D-12)

Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☑ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Penanganan penculikan perkuat rupiah

JAKARTA (Bisnis): Rupiah ditutup menguat terhadap dolar AS sebesar Rp 300 (2,34%) menjadi Rp 12.800 menyusul menguatnya mata uang regional serta sentimen positif atas penanganan pemerintah atas kasus penculikan sejumlah aktivis.

"Membaiknya mata uang regional dan sentimen positif atas penanganan kasus penculikan oleh pemerintah yang mulai menunjukkan ketegasan dibandingkan dengan sebelumnya," ujar pialang bank lokal.

Menurut *Dow Jones Market Quotes*, rupiah ditutup pada Rp 12.800 per dolar AS kemarin, menguat dibandingkan dengan Rp 13.100 posisi Senin. "Rupiah berhasil menembus *level* psikologis Rp 13.000 per dolar di pasar Jakarta sebelum ditutup sedikit melemah," ujar dia. Kisaran perdagangan dolar AS antara Rp 12.775 sampai Rp 13.150.

Pialang itu menambahkan keputusan militer melakukan investigasi terhadap menantu mantan presiden Soeharto, Prabowo Subianto berkaitan dengan penculikan aktivis pro-demokrasi diterima baik pasar.

"Nampaknya tengah terjadi konsolidasi kekuatan dalam tubuh militer berkaitan dengan keputusan investigasi. Pelaku pasar melihat tindakan itu sebagai langkah awal dari kestabilan politik," papar dia.

Pialang memperkirakan rupiah kemungkinan bisa mencapai Rp 12.500 per dolar AS selama tidak kembali menembus Rp 13.000. "Rupiah hari ini [kemarin] mampu mencapai Rp 12.775 per dolar AS. Saya perkirakan jika rupiah tidak kembali di atas *level* Rp 13.000, dapat mencapai Rp 12.500 besok [hari ini]."

Menkeu Bambang Subianto optimistis rupiah akan menguat ke posisi yang lebih realistis menyusul dikucurkannya dana pinjaman CGI dan IMF sepanjang tahun anggaran 1998/99.

Menkeu mengatakan dengan disepakatinya komitmen pinjaman CGI maupun IMF dalam jangka pendek, belum memberi kontribusi maksimal terhadap penguatan rupiah. **(m2/dj)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003



Mayjen Syamsu berjabatan tangan dengan Eva Arnaz (isteri Hamdun yang korban penculikan).

Ramalan Tentang Prabowo Meleset

BINTANG anak ketiga dari begawan ekonomi Prof Dr Sumitro Djojohadikusumo sebelum Sidang Umum MPR Maret 1998, benar-benar bersinar. Betapa tidak, Prabowo Subianto yang saat itu berbintang dua langsung naik pangkat menjadi berbintang tiga. Itu karena pengangkatannya sebagai Panglima Kostrad dan masih merangkap sebagai Komandan Kopassus.

Tak pelak lagi, para pengamat militer langsung meramalkan menantu Presiden Soeharto (waktu itu), bakal menjadi orang nomor satu di jajaran ABRI. Bukan cuma itu, posisi presiden Indonesia juga termasuk yang disebut-sebut bakal diduduki Prabowo.

Pria kelahiran Jakarta, 17 Oktober 1951 ini dalam soal pangkat dan jabatan memang tergolong cepat melejit seperti di jalan tol. Malah, dianggap terlalu cepat. Prabowo adalah jenderal pertama dari alumni Akabri 1974. Dia hanya butuh waktu 11 tahun untuk mencapai pangkat brigadir jenderal (brigjen).

Segudang pengalaman diraihnya ketika diterjunkan ke daerah operasi Timor Timur (Timtim). Pasukan Kopassandha (kini Kopassus) di bawah pimpinan Mayor Prabowo berhasil menewaskan Presiden Fretelin Nicalao Lobato, Desember 1978. Prabowo juga berhasil menangkap Guide Soares (Panglima Angkatan Bersenjata Fretelin) dan Somotxo, anggota Komite Sentral dan Komandan Sektor Koliman (1976-1978).

Di Korps Baret Merah, Prabowo pernah jadi Wakil Komandan Detasemen 81 (pasukan antiteror). Setelah dua tahun membina pasukan antiteror, dia diangkat menjadi Komandan Detasemen 81 Kopassus.

Prabowo juga pernah menjadi Komandan Batalyon 320 Kujang II/Kostrad, Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17/Kostrad. Dari tahun 1993-1994 menjadi Komandan Grup 3/Pusdik Kopassus di Batujajar, Bandung.

Dia kemudian menjadi Komandan Kopassus dari Desember 1995 hingga Februari 1998 setelah menjabat Wakil Komandan Kopassus selama satu tahun.

Di bidang pendidikan, Prabowo memiliki pendidikan khusus yang jarang dimiliki prajurit lain yakni pendidikan perang khusus di Amerika dan latihan khusus Antiteroris di Jerman Barat (sebelum bersatu).

Pangkat brigjen diraihnya November 1995. Setahun kemudian menyandang pangkat mayjen tepatnya Agustus 1996. Sedangkan pangkat Letjen diraih Prabowo Pebruari 1998.

Setelah Soeharto *lengser* dari jabatan presiden, Prabowo dimutasikan menjadi Komandan Sesko ABRI.(HAS/KUS)

KencingManis/

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Chairawan: Saya hanya Prajurit

BAKHTIAR PHADA/REP



Mantan Dan Grup IV/Kopassus Kolonel Inf Chairawan masih tampil seperti biasa. Tidak tampak tanda-tanda tertekan pada wajahnya. Sorot matanya tetap tajam. Rambutnya terpotong rapi, tidak begitu pendek. Yang membedakan dengan penampilan sebelumnya hanyalah bahwa kini tidak ada lagi tanda jabatan di saku dan tongkat komando di tangannya.

Penampilan Chairawan memang tidak mengesankan bahwa dia terpengaruh atas pemberitaan-pemberitaan tentang dirinya. Padahal, nama perwira Kopassus alumni Akabri tahun 1980 itu setiap hari selalu tercetak di hampir seluruh surat kabar baik nasional maupun daerah dalam kasus penculikan bersama Letjen TNI Prabowo Subianto dan Mayjen TNI Muchdi Purwoprandjono.

Ketika *Republika*, secara kebetulan, bertemu dengan Chairawan di Markas Kopassus, Cijantung, kemarin, sikapnya tetap ramah dan bersahabat. Dia tidak segan-segan mengulurkan tangannya lebih dulu untuk berjabat tangan.

"Seperti yang Anda lihat, saya sehat-sehat saja," katanya sambil tersenyum tipis, ketika ditanya keadaannya. Menyinggung soal Dewan Kehormatan Perwira (DKP), sambil tersenyum ia berujar pendek, "Saya tidak bisa berkomentar. Saya hanya seorang prajurit."

Ketika ditanyakan apakah dia merasa dendam dengan pemberitaan-pemberitaan yang menyudutkan namanya, Chairawan menjawab, "Semua itu 'kan ada masanya, semua itu ada strateginya."

Suasana Kopassus sendiri, seperti diakui beberapa perwira baret merah kepada *Republika* tetap seperti biasa. "Kami tetap mengadakan pertandingan antar-RW untuk memperingati 17 Agustus. Kami tetap seperti biasa, main voli bersama," kata seorang perwira berpangkat mayor.

Begitupun ketika DKP, kemarin, meninjau markas korps elite TNI-AD itu suasana juga normal-normal saja. Para prajurit tetap menjalankan aktivitas sehari-hari.

"Kami di sini semua kan menjalankan perintah-perintah. Tidak mungkin kami melakukan tugas atas inisiatif sendiri. Dan kami tidak terpengaruh oleh pemberitaan-pemberitaan di koran," lanjut sang mayor. ■ bsa

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

ANALISIS

Prabowo, Patriot atau Bukan?

Oleh:
Soetjipto Wirosardjono


ALIS

"Kalau Prabowo bagaimana, Mas?" jawab seorang perwira tinggi TNI AD, tatkala saya menanyakan siapa kader pimpinan nasional dari unsur ABRI. "Masa kepada kita, Anda kasih pemimpin seorang Janggo (maksud saya Rambo)," jawab saya dengan niat sekadar bercanda menggoda kenalan tersebut yang kebetulan juga karib Letnan Jenderal Prabowo. Kemudian dari obrolan dan pengecekan ihwal tokoh yang pernah mendapat kehormatan dijagokan oleh teman-teman sebayanya (*peer*nya) itu, saya mendapat gambaran lebih berimbang tentang perwira tinggi yang kariernya meroket tersebut.

"Prabowo memang perwira pintar, berdisiplin, korek serta sangat hormat pada atasan dan menghargai yang lebih senior, biarpun perwira lebih tua itu pangkat dan jabatannya ketinggalan dibanding dia," cerita seorang kolonel purnawirawan yang pernah bertugas di mabes ABRI.

Mereka yang pernah bertemu muka dengan bungsu Profesor Soemitro Djojohadikoesoemo ini semua terkesan semangat pantang menyerahnya. Sebagai pimpinan ia sangat peduli nasib dan kondisi kehidupan anak buahnya. Karena itu, salah satu hal pertama yang dilakukan ketika baru diangkat sebagai Danjen Kopassus adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Tetapi kenapa di saat kritis, jenderal yang fasih berbahasa asing (Inggris, Belanda, Jerman, dan Prancis) ini terkesan gagal mengendalikan diri?

"Kepribadiannya memang terkadang mengesankan labil," kata seorang wartawan senior yang beberapa kali pernah berurusan dengan dia sebagai akibat hasil kerja reporternya yang kurang berkenan di hati sang jenderal. "Satu kali, dimaafkan, dua kali catat, tiga kali dianggap musuh," katanya menirukan Prabowo saat menakut-nakuti sang wartawan. Karena itu di masa lampau kalau dapat menghindar, korannya memilih tidak meliput berita tentang ABRI. Serba salah, cetusnya.

Lain lagi anak-anak muda yang ikut terbawa ketika sejumlah pemimpin umat Islam diundang Letjen Prabowo datang di markas Kopassus di Cijantung Jakarta, guna mendapat *briefing* mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan situasi politik dan keamanan terakhir tanah air sebelum SU MPR '93.

"Dahsyat sekali Mas," komentar salah satu yang hadir mengenai betapa 'pemihakan' Prabowo pada perjuangan umat Islam. Prabowo sampai dua kali mencium tangan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Dr Anwar Haryono. "Hati-hati, Dik! Kultur cium tangan Kyai hanya ada di NU lho, padahal Dr Anwar 'kan Muhammadiyah," kata saya menggoda anak muda yang telanjur kelewat gembira itu.

Dia belakangan juga mendengar bahwa *Mbah* Lim (Kyai Haji Muslim Puro) dari Klaten juga dimuliakan oleh Jenderal Prabowo. Apa yang sesungguhnya terjadi? Dalam percakapan saya dengan *peer group* Prabowo tadi saya memperoleh kesan bahwa belum signifikan pergeseran pandangan ABRI terhadap dimensi politik geliat umat Islam.

"Saya tersinggung tatkala dulu dalam suatu interogasi ditunjukkan seraya dikibar-kibarkan di depan mata, sebuah buku dengan judul yang bunyinya kurang lebih Islam dan Radikalisme," kata Dr Jimly Asshidiqie salah seorang asisten wakil presiden yang ketika muda aktif bergerak dalam organisasi remaja masjid dan pemuda Islam. Mereka menumbuhkan (mengaburkan) fanatisme, fundamentalisme, dan radikalisme dalam gerakan Islam.

"Bagaimana pendapat Anda tentang judi, lokalisasi, kristenisasi, dan riba vs bunga bank," pancing kenalan saya tadi, tatkala membicarakan tentang keanggotaan saya di ICMI. Pertanyaan itu justru saya terima sebagai isyarat hal-hal apa saja yang dia pandang selaku perwira ABRI, menjadi ganjalan atau reserve buat mendukung kepemimpinan nasional di tangan tokoh politik Islam karena saat itu sedang ramai Habibie yang kebetulan juga ketua ICMI hendak dicalonkan fraksi-fraksi di MPR sebagai wapres.

"Tinggalkan itu stigma lama tentang Islam sebagai ancaman," ujar seorang letnan jenderal purnawirawan, menirukan nasihat dia pada para juniornya. Umat Islam itu biarpun mayoritas tetapi secara politik mereka tidak akan jadi ancaman karena tidak pernah dapat bersatu, tambahnya.

Tidak pula ada satu orang pemimpin umat Islam pada saat ini, yang dapat diterima oleh semua jamiiyah. Karena itu rangkullah Islam, sebab yang mereka butuhkan cukup seorang pemimpin yang menjalankan syariat Islam dengan baik.

Contohnya, Habibie 'kan bukan seorang tokoh politisi Islam.

Saya kecewa dengan premis nasihat itu. Karena biarpun sahih tetapi tidak menunjukkan empati pada perjuangan umat Islam Indonesia untuk dapat meraih makna substantif dari partisipasi politiknya dalam wacana nasional. Kalau toh ada 'kemajuan' dalam menyikapi aspirasi umat Islam, ABRI sekarang berbeda dalam taktik dibanding dengan tahun 1980-an apalagi sebelumnya.

Dulu Letnan Jenderal (purn) Alamsyah Ratu Perwiranegara suka menggunakan ungkapan politik belah bambu, untuk menggambarkan bagaimana pemerintah khususnya ABRI saat itu menghadapi umat Islam. Seperti ulah orang membelah bambu, keutuhan umat dipecah, lalu sebagian diinjak kuat-kuat, tatkala bagian lainnya diangkat, untuk dirobek. Tujuan akhirnya memecah belah agar secara keseluruhan menjadi tidak berdaya.

Sekarang taktik yang dipakai tampak lebih halus, walaupun kadang kala datang mengimbangi pendudukan gedung MPR/DPR oleh para mahasiswa, sementara umat bertanya kok pada pakai sorban seperti pasukan Taliban dari Afghanistan saja? Kalau mau wajar 'kan pakai pici atau sarungan saja!

Bukankah gerakan massa bersorban yang disorot oleh kamera CNN dan media TV internasional lainnya kemudian disiarkan ke seluruh dunia dapat menjadi alat murah untuk menghancurkan reputasi gerakan Islam Indonesia?

Saat sekarang, operasi rupanya secara lebih halus dan persuasif ditujukan untuk merangkul, kalau perlu juga dengan memberi bantuan dana gerakan umat Islam yang dinilai berpotensi suatu ketika menjadi radikal, supaya potensi itu tidak memanifest dalam gerakan massa. Kemudian tatkala saatnya tepat menjerumuskan (*traps*) pengikut-pengikut fanatik gerakan ke arah perbuatan radikal yang memberi legitimasi untuk menghancurkan seluruh gerakan Islam dimana perlu.

Itulah yang terbaca dari rangkaian peri-

Kelas: .....

LSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

dia:		Tanggal	Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Gus Dur: DKP belum selesaikan masalah

JAKARTA (Bisnis): Ketua Umum PB NU KH Abdurrahman Wahid [Gus Dur] menilai Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dibentuk Menhankam/Pangab belum dapat menyelesaikan masalah dalam mengusut tuntas kasus penculikan sejumlah aktivis.

Gus Dur menyatakan untuk mengungkap masalah kasus penculikan sebaiknya melalui proses persidangan dalam pengadilan supaya masyarakat dapat mengetahui secara jelas. "Dibentuk DKP *sih* baik saja. Namun apa tidak lebih baik kalau melalui proses persidangan dulu," ujarnya.

Menurut dia, kalau hanya melalui proses pemeriksaan di DKP tanpa melalui pengadilan sebagaimana layaknya orang melakukan tindakan pidana, justru akan menimbulkan tanda tanya di masyarakat.

"Masyarakat *kan* sangat ingin tahu, sejauh mana penyalahgunaan wewenang dan kehormatan sebagai perwira yang dilakukan," katanya kepada *Bisnis* seusai mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum DPP PDI hasil Munas Megawati Soekarnoputeri, dan sejumlah tokoh Barisan Nasional (BN).

Tokoh BN yang ikut hadir dalam pertemuan di rumah Gus Dur di Ciganjur Jaksel tersebut a.l. Letjen TNI (Purn.) Kemal Idris, Letjen TNI (Purn.) Kharis Suhud, Letjen Marinir (Purn.) Ali Sadikin dan mantan Sekjen Golkar Rachmat Witoelar.

Salahi prosedur

Di tempat terpisah, Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir mengatakan DKP menyalahi prosedur dan cacat.

Janggal

Menurut Munir, terdapat kejanggalan dalam pembentukan DKP terhadap Surat Keputusan Pangab tentang pembentukan DKP bernomor SKEP/838/IV/95 tertanggal 30 April 1995. "Menurut SK itu DKP dibentuk setelah dilaksanakan persidangan di Mahkamah Militer (Mahmil) dan keputusan Mahmil menjadi bahan utama bagi DKP, bukan sebaliknya," kata Munir.

Bab I butir 7 tentang materi pelanggaran antara lain menyebutkan bahwa perwira yang diperiksa DKP disebabkan karena dikenakan hukuman pidana yang lebih berat dari hukuman tiga bulan dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang ia tidak dapat lagi dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan.

Dalam Bab III tentang sifat, pembentukan, susunan, tugas, dan wewenang dewan disebutkan, "DKP tidak berwenang mengoreksi, menilai, mencabut dan membatalkan putusan pemberhentian tidak dengan hormat dari Mahmil yang berwenang."

Butir itu, menurut Munir, jelas memperlihatkan bahwa DKP dibentuk setelah sidang Mahmil mengambil keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Pelanggaran kedua, lanjutnya, mengenai komposisi pemeriksa perwira yang diduga melanggar prosedur. Menurut SK itu, pemeriksa berjumlah tujuh orang, di mana tiga di antaranya harus berpangkat lebih tinggi dari yang diperiksa.

Pelanggaran ketiga, katanya, menyangkut perwira yang diperiksa. Menurut SKEP tersebut yang dapat diperiksa DKP hanya perwira tinggi seperti Letjen TNI Prabowo dan Mayjen TNI Muchdi. Lembaga tersebut menurut SK itu, kata Munir, tidak berwenang memeriksa Kol. Inf. Chairawan yang masih tergolong perwira menengah.

"Kami khawatir diikutsertakannya Chairawan dalam pemeriksaan DKP agar dia tidak buka mulut di Mahmil yang bersifat terbuka yang sebenarnya paling berwenang mengadili dia," kata Munir.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Penasehat Kontras M. Billah mengatakan selama ini masyarakat dipaksa menerima lembaga yang mereka tidak tahu dasar hukum pembentukannya.

Dalam bagian lain Munir mengatakan, utusan Kontras ke Davao, Filipina, Dadang Trisasongko, memastikan bahwa Herman Hendrawan yang mengaku korban penculikan, ternyata bukan Herman yang dicari Kontras. Kontras, katanya, akan mengusut latar belakang 'Herman' tersebut lebih lanjut.

Menurut Munir, saat ini Kontras juga tengah mengusut mayat tidak dikenal di Kepulauan Seribu yang ditemukan warga pertengahan Mei lalu. Saat ini kerangka mayat tersebut diperiksa Laboratorium Forensik UI.

"Ada dugaan itu kerangka Noval, korban penculikan," kata Munir. Namun untuk kepastian dia masih menunggu hasil penelitian yang diumumkan hari ini.

Sementara itu, Isaias Begonia, Kepala Konsulat Jenderal (Konjen) Filipina di Manado, menjelaskan pemerintah Filipina bekerja sama dengan Konjen Indonesia di Davao City sudah meneliti orang yang disebut sebagai Herman.

"Ternyata orang itu bukanlah Herman Hendrawan seperti yang diduga selama ini," katanya. **(k1/s8/04)**

Kelas: .....

Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Nama:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

William Liddle soal Pemeriksaan Prabowo Dkk

Bila Terbukti, harus Dibawa ke Pengadilan

NEW YORK — Pengamat politik Indonesia dari AS, William Liddle, mengatakan Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kolonel Chairawan, harus diajukan ke Mahkamah Militer, jika dalam pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terbukti terlibat kasus penculikan.

"Kalau dalam pemeriksaan DKP mereka terbukti terlibat dalam penculikan dan penganiayaan, demi tegaknya hukum, ya harus ke pengadilan," katanya di New York, Senin petang (Selasa pagi WIB).

Liddle mengatakan penculikan dan penganiayaan adalah kejahatan, bukan kesalahan prosedur atau pelanggaran disiplin keprajuritan. Karena masalah kriminal, yang bisa memeriksa bersalah atau tidak adalah pengadilan. Tidak cukup hanya terhenti pada DKP.

Pemeriksaan terhadap Prabowo dan lainnya, menurut dia, adalah demi kehormatan ABRI sendiri. "Itu semua agar ABRI tidak dicemooh di dunia internasional," tambahnya. Meski ia mengakui dengan kejadian ini bahwa nama baik Kopassus sebagai pasukan elite sudah cemar.

Meski sudah tercemar, ia tidak setuju kalau Korps Pasukan Khusus itu dibubarkan. "Dimana-mana negara tentu memerlukan pasukan elite. Yang perlu dilakukan adalah bukan pembubaran, tetapi pembersihan," katanya. Cara mengembalikan martabat Kopassus, adalah memfungsikan kembali pasukan ini sebagai penjaga keamanan rakyat dan negara dari ancaman luar, bukan justeru menembaki dan membunuhi rakyatnya sendiri.

Perdebatan tentang keberadaan DKP sampai saat ini masih bermunculan. Aktivis korban penculikan Andi Arief mengatakan yang dibutuhkan bukan DKP, melainkan sebuah dewan yang fungsinya memulihkan atau merehabilitasi nama baik ABRI yang saat ini sudah coreng-moreng dan centang-perenang oleh beberapa kasus.

Menurut Andi, dewan yang dibentuk itu harus bisa mengakomodir seluruh kasus tindak kekerasan militer selama 32 tahun Orde Baru berkuasa. "Seperti tindakan militer di Aceh, Kasus Lampung, Tanjung Priok, Haur Koneng, Timtim, atau Papua dan sebagainya," tambahnya. "Kalau yang dibentuk saat ini DKP khusus kasus penculikan, maka ini akan mubazir. Bagaimana dengan kasus tindak kekerasan militer lainnya?" tanyanya.

Ketua DPA AA Baramuli berpendapat bahwa kasus penculikan yang melibatkan para perwira ABRI bisa dilakukan deponir (penyimpanan perkara). Dan deponir ini dilakukan terutama menyangkut masalah-masalah yang bisa merusak dan mengakibatkan kepentingan bangsa terancam.

"Menhankam Pangab boleh melakukan deponir. Hal itu boleh dilakukan karena diatur berdasarkan UU," katanya di Gedung DPA, kemarin. "Kecuali memang kita tidak mau mentaati UU itu."

Mengenai pembentukan DKP Baramuli mengatakan bahwa dalam ABRI ada yang dinamakan DKP dan DHM (Dewan Hakim Militer). Perbedaannya, DKP menyangkut masalah kedisiplinan dan pelanggaran perintah atasan. Sedangkan DHM menyangkut pelanggaran tindak pidana perwira tersebut. Sehingga, lanjut Baramuli, jika perwira telah diperiksa oleh DKP, maka masalahnya bisa juga menjadi kasus pidana.

Sedang pengamat militer Dr Salim Said berharap masyarakat memberi kepercayaan dan kesempatan kepada DKP untuk bekerja. Menurutnya, pembentukan DKP telah menunjukkan keseriusan ABRI menyelesaikan persoalan.

Salim yakin, jika pada sidang DKP terungkap pelanggaran pidana, maka para perwira yang diperiksa akan diajukan ke pengadilan militer. "Saya percaya DKP tidak akan main-main dalam masalah ini," tegasnya seusai acara pengkajian dwifungsi ABRI di Sesko AD, Bandung, kemarin.

Salim menambahkan, aktivitas dan hasil kerja DKP juga akan berpengaruh terhadap citra pemerintah.

"Kalau sampai muncul penilaian minus dari masyarakat internasional dan publik dalam negeri terhadap hasil kerja DKP, tentu akan berdampak langsung pada upaya ABRI dalam menegakkan dirinya sebagai kekuatan hankam dan sospol di masa mendatang," ujarnya.

■ jok/vie/ant/oed

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☑ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Chairawan: Saya hanya Prajurit

BAKHTIAR PHADA/REP



Mantan Dan Grup IV/Kopassus Kolonel Inf Chairawan masih tampil seperti biasa. Tidak tampak tanda-tanda tertekan pada wajahnya. Sorot matanya tetap tajam. Rambutnya terpotong rapi, tidak begitu pendek. Yang membedakan dengan penampilan sebelumnya hanyalah bahwa kini tidak ada lagi tanda jabatan di saku dan tongkat komando di tangannya.

Penampilan Chairawan memang tidak mengesankan bahwa dia terpengaruh atas pemberitaan-pemberitaan tentang dirinya. Padahal, nama perwira Kopassus alumni Akabri tahun 1980 itu setiap hari selalu tercetak di hampir seluruh surat kabar baik nasional maupun daerah dalam kasus penculikan bersama Letjen TNI Prabowo Subianto dan Mayjen TNI Muchdi Purwoprandjono.

Ketika *Republika*, secara kebetulan, bertemu dengan Chairawan di Markas Kopassus, Cijantung, kemarin, sikapnya tetap ramah dan bersahabat. Dia tidak segan-segan mengulurkan tangannya lebih dulu untuk berjabat tangan.

"Seperti yang Anda lihat, saya sehat-sehat saja," katanya sambil tersenyum tipis, ketika ditanya keadaannya. Menyinggung soal Dewan Kehormatan Perwira (DKP), sambil tersenyum ia berujar pendek, "Saya tidak bisa berkomentar. Saya hanya seorang prajurit."

Ketika ditanyakan apakah dia merasa dendam dengan pemberitaan-pemberitaan yang menyudutkan namanya, Chairawan menjawab, "Semua itu 'kan ada masanya, semua itu ada strateginya."

Suasana Kopassus sendiri, seperti diakui beberapa perwira baret merah kepada *Republika* tetap seperti biasa. "Kami tetap mengadakan pertandingan antar-RW untuk memperingati 17 Agustus. Kami tetap seperti biasa, main voli bersama," kata seorang perwira berpangkat mayor.

Begitupun ketika DKP, kemarin, meninjau markas korps elite TNI-AD itu suasana juga normal-normal saja. Para prajurit tetap menjalankan aktivitas sehari-hari.

"Kami di sini semua kan menjalankan perintah-perintah. Tidak mungkin kami melakukan tugas atas inisiatif sendiri. Dan kami tidak terpengaruh oleh pemberitaan-pemberitaan di koran," lanjut sang mayor. ■ bsa

Kelas: .....

LSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

dia:		Tanggal	Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Kolonel Inf Chairawan, Kopassus, dan Perkara penculikan

"Saya Bersumpah, Tak Tahu Akhirnya Begini"

NAMA Kolonel Inf Chairawan tiba-tiba populer. Bukan karena dia ingin memopulerkan diri, tetapi karena dia perwira Kopassus yang kini sedang kesandung sial. Wawa –panggilan akrab Chairawan– kini masuk dalam salah seorang daftar tersangka kasus penculikan bersama Mayjen TNI Muchdi Pr. dan Letjen TNI Prabowo Subiyanto. Dan, kasusnya kini ditangani tim DKP yang dipimpin KSAD Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo.

Apa yang dilakukan kali pertama ketika kasus penculikan itu meledak dan nama Chairawan disebut-sebut sebagai tersangka? Wawa, menurut sumber *Jawa Pos*, hanya bisa pasrah. "Saya kan prajurit, hanya sekadar melaksanakan perintah," ujar sumber tadi menirukan pernyataan Wawa.

Ketika kasus penculikan terus diledakkan pers, Wawa pun sempat mondar-mandir mencari perlindungan. Di antaranya kepada salah seorang mantan Dankopassus. Hanya, siapa nama mantan Dankopassus itu, menurut sumber tadi tidak etis untuk dipublikasikan. Apa kata Wawa kepada mantan Dankopassus yang dimintai perlindungan itu. "Pak, saya bersumpah tidak tahu kalau akhirnya begini. Saya *kan* prajurit, hanya sekadar menjalankan perintah. Tolonglah saya, Pak! Saya mohon perlindungan."



Kolonel Inf Chairawan

Memang diakui, Wawa termasuk anak yang baik. Ketika di Kopassus, dia sudah menunjukkan dedikasi dan banyak prestasi yang menonjol. Putra kelahiran 44 tahun lalu dari keluarga berdarah Minang ini, pada Mei 1996, berhasil memimpin pembebasan penyanderaan di Irian Jaya. Wawa adalah teman seangkatan Letkol Inf Adel yang dulu meninggal karena menjadi korban pembebasan sandera di Irja pada 1996. Karena Prabowo Subiyanto –waktu itu menjadi Dankopassus– kehilangan anak emasnya (Adel), akhirnya giliran Wawa yang dijadikan orang kepercayaan Prabowo.

Bahkan, pulang dari pembebasan sandera di Irja –saat itu masih menjabat komandan Batalyon 22 Kopassus–, jabatan Dangroup IV/Kopassus bidang intelijen yang semula mau dihadiahkan kepada Letkol Adel (almarhum) akhirnya diberikan kepada Wawa.

Saat menjabat Dangroup IV/Kopassus inilah, Wawa kesandung sial. Wawa yang kini tercatat sebagai mahasiswa S-2 di ITB ini mendapat order dari atasannya untuk mengamankan para aktivis yang dianggap menggangu keamanan negara. Itu diucapkan sendiri oleh Wawa, seperti dikutip tabloid *DeTAK*. "Saya hanya menjalankan perintah atasan. Dan, tentu wartawan tahu siapa yang saya maksudkan atasan."

Wawa yang alumnus Akabri 1982 ini memang salah seorang perwira yang digadang-gadang Prabowo untuk diorbitkan. Konon, Wawa juga dipersiapkan menjadi Wadanjen Kopassus dengan pangkat jenderal berbintang satu. Tetapi karena Prabowo yang "menjanjikan" itu ikut kesandung musibah, akhirnya pupus harapan Wawa untuk bisa meniti karier di militer yang lebih tinggi.

Wawa yang kini dikaruniai dua anak –Tania, 13 tahun, dan Adit, 5 tahun– dari istri tercintanya, Irma, 37 tahun, tinggal menunggu vonis dari DKP. Apakah dia cukup diberi sanksi diberhentikan dari tugasnya di militer, atau justru lebih jauh lagi; kasusnya dibawa ke mahmilub. Jika itu benar-benar terjadi pada Wawa, beban dirinya akan makin berat. Meski Wawa sudah telanjur menjadi "korban", banyak perwira tinggi yang menyayangkan

Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Prabowo Cs Bisa Stres Berat

Jakarta, JP.-

Bagaimanakah gejala kejiwaan perwira ABRI yang diperiksa Dewan Kehormatan Perwira (DKP)? Menurut psikolog Prof Dr Sarlito Wirawan, jika seseorang tersangka mendapat sorotan luas dan tajam dari masyarakat, yang bersangkutan akan mengalami stres berat.

Apalagi, tokoh seperti Letjen TNI Prabowo Subianto merupakan figur yang dikenal luas, baik di kalangan ABRI maupun masyarakat. Kariernya yang melesat bagai meteor telah mengantarkannya menjadi tokoh populer di negeri ini.

Statusnya sebagai menantu mantan Presiden Soeharto makin menambah posisi Prabowo jadi sorotan masyarakat. "Terlepas dari soal benar atau salah, kalau tiap hari terus diungkap di media massa, yang bersangkutan bisa *down*. Bisa stres berat," ujar Sarlito menjawab pertanyaan *Jawa Pos* di kampus UI, Depok, kemarin.

Dikatakannya, para perwira ABRI yang sedang diperkarakan DKP secara umum akan mengalami gejala tekanan kejiwaan. Mereka akan merasa tertekan.

Menurut guru besar UI ini, kondisinya bertambah parah jika terjadi *trial by the press*. Yang bersangkutan langsung divonis masyarakat sebelum pengadilan memutuskan vonis bersalah.

Mestinya, lanjut Sarlito, sebelum pengadilan memutuskan bersalah, Prabowo cs tetap harus dianggap tidak bersalah. "Tapi sekarang, kelihatan tidak *fair*. Banyak sekali yang sudah diungkap sebelum diajukan ke pengadilan," tuturnya.

Kondisi demikian muncul karena situasinya memang berlainan dengan era sebelumnya. Dulu, tiap pemeriksaan pelanggaran etika ABRI selalu dilakukan hati-hati. Masyarakat pun tidak langsung memvonis.

Namun, kini zaman berbeda. Semangat reformasi telah menempatkan Prabowo cs sebagai terhukum sebelum hukum memutuskan bersalah.

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 (7) 13 19 25 31	Januari	Juli	(1998)
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	(Agustus)	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	(☐ Suara Merdeka)	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Prabowo di Tengah Perjalanan Soeharto

APA yang akan dilakukan Prabowo, seandainya DKP memutuskan dia harus diberhentikan dari jabatannya atau diberhentikan dari kedinasan ABRI karena terbukti bersalah dalam kasus penculikan atau orang hilang?

"Saya akan tinggal di gunung dan menulis buku." Jawaban itu dikemukakan Letjen TNI Prabowo Subianto kepada seorang rekannya beberapa saat setelah dia dimutasikan dari jabatan Pangkostrad menjadi Komandan Sesko ABRI akhir Mei lalu, meski jabatan itu belum lama dipangkunya.

Sebelum tersandung kasus orang hilang, terutama sewaktu posisi Soeharto masih kuat, nama pria kelahiran Jakarta 17 Oktober 1951 itu sangat cemerlang. Kariernya cepat menanjak. Dari teman seangkatan (lulusan Akabri 1974), hanya dia yang kini sudah meraih pangkat letnan jenderal.

Dua lainnya mayor jenderal, yaitu Safri Syamsoeddin (mantan Pangdam Jaya) dan Riyamirzad (menantu Try Sutrisno). Sedangkan sebagian besar masih berpangkat kolonel.

Banyak pihak menilai, percepatan karier Prabowo karena dia menantu Soeharto. Bahkan, sering disebut-sebut dia calon pemimpin masa depan, walau penyebutannya belum transparan sekali.

Putra keempat begawan ekonomi Prof Dr Sumitro Djojohadikusumo ini pada masa kecilnya harus ikut berkelana orang tuanya dari satu negara ke negara lain. Ini tak lain karena ayahnya dituduh oleh Bung Karno bersekongkol dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta. Maka, Sumitro mengajak keluarganya, termasuk Prabowo, menjelajah ke Singapura, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Swiss, dan Inggris.

Barangkali hidup berpindah-pindah itulah, yang membuat Prabowo tak mengalami kesulitan dalam menyatakan pendapat dan ekspresi dengan bahasa Inggris. Bisa jadi, kemampuan berbahasa Inggris dan kebiasaan selama di luar negeri menyebabkan dia tak sulit bergaul dan masuk ke dalam lingkungan para perwira Amerika. Bukan cuma Inggris, Prabowo juga dikenal mahir berbahasa Prancis, Jerman, dan Belanda.

Kemungkinan berkat kemampuannya itu membuat karier dia mulus selepas pendidikan Akabri. Ia pun pernah menjalani pendidikan kemiliteran di Fort Bragg (North Carolina) dan Fort Benning (Georgia), Amerika Serikat.

Bahkan, ada yang mengungkapkan, ketika dites untuk masuk menjadi anggota satuan elite, Kopassus, hampir saja ia gagal. Tapi bukan karena nilai tesnya rendah, justru karena nilai Prabowo berada di atas peringkat yang bisa diterima di satuan khusus itu.

Menikahi Titiek

Meski demikian, yang membuat namanya cepat dikenal luas bukan kelebihannya itu atau karena putra Prof Sumitro, melainkan karena ia kemudian menikahi Siti Hedijati Harijadi (Titiek), putri keempat Soeharto. Perkawinan itu membuahkan seorang putra bernama Ragowo Hedi Prasetio.

Tak lama setelah dilantik sebagai Komandan Kopassus 4 Desember 1995, organisasi Kopassus dimekarkan. Suara-suara miring mengungkapkan, pemekaran organisasi Kopassus hanya untuk mempercepat kenaikan pangkat Prabowo, karena dengan itu ia harus meyandang bintang dua.

Sebab, dengan perubahan pimpinan Kopassus dari Komandan menjadi Danjen, tak urung pangkat pimpinannya harus disesuaikan. Maka, tak aneh jika pemekaran Kopassus saat itu mendapat kritik dari banyak pihak, termasuk dari sebagian petinggi ABRI.

Namun Majalah *Time* edisi 26 Mei 1997 pernah memberitakan, Soeharto sempat hilang kepercayaannya terhadapnya berkaitan dengan insiden 27 Juli 1996, saat terjadi perebutan kantor DPP PDI yang berbuntut kerusuhan. Kabarnya, pasukan Prabowo saat itu bergerak di kawasan Cendana, kediaman pribadi Soeharto. Ada bisik-bisik, pasukannya akan melancarkan kudeta. Benarkah? Menurut sebuah sumber, Prabowo membantah habis tulisan di majalah itu karena sesungguhnya ia bergerak ke Cendana ingin mengamankan Presiden.

Yang terang, Maret 1998 Prabowo dipromosikan sebagai Panglima Kostrad. Tentu saja, dia kembali harus naik pangkat menjadi letnan jenderal. Tetapi tak lama setelah itu Soeharto jatuh. Sehari setelah turunnya Soeharto, ia pun dipindahkan ke Sesko.

Terungkaplah kasus penculikan dan orang hilang. Saat itu malah sempat beredar isu, ia juga berada di balik insiden Trisakti 12 Mei.

Tentu saja, kebenaran isu-isu yang menyangkut dirinya baru bisa diungkapkan setelah pemeriksaan DKP selesai. Apakah ia benar-benar terlibat banyak tindakan yang melanggar HAM itu, siapakah yang memerintahkan sesungguhnya, apakah ia juga akan diajukan ke Mahmil, apakah ia juga akan dipecat dari kedinasan ABRI?

"Low Profile"

Sedangkan Mayjen Muchdi PR, yang kini juga diajukan ke DKP bersama Prabowo, namanya kurang dikenal masyarakat luas sebelum diangkat sebagai Danjen Kopassus menggantikan Prabowo. Ia memang sosok yang berpenampilan *low profile*.

Muchdi bukanlah seangkatan Prabowo. Ia lulus AMN tahun 1970 atau empat tahun di atas Prabowo. Lelaki berparas lunak ini dikenal akrab dengan Prabowo, terutama setelah menjabat sebagai Pangdam VI/Tanjungpura.

Tidak jelas bagaimana prosesnya. Yang jelas, selepas menduduki jabatan pangdam, ia dilantik sebagai Danjen Kopassus pada 22 Maret 1998 menggantikan adik kelasnya, Prabowo Subianto.

Begitu pula Kol Chairawan yang jabatan terakhirnya Komandan Grup IV Kopassus. Orang hanya bisa menduga tokoh ini tentulah orang kepercayaan Prabowo. Sebab, sebelumya Prabowo adalah Danjen Kopassus saat Chairwan naik jabatan di posisi terakhirnya itu.

(Wahyu Atmaji -11k)

Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☑ Berita Buana	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Samsudin: Hanya Berhenti di Prabowo

Jakarta, Berita

Anggota Komnas HAM, Mayjen (Purn) Samsudin, merasa yakin bahwa kasus penculikan aktivis prodemokrasi yang melibatkan sejumlah perwira tinggi di Kopassus semata-mata merupakan "tindakan anak nakal" atau insubordinasi. Dengan kata lain, hal itu merupakan suatu tindakan indisipliner yang melawan perintah atasan atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan perintah atasan.

"Tindakan anak nakal atau insubordinasi serupa ini sering terjadi. Bentuknya macam-macam. Misalnya, ada yang lari sampai 10 hari. Kalau begini, atasannya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban," ujar Samsudin di Jakarta, Sabtu (8/8) pagi, menanggapi pernyataan Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo HS bahwa dalam pemeriksaan Mayjen Muchdi dan Kolonel Chairawan terungkap bahwa mereka sekadar menjalan perintah.

Menurut mantan Pangdam Cendrawasih ini, secara hirarki, yang berhak memerintah adalah atasan langsung. Dalam kaitan dengan Muchdie maupun Letjen Prabowo, sebagai Danjen Kopassus, secara pembinaan, atasan langsung mereka adalah Kasad, sedang secara operasional adalah Pangab.

"Tetapi, saya yakin, baik Jenderal Feisal Tanjung sebagai Pangab waktu itu maupun Jenderal Wiranto, yang saat itu sebagai Kasad dan kini sebagai Pangab, sama sekali tidak tahu-menahu. Artinya, dalam kasus ini, saya yakin persoalannya berhenti pada Prabowo saja. Ini berarti, semua terjadi atas inisiatif Prabowo, tanpa berkoordinasi dengan atasannya, baik Kasad maupun Pangab," ujar Samsudin.

Tindakan semacam itulah, menurut dia, yang sering terjadi. Dalam militer, hal itu termasuk kategori sebagai tindakan kesalahan prosedural. "Saya berani mengatakan, kasusnya hanya berhenti sampai di Prabowo, setelah melihat perkembangan pemeriksaan maupun pernyataan-pernyataan, baik Pangab maupun Kasad," katanya lagi.

Secara terpisah, Letjen (Purn) Sajidiman Surjohadiprojo mengemukakan, selain Kasad dan Pangab sebagai atasan langsung, ada pihak lain yang bisa mengeluarkan perintah, yakni presiden.

"Dalam UUD 1945 diterangkan dengan jelas bahwa presiden sebagai kepala negara memiliki kewenangan memerintah AD, AL, AU, dan Polri. Jadi jelas, selain Kasad maupun Pangab, ada pihak lain yang punya wewenang mengeluarkan perintah," ujar mantan Gubernur Lemhannas ini.

Hanya saja, dalam kasus penculikan yang melibatkan para perwira tinggi Kopassus itu, Sajidiman yakin tidak ada kaitannya dengan Kasad. Sebab, hal itu adalah kasus penculikan dan bukan menyangkut masalah administratif. ❑ tri

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA		1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA		2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA		3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA		4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN		5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Prabowo Tahu Risiko Tentara

JAKARTA — Mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto tadi malam mengadakan doa bersama dengan sejumlah ulama di rumahnya, Jalan Cendana nomor 7, Jakarta Pusat. Menurut KH Yusuf Hasyim (Pak Oed) — yang tadi malam hadir pada doa bersama itu — mereka mengadakan doa, *wirid*, dan shalat Isya berjamaah.

"Tidak ada pertemuan yang spesifik, kami hanya berdoa bersama dan shalat Isya berjamaah agar segalanya berjalan dengan baik," ujar KH Yusuf Hasyim yang dihubungi *Republika*, di rumahnya tadi malam.

Hal senada di kemukakan Ketua Harian Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Achmad Sumargono. Menurutnya, pertemuan itu hanyalah pertemuan biasa. Silaturahmi. Mereka yang hadir, katanya, datang untuk menyampaikan keprihatinan atas nasib yang tengah dialami Prabowo.

"Kami semua datang untuk menyatakan prihatin, satu yang Pak Prabowo sendiri tidak tampak seperti itu. Dia tetap tampil seperti biasa, seolah tidak ada apa-apa. Dia sadar bahwa dia adalah tentara, tentu mempunyai risiko-risiko," jelas Achmad.

Prabowo, kata Achmad, tetap tampil ramah dan banyak tertawa. Itu, katanya, sangat berbeda dengan apa yang dibayangkan banyak orang. "Padahal, saya datang 'kan niatnya menghibur," katanya.

■ bs

Kelas: .....

LSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☑ BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Kontras terima *Suardi Tasrif Award*

JAKARTA (Bisnis): Komite Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) terpilih sebagai penerima *Suardi Tasrif Award* untuk tahun ini, sementara Margiono (Pemred majalah *DR*) dan Bambang Bujono (Redpel majalah *DR*) menerima *Fuad Muhammad Syafruddin (Udin) Award*.

Pengumuman penerima kedua penghargaan tersebut dilakukan tadi malam dalam resepsi HUT ke-4 Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Hadir a.l. Menpen Yunus Yosfiah, Ketua AJI Lukas Luwarso, Sekjen PWI Pusat Parni Hadi, Goenawan Mohamad, Pemred *Detak* Eros Djarot, wartawan, serta sejumlah artis.

Ketua Dewan Juri Masmimar Mangiang mengemukakan pada tahap seleksi terdapat enam kandidat [lima individu, satu lembaga] untuk *Suardi Tasrif Award*, sedangkan *Udin Award* hanya ada tiga calon.

Kontras dinilai layak menerima penghargaan itu karena kegigihannya mengungkapkan kasus orang hilang dan korban tindak kekerasan. Sedangkan Margiono dan Bambang Bujono pernah diperiksa aparat karena *DR* menampilkan *cover* bergambar Soeharto dalam kartu *king*.

Sementara itu, Menpen Yunus Yosfiah mengatakan di tengah suasana reformasi saat ini pejabat tidak perlu gusar bila mendengar kritik dari berbagai pihak, termasuk pers. "Justru karena kritik itulah saya kira kita sebagai bangsa dapat lebih cepat berkembang."

Dia menilai sudah tidak tepat lagi bila sekarang pejabat kebal kritik. Dengan perubahan kebijakan dan suasana saat ini, katanya, "Kita harapkan pejabat tidak lagi cepat merah kupingnya bila mendengar kritik dari pers." **(sj)**

Kelas: .....

LSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

dia:			Tanggal	Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Mayjen TNI (Purn) Syamsudin:

'Ini Suatu Coreng bagi Kopassus...'

PEMERIKSAAN yang dilakukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terhadap Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi Purwopranjono, dan Kolonel (Inf) Chairawan yang diduga kuat terlibat penculikan, belum memenuhi harapan masyarakat. Hingga kini sejauh mana pemeriksaan terhadap ketiganya, masyarakat tampaknya harus bersabar menunggu hasil pemeriksaan. Kendatipun tiga orang perwira sudah di-DKP-kan, dan 11 anggota Kopassus sudah ditahan di Puspom ABRI, namun 14 aktivis belum juga ketahuan rimbanya. Tapi, semoga saja dengan semangat reformasi, hukum ditegakkan sebagaimana mestinya, sehingga citra ABRI kembali terangkat. Setelah Soeharto berhenti, ABRI terus menjadi sorotan dengan mencuatnya berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia. Untuk mengetahui seberapa penting sebenarnya DKP dan Mahmakah Militer yang akan menyidangkan 11 anggota Kopassus, **Ade Alawi** dari *Media* mewawancarai mantan anggota Kopassus yang kini aktif di Komnas HAM, **Mayjen TNI (Purn) Syamsudin**. Berikut petikannya.

Sebenarnya apa yang mau dicapai dari pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP)?

Dulu Dewan Kehormatan Militer, sekarang DKP, saya kira tidak ada bedanya. Ya, artinya de-

ke DKM/DKP itu melanggar kode etik perwira apa *nggak*. Itu saja. DKP sebatas kode etik saja. Nah, orang banyak bertanya, apakah cukup di situ bahwa tiga orang ini (Prabowo, Muchdi, dan Chairawan) ke DKP, ini ke mahkamah milliter (mahmil), Pangab telah mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan yang ketiga ini dengan melihat perkembangan mereka harus ke mahmil. Kasus begini saya kira tidak mungkin DKP menemukan secara detail karena teknik-teknik intrograsi itu, mereka bukan ahlinya, banyak orang berpendapat termasuk saya sendiri mereka itu harus ke mahmil. Sehingga dengan demikian, sering saya katakan, saran yang diajukan oleh DKP ke Pangab saya kira hanya satu ajakan ke mahmil, jika terjadi pelanggaran kode etik.

Sejak awal kasus ini mencuat Anda bersikeras bahwa para pelakunya tak pandang bulu, termasuk ketiga perwira itu, harus dimajukan ke mahkamah militer. Mengapa?

Kasus-kasus begini harus diajukan ke mahkamah militer. Walaupun diberhentikan secara terhormat dari jabatannya itu sudah merupakan hukuman yang bukan main beratnya bagi seorang perwira. Kalau yang tiga ini keputusannya sekadar diberhentikan dengan hormat, sedangkan yang 11 orang diambil tindakan hukum, maka akan terjadi suatu gejolak. Timbul ketidakpercayaan anggota Kopassus kepada para pimpinannya.

Sekaligus dengan pengajuan (ke Mahmil) ini *fair*. Kalau Prabowo salah, seberapa jauh *sih* ke-

acungkan. Dengan demikian yang bisa melihat seberapa jauh kesalahannya, ya pengadilan. Kita kadang di lain pihak ingin menegakkan hukum maupun mengembalikan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa, nah ini kesempatan bagi ABRI untuk menunjukkan betul-betul sebagai pelopor dalam menegakkan supremasi hukum di Tanah Air.

Anda yakin jika terjadi diskriminasi hukum dalam kasus penculikan ini akan terjadi gejolak di Kopassus....

Betul, kepercayaan kepada pimpinan akan hilang. Apakah akan mengorbankan ini kepada kesatuan yang begitu terhormat selama ini. Saya mengimbau kepada Kopassus, memang ini suatu coreng bagi Kopassus, tapi saya imbau bekerja dengan baik dalam jalur sapta marga dan sumpah prajurit. Tidak perlu korps baret merah ini, ya katakanlah tergoncang. Ini tanggung jawab seseorang. Kemudian saya imbau kepada masyarakat jangan terlalu mendramatisir sehingga Kopassus betul-betul sudah hampir punah, tidak ada lagi wibawanya.

Banyak yang masih bertanya-tanya mengapa mantan Panglima ABRI Jenderal TNI Feisal Tanjung tidak tersentuh kasus ini. Anda sendiri bagaimana melihatnya?

Keyakinan saya, ini bukan merupakan kebiasaan atasan, baik Pak Tanjung maupun Pak Wiranto. Ini adalah merupakan insubordinasi dari orang-orang ini (Kopassus). Artinya, tidak melaksanakan perintah atasan atau melakukan sesuatu yang ber-

kan negara, menyelamatkan rakyat. Oke saja orang berpikir begitu, cuma lihat wewenang 'kan, apakah ada wewenang Kopassus beroperasi.

Sebatas apa wewenang Kopassus itu?

Jadi, ada dua macam komando, komando pembinaan dan komando operasional. Komando pembinaan ini tugasnya adalah membina pasukan saja, dilatih dengan baik, diberi kemampuan dengan baik, diberi perlengkapan dengan baik. Komando operasional melakukan operasi, nah komando operasional mungkin memerlukan, saya perlu satuan Anda, perlu Kopassus. Setelah diberi, yang mengendalikan operasi adalah komando di tempat tadi itu. Katakanlah Pangdam Jaya memerlukan Kopassus, dia minta kepada Pangab, Pangab memberi. Karena itu putuslah rantai komando pembinaan antara kesatuan tadi dengan komandannya. Jadi, komandan Kopassus tidak punya wewenang untuk mengendalikan operasi. Dia adalah komando pembinaan saja. Waktu saya di Irian, dulu, pernah, dapat tujuh batalion dari Sumatera, Jawa Timur, Jawa Tengah, Brimob pun ada dua batalion; ada juga satuan dari udara helikopter dan Kopassus, semua itu masuk ke Irian, saya yang kendalikan. Komando-komando dari Kopassus dan dari mereka berasal lepas, sayalah yang mengendalikan. Setelah selesai, saya pulangkan. Kopassus dan Kostrad itu komando pembinaan saja.

Kalau Pangab tidak memerintah, berarti penculikan ini

kan tadi saya tidak yakin panglima ABRI (memerintah).

Anda sendiri apakah melihat para aktivis itu telah melakukan gerakan radikal yang akan membahayakan negara?

Saya kira tidak radikal, mereka menentang kebijaksanaan pemerintah itu di mana pun bisa berbeda pendapat, kenapa itu harus kita katakan radikal? Dia menyampaikan masalah-masalah kemasyarakatan sekarang 'kan banyak bahkan lebih vokal lagi. Zaman Orde Baru hampir-hampir tidak boleh ada perbedaan pendapat sehingga ekstrem jadinya 'kan. Sebenarnya UUD '45 menjamin perbedaan pendapat.

Kopassus 'kan dikenal sebagai pasukan yang sangat disiplin. Tapi, kenapa melakukan tindakan penculikan tidak melapor ke Pangab?

Nah itulah, saking disiplinnya. Anak *you* nakal, *you* bisa tahu *nggak*?

Logikanya gampang saja, *you* marah-marah jangan begini, jangan minum-minuman keras, *you nggak* tahu dia minum. Secara moral *you* bertanggung jawab kepada anak *you* 'kan? Tapi secara hukum yang berbuat adalah orang itu. Anak itu mencuri, tapi bukan perintah saya, dalam hukum pidana pelakunya yang dituntut.

Jadi, benar Feisal Tanjung tak terlibat?

Saya katakan dia tidak tahu. Itu merupakan insubordinasi dari Prabowo. Ya, katakan mudah saja 'kan anak *you* berbuat salah *you* mau dihukum, *nggak* 'kan. Paling tanggung jawab moral *you*. Itu aja logikanya,

Saya yakin, dalam hirarki ABRI siapa yang berhak memberi perintah kepada saya adalah mereka satu tingkat di atas saya. Berarti kalau saya berlaku di luar perintah kalau komandan saya tidak tahu berarti bukan kesalahan komandan saya. Saya yang salah, ini hirarki. Dalam hirarki satu tingkat di atas, itulah yang memerintahkan saya. Tapi dalam kasus ini saya yakin pangab, baik yang lama maupun yang baru *ndak* tahu. Saya sudah tanya, Pak Feisal saya kenal baik. Saya lama di Kopassus. Pak Wiranto bahkan pernah menjadi anak buah saya di pusat infanteri. Saya tahu kedua orang ini, saya yakin betul mereka itu tidak melakukan perintah untuk menculik orang.

Apakah nanti nasib 14 aktivis yang belum jelas nasibnya itu akan terungkap di pengadilan?

Itu bisa terbukti nanti di pengadilan, di DKP tidak mungkin terungkap. Pak Syamsu Djalal dari Danpuspom ABRI sebagai tim pencari fakta, tapi seberapa jauh? Apakah ada kaitan dengan 14 orang hilang, kerusuhan 14 Mei, perkosaan, pembakaran, penjarahan, itu nanti di pengadilan kita tahu.

Tapi kenapa para penculik ini tidak membebasan yang ke 14 orang?

Ya, kita *nggak* tahu di mana sekarang, siapa yang tahu?

Para penculik yang sudah ditahan itu pasti tahu *dong*...

Ya, di mana? Di pengadilan nanti terbongkar.

Atau, mungkin para penculik ini merasa bingung, serba salah, menjelaskan nasib ke 14 aktivis itu....

Nggak, saya *nggak* yakin, kenapa Pius Cs dilepaskan, itu nanti harus dicari di pengadilan, apakah masih ada, apa *nggak*.

Banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi cukup dengan permintaan maaf dari pemerintah?

Lha, mau gimana, bagaimana begitu banyak kasus. Harus diselesaikan secara hukum, itu namanya hati panas. Hati panas boleh tapi rakyat lapar, berarti tidak ada kestabilan. Ini (permohonan maaf, red.) sudah pernah dilakukan oleh Afrika Selatan, Afrika Selatan itu lebih parah dari pada kita, dulu. Tapi kemudian terjadi rekonsiliasi nasional, selesai, pemerintah minta maaf. Nah, itu sekarang harus kepala dingin 'kan. Diselesaikan semua urusan tapi terbengkalai, soal makan rakyat jadi *gimana?*

Tapi, permintaan maaf itu kesannya mengenyampingkan proses hukum...

Tidak, itu adalah satu acara. Ada yang menuntut secara hukum oke, mari kita selesaikan, usut satu-satu, tapi habis waktu untuk itu saja, terbengkalai ekonomi. Digoyang terus jatuh Habibie besok, ganti pemerintah besok tuntut lagi, mau begitu kita kapan mau pikir makan rakyat, nah ini harus berjiwa besar. Kalau mau pemerintah diajukan ke pengadilan, boleh, ajukan di situ ia minta maaf di depan Mahkamah Agung. **(E-2)**

Kelas: .....

LSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

dia:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto:

Jangan ada spekulasi baru

Sejak Menhankam/Pangab **Jenderal Wiranto** mengumumkan secara resmi adanya keterlibatan anggota ABRI dalam kasus penculikan sejumlah aktivis, sedikit demi sedikit misteri di balik aksi itu mulai terkuak.

Sebelumnya, masyarakat merasa pesimistis dan khawatir kasus itu akan dipetieskan seperti berbagai kasus lain yang melibatkan ABRI seperti insiden kasus Santa Cruz, Dili dan peristiwa Tanjung Priok.

Masyarakat pantas bersikap pesimistis mengingat dalam banyak kasus yang melibatkan ABRI, biasanya sang pelaku nyaris 'tak tersentuh' hukum. Akibatnya, berbagai kasus itu tetap beku.

Meski para korban penculikan saat itu mengindikasikan dirinya diculik anggota ABRI, masyarakat masih belum yakin pihak ABRI akan menindaklanjutinya. Masyarakat pun tetap pesimistis ABRI bersedia mengakui kesalahan anggotanya. Namun, desakan berbagai kalangan, baik domestik maupun internasional, akhirnya membuka cakrawala baru bagi ABRI.

Wiranto dengan kestaria mengakui adanya keterlibatan anggota ABRI dari pasukan elite Baret Merah TNI-AD. Keberanian jenderal bintang empat itu banyak dipuji.

Langkah Wiranto itu jelas membutuhkan nyali dan keberanian luar biasa. Sebab beberapa perwira tinggi diduga terlibat di sana, selama ini dikenal memiliki pengaruh kuat di pasukan, terlebih lagi dalam era kepemimpinan H.M. Soeharto.

Melihat kenyataan itu, Wiranto tampak bersikap taktis dan hati-hati dalam mengungkapkan setiap perkembangan. Hal ini mengesankan penyelidikan kasus itu terasa lamban.

Sikap taktis Wiranto terlihat dalam caranya mengungkapkan satu-demi satu fakta-fakta kasus penculikan. Sejak kasus ini muncul kepermukaan, sebagai Panglima ABRI, Wiranto tentunya sudah dapat membaca siapa pelaku aksi penculikan itu. Banyak pihak meyakini Wiranto sudah mengetahhui adanya keterlibatan anggota Kopassus sejak kasus itu mengemuka.

Buktinya, tanpa ada angin dan hujan, Wiranto tiba-tiba mencopot mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto dari jabatan Pangkostrad dan menempatkannya pada posisi Komandan Sesko ABRI di Bandung.

Menhankam/Pangab juga mencopot Mayjen TNI Muchdi PR Danjen Kopassus.

Banyak orang menduga pencopotan itu terkait dengan kedekatan perwira tinggi itu dengan Prabowo.

Setelah melakukan konsolidasi kedalam, Wiranto secara bertahap mulai mengungkapkan kasus penculikan. Kini, ketiga mantan komandan Kopassus [Prabowo, Muchdi PR dan Kolonel Chairawan/Dan Grup IV Kopassus] dibebastugaskan untuk menjalani pemeriksaan.

Melanggar

Wiranto menegaskan ketiga orang itu nyata-nyata melanggar kode etik perwira, disiplin militer, dan disiplin ABRI.

Jika waktu itu Wiranto tidak segera mengumumkan soal keterlibatan anggota ABRI, ini semata-mata hanya merupakan sikap kehati-hatiannya.

Sebelum mengungkap ketiga nama perwira itu, Wiranto selalu menggunakan istilah 'adanya indikasi keterlibatan beberapa oknum ABRI, dalam kasus pelanggaran hak azasi manusia itu. Namun saat itu, ia tidak mengungkap nama-nama, pangkat, jabatan maupun kesatuannya.

Setelah 'pengakuan' itu disampaikan Wiranto, reaksi masyarakat pun bermacam-macam. Sebagian masyarakat menganggap pengakuan it sebagai sikap jujur ABRI, namun di sisi lai masyarakat makin mencerca institusi ABI yang memang selama ini seolah berada jau dari jangkauan hukum.

Terlepas dari semua itu, masyarakat haru mengakui bahwa ABRI mulai berani bersika jujur dan terbuka.

Pengungkapan awal itu, tampaknya merupa kan semacam pancingan untuk melihat real si masyarakat dan kalangan ABRI serta 'pet situasi'. Tampaknya, reaksi masyarakat ma pun ABRI mendukung upaya Wiranto mengun kap misteri penculikan, sehingga akhirnya pun tak ragu lagi untuk menyebut keterlibata anggota Kopassus TNI-AD.

Pengumuman tentang keterlibatan anggo Kopassus akhirnya memancing Dan Ses ABRI Letjen Prabowo angkat bicara dan men atakan akan bertanggung jawab dan berse diperiksa.

Dengan kesanggupan Prabowo bertanggur jawab maka makin terbukalah peluang Wira untuk mengungkap dalang di balik semua a si penculikan aktivis prodemokrasi.

Pengungkapan kasus tersebut, menu Wiranto, bagi ABRI merupakan langkah u tuk membersihkan citra institusi yang sela ini telah tercoreng oleh ulah anggota ABRI i

Meski masyarakat memberikan dukung masyarakat masih bertanya-tanya akankah sus itu diusut tuntas tanpa ada yang ditut utupi sedikit pun demi melindungi instit ABRI dari kehancuran dan kepercayaan?

Keraguan ini mencul karena masyarakat lah telanjur menyakini bahwa bukan ha tiga petinggi Kopassus yang terlibat nan beberapa pejabat tinggi negara did kuat juga terlibat.

Bahkan, sebagian masyara

ya pelaku-pelaku dalam kasus penculikan
erupakan dalang dalam kerusuhan mas-
)-15 Mei lalu yang diawali dengan pen-
ıkan mahasiswa Universitas Trisakti
n sebuah konspirasi tingkat tinggi.
hkan, seorang perwira tinggi ABRI ikut
lukung teori itu.
nurut perwira yang enggan disebut identi-
'a itu, ada sebuah skenario yang menggam-
an adanya dalang tunggal dalam tiga ka-
'akni penculikan, penembakan mahasis-
an kerusuhan massal 13-15 Mei.
a menduga Prabowo merupakan salah satu
dan dalang dari semua peristiwa itu. Mo-
inya, menurut dia, untuk mengincar kur-
esiden melalui sebuah skenario yang nya-
ıirip dengan sejarah duduknya Soeharto
gai presiden.
batan presiden merupakan obsesi Prabowo
ı mengawali kariernya di militer. "Ketika
uk Akabri, dalam biodata Prabowo ter-
um cita-cita menjadi presiden."
odata ini tampaknya dapat menjadi gam-
n betapa menantu Soeharto itu sangat am-
ıs dan haus kekuasaan.
ıenario tersebut, kata perwira tinggi itu,
ulai dengan menculik sejumlah aktivis se-
ıi langkah untuk mengamankan dan melan-
:an agenda Sidang Umum MPR untuk
ıdudukkan kembali Soeharto sebagai pres-
ı periode 1998-2003.
etelah Soeharto terpilih kembali sebagai
iiden, menurut analisis perwira itu, maka
unculkan kerusuhan massal dengan diawali
embakan mahasiswa. Di negara mana pun
ıbunuhan terhadap mahasiswa akan
ıimbulkan huru-hara dahsyat.
engan timbulnya kerusuhan massal nasio-
lanjutnya, maka diharapkan Soeharto
n mengumumkan situasi darurat perang
menunjuk Prabowo sebagai Panglima Ko-
ıdo Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
ngkopkamtib. Dengan jabatan itu, maka
bowo dapat melangkah ke kursi presiden
erti pernah dialami Soeharto.
lenurut sumber itu, jika diterapkan situ-
darurat perang maka Soeharto tentu akan
nilih Prabowo sebagai Pangkopkamtib dan
an Wiranto. Karena, menantunya itu ten-
ya lebih dapat diharapkan untuk melindungi
uarga dan kekayaan Cendana setelah
harto *lengser keprabon*.
Tamun, rupanya desakan dari mahasiswa
rakyat membuat Soeharto 'kembali memi-
nurani' untuk turun tahta dan digantikan
ıentara oleh Wapres B.J. Habibie.

enario Trisakti

antas bagaimana dengan skenario penem-
an mahasiswa Universitas Trisakti yang ma-
kontroversial itu?
etika mahasiswa Trisakti melakukan de-
ıstrasi di kampus Grogol yang berakhir den-
meninggalnya empat mahasiswa 12 Mei
diyakini bahwa pelaku penembakan be-
a pada jarak cukup jauh dari kampus den-
posisi bidik yang sangat strategis. Sehingga
ıdangan dapat menjangkau sasaran yang
ada di balik tembok atau gedung sekalipun.

Penembakan itu juga diyakini dilakukan oleh anggota pasukan yang sangat terlatih dan memiliki kemahiran menembak. Posisi lokasi bangunan yang paling memungkinkan adalah menara Hotel Ciputra.

Dugaan bahwa penembakan dilakukan dari hotel itu didasarkan pada kenyataan bahwa tubuh korban penembakan tidak tertembus peluru. Padahal, berdasarkan hasil uji balistik diketahui senjata yang digunakan adalah jenis Stayer.

Senjata jenis ini jika hanya ditembakkan dari jembatan layang [lokasi anggota Brimob yang dituduh menembak] ke halaman kampus, peluru itu dapat menembus lima tubuh manusia secara berurutan sekaligus.

Jadi, jika terdapat lima orang berjajar maka kelimanya dapat tertembus peluru yang ditembakkan dari senjata jenis Stayer pada jarak antara kampus dan jembatan layang.

Maka pantas diduga bahwa penembakan dilakukan dari jarak jauh. Posisi jembatan layang di depan kampus Trisakti dianggap terlalu dekat karena kenyataannya proyektil peluru bersarang di tubuh korban, bukan menembus tubuh.

Namun Wiranto menepis dugaan keterlibatan anggota Kopassus dalam aksi penculikan, penembakan mahasiswa dan kerusuhan massa 13-15 Mei.

Karena itu, kata Wiranto, pemeriksaan terhadap tiga tersangka oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP), tidak akan diarahkan pada kasus kerusuhan dan penembakan mahasiswa Trisakti. Alasannya, menurut Wiranto, kedua kasus itu telah diselidiki oleh Tim Pencari Fakta (TPF) tersendiri. "Tidak *dong*, *kan* sudah ada tim pencari faktanya sendiri."

DKP yang dibentuk Senin silam kini sudah mulai melakukan sidang pemeriksaan. Hasilnya akan menjadi pertimbangan Pangab mengenai tindakan yang akan diambil terhadap ketiga perwira tersebut.

Persoalannya sekarang, masyarakat luas, Komnas HAM dan Kontras, terus mendesak Wiranto agar ketiga tersangka dan anggota Kopassus lainnya yang terlibat diajukan ke Mahkamah Militer agar fakta-fakta yang ada terungkap secara transparan.

Menanggapi desakan masyarakat itu, Wiranto berkilah, "Jika dari pemeriksaan oleh DKP terdapat indikasi tindak pidana maka siapapun akan diajukan ke Mahkamah Militer."

Jangan berspekulasi

Pangab mengingatkan ABRI akan mengacu pada sistem peradilan yang berlaku untuk ABRI, yaitu melalui DKP dan Mahkamah Militer (Mahmil). Mahmil, lanjutnya, diperuntukkan bagi prajurit berpangkat Mayor ke bawah yang nyata-nyata patut diduga terlibat langsung dalam kasus itu.

"Saya berharap selama proses persidangan jangan ada spekulasi baru yang dilemparkan sehingga mengintervensi peradilan ABRI yang dilaksanakan secara jujur," kata Pangab.

Dia menjamin proses persidangan betul-betul bebas dari tujuan politik karena ABRI bertekad mengembar tugas yang lebih kompleks dengan kekuatan prima.

"Jangan sampai ada spekulasi l
dilemparkan untuk mempersulit ni
membersihkan dirinya."

Wiranto menambahkan dia belum
rapa lama pemeriksaan oleh DKP da
sidang Mahmil akan digelar, namun di
dapat lebih cepat diselesaikan lebih

Pembentukan DKP itu sendiri meni
polemik. Ketua Komisi untuk Orang Hi
Korban Tindak Kekerasan (Kontras) M
nilai pembentukan DKP telah menyala
dur dan cacat secara substansial.

Menurut Munir, terdapat kejanggal
pembentukan DKP karena tidak se
gan Surat Keputusan Pangab tenti
bentukan DKP bernomor SKEP/838/
tanggal 30 April 1995.

"Menurut SK itu DKP dibentuk se
laksanakan persidangan di Mahkama
(Mahmil) dan keputusan Mahmil me
han utama bagi DKP, bukan sebalik
ta Munir.

Pada Bab I butir 7 tentang materi pe
an antara lain menyebutkan bahwa
yang diperiksa DKP disebabkan kare
nakan hukuman pidana yang lebih b
hukuman tiga bulan dan menurut per
gan pejabat yang berwenang ia tidak d
gi dipertahankan untuk tetap berad
dinas keprajuritan.

Sementara itu, dalam Bab III tentan
pembentukan, susunan, tugas, dan we
dewan disebutkan, "DKP tidak ber
mengoreksi, menilai, mencabut dan m
alkan putusan pemberhentian tidak
hormat dari Mahmil yang berwenang."

Butir-butir itu, menurut Munir, jelas m
lihatkan bahwa DKP dibentuk setelah
Mahmil mengambil keputusan yang m
kekuatan hukum tetap.

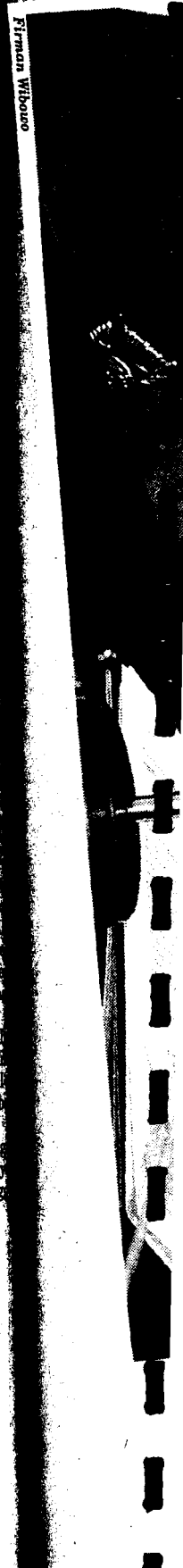
Pelanggaran kedua, lanjutnya, me
komposisi pemeriksa perwira yang didi
at melakukan pelanggaran prosedural. M
SK itu, pemeriksa berjumlah tujuh or
mana tiga di antaranya harus berpang
bih tinggi dari yang diperiksa.

"Dalam kasus ini hanya Kasad TNI-A
deral TNI Subagyo HS saja yang berpa
lebih tinggi dari Letjen TNI Prabowo Sub
lanjutnya.

Pelanggaran ketiga, katanya, menya
perwira yang diperiksa. Menurut SKEP
but yang dapat diperiksa DKP hanya pe
tinggi seperti Letjen TNI Prabowo dan M
TNI Muchdi. Lembaga tersebut menur
itu, kata Munir, tidak berwenang meme
Kol. Inf. Chairawan yang masih tergolon
wira menengah.

"Kami khawatir diikutsertakannya C
wan dalam pemeriksaan DKP merupaka
ya agar dia tidak buka mulut di Mahmil
bersifat terbuka yang sebenarnya paling
nang mengadili dia," kata Munir.

Apapun komentar masyarakat tentan
dalam mengusut kasus itu, Wiranto han
nanggapinya dengan kalimat,"Kita tung
ja hasilnya."**(cp)**


Firman Wibowo

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☑ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Mereka Semakin Tertancap, dalam..

BARANGKALI sudah menjadi takdir LSM — sekalipun mereka sering disebut sebagai organisasi non-pemerintah (ornop) — tetapi dalam aktivitas sehari-hari tak pernah bisa melepaskan dari "campur tangan" pemerintah. LSM yang bercirikan karitatif dan *developmentalist* harus sering berhubungan dengan pemerintah, karena pelaksanaan programnya memang "mewajibkan" mereka berhubungan dengan pemerintah. Paling tidak, sekadar memberitahukan, program pengembangan masyarakat atau pemberian bantuannya akan dilakukan.

Sebaliknya, LSM yang berorientasi pada kegiatan advokasi maupun transformatif juga tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan pemerintah. Ketika mereka harus memperjuangkan kliennya di peradilan pasti akan bertemu dengan pemerintah, minimal wakil pemerintah yakni jaksa atau hakim. Namun hubungan dengan "pemerintah" yang paling tak mengenakan terjadi, kalau aktivitas mereka dinilai terlalu kritis.

Seperti yang dialami pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Esther Indahyani Jusuf (27). Sebuah "timpukan" kecil menerpa punggungnya pertengahan tahun ini.

"Sebenarnya tidak terlalu merasa sakit. Namun kata teman-teman, dari bentuk luka yang ditinggalkan, mungkin terkena tembakan peluru karet. Ini mungkin teror bentuk lain yang harus saya terima," ungkapnya kepada *Kompas* di Kantor LBH Jakarta, beberapa hari lalu.

Bukan kali itu saja dia menerima teror. Selama berkantor di LBH Jakarta, yang menjadi tempat pertemuan hampir semua aktivis di Tanah Air, berulangkali ia menerima ancaman.

***

APA yang dialami Esther mungkin belum sedramatis yang



arb

Pius Lustrilanang


tra

Esther Indahyani


jpe

Rahardjo Waluyo J

dialami aktivis ornop lainnya, seperti Pius Lustrilanang dari Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera), Desmond Junaidi Mahesa dari LBH Nusantara Jakarta, dan Rahardjo Waluyo Jati, aktivis muda dari Komite Nasional Pejuang Demokrasi (KNPD). Dalam perjalanan sebagai aktivis mereka terkadang harus berhubungan *full body contact* dengan aparat.

Dalam catatan hidup Pius, paling tidak tiga kali dia mengalami perlakuan "khusus" dari aparat. Pertama, saat memperjuangkan hak petani di Badega, Jawa Barat. Kedua, tubuhnya memar pada 14 tempat ketika beraksi mendukung Megawati di Bandung. Hal yang sama dialami juga Desmond J Mahesa ketika memperjuangkan hak-hak warga Cibentang dan Ciseeng, Bogor yang tidak mau dilewati jaringan kabel tegangan tinggi. Juga Jati, waktu memperjuangkan hak petani di Situbondo dan Banyuwangi, Jawa Timur yang lahannya akan dimanfaatkan untuk latihan gabungan ABRI tahun 1992.

Pengalaman dramatik bagi ketiganya adalah saat harus "dipenjara" selama beberapa bulan tanpa proses peradilan. Ketiganya adalah korban aksi penculikan dan penghilangan aktivis yang tengah diselidiki Mabes ABRI. Meski kini mereka sudah "dibebaskan" dan dapat bergerak kemana-mana, namun pengalaman buruk itu tak begitu saja bisa dilupakan.

Desmond misalnya, setelah keluar dari sekapan penculik, kini menjadi perokok berat. "Ini 'kan untuk mengurangi kecemasan. Tak dapat dipungkiri, sampai saat ini pengalaman diculik dan disekap itu masih membayang," tuturnya.

Seperti dikisahkan Pius, Desmond, dan Jati dalam kesaksian mereka di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), selama diculik dan disekap di suatu tempat, mereka mengalami siksaan yang tak manusiawi. Selain disetrum dan dipukul, ketiganya dipaksa tidur di atas balok es atau dibenamkan dalam bak air.

Sebenarnya mereka sadar, risiko dari aktivitasnya, yaitu terluka atau paling ringan menerima teror. Bahkan, seperti Gilang di Solo dan korban penculikan yang lain, harus menerima kematian tragis. Tetapi diculik dan disiksa seperti yang mereka alami, tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Yang paling mungkin dan ini sering terjadi, mereka ditangkap waktu melakukan unjuk rasa dan dimintai keterangan, untuk tidak menyebut ditahan, selama beberapa hari. Bila dirasa cukup, mereka baru dilepaskan. Tetapi permintaan keterangan itu dilakukan secara terbuka. Artinya, aktivis yang lainnya mengetahui di instansi mana pemeriksaan itu dilangsungkan.

"Saya tidak akan pernah lupa dengan pengalaman penculikan ini. Meski demikian, pengalaman itu tidak akan menyurutkan langkah saya untuk tetap aktif memperjuangkan demokratisasi dan keadilan rakyat. Apalagi, saat ini masih banyak rakyat yang tak memperoleh perlakuan adil," tandas Jati, mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta).

Dia membuktikan omongannya. Bersama aktivis lain, terutama dari Partai Rakyat Demokratik (PRD), Jati sudah "turun ke jalan" lagi, misalnya dengan mempersoalkan pembebasan narapidana politik dan tahanan politik (napol/tapol) yang dirasakan tidak adil, serta menuntut dibukanya berbagai ketidakadilan yang lain. Sedangkan Pius dan Desmond berulang kali tampil dalam aneka mimbar untuk terus menggelorakan semangat "perlawanan" terhadap pemerintahan yang belum menghormati demokrasi, hak asasi manusia, dan hak warga negara.

***

DARI pengalaman selama ini, perlakuan "khusus" yang diterima aktivis ornop dari aparat acapkali bukan menyurutkan langkah mereka untuk berteriak dan memperjuangkan keyakinannya. Seperti Esther yang kini tengah hamil, meski terus menerima teror dan ancaman, tidak ingin meninggalkan LBH Jakarta dan SNB. Dia masih ingin bersama aktivis lainnya memberdayakan masyarakat. Padahal, jika dia mau, sebagai sarjana hukum dari Universitas Indonesia, banyak tempat "basah" yang menunggu.

Pius, Desmond, dan Jati sam-

pai saat ini masih "menganggur". Seluruh hidupnya benar-benar untuk gerakan "mengontrol" pemerintah, serta menggalang kekuatan sosial masyarakat. Benturan dan pelajaran pahit yang diberikan aparat menjadi bahan bakar baru untuk mendorong sebuah perubahan, melalui berbagai aksi yang terencana.

Keempat aktivis itu mengaku, tindakan keras yang dilakukan aparat sering justru menjadi tantangan.

Dalam konteks ini, tokoh LSM MM Billah menyatakan, benturan dan perlakuan keras dari aparat bukan cara yang tepat untuk dapat meredam aksi kritis aktivis ornop. Bahkan, benturan ini membuat para aktivis makin mencintai perjuangannya. "Mereka itu 'kan mirip paku. Benturan itu membuat mereka semakin tertancap, dalam.... Susah untuk mencabutnya," ucap Direktur *Community for Participatory Social Management* (CPSM) itu.

Dari pengalaman selama ini, tidak semua kader ornop bisa bertahan dan menjadi militan, seperti Pius, Desmond, Esther, ataupun Jati. Dari pengalaman 124 korban penyerbuan kantor DPP PDI di Jl. Diponegoro 58, Jakarta Pusat pada 27 Juli 1996 membuktikan, aksi kritis masyarakat tak bisa dihadapi dengan kekerasan aparat, karena yang terlahir justru bukan ketakutan untuk bicara benar tetapi suatu keberanian moral yang kian kental untuk menyuarakan kebenaran.

Oleh aparat, ke-124 orang itu dibawa ke pengadilan dan dihukum. Tetapi, itu tak membuat mereka jera. Bahkan, mereka yang semula hanya menjadi simpatisan PDI, kini menjadi garda depan PDI perjuangan yang berani dan kritis. Benturan dari aparat yang membikin mereka begitu. **(tra)**

Kelas: .....

SAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

ia:			Tanggal							Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31		Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26			Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27			Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28			April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29			Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30			Juni	Desember	2003

Pasca Tanjung Priok, Penculikan, Kebanggaan Tokoh Kopassus

Bermula dari Pertempuran dengan Pasukan RMS

Sedih, Menangis, dan Bangga Kopassus

"Saya tetap bangga pada Kopassus." Ucapan pengakuan Gubernur Lemhanas Letjen TNI Agum Gumelar terhadap korps baret merah yang sedang menjadi sorotan tajam masyarakat itu. Pasukan khusus yang disebut-sebut sebagai yang terhebat ketiga di dunia (setelah SAS Inggris dan pasukan khusus Israel) itu memang sedang terpuruk lantaran kasus penculikan aktivis. Keterlibatan Kopassus dalam kasus itu memang masih harus dibuktikan. Namun, benarkah kehebatan pasukan ini sudah terbukti? Mengapa "alumninya" begitu bangga pada Kopassus?

SEBAGAI orang yang pernah dibesarkan di Kopassus, Agum mengaku mengerti betul bahwa sejak kelahirannya sampai sekarang, pengabdian Kopassus hanyalah ditujukan kepada bangsa dan negara. Kalaupun kemudian namanya tercoreng oleh kasus penculikan sejumlah aktivis, itu hanya dilakukan oleh "oknum". "Jangan sampai karena nila setitik, rusak air sebelanga," ujar Agum.

Kasus penculikan yang menyeret sepuluh anggota dan tiga perwira Kopassus memang telah membuat tokoh-tokoh Kopassus terpukul. Sebagai mantan komandan Kopassus, Agum menyebut dirinya sangat sedih dan menangis karena kasus yang memalukan tersebut.

"Meski sedih dan menangis, saya tetap bangga pada Kopassus," katanya. Kebanggaan Agum terhadap korpsnya memang bukan tanpa alasan. Sejak kelahirannya tahun 1952, berbagai prestasi mengagumkan telah ditorehkan pasukan elite TNI Angkatan Darat ini. Dalam berbagai medan operasi, termasuk saat-saat menentukan kelangsungan kehidupan bangsa dan negara, Kopassus selalu menjadi andalan utama.

Inspirasi pembentukan Kopassus sebenarnya lahir dari pasukan komando milik RMS (Republik Maluku Selatan) tahun 1950. Saat itu, TNI di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang dan Letkol Slamet Riyadi ditugasi pemerintah untuk menumpas RMS di bawah pimpinan Dr Soumokil. Kawilarang dan Slamet Riyadi kala itu menemukan perlawanan dari pasukan yang jumlahnya kecil, tapi daya pukulnya hebat.

Pasukan komando RMS tersebut adalah tentara-tentara bekas KNIL. Meski jumlahnya kecil, mereka mampu bergerak dengan mobilitas tinggi di medan operasi. Pengalaman itu telah mengilhami Kawilarang untuk membentuk pasukan komando serupa. Namun, sebelum impiannya terwujud, Slamet Riyadi keburu gugur dalam pertempuran di Benteng New Victoria.

Cita-cita Kawilarang baru kesampaian saat dia ditugasi menjadi komandan Kodam III Siliwangi di Bandung. Tepatnya tahun 1952, Kawilarang membentuk satu satuan yang diberi nama Kesatuan Komando Teritorium (Koter) III Siliwangi. Tugasnya saat itu adalah menumpas pemberontakan DI/TII pimpinan Kartosuwiryo.

Karena dianggap sukses menumpas DI/TII, pasukan komando bentukan Kawilarang itu akhirnya ditarik ke Markas Besar Angkatan Darat dan meningkatkannya menjadi Korps Komando Angkatan Darat (KKAD). Tahun 1955, namanya diubah menjadi RPKAD (Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat).

Tahun 1965, RPKAD tampil sangat menentukan di saat bangsa dan negara dalam keadaan genting oleh ancaman PKI. Di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo (terakhir berpangkat letnan jenderal), RPKAD menjadi satuan pemukul yang menghancurkan G 30 S/PKI. Berkat pasukan ini pula, Pangkostrad Mayjen TNI Soeharto kala itu secara perlahan tapi pasti tampil ke puncak kekuasaan hingga akhirnya menjadi presiden kedua RI menggantikan Ir Soekarno.

Selama Orde Baru, pasukan yang dikenal dengan sebutan korps baret merah ini berkali-kali ganti nama. Berturut-turut menjadi Puspasus-AD (Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat), Kopassandha (Komando Pasukan Sandhi Yudha), dan terakhir saat L.B. Moerdani menjadi Pangab diubah menjadi Kopassus (Komando Pasukan Khusus).

Dalam perkembangannya, Kopassus selalu melahirkan tokoh-tokoh besar. Selama Orde Baru, jabatan KSAD dan Pangab selalu dipercayakan kepada prajurit-prajurit yang pernah dibesarkan di Kopassus.

Selain L.B. Moerdani, sebut saja, antara lain, Jenderal (pur) Try Sutrisno, Jenderal (pur) Edi Sudradjat, dan Jenderal (pur) Rudini. Letjen (pur) Yogie S.M. dan Letjen (pur) Sintong Panjaitan juga prajurit Kopassus yang cemerlang pada masanya.

Kini, dalam struktur kepemimpinan ABRI, alumni baret merah juga bertebaran dan memegang jabatan kunci. Mereka, antara lain, KSAD Jenderal TNI Subagyo H.S., Gubernur Lemhanas Letjen TNI Agum Gumelar, Sekjen Dephankam Letjen TNI Suyono. Sejumlah Pangdam dan perwira di Mabes TNI AD dan Mabes ABRI juga "alumni" korps baret merah.

Berbeda dengan pendahulunya, Pangab Jenderal TNI Wiranto memang bukan prajurit Kopassus. Dia dibesarkan di Kostrad. Namun, karena pengaruh yang besar di TNI AD, Wiranto pun didaulat menjadi warga kehormatan Kopassus. Itu dilakukan akhir 1997 lalu, saat Danjen Kopassus dijabat Prabowo.

Sederet prestasi dan kebesaran nama yang disandangnya itulah, barangkali, yang membuat para tokoh Kopassus tetap mengaku bangga pada korpsnya. Seperti yang diakui Agum, sebagai satuan organik ABRI, Kopassus tidak akan melakukan perbuatan tercela dan melukai rakyat seperti menculik aktivis dan menghilangkan orang.

"Saya tahu betul dan mengerti betul karena saya pernah dibesarkan dan menjadi komandannya. Tidak ada setitik pun pengabdian Kopassus itu diabdikan untuk kepentingan

bukan kepada bangsa dan negara," jelas mantan Pangdam VI Wirabhuana ini.

Kasus penculikan memang telah mencoreng nama baik Kopassus. Kasus yang diduga melibatkan mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo, Mayjen TNI Muchdi Pr, dan Komandan Grup IV Kolonel Inf Chairawan benar-benar menjadi beban berat bagi seluruh prajurit Kopassus. Juga, pukulan dan beban berat bagi ABRI. Dan, tentu juga bagi bangsa dan negara.

Tak mengherankan, pimpinan ABRI menganggap serius kasus penculikan tersebut. Buktinya, Pangab segera membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk memeriksa Prabowo, Muchdi, dan Chairawan. Sepuluh prajurit Kopassus yang terlibat penculikan pun kini disidik untuk diajukan ke mahmil.

"Kasus ini memang akan mempengaruhi citra dan kehormatan Kopassus. Namun, saya percaya semua prajurit Kopassus akan tetap tegar dan terus melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara sampai kapan pun," tegas Agum yang kini masuk anggota DKP.

Agum menjabat komandan Kopassus tahun 1994-1995. Saat ditarik ke Mabes ABRI sebagai staf ahli Pangab, jabatan yang ditinggalkan Agum diisi Subagyo H.S. Hanya sebentar menjabat, tahun 1996 Subagyo digantikan Prabowo. Saat dijabat Prabowo ini, Kopassus mengalami pengembangan besar-besaran.

Selain sistem persenjataan dimodernkan, pasukan dimekarkan dari tiga grup menjadi empat grup. Grup I berkedudukan di Serang, Grup II di Kartasura, Grup III sebagai pusat pendidikan Kopassus di Batujajar, Bandung, dan Grup IV sebagai pasukan antiteror di Cijantung, Jakarta. Status komandan yang semula dijabat jenderal bintang satu pun ditingkatkan menjadi jenderal bintang dua dengan sebutan Danjen Kopa–ssus. Menjelang SU MPR 1998, Prabowo mendapat promosi lagi menjadi Pangkostrad dengan pangkat letnan jenderal. Jabatannya di Kopassus diisioleh pilihannya sendiri, yaitu Mayjen TNI Muchdi Pr.

(adang d. bokin/bersambung)



Kolonel Inf Chairawan (paling kanan) bersama beberapa anggota Kopassus.

SAM Pusat
LEM
THE

dia:

BISNIS INDONES
JAKARTA POST
JAWA POS
KOMPAS
KD. RAKYAT
MEDIA INDONES

Wal

SURAB
dya Surab
untuk secep
pembantu
yang hilan
lalu, terus
perkara itu
juga minta
pat.

Menur
madya Su
permintaa
itu semat
mukan.
sian, pen
up Bako
sudah mi
bang, ke

Dijela
secara r
Bakorst
mencari
likota r
kungan
pencari

LSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Kopassus, Pasukan Komando Kebanggaan Tokoh-tokohnya (2-Habis)

Woyla Jadikan Terhebat Ketiga di Dunia

Selalu Jadi Incaran Lulusan Akmil

Banyak tokoh yang turut membesarkan Kopassus. Salah satunya, L.B. Moerdani. Mantan Pangab ini adalah angkatan pertama prajurit pasukan baret merah ini. Sebagai perwira yang berbintang terang, Moerdani pula yang kemudian banyak melakukan restrukturisasi di tubuh ABRI. Termasuk mengubah Kopasandha menjadi Kopassus. Fakta juga membuktikan, dari tuan elite di AD inilah muncul banyak tokoh ngetop, baik dilingkungan militer maupun pemerintahan. Lalu, bagaimana Kopassus sekarang?

TIDAKLAH lengkap memotret perjalanan Kopassus tanpa melihat sosok Moerdani. Meski tak sempat menjadi komandan Kopassus, nama Beni –demikian panggilan Moerdani– cukup melegenda di korps baret merah tersebut. Ketokohannya hanya bisa disaingi Prabowo pada masa jayanya.

Beni adalah orang yang merasakan sentuhan latihan dari pelatih Kopassus pertama, Kapten Idjon Djanbi. Idjon adalah perwira Korps Special Troopen KNIL yang direkrut Kolonel Kawilarang pada 1952 untuk melatih pasukan komando TNI di Bandung. Idjon adalah komandan Kopassus pertama (saat itu bernama Komando Teritorium III Siliwangi). Beni, perwira kelahiran Cepu, Jateng, 2 Oktober 1932 ini, banyak menempa diri di Kopassus. Sebagai perwira cemerlang, Beni dalam waktu cepat menjadi pelatih Korps Komando. Kemudian, dia dipercaya menjadi kepala Sekolah Komando di Batujajar, Bandung. Karier selanjutnya di Kopassus adalah komandan Kompi RPKAD (1956–1957) dan komandan Batalyon I/RPKAD (1963–1964). Meski sempat mengikuti pendidikan perwira komando di Amerika Serikat, Beni tercatat tidak meneruskan kariernya di Kopassus. Oleh Presiden Soeharto, saat itu, ia lebih dipercaya menangani intelijen.

Meski menangani tugas intelijen, hubungan Beni dengan Kopassus terus terbina. Satu puncak prestasinya terjadi saat Beni menerjunkan Kopassus dalam operasi pembebasan sandera pembajakan pesawat Woyla di Bandara Don Muang, Bangkok, pada 1982. Operasi yang dikenal dengan kasus Woyla itu telah mengangkat citra Kopassus sebagai pasukan antiteror terhebat ketiga di dunia setelah milik Amerika dan Israel.

Operasi Woyla juga otomatis makin mengharumkan Beni. Kariernya pun bisa ditebak. Beni kemudian menjabat Pangab merangkap Pangkopkamtib. Sebagai prajurit yang pernah membesarkan dan dibesarkan di Kopassus, Beni sangat bangga pada korpsnya. Dalam tiap kali ulang tahun dan acara-acara Kopassus, dia akan selalu datang dengan baret kebesarannya, baret merah.

Para perwira muda Kopassus, termasuk Prabowo, juga sangat menaruh hormat kepada Beni. Mereka tahu, Beni adalah profil prajurit Kopassus yang profesional. Meskipun dikenal sebagai tokoh sulit tersenyum dan terkesan angker, Beni adalah sosok ABRI profesional.

"Kopassus telah mencapai kemajuan pesat. Ini suatu kebanggaan bagi kami, para seniornya. Hanya, jangan sampai lupa daratan atas berbagai pujian," begitu pesan Beni kala dimintai pendapat soal Kopassus.

Menjadi prajurit Kopassus memang kebanggaan tersendiri bagi tiap anggota ABRI. Sebagai satuan elite TNI AD, Kopassus selalu menjadi incaran para lulusan Akmil. Para perwira muda itu percaya, lewat Kopassus, karier mereka akan cemerlang. Anggapan para perwira muda itu memang bukan tanpa alasan.

Buktinya, selama ini banyak prajurit Kopassus yang mencapai puncak karier di garis struktural ABRI. Sudah bukan rahasia lagi, jabatan-jabatan strategis: Danyon, Danrem, atau Pangdam banyak diisi para perwira Kopassus. Pejabat strategis di garis komando tempur dan pembinaan teritorial pun banyak berasal dari pasukan komando tersebut.

Menjadi prajurit Kopasus memang tidak mudah. Sebab, untuk masuk Kopassus harus masuk kategori prajurit pilihan. Biasanya, prajurit Kopassus diambil dari sepuluh lulusan terbaik dalam berbagai tingkat pendidikan. Maka, tak berlebihan jika Kopassus mendapat tempat lebih "terhormat" di satuan-satuan lain TNI AD.

Mantan KSAD Jenderal (pur) Wismoyo Arismunandar termasuk tokoh yang begitu bangga dengan Kopassus.

Kebanggaan itu juga bukan tanpa sebab. Sejak lulus AMN pada 1963, Wismoyo langsung masuk Kopassus. Kariernya pun terus melesat.

Di struktur korps baret merah, Wismoyo antara lain pernah menjabat Danton Yon-3 RPKAD, komandan Tim B Yon Sandha, komandan Prayudha Yon Sandha, komandan Karsa Yudha Grup-4 Sandha, komandan Grup I Parako, dan terakhir Danjen Kopasandha (1983-1985). Tokoh yang sempat populer di awal 1990-an ini betul-betul dibesarkan di Kopassus.

Wismoyo adalah perwira generasi pasca '45 pertama yang memimpin Kopassus. Saat itu, Wismoyo menggantikan Yogie S.M. "Saya dibesarkan di Kopassus. Maka, wajar saya bangga dengan korps ini," kata Wismoyo saat menghadiri ulang tahun Kopassus tahun lalu.

Wismoyo yang kini menjadi ketua umum KONI Pusat ini menilai Kopassus sebagai satuan dengan tugas khusus. Di pundak Kopassus, terdapat tugas-tugas penting. Bahkan, tak jarang citra dan nama baik bangsa dan negara berada di pundak Kopassus.

Contohnya dalam kasus penyanderaan oleh tokoh GPK Irja Kelly Kwalik pada 1996 lalu, Kopassus mendapat tugas penting menyelamatkan sandera. Meskipun harus dilalui dengan waktu cukup panjang, tugas tersebut memang berhasil. Penyanderaan berakhir meski harus ditebus dengan pengorbanan yang tidak kecil. Sejumlah prajurit Kopassus dan satuan pembebasan sandera gugur.

Sukses membebaskan sandera, akhir 1997, Kopassus kembali mencatat prestasi mengagumkan. Kali ini, tim pendaki Gunung Himalaya dari Kopassus berhasil menancapkan sang saka Merah Putih di puncak gunung tertinggi di dunia, Mount Everest. Sukses Everest adalah puncak prestasi terakhir Prabowo di korps baret merah.

Prestasi Prabowo membawa prajuritnya menaklukkan gunung tertinggi di dunia itu akan menjadi tinta emas bagi ABRI. Juga, menjadi kebanggaan seluruh bangsa Indonesia. Sayang, Prabowo tidak hanya menorehkan tinta emas bagi Kopassus. Kasus penculikan dan orang hilang telah memberi noda bagi Kopassus saat dipimpin Prabowo pula.

Sebelum ini, masyarakat sipil pun begitu kagum kepada pasukan elite TNI Angkatan Darat ini. Bahkan, warga yang tinggal di sekitar Cijantung begitu bangganya menyebut rumahnya dekat markas Kopassus, jika ditanya tempat mereka tinggal.

Selain itu, masyarakat sipil cukup bangga jika di atas bufet di rumahnya dipajang beker suvenir dari Kopassus dengan lambang baret merah serta pisau sangkur berdiri tegak. Selain itu, meski tidak punya keluarga di Kopassus, orang-orang sepertinya punya kebanggaan kalau pintu rumahnya ditempeli stiker Kopassus.

Namun, dengan adanya pengungkapan kasus penculikan itu, entah apakah masih ada kebanggaan atau kekaguman masyarakat terhadap pasukan baret merah ini.

Seperti yang dikatakan Agum Gumelar, mudah-mudahan noda memalukan itu tidak menjadi nila yang merusak air sebelanga. Kasus penculikan itu tentu akan berpengaruh pada prajurit Kopassus. Namun, Agum menyebut para prajurit baret merah akan tegar menghadapi cobaan tersebut.

"Kalau berpengaruh, tentu saja. Tapi saya tahu betul, semua prajurit Kopassus tidak akan berhenti mengabdi kepada bangsa dan negara. Saya percaya itu dan saya tetap mencintai Kopassus," ujar mantan komandan Kopassus yang kini menjabat gubernur Lemhanas ini. **(adang d. bokin)**



djoko wahyudi

Para tokoh Kopassus di tengah para prajurit baret merah.

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

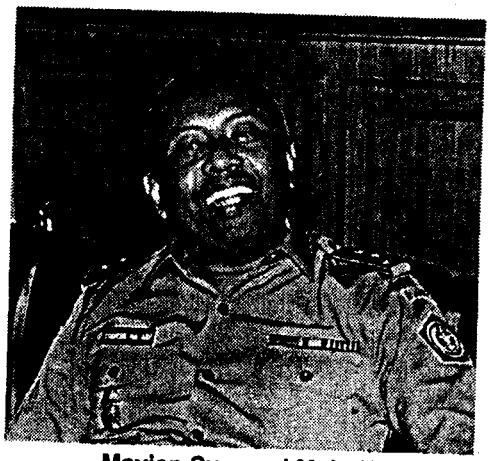
Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Janji ABRI

"Kita Ungkap Secara Tuntas"

SAMPAI kemarin, proses penyidikan kasus penculikan dan penganiayaan terhadap aktivis pro-demokrasi yang diduga melibatkan anggota Kopassus terus bergulir dan ditangani Tim Pencari Fakta (TPF) Puspom ABRI dan Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

Pernyataan tersebut diungkap Kapuspen ABRI Mayjen Syamsul Ma'arif kepada *Merdeka* di Jakarta, kemarin. Meski demikian, dia belum dapat menjelaskan sejauh mana proses penyidikan yang sudah dijalankan.



Mayjen Syamsul Ma'arif

"Kalau proses penyidikan itu kan tertutup. Jadi tunggu saja nanti di Mahmil," kata Kapuspen.

Karena prosedur standar pemeriksaan militer yang demikian, maka pihaknya belum dapat menjelaskan sangkaan yang dituduhkan kepada para anggota ABRI yang terlibat dalam kasus pidana tersebut.

Meski demikian, Kapuspen menegaskan bahwa ABRI akan mengungkapkan kasus penculikan dan penganiayaan yang dilakukan anggota secara transparan dan terbuka.

"Kita akan ungkap masalah itu secara tuntas," ujarnya. Demikian juga hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang tengah memeriksa Letjen Prabowo Subianto, Mayjen Muchdi dan Kolonel Chairawan.

Untuk mengungkap secara terbuka kasus tersebut, menurutnya, sudah menjadi tekad ABRI seperti yang telah ditegaskan Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto. "DKP dibentuk untuk memberikan saran kepada Pangab. Setelah saran itu diterima, tidak tertutup kemungkinan para perwira tersebut akan diajukan ke mahkamah militer. Itu tergantung saran DKP nanti," tandasnya. **(DP)**

Keluarga Bimo Petrus

"Ia Masih Hidup"

PERNYATAAN optimis tentang keberadaan korban-korban penculikan tersebut dilontarkan antara lain oleh Utomo Rahardjo, orang tua dari Bimo Petrus (25 tahun).

"Saya sama sekali tidak pernah terpikir tentang kemungkinan terburuk yang dialami Bimo karena saya benar-benar percaya kalau dia masih hidup hingga sekarang," tegas Utomo ketika dihubungi Merdeka.

Bahkan Utomo sangat mengharapkan agar pihak penculik selekasnya mengembalikan Bimo kepada keluarganya. "Saya menghimbau kepada pihak-pihak yang lebih tahu untuk menginformasikan dimana kiranya putra saya disembunyikan," katanya dengan penuh harap.

Keluarga Utomo nampaknya demikian yakin dengan keberadaan Indonesia sebagai negara hukum. Dan oleh sebab itu dia merasa akan memperoleh kepastian secara hukum mengenai nasib anaknya itu.

Bimo yang hingga kini masih terdaftar sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, kata ayahnya adalah anak yang suka menolong dan karena senang bergaul maka wajar saja kalau dia punya banyak teman. "Selain itu dari kecil dia pun rajin dan tekun beribadah," tukasnya.

Maka, imbuh Utomo tak pernah selintas pun kami membayangkan bahwa Bimo bisa mempunyai musuh di luar atau sampai menyakiti orang lain.

Memang, diakuinya kalau dirinya tidak terlalu banyak mengetahui kegiatan Bimo di luar kampus yang aktif dalam berbagai organisasi. Dan keluarganya pun tidak pernah merasa curiga dengan aktivitas Bimo di luar rumah.

"Asalkan tidak merugikan orang lain, kami tidak pernah khawatir terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan Bimo," ujarnya.

Berdasarkan data yang terdapat pada YLBHI, Bimo adalah ketua Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi di Surabaya.

Disamping itu Bimo juga pernah diminta menjadi pengurus pusat Partai Rakyat Demokrat (PRD). Sebab itu tak heran apabila dia dikenal sebagai pemuda yang cukup berani dan radikal di kalangan aktivis.

Keluarga Noval Alkatiri

"Kami Pasrah, Tapi..."

SEMENTARA itu dari keluarga Noval Alkatiri menyatakan bahwa hingga saat ini mereka belum pernah membicarakan tentang upaya pengajuan tuntutan terhadap pelaku penculikan apabila dalam kenyataan nanti Noval sudah meninggal.

"Kalau tuntutan dari keluarga sih belum ada sampai sekarang, tapi memang kita akan tetap tanya kepada pihak ABRI kenapa kakak saya sampai diperlakukan begitu," ungkap Soraya, salah seorang adik Noval.

Dituturkannya bahwa keluarganya berkeyakinan kalau Noval masih hidup. Karena itu apabila nanti kakaknya tersebut dinyatakan sudah meninggal maka keluarganya akan menganggap hal itu sebagai kehendak Yang Maha Kuasa.

"Ya kami akan menerimanya dengan pasrah tapi akan tetap menanyakan apa alasannya sampai Noval bisa meninggal. Jika dia memang bersalah ya boleh dihukum tapi tidak dengan cara menghilangkan nyawanya seperti itu," papar Soraya.

Walaupun belum pernah merencanakan niat untuk mengajukan tuntutan namun kelihatannya keluarga Alkatiri ini akan tetap mempersoalkan perihal kematian Noval apabila nanti terbukti.

Peristiwa penculikan Noval sendiri sempat membuat goncang ibunya yang sebelumnya sering sakit-sakitan karena mengidap penyakita gula. "Karena peristiwa itu ibu saya shock malah waktu itu kadar gulanya naik turun, kalau lagi ingat sama Noval maka gulanya langsung naik lagi," jelasnya

Dalam kehidupan sehari-harinya, Noval yang juga lulusan dari sebuah Sekolah Menegah Pertama (SMP) ini menurut sang adik memiliki sifat suka menolong orang lain. "Teman-teman kantornya juga banyak karena dia orangnya baik sering membantu kalau ada yang kesusahan," katanya.

Pekerjaan Novel sendiri sebelum diculik adalah menjadi pimpinan dari perusahaan Sangkuriang yang didirikannya, PT tersebut itu bergerak dalam bidang ketenagakerjaan.

Keluarga Yadin Muhyidin

"Meski Takdir, Beritanya Tetap Ditunggu"

KELUARGA Yadin Muhyidin justru ingin mengajukan tuntutan jika pemuda berumur 22 tahun itu ternyata ditemukan meninggal.

"Kalau pada akhirnya Yadin tidak kembali ke rumah karena sudah meninggal maka keluarga kami akan menuntut pemerintah bahkan kalau perlu sampai ke Mahkamah Agung," tegas Teti Rohimah, kakak kandung Yadin.

Ini diungkapkannya karena menurut sang kakak, Yadin tidak layak menjadi korban penculikan. "Adik saya itu tidak pernah terlibat dalam organisasi apapun dan dia bukan aktivis," ujar Teti.

Keberadaan Yadin sesehari sebagai karyawan disalah satu perusahaan pelayaran menurut Teti pun tetap berkeyakinan bahwa Yadin masih hidup. "Mungkin itulah keyakinan saya kalau Yadin masih hidup," ungkap ibundanya, Nunung Nurhasanah.

Kalaupun, lanjut Nunung ternyata putranya itu sudah meninggal maka dia dan keuarganya tentu tak bisa menyangkali takdir.

"Jadi andaikata Yadin sudah meninggal ya mau dibilang apa, itu sudah kehendak Tuhan. Tapi kalau begitu kan harus ada beritanya," tutur Nunung.

Dalam hal tuntut menuntut, ibu Yadin ini tidak begitu antusias nampaknya. " Ya soal tuntutan itu saya nggak bisa memutuskannya sendiri karena harus dimusyawarahkan dulu dengan keluarga. Tapi sampai sekarang keluarga belum pernah berpikir

Keluarga Hendra Hamli

"Akan Menuntut Kopassus"

SEPERTI halnya keluarga Yadin, dalam hal ini keluarga korban penculikan Hendra Hambali juga berniat untuk menuntut jika putra dari pasangan Hambali dan Ratna tersebut akhirnya diketemukan sudah meninggal.

" Andaikata nanti Kopassus menyatakan bahwa Hendra sudah meninggal saya pasti akan menuntutnya bersama-sama dengan keluarga korban penculikan lainnya," tandas Charlie.

Bahkan, imbuhnya pengajuan tuntutan itu akan tetap dilaksanakan kendati nantinya Hendra yang tercatat sebagai salah seorang mahasiswa di Universitas Tarumanegara ini kembali ke rumah dalam keadaan hidup.

Sebelum diculik, Hendra memang dikenal sebagai anak yang pintar bergaul dengan berbagai lapisan masyarakat. Namun dia bukanlah aktivis yang berkiprah dalam organisasi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). "Ya saya tahu Hendra itu anaknya agak nakal maksudnya dia itu suka ikut-ikutan kalau ada demonstrasi seperti pada peristiwa 12 Mei lalu di Trisakti," paparnya.

Keluarga Yani Afri

"Tuntut yang Bilang Mati"

BEGITU pula sikap dari Tuti, ibu Yani Afri (27) yang kelihatannya pasrah hingga tidak berniat mengajukan tuntutan terhadap para penculik anaknya itu.

"Apabila ada yang memberitakan atau membuat isu bahwa Yani sudah meninggal maka saya akan menuntut orang tersebut sampai ke akar-akarnya," ungkap Tuti.

Yani yang sebelum diculik bekerja sebagai sopir angkutan memang sangat dekat dengan sang ibu bila dibandingkan dengan saudaranya yang lain.

Jadi, kata Tuti kalau seandainya Yani ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa lagi maka mungkin dia akan menjadi gila.

Apa yang diungkapkan oleh nyonya Tuti ini memang tidak berlebihan. Sebagai anak yang dekat dengan ibu, kehadiran Yani ditengah keluarga juga menjadi salah satu tiang penguat ekonomi keluarga.

Begitulah, hari-hari terakhir ini Tuti selain terus berdo'a, ia juga berusaha untuk mengikuti segala macam perkembangan berita yang berkaitan dengan kasus yang menimpa anaknya itu. Tapi, dengan mimik serius ia mengngkapkan siapapun yang akan menyampaikan informasi tentang anaknya itu, kalau salah akan ia tuntut. "Siapapun dia, saya tidak peduli," katanya berapi-api.

Keluarga Dedi Hamdun

"Tak Rela Suaminya Diambil"

"POKOKNYA kembalikan suami saya!. Kata-kata inilah yang selalu meluncur dari mantan aktris panas, Eva Arnaz yang suaminya menjadi korban penculikan. Kalimat ini pun seolah menjadi *pening statement* setiap kali ia melakukan tuntutan tentang nasib suaminya, atau sedang membicarakan suaminya.

"Aparat ini memang kerjaannya lambat. Masak setiap kali ditanya jawabannya itu-itu saja," kata Eva saat ditemui di LBH beberapa waktu yang lalu.

Dedy Oemar Hamdun, adalah suami Eva yang menjadi korban penculikan dan sampai saat ini masih belum ditemukan.

Eva Arnaz sendiri, beberapa hari sebelum turunnya Soeharto sebenarnya sudah berusaha maksimal mencari di mana suaminya, termasuk mengadu ke LBH. Tapi, hampir empat bulan ini, jangankan kabar tentang suaminya, kabar tentang bagaimana hasil penyelidikan tentang hilangnya sang suami saja belum ia terima.

"Jawabannya, ya itu itu saja. Pokoknya, sampai di manapun akan saya kejar terus. Saya tidak rela suami saya diambil begitu saja. Memangnya mereka itu siapa," ujarnya dengan mata merah dan sembab.

Perjuangan Eva mencari sang suami, setiap hari memang terlihat semakin keras. Selain intensitas kehadirannya yang tinggi di LBH Jl Diponegoro atau Markas Puspom di Gambir, salah seorang kerabat Eva mengungkapkan bahwa upaya-upaya lain juga dilakukan Eva.

Bahkan, kalau dulu kedatangan Evva ke LBH atau ke Puspom hanya ditemani dua atau tiga dari anggota keluarganya, akhir-akhir ini ia membawa juga seluruh anggota keluarga.

Bahkan, saat menghadap ke Puspom minggu lalu, ia ditemani oleh mertua, paman, bibi, dan saudara-saudara dari pihak sang suami dan adiknya.

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Hari-hari Kelabu Keluarga Korban Penculikan

"Cemas, Tegang, Pasrah dan Siap Menuntut"

KASUS penculikan yang menyebabkan hilangnya beberapa aktivis, dari awalnya memang sudah terlihat aneh. Orang yang ada tiba-tiba lenyap, dari lenyap tiba-tiba ada. Tetapi, keanehan ini rasanya semakin sulit diterima oleh para keluarga korban penculikan itu. Penantian mereka semakin dipenuhi dengan kecemasan. Tidak saja karena gencarnya berita penemuan mayat, juga tentang proses penyidikan yang dinilai masih lambat dan kompromis itu. Orang mungkin sudah menduga-duga, nasib apa sebenarnya yang saat ini tengah menimpa para korban penculikan yang belum kembali itu. Semua kemungkinan bisa saja terjadi. Termasuk, hukuman berat bagi dalang semua ini —yang tiba-tiba menjadi tampak aneh di depan banyak orang. Berikut beberapa pengakuan keluarga korban penculikan yang belum kembali kepada Eshter Permatasari dan Imam Mawardi dari Merdeka.



ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

"Coba Cek di Kali Ciliwung"

"SAYA sangat mengkhawatirkan keadaan mereka," ujar Pius Lustrilanang mengenai nasib korban penculikan yang belum kembali. Aktivis Aldera yang sempat hilang diculik itu mengungkapkan sangat kecil kemungkinan para korban penculikan itu bisa kembali.

"Yang saya tahu, Sony, Ryan, Hendrawan dan beberapa teman yang lain itu sekitar tanggal 16 Maret sudah dikeluarkan dari lokasi penyekapan. Biasanya, kalau sudah keluar mereka akan dikembalikan lagi ke rumahnya atau ke kantor polisi. Tapi, sampai sekarang baik di rumah atau di kantor polisi mereka tidak ada," katanya.

Apakah ada kemungkinan bahwa mayat-mayat yang ditemukan di Lampung, Kepulauan Seribu, atau di Filipina diantaranya ada para aktivis yang diculik itu?

"Saya kok nggak yakin kalau itu benar mayat-mayat mereka. Rasanya tidak mungkin mereka dibunuh di tempat diluar Jakarta. Kalaupun mereka dibunuh, saya kira itu bisa dilakukan di Jakarta," katanya.

Lagi pula, lanjut dia, kenapa para penculiknya repot-repot membunuh mereka di luar kota. "Kondisinya sangat memungkinkan kalau korban penculikan itu dibunuh di sekitar Jakarta," katanya.

Apalagi, dari pengalaman Pius sendiri saat diculik, perlakuan para penculiknya itu sangat memungkinkan para korban diperlakukan apa saja; termasuk dibunuh. "Kalau nggak cocok sama mereka, langsung saja digebuk, dipukul macam-macamlah. Belum lagi kalau tiba-tiba mereka dapat perintah yang lain lagi. Main hantamnya ke korban juga," katanya.

"Pokoknya, mau dibakar atau mau dibunuh, itu sangat memungkinkan. Mereka (para penculik itu) benar-benar tidak obyektif dan ngawur saja dalam memeriksa," katanya.

Lalu kira-kira ada dimana mayat mereka jika benar-benar sudah meninggal? "Coba saja di cek di Kali Ciliwung. Cari kira-kira apa ada penemuan mayat di sana, sekitar beberapa hari sebelum turunnya Soeharto," kata Pius.

Apa yang diungkapkan Pius ini mungkin bisa jadi petunjuk, karena sebagian korban penculikan sebenarnya sudah di keluarkan dari lokasi penculikan beberapa hari sebelum Soeharto jatuh. "Bisa jadi, karena yang menculik itu marah dan frustasi, akhirnya mereka main tembak saja," katanya.

Hambatan Politis

Sementara itu, Munir SH, Ketua Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) tetap yakin mereka yang belum kembali masih hidup. "Secara pribadi dan sebagai ketua Kontras, tentu saya berprinsip harus meyakini bahwa mereka masih hidup. Dengan demikian, saya akan terus melakukan penyelidikan sampai tuntas," katanya.

Tapi bagaimana jika ternyata mereka sudah tiada?" Yang penting semua jelas dulu. Kalau ternyata mereka misalnya, sudah tidak ada lagi (meninggal -red), tentu saja pertanggungjawabannya harus sesuai dengan kapasitas orang meninggal. Ini *kan* bisa berarti pembunuhan berencana."

Alumni FH Universitas Brawijaya Malang ini mengaku sampai saat ini memang belum ada kejelasan kasus tersebut seperti yang diharapkan. Selain masih 'gelap'nya keberadaan korban yang belum kembali, di kalangan ABRI pun upaya mengungkap pelaku penculikan terjadi tarik menarik. ABRI memang terlihat serius menangani. Tetapi persoalan ini memang memiliki hambatan politis yang tak gampang diselesaikan.

Di tengah upaya pemerintah dan bangsa Indonesia umumnya mengembalikan kepercayaan dunia, berlarutnya masalah penculikan ini sebenarnya merupakan pukulan berat. Tetapi tak mungkin menutupi masalah ini dari mata dunia. Karenanya, sudah sejak beberapa waktu lalu Kontras membawa masalah ini ke Komnas HAM PBB di Jenewa.

Tanpa keterlibatan lembaga internasional, kasus ini sebenarnya bisa diselesaikan. Tetapi bagaimanapun ini menyangkut masalah universal yang pasti disorot dan dipedulikan seluruh dunia.

Dengan demikian, posisi stategis yang diambil Kontras dalam konteks ini adalah menunjukkan kepada bangsa-bangsa di dunia bahwa ada bagian masyarakat Indonesia yang masih menghormati HAM. "Jadi, kita korektif terhadap masalah ini. Ini bukan soal siapa memukul siapa, tapi meluruskan," tandas Munir. Pada titik ini, Munir yakin opini dunia memang akan mempercepat upaya-upaya hukum dalam negeri.

Di samping itu, katanya, harus diakui selama ini PBB lebih percaya kepada lembaga informal berkaitan dengan upaya mencari informasi semacam ini. Keadaan ini terbangun karena sikap pemerintah yang cenderung defensif terhadap serangan-serangan khususnya dalam masalah pelanggran HAM.

Menggali informasi kasus-kasus bersifat universal lewat jalur-jalur resmi seringkali menemukan jalur buntu. (**Ipung/Nang**)

Kelas: .....

SAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

ia:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Dewan Kehormatan

Dari Kasus eks-KNIL hingga Liquisa

Kasus pertama yang melahirkan Dewan Kehormatan terjadi seusai perang gerilya kedua, pada 1949 di Yogyakarta. Kala itu, muncul pertentangan keras eks-tentara KNIL dan pegawai federal dengan para laskar gerilyawan. Mantan laskar gerilya merasa posisi eks tentara bentukan Belanda itu terlalu diistimewakan kendati itu merupakan konsekuensi kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB).

DK kedua terbentuk ketika kasus surat Kolonel Bambang Supeno yang berisi mosi tak percaya kepada KSAD Kolonel AH Nasution terjadi pada 1952. Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX membentuk DK atas usulan Pengurus Pusat Ikatan Perwira Republik Indonesia dan mengupayakan penyelesaiannya secara militer. Namun, ketidakpuasan beberapa perwira senior menyebabkan kasus ini berkembang menjadi peristiwa 17 Oktober 1952. Istana pun dikepung barisan panser dan Presiden Soekarno dituntut untuk membubarkan parlemen. Kasus ini baru berakhir tiga tahun kemudian, 1955 lewat 'Piagam Yogyakarta' selepas para perwira berziarah ke makam Panglima Besar Jenderal Soedirman.

Kasus yang melahirkan DK ketiga adalah ketika pergolakan PRRI/Permesta mencuat. Banyaknya perwira di daerah yang dianggap tidak taat kepada pimpinan di pusat mendorong pemerintah membentuk DK. Hasil dari DK lebih banyak memberikan amnesti dan abolisi kepada para perwira yang terlibat dalam pemberontakan tersebut.

Kasus keempat baru muncul 34 tahun kemudian lewat kehadiran Dewan Kehormatan Militer (DKM) akibat kasus insiden Santa Cruz, Dili, 12 November 1991. Dibentuk Kasad Jenderal TNI Edi Sudrajat, DKM ini diketuai Mayor Jenderal TNI Feisal Tanjung yang saat itu menjabat Dan Seskoad. Sejak DKM ini, alasan pembentukannya sudah tidak menyangkut persoalan internal ABRI tapi sudah menyangkut operasi militer ABRI yang memakan korban pihak sipil.

REPRO GATRA



■ GPK Timtim, picu Dewan Kehormatan.

Insiden Santa Cruz sendiri menyebabkan tewasnya sekitar 50 orang, dan hilangnya 90 orang serta sekitar 100 luka-luka. Atas peristiwa itu, 19 prajurit TNI AD dianggap bertanggung jawab. Dari jumlah itu, terdapat enam perwira yang jadi 'korban' DKM. Para perwira itu, mantan Pangdam Udayana Mayjen TNI Sintong Panjaitan dan Danrem 164 Wira Dharma Kol (Inf) JP Sepang serta mantan Dandim 1627/Dili Letkol (inf) Wahyu Hidayat meski dicopot jabatan strukturalnya namun masih dinas aktif. Nasib tragis malah diterima mantan Pangkolakops Brigjen TNI RS Waraouw dan mantan Dan Sektor C Kol (Inf) Binsar Aruan serta Dan Satgas Intel Kol (Inf) Gatot Purwanto yang diberhentikan dengan hormat dari dinas militer.

Kasus berikutnya yang menyebabkan diperiksanya para perwira TNI AD adalah kasus insiden Liquisa, 12 Januari 1995. DKP untuk memeriksa kasus ini dibentuk Kasad Jenderal TNI R Hartono. Berbeda dengan kasus Santa Cruz yang jumlah anggota DKM-nya tidak terlalu banyak, untuk kasus Liquisa jumlah personilnya mencapai 36 orang terdiri dari perwira tinggi dan menengah. Menurut Hartono seperti dikutip *Gatra* hal utama yang mendorong begitu banyaknya anggota DKP karena kasus Liquisa terbilang lebih kabur dari kasus Santa Cruz.

Kasus ini tuntas dalam waktu relatif cepat. Sejak pembentukan pada Maret 1995, akhir April DKP menyelesaikan tugas dengan hanya mengantarkan seorang perwira pertama Lettu Jeremias Kasse dan beberapa bintara ke hadapan pesakitan di Mahkamah Militer. Mahkamah Militer tersebut menghukum Kasse 4 tahun enam bulan penjara. Tak ada satu pun perwira menengah atau tinggi yang jadi atasan Kasse ditindak. Persoalannya, Kasse terbukti tidak menaati perintah dinas. Dandim 1638/ Liquisa Letkol (Inf) Tris Suryawan Adiwijaya selaku atasan Kasse telah memberi pengarahan yang mengharuskan ditangkapnya hidup-hidup GPK yang tidak bersenjata. Arahan ini disalahgunakan dengan membantai enam orang GPK tak bersenjata. ■ nf

Kelas: .....

SAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

dia:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Ketua DKP, **Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo**

Tidak Selalu Harus Mahmil

Ada kesan dengan dibentuknya DKP, ABRI setengah hati menyelesaikan kasus penculikan ini?

Sebagai ketua DKP saya berpendapat adalah satu hal yang baik seorang perwira [yang diduga melakukan pelanggaran] diproses melewati Dewan Kehormatan Perwira. Sudah dijelaskan bahwa seorang perwira itu punya kode etik perwira yaitu *Budi Bakti Wira Utama* artinya berbudi baik dengan keperwiraan yang utama. Kalau tidak utama, kalau seorang perwira tidak juga melakukan keperwiraannya maka dia harus diajukan ke DKP. Demikianlah, seharusnya Anda ini kan mengangkat bahwa sedemikian bagusnya ABRI ini mau memutuskan sesuatu memakai proses yang demikian jeli, teliti dan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu termasuk keperwiraan tersebut.

Lalu mengapa ada perbedaan perlakuan antara perwira tinggi dan di bawahnya yang langsung diajukan ke mahmil?

Tidak. Tidak ada perbedaan. DKP itu ada prosesnya, itu berlaku untuk semua perwira. Kebetulan sekarang ini ada Pati-nya. Kalau sebelumnya kan perwira-perwira biasa. Lha yang melanggar di batalyon itu, tentu ada DKP. Tetapi tidak diumumkan, ini tertutup kok sifatnya. DKP itu sudah berkali-kali itu.

Begitulah, pada prinsipnya itu semua dalam rangka mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya, setepat-tepatnya untuk para perwira khususnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sehingga keputusan yang akan diambil nanti dihasilkan melalui pertimbangan yang teliti, jeli dan tepat. Diharapkan dengan proses itu keputusannya bisa tepat. Apakah keputusan itu diakhiri masa dinasnya dengan tidak hormat, apakah dinon-struktural itu masih proses.

Kerja DKP mendapat perhatian internasional. Apakah ini jadi beban moral?

DKP berusaha semaksimal dan seobyektif mungkin untuk bisa memberikan saran terbaik kepada Pangab dalam mengambil keputusan. Terbaik dinilai secara obyektif, fakta ataupun kesalahan yang dilanggarnya akan disampaikan kepada Pangab.

Setelah dibentuk DKP pada kasus penculikan, banyak tuntutan untuk kembali membuka kasus lama seperti Tanjung Priok dan Lampung. Komentar Anda?

Begini deh. Anda kan mengikuti pernyataan Pangab bahwa ABRI berniat dan bertekad serta berusaha membersihkan ABRI sehingga ABRI menjadi lebih baik. Kedua, dalam membangun bangsa ini. Misalnya saja Anda ketika menuju ke sini, Anda ribut saja soal sepatu, soal pakaian, nah ini kapan sampai ke Cipayung (tempat wawancara —Red). Jadi begitu. Dulu para pelaku kasus-kasus yang Anda sebutkan telah dihukum melalui proses dan sudah dilakukan tindakan hukuman yang setimpal menurut kesalahan yang dilakukannya waktu itu. Dan sekarang mari kita lihat ke depan. Jangan kita selalu disibukkan dengan hal-hal yang kurang menguntungkan apalagi yang lalu, lalu, lalu. Mari niat baik, tekad baik dan upaya yang baik ini disambut dengan baik, dibantu kalau ada hal-hal informasi yang memperkuat dalam DKP atau hal-hal lain terutama yang berkaitan dengan stabilitas keamanan untuk bisa digunakan aparat keamanan. Mari bersama-sama seluruh komponen bangsa ini menjaga stabilitas keamanan dan membangun ekonomi agar bisa keluar dari krisis.

TEGUH INDRA/REP



Kalau perwira sampai dimasukkan ke DKP tentu ada hal-hal yang tidak terhormat [telah dia lakukan].

Sejauh ini bagaimana kerja dewan yang Anda pimpin?

Prinsipnya lagi proses. Beberapa hari lalu diumumkan oleh Pangab, sehari kemudian kami sudah melakukan sidang, lalu mengecek lokasi untuk mencari keterangan-keterangan yang mendukung. Dengan demikian nanti diharapkan saran atau keputusan dari dewan ini akan lebih teliti, lengkap sehingga bentuk saran kepada Pangab betul-betul menjadi pertimbangan yang kuat untuk bisa mengambil keputusan yang tepat.

Apa sebenarnya kerja dewan ini?

Prinsipnya untuk mengecek kepada yang bersangkutan, menghadirkan saksi-saksi, mencari keterangan-keterangan lain untuk memperkuat keterangan tersebut. Sehingga kita bisa benar-benar mengetahui kesalahan-kesalahan perwira tersebut baik kesalahan disiplin, tabiat. Lalu apakah perwira itu dipertahankan atau harus diakhiri masa dinasnya.

Berapa lama proses itu?

Secepat mungkin.

Apakah Prabowo dkk mendapat pembela?

Ada. Ada pembela, ada [illegible] yang ditampilkan oleh yang diperiksa. Siapa pembela mereka? Nggak usah kita umumkan karena [illegible] sifatnya tertutup. Tapi pada prinsipnya kan ada pembelaannya. Hak-haknya termasuk kewajiban-kewajibannya ada dalam tata tertib DKP tersebut. Pembela ini berfungsi untuk memperkuat pertimbangan atau saran nanti sehingga keputusannya lebih tepat.

Sanksi apa yang mungkin akan dihasilkan DKP?

DKP tidak memberi sanksi. DKP hanya menyarankan ke Pangab. Apa kemungkinannya? Belum selesai kok tanya.

Tidak tertutup kemungkinan ke mahmil?

Ini masih dalam proses, dan jangan buru-buru.

Ada kesan bahwa mereka yang diajukan ke DKP sudah dinyatakan bersalah?

Kalau perwira sampai dimasukkan ke DKP tentu ada hal-hal yang tidak terhormat [telah dia lakukan]. Kalau tentang salah atau tidak tindakannya itu, hakim nanti yang menentukan. DKP hanya akan melihat dan meneliti apakah perwira ini masih pantas dipertahankan atau tidak.

Untuk mengetahui kesalahannya seharusnya digelar mahmil?

Tidak selalu. Tidak selalu harus mahmil. Percayalah pada aturan ini semua. Sampai pada keputusan nanti, itu ada aturan main-nya.

Ada isu Prabowo saat itu mendapat perintah dari Pangab Feisal Tanjung cs. KSAD Wiranto yang bila diterje-

Kelas: .....

Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

la:		Tanggal						Bulan		Tahun
ISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
ST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
NESIA	☐	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003



ANALISIS

DKP dan Masa Depan ABRI

lani

emberitaan di berbagai media massa menyangkut ABRI saat ini seakan menghilangkan kesan ABRI yang 'memen-kekaguman'. Kesan yang lama disandang ba-tiba menghilang dan membawa ABRI posisi *set back*. Orang pun bebas pertanyakan bahkan menyudutkan posisi hingga seolah-olah tak berdaya.

enapa hal itu bisa terjadi? Memahami posisi saat ini, tak bisa melepaskannya dalam sejarah ABRI pada masa 60-an. Itu akan udahkan melihat sikap ABRI di masa

at itu, ketika meruntuhkan Orde Lama, ABRI berdiri di barisan rakyat, meski watak sebagai prajurit menuntutnya tetap loyal da Soekarno. Artinya, biar ABRI itu olitik, mereka bukan 'parpol'. Mereka diikat disiplin militer yang menuntutnya tunduk-n kepada atasan. Oleh karenanya, meski ter-berseberangan, ABRI tetap wajib *sami'na to'na* kepada Soekarno.

takutan kepada PKI-lah yang menjadikan mengambil posisi yang kian renggang, dan nya berseberangan dengan Soekarno. Itu ak langsung berhadapan muka dengan arno.

njelang Orde Lama runtuh, barangkali dianggap sebagai satu-satunya kekuatan bisa melawan. Bersama dengan kekuatan siswa dan pelajar, ABRI berhasil mbangkan Orde Lama. Kekuatan ABRI mendapat legitimasi dari rakyat dan khiri kekuasaan Soekarno.

ena itu, ketika Seminar TNI AD pada us 1966 memutuskan untuk membentuk intahan yang disebut Orde Baru, ABRI pada kesimpulan untuk membentuk emerintah Indonesia yang akan anakan Pancasila dan UUD 1945 secara dan konsekuen.

likasi keputusan ini berakibat pada ian drastis posisi ABRI di masa rezim aru. Di masa lalu, ABRI hanya ada dalam frastruktur. Tapi, ABRI dengan tiba-tiba atkan dirinya ada di suprastruktur. ahasa Jenderal Panggabean, posisi itu *commanding position*, istilah yang an tak digunakan karena terkesan Meski demikian, kenyataan memang ukkan hal tersebut.

a saja, pemimpin yang kemudian kan ABRI dan didukung oleh rakyat lewat MPRS berhasil membangun dan memusatkan kekuasaan dalam tangannya, melalui serangkaian rekayasa politik yang sistematik dan canggih. Proses yang berlangsung menempatkan ABRI berangsur-angsur menjadi tak berkutik. Syaiful Sulun menyebutnya tak lebih dari instrumen kekuasaan.

Itu sebabnya, sulit menjawab bila orang mempertanyakan sistem apa yang sebenarnya dibangun oleh ABRI. ABRI mengangkat seorang menjadi pemimpin bangsa ini, namun di kemudian hari tak mampu mengontrolnya. Getir sekali pertanyaan itu. Dilema yang dihadapi ABRI adalah posisi dan perannya yang bukan saja sebagai alat kekuatan untuk Hankam, tapi sekaligus juga sebagai kekuatan sosial politik. Sehingga dengan demikian kekuatan sospol ABRI dituntut untuk independen.

Tapi, sebagai alat kekuatan Hankam yang tidak boleh menjadi senjata untuk memaksakan kehendak. Sebagai kelompok yang disebut *expert in violence*, tanpa kontrol yang baik, ABRI dapat menjadi kekuatan yang menakutkan.

Ada beberapa faktor yang bisa mengontrolnya. Pertama, kekuasaan tentara itu harus ada *moral platform* untuk menegakkan disiplin. Moral yang kokoh untuk menopang perilaku disiplin. Itulah mengapa di ABRI ada kode etik Sapta Marga, ada ancaman hukuman militer dll yang dapat memaksa perilaku yang kompatibel dengan prinsip-prinsip moral.

Kedua, faktor eksternal yakni kontrol politik oleh kekuasaan politik di atas ABRI untuk mencegah penyalahgunaan kekuasannya. Ketiga, kontrol hukum baik nasional maupun kemanusiaan yang lebih dikenal dengan konvesi-konvensi Jenewa.

Tentang sikap moral itu, Jendral Eisenhower mengatakan *There are no bad soldiers, we have only bad officers* (tak ada prajurit yang bobrok, yang jelek itu korps perwiranya). Karena itu, saya punya kesimpulan para perwira Kopassus yang kini menghadapi DKP sesungguhnya merupakan korban dari sistem. Bukan hanya Kopassus atau ABRI, tapi kita semua pada berbagai tingkat menjadi korban sistem itu. *We're all victims by the past system*. Kita karenanya sampai kehilangan moralitas dan martabat bangsa.

Dewan Kehormatan Perwira itu merupakan proses baku di militer. Bila tamtama dan bintara melanggar disiplin, maka terkena hukuman disiplin. Yang memberi hukuman adalah 'ankum' (atasan yang berhak memberi hukuman), suatu jabatan yang diberikan kepada komandan perwira yang jenjang jabatannya sudah cukup matang.

Tapi untuk perwira, yang dalam militer dituntut punya kesempurnaan watak, membina disiplin anak buahnya, jadi teladan, karenanya lalu dianggap tak lagi pantas bila ada perwira yang sampai melanggar disiplin. Dia akan dianggap menghancurkan kehormatan perwira.

Kalau sampai ada pelanggaran disiplin oleh seorang perwira, maka militer membentuk Dewan Kehormatan Perwira. Di lembaga ini nanti yang akan dinilai adalah apakah ada pencemaran atau tidak, yakni pencemaran kehormatan.

DKP kepada perwira Kopassus itu untuk melihat apakah yang dilakukan mereka tergolong pelanggaran disiplin. Bila ya, maka disiplin berat atau ringan. Dan apakah dalam pelanggaran berat itu ada yang bisa dipandang batas delik pidana. Apakah itu delik pidana biasa atau delik pidana berat. Uniknya, di dalam institusi militer, batas antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran pidana batasnya diibaratkan seperti rambut dibelah tujuh.

Dewan Kehormatan Perwira (DKP) merupakan usaha ABRI yang menunjukkan bahwa komitmen ABRI kepada supremasi hukum tetap diprioritaskan. DKP sekarang ini, secara sadar juga untuk memulihkan citra ABRI. Namun, itu tak berarti ABRI surut dalam urusan untuk mengusut kasus penculikan yang menghebohkan itu ke mahkamah militer. Bila DKP melihat ada cukup kuat bukti-bukti yang menunjukkan kepada unsur pidana di dalamnya, saya kira, perwira yang terlibat akan dibawa ke mahkamah militer. Jadi, itu bukan berarti tak tertutup kemungkinan dari DKP berlanjut ke mahkamah militer. Prinsipnya, hukum harus ditegakkan.

Dengan memperhatikan berbagai sikap ABRI dan sikap masyarakat serta perkembangan lingkungan, kita bisa meramalkan peran sospol ABRI di masa depan sedikit banyak akan berubah. Lebih-lebih karena generasi muda ABRI akan semakin profesional. Jadi, dalam memainkan peran politiknya dari masa ke masa tak akan pernah sama dengan peran yang pernah ada.

■ dw dikembangkan dari diskusi di *republika*

* ZA Maulani adalah pengamat militer.

Hal. 17 .....
Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal	Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Motivasi politik harus diungkap'

adiran Dewan Kehormatan rwira (DKP), meski awal- enjanjikan angin segar, ki- u mengundang kekhawati- syarakat. Sebelumnya, ma- at masih berharap banyak ap dewan itu. Kini, harapan ap DKP untuk bisa men- ntas kasus penculikan ak- ulai menipis.

r hukum Loebby Luqman ngatkan keterlibatan DKP pemeriksaan terhadap per- BRI bermasalah lebih pada iksaan kode-kode etik per- amun, bila para perwira ter- erbukti bukan sekedar me- r etika maka mereka diajuk- Mahkamah Militer (Mahmil). urut dia, pengusutan terha- rwira yang diduga bersalah dilihat jenis pelanggaran ilakukan perwira itu.

arang, Prabowo sedang di- bukan sekedar untuk pe- an etika keperwiraan sa- suatu hal yang melanggar uan perundang-undangan. emikian, tidak bisa tidak, iajukan ke pengadilan."

menambahkan masyarakat engkhawatirkan bahwa ya hanya dianggap pelang- tika profesionalisme perwi- an suatu pelanggaran hu- ehingga, jelasnya, tindakan ambil ABRI hanya berupa uan dan penahanan pang- um yang bersalah.

a menggiring perwira terse- Mahmil, menurut dia, akan tung pada pemeriksaan eandainya prajurit [bawah- ira] yang diperiksa menya- ksi tersebut atas inisiatif [pelaksana], kita tidak bi- uat apa-apa."

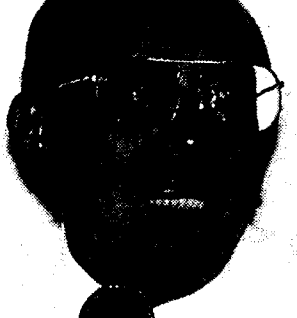
y menilai opini masyara- h mengarah pada keingin- hukuman bagi Letjen Pra- bianto karena dianggap kut. "Tapi sekarang ter- apa tidak, konsep hukum harus ditegakkan. Asas tidak bersalah itu harus kan."

enting saat ini, menurut Pharus melakukan peme- ecara transparan. Artinya ang bisa mengetahui dan ampai ada perlindungan korps.

igingatkan keterbukaan rarti semua orang bisa rosesnya. Pemeriksaan ifat intern namun ma-



Hendardi



Loebby Luqman

dia mengingatkan jangan sampai keterbukaan itu kebablasan sehingga langsung menuduh orang bersalah.

"Berfikirlah secara dewasa. Sekarang bagaimanapun harus ada yang terbuka. Kalau tidak, [citra] Koppassus lebih terpuruk lagi."

Loebby mengingatkan pengusutan bukan hanya untuk kasus orang hilang namun hendaknya juga menyangkut peristiwa 27 Juli 1996, penembakan di Trisaksi, penjarahan dan perkosaan. Namun, dia mengingatkan penanganannya jangan sampai dicampur aduk.

Meski ada kemungkinan otak pelakunya satu orang, menurut dia, harus dilihat kasus per kasus. Dia mencontohkan seandainya penculikan dilakukan Prabowo tetap harus dicari motivasinya sebagai lembaga atau pribadi. "Bisa saja seorang perwira memerintahkan 'amankan' yang bisa diartikan macam-macam."

Motif politik

Praktisi hukum Hendardi menilai pentingnya pembongkaran motif atau latar belakang politik dalam kasus yang melibatkan ABRI ini.

Bila hanya mau menyeret oknum dan memilah-milah sanksi pidana dan administratif, menurut dia, pengusutan bisa menggunakan mekanisme DKP dan Mahmil. Namun, jelasnya, bila ingin membongkar motivasi politiknya harus mengunakan mekanisme lain sehingga bisa menyeret penanggung

sus penculikan. Dia mencontohkan sejak awal Panglima ABRI menyatakan langkah penculikan itu dilakukan oleh oknum dan merupakan kesalahan prosedur. "Kami berpandangan ini bukan perbuatan iseng-iseng yang tidak sengaja. Ini perbuatan kesengajaan, terorganisasi dan memiliki tujuan politik. Sehingga yang kami tuntut sejak awal adalah motif politiknya dibongkar."

Pentingnya pembongkaran motif politik, menurut dia, agar kejadian seperti itu tidak terulang. "Supaya kita tidak dicerca negara lain bahwa kita bangsa yang tidak beradab."

Untuk menuntaskan kasus itu, menurut Hendardi, harus ada pihak ketiga yang menyelidiki kasus ini. "ABRI sudah tidak absah atau tidak memiliki legitimasi lagi untuk menyelidiki karena sudah mengakui unsurnya yang terlibat."

Bahkan, lanjutnya, sampai saat ini belum jelas adanya unsur sipil yang terlibat. "Yang dominan itu *kan* ABRI. Bagaimana logikanya jika pihak terlibat kemudian menyelidik dan kita menjadi penonton dari penyelidikan itu?"

Dia menilai penyelidik dari pihak ketiga harus independen, bukan pelaku ataupun korban. Dia mencontohkan penyelidik itu bisa berasal dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang hak azasi manusia atau Komnas HAM

kemauan pemerintah untuk me batkan PBB. Namun, menur dia, bila pemerintah mempuny komitmen politik kuat untuk me bongkar kasus ini maka har mengizinkan PBB terlibat dala penyelidikan. "Jika tidak, pemeri tah ini memang tidak jauh bert da dengan pemerintah yang lalu

Dia melihat DKP hanya terlih mengarahkan kasus itu pada p langgaran etika profesionalism Pengusutan terhadap tiga pe wira yang diduga bersalah, men rut dia, hanya bertujuan untuk m ngunci kasus penculikan dan p nyekapan sampai situ. Dia meng kui ketiga perwira itu masih mun kin diajukan ke Mahmil dan me dapat sanksi pidana militer. N mun, dia meragukan kasus i akan mampu menyeret panglim tinggi ABRI pada waktu itu. "Ki *kan* menerapkan asas pradug tidak bersalah. Soeharto dan Feis Tandjung harus diperiksa."

Bila berasumsi ada motif politi nya, menurut dia, sebetulnya bis diselidiki keterkaitan rangkaia tiga peristiwa yakni penculika penembakan di Trisaksi dan k rusuhan 13-15 Mei.

Menurut dia, ketiga peristiwa i memiliki pola yang sama, yak menggunakan kekerasan denga sasaran antara yang bisa diteba yakni membuat keresahan, ket daktenteraman, ketidaknyamana dan rasa khawatir yang besar masyarakat.

Dia melihat ketiga kasus itu s bagai proses yang menanjak. Awa nya, jelasnya, dalam kasus pe culikan dan penyekapan, korba tidak berani berbicara. Langka itu sebagai media untuk menja dikan masyarakat trauma.

Namun, menurut Hendard anggapan itu terpatahkan ketik Pius Lustrilanang berani melak kan kesaksian. sadar cara itu ka das, lanjutnya, mereka melakuka penembakan di kampus Unive sitas Trisaksi yang menyulut k rusuhan.

Bila hal itu disimak secara seksa ma, menurut dia, aksi itu terorgan sisasi. "Harus ditanyakan di man ABRI waktu itu?"

Amuk massa 13-15 Mesi silam menurut Hendardi, terkesan d biarkan. Aksi itu memiliki tujua antara, yakni mengelola psikolo gi massa agar merasa trauma. Tu juannya, lanjutnya, kemungkina mencari legitimasi baru setelah k

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐	KOMPAS	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

"Penculikan itu Terpola

Bisa diceritakan hasil temuan TPF DPR di Aceh?

Ada operasi militer terjadi pelanggaran hukum dan HAM di Aceh. Orang-orang yang dicurigai sebagai anggota dan simpatisan GPK, tanpa pakai ba bi bu, tanpa prosedur yang benar, langsung diculik oleh aparat militer. Kemudian mereka disekap di kamp-kamp militer, yakni di kamp militer di Rumoh Geudong, Kecamatan Mutiara Tiga, Kabupaten Pidie, dan kamp militer di Rancung, Kabupaten Aceh Utara. Kepada TPF DPR, para korban melaporkan, di kamp militer itu mereka disekap, disiksa, dan menyaksikan rekannya dibunuh. Mayatnya kemudian dikubur di belakang kamp militer. Malah ada yang mengaku, dia menguburkan korban penculikan di Pidie. Saya percaya itu.

Para korban melaporkan, banyak wanita yang diperkosa oleh aparat. Ada seorang perempuan diperkosa secara bergiliran oleh tiga oknum hingga pingsan. Kemudian banyak rumah warga yang dibakar. Juga ada seorang wanita yang diculik dan disekap di kamp militer, karena suaminya dicurigai sebagai simpatisan GPK. Karena sang suami tak di rumah, istrinya diambil, dibawa ke kamp militer, disiksa. Setelah suaminya datang ke kamp militer, isterinya lalu dibebaskan. Ini fakta. Ada orang-orang yang berhati srigala yang tega menyetujui perbuatan itu. Ini pelanggaran HAM yang paling dahsyat.

Jadi, saya tidak bisa menerima kalau ada yang mengatakan tidak ada kamp militer, tidak ada penyiksaan dan pembunuhan di Aceh. Ini berarti yang *ngomong* begitu *nggak* pakai hati nurani, inderanya *nggak* normal.

Siapa itu?

Termasuk yang ngomong begitu adalah Menko Polkam Feisal Tanjung. Saya tidak mengerti mengapa dia mengatakan pelanggaran hukum dan HAM di Aceh itu hanya karangan. Saya bantah itu. Saya mendengar langsung laporan dari masyarakat.

Selama di Aceh TPF DPR bedialog dengan para korban, Gubernur Aceh, Pangdam Bukit Barisan, Danrem, Muspida, dan sebagainya. Informasi para pejabat itu berbeda dengan yang kami peroleh dari masyarakat. Saya lebih percaya informasi dari masyarakat.

Sejak kapan terjadi penculikan?

Sejak 1990 sampai pertengahan Mei 1998, Aceh dijadikan Daerah Operasi Militer Ada yang mengatakan kasus di Aceh itu hanya ekses, salah prosedur, itu tidak ada perintah. Apakah itu benar? Kalau itu ekses, salah prosedur, tidak ada perintah, kenapa tidak dihentikan, dan mengapa masih berelangsung sekian lama? Penculikan itu melibatkan sebuah institusi dan terpola, sistematik. Dalam waktu yang sangat panjang, tidak ada upaya untuk menghentikan atau mencegahnya. *Enak aja* penguasa mengatakan itu sekedar ekses, salah oknum.

Tahun 1990, Pangab nya adalah Try Sutrisno, Menhankam nya LB Moerdani, Pangdam Bukit Barisan HR Pramono. Sedangkan Danrem Lilawangsa —yang membawahi Kodim Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur - pada tahun 1991 adalah Kolonel Syarwan Hamid. Saya tidak tahu persis berapa lama Syarwan Hamid menjadi Danrem Lilawangsa, tapi yang pasti saya tahu , tahun 1991, Danremnya adalah Syarwan.

Saat Syarwan menjadi Danrem tahun 1991 itulah di ketiga kabupaten yang menjadi kekuasaannya itu terjadi pelanggaran hukum dan HAM yang paling parah. Ketika saya ke Aceh 1991, saya tidak berani pulang ke rumah. Ngeri. Takut. Karena hampir tiap hari ditemukan mayat-mayat bergelimpangan di pinggir jalan. Tak seorang pun berani mengambil mayat-mayat tanpa seizin penguasa militer setempat.

Menurut Anda, bagaimana penyelesaian kasus Aceh?

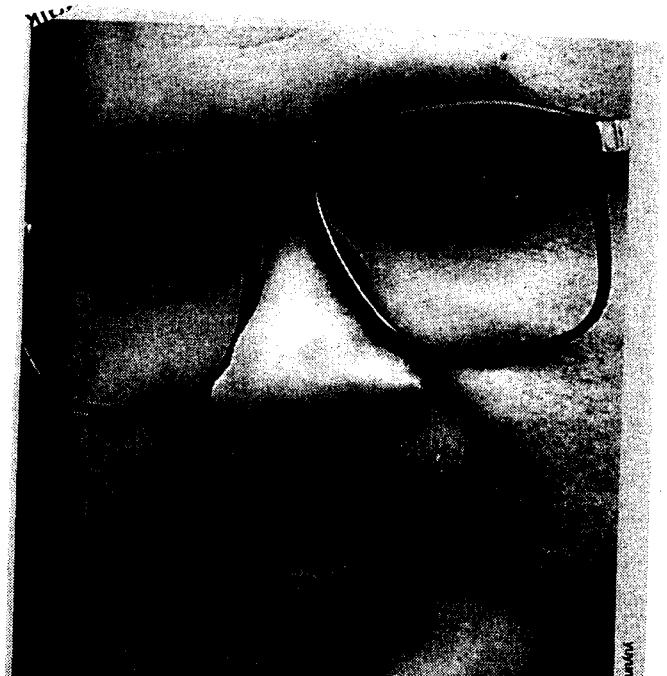
di semua tingkatan harus bertanggung jawab secara hukum. Semua korban, ana yatim piatu, janda, harus disantuni supay mandiri sampai mereka bisa hidup denga layak. Rumah-rumah yang dibakar, haru dibangun kembali. Karena sekarang men ka banyak yang tidak punya rumah Mereka terpaksa menggelandang atau dita mpung oleh sanak familinya. Selanjutny yang sakit-sakitan karena disiksa, haru diobati. Kalau ada tapol/napol yang masi disekap, segera dibebaskan. Mereka sang trauma selama operasi militer, harkat da martabat mereka terpuruk,

Anda seebutkan tadi, mereka diseka di kamp militer itu tanpa proses hukum

Hukum tidak jalan di Aceh! Ada sej rang pejabat setempat mengakui, selam operasi militer berjalan, hukum tidak ada d Aceh. Malah ada yang mengatakan KUHAP Anda lemparkan saja ke pari KUHAP tidak berlaku di Aceh.

Apa ada indikasi Aceh aka memisahkan diri dari RI?

Tidak! Aceh selalu setia pada RI. Ace sudah banyak menanam modal d Indonesia. Aceh sudah banyak sahan untuk negara ini. Ketika daerah lain sudah linglung pada negara kesatuan, Aceh teta tegar pada kesatuan negara, sejak dul sampai sekarang. Kami berbeda denga Irian Jaya dan Timtim. Aceh sudah puny saham di negeri ini, sedangkan merek masuk kemudian. Jangan disamakan, kam beda sejarah, beda karakter, dan beda sikap Kami tidak senang kalau disamakan den gan Irian dan Timtim. ■



ELSAM

Media:

- BISNIS I
- JAKART
- JAWA PO
- KOMPAS
- KD. RAK
- MEDIA I

Pan

Lag

Menhank
untuk meneli
dengan pem-
kinan akan d
"Bisa yang b
komandan-k
menanggapi
oleh Dewan I

Wiranto me
akan menungg
riksaan lengk
matan Perwir
masalah Letjer
mua bisa jelas
dia memberik
tong-sepotong
masalah kasu
bowo Subiant
Wiranto m
menjawab pe
seusai memb
rangan ABRI
langkap, Sela
Ketika dit
(Bawah Kend
Wiranto, BK
dan tergantu
itu dalam ra
satuan lainn
velnya. Siap
kan BKO, uj
komando ata
pat tugas-tu
menyusun s
untuk melal
itu. Dalam t
dilaksanaka
nkan per
ng lain. I
n itu kala
di namany
"Jadi dia
k satuan
ndali op
ng dapat
nto. Teru
kepada
ngan beg
ai pemer
nto.

Ketua I
yo Ha
k ben
ad per
Dani

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Kemal Idris : Mungkin Saja Perintah Penculikan Dari Atasan Prabowo

Jakarta, 12 Agustus

Mantan Pangkostrad Letjen TNI (Purn) Kemal Idris menegaskan, kalau terbukti melakukan penculikan, penyekapan dan penghilangan sejumlah aktivis, maka Letjen TNI Prabowo Subianto harus diajukan ke Mahkamah Militer dan tidak boleh ditutup-tutupi.

"Kalau itu terbukti, maka dia harus diajukan ke Mahmil, tidak boleh ditutupi. Pemeriksaan kasus ini harus dilakukan sampai tuntas," kata Kemal kepada *Pembaruan* di Jakarta, Rabu (12/8) pagi.

Dia pun menggarisbawahi, pokoknya yang salah harus dihukum dan diajukan ke Mahmil, tidak boleh disembunyikan. Juga jangan sampai ada kesan atau pandangan ataupun upaya untuk membantu atau menutupi yang bersalah. "Jangan sampai ada pandangan seperti itu. Kalau itu terjadi, maka ABRI akan terpuruk, terutama pimpinan ABRI-nya," tandas Kemal Idris.

Berkaitan dengan hasil pemeriksaan sementara yang telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP), khususnya masalah pem-BKO-an (Bantuan Kendali Operasi) pasukan, Letjen (Purn) Kemal Idris mengatakan, mungkin saja perintah yang diberikan itu disampaikan oleh perwira yang lebih tinggi.

"Mungkin saja ada yang memberikan perintah dari yang lebih atas. Siapa yang berhak memberikan perintah itu, atasannya langsung," tambah Kemal. Ketika ditanya apakah mungkin perintah yang diterima Letjen Prabowo saat itu tidak jelas, sehingga salah dalam menafsirkan, Letjen (Purn) Kemal mengatakan, kalau perintah yang diterima kurang jelas, maka dia harus bertanya, apa maksudnya.

"Kalau tidak jelas dan langsung melaksanakan perintahnya, kalau salah melaksanakan, maka yang salah dia, kenapa tidak tanya," ujar Kemal sambil menambahkan, kalau menerima perintah yang belum jelas harus ditanyakan supaya perintah itu dilaksanakan secara benar.

Objektif

Sementara itu, Ketua Fraksi Karya Pembangunan DPR RI, Irsyad Sudiro hari Selasa (11/8) mengatakan, masyarakat berharap pemeriksaan terhadap dua perwira tinggi dan seorang perwira menengah ABRI dalam kaitan dengan penculikan dan orang hilang oleh DKP (Dewan Kehormatan Perwira), objektif dan bisa dijelaskan kepada masyarakat.

Yang terpenting, hasil pemeriksaan itu harus menghasilkan dua hal, yaitu apakah hasil pemeriksaan itu mengindikasikan harus dilanjutkan ke pengadilan militer atau tidak, serta klarifikasi kepada masyarakat. "Saya yakin kalau hasil pemeriksaan itu objektif, akan diterima dengan lega oleh semua kalangan," katanya.

Mengenai ada indikasi kaitannya dengan BKO (Bawah Kendali Operasi), Irsyad mengatakan bisa saja hal itu berkaitan dengan operasi rahasia yang menyangkut keselamatan negara. Namun, bagaimanapun juga tidak bisa ditutup-tutupi jika hal itu mengarah kepada keterlibatan lembaga lain di dalam ABRI.

Menurut Irsyad, kalau memang hasil pemeriksaan itu mengindikasikan adanya keterlibatan pimpinan ABRI yang lebih tinggi, ya DKP harus terus mengusutnya.

Pengusutan secara tuntas persoalan ini, kata Irsyad akan sangat penting bagi ABRI dalam memulihkan citra dan kepercayaan rakyat dan juga bagi Indonesia dalam membangun kepercayaan internasional.

Oleh karena itu, kalau kemudian ada indikasi bahwa persoalan penculikan dan orang hilang ini menyangkut lembaga lain dan pejabat yang lebih tinggi, pengusutan tidak boleh berhenti. Harus sampai tuntas.

Transparan

Di tempat terpisah, Wakil Sekretaris FPP DPR RI, Lukman Hakiem mengatakan Selasa petang, pihak Dewan Kehormatan Perwira (DKP) harus memberikan penjelasan yang transparan kepada rakyat mengenai hasil pemeriksaan sejumlah perwira yang terkait dalam kasus penculikan aktivis, agar rakyat tidak terus menduga-duga dan termasuk isu-isu yang belum tentu benar.

Dikatakan, hasil kerja DKP jangan ditafsirkan sebagai pemeriksaan untuk kepentingan intern, tetapi harus dijabarkan sebagai kepentingan bangsa, karena ABRI adalah bagian tak terpisahkan dari warga bangsa ini.

"Saya melihat DKP kurang transparan, sehingga rakyat bertanya-tanya, malah bukan tidak mungkin akan memperkencang arus isu yang macam-macam yang akibatnya malah bisa makin memojokkan ABRI," katanya.

Ia juga mengingatkan agar semua pihak juga berpikir jernih bahwa pemeriksaan atas anggota ABRI yang terlibat kasus penculikan atau tindak kekerasan tidak dianggap sebagai memojokkan ABRI atau dianggap sebagai kasus luar biasa. Tetapi harus dipandang sebagai hal yang wajar dalam era penegakan hukum yang sesungguhnya.

Bukan hanya perwira, para menteri, malah mantan presiden sendiri pun kalau ternyata terlibat dalam kasus yang ada sekarang, harus diperiksa dan itu jangan dianggap sebagai keluarbiasaan. (M-11/S-22/W-7)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

dia:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Danpuspom ABRI Tentang Kasus Penculikan

Tidak Menutup Kemungkinan Oknum Satuan Lain Terlibat

Jakarta, 12 Agustus

Komandan Pusat Polisi Militer (Dan Puspom) ABRI Mayjen TNI Syamsu mengatakan, pemeriksaan kasus penculikan dan penyekapan sejumlah aktivis saat ini bisa berkembang. Sehingga, tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum dari satuan lain yang patut diduga terlibat.

"Jelas dengan masukan ini bisa kita kembangkan kemungkinan adanya keterlibatan oknum-oknum lain. Seperti dikatakan dalam laporan Sirait, ada keterlibatan intel Kodam 'kan. Nanti itu kita usut," kata Syamsu usai menerima laporan korban penculikan, Hendrik Dikson Sirait di Mapuspom ABRI Jakarta, hari Selasa (11/8).

Hendrik diculik pada tanggal 1 Agustus 1996 seusai menghadiri sidang gugatan Megawati Soekarnoputri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dikatakan, setelah dipukul dan dikeroyok beberapa orang, ia lalu dibawa dengan mobil ke suatu tempat dan diinterogasi beberapa kali. Selama enam hari Hendrik diinterogasi sambil dianiaya dan disiksa serta dipaksa untuk mengaku sebagai anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Secara khusus, Mayjen Syamsu menggarisbawahi dengan munculnya kasus ini, jangan disalahkan institusinya sebab itu oknum-oknumnya yang melakukan. Sebab Panglima ABRI tidak pernah memerintahkan kepada anggotanya untuk melakukan penganiayaan, penyekapan dan penculikan.

Ditegaskan, oknum-oknum yang yang melakukan hal-hal seperti itulah yang memang harus ditertibkan, terutama dalam zaman reformasi saat ini. Penyelidikan yang dilakukan polisi militer pasti secara transparan, yang salah harus diluruskan dan yang benar harus ditegakkan.

"Permasalahan Sirait bukan terlalu sulit, karena lebih jelas dan siapa yang patut diduga bisa lebih mudah diketahui. Hanya, kita harus menjujung tinggi asas praduga tidak bersalah," tandas Syamsu.

Introspeksi

Pada kesempatan tersebut Hendrik Dikson Sirait menyampaikan harapannya agar kasus yang dialaminya ini bisa menjadi bahan introspeksi ABRI untuk berani melakukan terobosan menghentikan tradisi kekerasan yang selalu digunakan oleh ABRI terhadap warga sipil dalam menyelesaikan masalah sosial politik di masyarakat.

"Saya juga ingin mengingatkan kepada Pak Syamsu bahwa kasus saya ini hanya merupakan ekses dari peristiwa yang lebih besar yaitu peristiwa 27 Juli 1996," kata Sirait.

Secara khusus Hendrik juga meminta jaminan keamanan dari Komandan Puspom ABRI, sebab menurut laporan dari tetangganya beberapa hari terakhir ini ada sejumlah orang tak dikenal yang mengawasi rumahnya.

"Apa pun namanya, yang terjadi antara kasus saya dengan yang terjadi terhadap teman-teman aktivis itu, merupakan bentuk penculikan dan penyiksaan yang dilakukan oleh satu skenario yang rapi, dilakukan oleh satu kerja yang terorganisir," tambah Sirait. (M-11)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☑ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Tak Ada yang Berani Menegur

Pengamat militer Letjen (Purn) Hasnan Habib mengatakan, dirinya tidak bisa memahami apa yang dikemukakan Kasad Jenderal Subagyo HS selaku Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) soal pengakuan Prabowo itu. Menurutnya, Subagyo harus secara jelas menyebutkan siapa yang memberikan perintah BKO kepada Prabowo.

"Karena perintah itu sudah pasti tidak bisa diberikan oleh perwira yang sama pangkatnya dengan Prabowo. Jadi, itu harus dari yang lebih tinggi dari Prabowo. Jadi siapa? Aneh, kok dikatakan salah menganalisa," kata Hasnan.

Menurutnya, setiap perwira harus mengerti apa yang dimaksud BKO. Sehingga kecil kemungkinan seorang perwira, apalagi sekelas Prabowo salah dalam melakukan analisa tersebut.

"Misalnya, atasannya memerintahkan. Prabowo keluarkan timmu atau grupmu untuk menjalankan perintah ini di bawah kendali operasi siapa. Itu bisa kendali Pangdam. Kalau memang begitu, Pangdam waktu itu ikut bertanggung jawab, bukan hanya Prabowo," tutur bekas Dubes RI untuk Amerika Serikat itu.

Kalau memang Prabowo salah dalam menganalisa, seharusnya si atasan jauh-jauh hari sudah mengingatkan perwira yang diberikan perintah. "*Kan* bisa disampaikan, Prabowo kamu keliru dan harus melaksanakannya seperti ini. Harusnya begitu *dong*," katanya.

Ketika ditanya apakah kesalahan dalam menganalisa BKO itu bisa masuk unsur pidana, dia mengatakan, harus dilihat dulu sampai di mana kesalahannya dan apa isi perintahnya. Apabila itu adalah operasi intelijen dengan melaksanakan penculikan maupun pembunuhan, itu merupakan suatu tindak pidana.

"Karena saya menilai saat ini bukan dalam suasana perang. Operasi intelijen itu untuk menghadapi musuh negara. Kalau ada yang tidak suka dengan pemerintah kita, bukan berarti dia itu musuh negara. Ini harus dimengerti dan dipahami perbedaannya," kata Hasnan Habib.

Sehingga apakah ini memenuhi unsur pidana atau tidak, menurutnya, harus dilihat dulu sampai sejauh mana analisa itu menyimpang dari perintah yang diberikan atasan Prabowo.

"Kalau ada unsur pidananya *ya* otomatis diajukan ke Mahmil. Tapi kenapa baru sekarang Prabowo mengakui kesalahannya? Padahal 10 anak buahnya sudah akan diajukan Puspom ABRI ke pengadilan," tuturnya.

Ketika ditanya apakah menghadirkan Prabowo dalam Mahkamah Militer tidak membawa konsekuensi tertentu dan bisa membuka semua rahasia, dia mengatakan, memang pada akhirnya semua yang terkait bisa terseret.

"Di dalam sistem penegakan hukum pidana militer yang paling menentukan adalah komandan selaku Papera. Kalau komandan merasa tindakan bawahannya itu ada unsur pidananya, namun apabila diperkarakan bisa menimbulkan keadaan yang lebih jelek lagi, maka dia berhak untuk tidak meneruskannya ke Mahkamah Militer. Terhadap Prabowo, Papera-nya adalah Pangab Wiranto," tuturnya.(PN)

Kelas: .....

Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

dia:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Di Mahkamah Militer ak Ada Mafia Peradilan

Bagaimana peluang Prabowo dan sejumlah anggota Kopassus lainnya untuk lolos dari jerat hukum, dalam kasus penculikan para aktivis politik? Selain debat soal hukum antara oditur dengan pembela di Mahmil nanti, ada institusi lain dalam ABRI yang cukup populer yaitu Ankum (atasan yang berhak menghukum). Melihat besarnya wewenang Ankum, ada kesan bahwa lembaga itu bisa digunakan untuk melindungi prajurit yang bersalah. Dalam praktik hari-hari, yang seperti sering terjadi. Jadi, bila Prabowo dan angka penculik lain diserahkan kepada Ankum, mereka bisa bebas' dari hukuman. Benarkah?

SESUNGGUHNYA tak ada lembaga apa pun yang bisa melepaskan pelaku tindak pidana dari hukuman. Tapi dalam praktik, sering kita lihat adanya 'hubungan-hubungan tertentu' yang menyebabkan seseorang yang jelas-jelas bersalah lolos dari hukuman. Adanya sinyalemen *mafia peradilan,* misalnya memungkinkan seorang pelaku kejahatan berat menjadi bebas, setidaknya menerima hukuman sangat ringan, yang tak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Di kalangan militer, kita mungkin takkan bertemu dengan *mafia peradilan,* tapi peluang untuk membebaskan anggota yang melakukan pelanggaran, terbuka dengan adanya lembaga Ankum.

Ada cukup banyak kasus pelanggaran pidana yang dilakukan oleh aparat, tapi si anggota tak berada di dalam sel, hal yang menimbulkan dugaan orang seakan-akan dia 'tak diapa-apakan.'

Yang lebih memprihatinkan, si pelaku tetap berdinas di bagian-bagian strategis, lalu sempat pula mengalami beberapa kali kenaikan pangkat.

Bagi masyarakat awam, hal ini terasa kurang adil jika pelanggaran yang dilakukan si oknum tergolong berat, misalnya merampok atau menembak mati orang lain. Sudah merugikan orang, tak masuk sel, malah naik pangkat.

Dalam kasus-kasus tersebut keterlibatan Ankum memang tak terlihat secara transparan. Hanya, sangat boleh diyakini bahwa seandainya si Ankum pasif, sang oknum sudah pasti menjalani hukuman.

Seorang komandan sudah pasti tak mau melihat anak buahnya terlibat urusan sampai ditahan oleh POM (Polisi Militer). Andai si anggota memang bersalah, paling tidak atasannya berusaha mengeluarkan dia dari sel tahanan sambil menantikan proses ke Mahmil.

Ada suatu contoh di suatu Polres Metro tentang seorang Bintara yang secara tak sengaja menembak orang sampai tewas. Peristiwa itu terjadi kurang lebih 10 tahun lalu, tapi sampai kini si pelaku bebas dan masih berdinas.

Kala itu di jalan raya di depan Polsek pihak petugas mengadakan razia kendaraan bermotor. Sebuah pick up bermuatan sayur mayur *nyelonong* melarikan diri. Seorang sersan dengan tangkas mencabut pistolnya, lalu melepaskan tembakan peringatan dan karena diabaikan, laras ditujukan ke ban mobil itu.

Pick up itu memang lalu berhenti, tapi peluru si sersan mengenai salah seorang tukang sayur yang menumpang kendaraan itu.

Ternyata si pedagang tewas. Sersan itu terkena hukuman disiplin dari Ankum dan setelah itu tak jelas betul proses pengadilannya. Sampai kini dia masih menjalani dinas di kepolisian.

Ini merupakan contoh betapa seorang komandan selaku Ankum bisa secara maksimal melindungi anak buahnya. Tapi misal yang lain menunjukkan bahwa Ankum juga tak bisa berbuat banyak manakala sang anak buah melakukan tindak pidana berat. Dia terpaksa membiarkan anggotanya diadili.

Misalnya Kapolres Depok sebagai Ankum dari Sersan Dua Syuhada terpaksa menyerahkan anak buahnya itu ke Provost Polda Metro Jaya, lantaran anggotanya itu melakukan pelanggaran pidana.

Malam itu sekitar pukul 23.30 saat Syuhada, anggota Polsek Bojong Gede sedang melakukan patroli jalan. Dia melihat sebuah kendaraan angkutan oprengan berhenti di tepi jalan menuju arah Bogor. Beberapa di antara penumpangnya tampak mendorong, mungkin angkot itu mogok.

Karena curiga, Syuhada yang memakai pakaian dinas dan menyandang senjata AK 47 mendekatkan sepeda motornya sambil menanyai sopir omprengan tentang surat-surat kendaraan. Sekilas dia menghitung, ada lima atau enam penumpang mobil tersebut. Makin curiga lagi anggota Polri ini,

karena ternyata tak lengkap surat-suratnya. Akhirnya Syuhada menyuruh sopir mengikutinya ke Polsek terdekat untuk diproses.

Tanpa banyak cincong sopir menjalankan dan mengikuti motor Syuhada. Namun, beberapa menit berjalan tempata secara cepat sopir balik kanan dan berusaha kabur meninggalkan polisi itu.

Tak ayal lagi, panas hati Syuhada, lalu mengejar kendaraan itu. Kejaran anggota ini tidak mengubah niat sopir untuk berhenti seperti yang diperintahkan anggota patroli tadi.

Kesal peringatannya tak digubris, dalam jarak tertentu Syuhada melepaskan tembakan peringatan. Ini pun tak dianggap oleh sopir omprengan. Akhirnya sasaran tembakan ditujukan ke arah ban mobil.

Beberapa letusan menggema lagi malam itu. Memang mobil berhenti. Setelah didekati ternyata akibat tembakan tadi, dua di antara penumpang mobil tertembak. Bahkan, salah seorang yaitu Majid harus menghembuskan nafas terakhirnya.

Malam itu juga anggota Provost Polres Depok yang dilapori menuju Bojong Gede dan mengamankan Syuhada. Kini anggota Polsek naas itu mengendon di Polda Metro Jaya, setelah mengalami proses pemeriksaan awal di Polres Metro Depok. Akibat lain lantaran tindakan Syuhada tersebut, dua hari kemudian jabatan Kapolsek yang dijabat Lettu Rusbandi diserahkan ke pada Lettu Kasdi.

"Kapolres sebagai Ankum dari Syuhada tidak perlu menggunakan kewenangannya menghukum bawahan, karena tindakan anak buahnya berkaitan dengan tindak pidana. Apalagi menyebabkan hilangnya nyawa manusia," ujar sumber *Merdeka*.

Ini memang jarang terjadi. Mungkin karena sekarang masyarakat sudah lebih terbuka, maka sang Ankum tak mau mengambil risiko kena protes. Dalam banyak kasus, terutama sebelum reformasi, kasus-kasus seperti itu tak berlanjut, atau, diteruskan tapi secara diam-diam.

Beda dengan Sipil

Perlakuan longgar seperti itu tak akan dialami oleh seorang tersangka sipil, walaupun perbuatannya serupa misalnya sama-sama melakukan pembunuhan secara tak sengaja, dalam arti tak direncanakan.

Seorang pegawai, swasta maupun PNS (pegawai negeri sipil) yang terkena kasus pidana bisa mendekam dalam sel tahanan sampai perkaranya disidangkan dan setelah divonis, harus segera masuk penjara. Sementara itu pangkat, jabatan dan kedudukannya bisa dipastikan berantakan.

Semua itu tentu saja bisa dikaitkan dengan tempat, status dan kedudukan si tersangka. Seorang anggota ABRI bisa dikatakan sangat jelas semuanya, misalnya di mana dia bertugas sehingga kemungkinan melarikan diri sangat kecil.

Ini berbeda dengan orang sipil yang bisa lari, lalu hilang tak tentu rimbanya. Sementara seorang anggota tetap bisa dipantau keberadaannya walau berpindah-pindah kesatuan, sehingga pihak berwenang bisa menyuratinya untuk, misalnya memenuhi suatu panggilan hukum.

Cukup Berat

Di lain pihak, sesungguhnya penangguhan penahanan juga dimungkinkan untuk tersangka sipil, bisanya dengan jaminan berupa uang ataupun jaminan pengacaranya, tentunya dengan syarat-syarat cukup berat.

Tetapi fasilitas seperti itu sangat sulit dinikmati oleh tersangka sipil. Seorang Kapolres, misalnya, akan sangat berat hati untuk mengabulkan suatu permohonan penangguhan penahanan bagi tersangka, katakanlah pembunuhan yang tak direncanakan.

Hal yang mendasari keberatan itu umumnya reaksi masyarakat di lingkungannya, apalagi kalau tempat tinggal pelaku berdekatan dengan rumah korbannya. Sudah jelas warga, bersama keluarga korban akan memprotes, mengapa seorang pembunuh dibiarkan bebas berkeliaran.

Maka, apabila terjadi penangguhan penahanan terhadap tersangka kasus berat, kesannya adalah bahwa dia telah memperoleh perlakuan istimewa. Ini akan mudah menimbulkan isu bahwa lepasnya tersangka dari tahanan pasti karena memberikan imbalan kepada petugas. Apalagi bila keluarga si tersangka kebetulan tergolong orang berputnya.

Bisa dirasakan bahwa perlakuan yang sama, yaitu penangguhan penahanan akan lebih mudah diberikan pada anggota ABRI. Pihak POM akan meluluskan permintaan Ankum, karena tahu bahwa tersangka akan dikenakan hukuman disiplin dan komandan bisa melarangnya keluar dari kesatrian untuk menghindari reaksi masyarakat.

Menurut pengamat militer Dr Salim Said, hukuman yang diberikan atasan sebagai kewenangannya mengambil tindakan terhadap bawahan. Dalam hal ini tak perlu membawanya ke pengadilan militer.

Sementara menurut Ridwan Saidi, hukuman itu tergantung jenis pelanggaran, terutama menyangkut urusan internal. Misalnya soal disiplin dan pelanggaran lain yang cukup diberikan sanksi oleh atasannya dengan hukuman administratif. Sedangkan bila pelanggar melakukan tindakan pidana dan menyangkut orang lain maka bisa di teruskan ke mahkamah militer.

■ ANW

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
JAWA POS	SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
KOMPAS	SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
KEDAULATAN RAKYAT	SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA		6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

KSAD: Pengusutan Penculikan Tetap Berjalan

Jakarta, Kompas

Pemeriksaan dan pengusutan terhadap tersangka pelaku penculikan aktivis akan tetap berjalan, meskipun terjadi pergantian Komandan Pusat Polisi Militer (Dan Puspom) ABRI dari Mayjen TNI Syamsu Djalaluddin (kini Jaksa Agung Muda Intelijen) kepada Mayjen TNI Djasri Marin yang sebelumnya Wakil Komandan Puspom ABRI. Demikian diungkapkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo hari Senin (19/10).

"Kasus itu akan diselesaikan secepatnya, tetapi tidak berarti terburu-buru supaya fakta dan bahan yang digunakan lengkap. Dengan demikian, keputusan persidangan tidak mengecewakan dan dapat setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan," kata Subagyo menjawab pertanyaan pers usai serah terima jabatan Komandan Puspom ABRI.

Sebelumnya, Syamsu menegaskan, berita acara pemeriksaan (BAP) kasus penculikan akan dilimpahkan ke Oditur Militer tanggal 20 Oktober 1998. Ketika masalah itu ditanyakan kepada Djasri Marin, Komandan Puspom ABRI yang baru enggan berkomentar. "Saya akan pelajari dulu," kata Djasri ketika ditanya apakah BAP akan diserahkan Rabu (21/10).

Soal orang hilang

Menanggapi nasib 12 orang yang masih hilang, Subagyo mengatakan, pada prinsipnya masukan dari semua pihak akan diterima. Fakta-fakta yang diperoleh dari siapa pun, kata KSAD, dapat disampaikan kepada Komandan Puspom ABRI sebagai ketua tim pencari fakta untuk ditampung dan diproses sebaik-baiknya.

Sementara Syamsu mengatakan, sembilan saksi korban dan 11 tersangka kasus penculikan sudah menandatangani BAP untuk diserahkan kepada oditur militer. Secara tidak langsung Syamsu juga membantah sinyalemen Ketua Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir yang menyebutkan para penculik itu masih berkeliaran. "Mereka masih ada di sini (Puspom ABRI)," kata Syamsu.

Mengomentari perlunya hasil



Ant

Djasri Marin

visum et repertum korban penculikan seperti yang dikatakan Munir, Syamsu mengatakan, hasil itu tidak dapat dilampirkan dalam BAP —yang dibuat sesuai keterangan korban waktu pemeriksaan. "Visum tidak dilampirkan karena tidak ada lagi bekas-bekasnya. Bagaimana memvisumnya lagi," tandas Syamsu.

Unjuk rasa

Sekitar pukul 11.00 WIB, keluarga korban penculikan mendatangi markas Puspom ABRI untuk minta kejelasan nasib 12 korban penculikan yang belum kembali. Keluarga korban tersebut tidak diperbolehkan menemui Komandan Puspom dan diterima staf pribadi Dan Puspom Kolonel (CPM) I Ginting S di depan pagar Puspom.

"Kasus penculikan selama ini ditangani Bapak Syamsu. Bagaimana nanti kalau dialihkan. Kami mau minta kejelasan, mati atau hidup," kata Elisabeth Waleau salah satu korban yang mengaku pernah diculik aparat. Sebelum meninggalkan tempat, keluarga korban juga menyerahkan foto korban penculikan yang belum kembali kepada Dan Puspom melalui Ginting.

Penyelesaian kasus penculikan, sejauh ini belum jelas dan transparan. Hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) hanyalah pemberhentian Letjen Prabowo Subianto, mantan Komandan Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus). Sedang kesalahan Prabowo sendiri tidak jelas. Prabowo dikatakan salah menganalisis bawah kendali operasi (BKO) tanpa ada penjelasan lebih jauh soal kesalahan analisis itu. Sementara 13 korban penculikan, sampai saat ini juga belum diketahui keberadaannya. **(bb)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Kalau Hasil DKP Memenuhi Unsur Dimahmilkan, Jangan Ditunda-tunda

Yogyakarta, 22 Agustus

Dekan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Dr Nindyo Pramono SH NS, mengharapkan, guna memperbaiki citra ABRI kalau memang para perwira tinggi tersebut memenuhi kriteria untuk diajukan ke mahkamah militer (dimahmilkan), sebaiknya tidak ditunda-tunda.

Menjawab pertanyaan *Pembaruan* di Yogyakarta hari Jumat (21/8), ia menerjemahkan keterangan Ketua DKP, Jenderal TNI Subagyo HS yang dilansir media massa, ada dua kemungkinan sanksi yang dijatuhkan, yaitu administrasi atau bisa dimahmilkan.

''Saya menangkap ini artinya ada unsur yang memang memenuhi kriteria untuk diajukan ke mahkamah militer, sehingga kalau hanya sanksi administrasi, saya khawatir belum bisa memulihkan kembali citra ABRI,'' katanya. Seperti diberitakan, menurut rencana, Pangab akan mengumumkan hasil pemeriksaan DKP tersebut pada hari Senin (24/8) nanti.

Sementara itu, pengamat masalah ABRI, Dr Salim Said mengatakan, mengenai keputusan DKP (Dewan Kehormatan Perwira) yang akan diumumkan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto apakah ketiga perwira, Letjen TNI Prabowo, Mayjen TNI Muchdi dan Kolonel Inf Chairawan di-Mahmilkan atau tidak, sudah dapat diketahui masyarakat. Sebab hasil pemeriksaan DKP terhadap ketiga perwira tersebut setiap hari diumumkan Ketua DKP Subagyo kepada wartawan. ''Dengan adanya pengumuman hasil pemeriksaan DKP yang disampaikan ke masyarakat melalui wartawan, masyarakat sudah dapat menduga ke arah mana keputusan Menhankam/Pangab,'' kata Dr Salim Said kepada *Pembaruan* di Jakarta, hari Jumat (21/8). (037/A

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
JAWA POS	SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
KOMPAS	SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
KEDAULATAN RAKYAT	SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA		6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Kebebasan Pers tak Buat Negara Ambruk

Jakarta, Kompas

Menteri Penerangan (Menpen) Muhammad Yunus hari Rabu (21/10) di Jakarta menyatakan, kebebasan pers itu tidak akan membuat negara ambruk. Kebebasan, dalam pengertian tanpa SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), seperti yang dialami pers Filipina selama 12 tahun sejak kemunculan Presiden Cory Aquino, ternyata telah membuktikan asumsi itu.

Namun demikian, usai berbicara di depan seluruh Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan, Kepala Stasiun RRI dan Kepala Stasiun TVRI di Deppen, Menpen mengingatkan bahwa dalam dunia pers yang bebas itu di mana pun tetap saja ada rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar.

Pelanggaran terhadap rambu-rambu itu, katanya, mengakibatkan sanksi pidana. Sanksi yang berlaku di Indonesia, tertera jelas dalam "buku biru" tentang ketentuan pidana yang ada kaitannya dengan media massa.

"Opini yang berlebihan tentang akan ambruknya negara karena kebebasan pers hanyalah kekhawatiran pihak-pihak yang tidak mengetahui rambu-rambu tentang ketentuan pidana itu," ujar Menpen.

Ia menginstruksikan para pejabat daerah untuk memasyarakatkan "buku biru" itu sehingga mereka tidak ragu-ragu dalam memberikan keterangan. Konsekuensinya, para pejabat daerah atau siapa pun yang merasa dirugikan oleh penerbitan yang melanggar rambu-rambu itu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Sebaliknya kepada para wartawan, Menpen menyarankan untuk mempelajari "buku biru", serta mensosialisasikannya ke masyarakat. Menpen juga menandaskan, keberadaan RRI/TVRI dalam era reformasi saat ini tidak boleh menjadi corong propaganda pemerintah. **(vik)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	~~1998~~
JAKARTA POST	~~REPUBLIKA~~	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	~~September~~	2000
KOMPAS	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KEDAULATAN RAKYAT	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Buyung Siap Jadi Pembela Prabowo

Jakarta, Sabtu, Merdeka

Pengacara senior Adnan Buyung Nasution tiba-tiba menyatakan siap menjadi pembela mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto. Kesediaan Buyung ini kalau menantu Soeharto yang diduga terlibat penculikan para aktivis pro demokrasi ini jadi diajukan ke Mahmil.

"Kalau diminta, saya bersedia menjadi tim pembela Prabowo," ujar Adnan Buyung Nasution di kampus UI Depok, kemarin. Dikatakannya, peluang Prabowo dimahmilkan sangat besar. Alasannya, kini para prajurit Kopassus yang terlibat penculikan para aktivis itu mengaku mendapat perintah Prabowo.

Kenapa Buyung bersedia menjadi pembela Prabowo? Alasan Buyung, karena dia ingin menjalankan profesinya untuk menegakkan hukum yang berlaku. Sebab, dia khawatir dalam kasus pengadilan Prabowo nanti terjadi rekayasa yang tak diinginkan oleh masyarakat.

Dikatakan, tidak menutup kemungkinan kalau pimpinan ABRI jadi membawa Prabowo ke Mahmil, skenario proses persidangannya sudah disiapkan secara rapi. "Bahkan tidak menutup kemungkinan vonisnya pun sudah dirancang," katanya.



Adnan Buyung Nasution

Menurut pendiri YLBHI ini, dia menginginkan, proses peradilan Prabowo nanti benar-benar berlangsung secara fair. Artinya, tidak ada manipulasi atau rekayasa sehingga kasus yang sebenarnya tidak terungkap secara jelas.

Padahal, masyarakat mengharapkan sekali kejelasan motif politik dan latar belakang yang terjadi dari kasus penculikan yang melibatkan mantan Danjen Kopassus tersebut.

Jika nanti Buyung benar menjadi tim pembela Prabowo, berarti ini kali kedua dia membuat keputusan kontroversial. Sebelumnya, dia secara kontroversial membela terdakwa kasus Trisakti. Saat itu, Buyung sempat diprotes para mahasiswa karena membela yang jelas-jelas menyebabkan empat mahasiswa Universitas Trisakti tertembak. Namun, Buyung tetap pada keputusannya.

Kini, Buyung lagi membuat keputusan kontroversial dengan menyatakan bersedia menjadi tim pembela Prabowo. Apakah sudah ada pembicaraan dengan Prabowo? "Belum ada pembicaraan apa-apa. Ini tadi saya katakan, kalau diminta saya bersedia," tandasnya.

Kasus Prabowo sendiri, hingga kini belum jelas. Proses hukum yang sudah berjalan baru kepada sebelas prajurit Kopassus yang terlibat penculikan aktivis. Kini, kasusnya sedang digelar di Mahmil Jakarta. Mengenai apakah Prabowo juga akan diseret ke Mahmil, belum ada tanda-tanda jelas. (JPNN)

Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

dia:		Tanggal						Bulan		Tahun
SNIS INDONESIA	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
AKARTA POST	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
AWA POS	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
OMPAS	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
EDAULATAN RAKYAT	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
EDIA INDONESIA		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Buyung Siap Jadi Pembela Prabowo

Jakarta, JP.-

Pengacara senior Dr Adnan Buyung Nasution SH menyatakan siap menjadi pembela mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto, jika diajukan ke pengadilan atas tuduhan terlibat penculikan para aktivis prodemokrasi. ''Kalau diminta, saya bersedia,'' ujar Adnan Buyung Nasution di kampus UI Depok, kemarin.

Dikatakan Buyung, peluang Prabowo dimahmilkan sangat besar. Alasannya, kini para prajurit Kopassus yang terlibat penculikan para aktivis itu mengaku mendapat perintah Prabowo.

Kenapa Buyung bersedia menjadi pembela Prabowo? Alasannya, ia ingin menjalankan profesinya untuk menegakkan hukum. Sebab, ia khawatir dalam kasus pengadilan Prabowo nanti terjadi rekayasa yang tidak diinginkan masyarakat.

Dikatakan, tidak tertutup kemungkinan kalau pimpinan ABRI jadi membawa Prabowo ke mahmil, skenario proses persidangannya sudah disiapkan secara rapi. ''Bahkan, tidak menutup kemungkinan vonisnya pun sudah dirancang,'' katanya.

Pendiri YLBHI ini menginginkan proses peradilan Prabowo nanti benar-benar berlangsung secara *fair*. Artinya, tidak ada manipulasi atau rekayasa. Dengan demikian, kasus yang sebenarnya bisa terungkap secara jelas. Padahal, masyarakat sangat berharap kejelasan motif politik dan latar belakang di balik kasus penculikan yang melibatkan mantan Danjen Kopassus itu.

Jika nanti Buyung benar menjadi tim pembela Prabowo, berarti ini kali kedua dia membuat keputusan kontroversial. Sebelumnya, dia secara kontroversial membela terdakwa kasus Trisakti.

Kini Buyung lagi-lagi membuat keputusan kontroversial dengan menyatakan bersedia menjadi tim pembela Prabowo. Apakah sudah ada pembicaraan dengan Prabowo? ''Belum ada pembicaraan apa-apa. Ini tadi saya katakan, kalau diminta, saya bersedia,'' tandasnya. **(adb)**

Kelas: .....

LSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☑	Berita Utama	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Mereka Bicara Prabowo

Bambang Triantoro *(Mantan Kassospol ABRI)*

Melihat perkembangannya dari hasil pemeriksaan Tim DKP, *feeling* saya memang mengatakan rekomendasi yang akan diajukan adalah mengadili Prabowo melalui pengadilan militer. Keputusan Pangab merupakan langkah tegas, berani, dan memang seharusnya demikian. Sebab, berbagai kasus penculikan bukan merupakan kebijakan ABRI atau pemerintah, melainkan dilakukan atas inisiatif oknum petugas.

Jadi, keputusan memahmilkan Prabowo tersebut sesuai dengan harapan kita semua, juga dunia internasional. Lebih baik membawa seorang oknum bintang tiga sekalipun ke mahmil, kalau memang ia diindikasikan kuat bersalah, daripada citra ABRI, bangsa, dan negara ini tercoreng. Melalui mahmil itu pula, kelak kita harapkan bisa terungkap duduk perkara kasus penculikan ini dengan jelas.

Dr Kastorius Sinaga *(Sosiolog Hukum UI)*

Dari bukti-bukti yang terungkap melalui pers maupun hasil kerja DKP, serta pengakuan Prabowo sendiri yang siap bertanggung jawab, keputusan Pangab untuk memahmilkan Prabowo tentu sangat tepat. Di ABRI kan tidak ada tanggung jawab kolektif. Jadi, secara psikologis dan politis, keputusan tersebut diharapkan dapat melegakan masyarakat, juga dunia internasional. Jenderal Wiranto tentu mendengar kiri kanan, termasuk dari Pak Harto, untuk mengambil keputusan tersebut.

Lukman Harun *(Anggota DPR-RI/Ketua PP Muhammadiyah)*

Apa pun yang diputuskan Pangab, itulah yang terbaik. Sebagai pimpinan puncak di tubuh ABRI, Jenderal Wiranto tentu telah mempertimbangkan dari berbagai segi, yang terbaik bagi ABRI, bangsa, dan negara ini. Sekalipun Prabowo dibawa ke mahmil, tentu kita tidak bisa langsung memvonis bahwa ia memang bersalah. Sebagai negara hukum, asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi. Biarlah pengadilan yang membuktikannya, dan para hakim nanti yang menjatuhkan vonisnya seperti apa. ❑ jat

Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☑ Berita Buana	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Tenang, Suasana Rumah Sumitro



BERAGAM cerita tentang reaksi keluarga Sumitro Djojohadikusumo (81) telah beredar sejak berita tentang Letjen TNI Prabowo Subianto santer diberitakan, putra ketiga keluarga ini, telibat dalam penculikan aktivis prodemokrasi. Bisa dipahami kalau Pak Cum, panggilan akrab Sumitro, akhir-akhir ini menghindari kejaran wartawan.

Mungkin karena sudah mendengar karir anaknya akan ditentukan hari ini, Sumitro, Senin pagi tadi (24/8), bersama istri, Ny Dora Sigar, dan seorang sopir, bertolak ke Purwokerto untuk istirahat beberapa hari di rumah keluarganya.

Pasangan Pak Cum dan Ny Dora dikaruniai empat anak. Dua di antara mereka menjadi *public figure*, Prabowo Subianto dan Hashim Djojohadikusumo. Hashim, si bungsu, dikenal sebagai salah satu usahawan terkemuka di Indonesia. Seorang putri Pak Cum menikah dengan Soedradjad Djiwandono, mantan Gubernur Bank Indonesia. Sedangkan Prabowo menikah dengan Siti Hediati, putri keempat mantan Presiden Soeharto.

Semula, Pak Cum yakin kalau Prabowo tidak terlibat dalam kasus penculikan itu. Namun, ketika Prabowo mengaku bersalah dan siap mempertanggungjawabkan kesalahannya, Pak Cum menjadi sangat marah.

Prabowo Subianto terakhir kali mengunjungi Sumitro Djojohadikusumo pada saat pemilu 1997 lalu. Pertemuan itu tidak berlangsung di rumah orangtuanya, di Jl Metro Kencana IV Kav 22 No 27 Pondok Indah, tapi dilakukan di kantor Sumitro, di Jl Kartanegara No 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Menurut Sujono, salah seorang pembantu rumah tangga, Sumitro sama sekali tidak kelihatan stres. Ia terlihat biasa-biasa saja menghadapi berita-berita panas yang menyangkut salah satu putranya.

Suasana di rumah Sumitro, yang luasnya sekitar 1.000 m2, terlihat sepi dan tenang. Tidak terlihat anak maupun cucu-cucunya. Yang tampak hanya satpam dan beberapa pembantu. Anak Sumitro yang sering datang ialah Hashim. Hashim datang untuk makan malam bersama. "Beberapa hari ini, Pak Mitro kurang sehat. Ia agak flu, sehingga tidak bisa diganggu," ujar Amelia, sekretaris Sumitro.

Bagi kakak dan adiknya, Prabowo terlihat cukup 'disegani'. Tahun lalu, Prabowo kebetulan melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Dia menjadi tamu Kementerian Luar Negeri Jepang. Pada saat yang sama, diselenggarakan Sidang Consultative Group on Indonesia (CGI) di Tokyo, yang juga dihadiri Gubernur Bank Indonesia waktu itu, Soedradjad Djiwandono, ipar Prabowo.

Ketika wartawan menanyakan apakah Pak Soedradjad sudah bertemu Prabowo, sambil tersenyum Soedradjad berkilah, "Apa kamu berani menemui beliau?" ❑ sab

Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐ Berita Buana	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Bagian Kedua
Susunan Pengadilan
Pasal 12

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari :
a. Pengadilan Militer
b. Pengadilan Militer Tinggi
c. Pengadilan Militer Utama dan
d. Pengadilan Milter Pertempuran

Pasal 13

Susunan organisasi dan prosedur Pengadilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 12 ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Nama Tempat, Kedudukan, dan daerah Hukum

1. Tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Nama tempat, kedudukan, dan daerah hukum pengadilan lainnya ditetapkan dengan keputusan panglima.
3. Apabila perlu, Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang diluar tempat kedudukannya.
4. Apabila perlu, Pengadilan Militer dan Pengadilan militer Tinggi dapat bersidang di luar daerah hukumnya atas izin kepala Pengadilan Militer Utama.

Bagian Keempat
Susunan Persidangan
Pasal 15

1. Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang hakim ketua dan 2 (dua) orang hakim anggota yang dihadiri 1 (satu) orang oditur militer/ oditur militer tinggi dan dibantu 1(satu) orang panitera.
2. Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang panitera.
3. Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding dengan 1 (satu) orang hakim ketua dan 2 (dua) orang hakim anggota yang dibantu 1 (satu) orang panitera.
4. Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat banding dengan 1 (satu) orang hakim ketua dan 2 (dua) orang hakim yang dibantu 1 (satu) orang panitera.

Pasal 16

1. Hakim ketua dalam persidangan Pengadilan Militer paling rendah berpangkat mayor, sedangkan hakim anggota dan oditur militer paling rendah berpangkat Kapten
2. Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi paling rendah berpangkat kolonel, sedang hakim anggota dan oditur militer tinggi paling rendah berpangkat letnan kolonel.
3. Hakim ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat brigjen/laksamana Pertama/marsekal Pertama, sedangkan hakim anggota paling rendah berpangkat kolonel.
4. Hakim anggota dan oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hakim anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah berpangkat setingkat lebih tinggi daripada pangkat terdakwa yang diadili.
5. Dalam hal terdakwanya berpangkat Kolonel, hakim anggota dan oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa dan dalam hal terdakwanya perwira tinggi hakim ketua, hakim anggota, dan oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa.
6. Kepangkatan panitera dalam persidangan
   a. Pengadilan Militer paling rendah berpangkat pembantu letnan dua dan paling tinggi berpangkat kapten.
   b. Pengadilan Tinggi paling rendah berpangkat kapten dan paling tinggi berpangkat mayor.
   c. Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat mayor dan paling tinggi berpangkat kolonel.

Pasal 17

1. Pengadilan Militer pertempuran bersidang untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara pidana dengan 1(satu) orang Hakim anggota yang keseluruhannya selalu berjumlah ganjil, yang dihadiri 1 (satu) orang oditur Militer/oditur militer tinggi dan dibantu 1(satu) orang panitera.
2 Hakim ketua dalam persidangan Pengadilan Militer pertempuran paling rendah berpangkat letnan kolonel, sedangkan hakim anggota dan oditur paling rendah berpangkat mayor.
3 Dalam hal terdakwanya berpangkat letnan kolonel, hakim anggota, dan oditur sebagaimana pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa yang diadili.
4 Dalam hal terdakwa berpangkat kolonel dan/atau perwira tinggi, hakim ketua, hakim anggota, dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa yang diadili.

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA		1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA		2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA		3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA		4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN		5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Untung Saya Tak Diculik

TOKOH satu ini memang harus berkomentar soal pencopotan Prabowo. Siapa dia? Sofyan Wanandi, mantan juru bicara Kelompok Jimbarans yang pernah dituduh membiayai para aktivis korban penculikan. Berikut ini kutipan komentarnya:



Sofyan Wanandi

Prabowo diberhentikan dari kedinasannya di ABRI. Apa komentar Anda?

Apa pun itu, pasti ada alasan dari DKP (Dewan Kehormatan Perwira) maupun Pangab untuk memensiunkan Prabowo. Cuma, saya pikir, masyarakat ingin tahu lebih banyak. Lagi pula, menurut kita, *kan* harus lebih transparan. Jadi, menurut saya, sebaiknya ada pengadilan militer terhadap Prabowo sehingga terbuka, misalnya, siapa yang menyuruh. Semua orang *kan* masih bertanya-tanya.

Pandangan Anda terhadap penculikan?

Apa pun alasannya, penculikan itu sebenarnya merupakan kesalahan yang besar, apalagi masih ada yang hilang dan tidak ditemukan. Apa ini bisa diselesaikan secara intern, tanpa hukum yang berlaku untuk semua orang? Itu, menurut saya, yang sebenarnya harus ditegaskan. Saya percaya, kalau melihat apa pun yang diperbuat Prabowo, mesti ada atasannya. Paling sedikit dia mengetahui, kalau tidak memerintah. Saya percaya bahwa semua yang dilakukan Prabowo itu diketahui Pak Harto (mantan presiden).

Dari mana kesimpulan Anda itu?

Pertama, yang dilakukannya adalah menyuruh Om Liem (Liem Sioe Liong) memecat saya dari jabatan ketua pelaksana Prasetya Mulya dan dari juru bicara Kelompok Jimbaran. Setelah itu, saya *dikerjain*. Om Liem sendiri yang bercerita kepada saya. Begini: karena Soeharto *nggak* senang sama *you*, karena *you* punya statemen, sehingga *you* diminta untuk dipecat. Jadi, kalau ada sesuatu pekerjaan diarahkan kepada saya, saya percaya penculikan-penculikan itu Pak Harto juga tahu. Sebab, isunya sama. Mungkin karena beruntung saja saya tidak diculik. Sebagian besar yang diculik *kan* juga ditanya, berapa besar saya memberi uang kepada mereka? Pada Pius Lustrilanang dan lainnya, saya dilibatkan.

Apa harapan Anda?

Saya kira, presiden saat itu harus bertanggung jawab di sidang MPR. Ini *nggak* bisa dilakukan oleh DKP. Jadi, saya percaya bahwa MPR akan menentukan sikap, apakah presidennya bisa diperiksa atau tidak. Sebab, apa pun yang terjadi, presiden itu harus di bawah MPR.

Anda kan dekat dengan Prabowo?

Saya *ndak* dekat dengan dia, tapi saya kenal dia. Saya pernah mengadakan diskusi bersama dia. Dan, saya pernah datang pada dia untuk *ngomong* dalam rangka permulaan tahun. *Kan* selalu ada ucapan selamat tahun baru. Saya diskusi sama dia, tapi *nggak* ada yang lain dari itu. **(bik)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☑ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid:

Hentikan Polemik dan Debat mengenai Prabowo

Jakarta, Kompas

Hentikan polemik dan debat tentang keputusan Pangab, demikian harapan Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid. Sementara KSAD Jenderal TNI Subagyo mengatakan, bisa saja Letjen TNI (Purn) Prabowo diajukan ke Mahkamah Militer (Mahmil), dan hal itu dinilai baik sekali oleh Nurcholish Madjid.

Ketua Umum PB NU KH Abdurrahman Wahid menegaskan perlunya segala bentuk polemik dan debat tentang keputusan Pangab patut dihentikan dahulu. "Hentikan sampai di sini. Nanti kita lihat lebih lanjut hasil pemeriksaan terhadap 10 tersangka lainnya. Masalah Prabowo itu mengaku atau tidak, itu bukan soal," tuturnya kepada wartawan di kediamannya, Rabu.

Sementara KSAD Subagyo Hadisiswoyo mengatakan, meski telah menjadi seorang sipil, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto bisa saja dibawa ke Mahmil. Menjawab pertanyaan *Kompas* dan *Media Indonesia* di sela-sela acara peluncuran buku *Gagasan dan Pemikiran Edi Sudradjat* di Jakarta, Selasa (25/8) malam, Subagyo menyatakan, langkah seperti itu bisa dilakukan mengingat perkaranya terjadi saat Prabowo sedang menjabat posisi di militer.

"Persoalannya bukan Prabowo dijamin atau tidak ke Mahmil. Ia bisa ke Mahmil. Itu bisa karena proses atau masalahnya terjadi waktu dia ada di sana (di Kopassus). Kita bisa lihat keterkaitannya bagaimana. Tergantung kasusnya, *dong*. Ini 'kan kasus dulu waktu dia di ABRI," kata Subagyo.

Subagyo menambahkan, yang terjadi di luar negeri pun begitu. Misalnya, pengadilan dapat dilakukan terhadap para veteran perang Vietnam. "Ini contoh kasus saja," tutur Subagyo.

Pendapat senada dikemukakan secara terpisah oleh Menkeh Muladi dan Jaksa Agung AM Ghalib sebelum mengikuti sidang Kabinet Pembangunan Reformasi bidang polkam di Bina Graha, Jakarta, Rabu. Dikatakan, meski sudah diberhentikan dari dinas kemiliteran, namun tidak tertutup kemungkinan Prabowo Subianto tetap bisa dibawa ke Mahmil.

Menkeh menilai, keputusan terhadap Prabowo menunjukkan integritas dan obyektivitas Wiranto, sekaligus menghapus keraguan berbagai pihak kepadanya, mengingat Wiranto pernah menjadi ajudan mantan Presiden Soeharto.

"Tapi langkah ini belum selesai. Jadi kita tunggu. Kita lihat saja, jangan dipengaruhi, biar obyektif. Biar ABRI menyelesaikan masalahnya secara baik. Karena dalam hal ini yang dihadapi itu 'kan rakyat. Semuanya harus transparan dan obyektif," kata Muladi sambil menegaskan tidak tertutup kemungkinan Prabowo di bawa ke Mahmil. Jaksa Agung AM Ghalib mempertegas, pengajuan ke Pengadilan Militer, bisa dilakukan bila sudah ada keputusan penyerahan perkara.

Sedangkan Nurcholish Madjid berpendapat, keinginan mengajukan Prabowo ke Mahmil baik sekali, karena dapat mengungkapkan semua yang terjadi berkaitan dengan kasus penculikan tersebut. Namun pengadilan Mahkamah Militer juga dapat menimbulkan efek pembebasan Prabowo. "Yang penting adalah bagaimana caranya agar kasus ini dikejar terus dan apakah hanya berhenti pada Prabowo," kata Nurcholish. **(uu/gg/wis/rie/osd)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA		1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA		2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA		3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA		4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN		5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Gus Dur: Pemberhentian Prabowo untuk Lindungi ABRI

JAKARTA —Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) KH Abdurrahman Wahid menilai bahwa pemberhentian mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto lebih merupakan upaya untuk melindungi organisasi ABRI. Hal itu, menurutnya, belum dapat dikatakan sebagai bagian reformasi internal ABRI.

Gus Dur -demikian panggilan akrab Abdurrahman- melihat bila kasus penculikan yang melibatkan Prabowo itu diusut tuntas, maka banyak sekali yang terlibat. "Prabowo kena, KSAD juga kena, Pangab juga kena. Setelah itu Pangti kena. Bila sudah sampai ke Pangti, maka rakyat juga ikut kena. Salah sendiri rakyat juga ikut mengangkat Pangti," paparnya kemarin di sela pembentukan Kinkonas (Komisi Indipenden Pencari Kebenaran untuk Rekonsiliasi Nasional), di rumahnya Ciganjur Jakarta.

Meski demikian, Gus Dur menegaskan bahwa langkah Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto dalam mengusut kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum ABRI tak bisa berhenti, hanya dengan memberhentikan Prabowo. "ABRI harus melakukan perubahan orientasi besar-besaran dalam menangani setiap kasus yang terjadi."

Di tempat lain, komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras) mempertanyakan kembali dasar pengambilan keputusan Pangab terhadap Prabowo. Pangab, menurut Koordinator Kontras Munir SH dinilai belum menjelaskan tindakan apa yang telah dilakukan Prabowo, Mayjen TNI Muchdi PR dan Kolonel Chairawan sehingga harus dikenai sanksi administratif. "Sejauh mana keterkaitan sanksi itu dengan keterlibatan mereka dengan penculikan, mestinya dijelaskan," kata Munir.

Masalah penculikan ini menjadi salah satu alasan mengapa Gus Dur membentuk Kinkonas, bersama dengan rekan-rekannya seperti pengusaha etnis Tionghoa Edward Soerjadjaja, Musofa Zuhad Mughni (NU), Nasir Tamara (ICMI), dan Vjekoslav Kopnunyak (mantan dubes Yugoslavia untuk Indonesia). Alasan lain, dan lebih utama adalah banyaknya sorotan dunia terhadap kerusuhan Mei yang mengukapkan terjadirya banyak pemerkosaan.

Menurut Gus Dur, masyarakat internasional saat ini berkampanye untuk memboikot perdagangan dengan Indonesia, karena adanya pemerkosaan itu. Kampanye itu dilakukan dengan demonstrasi. Juga dengan pameran foto tentang kekejaman dan kekerasan yang dilakukan umat Islam.

Untuk mematangkan gagasan Kinkonas, Gus Dur menunjuk Yayasan Persemaian Persahabatan (YPP). Tujuan utama Kinkonas sendiri adalah mengungkapkan kebenaran sesungguhnya dibalik berbagai peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia, tanpa diwarnai kepentingan politik atau kebencian. ■ ttw

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	Noyember	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐ Berita Buana	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Panggabean: Pemecatan Prabowo Kecewakan Rakyat

Jakarta, Buana

Mantan Menhankam/Pangab Jenderal (Purn) Maraden Panggabean menegaskan, tindakan hanya memecat mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto dari ABRI, dalam kasus penculikan aktivis, sangat mengecewakan hati rakyat. Menurutnya, karena Prabowo sudah mengakui menculik, tak ada lagi alasan dari pimpinan ABRI untuk tidak membawa Prabowo ke mahkamah militer (mahmil).

"Prabowo sudah mengaku memerintahkan penculikan itu. Lantas, mengapa hanya dipecat tanpa dibawa ke mahmil? Jangan main-main, kasus yang menyangkut nyawa rakyat ini sudah menjadi perhatian dunia? Apalagi, nasib aktivis itu belum jelas," ujar Panggabean kepada *Buana*, Kamis (27/8).

Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ini pun pesimistis dengan pernyataan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto bahwa jika ke-10 prajurit Kopassus yang akan disidangkan itu memberatkan mantan atasannya, maka Prabowo akan diajukan ke mahmil. Menurutnya, hal itu akan membuat munculnya keraguan, apakah memang ada rencana untuk menuntaskan kasus ini dengan membawa Prabowo ke mahmil.

"Semua tahu soal kesetiaan seorang prajurit terhadap atasannya. Jangankan untuk tak 'buka mulut' di pengadilan, mati pun mereka siap. Jadi, tipis kemungkinan jika berharap mereka bicara yang memberatkan komandannya. Citra ABRI yang saat ini rusak parah, dikaitkan dengan penculikan, pemerkosaan, penganiayaan, hingga pembunuhan di Aceh, serta kerusuhan di Jakarta, seharusnya membuat Wiranto bertindak memperbaikinya," lanjutnya

Periksa Feisal Tandjung

Sementara itu, mantan Dubes RI di Malaysia Letjen TNI (Purn) Rais Abin menyatakan, ia tidak puas dan tidak bisa menerima begitu saja keputusan tersebut. Menurutnya, keputusan itu dirasakan cukup aneh dan membingungkan. Dikatakannya, semua ragu dengan tekad yang sudah dicanangkan Jenderal TNI Wiranto untuk menindak tegas siapa pun anggota ABRI yang melanggar hukum.

"Tidak ada alasan apa pun yang bisa memperlunak pimpinan ABRI. Apa yang dilakukan Prabowo itu jelas-jelas merupakan kejahatan nasional. Siapa yang percaya bahwa seorang jenderal berbintang tiga bisa salah dalam menafsirkan perintah BKO (Bawah Kendali Operasi)? Perintah itu memakai bahasa Indonesia, bukan bahasa Tibet! Ini kita bicara tentang tingkat inteligensi seorang jenderal atau kopral?" tegasnya.

Soal siapa pemberi BKO, Rais Abin yakin hal itu datang dari Pangab waktu itu (Jenderal TNI Faisal Tanjung, *red*). Menurutnya, penyangkalan Feisal Tanjung bukan berarti penyidikan harus dihentikan. "Jangan setengah-setengah. Pangabnya dulu harus disidik. Bahkan, kemudian, jika perlu, juga Soeharto sebagai pimpinan tertinggi. Sebab, tidak mungkin Pangab mengeluarkan perintah kalau tidak ada arahan dari pimpinannya yang tertinggi," tegas Rais Abin.

Mantan Kassospol ABRI Letjen (Purn) Haryoto PS mengatakan, keputusan Wiranto 'memensiunkan' Prabowo itu membingungkan masyarakat. "Keputusan itu membingungkan, karena informasi pemeriksaan DKP terpotong-potong. Maka, demi keadilan, Prabowo harus segera diajukan ke mahmil," ujarnya.

Sedangkan pengamat militer Letjen TNI (Purn) Hasnan Habib mengatakan, dengan diratifikasinya konvensi PBB oleh Indonesia, para keluarga korban bisa mengadukan ABRI ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Menurutnya, jika prajurit Kopassus benar-benar sudah profesional, mereka tak perlu menyiksa tahanan dalam menginterogasi dan cukup hanya dengan pendekatan psikologis. ❑ **tim *Buana***

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☑ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Muladi: Mungkin Prabowo diseret ke Mahmil

JAKARTA (Bisnis): Menkeh Muladi menegaskan tidak tertutup kemungkinan mantan Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto diseret ke Mahkamah Militer.

Menurut Menkeh, keputusan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto untuk mempensiunkan Prabowo merupakan jawaban atas keraguan terhadap integritas Wiranto karena bekas ajudan mantan Presiden Soeharto, sedangkan Prabowo adalah menantu Soeharto.

"Jadi jika orang meragukan dia [Wiranto] ternyata terbukti tidak benar dan tidak objektif," katanya sebelum Sidang Kabinet Terbatas bidang Polkam di Bina Graha Jakarta, kemarin.

Muladi menegaskan langkah tadi tidak berhenti begitu saja. "Tidak tertutup kemungkinan [Prabowo diseret ke Mahkamah Militer]. Siapa pun yang terlibat penculikan, di mana penculikan merupakan kejahatan sangat besar baik dari segi HAM maupun hukum."

Di tempat terpisah, Ketua Umum PB NU KH Abdurrahman Wahid [Gus Dur] menilai pemberhentian mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto hanya upaya untuk melindungi organisasi ABRI.

Menurut Gus Dur, kalau kasus tersebut diusut secara tuntas, maka semua pihak pasti terkait dan terlibat.

"Prabowo kena, Pangab juga kena, Kasad juga kena. Setelah itu Pangti juga kena. Kalau sudah sampai ke Pangti, rakyat juga ikut kena. Salah sendiri rakyat ikut mengangkat Pangti," kata Gus Dur.

Sementara, mantan Menhankam Jenderal TNI (Purn.) Edi Sudradjat menegaskan yang terpenting adalah introspeksi dari semua jajaran ABRI mengenai kasus tersebut.

Sebelumnya, Dan Puspom ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalaluddin menegaskan Puspom saat ini sedang menyelidiki sejauh mana keterlibatan Letjen TNI Prabowo Subianto cs dalam kasus penculikan para aktivis prodemokrasi.

Penyelidikan atas dugaan keterlibatan Subianto, Muchdi PR dan Chairawan dalam penculikan aktivis itu dilakukan dengan menginterogasi secara mendalam terhadap tersangka sepuluh anggota Kopassus. **(s8/ens/cp)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Masyarakat Bebas Membentuk Kontras Daerah

Jakarta, Kompas

Dalam rangka mengungkap kasus-kasus penghilangan orang dan tindak kekerasan di berbagai daerah, masyarakat ada baiknya membentuk lembaga sejenis Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Bahkan, pihak Kontras Jakarta tidak keberatan jika nama lembaganya digunakan di daerah. Dengan adanya lembaga-lembaga seperti itu, diharapkan kasus-kasus penghilangan paksa dan tindak kekerasan di berbagai daerah bisa berkurang.

Penegasan itu disampaikan Koordinator Badan Pekerja Kontras, Munir, menanggapi kemungkinan perluasan wilayah kerja Kontras. "Kontras sendiri *sih* tidak akan membuka cabang di mana-mana. Tapi, masyarakat bisa saja mendirikan lembaga sejenis ini, bahkan dengan menggunakan nama Kontras. Hanya saja kalau menggunakan nama Kontras, tentu harus ada koordinasi dengan kami, sehingga arah geraknya bisa kami bantu," ungkap Munir, Jumat (17/7), di Jakarta.

Menyusul pembentukan kelompok kerja (Pokja) Kontras untuk Aceh, pekan ini, menurut rencana akan hadir pula Kontras di Manado, Sulawesi Utara. Pembentukan Kontras di Manado ini, kata Munir, dibentuk oleh sejumlah LSM yang bekerja sama dengan kantor cabang YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) di sana.

Munir menegaskan, pendirian lembaga sejenis Kontras tidak mudah, karena sampai saat ini lembaga itu benar-benar menggantungkan dananya pada lembaga-lembaga yang bergabung di Kontras tersebut. "Tawaran dana untuk mendukung pembiayaan kami sangat banyak, tetapi kami tolak karena tidak ingin nama Kontras menjadi jelek karena ada masalah-masalah di kemudian hari soal penggunaan dana-dana tersebut," jelasnya.

Khusus soal pembentukan Pokja Aceh, pimpinan Kontras itu menambahkan, masalah orang hilang di Aceh sudah seharusnya segera dituntaskan, karena sudah berlangsung lama dan menelan korban dalam jumlah yang jauh lebih besar.

Diungkapkan, berdasarkan laporan warga dari Kabupaten Pidie, sepanjang tahun 1990 tercatat 11 orang hilang, tahun 1991 empat orang, tahun 1996 satu orang, tahun 1997 empat orang, dan tahun 1998 sebanyak 25 orang, sehingga seluruhnya 45 orang. Di samping itu, 10 orang lainnya yang sebelumnya dinyatakan hilang, akhirnya diketahui telah tewas. Mereka yang dilaporkan hilang itu terdiri dari petani, wiraswasta, pegawai negeri, pejabat desa, mahasiswa, dan aktivis PDI (Partai Demokrasi Indonesoa). **(oki)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Saksi Kunci Kerusuhan Mei Diculik

Jakarta, Kamis, Merdeka

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengumumkan satu lagi nama korban penculikan: Abdul Nasir SE (33 tahun). Abdul dinyatakan hilang setelah kerusuhan 13-15 Mei lalu, di pertokoan Mega Mal Tangerang. Ini menambah deretan nama orang hilang yang terkait dengan kerusuhan Mei lalu.

"Selama ini nama Abdul Nasir SE memang tidak pernah kami ungkapkan, dengan pertimbangan keselamatan keluarga. Di samping itu, masih ada satu nama lagi yang masih kami rahasiakan dengan alasan yang sama," ujar koordinator Kontras Munir kepada wartawan di kantor YLBHI, kemarin.

Abdul Nasir SE dan seorang korban yang masih dirahasiakan, bersama tiga nama korban lainnya yang telah diumumkan lebih dulu yaitu Yadin Muhidin (25 tahun), Hendra Hambali (19 tahun) dan Ucok M Siahaan (22 tahun) adalah korban penculikan yang hilang paska kerusuhan 14 Mei lalu.

Dari hasil pelacakan di lapangan, menurut Munir, Kontras meyakini benar bahwa keempat orang ini bukan orang yang meninggal dunia saat kerusuhan terjadi. "Tapi menurut sejumlah saksi, mereka adalah orang-orang yang *dicomot* begitu saja dari jalanan," tegasnya.

Ini berdasarkan pengakuan sejumlah saksi, bahwa korban terlihat masih hidup setelah kerusuhan terjadi. Sehingga kecil kemungkinan korban menjadi bagian dari mayat-mayat yang hangus terbakar saat kerusuhan dan pembakaran terjadi.

"Besar kemungkinan lima korban ini diculik setelah kerusuhan terjadi. Dan dikhawatirkan, para korban merupakan saksi kunci yang sangat berguna untuk membongkar kasus kerusuhan Mei lalu. Sehingga melihat kondisi ini, upaya untuk membongkar kasus kerusuhan Mei tidak bisa dipisahkan dari kasus penculikan," ujar Munir.

Indikasi yang menguatkan para korban merupakan saksi kunci kasus kerusuhan ini, juga diperoleh Kontras dari para saksi yang saat itu melihat korban di lokasi kejadian paska kerusuhan terjadi.

Misalnya Abdul Nasir. Beberapa saat setelah kerusuhan 14 Mei tepatnya pukul 17.30 sore, korban terlihat ikut menyaksikan proses evakuasi mayat dari pertokoan Mega Mal.

"Menurut saksi, saat itu kerusuhan dan pembakaran sudah selesai dan hanya ditemukan dua mayat dari dalam pertokoan. Sekitar pertokoan megah itu berada di bawah pengawalan ketat petugas keamanan. Tapi setelah Abdul Nasir masuk ke dalam gedung, dia tidak pernah terlihat lagi," jelas Munir.

Hal serupa juga dialami Ucok M Siahaan, salah seorang mahasiswa STIE Perbanas dan Yadin Muhidin, seorang lulusan sekolah pelayaran. Saksi mata sempat melihat Ucok ditangkap dua orang berpakaian preman dan dimasukkan ke dalam mobil Kijang. Tapi sampai saat ini, tidak pernah diketahui kemana Ucok dibawa orang-orang tidak dikenal itu.

"Ucok ditangkap sekitar pukul 7 malam, setelah tidak terjadi lagi kerusuhan dan pembakaran. Begitu juga Yadin yang ditangkap petugas dari kepolisian pada sore hari, lalu dibawa ke Polres Jakut. Diperoleh surat penangkapan dan telah dikeluarkan, tapi tidak diketahui sampai saat ini berada di mana," ujarnya.

Begitu juga dengan Hendra Hambali yang ditangkap di sekitar pengawalan ketat petugas keamanan di sekitar kawasan Glodok, beberapa saat setelah pembakaran dan kerusuhan terjadi. Hendra berusaha keluar dari lokasi kebakaran menuju jalan pulang, tapi sampai saat ini Hendra yang masih pelajar ini tidak pernah kembali.

"Di sekitar kawasan itu, menurut saksi juga dijaga ketat oleh petugas keamanan. Dan jelas-jelas korban masih hidup setelah kerusuhan terjadi. Mereka bukan korban yang meninggal terbakar," tambahnya.

Melihat modus operandi ini, menurut dia, pengusutan kasus kerusuhan tidak bisa dipisahkan dari kasus penculikan. Apalagi besar kemungkinan korban dihilangkan karena alasan menutupi berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum dan HAM dalam kerusuhan Mei lalu. Bahkan, untuk menutupi masalah yang sebenarnya terjadi.**(EKA)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KEDAULATAN RAKYAT	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Keluarga Korban Penculikan Gelar Lesehan di Puspom ABRI

Jakarta, JP.-

Bosan berunjuk rasa dengan cara biasa, puluhan keluarga korban penculikan yang sampai kini nasibnya tidak jelas kemarin menggelar aksi *nyleneh* di Puspom ABRI. Dipandu Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), kelompok ini menggelar lesehan di ruang tunggu gedung penyidikan Puspom ABRI, Jl Ridwan Said. Aksi damai ini juga diwarnai penggelaran berbagai poster dan foto-foto korban penculikan yang belum jelas nasibnya.

Dengan aksi kali ini, mereka berharap bisa menyentuh perasaan Puspom ABRI. Mereka minta agar institusi ABRI ini bisa menyelamatkan nyawa 13 aktivis yang sampai sekarang masih dinyatakan hilang. Aksi yang dipimpin Ny Toeti -ibunda Yanni Afri- ini sebenarnya bukan yang pertama. Tapi sudah yang kesekian. Namun, di antara aksi para keluarga korban itu, gerakan inilah yang dilakukan dengan gaya memelas. Mereka juga memasang spanduk berukuran besar bertulisan "*ABRI Harus Bertanggung Jawab terhadap Kasus Penculikan*".

Keluarga korban yang turut menggelar lesehan itu, selain Ny Toety, adalah keluarga Dedy Hamdun, keluarga Noval Al Katiri, keluarga Yadin Muhidin, Hendra Hambalie, Ucok Siaahan, dan Faisol Reza yang pernah diculik itu.

Tujuan aksi ini, antara lain, ingin bertemu langsung Danpuspom baru Mayjen TNI Djasri Marin SH yang belum sebulan menggantikan Mayjen TNI Syamsu Djalal SH.

Sebenarnya, rombongan keluarga korban penculikan itu sekitar pukul 09.00 sudah diterima oleh Wakil Danpuspom Brigjen TNI Iding Alidin SH. Namun, rombongan yang dipelopori Ny Toety itu *ngotot* ingin bertemu Danpuspom. Akibatnya, sampai pukul 17.00, mereka masih lesehan di ruang tamu gedung penyidikan.

"Kami semua ingin bertemu langsung dengan Danpuspom yang baru. Bagaimana nasib anak-anak kami?" katanya kepada Wakil Danpuspom. **(mik)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Syamsu Tak Takut Periksa Prabowo

Periksa Sejumlah Saksi, Siap Seret ke Mahmil

Kontras Gagal Temui Danpuspom

Jakarta, JP.-

ABRI betul-betul ingin membuktikan tekadnya untuk mengusut tuntas kasus penculikan para aktivis. Ini terlihat dari upaya Danpuspom ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalal untuk terus mengumpulkan keterangan para saksi tentang keterlibatan mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto dalam kasus yang menjadi sorotan internasional ini.

Sayangnya, Syamsu tidak mau menyebutkan siapa saja saksi yang sudah dimintai keterangan untuk menjerat Prabowo ke mahkamah militer. Ia hanya menegaskan bahwa untuk seseorang yang sudah patut diduga melakukan tindak pidana, pasti pengumpulan keterangan dari para saksi itu akan dilakukan dengan hati-hati dan serius.

Danpuspom juga menyayangkan masih munculnya pernyataan-pernyataan yang meragukan keberanian ABRI untuk mengusut Prabowo lebih lanjut. Dia berjanji, setelah menantu mantan Presiden Soeharto itu mengakui telah menculik sembilan aktivis, hampir dipastikan ia akan dibawa ke mahmil untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Prabowo sudah dikenai sanksi administratif dengan diberhentikan dari ABRI secara hormat.

Bukankah Prabowo sekarang sudah menjadi orang sipil? Syamsu lantas menyebutkan aturan pemeriksaan yang tertuang dalam UU tentang peradilan militer. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa lingkungan peradilan militer berwenang untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan seseorang yang pada waktu melakukan pidana adalah prajurit.

Syamsu juga mengutip pernyataan Pangab Jenderal TNI Wiranto, prajurit yang bersalah tidak lepas dari tuntutan hukum.

"Siapa yang bersalah akan dihukum, sedangkan siapa yang berprestasi akan diberi penghargaan. Itu sudah kebijakan hankam."

Karena itu, tegasnya, Puspom tidak harus menunggu perintah Pangab. Kalau memang terbukti, tentu akan diperiksa. Juga tidak ada masalah, meski Prabowo sebelum diberhentikan dari ABRI berpangkat lebih tinggi daripada Syamsu.

Lalu, kapan Prabowo akan diseret ke mahmil? Menurut dia, penculikan adalah tindak pidana berat. Kedaluwarsanya lima tahun lebih. Karena itu, tak perlu terburu-buru. "Tetapi, kita tetap akan selesaikan dengan cepat," ujarnya. Jadi, kalau sudah terbukti, nantinya Prabowo pasti diadili di mahkamah militer.

Sementara itu, rombongan Kontras yang dipimpin Munir SH kemarin terpaksa batal bertemu dengan Danpuspom Syamsu Djalal. Pasalnya, ketika sampai di markas Puspom, ternyata Syamsu tidak ada di kantornya karena sedang dipanggil Pangab Jenderal TNI Wiranto.

"Kami perlu ke Puspom karena kami menilai bahwa sampai saat ini Puspom ABRI belum secara jujur memberikan keterangan yang sebenarnya tentang nasib 14 aktivis yang diculik," katanya.

Menurut Munir, pertemuan dengan Danpuspom ABRI itu sebenarnya dalam rangka meminta penegasan Puspom tentang nasib orang hilang itu. Selain itu, Kontras meminta penegasan tentang Prabowo cs. Sebab, kalau memang ada BKO (bawah komando operasi), berarti Puspom juga harus memeriksa institusi-instiusi yang menjadi BKO itu.

"Sebab, BKO itu juga bisa dijadikan alat bukti. Kalau tidak, pemeriksaan terhadap sebelas tersangka di Pupom ABRI sekarang ini tidak ada artinya. Karena itu, Puspom harus memeriksa semua unsur," katanya. **(gie/mik)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐ Kesira Buana	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Kontras Sesalkan Tanggapan Wiranto

Jakarta, Buana

Koordinator Komite untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Munir, menyesalkan tanggapan Menhankam/ Pangab Wiranto terhadap temuan hasil investigasi Komnas HAM di Aceh.

"Bagi kami, tanggapan Menhankam/Pangab yang menyesalkan pengumuman Komnas HAM itu adalah suatu yang mengejutkan," ujar Munir di Jakarta, Kamis (27/8). Munir menegaskan, tanggapan Pangab itu bertentangan dengan kemauan berbagai pihak yang ingin mengusut tuntas kekerasan militer di Aceh.

Mengutip laporan Amnesti Internasional, Munir mengungkapkan, selama penempatan Aceh sebagai daerah operasi militer (DOM), hingga 1990, sedikitnya 1.000 orang telah ditahan di tempat yang tidak diketahui. Selama dalam tahanan, mereka tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar.

Dalam proses itu juga terjadi beragam bentuk penyiksaan dan teror, baik kepada para tahanan maupun kepada masyarakat. Jumlah pasukan yang ditempatkan di Aceh sebanyak 5.000 tentara. Hal itu juga tidak sebanding dengan anggota Gerakan Aceh Merdeka yang hanya 154 orang.

Kuburan massal di wilayah Aceh Timur, Aceh Pidie, dan Aceh Utara, yang juga ditemukan Komnas HAM, bukan isapan jempol, melainkan fakta dan sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat Aceh. "Kecil kemungkinan kalau kuburan itu kuburan korban peristiwa G 30 S PKI," tukas Munir. Data di lapangan tentang jatuhnya korban pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, dan penganiyayaan merupakan gambaran yang tidak dapat ditolak tentang realitas yang terjadi sepanjang proses itu.

ABRI, ujar Munir, tidak seharusnya memberi tanggapan negatif terhadap pengumuman hasil investigasi Komnas HAM. Sebaliknya, ABRI harus menjadi pendukung upaya rehabilitasi kondisi masyarakat Aceh, dengan membuka ruang bagi berbagai komponen masyarakat, untuk menemukan fakta-fakta jatuhnya korban serta mengembalikan kondisinya. ❑ **pet/han/ray**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KEDAULATAN RAKYAT	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Trauma Masih Bayangi Korban Penculikan ...

KEDATANGAN korban penculikan Feisol Reza ke Markas Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI, Jakarta, Senin (26/10), bukanlah yang pertama. Sebelumnya ia pernah diperiksa, beberapa lama setelah dibebaskan penculiknya. Meskipun demikian, Reza tak bisa menahan takut ketika mendengar suara terompet tanda apel di Markas Puspom ABRI pukul 15.00 WIB.

"Begitu terompet berbunyi, Reza langsung melompat dan lari ke saya. Jangan-jangan dulu saya disekap di sini, kata dia. Bunyi terompet itu ternyata menghukum dia. Setelah itu ke kamar mandi pun dia minta dikawal. Trauma semacam itu adalah hal yang akan muncul di waktu-waktu tertentu, entah sampai kapan," ungkap Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munir, ketika berbicara pada kegiatan "Sosialisasi Hak Asasi Manusia", Selasa (27/10) di Universitas Borobudur, Jakarta.

Sekilas, tanda-tanda trauma akibat penculikan itu memang tidak akan terlihat pada korban penculikan. Sembilan korban penculikan yang sudah bebas, menjalani kehidupan mereka kembali seperti biasa, seolah tak ada sesuatu yang hilang dalam hidup mereka. Padahal, trauma akibat penculikan dan siksaan para penculik itu masih membekas.

Aan Rusdianto menceritakan, suatu ketika saat berkumpul bersama beberapa teman, tanpa sengaja tangannya tersundut rokok yang masih menyala. "Saat itu saya berteriak keras sehingga semua orang kaget. Saya sendiri juga kaget, reaksi spontan yang mengingatkan pengalaman waktu diculik itu bisa muncul sedemikian cepat," ungkapnya.

Aan yang diculik bersamaan dengan Nezar Patria dan Mugiyanto itu yang disiksa dua hari dua malam, menuturkan, sejak dilepas penculiknya, korban berusaha sendiri untuk bangkit kembali secara psikologis. Korban belum mendapatkan bimbingan psikologis.

Munir menambahkan, ketika beberapa orang dari korban penculikan sempat tinggal di kediamannya, Munir beberapa kali harus bangun tengah malam untuk membangunkan korban penculikan itu karena mereka bermimpi masih berada di tempat penyekapan. "Padahal itu hampir dua bulan setelah mereka dilepas. Itu adalah satu siksaan psikologis luar biasa yang belum bisa diobati," ucap Munir.

***

BAGI para korban penculikan adalah sebuah "perang batin" untuk terus memperjuangkan terungkapnya kasus penculikan, karena dalam upaya untuk mengungkap kasus ini mereka kembali harus berhadapan dengan hal-hal yang bisa membangkitkan kembali kenangan pahit yang pernah mereka alami. Terlebih lagi persoalan penculikan masih menyisakan sejumlah orang hilang yang nasibnya belum jelas. Ungkapan perasaan para orangtua korban itu menjadi elemen tersendiri yang melengkapi pengalaman traumatis Reza dan kawan-kawan senasibnya.

Tekad korban penculikan dan keluarga korban sudah bulat. Mereka ingin membangun sebuah masyarakat baru yang benar-benar menghormati kemanusiaan, dengan menuntaskan kasus pelanggaran berat atas kemanusiaan itu dan menuntut pertanggungjawaban. Mereka rela berletih-letih mendatangi kampus untuk menebarkan benih peduli kemanusiaan. **(oki)**

Kelas: .....

ISAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

dia:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☑	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Koordinator Kontras Munir SH

KP Melegalkan Lembaga Ekstra Yudisial

ama ini Kontras dikenal sebagai pi-ang paling getol memperjuangkan para tersangka pelaku penculikan a ke pengadilan. Menurut Anda, benarnya yang menjadi latar be-gnya?

uar penolakan DKP, kami mengang-rsoalan pemeriksaan terhadap para a memang harus berakhir di penga-Sebab, ini juga akan dapat memberi-mpak positip kepada masyarakat luas, hukum dikenakan untuk memutus-iap persoalan. Jadi motif kami adalah ngun kepercayaan masyarakat kepa-um. Dan di sini pula diharapkan, un-sa ke depan, masyarakat akan melihat rlakuan hukum secara tidak diskrimi-siapa pun yang bersalah maka harus m. Itu saja.

kah Anda tidak takut dituduh motif politik?

a sekali tidak. Bagi kami interest po-emang ada. Tapi maksudnya itu bu-erst kelompok, perorangan, atau go-. Bagaimana kami bercita-cita untuk ngun negara hukum. Bagaiamana ngun kepercayaan masyarakat terha-em hukum dan peradilan yang ada. jelas hanya bisa dicapai melalui ke-an politik ala kami. Sekali bila ada ngan politik, kepentingan tersebut ukan untuk golongan, maupun pero-Tapi untuk semua orang tanpa terke-

mana bila hasil DKP nanti hanya memberhentikan para perwira rir militernya, apa yang akan lakukan?

lnya, bagi saya bukan pertanyaan akan Kontras lakukan. Tapi, apa nya bila dengan DKP maka proses peradilan tidak dilakukan. Nah, bagi saya menyikapi hal ini ada beberapa pemikiran. Pertama, bila peradilan tidak dilakukan maka akan timbul keraguan di kalangan masyarakat bahwa perubahan yang kini tengah terjadi ternyata tidak bisa menjamin terbentuknya iklim negara yang demokratik. Alhasil optimisme hukum akan menjadi dikalahkan dengan kepentingan yang lain.

Kedua, bila tidak dilaksanakan maka masyarakat dipastikan akan terjebak lagi kepada problem ketidakpercayaan kepada prosesi hukum. Dan ini dalam jangka panjang berbahaya, yakni masyarakat akan bertindak sendiri-sendiri, yakni melalui berbagi aksi tindak pidana kekerasan, misalnya kerusuhan, penculikan dan pembakaran.

Pekan lalu, pihak Kontras menyebutkan bahwa pembentukan DKP adalah cacat hukum. Apa alasan Anda terhadap pernyataan ini?

Bagi kami DKP catat hukum, baik itu secara subtsansial maupun secara prosedural. Yang prosedural adalah berdasarkan keputusan Pangab tahun 1995 nomor 438, yang itu mengatur tentang dibentuknya DKP. Di situ terlihat, prasyarat pembentukan atau orang yang bisa diajukan ke DKP adalah mereka yang telah dijatuhkan hukuman minimal 3 bulan ke atas. Atau pula telah dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan atau skorsing oleh Mahkamah Militer. Nah, dengan melihat ini maka seharusnya orang yang diajukan DKP adalah mereka yang sudah terlebih dahulu mendapat putusan oleh mahkamah militer.

Yang substansial?

Cacat yang subtansial itu ada tiga hal. Pertama, bila DKP menjadi lembaga administratif ABRI yang keputusannya itu nanti bisa mengabaikan keputusan pengadilan, maka DKP jelas sudah menjadi sebuah lembaga yang mempraktekan diskriminasi dalam pelaksanaan hukum. Kedua, bagi kami dengan dibentuknya DKP adalah juga merupakan cerminan dari adanya intervensi terhadap lembaga peradilan. Alhasil, keputusan DKP kami anggap tetap bukan keputusan peradilan, melainkan hanya sebatas keputusan politik intern ABRI saja.



Ketiga, DKP terlihat membentuk negara hukum dipastikan akan gagal kita wujudkan.

DARMAWAN/REP

Kalau demikian, apakah pembentukan DKP itu dilatar belakangi adanya rekayasa politik?

Saya kira bukan sekedar rekayasa politik. DKP adalah sebuah keputusan yang sangat berbahaya bagi kepentingan penegakan hukum.

Selain Kopassus, banyak kesaksian yang menyatakan bahwa instansi lain juga terlibat dalam aksi penculikan. Kenapa instansi lain belum diusut?

Sejak awal memang kami sudah mengatakan, penculikan tidak hanya dilakukan oleh Kopassus saja. Instansi lain, termasuk Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, beberapa Koramil, Kodim, atau juga —seperti yang dikatakan Kapuspom bahwa BIA— juga ikut melibatkan diri. Nah, bila dilihat dengan cara pandang ini, saya khawatir bila hanya menunjuk Kopassus maka itu adalah sebuah usaha pihak ABRI untuk melokalisir keterlibatan oknum pelaku penculikan. Sehingga dengan demikian, kami sampai hari ini melihat pihak ABRI masih belum terbuka total terhadap kasus penculikan. Mereka terlihat masih melakukan pembatasan terhadap pihak-pihak tertentu.

Apa yang Anda harapkan dari pengungkapan kasus orang hilang?

Kalau kita melihat dari konteks sempit, yakni hanya mengkaitkan pada 24 orang, maka akan terjadi tiga hal. Pertama, akan terjadi pertanggungjawaban hukum, yakni siapa pun yang terlibat akan dipidanakan. Kedua, akan ada pula pertanggungjawaban politik, artinya ABRI akan meminta maaf akan terjadinya kasus tersebut. Ketiga, adanya pertanggungjawaban dari pemerintah, yakni melakukan rehabilitasi terhadap hak-hak keluarga korban serta menghilangkan rasa takut yang kini berada di dalam benak masyarakat.

Tapi untuk konteks makro, kasus orang hilang sudah terjadi semenjak tahun 70-an itu mempunyai konsekuensi dua hal. Perta-

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	(Juli)	(1998)
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	(8)	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Kontras Pastikan Hadir di Sidang Komisi HAM PBB

Jakarta, Kompas

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memastikan akan hadir pada sidang kelompok kerja penghilangan paksa (*Enforced and Involuntary Dissappearence*) dan penyiksaan (*Torture, Arbitrary Detention*), Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, yang akan dilaksanakan September-November mendatang di Geneva. Kontras akan memberikan laporan perkembangan terakhir mengenai kasus orang hilang, untuk melengkapi laporan yang sudah diberikan selama ini.

Demikian Koordinator Badan Penasihat Kontras, Mulyana W Kusumah dan Koordinator Badan Pekerja Kontras, Munir, Selasa (7/7), di Jakarta. Kehadiran Kontras di sidang kelompok-kelompok kerja, tambah Munir, merupakan undangan, sebagai tindak lanjut dari laporan-laporan Kontras selama ini. "Sebenarnya mereka mengharapkan ada tiga pihak yang hadir, yaitu Kontras, wakil korban dan keluarga korban. Namun, sekarang ini baru Kontras yang bisa memastikan diri. Sementara pihak korban dan keluarga korban berpendapat masih perlu untuk menyelesaikan di tingkat nasional," jelas Munir.

Dia menambahkan, pada sidang-sidang itu Kontras akan menyampaikan secara terbuka apa pun kondisi terakhir sampai bulan September. "Kalaulah misalnya sampai bulan September tetap belum dilakukan penyelesaian, maka itu yang akan dilaporkan. Sebaliknya kalau ABRI sudah melakukan langkah-langkah lebih maju pun akan dilaporkan secara terbuka," tegas Munir.

Ditambahkan Mulyana, kehadiran Kontras di sidang-sidang kelompok kerja Komisi HAM PBB itu sangat penting apalagi dalam kaitan akan segera diratifikasinya Konvensi Anti Penyiksaan oleh Indonesia, Agustus nanti.

Kontras dalam kesempatan itu juga menyatakan, ada kesan kuat bahwa ABRI lebih mendahulukan kepentingan internalnya. Hal itu tercermin dari tidak adanya penyampaian hasil penyelidikannya soal orang hilang itu secara terbuka kepada masyarakat. Khususnya dalam kaitan 40 orang yang sudah diperiksa, serta keberadaan korban-korban penculikan lain yang sampai sekarang belum diketahui nasibnya.

Ditambahkan, ABRI juga harus bersikap tegas terhadap status mereka yang selama ini sudah diperiksa, apakah tersangka atau saksi sehingga masyarakat juga jelas. Kontras mendesak agar Pangab membuat penjelasan terhadap status hukum mereka itu. **(oki)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Kontras Yakin Korban Penculikan Masih Hidup

Jakarta, Kompas

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sampai saat ini merasa yakin, korban penculikan yang belum kembali masih hidup seluruhnya. Diperkirakan, korban penculikan masih disekap penculiknya atau telah "dibuang" ke suatu tempat yang membuat mereka belum bisa berkomunikasi dengan pihak lain, termasuk keluarganya. Untuk itu, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) perlu menjelaskan keberadaan korban penculikan yang masih belum kembali.

Keyakinan itu disampaikan Koordinator Badan Pekerja Kontras, Munir, Selasa (18/8), di Jakarta. "Kita meminta agar DKP (Dewan Kehormatan Perwira) yang dipimpin Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo secepatnya mengumumkan keberadaan ke-12 korban penculikan itu, dan mengakhiri polemik di masyarakat sekitar nasib mereka itu," tegasnya.

Munir menegaskan, pihaknya tidak akan pernah menganggap para korban penculikan itu telah meninggal, sebelum ada penjelasan resmi dari pemerintah atau ABRI. Kalaupun suatu saat ada pernyataan para korban telah tiada, perlu dibuktikan pula di mana jenazah dan kuburan para korban itu, karena hal itu juga merupakan tuntutan para keluarga korban.

"Oleh karena itu tidak mungkin saya menyatakan para korban itu sudah meninggal. Saya juga tidak akan memberi batas waktu kepada pemerintah atau ABRI untuk terus mencari para korban penculikan itu. Tapi kalau ABRI sudah mengetahuinya maka tidak ada untungnya terus menerus menyimpan informasi itu, karena selama itu pula masyarakat akan menagih dan menaruh ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan ABRI," ujar Munir. **(oki)**

Hal. 17 .....
Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐	Berita Buana	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

14 Aktivis yang Diculik Telah Meninggal

arta, Buana

Pengusutan kasus penculikan diminta tak alan lamban seperti sekarang. Dewan Kematan Perwira (DKP) sebaiknya segera mberi rekomendasi kepada Menhankam/ gab Jenderal TNI Wiranto agar kasusnya era dilimpahkan ke Mahkamah Militer. Se, ke-14 korban penculikan yang hingga saat belum ditemukan diyakini telah mening-

Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan rban Tindak Kekerasan (Kontras) A Munir ngatakan, ia yakin bahwa aktivis yang dilik tersebut sudah meninggal. Menurutnya, merintah, dalam hal ini ABRI, lebih baik ngumumkannya secara terbuka agar keluarkorban tak terus menerus berharap.

Sejak lama kita sudah yakin bahwa ke-14 an itu sudah meninggal. Maka dari itu, unapa DKP masih lamban dalam menangani ini? Segera bawa ke pengadilan militer rakyat tahu siapa dalangnya dan hukumpa yang pantas diberikan!" tegas Munir da *Buana*, Selasa (18/8)..

nggota DKP, yang juga Gubernur Lem-, Letjen TNI Agum Gumelar, tak memah sinyalemen bahwa ke-14 aktivis itu temeninggal. Menurutnya, hal itu pun sudah jadi salah satu bahan dasar penyidikan P dalam memeriksa mantan Danjen Kopas-Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen Muchdi, serta mantan Dan Grup Kopas-IV Kolonel Chairawan.

Penyidikan DKP pun diarahkan ke sana, bagaimana nasib para aktivis yang di-itu. Saya tak berhak bicara. Tunggu saja rekomendasi kami kepada Pangab," ujar n.

Yakin Meninggal

ementara itu, Ketua Solidaritas Maha- Indonesia (SMI) untuk pro-Demokrasi Arief dan Ketua Aliansi Demokrasi at (ADR) Pius Lustrilanang, secara ter-, mengatakan keyakinannya bahwa para an itu sesungguhnya sudah lama meninghkan, sejak jauh hari, Andi Arief telah li-kali mengatakan bahwa korban-korban lah dibunuh. Apalagi, para aktivis yang an tersebut dinyatakan sudah dilepas, natidak juga kembali ke rumah.

ejak awal saya sudah menduga mereka dihabisi. Buktinya, mereka telah dibebaskan bersamaan dengan saya, tetapi mengapa mereka tidak juga kembali kerumahnya? Itu artinya mereka sudah meninggal. Sebaiknya ABRI secara jantan mengakuinya," tandas Pius.

Meski sebelumnya telah menduga bahwa para aktivis itu telah dibunuh, Andi Arief sempat terkejut dengan informasi yang diperoleh *Buana* tersebut. Ia menyatakan sangat terpukul dengan peristiwa ini. Menurutnya, ini adalah sebuah bukti nyata mengenai kekejaman politik yang mungkin sangat keji di antara kekejaman politik di negara mana pun. Karena itu, ia berharap para pelakunya segera ditindak seadil-adilnya.

"Ini adalah kenyataan yang mau tidak mau harus diterima. Tetapi, saya berharap pemerintah segera mengeluarkan informasi resmi mengenai kematian mereka. Bagaimanapun, keluarga korban harus mendapat kejelasan mengenai nasib anggota keluarganya. Apa pun alasannya, ABRI harus menemukan kerangka mereka dan kemudian diserahkan secara resmi kepada keluarga yang bersangkutan," ujar Andi Arief.

Menilik kekejian tersebut, Andi Arief dan Pius Lustrilanang sependapat bahwa pihak-pihak yang terlibat harus dikenakan hukuman yang seberat-beratnya. Mereka bukan lagi penjahat perang. Mereka lebih dari itu. Mereka adalah penjahat-penjahat kemanusian.

"Prabowo dan teman-temannya yang terlibat dalam kasus ini harus dihukum mati, termasuk Panglima Tertinggi ABRI. Bohong belaka bila ada anggapan Panglima Tertinggi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi ketika itu," ujar Andi Arief.

Penyerahan mayat sesegera mungkin, menurut Pius, adalah hal yang mutlak. Sebab, selama ini, mereka telah diombang-ambingkan dengan janji dan harapan bahwa keluarganya masih hidup. Untuk menuntaskan kasus ini, Pius menyatakan kesediaanya menjadi saksi. Menurutnya, apa pun yang terjadi, ia akan tetap berjuang hingga kasus ini benar-benar tuntas. ❑ mal

NASIB MEREKA YANG HILANG

No	Nama	Organisasi	Saat Penculikan	Pertiraan
1	Wiji Thukul (35)	Jaringan Kesenian Rakyat afiliasi ke PRD	Hilang sejak Agustus 1996 ketika akan keluar dari rumah	meninggal
2	Yusuf (30)	Tidak jelas	Diculik di rumahnya pada 7 Mei 1998	meninggal
3	Yanni Ani (27)	DPC PDI Perjuangan	Hilang sejak 26 April 1997	meninggal
4	Sonny (28)	Mantan preman aktif di DPC PDI Perjuangan, Jakut	Diculik saat dalam perjalanan pulang dari Kantor Kodim pada 26April 1997	meninggal
5	Dedy Hamdun (44)	Pendukung PPP dan cukup punya nama dalam dunia preman	Diculik saat kampanye pada 29 Mei 1997	meninggal
6	Noval Alkatiri (31)	Pendukung Mega-Bintang	Hilang bersama Deddy Hamdun	meninggal
7	Ismail (30)	Sopir Deddy Hamdun	Hilang bersama majikannya	meninggal
8	Suyat (23)	Aktivis Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi	Diculik saat berada di rumah sahabatnya di Sumber, Solo pada 12 Februari1998	meninggal
9	Herman Hendrawan (28)	Deklarator Komite Nasional Pro-Demokrasi (KNPD)	Diculik sesaat setelah meninggalkan LBH sesaat memproklamasikan KNPD	meninggal
10	Petrus Bimo Anugrah (25)	Aktivis PRD	Hilang sejak 31 Maret 1998	meninggal
11	Yudhi Muhtadin (22)	Tidak aktif dalam kegiatan politik	Hilang sejak kerusuhan 14 Mei saat ia berada di Sumber	meninggal
12	Herman Hendrawan (27)	Politisi dan tokoh aktif dalam kegiatan politik	Hilang sejak kerusuhan 14 Mei saat ia berada di Glodok	meninggal
13	Ucok Munandar Siahaan (21)	Mahasiswa Perbanas	Ketika kerusuhan ia terbawa arus massa di Jakut	meninggal
14	Triyono (23)	Mahasiswa FS UGM	Diculik saat kerusuhan 13 Mei di Jakarta	meninggal

Sumber: Pusat Data Buana

Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

▲ Keluarga Aktivis yang Hilang:

Prabowo Kami Maafkan

Asal 14 Aktivis yang Hilang Dikembalikan

Jakarta, Jumat, Merdeka

Ada perkembangan baru dalam kasus penculikan dan orang hilang. Keluarga korban menawarkan barter dengan pihak ABRI. Mereka mendesak ABRI segera membebaskan 14 aktivis yang masih hilang, tanpa menuntut diseretnya para tersangka pelaku penculikan ke Mahkamah Militer.

Tawaran barter itu dikemukakan Andi Arief — salah seorang korban penculikan yang telah kembali — yang mendampingi lima dari 14 keluarga korban penculikan, saat datang ke Mabes AD, kemarin. Kelima keluarga korban yang datang itu masing-masing keluarga Noval Alkatiri, keluarga Dedi Hamdun, keluarga Yani Afri, keluarga Ucok Munandar, dan keluarga Yadin Muhidin.

"Kami berharap teman-teman kami yang saat ini belum kembali segera dilepaskan. Kami dan keluarga korban tidak akan menuntut, biarlah Prabowo Cs tidak dikirim ke Mahmil. Ini tidak apa-apa, kami maafkan asal teman-teman kami dibebaskan. Barter ini merupakan alternatif terendah untuk membebaskan para korban," kata Andi Arief kepada wartawan.

Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar dua jam (pukul 10.00—12.00 WIB) itu, Andi dan para keluarga korban diterima Kadispenad Brigjen I Putu Rai dan Aspam Kasad Mayjen M Noor Aman.

Menurut Andi, sepahit apapun kondisi para korban yang kantinya akan dijelaskan oleh pihak ABRI, sangat dibutuhkan para keluarganya yang kini menunggu dalam ketidakpastian.

"Sekalipun dalam kondisi meninggal, pihak keluarga akan menerimanya dengan hati lega. Tapi kalau tidak pernah diberitahukan, ini hanya akan menimbulkan dendam mendalam," tambahnya.

Dikatakan pula, tawaran barter ini memang sifatnya tidak resmi, yang seyogyanya disampaikan lewat Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Tapi, menurutnya, kondisi psikologis para keluarga korban mendesak untuk mengungkapkan barter tersebut.

Dalam pertemuan kemarin, para keluarga korban belum memperoleh kepastian mengenai nasib 14 aktivis yang masih hilang. Karena sama dengan yang dijelaskan Puspom ABRI, pihak Mabes AD juga belum mengetahui dimana dan bagaimana nasib mereka itu.

"Pihak Mabes AD masih mengatakan belum tahu di mana mereka sekarang. Kami akan datang lagi hari Selasa mendatang, dengan harapan dapat bertemu langsung dengan Kasad selaku ketua DKP, karena setelah datang ke tempat ini untuk kedua kalinya, Kasad belum berkenan menerima kami secara langsung," ungkap Andi Arief.

Menurut Andi, penjelasan tentang nasib ke-14 korban ini lebih penting dibanding pengusutan kasus yang telah dialami dirinya maupun korban penculikan lainnya yang telah kembali. Dikatakan, pihak keluarga korban merasa yakin kalau ke-14 anggota keluarga mereka masih hidup. Setidaknya, masih ada yang hidup dan harus segera dibebaskan.

"Para keluarga korban tidak terlalu memikirkan Mahmil, proses sanksi administrasi yang akan dijatuhkan pada tersangka atau DKP, yang penting mereka segera dikeluarkan," tegasnya lagi.

Apalagi menurutnya, sulit untuk memberikan batas waktu kepada ABRI untuk segera menuntaskan kasus ini. Tapi kalau dilihat lagi, ABRI telah mengetahui siapa tersangka dan lokasi penyekapan para korban, ABRI tidak sulit untuk mengetahui keberadaan mereka.

Sementara itu Kadispenad Brigjen I Putu Rai mengatakan, selama ini ABRI telah bersungguh-sungguh dalam mengusut kasus penculikan ini. Termasuk berusaha mencari tahu dimana ke-14 aktivis yang masih hilang.

Sementara itu pengumuman hasil rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dan keputusan Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto atas nasib tiga perwira terperiksa Letjen Prabowo Subianto, Mayjen Muchdi PR dan Kolonel Chairawan masih belum jelas.

Jenderal Wiranto yang dicegat wartawan kemarin memastikan bahwa keputusan tersebut tidak akan diumumkan hari Jumat ini. Yang pasti akan dilakukan minggu depan, namun tidak disebutkan harinya.

"Nggak, bukan besok (hari ini - Red)," kata Pangab singkat ketika dicegat seusai mengikuti Rakor Polkam, kemarin siang.

Ketika ditanya kapan akan diumumkan, jenderal berbintang empat itu mengatakan, "Nggak tahu kapan akan diumumkan. Minggu depan lah."

Soal rekomendasi dari DKP yang dipimpin oleh Jenderal Subagyo, dia mengatakan sampai saat ini dirinya masih belum menerimanya. "Rekomendasi itu belum masuk ke saya. Baru dievaluasi kan," tambahnya. **(EKA/WR/PN)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

14 Mayat Itu Diduga Para Terculik

Jakarta, Sabtu, Merdeka

Meski belum berani mengambil kesimpulan bahwa 14 mayat laki-laki dewasa yang sempat dilihat dan ditemukan di Sungai Way Umpu, Lampung Utara adalah mayat korban penculikan, pihak Kontras mendesak Puspom ABRI untuk segera melakukan investigasi ke lapangan serta memberikan perintah otopsi.

"Setelah itu sesegera mungkin pula Puspom ABRI mengumumkan secara terbuka apakah mayat-mayat tersebut merupakan korban penculikan atau bukan. Untuk itu, hari ini (Jumat, 31/7) kami mengirim surat ke Danpuspom," ujar Koordinator Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Munir di Jakarta, kemarin.

Menurut Munir, ditemukannya mayat-mayat tersebut berkat laporan masyarakat setempat. Mayat pertama ditemukan 6 Juli lalu sekitar pukul 17.30 WIB oleh warga Kampung Temiang Lada, Desa Blambangan Umpu, Lampung Utara. Tiga hari kemudian (9 Juli) di tempat yang sama ditemukan satu mayat tersangkut di aliran sungai.

Kemudian tanggal 13-14 Juli sekitar pukul 17.45 WIB seorang warga Olok Lunding melihat dua mayat laki-laki terapung dengan posisi sejajar tertelungkup. Selanjutnya tanggal 16 Juli sekitar pukul 14.00 WIB di jembatan Blambangan Umpu terlihat enam mayat laki-laki terapung.

Pada tanggal 18 Juli pukul 12.00 WIB seorang warga menemukan satu mayat tersangkut di sebuah akar pohon di pinggir sungai. Pada waktu yang hampir bersamaan di Kampung Karang Agung ditemukan dua mayat dan di Muara Giham ditemukan satu mayat sekitar pukul 19.00 WIB.

Menurut Munir, pada mayat-mayat tersebut ditemukan tanda-tanda akibat kekerasan, rata-rata telapak tangan tidak ada dan di seluruh tubuh ada luka bekas tusukan.

Sementara itu menurut Happy Hendrawan anggota Kontras yang melakukan investigasi langsung ke Lampung sejak 27 Juli hingga 30 Juli lalu, dari ke-14 mayat tersebut hanya satu yang bisa diselamatkan oleh warga, yaitu mayat yang ditemukan di bawah jembatan Blambangan Umpu. Kemudian mayat itu dikuburkan oleh warga setempat.

"Menurut salah seorang warga yang ikut dalam penguburan, kedua telapak tangan mayat itu hilang, kulit kepala terkelupas, dagu bagian bawah hilang dan gigi atas tinggal tujuh. Saksi itu juga menyatakan ada indikasi, mayat tersebut telah mengalami penganiayaan berat," ujarnya.

Namun, pihak Polsek Blambangan Umpu memberikan keterangan yang berbeda. Menurut mereka, daging mayat itu hanya rusak di bagian hasta, telapak tangan hilang dan perutnya jebol.

Happy mengaku selama berada di Lampung, dia dan seorang rekannya, Victor, mengalami kesulitan untuk mendapatkan data-data dari masyarakat setempat. Warga sepertinya ketakutan untuk mengungkapkan hal ini.

"Ketika didesak, mereka mengaku trauma atas kasus tahun 1986. Saat itu musim Petrus (penembak misterius). Waktu itu kalau mereka menemukan mayat dan kemudian melaporkan ke pihak kepolisian, mereka malah dituduh sebagai pelaku," katanya.

Kondisi mayat-mayat tersebut menurut salah seorang saksi, lanjut Happy, rata-rata mengalami luka di dada sebelah kiri, robek di perut dan semuanya tidak mengenakan alas kaki.**(WR)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☑ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

LBH Teliti Informasi Penemuan 14 Mayat di Way Umpu

Jakarta, Kompas

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung masih meneliti informasi yang menyebutkan ditemukannya 14 mayat terapung di aliran Way (Sungai) Umpu, desa Rantau Kijang, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Lampung Utara (Lampung). Bersamaan, muncul pula kabar, mayat-mayat tersebut adalah aktivis mahasiswa yang menjadi korban penculikan.

"LBH Bandarlampung serius mencari kebenaran informasi penemuan belasan mayat di Way Umpu, Lampung Utara tersebut. Setelah dua kali investigasi di lapangan, memang ada yang melihat sejumlah mayat terapung di sungai. Berapa jumlahnya, sejauh ini belum bisa dipastikan. Tapi, yang jelas masyarakat setempat memang mengaku pernah melihat lebih dari satu mayat terapung dan hanyut di aliran sungai tersebut," ungkap Watoni Nurdin, Kepala Divisi Pertanahan dan Lingkungan, LBH Bandarlampung, menjawab *Kompas*, Jumat (31/7).

Selain tim investigasi dari LBH Bandarlampung, Komite untuk orang hilang dan korban kekerasan (Kontras) Jakarta pun menaruh perhatian terhadap informasi tersebut. Sebagai tindak lanjut, Kontras Jakarta mengirim dua anggotanya ke Lampung Utara, yakni Viktor Da Costa dan Chepy Hendrawan. Bersama LBH Bandarlampung, dua personel Kontras ini melakukan investigasi selama dua hari, Selasa dan Rabu (28-29/7) lalu.

Menurut Watoni, tim dari kedua lembaga itu telah menelusuri aliran sungai Umpu dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi mata yang mengaku melihat langsung mayat-mayat terapung tersebut. Informasi pun dikumpulkan dari warga yang tinggal di pinggiran sungai, para kepala desa dan Kapolsek Blambangan Umpu.

"Dari investigasi lapangan, bisa disimpulkan bahwa memang ada yang melihat sejumlah mayat mengambang di Way Umpu dalam dua pekan terakhir. Tentang jumlah mayat itu memang tidak bisa dipastikan, tapi yang jelas sesuai keterangan jumlahnya memang lebih dari satu dan itu pun semuanya mayat laki-laki," kata Watoni.

Ditegaskannya, meski lebih dari satu mayat, tim investigasi LBH dan Kontras hanya menemukan satu kuburan. Jasad yang dikuburkan itu adalah seorang laki-laki dewasa yang identitasnya tidak diketahui.

Dilukiskan, kondisi mayat sangat mengenaskan, karena beberapa bagian anggota tubuhnya tidak lengkap lagi. "LBH curiga mayat itu sengaja dibuang dan jati dirinya pun dikaburkan. Sebab, ada bagian raganya yang seolah sengaja dihilangkan, seperti telapak tangan, bagian muka, gigi dan lain-lain," ungkapnya.

Tentang isu yang mengkaitkan mayat-mayat terapung di Way Umpu ada hubungan dengan aktivis korban penculikan, secara tegas Watoni menyatakan, bahwa sejauh ini LBH tidak bisa menyimpulkannya.

"Itu hanya opini yang berkembang di masyarakat, dan kita tidak mau berspekulasi. Kendati demikian, informasi penemuan mayat tersebut tetap akan ditindaklanjuti dan disosialisasikan. Termasuk meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut," katanya. **(zul)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Melacak Penemuan 14 Mayat

Munir Minta Kubur di Olok Haji Digali

Jakarta, Senin, Merdeka

Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) hari ini pukul 11.00 WIB akan menemui Puspom ABRI untuk mendesak segera dilakukan investigasi lapangan guna mengecek identitas ke-14 mayat yang ditemukan di Sungai Way Umpu, Lampung Utara sejak tanggal 6-18 Juli 1998 lalu.

Hal tersebut diungkapkan Koordinator Kontras Munir ketika dihubungi *Merdeka* tadi malam. Menurutnya, Kontras mendesak Puspom ABRI untuk menggali kuburan satu mayat yang ditemukan warga di jembatan rel kereta api di Kampung Tua, Olok Haji.

''Sampai saat ini hanya satu mayat yang bisa diselamatkan oleh warga Kampung Tua yang berada di pinggiran Sungai Way Umpu dan dimakamkan di sekitar situ,'' jelas Munir.

Sedangkan ke-13 mayat lainnya, menurut Munir, tidak diselamatkan warga karena mereka masih trauma dengan peristiwa tahun 1986. Pada saat itu di wilayah tersebut sedang banyak penembak misterius (Petrus). Setiap kali masyarakat menemukan sesosok mayat dan melaporkan penemuan tersebut ke polisi, mereka langsung dituduh sebagai pelaku penembakan tersebut. Bahkan untuk mendapatkan informasi tentang temuan ke-14 mayat tersebut, Happy Hendrawan dan Victor, anggota Kontras yang dikirim langsung ke Lampung mendapat kesulitan.

''Masyarakat Lampung masih trauma. Maka ketika warga yang menemukan mayat tersebut malah berusaha menyingkirkannya dengan cara mendorong mayat yang menyangkut di pinggiran sungai ke arah tengah sehingga mayat-mayat itu terbawa arus kali. Nah, itu yang harus kita telusuri kembali sampai ke-13 lainnya ketemu,'' kata Munir lagi.

14 Mayat yang Ditemukan di Sungai Way Umpu, Lampung Utara

Tanggal Penemuan	Pukul	Jumlah	Lokasi
6 Juli 1998	17.30	1	Temiang Lada
9 Juli 1998	10.00	1	Temiang Lada
13-14 Juli 1998	17.30	2	Olok Lunding
16 Juli 1998	14.00	6	Simpang Empat
18 Juli 1998	09.00	2	Karang Agung
	12.00	1	Kampung Tua
	15.00	1	Muara Giham

Selain itu, lanjutnya, setelah Puspom ABRI melakukan pemeriksaan terhadap mayat tersebut maka Puspom segera melaporkan secara terbuka temuan mengenai mayat-mayat tersebut.

''Sehingga masyarakat mengetahui apakah mayat-mayat tersebut adalah ke 14 korban penculikan yang sampai sekarang masih raib atau bukan,'' katanya.

Sementara itu ketika ditanya tentang tidak diizinkannya anggota Kontras Mugiyanto untuk bertemu dengan Konsulat Jenderal Indonesia di Davao, Filipina berkaitan dengan munculnya Herman Hendrawan, dia menyayangkannya. Herman Hendrawan yang saat ini berada di Davao semula diduga sebagai salah seorang dari 14 korban penculikan yang belum ketahuan sampai saat ini, tapi ternyata bukan orang yang dimaksud. Menurut Munir, sebenarnya Mugiyanto memang bukan utusan resmi dari Kontras.

''Dia (Mugiyanto) sejak seminggu lalu memang berada di Filipina untuk mengikuti pertemuan dengan orang-orang yang diculik se-Asia. Tetapi kemudian saya mengutus dia menemui Herman di sana. Dia tidak diizinkan masuk karena tidak membawa surat kuasa dari keluarga,'' lanjut Munir.

Melihat hal tersebut kemudian Kontras mengirim orang, Dadang Trisasongko yang membawa surat kuasa dari orangtua Herman Hendrawan yang berasal dari Universitas Airlangga. ''Tetapi sampai sekarang saya belum ada kontak dengan Dadang. Tadi kontak terakhir jam 11.00 siang,'' katanya.

Namun ketika hal tersebut dikonfirmasikan *Merdeka* ke Konsul Jenderal Asmardi Arbi di Davao Filipina, pihaknya membantah.

''Sampai saat ini belum ada tamu dari Kontras yang datang ke konsulat. Kalau memang ada, masa saya tidak tahu. Tetapi saya tidak tahu kalau anak buah saya yang menerima. Seandainya memang begitu, kok dia tidak melaporkan hal itu ke saya. Dan kalau saya tahu anak buah saya tidak melaporkan hal itu, akan saya marahi dia,'' tutur Ardi.(WR)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA		1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA		2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA		3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA		4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN		5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Polda Lampung Turunkan Lagi Tim Ke Way Umpu Meneliti Soal Mayat

Bandarlampung, 5 Agustus

Hasil Tim Pencari Fakta Polda Lampung bersama wartawan setempat selama sehari penuh (Selasa, 4/8) menyimpulkan, hanya satu mayat tak dikenal yang ditemukan masyarakat di Way (Sungai) Umpu dan sudah dikebumikan oleh penduduk.

Sementara itu Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyebutkan, sesuai hasil investigasi mereka selama beberapa hari di sepanjang Sungai Umpu, terdapat lebih dari satu orang yang ditemukan masyarakat. Kontras tetap berkeyakinan mayat tak dikenal yang ditemukan di Sungai Umpu itu lebih dari satu.

Akibat silang pendapat dari hasil investigasi ini, Polda Lampung menurunkan dua tim ke lokasi kejadian Rabu (5/8) pagi dengan maksud untuk membuktikan kebenaran masing-masing pihak. Kedua tim itu, dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri dan FK UI. Tim ini akan menggali kembali kuburan jenazah tak dikenal yang ditemukan warga di Way Umpu guna mencari bukti-bukti penyebab kematiannya.

Kapolda Lampung Kolonel Pol Drs Gendro BS kepada wartawan di Mapolda Lampung, Selasa (4/8) menyatakan, pihaknya belum berani mengambil kesimpulan bahwa mayat yang ditemukan di Sungai Umpu korban pembunuhan. Untuk itu pihaknya mengajak Kontras dan LBH maupun pihak lainnya untuk membuktikan di lapangan, guna mencari kepastian yang sebenarnya. "Mari kita lakukan penelitian sama-sama guna mencari kebenaran di lapangan," katanya.

Tim Pencari Fakta Polda Lampung yang terdiri dari Kadit Serse, Letkol Pol Drs Yoyon Prasetyo, Kadit TPP, Letkol Pol Drs Try Mulya, Kapolres Lampung Utara, Letkol Pol Pl. Tobing, Sesditpen, Kapten Pol Zainal Gunawan, Kapolsek Balambang Umpu, Letda Pol Drs Edy Santoso yang melibatkan 11 wartawan media cetak dan elektronik itu setelah menyusuri sungai dan mendengarkan keterangan saksi-saksi mata dan melakukan pengecekan di TKP memastikan, dari 14 mayat yang disebut-sebut terapung itu hanya ada satu. Dan itu juga telah dikebumikan masyarakat, tandas Gendro BS.

Gendro juga mengatakan, Way Umpu ketap dijadikan lokasi pembuangan limbah restoran, dan tidak jarang mereka memasukan jeroan ayam ke dalam karung, sehingga menimbulkan bau yang tak sedap.

Laki-laki

Menurut dr. Heri Joni, Kepala Puskesmas Blambangan Umpu, mayat tak dikenal itu berjenis kelamin laki-laki, usia sekitar 35 tahun, dalam kondisi rusak tak dapat dikenali. Kepalanya sudah berbentuk tengkorak, gigi atas tinggal tujuh, kedua lengan dan kakinya hilang, asus dalam keadaan terurai.

Sekdes Blambangan Umpu, Nasro Jidil, menjelaskan, dia mengetahui adanya mayat terapung berdasarkan laporan warganya, lalu dilaporkan ke Kades, serta dilanjutkan ke Kapolsek Blambangan Umpu, Letda Pol Edi Santosa.

Warga yang melihat mayat secara langsung adalah Hendra, Syawal dan Wahdani. Mereka ikut menguburkannya.

Kapolsek Blambangan Umpu, Letda Pol Edi Santosa, mengungkapkan, pihaknya mendapat laporan dari warga adanya mayat terapung dan mereka langsung turun ke lapangan melakukan pemeriksaan.

Diakui, sebelumnya terdengar rumor adanya mayat lebih dari satu, sedangkan penduduk Blambangan Umpu hanya melihat satu mayat.

Keterangan Kontras

Happy Hendrawan SH dari Kontras ketika dihubungi Selasa (4/8) sore menyatakan yakin korban yang ditemukan di Way Umpu lebih dari satu orang sesuai dengan hasil investigasi mereka selama beberapa hari akhir Juli lalu. Disebutkan, pihaknya menyakini mayat lebih dari satu orang didukung kesaksian tiga penduduk yang memberikan penjelasan secara terinci. Salah seorang di antara saksi menyebutkan, pada 16 Juli ia melihat sesosok mayat lelaki tidak dikenal terapung di sungai ini. Sebelumnya pada 13 dan 14 Juli, dua penduduk setempat masing-masing melihat dua mayat terapung di sungai itu.

Seminggu sebelumnya, seorang warga melihat mayat terapung yang jumlahnya sembilan.

Untuk itulah, pihak Kontras berharap agar aparat keamanan meneliti secara benar hasil temuan mereka, sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran.

Menyinggung diturunkannya tim pencari fakta dari Labfor Mabes Polri dan Forensik UI, disebutkan, pihaknya juga ikut serta sehingga nantinya bisa diketahui siapa sebenarnya korban yang sudah dikuburkan itu. (122/U-2)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

KILASAN HUKUM

MAYAT DI WAY UMPU — Kuburan mayat yang tak dikenal di Way Umpu, Blambangan Umpu, Lampung Utara jika tidak ada halangan, Rabu (5/8) ini segera digali tim dari Puslabfor Polri dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Mayat akan diotopsi untuk melihat sejauh mana korelasi informasi penemuan mayat dengan aktivis yang masih hilang. Demikian Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung, Kolonel (Pol) Gendro Budi Santoso, dalam jumpa pers Selasa (4/8) di Bandarlampung. **(cal)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Polri Teliti Tulang Dan Gigi Mayat Di Way Umpu, Lampung

Bandarlampung, 6 Agustus

Tim Forensik dari Puslabfor Mabes Polri dan FK-UI membongkar makam orang tak dikenal di tepi Sungai (Way) Umpu, Blambangan Umpu, Lampung Utara, dan mengambil tulang rusuk dan giginya guna penelitian penyebab kematiannya sekaligus mengidentifikasi apakah korban ada korelasinya dengan hilangnya para aktivis seperti dugaan Tim Kontras (Komite Orang Hilang dan Anti Kekerasan).

Tim Puslabfor yang terdiri atas Letkol Pol dr Slamet Purnomo Spf dan Kapten Pol dr Sumirat Spf (Ladok Dik Dokkes Mabes Polri), Dr H Budi Sampurna Spf (FK UI), Letda Pol Yusmanto (Pusat Identifikasi Mabes Polri), Letkol Pol Drs Toto Suyato, Mayor Pol Drs Andi Takdir dan Kapten Pol Pakpahan (Dirserse Mabes Polri) itu tiba di lokasi hari Rabu (5/8) sekitar pukul 10.15 WIB. Sekitar tiga puluh menit kemudian kuburan itu mulai terkuat, dan langsung menebarkan bau busuk yang sangat menyengat hidung sampai radius sepuluh meter.

Kondisi mayat, nyaris tinggal tulang belulang dan hanya tersisa sedikit daging disekitar pangkal paha. Sebab-sebab kematian korban, belum dapat diketahui.

Setelah jenazah diangkat ke permukaan, tim mulai mengamati tengkorak kepala dimana kondisinya sudah tak utuh lagi, tinggal rahang bagian bawah, delapan gigi depan dan geraham atas tidak ada lagi, bagian depan hidung tampak bekas benturan benda keras.

Gigi yang tersisa tujuh buah, tiga berada dibagian kanan dan empat bagian kiri, gigi geraham bagian atas tampak berlubang. Selain itu, sebagian besar gigi korban banyak melekat karang gigi, ujar Kapolres Lampung Utara, Letkol Pol Drs PL Tobing yang turut menyaksikan otopsi itu.

Ciri lainnya dari mayat itu, adalah mata menonjol, tulang bagian belakang kepala besar dan kasar, bentuk muka segi empat dengan ketinggian tengkorak 14,5 cm, panjang 15,1 cm, lebar 13,1 cm.

Seusai tim memeriksa bagian kepala, dilanjutkan ke bagian tubuh setelah terlebih dahulu dibersihkan. Tim mulai mengukur bahu hingga pergelangan kaki (142 cm), betis (33,3 cm), lengan bawah (25 cm), kemudian tim menyingkap tulang rusuk dan mengambil salah satu tulang rusuk sebelah kiri.

Sedangkan ciri fisik dari tubuh mayat tak dikenal yang ditemukan warga di aliran Way Umpu itu, memiliki ketinggian 155 - 160 cm, jenis kelamin laki-laki, umur diperkirakan antara 23 - 30 tahun.

Sekitar pukul 12.20 WIB, mayat tersebut kembali dimakamkan, sedangkan Tim Forensik itu hanya mengambil tulang rusuk sebelah kiri dan gigi guna mengetahui DNA atau golongan daerah mayat itu, dan diperkirakan hasilnya baru diketahui paling cepat satu minggu kemudian.

Sebelum melakukan pembongkaran, tim Puslabfor itu terlebih dahulu singgah di Mapolsek Blambangan Umpu guna mendengarkan penjelasan Kapolres Lampung Utara Letkol Pol Drs PL Tobing dan Kasat Serse Lettu Pol Ivan Setyiadi, tentang penemuan mayat tak dikenal oleh masyarakat setempat.

Menurut Kapolres, ada empat titik penemuan mayat yang dihimpun dari warga, namun hanya dua titik penemuan yang dinilai akurat. Pertama, dimana Ibrahim bin Usman dan Tohor melihat mayat di sekitar kebun (6/7). Mayat yang ditemukan kedua orang itu menurut Kapolres, mengenakan kaus putih dan celana dalam cokelat didorong oleh saksi ke hilir, sembari menjelaskan jarak titik penemuan itu dengan titik penemuan Sapri dibawah jembatan kereta api adalah 100 meter (18/7).

Titik penemuan ketiga, oleh saksi Syawal (22) dari atas jembatan lintas Sumatra di Desa Simpang Empat, Blambangan Umpu (15/7). Namun saksi Syawal, kata Kapolres, mengaku hanya melihat bagian muka yang tertutup buih.

Sedangkan titik keempat diketahui oleh Hendra (28) yang mengaku melihat adanya dua mayat terapung. Namun kesaksiannya diragukan, selain karena hari sudah menjelang senja, yang bersangkutan memiliki penglihatan yang kurang baik.

Kades Blambangan Umpu, Abdi Muhir mengatakan, mendapat informasi adanya mayat hanyut di Dusun 8 Rantau Tijang (6/7), warga mencari mayat tersebut pada (7/7-8/7) namun tak menemukan apa-apa, baru pada (18/7) mendapatkan laporan ada penemuan mayat.

Hanya Satu Mayat

Sementara itu, Komandan Detasemen Pom II-3 Sriwijaya, Lampung Letkol CPM Bagus Heroe Sucahyo mengatakan, berdasarkan temuan Tim Investigasi Pom, hanya satu mayat yang ditemukan. Warga masyarakat siap memberikan kesaksian untuk dikonfrontasikan dengan data yang diperoleh Tim Kontras.

Bahkan, dalam waktu dekat ini para saksi itu akan diupayakan memberikan keterangannya di Puspom ABRI Jakarta. Mereka akan menjelaskan apa yang dilihat, ditemukan dan informasi seputar penemuan mayat tak dikenal itu.

Saksi yang ditanya Tim Investigasi Pom itu antara lain Iskandar (28), Hendra (28), Syawal Amin (22), Sapri (25), Basaruddin, Ibrahim dan Ragil, semuanya warga Blambangan Umpu, termasuk Kadesnya.

Menurut Letkol CPM Bagus HS, hasil tim investigasi yang dibentuk itu telah dikirim melalui faksimili ke Pomdam II Sriwijaya di Palembang, untuk diteruskan ke Puspom ABRI. Inti laporannya hanya satu mayat yang ditemukan warga.

Disimpulkan, berita adanya penemuan 14 mayat oleh warga itu merupakan *rumor* dan tidak ada bukti-bukti, ditambah lagi keterangan saksi-saksi yang meragukan.

Tim yang turun ke lokasi hari

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

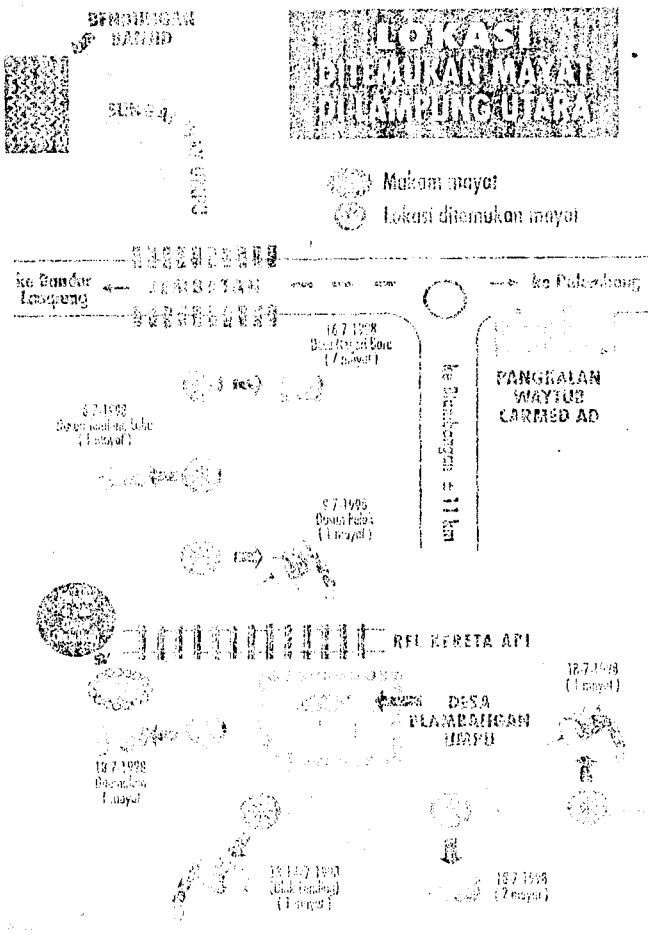
Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐	GATRA	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Mayat Siapa Lampung

[redacted] 18 Juli lalu, seorang kliennya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Hadi [redacted] bukan main [redacted] dengan dua mencerita-kan bahwa banyak ditemukan mayat di sebuah kampung, Sungai Way Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Lampung Utara. "Kata seberapa korban yang meninggal, kalau bisa tak melakukan pengautopsi," tanya Wakil Nasdin dari LBH Bandar Lampung.

Pertanyaan tersebut mendorong LBH Bandar Lampung melakukan investigasi ke lokasi penemuan mayat tersebut. 24 hingga 26 Juli lalu, sebanyak 16 mayat berhasil diautopsi. Hasilnya memang benar mengejutkan. "Tapi kami menyimpulkan ada lebih dari satu mayat," kata Wakil Nasdin pada GATRA. Rupanya, temuan mayat di Lampung ini menarik perhatian Kontras Jakarta. Lalu, bersama LBH Lampung, tim Kontras yang terdiri dari Heppy dan Victor berangkat ke sana pada 14-16 mayat. Mayat yang [redacted] yang ditemukan 6-18 Juli itu masih terkonsentrasi di desa Kecamatan Blambangan Umpu. Rata-rata mayat yang ditemukan [redacted] tangannya mengenakan [redacted] lagi. Di antaranya, ada yang [redacted] tangannya hilang. Kulit kepala [redacted] lepas, dan gigi hilang.

Selain itu, menurut Victor, masyarakat di sekitar tempat ditemukannya mayat itu [redacted] mengganggu. "Mereka [redacted] atas kejadian [redacted]," kata Victor pada Dewi Sri Utorodi dari GATRA. Sebelum di zaman [redacted] (penerbitan [redacted]) pada 1993, banyak mayat mengambang di sungai yang [redacted]. "Begitu dilaporkan, malah dianggap sebagai pelaku," kata Victor. Untuk itu, atas [redacted] para pendidik sekitar, kini, mereka merasa lebih aman bila diam saja.



Tentang jumlah 14 mayat [redacted] Kepala Polisi Resor Lampung Utara, Letnan Kolonel [redacted] Tobing menyebut sebagai angka yang terlalu mengada-ada. "Yang benar hanya satu mayat," kata Tobing. Satu mayat ini, menurut Tobing, yang ditemukan masyarakat pada 18 Juli lalu. Di siang hari itu, seorang penduduk bernama Syafei, yang berdiri memancing ikan, melihat adanya sesosok mayat terapung di tepi sungai. Penemuan ini kemudian dilaporkan ke Polsek Blambangan Umpu.

Setelah divisum oleh petugas kesehatan setempat, mayat lelaki berusia 35 tahun itu [redacted] tinggi 170 sentimeter dan berat 65 kilogram. Ketika ditemukan, korban [redacted] mengenakan [redacted] dalam [redacted] merek Crocodile, [redacted] dan kini sudah [redacted] tinggal tulang, kepala [redacted] tengkorak. Ia [redacted] sudah tak ada, [redacted] gigi [redacted] atas [redacted] sudah [redacted], dan rahang bawah [redacted].

Berapa pun jumlah mayat tersebut, menurut Kepala Kontras, Munir, kasus penemuan mayat di Lampung ini harus segera diselidiki. "Berhubungan dengan kasus pembunuhan atau tidak harus tetap diselidiki," katanya. "Karena ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang harus diperiksa secara [redacted]," katanya.

Hal. 1/ .....
Kelas: .....

Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

a:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Pelepasan Korban Lebih Penting dari Kerja DKP

Jakarta, Kompas

Lima anggota keluarga korban penculikan Kamis (20/8) kembali mendatangi Markas Besar (Mabes) TNI Angkatan Darat, Jakarta. Mereka bermaksud menemui Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo dan menanyakan kembali nasib korban penculikan yang hingga kini belum jelas keberadaannya. Para keluarga korban lagi-lagi mengimbau agar sanak keluarga mereka yang diculik segera dilepaskan. Bagi mereka, dilepaskannya korban lebih penting daripada pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

Didampingi dua korban penculikan yang sudah dilepas, yakni Andi Arief dan Faisol Reza, keluarga korban penculikan Noval Alkatiri, Yadin Nuhidin, Ucok Munandar, Yani Afri, dan Herman Hendrawan diterima Asisten Pengamanan (Aspam) KSAD Mayjen TNI M Noor Aman dan Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI I Dewa Putu Rai. Pertemuan berlangsung tertutup.

Damaris Hutabarat, ibu dari Ucok Munandar, kepada *Kompas*, mengatakan, ia bersama keluarga korban penculikan lainnya berharap, korban penculikan yang sampai kini belum kembali, segera dilepas. "Saya tidak peduli apakah akan ada Mahmil (Mahkamah Militer) atau DKP. Yang penting anak saya dikembalikan," tutur Hutabarat.

Ketika ditanya apa yang membuat dirinya yakin anaknya masih hidup, Hutabarat mengatakan, keyakinannya didasarkan pada seringnya ia bermimpi anaknya itu datang. "Pernah saya mimpi anak saya datang dengan luka di bagian muka," tutur Ny Hutabarat.

Belum tahu

Andi Arief kepada pers mengatakan, pihak TNI AD hingga kemarin mengaku belum mengetahui di mana 14 orang korban penculikan yang belum jelas keberadaannya. Sebab itu, keluarga korban hari Selasa (25/8) mendatang akan kembali menemui dan menanyakan langsung hal tersebut kepada KSAD.

Ditekankan, pelepasan korban penculikan lebih penting daripada proses pemeriksaan pelaku penculikan melalui DKP atau Mahmil, karena persoalan penculikan menyangkut kemanusiaan dan nyawa orang. Dalam kaitan itu Andi Arief bersama beberapa teman korban penculikan menginginkan dilakukan barter. "Kalau bisa kita barter, 14 korban itu dikeluarkan dan bila perlu mereka tidak perlu diajukan ke Mahmil," katanya.

Sementara itu, Koordinator Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir mengatakan, pengungkapan kasus dan korban penculikan masih panjang dan terhalang upaya politis untuk tidak secara jujur mengungkapkannya. Kedatangan anggota keluarga korban penculikan yang belum kembali itu merupakan salah satu upaya untuk mengungkapkan kasus penculikan.

Disidik

Sehari sebelumnya, Munir mengatakan tiga perwira tinggi yang diperiksa DKP, yakni Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kolonel Chairawan, seharusnya segera disidik pihak Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI. Sebagai institusi penyidik resmi untuk lingkungan militer, Puspom ABRI wajib menjalankan fungsinya demi penegakan hukum. Dalam kaitan itu, Panglima ABRI dituntut untuk mewujudkan komitmennya, dengan tidak menghalangi proses hukum terhadap ketiga Pati ABRI tersebut, dan tersangka pelaku penculikan lainnya.

Kontras secara resmi mengirimkan surat kepada Puspom ABRI agar institusi penyidik itu menjalankan tugas sebagaimana mestinya, antara lain menyidik tiga Pati ABRI yang diperiksa DKP dan menjawab keberadaan 14 korban penculikan yang belum kembali.

Ketidakjelasan nasib 14 korban penculikan lainnya, menurut Munir, harus juga dijawab Puspom ABRI atau DKP. Kenyataan bahwa sampai saat ini DKP pun belum menjawab soal nasib korban penculikan lainnya itu, adalah bukti bahwa proses yang tertutup di DKP tidak kondusif untuk pengungkapan kasus secara menyeluruh. Kenyataan itu semakin me-

UPAYA KELUARGA MENCARI KORBAN PENCULIKAN

Tanggal	Tempat yang Didatangi	Penerima
16-6-1998	Komnas HAM	Anggota Komnas
17-6-1998	Fraksi ABRI DPR RI	Gagal Bertemu
18-6-1998	Palang Merah Internasional (ICRC)	Wakil Ketua ICRC Jkt
22-6-1998	Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI	Komandan Puspom ABRI
30-7-1998	Kantor Departemen Pertahanan/ Keamanan	Pangab
13-8-1998	Rumah Abdurrahman Wahid (Gus Dur)	Gus Dur
20-8-1998	Mabes AD	Aspam dan Kadispenad

Diolah dari *Pusat Informasi Kompas*

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KEDAULATAN RAKYAT	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	Berita Buana	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Penanganan Kasus Penculikan Masih Janggal

Jakarta, Buana

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) tidak menghendaki kasus penculikan yang melibatkan 11 oknum Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dilimpahkan ke mahkamah militer (mahmil). Sebab, Kontras melihat dalam penanganan kasus ini masih banyak kejanggalan. Padahal, baik Kontras maupun keluarga korban penculikan membutuhkan proses peradilan yang jujur dan final, tidak mengambang seperti kasus penembakan mahasiswa Trisakti.

Akibat tidak adanya kesamaan persepsi, pertemuan Kontras dengan Danpuspom ABRI Mayjen TNI Djasri Marin, Selasa (27/10) malam, belum menghasilkan kesepakatan, terutama mengenai berbagai hal prinsipil dalam kasus penculikan tersebut. "Ada beberapa hal prinsipil yang harus didahulukan, sebelum melimpahkan perkara ini," kata Koordinator Kontras Munir SH kepada wartawan, usai pertemuan antara Danpuspom dan keluarga korban, di Markas Puspom ABRI.

Dalam pertemuan itu, Kontras dan keluarga korban mendesak 11 tersangka dikonfrontir dengan sembilan korban penculikan yang telah dibebaskan. Hal ini amat penting untuk menjelaskan bagaimana nasib ke-13 korban yang masih belum kembali. Langkah konfrontir ini, menurut Munir, sangat prinsipil. Soalnya, kasus penculikan ini mempunyai kaitan dan tak bisa dipisah-pisahkan. Bagi Munir, peradilan terhadap perkara ini harus menunggu hasil penyidikan terhadap nasib 13 orang hilang.

Menurut Danpuspom, tidak ada kaitan antara kasus penculikan sembilan aktivis dan 13 orang yang belum kembali. ❑ **rad**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Orang Hilang Ditemukan di Davao, Filipina

JAKARTA (Media): Penyelidikan 14 aktivis yang hingga kini dinyatakan hilang, mulai menemui titik terang. Dari Davao City, Filipina, kemarin, muncul pengakuan seseorang yang bernama Herman Hendrawan.

Herman Hendrawan, adalah satu dari 14 korban penculikan yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. "Dia sekarang berada di rumah Konsulat Jenderal RI di Davao," kata Kapuspen ABRI Mayjen TNI Syamsul Ma'arif kepada pers di Jakarta, kemarin.



■ MEDIA-AGUS MULYAWAN

■ Munir

Menurut Kapuspen, Herman Hendrawan sudah berada di Davao selama dua bulan, dan akan kembali ke Indonesia secepatnya. Aktivis itu ada di Davao, katanya, dalam rangka menenangkan diri. Dia melapor ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), 27 Juli 1998, pukul 18.30 waktu setempat.

Kapuspen menyatakan, pihaknya telah memerintahkan Atase Pertahanan di Filipina untuk menindaklanjuti keterangan dan meneliti identitas Herman tersebut.

ABRI serius menangani kasus orang hilang dengan membentuk Tim Pencari Fakta. Sejumlah oknum Kopassus dinyatakan terlibat, dan dalam waktu dekat ABRI membentuk Dewan Kehormatan Militer (DKM) yang diketuai perwira tinggi berbintang empat.

Benarkah orang yang mengaku bernama Herman Hendrawan itu asli? Untuk memastikannya, Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sudah melakukan kontak telepon. Koordinator Kontras Munir dan pacar Herman Hendrawan yang asli, Nurnikmah, serta Faisol Reza, aktivis yang sudah dilepas oleh penculik, berbicara langsung dengan "Herman Hendrawan".

Setelah berbicara langsung melalui telepon, ketiga orang itu meragukan kebenaran identitas orang tersebut. "Saya lakukan pembicaraan itu berdasarkan info dari Mabes ABRI bahwa Herman Hendrawan, yang dinyatakan hilang sejak beberapa bulan lalu itu ada di Davao. Tetapi dia mengaku bukan Herman yang kita maksudkan dan minta supaya jangan diganggu lagi," kata Munir kepada pers di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, "Herman Hendrawan" itu mengaku mahasiswa semester delapan Universitas Siliwangi, Tasikmalaya.

Herman Hendrawan yang dimaksudkan Kontras, yang telah diculik oknum ABRI, kata Munir, berasal dari P Bangka dan logat Jawa Timur-nya kental sekali. Sedangkan yang diajaknya bicara di telepon dari Davao itu berlogat Sunda dan tidak mengenal kerabat Hendra Hendrawan sejati yang mendampingi Munir.

"Ada beberapa kemungkinan. Jika dia betul Hendra yang kita cari, mungkin dia masih belum berani dan siap bicara dengan kami. Mungkin juga dia orang yang disuruh mengaku sebagai Hendra oleh pihak tertentu, dan mungkin saja dia memang bukan Hendra," katanya menerangkan.

KJRI di Davao masih meneliti identitas orang itu. "Hingga kini kami belum dapat memastikan apakah orang itu benar-benar Herman Hendrawan, karena dia tidak membawa surat identitas apa pun," kata Kepala Bidang Konsuler dan Ekonomi KJRI di Davao City, Taufan Adityawarman, saat dihubungi *Antara*, kemarin.

Untuk memastikan orang itu Herman Hendrawan yang sejati, Kontras mengirim anggotanya ke Davao, kemarin sore.

Kontras mendapat informasi keberadaan "Herman Hendrawan" di Davao dari seseorang di Mabes ABRI, malam Jumat. Ketika dikontak melalui telepon kemarin sekitar pukul 15.00, kata Munir, "Herman Hendrawan" itu juga mengaku diculik, 12 Maret lalu.

"Kami juga mengirim foto Herman Hendrawan yang asli melalui faksimile ke Konjen RI di Davao. Setengah jam kemudian, diperoleh kabar dari Konjen, foto itu mirip 'Herman Hendrawan'. Namun, kami belum berani mengambil kesimpulan bahwa dia Herman Hendrawan dan ABRI harus mengklarifikasikan ini dengan pelaku-pelaku penculikan itu," kata Munir.

Terlepas dari siapa sesungguhnya "Herman Hendrawan" itu, Kapuspen mengatakan, "Peran dan keterangan masyarakat sangat diharapkan untuk memberikan masukan kepada ABRI dalam mencari orang yang belum ditemukan."

Masalah orang hilang, kemungkinan akan menjadi topik pembicaraan Menteri Pertahanan Amerika Serikat William Cohen yang hari ini menemui Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto di Dephankam. (Was/Wdh/M-3)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Korban penculikan ditemukan di Davao

JAKARTA (Bisnis): Seorang laki-laki mengaku korban penculikan bernama Herman Hendrawan melapor ke Konsulat Jenderal RI (KJRI) Davao City, Filipina, 27 Juli lalu, namun sampai kini belum ada kepastian mengenai kebenaran identitasnya.

Kapuspen ABRI Mayjen TNI Syamsul Mu'arif mengatakan Herman sudah berada di Davao selama dua bulan dan akan kembali ke Indonesia secepatnya. "Saat ini dia berada di rumah KJRI di Davao," kata Syamsul seperti dikutip *Antara*.

Sementara itu, Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir mengatakan Kontras baru merasa yakin laki-laki itu Herman Hendrawan mahasiswa FISIP Unair yang diculik 12 Maret bila sudah bertemu.

Kontras, katanya, mengirim utusan ke Davao, Jumat sore, dan diperkirakan baru dapat bertemu Herman Minggu.

"Kami sudah mengirim faksimili foto Herman ke KJRI di Davao, dan menurut pejabat di sana laki-laki itu memang mirip Herman Hendrawan," kata Munir kepada *Bisnis* tadi malam.

Dalam konferensi pers Kontras kemarin Munir menyatakan belum sepenuhnya yakin laki-laki itu Herman Hendrawan, mahasiswa FISIP Unair yang dinyatakan hilang 12 Maret .

Munir menjelaskan pk. 15.00 kemarin dia melakukan kontak telepon sekitar 10 menit dengan orang yang mengaku Herman Hendrawan. Namun Munir merasa ada kejanggalan, seperti logatnya yang berbeda dengan Herman yang cukup lama dikenal Munir.

"Dia memang mengaku pernah diculik tapi menurutnya, dia mahasiswa Universitas Siliwangi Tasikmalaya, bukan Unair [Surabaya]," kata Munir.

Munir mengatakan mungkin saja Herman yang sebenarnya memang di Davao, tapi dia belum bersedia berhubungan dengan Kontras sehingga menyuruh orang lain berbicara dengan Munir melalui telepon. Di akhir pembicaraan, kata Munir, orang itu mengatakan, "Saya bukan orang yang bapak cari, mohon saya jangan diganggu."

Bila ternyata laki-laki itu bukan Herman yang dimaksud, kata Munir, maka ABRI bertanggung jawab untuk memberi penjelasan lebih lanjut. Bila benar ada Herman Hendrawan lain, berarti telah terjadi penculikan yang tidak dilaporkan dengan nama korban yang sama.

14 Mayat

Kontras juga menyelidiki kabar ditemukannya 14 mayat di sungai Way Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Lampung Utara, sekitar 300 km dari Bandar Lampung pada 6-18 Juli. Beberapa pihak curiga mayat tersebut sebagai aktivis prodemokrasi yang hilang akibat penculikan.

"Walaupun ternyata tidak berhubungan dengan 14 aktivis korban penculikan, Puspom tetap harus menyelidikinya karena ada indikasi terjadinya penyiksaan sebelum korban dibunuh," kata Munir.

Menurut dia, dari 14 mayat hanya satu orang yang dikebumikan masyarakat sementara sisanya hanyut terbawa arus.

Sementara itu, Happy, ketua tim pencari fakta LBH Lampung, mengatakan sikap aparat kepolisian di sana tidak akomodatif dan malah ada kesan berusaha menutup-nutupi.

Di tempat terpisah, Komandan Korps Reserse Polri mengungkapkan Mabes Polri segera mengirim tim Puslabfor untuk mengidentifikasi 14 mayat yang ditemukan di Lampung Utara.

"Ya kita tentu segera mengirim tim Puslabfor Mabes Polri ke sana terutama jika diminta oleh Polda Lampung," kata Dakorserse Polri Mayjen Pol Da'i Bachtiar kepada *Bisnis*, kemarin.

Polda Lampung, katanya, tidak dapat melakukan identifikasi terhadap mayat tersebut karena tidak memiliki Labforpol, sehingga harus dibantu oleh tim Puslabfor Mabes Polri. **(04/cp)**

Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Kontras Sangsi Keaslian 'Herman Hendrawan'

JAKARTA — Herman Hendrawan yang berada di Davao City, Filipina, sebagai korban penculikan, diragukan keasliannya oleh Koordinator Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

"Tadi siang, saya sendiri memang berbicara dengan seseorang yang mengatakan dirinya sebagai Herman Hendrawan. Dia mengatakan dirinya kini masih hidup dan berada di Davao, Filipina. Namun, setelah panjang lebar berbicara dengan orang tersebut, saya malah cenderung tidak percaya bahwa itu memang Herman Hendrawan yang sebenarnya. Saya tetap sangsi," kata Koordinator Kontras, Munir, kepada wartawan di Kantor YLBHI, Jakarta, kemarin.

Jumat siang kemarin memang muncul berita bahwa salah seorang dari 14 korban penculikan yang belum kembali, Herman Hendrawan, dinyatakan berada di Davao, Filipina. Kabar ini diterima Mabes ABRI setelah menerima tembusan surat dari Konjen RI di Davao kepada Menlu. Surat yang juga ditembuskan ke Dubes RI di Filipina, Kepala BIA, Kabakin, dan Danpuspom itu menjelaskan bahwa ada seseorang yang mengaku bernama Herman Hendrawan datang melaporkan diri ke Konjen RI di Davao, 27 Juli lalu.

Seperti pernah diberitakan, jati diri Herman adalah pemuda asal Bangka yang kuliah di FISIP Unair Surabaya angkatan 1990 dan aktivis SMID pimpinan Andi Arief. Herman hilang sejak 12 Maret, seusai menghadiri konferensi pers di kantor YLBHI.

Menurut kesaksian Rahardjo Waluyodjati dari SMID, Herman diculik bersama dia di depan RSCM Jakarta. Berdasarkan kesaksian Rahardjo, Faisol Reza, dan Andi Arief, Herman memang diculik oleh pihak yang menculik mereka. Selama di dalam penyekapan penculik, Herman sering terdengar menyanyi.

Sedangkan yang ada di Filipina itu, berbeda dengan ciri-ciri di atas. Dalam pembicaraan dengan Munir, 'Herman' ini mengaku asal Tasikmalaya, kuliah di FISIP Universitas Siliwangi Tasikmalaya. "Nah, di sinilah keraguan saya makin bertambah. Gaya bicaranya bukanlah gaya bicara ala Herman yang saya kenal," kata Munir lagi.

Kesangsian Munir ini didukung oleh penjelasan Konsul Indonesia di Davao, Asmadi Arbi. Menurut Asmadi. Herman yang ada di tempatnya itu bukanlah korban penculikan yang dicari-cari selama ini. "Setelah kami cek dan konfirmasi ke Jakarta, ternyata bukan Herman yang dari Unair itu," tuturnya tadi malam kepada *Republika*.

Ia mengakui bahwa saat ini ada seseorang yang mengaku bernama Herman Hendrawan. Herman ini mengaku pula pernah diculik. Kepada Asmadi ia mengaku tak punya KTP dan Paspor. "Herman ini mengatakan tak ingin masalah yang berhubungan dengan dia dibesar-besarkan. Bikin negara tambah sulit katanya," tutur Asmadi menirukan 'Herman'.

Apakah Herman yang di Davao itu ada yang menyuruh untuk mengaku sebagai Herman korban penculikan yang dicari-cari? "Wah saya tak tahu. Tapi setahu saya tak ada pihak-pihak yang menyuruhnya."

Meski demikian, untuk memberikan kepastian ihwal Herman ini, pihak Kontras kini sudah mengirimkan utusan untuk mengecek kebenarannya. Dan, kemungkinannya dalam beberapa hari ke depan kepastian tersebut sudah bisa didapatkan.

Apakah masuk akal bila korban berada di tempat itu? Menjawab pertanyaan ini, Munir mengatakan semua itu bisa-bisa saja. Apalagi, katanya, Davao adalah wilayah Filipina yang letaknya tidak jauh dari Sulawesi Utara.

Kapuspen Hankam/ABRI, Mayjen TNI Syamsul Ma'arif, kemarin menyatakan bahwa salah satu orang hilang yang hingga kini belum diketahui nasibnya yaitu Herman Hendrawan telah ditemukan berada di Davao, Filipina. Dia, kata Syamsul, kini berada di rumah Konjen RI di Davao, Asmadi Arbi, dalam keadaan sehat walafiat.

Kabar tersebut diterima Mabes ABRI setelah menerima tembusan surat dari Konjen RI di Davao kepada Menlu, kemarin. Ketika ditanyakan apakah Herman memang benar-benar korban penculikan, Syamsul menjelaskan bahwa memang ada hubungannya. "Memang ada hubungannya dengan pelepasan Andi Arief dari Mabes Polri sehingga dia pergi ke sana. Sekarang kita tinggal menunggu dia pulang," ujarnya.

Syamsul kemudian menjelaskan bahwa saat ini ABRI betul-betul belum tahu terhadap nasib 14 orang hilang yang hingga kini belum kembali. ■ uba/bsa/ttw

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Kapuspen ABRI: Herman Hendrawan Ada di Davao

* Kontras Meragukan Identitasnya

Jakarta, Kompas

Herman Hendrawan, yang mengaku sebagai korban penculikan, ternyata masih hidup dan dalam keadaan sehat. Herman melaporkan diri ke Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Davao, Filipina selatan, Senin (27/7) dan hingga kini ia masih berada di Davao City. Demikian diungkapkan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) ABRI Mayjen TNI Syamsul Ma'arif dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (31/7).

Namun Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan belum bisa memastikan kebenaran keterangan Kapuspen ABRI itu. Dari perbincangan melalui telepon dengan Herman di rumah Konjen RI di Davao, Jumat, Kontras memperoleh petunjuk bahwa Herman yang berada di Davao itu adalah Herman yang lain.

Dihubungi *Kompas* per telepon, Konjen Asmadi Arbi di Davao juga mengatakan, orang itu bukan Herman yang dicari Kontras. "Setelah dicocokkan dengan ciri-ciri dalam gambar Herman yang dikirimkan dari Jakarta, ternyata tidak *klop*. Karena itu saya memastikan, Herman yang melaporkan diri ke KJRI Davao itu bukan Herman yang hilang," katanya.

Herman yang melaporkan diri ke KJRI Davao, lanjut Asmadi Arbi, sudah dua bulan berada di Davao City dan wilayah Mindanao. Dia ke Davao dalam rangka pengembaraan serta tidak ada kaitannya dengan kasus-kasus orang hilang.

Mengapa dia melapor ke KJRI Davao? Menurut Asmadi Arbi, karena yang bersangkutan sedang menemui kesulitan yang memerlukan uluran tangan, kalau ada WNI lagi kesulitan di luar negeri, pasti larinya ke KBRI atau KJRI," ungkap Asmadi.

Penjelasan Kapuspen

Kapuspen menjelaskan, Herman yang berusia sekitar 27 tahun mengaku sebagai mahasiswa Jurusan Manajemen Perusahaan, Fakultas Ekonomi, Universitas Parahiyangan, Bandung. Herman yang beralamat di Jalan Rajawali (Bandung) itu juga mengaku sebagai mahasiswa transfer tahun 1997 dari Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Penjelasan Kapuspen ini antara lain justru didasarkan pada laporan Konjen RI di Davao Asmadi Arbi kepada Menlu Ali Alatas, yang tembusannya ditujukan untuk Kepala Badan Intelijen ABRI (BIA) dan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) ABRI.

"Herman mengaku sudah kurang lebih dua bulan berada di Davao City tanpa paspor dan visa. Sebelum sampai ke Davao City, ia telah berkelana dari Jakarta ke Pontianak, kembali lagi ke Jakarta, lalu ke Manado. Dari sana ia menumpang kapal barang dan sampai di Davao City," tutur Syamsul.

Mengenai kapan Herman kembali ke Tanah Air, kata Syamsul, hal itu belum ada kejelasan. Yang pasti, Herman mengajukan permintaan agar ia diantar oleh Konjen RI untuk Davao, Asmadi Arbi.

Ada cerita lain, katanya, Herman ini sebenarnya merasa ragu untuk bertemu Konjen Asmadi Arbi. "Jangan-jangan ia adalah salah seorang korban orang hilang yang dilaporkan pihak Kontras, seperti diungkapkan Kontras dalam pertemuan dengan Menhankam/Pangab, Kamis (30/7). "Karena berat terhadap keluarga di Indonesia, timbul pikiran untuk bertemu dengan Dubes RI untuk Filipina di Manila. Namun oleh rekannya, ia dianjurkan datang ke Konjen RI di Davao," tutur Syamsul.

Mengenai kapan Herman kembali ke Tanah Air, kata Syamsul, hal itu belum ada kejelasan. Yang pasti, Herman mengajukan permintaan agar ia diantar oleh Konjen RI untuk Davao, Asmadi Arbi.

Ada cerita lain, katanya, Herman ini sebenarnya merasa ragu untuk bertemu Konjen Asmadi Arbi. "Jangan-jangan ia belum sepenuhnya mendukung reformasi. Ternyata setelah ke sana, Konjen RI menerimanya dengan baik, yaitu pada 27 Juli, pukul 18.30. Ia melapor ke Konjen dan sampai sekarang masih di sana," katanya.

Salah culik?

Menurut Munir, Koordinator Badan Pekerja Kontras, meski yang berbicara dengannya dan dengan Feisol Reza (kawan baik Herman) itu adalah Herman Hendrawan, namun identitas dirinya yang disampaikan kepada mereka itu berbeda dengan Herman yang tengah dicari Kontras.

Orang yang juga mengaku bernama Herman itu menyebutkan nama dirinya memang sama dengan korban penculikan yang lain, yaitu Herman Hendrawan, mahasiswa Unair yang dicari Kontras dan orang Hambali — yang diketahui hilang sejak 14 Mei — cukup mengherankan. Munir karena nama itu baru dimasukkan ke dalam daftar orang hilang pada akhir Mei 1998.

Meski demikian, kata Munir, Herman yang berada di Konjen RI itu menceritakan kronologi penculikannya mirip dengan penculikan yang dialami Herman Hendrawan yang mahasiswa Unair. Misalnya, waktu penculikannya adalah setelah keluar dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Menurut Munir, mungkin saja terjadi kesalahan menculik sehingga Herman Hendrawan yang berada di Davao itu memang bukan Herman Hendrawan yang ada dalam data Kontras. Kecenderungan kesalahan penculikan itu sudah pernah terjadi sebelumnya, yaitu pada seorang wanita ketika dia keluar dari kantor YLBHI.

Munir meminta agar Markas Besar ABRI segera menjemput Herman Hendrawan yang ada di Konjen RI di Davao untuk segera memastikan identitasnya. Kontras sudah berusaha menghubungi Kapuspen ABRI dan Kepala BIA (Badan Intelijen ABRI), namun sampai Jumat petang, keduanya belum bisa dihubungi.

"Buat saya, Mabes ABRI punya kewajiban untuk menjelaskan siapa Herman Hendrawan yang di Davao itu, karena ABRI-lah yang pertama menjelaskan kepada masyarakat bahwa itu Herman Hendrawan," ujarnya. Kontras sendiri Jumat malam langsung mengirim orang untuk mencek identitas Herman Hendrawan yang ber-

(Sambungan dari halaman 1)

nir, Herman Hendrawan yang berada di Konjen RI di Davao mengaku berasal dari Tasikmalaya dan mahasiswa Unpar, Bandung. Padahal Herman Hendrawan yang terdata di Kontras berasal dari Bangka, Sumatera Selatan, dan ia mahasiswa Universitas Airlangga, Surabaya.

"Saya ajak dia (Herman di Davao) *ngomong* Jawa Timuran, ternyata dia tidak bisa. Ketika saudara dekat Herman dan kawan dekat Herman ikut bicara, kami sampai pada kesimpulan bahwa Herman yang berbicara dengan kami bukan Herman yang kami cari," jelasnya.

Kronologi penculikan yang disampaikan Herman ini pun banyak kesamaannya dengan kronologi penculikan Herman yang sudah dimiliki Kontras dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya.

Kabar mengenai keberadaan orang bernama Herman Hendrawan di Davao sendiri, lanjut Munir, sudah diterima Kontras seminggu sebelumnya dari telepon yang berasal dari LSM di Davao.

Namun karena ketidakjelasan ke mana bisa dikontak, maka informasi itu pun hanya dijadikan salah satu informasi saja oleh Kontras. Seusai pertemuan dengan Panglima ABRI, Kamis (30/7) lalu, informasi ini pun pernah disampaikan kepada beberapa pejabat teras ABRI, namun tidak mendapatkan tanggapan berarti.

Sementara itu kepada Kontras, Konjen RI di Davao, Asmadi Arbi, menjelaskan, Herman Hendrawan baru hadir di Konjen 27 Juli. Dia datang ke Konjen, meminta perlindungan dengan menceritakan kronologi penculikan dirinya setelah konferensi pers di Gedung YLBHI.

"Dalam kasus penculikan ini ada tiga kemungkinan besar mengapa korban penculikan yang lain belum jelas," kata Munir. Pertama, mereka masih disekap kekuatan lain di ABRI yang masih belum bisa disentuh atau terpecahkan. Kedua, mereka sudah tidak ada. Ketiga, mereka ditempatkan di suatu wilayah di mana mereka tidak bisa berkomunikasi kembali.

"Buat saya, di Filipina itu mungkin saja karena di Davao itu ada ribuan imigran gelap Indonesia," jelas Munir.

Pangab bertanggung jawab

Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Abdul Hakim Garuda Nusantara yang dihubungi *Kompas*, Jumat, berpendapat bahwa Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto harus tetap bertanggung jawab atas nasib korban penculikan yang belum kembali.

Pendapat serupa disampaikan Wakil Ketua II Komnas HAM Marzuki Darusman. Marzuki menyatakan, pernyataan Wiranto kepada Kontras bahwa ABRI belum mengetahui keberadaan korban adalah pernyataan yang hampir tidak bisa dipercaya. Pernyataan itu akan mengundang pertanyaan masyarakat mengenai sejauh mana kemampuan ABRI dalam menjalankan fungsi politik, kemasyarakatan dan hankamnya.

"Namun dapat diperkirakan, kemungkinan Pangab Wiranto tidak tahu karena dalam situasi ABRI — waktu penculikan itu terjadi — seolah-olah ada ABRI dalam ABRI," ungkap Marzuki.

Meski demikian, pernyataan Pangab itu mengubah pandangan secara mendasar tentang perkembangan politik pada saat ini. Anggapan bahwa konsolidasi belum selesai, bisa muncul.

Perintah Panglima ABRI

Menanggapi pernyataan Kontras tentang hasil pertemuan Kontras dan Pangab, Kapuspen ABRI Mayjen TNI Syamsul Ma'arif menyatakan bahwa ABRI sangat serius untuk menemukan orang-orang hilang, karena itu ABRI mengharapkan masukan dan informasi dari masyarakat.

Dengan adanya kasus Herman ini, pimpinan ABRI telah menghubungi para atase militer untuk menjadikannya perhatian, karena siapa tahu ada orang hilang lainnya yang berada di luar negeri. "Pangab juga telah menginstruksikan Polri untuk secara serius meningkatkan usaha pencarian orang-orang hilang," kata Kapuspen.

Syamsul menegaskan, ABRI bersikap serius terhadap masalah ini. Ia membantah tuduhan bahwa ABRI berlaku seperti tidak tahu-menahu. "Tuduhan itu seolah-olah ABRI tidak bertanggung jawab. Waktu Kontras datang ke Menhankam/Pangab, pertemuan itu berlangsung dengan baik. Bahkan Kontras sendiri merasa begitu terbukanya Pangab," katanya.

Ditanya tentang adanya pendapat bahwa ABRI lamban sehingga terkesan ada pihak yang "lebih kuat" dari ABRI, seperti dituduhkan Kontras, Kapuspen menyatakan, itu tidak benar. "Mari kita berpikir jernih. Upaya untuk menuntaskan masalah ini lewat pengadilan 'kan masih dalam proses. Apa yang disampaikan Kontras itu dijawab Pangab, yakni bahwa nanti semua akan terungkap dalam proses pengadilan itu," katanya.

Ia juga membantah ada hambatan terhadap pemeriksaan kasus orang hilang. "Tidak ada hambatan apa-apa. Selama ini berjalan sesuai dengan rencana. Kalau kesan, boleh saja. Katanya ada yang lebih kuat segala macam. *Nggak* ada itu. Kita tidak terpengaruh kesan, masyarakat yang terpengaruh oleh kesan itu. Kalau ABRInya 'kan jalan terus dengan proses hukum itu," katanya.

(vik/oki/fr/bb)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA		1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA		2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA		3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA		4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN		5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Teka-teki Herman di Davao

Jakarta, Sabtu, Merdeka

Ternyata Herman Hendrawan yang saat ini berada di Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Davao, Filipina bukan Herman Hendrawan yang diduga sebagai salah seorang dari 14 korban penculikan yang sampai saat ini belum jelas nasibnya.

Hal ini bisa dibuktikan oleh Koordinator Kontras (Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Munir, Feisol Reza —salah seorang korban penculikan— dan teman dekat Herman, Nur Hikmah, yang berbicara langsung melalui telepon, kemarin sekitar pukul 15.00 WIB.

"Dalam masalah ini mungkin saja ada kesalahan ambil orang oleh para penculik. Karena, dari temuan-temuan di lapangan menunjukkan memang ada kebingungan-kebingungan dari para penculik dalam mengambil seseorang. Seperti seorang wanita yang diculik ketika keluar dari YLBHI, tetapi kemudian dikembalikan lagi karena salah ambil," kata Munir.

Sementara itu di Mabes ABRI, kemarin diadakan jumpa pers sehubungan dengan telah ditemukannya satu korban penculikan yang masih hidup. Kapuspen ABRI Mayjen Syamsul Ma'arif mengatakan, pihaknya yakin bahwa Herman Hendrawan adalah salah satu dari 14 korban penculikan yang ditanyakan Kontras selama ini. Data-datanya cukup akurat karena berdasarkan surat resmi Konjen RI di Davao Asmardi Arbi.

Surat berstempel resmi yang baru diterima kemarin itu ditujukan kepada Menlu Ali Alatas. Tembusannya disampaikan kepada Ka BIA, Kabakin serta Danpuspom ABRI.

Menurut Kapuspen ABRI, Herman Hendrawan yang berusia 21 tahun itu adalah mahasiswa semester VIII Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung. "Saat ini dia berada di Davao dalam keadaan sehat walafiat," katanya.

"Dia kabur ke Filipina karena takut. Herman ini termasuk orang hilang yang ditanyakan Kontras. Dia juga ada hubungannya dengan Andi Arief dan lain-lain," lanjutnya.

Tentang penilaian Kontras yang mengatakan upaya ABRI dalam mengusut kasus penculikan belum maksimal, menurut Kapuspen, pihaknya tidak akan terpengaruh. "ABRI bekerja sesuai fakta, bukan kesan atau penilaian orang," tegasnya.

Tak Yakin

Sementara itu menurut Munir, pertama kali dia menghubungi Konjen RI di Davao berbicara dengan Sekretaris Konjen Nursi dan Konjen Asmardi Arbi kemudian meminta untuk berbicara langsung dengan Herman.

"Saya bicara sekitar 10 menit, pertama kali memulai pembicaraan saya sudah tidak yakin bahwa yang berbicara dengan saya adalah Herman yang dimaksud," kata Munir kepada pers di kantor YLBHI, kemarin.

Menurut Munir, dia belum yakin apakah orang tersebut adalah orang yang disuruh bicara atas nama Herman atau memang ada orang lain yang bernama Herman.

"Orang itu langsung mengaku kalau dia juga korban penculikan, tetapi bukan Herman yang kuliah di FISIP Universitas Airlangga (Unair). Dia adalah mahasiswa yang semula berasal dari Universitas Siliwangi Tasikmalaya, kemudian pindah ke Universitas Parahyangan, Bandung," papar Munir.

Selain itu yang membuat Munir semakin yakin bahwa orang ini bukan yang dimaksud adalah logat bicara orang tersebut. Orang yang berbicara dengannya melalui telepon berbicara dengan logat Sunda yang cukup kental, sedangkan Herman yang dimaksud adalah orang Bangka yang memiliki logat Jawa yang kental.**(WR/PN/BY)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☑ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

rman yang Hilang atau Bukan?

Jakarta, JP.-

Benarkah Herman Hendrawan yang kini berlindung di KJRI di Davao, Filipina, adalah aktivis yang hilang itu? Bisa benar, bisa juga tidak. Sebab, jati diri Herman yang dinyatakan hilang dan Herman yang berada di KJRI tersebut berbeda.

Menurut Konsul Jenderal di Davao Asmadi Arbi, Herman yang di KJRI adalah aktivis Siaga (Solidaritas untuk Amien dan Mega). Dia kelahiran Bandung dan aktivis mahasiswa Universitas Parahiyangan Bandung.

Sebaliknya, Herman yang dinyatakan hilang, berdasarkan biodata di Kontras, adalah aktivis PRD dan lahir di Pangkalpinang pada 29 Mei 1970. Selain itu, dia aktivis Universitas Airlangga, Surabaya.

Namun, ada kesamaan ciri di antara "dua Herman" itu, yakni sama-sama memakai kacamata minus dan berkumis. "Tapi, bukankah orang yang berkacamata minus dan berkumis banyak," kata Asmadi kepada *Jawa Pos* di Davao kemarin.

Dari hasil cek silang itulah, Asmadi pada dasarnya tidak yakin bahwa Herman yang di Davao itu adalah orang yang dinyatakan hilang sejak 12 Maret lalu. "Karena ciri-ciri yang Anda sampaikan itu beda dengan ciri-ciri Herman di sini, maka saya berkesimpulan bahwa Herman yang di sini bukan orang yang hilang itu," tutur Asmadi.

Berikut petikan wawancara *Jawa Pos* dengan Asmadi:

Jangan-jangan Herman yang ada di KJRI itu menyamarkan jati dirinya?

Mengenai soal itu, saya tidak tahu. Yang penting, pengakuan Herman kepada saya seperti itu.

Kapan Herman Hendrawan tiba di KJRI?

Dua hari lalu.

Bisa diceritakan kenapa dia sampai nyasar di KJRI?

Dia saat datang ke sini tidak membawa paspor maupun KTP. Dia mengaku bernama Herman Hendrawan. Dia juga mengaku seorang aktivis. Dia berangkat ke Davao dari Manado dengan menumpang kapal.

Tolong saya diberi kesempatan berbicara dengan Herman.

Mohon maaf. Karena yang ingin berbicara pers, saya tak bisa mengabulkan. Ini permintaan Herman. Dia tak mau dipublikasikan. Bahkan, dia bilang: Kenapa wartawan *kok pada* ribut. Bahkan, kalau pemerintah ingin bicara langsung dengan Herman, harus saya yang mendampingi.

Mengapa begitu?

Sebab, Herman sudah menyatakan minta perlindungan dan jaminan keamanan kepada saya. Dan, saya sebagai perwakilan Indonesia di luar negeri jelas akan melindungi warga negara Indonesia yang minta saya lindungi.

Katanya, dia mau pulang?

Ya benar. Tapi, belum tahu kapan. Namun, kalau *toh* dia pulang nanti, dia tetap minta saya dampingi.

Mengapa dia memilih ke Davao?

Herman ke sini hanya ingin "nyepi". Dia tak mau diganggu oleh siapa pun.

Kesannya, dia ketakutan. Mengapa?

Ya karena dia aktivis itu. Tapi, keluarganya sudah tahu bahwa Herman ada di sini. *Nah,* kalau keluarganya tahu, apa itu bisa dikatakan dia hilang? (**yud**)

Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☑ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Polri kirim anggotanya ke Davao

JAKARTA (Bisnis): Kapolri Letjen Pol Roesmanhadi mengungkapkan Mabes Polri telah mengirim anggota NCB-Interpol ke Davao City, Filipina, untuk mencek identitas Herman Hendrawan yang dikhabarkan sebagai salah seorang korban penculikan.

"Mabes Polri sudah melakukan upaya melalui jalur interpol untuk mencek kebenaran informasi itu [keberadaan Herman Hendrawan di Filipina]. Bahkan, kami sudah kirim orang ke sana," ujar Roesmanhadi di NCB-Interpol Mabes Polri Jakarta, kemarin.

Roesmanhadi belum dapat memberikan keterangan mengenai kebenaran informasi tentang keberadaan Herman Hendrawan di Filipina. "Kami masih menunggu laporan."

Menurut dia, tim Interpol Mabes Polri dikirim ke Filipina membawa data-data Herman Hendrawan untuk dicocokkan dengan data yang diperoleh pihak Konsulat Jenderal RI di Davao, Filipina.

Polri, lanjutnya, berjanji akan menindaklanjuti setiap kali ada informasi menyangkut keberadaan para korban penculikan yang hingga saat ini belum kembali.

Sebelumnya, Kapuspen ABRI Mayjen TNI Syamsul Ma'arif mengungkapkan Herman Hendrawan sudah berada di Davao selama sekitar dua bulan.

Informasi itu diperoleh setelah seorang laki-laki mengaku korban penculikan bernama Herman Hendrawan melapor ke Konsulat Jenderal RI di Davao. Namun, sejauh ini belum diperoleh kepastian tentang kebenarannya.

Dalam mencek informasi itu Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan [Kontras] telah mengirim tim ke Davao dan diperkirakan akan menemui pria pelapor itu hari ini.

Pada kesempatan itu, Kapolri membantah adanya penemuan 14 mayat lelaki di Lampung Utara yang diduga sebagai korban penculikan. "Tidak benar itu, sebab setelah Polri mencek ke sana [Lampung Utara] ternyata hanya ada satu mayat tanpa identitas yang ditemukan selama bulan Juli." **(cp)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Kontras Tetap Ingin Tahu Jati Diri Herman di Davao

Jakarta, Kompas

Koordinator Komite untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Munir, kepada *Kompas* di Jakarta hari Minggu (2/8) mengakui, dia semakin meyakini Herman Hendrawan yang saat ini berada di Davao, Filipina Selatan, bukan Herman Hendrawan seperti yang dicari Kontras. Tetapi siapa pun Herman Hendrawan di Davao, Kontras ingin mengetahui jati dirinya.

"Kontras tetap akan menemui Herman Hendrawan yang kini berada di Davao itu. Siapa pun dia, ini harus diketahui," tegas Munir. Ditambahkan, dua anggota Kontras, Mugiyanto dan Dadang Trisasongko, sekarang sudah berada di Davao. Namun belum diperoleh keterangan apakah keduanya bisa bertemu dengan Herman Hendrawan.

Munir juga menegaskan, seandainya benar Herman Hendrawan yang di Davao itu bukan Herman Hendrawan yang didata Kontras, itu bukan masalah. "Tapi kalau Herman Hendrawan di Davao itu pun korban penculikan dan belum terdata oleh Kontras, dia tetap adalah bagian dari korban yang harus dilindungi kepentingannya. Kalau dia mau, Kontras akan menghubungkan kembali dengan keluarganya, serta menuntut pertanggungjawaban pelaku penculikan terkait," tuturnya.

Secara terpisah, Menko Polkam Feisal Tanjung yang ditemui terpisah di Sibolga mengutarakan, penemuan Herman Hendrawan di Davao adalah perkembangan baru dari penanganan kasus penculikan dan penghilangan aktivis.

Bantu Pom ABRI

Sementara itu, seorang korban penculikan yang sudah dibebaskan, Andi Arief, akhir pekan lalu mulai membantu pihak Polisi Militer (Pom) ABRI di Bandarlampung untuk memeriksa bukti penculikan dirinya. "Saksi-saksi warga di sekitar tempat kediaman orangtua Andi Arief maupun tempat-tempat yang menurut laporan dicurigai sebagai lokasi berkumpul para penculiknya, mulai diperiksa Detasemen Polisi Militer II/3 Lampung, diantar oleh Andi Arief sendiri," kata Kepala Operasional Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung, Iberahim Bastari, sebagaimana dikutip *Antara*, Jumat (31/7).

Orangtua Andi Arief mengakui, anaknya ikut bersama petugas dari Denpom II/3 Lampung, Rabu malam lalu, mengamankan beberapa barang bukti penculikan dari rumah tetangganya yang dicurigai menjadi salah satu tempat pengintaian sebelum dia "diambil", tanggal 28 Maret 1998 lalu pukul 11:00 WIB. Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain berupa helm standar warna putih dan selembar kertas tulisan tangan berisi nomor telepon genggam, dan nomor radio panggil yang diduga milik salah satu penculik.

(fan/tra)

Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☑ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Komnas HAM minta soal Hendrawan dituntaskan

JAKARTA (Bisnis): Anggota Komnas HAM Asmara Nababan mengatakan identitas Herman Hendrawan di Davao harus diusut secara tuntas.

Bila benar itu Herman yang dimaksud, ujarnya, telah terjadi pelanggaran HAM lain oleh aparat keamanan berupa pemindahan orang secara paksa dan penghilangan identitas warga negara. "Memang pelanggaran ini tidak seberat pelanggaran berupa penculikan, tapi tetap saja pelanggaran," ujarnya.

Menurut Nababan, pemerintah perlu mengusut kasus itu sampai tuntas dan ABRI agar menjelaskan secara rinci.

Komnas HAM, kata Nababan, tetap menuntut ABRI mengembalikan korban penculikan karena mereka menjadi korban pelanggaran HAM yang sangat besar. "Itu *standing position* Komnas HAM," katanya.

Ketua Komisi untuk orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (Kontras) Munir yang dihubungi secara terpisah mengatakan hingga kemarin sore utusan Kontras ke Davao, Fipilina, belum berhasil bertemu dengan laki-laki yang mengaku Herman Hendrawan.

"Mungkin karena hari libur sehingga kantor Konjen tutup. Mudah-mudahan kita sudah bisa mendapat kabar Senin," kata Munir saat dihubungi *Bisnis*.

Menurut Munir, utusan Kontras yang dikirim ke Davao ditambah seorang lagi mengingat utusan pertama yaitu Mugianto tak diizinkan menemui Herman Hendrawan karena tak membawa surat kuasa dari keluarga.

Utusan Kontras lainnya yaitu Dadang Trisasongko, kata Munir, kemudian menyusul ke Davao yang tiba kemarin dengan harapan bisa bertemu dengan Herman Hendrawan hari ini.

Sebelumnya Munir mengungkapkan keraguannya terhadap kebenaran Herman di Konjen RI Davao itu sebagai aktivis yang diculik. Kendati kronologis penculikan sama dengan Herman yang tengah dicari Kontras, laki-laki di Davao itu mengaku kuliah di perguruan tinggi lain. "Suara dan dialeknya pun berbeda dengan Herman yang saya kenal," kata Munir.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Hendardi mengatakan sebaiknya ABRI jangan tergesa-gesa mengumumkan nama korban penculikan Herman Hendrawan.

"Informasi yang menimbulkan perdebatan ini merupakan bukti kepanikan ABRI menghadapi kasus orang hilang," kata hendardi kepada *Bisnis* tadi malam.

Menurut dia, sebaiknya ABRI tidak memberikan informasi yang tidak jelas kebenaran kepada masyarakat. Sebelum mengumumkan laporan Konjen RI di Davao, tambahnya, aparat bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu sehingga didapat informasi yang akurat.

Ketidakjelasan yang kini berkembang di masyarakat, menurut Hendardi, selain menimbulkan tanda tanya besar juga akan meresahkan keluarga korban.

Hendardi mengatakan satu-satunya jalan agar masalah ini dapat diselesaikan dengan tuntas adalah membawa Herman Hendrawan yang saat ini berada di Davao kembali ke Indonesia.

Mengenai pengumuman penemuan Herman yang terkesan terburu-buru itu, Hendardi mengindikasikan adanya kekuatan lain di luar atau di dalam tubuh ABRI yang tidak ingin kasus penculikan terungkap dengan tuntas. **(04)**

Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

umpah, bukan Dia yang Dicari Kontras'

Konjen RI di Davao Pastikan Identitas Herman Hendrawan

JAKARTA (Media): Herman Hendrawan yang saat ini berada di Konsulat Jenderal RI di Davao City, Filipina, dipastikan bukan orang hilang yang dicari oleh Kontras.

"Sumpah, dia bukan Herman Hendrawan seperti yang dicari oleh Kontras, karena keluarganya tidak melaporkan ke Kontras," kata Asmadi Arbi, Konsul Jenderal RI di Davao City, yang dihubungi *Media* dari Jakarta, semalam.

Arbi menjelaskan, dirinya bisa memastikan Herman Hendrawan itu bukan orang yang dicari oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), setelah mencocokkan foto dan semua ciri-ciri, termasuk logat bicaranya.

"Kalau dia Herman yang sudah lama di Bandung dan biasa berlogat Sunda. Dia itu bukan Herman yang dicari. Sudahlah, saya pastikan bahwa dia bukan Herman yang dicari. *Ngapain* lagi diselidiki," katanya.

Arbi menjelaskan, keluarga dari Tasikmalaya sudah menelepon Herman Hendrawan yang saat ini ada di Davao. "Benar, Herman inilah yang dicari oleh keluarganya dari Tasikmalaya," katanya.

Menurut Arbi, Herman yang ada di Davao itu mengakui dirinya diculik dan ia ingin mengasingkan diri di sana. "Ayahnya, Engkas, juga telah berhubungan via telepon dengan anaknya," kata Arbi.

Sebelumnya, Kapuspen ABRI Mayjen TNI Syamsul Ma'arif memastikan Herman Hendrawan yang disebut-sebut sebagai orang hilang itu sudah berada di Davao sejak dua bulan lalu. Namun Kontras meragukan Herman Hendrawan itu sebagai orang hilang yang dicari selama ini.

Sementara Koordinator Kontras, Munir, menjelaskan, utusan khusus Kontras, Dadang Trisasongko, kemarin telah tiba di Davao sekitar pukul 14.00 tapi belum mendatangi Konjen RI. Kedatangan Dadang itu untuk menyusul Mugianto, utusan Kontras, yang lebih dulu tiba di Davao tapi tidak bisa menemui Herman Hendrawan karena tidak membawa surat kuasa keluarga.

Herman Hendrawan yang dicari Kontras adalah aktivis kelahiran Pangkal Pinang yang hilang pada 12 Maret 1998. Ia kuliah di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya tahun 1990. Sedangkan Herman Hendrawan yang "terdampar" di Davao itu adalah kelahiran Tasikmalaya. Dia kuliah di Universitas Siliwangi (Unsil), kemudian pindah ke Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung.

Asmadi Arbi menjelaskan, pihaknya sudah melihat foto Herman Hendrawan yang dicari Kontras ketika ditayangkan RCTI dan TVRI. Setelah dicocokkan dengan Herman Hendrawan yang ada di Davao, ternyata berbeda.

"Saya telah melihat foto orang hilang itu di RCTI dan TVRI setelah Kapuspen ABRI menyatakan orang hilang yang bernama Herman itu ada di Kota Davao, tapi ternyata tidak sesuai dengan Herman yang ada di sini," katanya.

Arbi membenarkan, utusan Kontras belum mendatangi Konjen RI di Davao. Ia juga menyesalkan pihak kepolisian langsung menghubungi Interpol. "Saya juga menyesalkan pernyataan Kapolri yang meminta bantuan Interpol untuk memastikan keberadaan Herman. Sudahlah, percaya saja pada Konjen RI di kota ini. Saya tidak akan berbohong," katanya.

Hingga kini masih 14 orang aktivis dinyatakan hilang, termasuk Herman Hendrawan. Sejumlah oknum Kopassus diduga terlibat kasus penculikan dan ABRI segera membentuk Dewan Kehormatan Militer (DKM). (Was/M-3)

Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☑ Suara Merdeka	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

"Bukan Herman Ini yang Dicari"

JAKARTA - Konsul Jenderal RI di Davao, Filipina, Brigjen TNI (Purn) Asmardi Arbi menegaskan Herman Hendrawan yang sementara ini tinggal di rumahnya sudah pasti bukan Herman Hendrawan yang dicari sebagai salah satu korban yang belum jelas nasibnya dalam kasus penculikan aktivis mahasiswa prodemokrasi.

"Sekali lagi saya tegaskan, orang yang lapor ke Konjen RI di Davao ini bukan Herman Hendrawan yang dicari. Hanya namanya yang sama. Sudahlah jangan diributkan lagi, karena membuat dia makin stres," kata Asmardi dengan nada tegas ketika diwawancarai *Suara Merdeka* melalui telepon, kemarin.

Berbicara dengan nada agak jengkel, Asmardi heran mengapa seolah-olah laporan dari Konjen RI di Davao sebagai lembaga Pemerintah tak dipercaya. Padahal, kata dia, pihaknya sudah mengirimkan laporan resmi ke Departemen Luar Negeri, Puspom ABRI, dan Kontras Jakarta.

Dia kembali menjelaskan, Herman sudah menghubungi ayahnya, Encep, di Tasikmalaya dan melakukan percakapan beberapa menit. Saat mendengarkan percakapan dengan ayahnya itulah, Asmardi yakin dia berasal dari Tasikmalaya. Bukan Herman korban penculikan yang berasal dari Pangkalpinang.

"Saya akan mengirimnya pulang ke Indonesia, bila dia sudah mau. Sejauh ini dia tak mau pulang ke Indonesia, tapi belum mau mengatakan alasannya. Mungkin dia bingung dan takut melihat perkembangan situasi di Tanah Air. Dia menyesalkan kenapa jadi begini," papar Asmardi.

Ketika disinggung mengenai pelariannya sehingga bisa masuk ke Filipina tanpa satu pun dokumen pribadi, Asmardi meminta tak dipersoalkan lagi. Ia juga tak bisa memastikan apakah Herman seorang nelayan. "Sudahlah, mungkin dia punya masalah pribadi," tandasnya.

Menurut pengakuan Herman kepada Asmardi, ia memang termasuk salah seorang yang pernah diculik. Tetapi selama dalam sekapan penculik yang tak dikenalnya, dia tidak sampai disiksa. Justru saat inilah ia merasa tersiksa dengan berbagai pemberitaan pers, baik pers Indonesia maupun asing.

Setelah ia memastikan Herman bukan Herman Hendrawan yang dicari, Asmardi mengharapkan pemberitaan dihentikan. Sebab pemberitaan menimbulkan kesan Indonesia tak aman, sehingga akhirnya menimbulkan rasa takut orang asing untuk datang ke Indonesia, terutama pengusaha yang ingin menanamkan modal.

Sementara itu keterangan Munir, Ketua Badan Pekerja Kontras, bahwa Dadang utusannya belum bertemu Herman juga dibenarkan Asmardi. Munir menyatakan Dadang kini berada di Davao bersama Mugianto yang sudah dua minggu di sana untuk sebuah pertemuan komite untuk orang hilang di berbagai negara di Asia.

"Sampai sekarang saya belum menerima kedatangan utusan dari Kontras. Herman dalam keadaan sehat. Bila ia sudah mau pulang ke Indonesia, saya akan segera mengirimnya. Jadi saya minta tolong masalah ini jangan diekspose lagi," pinta Asmardi.

Suara Merdeka meminta izin dapat berbicara langsung dengan Herman, tetapi tidak diperbolehkan dengan alasan demi ketenangan. "Saya kan sudah pastikan Herman ini bukan yang dicari, masih mau tanya apa lagi. Apa tidak percaya pada saya," ujarnya.

Munir semalam mengemukakan, dengan perkembangan baru ini menjadi tanggung jawab Kapuspen ABRI Mayjen TNI Syamsu Ma'arif untuk mencabut pernyatannya. "Karena dia yang kali pertama mengungkapkan, maka dia harus meluruskan."

Dia menyatakan Kapuspen ABRI terlalu sembrono mengeluarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Seharusnya setiap informasi terlebih dulu dicek secara saksama sebelum diumumkan ke masyarakat. Tanpa cek and cek ulang, akibatnya bisa membingungkan masyarakat.

"Meski begitu tetap masih perlu dicek terlebih dulu. Saya masih menunggu laporan dari Pak Dadang yang sudah berada di sana." (wid-23g)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA		1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA		2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA		3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA		4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN		5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Herman Di Davao Bukan Yang Dicari Kontras

Jakarta, 4 Agustus

Herman Hendrawan di Davao, Filipina, seperti sudah diduga sejak awal memang bukan Herman Hendrawan yang dicari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Kepastian mengenai identitas dari Herman Hendrawan yang saat ini berada di Konjen Indonesia di Davao diperoleh setelah Wakil Koordinator dan anggota Kontras, Dadang Tisasongko serta Mugianto bertemu dengan Herman.

"Terus terang sekarang kami mempertanyakan siapa sebenarnya Herman yang ada di Davao itu dan apa motifasi Kapuspen ABRI, Mayjen TNI Syamsul Ma'arif, menyatakan bahwa Herman adalah satu di antara 14 korban penculikan yang masih hilang," kata Koordinator Kontras, Munir, kepada *Pembaruan* Selasa pagi.

Munir, yang mendapat kabar dari Dadang Trisasongko, menjelaskan, Herman semula agak enggan menemui Kontras. Tapi, akhirnya ia mau melakukan dialog dengan Kontras.

Dari dialog tersebutlah Kontras yang membawa identitas lengkap data Herman Hendrawan berkesimpulan bahwa Herman di Davao bukan Herman yang dicari Kontras. Menurut Munir, lepas dari hasil pertemuan itu, Kontras akan terus mempertanyakan siapa sebenarnya Herman itu.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar lima jam itu, Herman menolak tawaran Kontras untuk membantu dirinya mengungkapkan siapa para penculiknya. Herman sebagaimana diberitakan mengaku sebagai korban penculikan. "Ia menilai Kontras mendapat sejumlah keuntungan jika menangani dirinya," tambah Munir.

Diminta Dicabut

Di tempat terpisah, Ketua Dewan Pengurus YLBHI, Bambang Widjojanto, meminta Kapuspen ABRI mencabut kembali keterangannya tentang penemuan Herman Hendrawan. Di samping itu, pimpinan ABRI harus sesegera mungkin meralat keterangannya karena hal ini berkaitan dengan suasana hati keluarga Herman yang masih hilang.

Jika Herman di Davao adalah korban penculikan maka ABRI pun harus segera mengungkapkan kasus yang menimpanya. Pimpinan ABRI harus segera menjernihkan kasus ini karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat pada ABRI. (A-14)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Herman 'Davao' Hendrawan Itu Orang Aneh

JAKARTA (Media): Siapa sesungguhnya Herman "Davao" Hendrawan? Koordinator Kontras, Munir, menyebutnya sebagai orang aneh.

"Dia orang aneh, karena Herman 'Davao' Hendrawan hafal dua nama aktivis yang hilang, Herman Hendrawan dan Hendra Hambalie, namun dia tidak mau dijemput oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)," kata Munir kepada *Media*, di Jakarta, kemarin.

Sekitar pukul 12.00, kemarin, bertempat di Konjen RI di Davao City, Filipina, utusan Kontras—Dadang Trisasongko dan Mugianto—bertemu dengan Herman yang didampingi oleh Konjen Asmadi Arbi.

"Setelah kami temui, memang Herman 'Davao' Hendrawan ini bukan orang yang kami cari, karena dia menolak kami jemput dengan alasan ingin mengasingkan diri," kata Munir.

Sebelumnya, ketika dihubungi *Media*, Asmadi Arbi sudah memastikan Herman Hendrawan yang "terdampar" di sana bukan orang yang dicari oleh Kontras.

Munir membenarkan pernyataan Konjen itu. Ia menjelaskan, dari foto yang dicocokkan, semua ciri-ciri termasuk logat bicaranya berbeda dengan Herman Hendrawan yang dicari Kontras.

"Dia juga mengaku diculik oleh orang tidak dikenal di daerah Tanjung Priok, sekitar Februari 1998. Ketika diculik, penculiknya memakai topeng. Para penculik mengajak Herman 'Davao' Hendrawan untuk membuat bom guna menghancurkan apartemen di Rumah Susun Tanah Tinggi, tetapi dia tidak mau. Akibatnya, dia dibuang ke Bandung dua minggu kemudian," kata Munir.

Minta diluruskan

Dalam keadaan takut, kata Munir, Herman yang dibuang ke Bandung itu kemudian lari ke Manado, Sulawesi Utara, lalu mengasingkan diri ke Davao. Munir menjelaskan, baru 27 Juli lalu Herman mendatangi Konjen dan mengaku sebagai orang hilang, kemudian Puspen ABRI menyatakannya sebagai Herman Hendrawan yang dicari selama ini telah ditemukan di Davao.

"Saya *nggak* mau dijemput Kontras, karena Kontras mendapat keuntungan yang tinggi atas kasus penculikan ini," kata Herman "Davao" Hendrawan kepada utusan Kontras seperti diutarakan kembali oleh Munir.

Menurut Munir, setelah dicek lebih jauh, ternyata berbeda pola penculikan Herman "Davao" Hendrawan dengan Herman Hendrawan yang dicari Kontras.

"Karena dia bukan Herman Hendrawan yang kami cari, maka kita tidak berhak menjemputnya pulang ke Indonesia dan meminta rombongan Kontras untuk segera kembali," kata Munir.

Munir juga meminta Kapuspen ABRI untuk meluruskan berita yang pernah dimuat di media massa bahwa Herman Hendrawan sudah ditemukan di Davao City, Filipina.

"Karena dia bukan Herman Hendrawan, Kontras meminta Kapuspen ABRI untuk meluruskan berita yang pernah dibuatnya, hari Jumat lalu yang menyatakan bahwa Herman Hendrawan telah ditemukan. Ini penting agar masyarakat tidak mendapat informasi yang keliru. Mungkin ini disinformasi yang dikembangkan," kata Munir.

Hingga kini, masih 14 orang aktivis dinyatakan hilang dan tidak bisa dipastikan keberadaan mereka. Pihak ABRI serius menangani kasus penculikan tersebut. Selain membentuk Tim Pencari Fakta, ABRI juga membentuk Dewan Kehormatan Perwira. Sejumlah oknum Kopassus dinyatakan diduga terlibat dalam kasus itu.

(Was/M-3)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA		1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA		2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA		3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA		4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN		5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☑ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Herman 'Davao' bukan Korban Penculikan

■ Danpuspom ABRI Undang Hendrik Sirait

JAKARTA (Media): Danpuspom ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalal memastikan, Herman 'Davao' Hendrawan bukan aktivis yang hilang dalam kasus penculikan.

"Saya sudah cek langsung ke Konsul Jenderal RI di Davao, Asmadi Arbi, bahwa Herman itu bukan korban penculikan karena data dan ciri-cirinya dengan Herman korban penculikan berbeda sama sekali," kata Syamsu di ruang kerjanya, kemarin.

Menurut Syamsu, sebenarnya dia punya rencana untuk pergi ke Davao menjemput langsung Herman Hendrawan yang menjadi korban penculikan. "Tetapi setelah saya cek ternyata bukan, maka tidak jadi saya berangkat ke Davao," tutur Syamsu.

Namun demikian, kata Syamsu, bila Herman yang megaku korban penculikan itu datang ke Jakarta ia juga akan meminta keterangannya apa motivasi mengaku-ngaku sebagai korban penculikan.

"Mengenai latar belakang pengakuan Herman di Davao itu kita belum tahu, karena belum ada kontak langsung," kata Syamsu.

Sebelumnya, Kapuspen ABRI Mayjen TNI Syamsul Ma'arif mengumumkan aktivis bernama Herman Hendrawan, yang dilaporkan hilang, ternyata sekarang berada di Davao, Filipina. "Dia sekarang berada di rumah Konsulat Jenderal RI di Davao," katanya, pekan lalu.

Hendrik diundang

Pada kesempatan itu, Syamsu juga minta agar Hendrik Sirait yang mengaku dirinya telah diculik oleh Intel Kodam Jaya untuk datang ke Puspom bersilaturahmi.

"Saya undang Hendrik untuk memberikan keterangannya agar kasus penculikan ini bisa diusut oleh Puspom," kata Syamsu.

Hendrik yang diculik tiga pria tak dikenal mengaku selama penyekapan disiksa dan dianiaya oleh penculiknya. Melalui Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Hendrik menceritakan pengalaman selama diculik dan disekap di Intel Kramat VII Kodam Jaya.

"Di zaman sekarang ini tidak usah takut lagi dan Puspom menjamin keamanan Hendrik bila datang ke Puspom. Kalau kita benar mengapa mesti takut," kata Syamsu.

Syamsu menjelaskan, kasus orang hilang yang telah berhasil diungkap, ternyata melibatkan 11 oknum Kopassus yang dalam waktu dekat ini akan disidangkan di Mahkamah Militer. Sedangkan tiga orang lagi, katanya, dihadapkan ke Dewan Kehormatan Perwira (DKP). "Ketiga perwira yang disidangkan DKP bisa dibawa ke Mahkamah Militer bila ada bukti unsur tindak pidananya," tegas Syamsu.

Hingga kini, belum diketahui keberadaan 14 aktivis yang dinyatakan hilang itu. Penemuan 14 mayat di Lampung belum lama ini dikait-kaitkan dengan korban penculikan.

Namun, dari Lampung dilaporkan, isu penemuan 14 mayat itu, setelah dicek, ternyata hanya ada satu mayat. Kapolda Lampung Kol Pol Gendro Budi Santosa menyatakan, pihaknya belum bisa memastikan apakah mayat yang ditemukan di Sungai Umpu itu korban pembunuhan. Menurut rencana, hari ini mayat itu akan diotopsi. (Wdh/IH/M-3)

t Informasi dan Dokumentasi
ɪBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

			Tanggal						Bulan		Tahun
SIA	❑	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
	❑	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
	❑	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
	❑	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
	❑	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
SIA	❑		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Belum Bertemu ın Hendrawan

ık Orang
ıdak Ke-
ugiyanto,
.vao, Fili-
abtu (1/8)
menemui
ugiyanto
: bertemu
ıl Indone-
ia tidak
asa dari

as Munir
karta me-
ɔ sempat
Konjen In-
r bisa me-
endrawan.
ıwa surat
kan mene-
ı (Sabtu —
ngko, ang-
sudah me-
' ujarnya.
anggota
ui Herman,
ah anggota
tang.
ınir, sudah
dari orang-
wan. "Teta-
dibawa itu,
ıa Herman
mahasiswa
langga (Su-
diculik se-
Jika benar
erman Hen-
i (Kontras)
a pulang ke
ngsung dia-

Munir mengatakan, sebenarnya ia ragu Herman Hendrawan yang berada di Davao adalah korban penculikan seperti yang dilaporkan pada Kontras. Walaupun demikian, jati diri orang itu tetap perlu ditelusuri, sebab terkesan misterius. Apalagi, ia pun bisa berkisah tentang penculikan yang menimpanya mirip dengan cerita penculikan Herman Hendrawan dari Unair.

"Herman Hendrawan di Davao itu, sesuai dengan pembicaraan lewat telepon, berasal dari Tasikmalaya. Sedang Herman Hendrawan yang kami (Kontras) cari, berasal dari Bangka (Sumatera Selatan). Namun siapa pun dia, perlu dicek," papar Munir lagi.

Bantuan Interpol

Sementara Kapolri Letjen (Pol) Roesmanhadi mengungkapkan, Polri meminta bantuan Interpol Filipina untuk memeriksa ciri-ciri Herman Hendrawan yang diduga sebagai salah satu korban penculikan yang kini berada di Davao. Ini perlu dilakukan, sebab Kontras meragukan Herman Hendrawan di Davao tersebut.

"Itu 'kan baru informasi. Polri akan mencocokkan ciri-ciri Herman dengan yang ada di sana melalui bantuan interpol di sana (Filipina). Apabila betul, maka akan kita (Polri) ambil," tutur Roesmanhadi dalam pertemuan pers di Jakarta, Sabtu. Polri telah mengirim data-data Herman Hendrawan ke Interpol Filipina.

Kapolri meminta masyarakat menunggu hasil pencocokan Interpol. "Kita tunggu dulu hasil dari Filipina. Ciri-ciri orang yang dicari itu begini, kira-kira cocok *nggak* dengan yang ada di sana. Mungkin saja dia operasi, tetapi pasti ada identitas lainnya yang tak bisa dihilangkan," jawab Kapolri.

Dari Tasikmalaya dilaporkan, Herman Hendrawan yang kini berada di Davao tak pernah tercatat sebagai mahasiswa Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya. Padahal, sebelumnya Herman itu mengaku jebolan Unsil dan pindah ke Universitas Katholik Parahyangan (Unpar) Bandung tahun 1997.

"Kami sudah membuka *file* mahasiswa yang keluar maupun transfer sejak tahun 1980 hingga kini. Tetapi tidak ada nama Herman Hendrawan seperti yang diberitakan. Nama Herman atau yang berakhiran Hendrawan memang ada, tetapi bukan Herman Hendrawan, dan data-data akademiknya tidak cocok," jelas Pembantu Rektor III Unsil Dr Ahmansya didampingi Kepala Humas Unsil Yadi Heryadi MSc yang dikonfirmasi, Sabtu (1/8).

Ahmansya mencontohkan, nama Herman yang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan adalah mahasiswa Angkatan 90/91 dan kuliah hanya satu semester. "Kami tidak tahu dia pindah ke mana, karena kuliahnya hanya satu semester," ujarnya.

Nama lain yang mirip, lanjutnya, adalah Hendra Hendrawan yang tercatat sebagai mahasiswa Teknik Sipil angkatan tahun 1994. Satu lagi, adalah Hengki Hendrawan mahasiswa Ekonomi jurusan Manajemen juga angkatan 1994. "Dari data kami menemukan hanya tiga nama itu yang mirip tapi tidak ada Herman Hendrawan. Kami juga tidak pernah mendengar ada aktivis mahasiswa Unsil dengan nama itu," ungkapnya.

Mayat di Lampung

Sementara itu, Sekretaris Dinas Penerangan Polda Lampung Kapten (Pol) Zainal Gunawan membantah informasi penemuan 14 mayat mengapung di Way Umpu, Lampung Utara. "Hingga kini yang ditemukan hanya satu mayat saja dan sudah dikuburkan. Polisi telah turun ke lokasi serta mengumpulkan keterangan dari warga. Sejauh ini tidak ada informasi dan bukti-bukti penemuan 14 mayat itu," kata Zainal di Bandarlampung, Sabtu.

Guna klarifikasi, polisi meminta para kepala desa di Kecamatan Blambangan Umpu, mencari kebenaran dari warganya. Para kades membuat pernyataan, warga hanya menemukan satu mayat mengapung dan itu sudah dikuburkan.

Mayat laki-laki yang ditemukan pada 18 Juli 1998, hingga kini identitasnya belum diketahui. Warga desa di Blambangan Umpu pun tidak ada yang melapor kehilangan anggota keluarganya. Ciri-ciri korban antara lain, usia sekitar 35 tahun, tinggi ditaksir 170 cm, berat badan diperkirakan 65 kg.

Kepala Divisi Pertanahan dan Lingkungan LBH Bandarlampung, Watoni Nurdin meminta pihak kepolisian, khususnya Polda Lampung mengusut tuntas kasus itu. LBH sangat menyesalkan, karena polisi terkesan kurang reaktif terhadap informasi penemuan belasan mayat di kawasan tersebut.

"Polisi baru bertindak setelah LBH dan Kontras Jakarta turun ke lokasi dan kasus itu mencuat ke permukaan. Dari investigasi, LBH Bandarlampung dan Kontras Jakarta tetap berkesimpulan memang ada warga melihat lebih dari satu mayat mengambang di Way Umpu. Penemuan itu tersebar di sembilan lokasi, umumnya desa-desa yang berada di pinggiran sungai itu," jelasnya. **(ren/nn/zul/tra)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☑ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Herman Sebaiknya Segera ke Indonesia

Davao City, Kompas

Herman Hendrawan yang kini berada di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Davao, Filipina, sebaiknya segera kembali ke Indonesia. Keberadaan Herman yang lebih lama di Filipina, akan menyulitkan dirinya sendiri karena statusnya yang masuk Filipina secara ilegal. Meskipun demikian, pihak KJRI tidak akan memaksa Herman, yang mengaku pernah diculik itu, untuk kembali ke Indonesia. KJRI akan terus menggali siapa sebenarnya Herman Hendrawan.

Hal itu disampaikan Konsul Taufan Adityawarman dan Wakil Konsul Iwan Delano Marcel ketika ditemui wartawan *Kompas* **Rakaryan Sukarjaputera** di Davao, Selasa (4/8). Keduanya sependapat, walau Herman yang mengaku berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat itu berada di KJRI, namun dia tetap berstatus masuk secara ilegal dan terkait dengan soal "politis". Hal ini tentunya akan mengundang perhatian pemerintah Filipina.

"Memang (kantor konsulat tempat Herman berada) ini wilayah Indonesia, tapi KJRI ini pun harus tunduk pada peraturan di Filipina karena berada di Filipina. Bisa saja suatu ketika pemerintah Filipina juga menuntut informasi bagaimana Herman yang tidak dilengkapi dokumen bisa masuk ke negeri ini," jelas Iwan yang bertugas menangani keimigrasian di KJRI Davao.

Pemberitaan mengenai keberadaan korban penculikan di KJRI Davao mendapat tempat cukup baik di dua surat kabar Filipina, yaitu *Sun Star* dan *Daily Mirror*.

Perlu diungkap

Sementara itu anggota Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Dadang Trisasongko berpendapat, walaupun Herman yang berada di KJRI Davao bukan Herman yang dicari Kontras, namun keberadaan korban penculikan yang secara fisik mempunyai sejumlah kemiripan dengan Herman yang dicari Kontras itu perlu diungkap lebih jauh. Jika berdasar keterangannya mengenai bagaimana dia diculik, maka patut diduga kuat telah terjadi salah menculik.*

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 (7) 13 19 25 31	Januari	Juli	~~1998~~
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Herman "Davao" Hendrawan Mengaku Datang Sendiri ke Davao

Davao City, Kompas

Marlinus Amos (62) — orang yang pertama kali menjemput Herman "Davao" Hendrawan di pelabuhan laut Calumpang, General Santos (Gensan), Filipina — mengemukakan, Herman mengaku datang sendirian ke Pulau Mindanao, Filipina. Namun, Herman tak banyak bercerita tentang siapa dirinya. Herman hanya mengatakan dia sedang dikejar-kejar orang di Jakarta.

Herman yang kini berada di kantor Konsultan Jenderal Republik Indonesia (KJRI) sempat tinggal sekitar 1,5 bulan di kediaman Marlinus. Marlinus kepada wartawan *Kompas* **Rakaryan Sukarjaputera** di Davao, Kamis (6/8) menceritakan, Herman mengaku berasal dari Bandung dan datang ke Filipina dengan pesawat dan mendarat di pelabuhan udara Uhaw (sekitar 8 kilometer dari pusat kota Gensan). "Ia bilang di Jakarta pernah diburu orang dan mengaku temannya ada yang lari ke Belanda karena diburu orang. Dia juga bilang cuma dia sendiri yang lari ke sini," ungkap Marlinus.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan ABRI (Kapuspen) ABRI Mayjen TNI Syamsul Ma'arif kepada pers sempat mengumumkan bahwa Herman Hendrawan yang menjadi korban penculikan ditemukan berada di Davao. Namun, setelah dicek tim dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), dipastikan Herman yang berada di Davao bukanlah yang dicari Kontras.

Di tempat lain

Marlinus adalah orang Indonesia yang sudah sejak tahun 1968 mencari nafkah di Gensan sebagai awak kapal penangkap ikan. Ia menceritakan, pertemuannya dengan Herman berawal dari kedatangan karyawan perusahaan perikanan Jilco ke kantor perusahaan tempat dia bekerja, TSPMI dan TPMI Fishing sekitar awal Juni lalu. Ketika itu sang karyawan Jilco menanyakan apakah ada karyawan TSPMI yang bisa berbahasa Indonesia. Kemudian, karyawan itu memberi tahu adanya orang Indonesia di Calumpang yang bukan berasal dari Sangir-Talaud. Marlinus pun kemudian menemui Herman dan mengajaknya untuk tinggal di kediamannya.

Selain Marlinus, Herman juga sempat tinggal bebarapa hari di keluarga Tagoriri, sekitar satu kilometer dari kediaman Marlinus. Marlinuslah yang memperkenalkan Herman pada keluarga ini. Namun menurut Tagoriri (59) di rumahnya pun Herman tak banyak bercerita. Herman hanya mengatakan, dia dikejar-kejar orang.

Keterangan Marlinus dan Tagoriri soal Herman sama dengan keterangan yang diberikan ke Konjen RI di Davao misalnya soal bahwa dirinya dikejar dan takut karena terus diburu. Kepada Konjen RI, penyebab ketakutan itu adalah karena dia pernah jadi korban penculikan. Namun, mengenai bagaimana Herman masuk Filipina, pengakuan Herman kepada Marlinus berbeda dengan KJRI.

Kepada KJRI dia mengaku datang ke Filipina lewat jalur laut dari Bitung, Sulawesi Utara. Namun berbagai kalangan di Konjen RI maupun warga Indonesia di Filipina menyangsikan jika Herman masuk ke Filipina lewat jalur udara. Tidak mungkin masuk Filipina tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Baik Marlinus maupun Tagoriri mengatakan mau menerima Herman di kediaman mereka karena dia adalah saudara sebangsa dan penampilannya terlihat baik.

Kegiatan Herman di KJRI Davao sendiri sejauh ini hanya beristirahat. *Kompas* yang sempat berpapasan dengannya di Mesjid KJRI Davao menangkap kesan ketertutupan dari Herman. Kesan ini juga ditangkap warga Indonesia lain yang mempunyai aktivitas di KJRI Davao. Meski demikian Herman bisa bersosialisasi cukup baik selama tinggal di KJRI Davao. Dia mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan olahraga sebagai bagian dari rangkaian peringatan 17 Agustus.

Dari penampilan fisik, Herman yang mengaku asal Tasikmalaya ini jauh dari mirip dengan foto Herman Hendrawan yang ada di Kontras.*

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA		1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA		2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA		3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA		4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN		5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Herman Hendrawan Tiba di Jakarta

"Biarlah Saya Sendiri yang Tahu"

Jakarta, Kompas

Pemuda yang mengaku berasal dari Tasikmalaya bernama Herman Hendrawan, akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Ia tiba di Jakarta, Jumat (7/8), pukul 20.15 WIB, dengan menggunakan pesawat Bouraq langsung dari Davao, Filipina. Ia diantar Konsul Jenderal (Konjen) RI di Davao, Asmardi Arbi. Namun, Herman yang juga korban penculikan masih enggan bercerita banyak. "Biarlah saya sendiri yang mengetahui dan merasakan apa yang saya rasakan," ucapnya.

Kepada *Kompas* yang menemani perjalanan Herman kembali ke Indonesia, lelaki berkumis tipis, berkacamata dengan kulit agak putih tersebut sering mengungkapkan rasa was-wasnya begitu memasuki wilayah Indonesia.

Ketika pesawat singgah di Bandara Sam Ratulangi Manado dan Bandara Juanda Surabaya, Herman menyatakan keengganannya untuk keluar dari pesawat. Namun karena diharuskan keluar dari pesawat, ia pun keluar pesawat. Ia duduk di ruang tunggu bandara dan "menyepi" agak menjauh dari penumpang lainnya.

"Perasaan saya mengisyaratkan keadaan belum aman betul. Perasaan saya itu kuat," ungkapnya sambil menambahkan bahwa dirinya menjadi korban penculikan justru karena mengabaikan perasaannya itu.

Dalam percakapan dalam bahasa Sunda dengan *Kompas*, ia menyatakan belum yakin keadaan telah benar-benar berubah meskipun di sana-sini disebut-sebut soal reformasi. "Soal perasaan seseorang hanya orang itu sendiri yang tahu. Jadi kalaupun disebut-sebut reformasi, siapa yang tahu betul mereka sudah berubah," jelas Herman.

Mengenai kepulangannya ke Indonesia, pemuda yang mengaku terakhir berkuliah di Universitas Parahyangan, Bandung itu, mengemukakan, pada dasarnya ia adalah orang yang tidak tega meninggalkan orangtuanya lama-lama. Perjalanan ke Davao itu adalah perjalanan pertamanya ke luar negeri sekaligus perjalanan pertamanya ke luar pulau Jawa. Kepulangannya ke Indonesia bukan karena paksaan siapa pun.

Ketika ditanya lebih jauh apakah akan segera pulang menemui orangtuanya, Herman menjawab, akan memikirkan dulu hal itu. Namun yang pasti, dia menyatakan masih perlu waktu untuk benar-benar menenangkan diri. "Mungkin saya akan tinggal di teman-teman dulu," ungkapnya sambil mengatakan bahwa dari Konjen RI Davao dia sempat menelepon orangtuanya.

Bukan salah culik

Meski dia memang bukan Herman Hendrawan yang dicari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), pemuda yang dalam pengakuan kepada Konjen RI di Davao mengaku diculik di Tanjungpriok, Jakarta, sekitar akhir Februari 1998 itu mengatakan bahwa dia memang korban penculikan. Di sisi lain, ia juga ragu kalau penculikan terhadap dirinya dilakukan karena kesalahan mengenali korban.

"Sepertinya apa yang saya alami itu ada kaitannya dengan apa yang saya sampaikan," ungkap Herman yang masih sulit sekali untuk bercerita panjang lebar. Ia pun menolak untuk diambil gambarnya.

Seringkali dia tampak ingin bercerita lebih panjang, namun di tengah jalan kata-kata dari mulutnya tidak dia lanjutkan. Jika sudah demikian, kata-kata berikutnya yang keluar dari mulutnya adalah, "Nantilah, pikiran saya sampai sekarang benar-benar semrawut."

Herman yang sebelum ke Davao sempat singgah di Pontianak dan Manado menjumpai teman-temannya sekaligus mendapatkan bekal uang dari mereka, menambahkan, dia masih sangat trauma dengan apa yang telah dialaminya. Dia juga teringat kejadian serupa yang menimpa anggota keluarganya yang lain, yang sampai saat ini kadang membuat saudaranya itu melakukan suatu perbuatan yang tidak normal.

Herman mengatakan tidak menyangka keberadaannya di Konsulat RI Davao akan tersiar ke mana-mana, karena dia sendiri sesungguhnya ingin apa yang terjadi atas dirinya tidak diketahui orang banyak. "Biarlah saya sendiri yang mengetahui dan merasakan apa yang saya rasakan," katanya.

Dia mengakui beberapa keterangan yang sudah dia berikan kepada Marlinus dan keluarga Tagoriri tidak sepenuhnya betul. Sebab, dia belum siap untuk ditanya-tanya sehingga ketika ada pertanyaan mengenai dirinya, dia menjawab pertanyaan itu menurut apa yang ada dalam pikirannya pada saat itu. Misalnya soal bagaimana dia masuk Davao. **(oki)**

Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Kontras akan Coba Temui Herman Hendrawan

Jakarta, Kompas

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) berniat menemui Herman Hendrawan asal Tasikmalaya, yang kini sudah berada di Tanah Air. Jika Herman yang sempat mencari ketenangan di Davao, Filipina Selatan, itu bersedia, Kontras akan memberikan proteksi dan menguruskan hak-haknya seperti yang diberikan selama ini kepada korban penculikan yang lain.

Demikian dikatakan Koordinator Kontras Munir kepada *Kompas* hari Sabtu (8/8) di Jakarta. "Kontras akan berusaha menemui Herman maupun orangtuanya. Walau Herman Hendrawan di Davao itu bukan yang dicari Kontras, namun ia harus tetap dilindungi dan memperoleh hak-haknya," jelas Munir.

Saat bertemu dengan anggota Kontras di Davao, lanjutnya, Herman memang tak memberikan kuasa kepada Kontras untuk melindungi dirinya, atau menguruskan hak-haknya. Bahkan, Herman terkesan tertutup. Namun itu diartikan Kontras sebagai hal yang biasa, karena Herman masih ketakutan. **(tra)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐ Suara Merdeka	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Munir Meragukan Herman di Davao Korban Penculikan

JAKARTA -Munir SH, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Antikekerasan (Kontras) meragukan Herman yang berada di Konjen RI di Davao, Filipina, sebagaimana disebutkan Kapuspen ABRI sebagai korban penculikan adalah benar-benar korban penculikan yang dia maksud.

"Saya telah melakukan pembicaraan telepon ke Konjen RI di Davao untuk memastikan apakah Herman itu korban penculikan yang sampai kini belum kembali ke rumah. Tetapi dalam pembicaraan telepon, dia mengaku bukan Herman yang kami maksudkan dan meminta supaya jangan diganggu lagi," kata Munir kepada wartawan di Kantor Pusat LBH Jakarta, kemarin.

Kapuspen ABRI Mayjen TNI Syamsul Ma'arif sebelumnya menyebutkan, Herman telah berada di Davao sekitar dua bulan dan dalam waktu dekat akan kembali ke Tanah Air. Dia tiba di Davao melalui jalur laut. Informasi keberadaan Herman itu diperoleh dari laporan Konjen RI di wilayah itu.

"Kami mendapat laporan, pada 27 Juli lalu Konjen RI di Davao kedatangan seorang warga negara Indonesia yang mengaku bernama Herman Hendrawan. Dia adalah salah seorang aktivis yang selama ini dinyatakan hilang. Awal ceritanya, yang bersangkutan berangkat dari Tanjungpriok menuju Pontianak dan terus ke Manado. Kebetulan di sana ada kapal menuju Filipina, yang bersangkutan pun menuju ke sana."

Namun Munir menyatakan memperoleh informasi berbeda, ketika dia menghubungi Konjen RI di Davao. Bahkan saat menelepon, ia juga diberi kesempatan bercakap-cakap dengan Herman beberapa saat. Sebelumnya ia sudah mengirimkan foto Herman Hendrawan yang hilang menurut versi Kontras melalui faksimile.

Menurut informasi dari Konjen RI, ungkap Munir, Herman memang mirip dengan foto yang dikirim Kontras. Untuk itu, waktu menelepon dia minta izin dapat berbicara langsung dengan Herman. Dalam perbincangan, Herman mengaku mahasiswa Universitas Siliwangi Tasikmalaya, bukan Unair Surabaya.

"Dia memang juga mengaku korban penculikan. Ia mengaku diculik setelah pulang dari kantor YLBHI. Tetapi, dari logat bicaranya saya ragu. Sebab Herman yang kami maksud sebenarnya kelahiran Bangka dan memiliki dialek bicara khas surabayanan, bukan dialek Sunda," tandasnya.

Berdasar hal itu, pihaknya masih meragukan apakah Herman Hendrawan yang berada di Konjen RI itu benar-benar Herman yang diculik sejumlah orang tak dikenal pada 12 Maret 1998 lalu. "Itu berarti masalah temuan Herman belum bisa dikatakn final," tambahnya.

Untuk lebih memastikan keberadaan Herman, pihaknya segera mengirim surat ke Konjen RI di Davao, sekaligus memberangkatkan awaknya untuk menemui langsung. "Saat ini tinggal bagaimana menunggu kelanjutan hasilnya."

Ditanya bagaimana kelanjutan informasi penemuan 14 mayat lelaki dewasa yang tercerai berai dan membusuk di Way Umpu, Lampung Utara, dia mengatakan sejauh ini belum memperoleh hasil. Tim yang dikirim ke Way Umpu belum kembali dan belum menyampaikan laporan.(wid,mon-11g)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Kontras Sangsikan Herman di Davao

Satu Lagi Aktivis yang Hilang Dikabarkan Ketemu

Jakarta, JP.-

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) masih menyangsikan kebenaran bahwa Herman Hendrawan yang pernah dilaporkan hilang kini ada di KJRI Davao. Keraguan Kontras ini disampaikan Munir SH di YLBHI, Jakarta, kemarin. "Kami belum yakin selama kami belum bertemu langsung dengan yang bersangkutan," katanya.

Munir mengatakan hal itu menanggapi penjelasan Kapuspen Hankam/ABRI Mayjen TNI Syamsul Maarif di Jakarta kemarin. Disebutkan bahwa Herman yang dilaporkan hilang itu ternyata berada di Davao. Salah satu aktivis yang dikabarkan hilang ini dikatakan sudah berada di Davao selama dua bulan dan akan kembali ke Indonesia secepatnya.

Munir mengaku sudah berdialog langsung dengan orang yang bernama Herman Hendrawan itu selama 10 menit. "Dari dialog selama sepuluh menit itu, saya berkesimpulan bahwa yang sedang saya ajak bicara itu bukan Herman Hendrawan aktivis PRD (Partai Rakyat Demokratik). Tapi, Herman Hendrawan lain.'

Meski begitu, Kontras tetap mengirimkan utusannya ke Davao untuk mengecek apakah benar Herman di Davao itu yang dilaporkan hilang selama ini. Kontras juga berharap ABRI bisa membawa pulang Herman yang berada di Davao.

Menurut Munir, keraguannya ini bukan berarti Kontras telah memvonis bahwa yang disebutkan Kapuspen Hankam/ABRI itu keliru. Sebab, kata Munir, dalam kasus-kasus kembalinya korban penculikan dari sekapan penculiknya, yang bersangkutan tidak langsung berterus terang bahwa dirinya korban penculikan.

"Sebagai contoh, ketika pertama kami mengontak Faisol Reza di Probolinggo, yang bersangkutan tidak bersedia berhubungan dengan orang lain. Bahkan, ketika bertemu dengan seseorang, Faisol selalu menyangkal dirinya korban penculikan. Hal itu kami pahami karena dia masih trauma dengan suasana ketika masih dalam sekapan penculiknya," jelasnya.

Diceritakan, saat ditelepon Munir, Herman ternyata tidak bisa diajak bicara dengan dialek Surabaya. Padahal, Herman yang hilang itu sehari-hari berdialek Surabaya meski lahir di Pangkalpinang. Demikian pula ketika Munir menyerahkan telepon ke Faisol Reza (teman Herman yang sama-sama diculik), ternyata Herman di Davao itu tak menunjukkan jati diri seperti identitas Herman yang hilang itu.

"Yang bersangkutan juga mengatakan terus terang kepada saya bahwa dia bukan orang yang dicari. Ia juga tidak pernah kuliah di Unair Surabaya. Tapi, kuliah di Universitas Siliwangi, yang kemudian pada tahun 1997 pindah ke Universitas Parahiyangan. Padahal, Herman Hendrawan yang saya kenal itu kuliah di Unair, FISIP," jelasnya.

Sementara itu, Faisol Reza mengatakan, bisa jadi Herman Hendrawan yang sesungguhnya memang berada di Davao. Tapi, bisa juga dia orang lain yang mengaku Herman yang hilang. "Berdasarkan pengalaman saya sendiri setelah keluar dari sekapan penculik, saya masih trauma. Bahkan, saya tidak mau ditemui orang lain. Karena itu, saya berharap bahwa yang di Davao itu Herman Hendrawan yang sebenarnya," katanya.

Danpuspom ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalaludin secara terpisah menyatakan gembira berkaitan dengan ditemukannya satu orang korban penculikan. "Saya berharap Herman Hendrawan ini memang Herman Hendrawan yang sebenarnya. Tapi, kami masih menunggu kabar selanjutnya dari Davao," ujarnya.

Ketika ditanya tentang keputusan Puspom ABRI yang akan melimpahkan berkasnya ke oditur militer awal Agustus ini, Syamsu mengatakan bahwa pihaknya tidak akan melimpahkan berkas itu sebelum semua penyidikan tuntas. "Kita tidak akan melimpahkan ke oditur kalau belum tuntas semuanya. Jadi, bulan Agustus itu belum tentu karena masih dalam penyidikan," katanya. **(mik)**

Prabowo Akan Dipanggil Lagi

JAKARTA – PEMBAHARUAN 11 JUNI 2003 Tim Ad Hoc Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk kasus kerusuhan 13-15 Mei 1998 akan melayangkan surat panggilan kedua kepada mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto pekan depan. Pasalnya, pada panggilan pertama Prabowo tidak datang dengan alasan belum diizinkan oleh tim advokasi TNI.

"Minggu depan kami akan layangkan surat pemanggilan kedua," kata Wakil Ketua Ketua II Komnas HAM Salahuddin Wahid saat dihubungi, di Jakarta, Rabu (11/6). Dia berharap, semua mantan pejabat dan pejabat TNI yang terkait dengan peristiwa kerusuhan Mei 1998 itu mau memberi keterangan ke Komnas HAM. Hanya saja, sampai saat ini belum satu pun mantan pejabat dan pejabat TNI yang terkait dengan kasus itu yang memenuhi panggilan Komnas HAM.

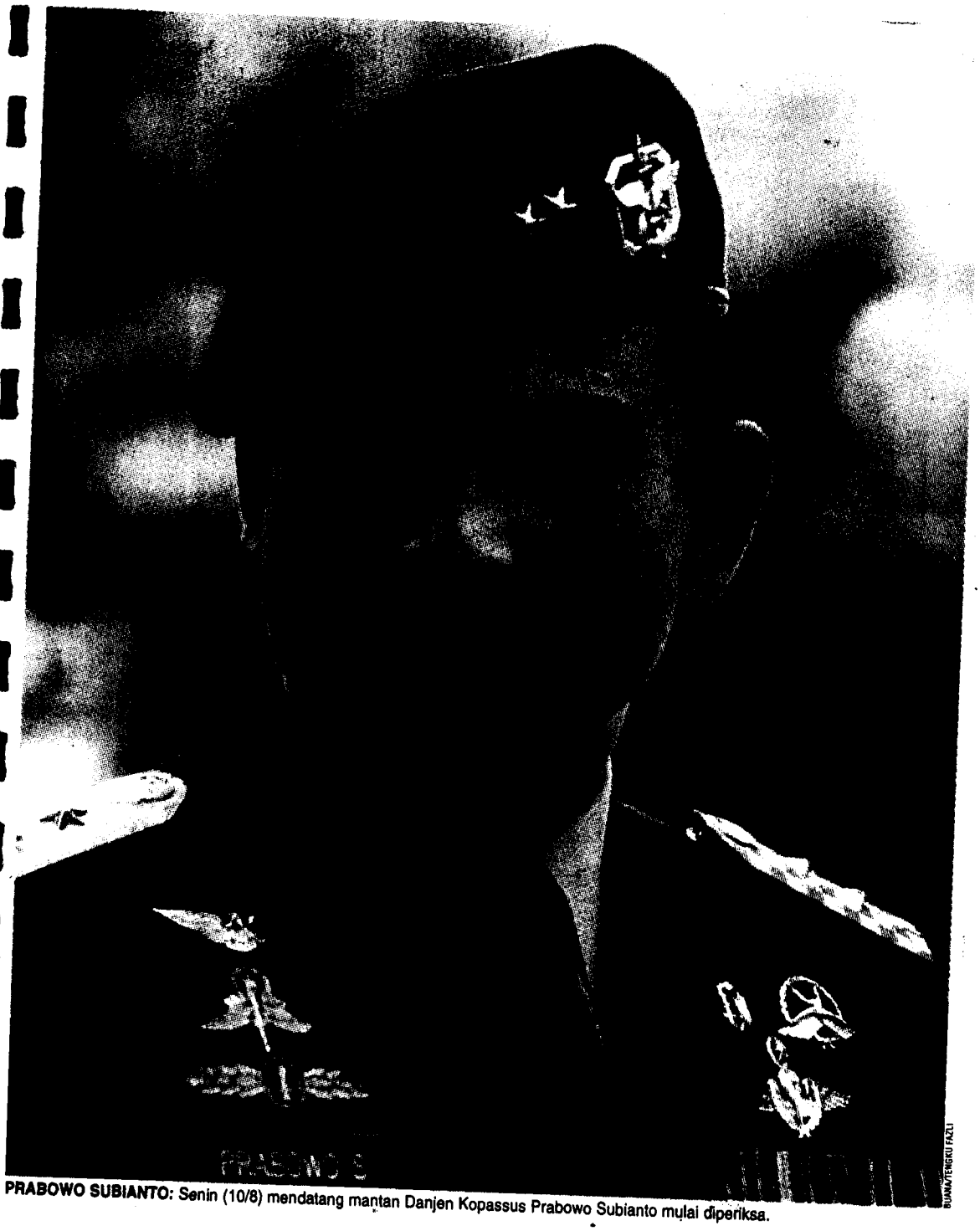
Mantan pejabat dan pejabat TNI yang sangat penting kehadirannya untuk dimintai keterangan berkaitan dengan peristiwa tersebut adalah Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin yang pada saat peristiwa itu terjadi menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya. Sejauh ini hanya Letjen TNI Sudi Silalahi yang sudah dipanggil untuk dimintai keterangannya memberi alasan ketidakhadirannya.

Selain itu, mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Wiranto sangat penting untuk dimintai keterangannya. Para kepala kepolisian resort (Kapolres) se-Jakarta dan Tangerang serta Komandan Kodim se Jakarta saat itu juga akan dimintai keterangan. "Kami akan mengklarifikasi keterangan mereka yang ditulis dalam laporan TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) dan menggali lebih dalam lagi sekitar kerusuhan Mei 1998," katanya.

Ketika ditanya soal langkah lebih lanjut yang ditempuh Komnas HAM bila para mantan dan pejabat TNI tidak memenuhi panggilan Komnas HAM sampai tiga kali, Salahuddin mengatakan, "Saya belum bisa menjawabnya karena itu sangat teknis". Kendati demikian, bila para jenderal dan mantan jenderal itu tetap tidak memenuhi panggilan Komnas HAM, pihaknya akan menemui Panglima TNI dan Kepala Polri. "Tapi bila panglimanya tidak mengizinkan, ya sudah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi," keluhnya.

Pada bagian lain dia menjelaskan, mantan anggota TGPF Marzuki Darusman, Asmara Nababan, dan Saparinah Sadli sudah menandatangani berkas laporan TGPF. Tanda tangan itu penting sebagai berita acara.

(A-21)



BUANA/TENGKU FAZLI

PRABOWO SUBIANTO: Senin (10/8) mendatang mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto mulai diperiksa.

ELSAM

Media:

- BISNIS IN
- JAKARTA
- JAWA PO
- KOMPAS
- KD. RAK
- MEDIA IN



Prabowo



Chairawan



Muchadi

LSAM P
L
T

edia:

BISNIS INDO
JAKARTA PO
JAWA POS
KOMPAS
KD. RAKYA
MEDIA INDO

Pem

SE

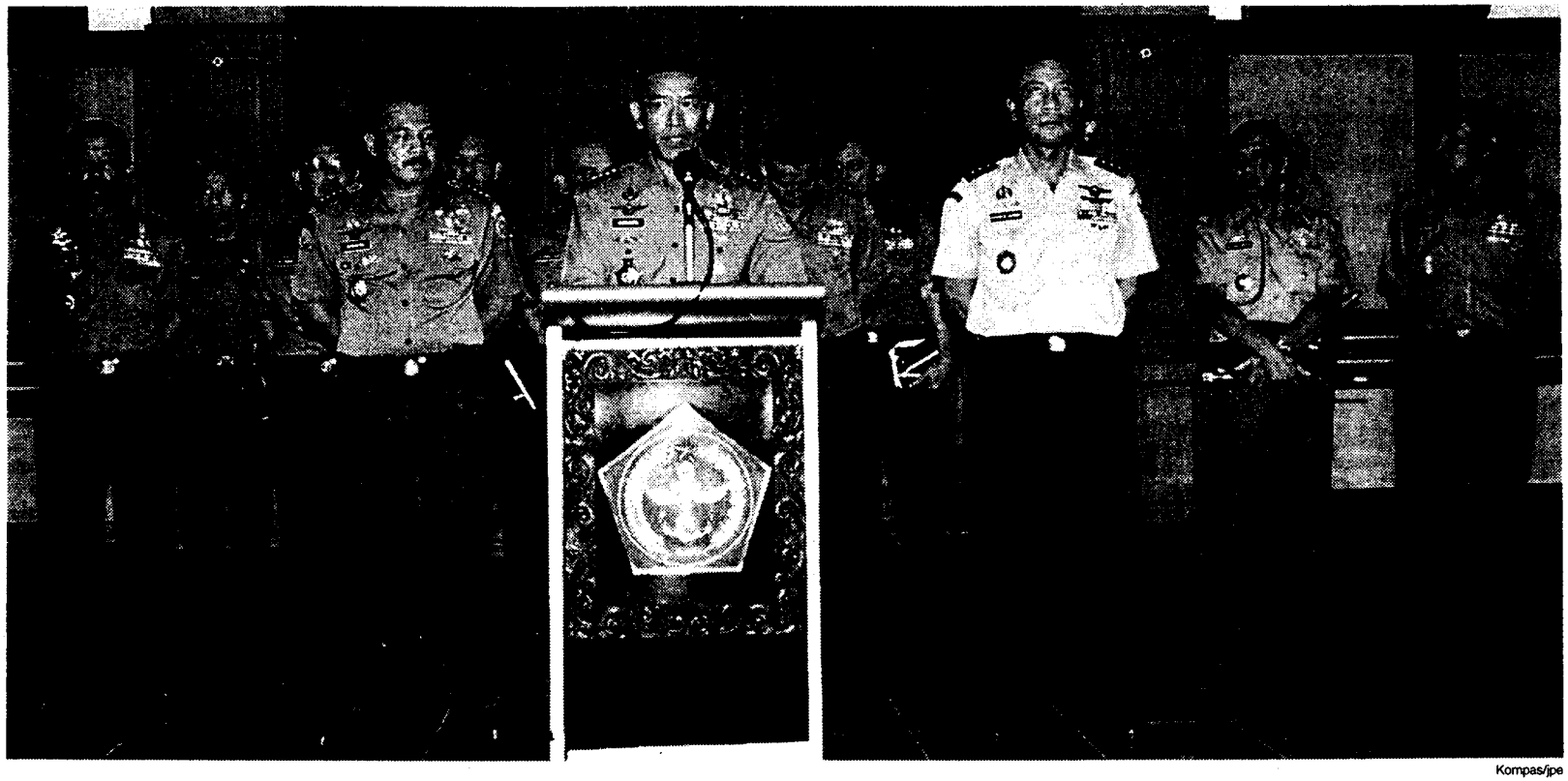
ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

TEGUH INDRA/REP



MENGADU: Sejumlah keluarga korban penculikan dengan membawa foto - foto keluarga mereka yang sampai saat ini belum diketahui keberadaanya, kemarin mendatangi Mabes TNI AD Jakarta. Pengaduan mereka diterima pihak Mabes AD melalui dialog dengan Aspam KASAD Mayjen TNI Noor Aman.



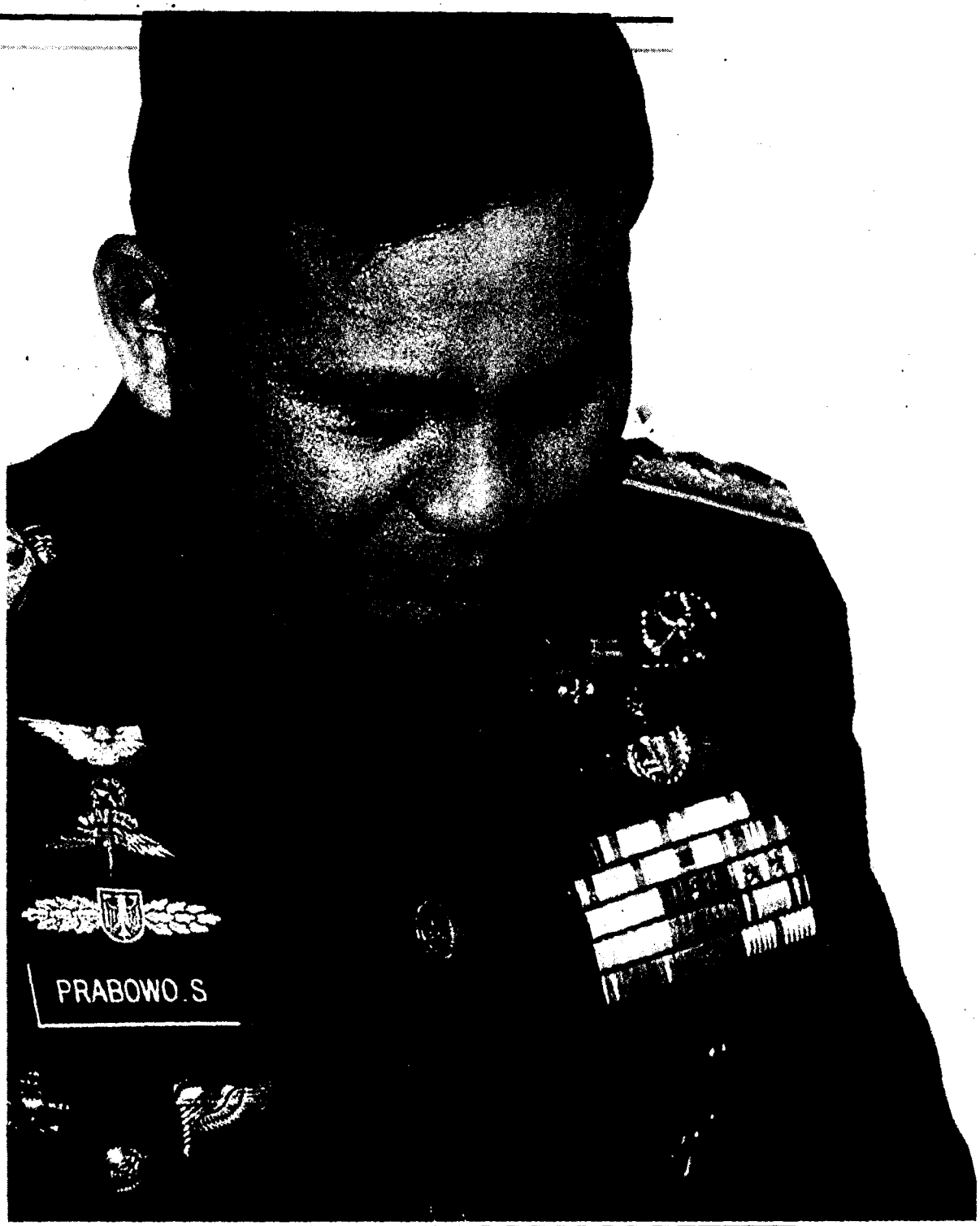
Kompas/jpe

KEPUTUSAN PANGLIMA ABRI — *Di hadapan puluhan wartawan di Dephankam, Jakarta, Senin (24/8), Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto, yang antara lain didampingi Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo, mengumumkan sanksi administratif bagi Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kolonel (Inf) Chairawan.*

ELS

Media:

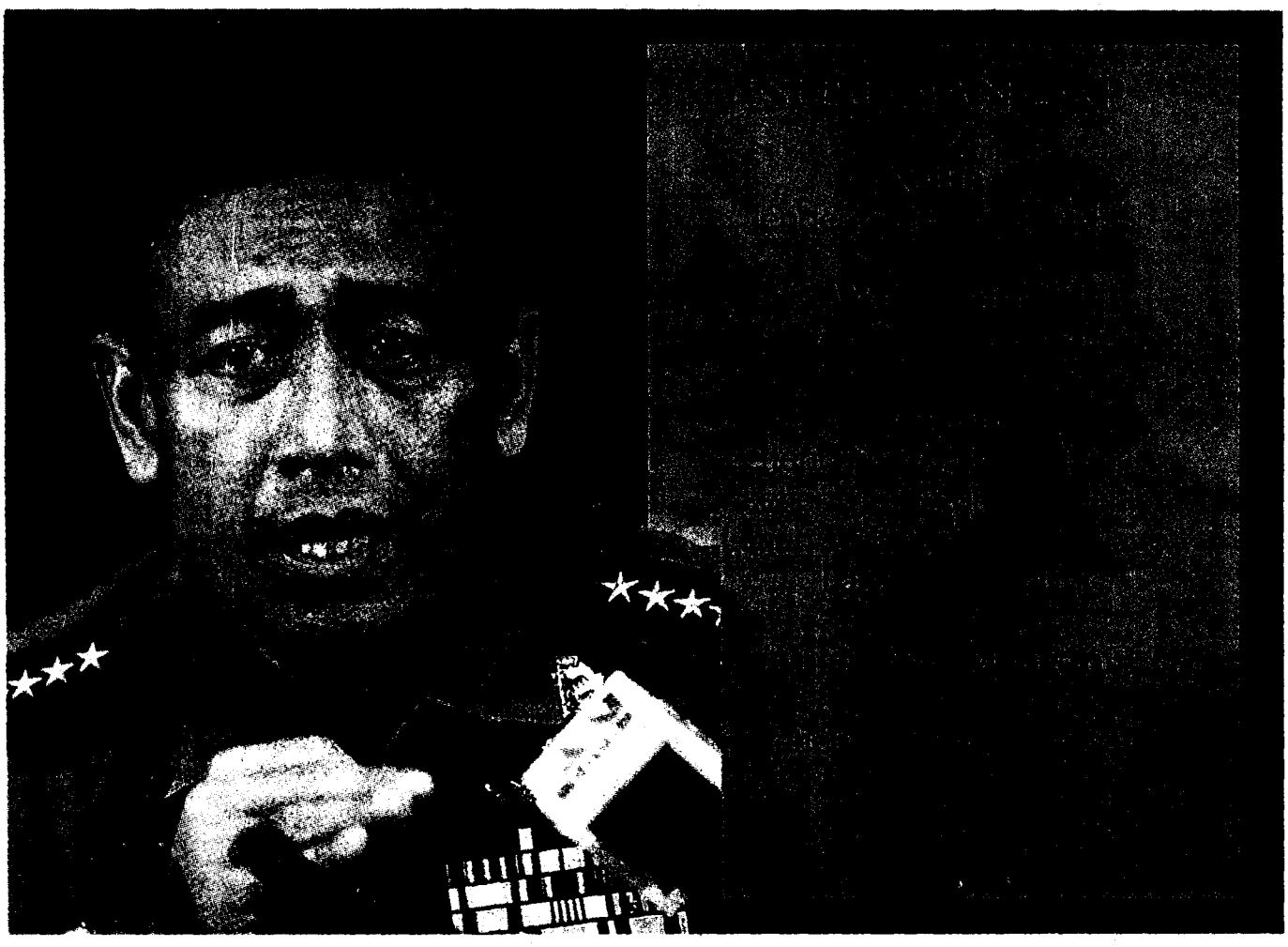
BISNIS
JAKAR
JAWA I
KOMPA
KEDAU
MEDIA



AFP

TARGET DKP: Akhirnya Menhankam/ Pangab Jenderal TNI Wiranto membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang akan memeriksa ketiga pentolan Baret Merah ini. Dari kiri: Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi dan Kolonel Inf. Chairawan.

FOTO-FOTO: GINO F HADIGRAFIS: PA



Saat ke AS dan Jepang

BISN
JAK
JAW
KOM
KD.
MED

JAKART
tan Dan
jen TNI
to dan M
di serta
dan G
Kolone
kemarin
Dewan K
wira (D
KSAD
bagyo.

Peme
pukul 0
sung di
Markas Be
sad), Jl
karta Pu
Selur
Selain Jen
hadir p
TNI Fa
Letjen
dan lima a
Letjen TNI
jen TNI
yono, L
negara, La
Soeratmi
Madya
Sepe
Jenderal T
lu membe
gas me
tiga pe
lam kasus
tivis proc
waktu
Prabo
jabatan
ABRI, M
kan da
irjen A
bebas
sebagai D



Letjen Prabowo (tengah) ketika memperkenalkan Mayjen Muchdi kepada Presiden Soeharto, 2 April 1998.

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☑ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

TEGUH INDRA/REP



MENGADU: Sejumlah keluarga korban penculikan dengan membawa foto - foto keluarga mereka yang sampai saat ini belum diketahui keberadaanya, kemarin mendatangi Mabes TNI AD Jakarta. Pengaduan mereka diterima pihak Mabes AD melalui dialog dengan Aspam KASAD Mayjen TNI Noor Aman.



DIGUGAT: Letjen (Pum) Prabowo Subianto dalam waktu dekat akan digugat korban penculikan.

ELSA

Media:

- ☐ BISN
- ☐ JAKA
- ☐ JAW
- ☐ KOM
- ☐ KD.
- ☐ MED

"La

JAKAR
dap tiga per
hilang men
dan Ketua U

Menuru
kan penega
masi, seyo
Sebab, bila
berarti mar
suatu tindak

"Hanya
dimahmilka
prerogatif P
akan memb
mempunya
tuntut," kat
kemarin.

Sebagai
Kopassus L
hentikan d

Media Indonesia, 26 Agustus 1998

Sanksi Untuk Prabowo Sangat Ringan



■ **DEMO UNTUK PRABOWO**: Ketika rekan-rekan mereka sedang "bertempur" di Palu, Sulawesi Tengah, kemarin, di Jakarta, warga Banteng yang tergabung dalam Komite Pendukung Megawati ini mendemo Dephankam. Mereka menuntut Prabowo Subianto diseret ke Mahkamah Militer. ■ MEDIA/AGUS MULYAWAN

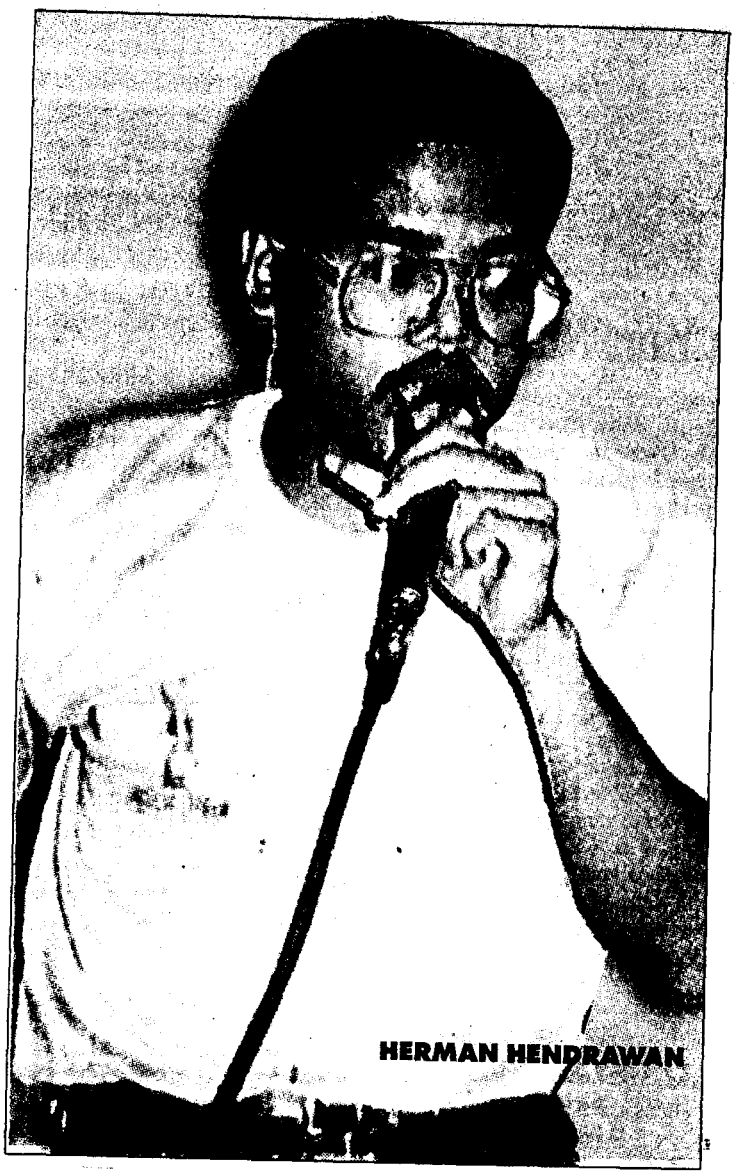
BISNIS INDO
JAKARTA PO
JAWA POS
KOMPAS
KD. RAKYAT
MEDIA INDO





Pembaruan/Charles Ulag/AP

DIPERIKSA – Mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto (foto kanan) berjalan meninggalkan mobil menuju gedung Markas Besar TNI-AD (Mabesad) untuk menjalankan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Senin (10/8) pagi. Foto kiri, siang harinya puluhan anggota masyarakat berkumpul di pagar Mabesad menyaksikan keterangan pers yang diberikan Kasad Jenderal TNI Subagyo HS di halaman Mabesad di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.


HERMAN HENDRAWAN

Hal. 1/ .....
Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1999
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Kontras Sinyalir Polisi Tekan Saksi Kasus Mayat di Lampung

JAKARTA — Koordinator Kontras Munir mensinyalir adanya tekanan aparat kepolisian terhadap para saksi kasus penemuan mayat di Lampung. Pasalnya, hingga ini para saksi kasus penemuan mayat di Lampung satu persatu mulai mencabut diri sebagai saksi, bahkan salah seorang saksi sempat diperiksa dan statusnya menjadi tersangka.

"Kita melihat ada langkah-langkah polisi di sana (Lampung —Red) tidak memberikan ruang dalam upaya penyelidikan mayat-mayat tersebut. Tapi polisi malah membuat para saksi ketakutan, bahkan saksi kini justru diperiksa dan sempat akan dijadikan tersangka," ungkap Koorditor Kontras Munir SH kepada pers kemarin.

Tapi, setelah Kontras melakukan protes, barulah status saksi tersebut diubah kembali. Melihat keberadaan itu, kata Munir, penyelidikan Kontras jelas menjadi terhambat. Sebelumnya Kontras berharap dengan masuknya polisi dalam kasus penemuan mayat di Lampung akan memperoleh titik terang, tapi malah sebaliknya menimbulkan hambatan.

Meski demikian, menurut Munir, walaupun tim kerja di lapangan mendapat hambatan, Kontras akan terus melakukan penelitian. Bahkan, ujarnya, Kontras akan melakukan penelusuran ke sungai-sungai sampai belasan mayat yang dicurigai sebagai aktivis korban penculikan itu ditemukan.

Sementara itu tiga kerangka mayat laki-laki yang ditemukan di Kepulauan Seribu, diduga keras bukan termasuk salah satu dari 14 aktivis korban penculikan yang hingga kini belum jelas keberadaannya. Hal ini diketahui dari keterangan keluarga korban yang melihat langsung ke kamar mayat RSCM, kemarin pagi.

Keluarga korban penculikan yang mendatangi kamar mayat RSCM yaitu keluarga Noval Alkatiri, Ucok Munandar, Herman Hermawan, Yadin Muhidin, dan Hendra Hambali. Sedangkan keluarga Dedi Hamdun, Yani Afri, dan M Yusuf tidak tampak.

"Saya yakin itu bukan kerangka kakak saya (Noval Alkatiri). Mamah juga merasa demikian," ungkap Eri adik kandung Noval Alkatiri kepada *Republika*. Menurut Eri yang mendampingi ibunya ke RSCM, dari ketiga kerangka yang dilihatnya tidak ada satu pun mirip dengan Noval. Terutama dari barisan gigi depan dan pakaian yang masih melekat di kerangka mayat.

Gigi Noval rata (rapi) dan bentuknya kecil-kecil, ujarnya. Sedangkan ketika pergi, Noval hanya mengenakan kaos oblong putih, celana jeans, dan sandal kulit. Semua ciri tersebut tak terlihat di kerangka ketiga mayat yang ditemukan pertengahan Mei lalu.

Menurut Munir keluarga korban yang hadir ke RSCM semua telah membantah bahwa dari ketiga kerangka mayat yang ditemukan tidak ada satu pun yang mirip dengan anggota keluarga yang hilang. Maka langkah selanjutnya, kata Munir, tinggal menunggu hasil cek penyamaan fisik ketika kondisi korban masih hidup dengan hasil tim forensik. Setelah itu baru bisa diketahui hasilnya.

Munir belum bisa memastikan apakah ketiga kerangka itu korban penculikan atau bukan. Tapi jika keluarganya membantah, ujarnya, bisa jadi kerangka tersebut tidak terkait dengan hilangnya para aktivis. Apalagi tim dokter forensik FKUI-RSCM tidak menemukan adanya bekas-bekas kekerasan.

Maka metoda selanjutnya yang ditawarkan tim dokter forensik FKUI-RSCM kepada Kontras, yaitu dari foto dua dimensi kemudian hasilnya digambar melalui model scan komputer, sehingga menghasilkan gambar tiga dimensi.

Sedangkan tahap akhir, tim dokter forensik FKUI-RSCM yang terdiri dari dr Herkutanto, dr Zulhasmar Syamsu, dr Abdul Mun'im Idries, dr Djaja Surja, dr Sidhi, dr Tjejep, mulai mengarah pada pengujian darah DNA.

■ vie

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Danpuspom ABRI, Mayjen TNI Syamsu Djalal ✓

Jangan Kaitkan Mayat Di Pulau Untung Jawa Dengan Penculikan

Jakarta, 6 Agustus

Tiga mayat yang ditemukan di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, pertengahan Mei lalu, belum dapat dipastikan identitasnya. Ketiga mayat yang dilaporkan penduduk ke Puspom ABRI pada 30 Juli lalu itu, saat ini tengah diautopsi di RSCM untuk mengetahui indentitasnya.

Menurut Danpuspom ABRI, Mayjen TNI Syamsu Djalal, autopsi terhadap kerangka ini dilakukan sebagai bagian dalam mengungkapkan hilangnya sejumlah aktivis. Namun, ia meminta agar penemuan mayat ini tidak dikait-kaitkan dengan 14 korban penculikan yang belum jelas keberadaannya.

"Jangan dikait-kaitkan, apalagi menduga-duga bahwa mayat tersebut adalah tiga orang di antara mereka," kata Mayjen Syamsu kepada wartawan Rabu (5/8) di Jakarta.

Dijelaskan, pihaknya segera menindaklanjuti laporan pendu-duk dengan memberangkatkan tim ke lokasi penemuan mayat Minggu (2/8). Tim yang terdiri dari 15 orang ini dipimpin oleh Kolonel CPM Sudirman Panigoro, disertai oleh 4 orang dari forensik RSCM yang diketuai dr Zulharman Syamsu.

Mayat yang telah menjadi kerangka tersebut ditemukan terkubur di pantai dekat dermaga di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Ketiga mayat tak dikenal itu, Selasa (4/8) langsung dibawa ke RSCM Jakarta untuk diautopsi.

Syamsu menyatakan, pihaknya harus berhati-hati dalam mengungkapkan ketiga mayat tersebut. Ia belajar dari kasus Herman Hendrawan yang dilaporkan berada di Davao, Filipina, namun ternyata bukan Herman yang saat ini dicari, korban penculikan.

Sementara itu, Kol CPM Sudirman Panigoro mengatakan, mayat yang ditemukan penduduk mengambang di laut tanggal 17 Mei lalu itu, pada hari yang sama dilaporkan ke Kepolisian setempat dan dikuburkan. Saat kuburannya digali, ketiga kerangka yang ditutupi terpal itu ada yang masih memiliki rambut dan mengenakan pakaian yang sudah tidak jelas bentuknya.

Diperiksa

Ketiga kerangka itu hari ini diperiksa dokter Forensik RSCM FKUI. Ahli forensik, dr Zulhasmar Syamsu, yang dihubungi *Pembaruan* Kamis pagi membenarkan bahwa hari ini ketiga mayat tak dikenal tersebut diperiksa secara tim. Mayatnya diperiksa secara tim, minimal dua dokter forensik, bisa juga nanti bersama dr Budi Sampurna (dokter forensik yang menangani kasus penemuan mayat tak dikenal di Lampung), katanya.

Pemeriksaan tersebut, menurut Zulhasmar, meliputi pemeriksaan guna mengetahui ciri-ciri korban sejauh yang bisa diidentifikasi, antara lain golongan darah dan ciri lain seperti tinggi badan, rambut dan sebagainya.

Ketiga mayat diperkirakan berusia sekitar 25 tahun ke atas dan berjenis kelamin lelaki. Pada mayat yang digali Selasa (4/8) sekitar pukul 14.00 tersebut ditemukan pula barang-barang yang diduga milik korban antara lain pakaian dan jam tangan.

Seorang petugas forensik yang ikut dalam penggalian mengatakan, pakaian korban yang diketahui adalah celana jeans dan sebuah celana pendek dengan warna yang sudah kusam.

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☑ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☑ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Puspom ABRI Temukan Tiga Mayat di Kepulauan Seribu

* Di Lampung Makam Dibongkar

Jakarta, Kompas

Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI, Mayjen TNI Syamsu Djalaludin mengatakan, tim penyidik dari Puspom telah menemukan tiga mayat tak dikenal di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, sebelah utara Jakarta. Ketiga mayat tersebut kini masih dalam pemeriksaan Puspom bersama tim dokter forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Hal itu diungkapkan Syamsu kepada pers di Markas Puspom ABRI Jakarta, Rabu (5/8). Diungkapkan, Puspom ABRI menerima laporan adanya penemuan mayat tak dikenal dari masyarakat setempat tanggal 30 Juli 1998. Berdasarkan laporan itu, Puspom langsung menindaklanjuti dengan mengirim 15 penyidik pada 2 Agustus 1998 bersama tim dokter forensik dari RSCM.

Ditambahkan, masyarakat menemukan mayat tak dikenal itu pada tanggal 17 Mei 1998 dan langsung dikuburkan oleh masyarakat. "Di sana ada kebiasaan, kalau bukan warga dari kepulauan sana, jenazah langsung dikuburkan dan tidak diumumkan," kata Syamsu.

Ia meminta, penemuan mayat di Kepulauan Seribu ini jangan dikaitkan langsung dengan penemuan mayat di Lampung. "Kesimpulan sementara belum ada. Belum waktunya. Kalau sudah, saya panggil," katanya. Namun Syamsu juga mengingatkan, jika ditemukan mayat yang identitasnya tidak jelas segera melapor kepada aparat kepolisian.

Menurut salah satu anggota tim RSCM, dua mayat pria tidak dikenal ditemukan di pantai Pulau Untung Jawa, 17 Mei 1998. Sementara satu mayat lainnya ditemukan di pantai Pulau Rambut yang terletak di sebelah barat Pulau Untung Jawa. Oleh warga, ketiga mayat tersebut kemudian dimakamkan bersamaan dalam sebuah makam di Pulau Untung Jawa.

Ditemukan harmonika

Salah seorang dokter tim forensik RSCM, dr Zulhasmar Syamsu ketika dihubungi *Kompas* Rabu malam, mengatakan, penggalian tiga mayat yang ditemukan di Pulau Untung Jawa, dilakukan 4 Agustus 1998 pukul 14.00 WIB bersama masyarakat dan aparat keamanan.

Menurut Zulhasmar, ciri-ciri ketiga mayat tersebut berkelamin laki-laki dan berusia di atas 25 tahun. Dari ketiga mayat yang ditemukan, ada yang tidak berpakaian, berpakaian celana *jeans* biru, dan satu mayat yang bercelana panjang cokelat dan celana pendek biru. Selain itu, ditemukan juga dua jam tangan, dua dompet berwarna cokelat dan biru, dan sebuah harmonika kecil warna merah pada kantung celana pada salah satu mayat.

Barang-barang yang ditemukan bagian forensik RSCM tersebut kemudian dibawa seorang perwira Puspom ABRI, Letnan Satu CPM Kemas Achmad Yani, Rabu kemarin sekitar pukul 13.00 WIB, ke Puspom ABRI.

Zulhasmar menjelaskan, identifikasi mayat akan dilakukan secara lebih detil hari Kamis (6/8) ini untuk melihat apakah ada tanda-tanda bekas penganiayaan. "Identifikasi akan dilihat melalui tulang karena dari jaringan lunak sudah agak sulit," tegasnya. Menurut dia, identifikasi secara detil itu meliputi tengkorak, gigi, dan bagian tubuh penting seperti tangan dan kaki.

Sudah mengetahui

Sementara itu, Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir mengatakan, penemuan mayat di Kepulauan Seribu tersebut sudah diterima Kontras sekitar sebulan lalu dari masyarakat. Namun Kontras belum menelusurinya, karena tidak menemukan kejelasan informasi dan lokasi.

Kontras, lanjut Munir, juga sudah mencek ke RSCM dan menemukan beberapa barang, seperti jam tangan dan dompet yang akan dikonsultasikan kepada para keluarga korban kasus orang hilang yang belum kembali. Sehubungan itu, lanjutnya, Puspom ABRI diharapkan mampu mengidentifikasi ketiga mayat tersebut sebaik mungkin, sehingga bisa dijelaskan apakah ketiganya ada kaitannya dengan kasus penculikan.

Dibongkar

Sementara itu dari Bandarlampung dilaporkan, Tim dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemarin membongkar kuburan tak dikenal di tepi Way (Sungai) Umpu, Desa Blambangan Umpu (230 km dari Bandarlampung). Hasil otopsi menunjukkan mayat berjenis kelamin pria, umur antara 23-30 tahun, dengan tinggi berkisar 155 - 160 cm.

Kuburan digali pukul 10.55 WIB oleh enam warga setempat, disaksikan lebih 150 warga desa setempat. Pada pukul 11.14 WIB mayat berhasil diangkat dan langsung diotopsi di sisi kuburan oleh dr Budi Sampurna dari FK UI dan Letkol (Pol) Slamet Poernomo SPF, pakar forensik dari Puslabfor Mabes Polri.

Setelah melakukan otopsi pada pukul 12.20 WIB, Slamet Poernomo kepada wartawan mengatakan, pihaknya untuk sementara hanya bisa mengenali beberapa ciri fisik. "Jenis kelaminnya pria, usia berkisar 23-30 tahun dan tinggi antara 155 - 160 cm," katanya.

Kedua ahli forensik itu juga menyebutkan, bahwa rahang bawah mayat tersebut tidak ditemukan di dalam kuburan. Tujuh gigi pada rahang atas depan telah rontok dan [illegible] ketahui pasti penyebab kerontokan itu. Gigi geraham kanan atas belakang berlubang, diduga kuat akibat sakit gigi sejak lama.

"Sedang karang gigi terlihat melingkar hitam di sekitar masing-masing delapan biji gigi yang ada. Kami belum menemukan fakta lain, tetapi kami akan terus mengembangkan pemeriksaan laboratoris di Jakarta," kata Slamet.

Demi pemeriksaan lebih lanjut, seperti untuk mengetahui DNA atau golongan darah serta fakta lain, tim membawa sepotong tulang rusuk dan sepotong gigi ke Jakarta. "Kami belum dapat memastikan apakah ada tanda-tanda penganiayaan atau tidak," kata Slamet.

Mayat yang dibongkar dari kuburnya ini 18 Juli lalu ditemukan terapung di Way Umpu oleh Supri, warga Desa Blambangan Umpu. Pada tanggal yang sama, Supri dibantu beberapa warga sekitar menguburkan mayat itu di tepi sungai.

Mayat-mayat

Penemuan mayat di Lampung itu menggemparkan terutama karena sebelumnya diinformasikan bahwa warga setempat menemukan 14 mayat terapung di sungai yang sama. Tim pencari fakta dari Polda Lampung menyatakan bahwa penemuan 14 mayat itu hanyalah *rumor* belaka. Diakui hanya ada satu mayat, yang Rabu kemarin diotopsi tim dari Jakarta.

Sementara itu, laporan penemuan mayat yang semula dianggap *rumor*, akhirnya menjadi fakta baru setelah dua orang warga, masing-masing Iberahim dan Tohir melaporkan bahwa mereka sempat melihat dan memegang mayat yang mengapung di Way Umpu pada 6 Juli. Mereka tidak menguburkan mayat itu, tetapi langsung mendorongnya ke tengah arus sungai.

"Mayat itu berjenis kelamin pria, memakai kaos putih dan celana dalam warna cokelat," kata Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Lampung Utara, Letkol (Pol) PL Tobing [illegible]

Kelas: .....

LSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

dia:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Puspom ABRI Teliti Tiga Mayat tak Dikenal

JAKARTA (Media): Masyarakat Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara telah menemukan tiga mayat laki-laki tidak dikenal yang diduga sebagian dari aktivis yang hilang yang sampai sekarang belum kembali. Mayat-mayat tersebut ditemukan sekitar dua bulan lalu.

Dokter Zulhasmar Syamsu, ahli forensik RSCM Jakarta menuturkan hal tersebut kepada pers kemarin di Jakarta seusai bersama tim Puspom ABRI meneliti ketiga mayat tersebut.

Menurut dr Zulhasmar, masyarakat menemukan mayat tersebut tepatnya pada 17 Mei 1998. Saat hendak memancing, mereka melihat gundukan pasir kemudian membongkarnya. Ketika digali, ditemukan tiga mayat terbungkus terpal berwarna cokelat. Penemuan itu dilaporkan ke lurah setempat kemudian diteruskan ke Polsek Pulau Seribu.

Tidak ada keluarga di kawasan Pulau Seribu yang melaporkan kehilangan sanak keluarga. Penemuan mayat tersebut dilaporkan ke Puspom ABRI pada 30 Juli. Berbekal laporan tersebut Puspom ABRI membentuk tim dengan beranggotakan 15 orang dari Puspom dan empat dari dokter forensik. Tim tersebut datang ke Pulau Untung Jawa menyamar sebagai turis.

Pada 04 Agustus ada kepastian mengenai kebenaran adanya tiga mayat tersebut. Sore itu juga kuburan tersebut langsung digali dan tiga mayat itu diangkat kembali. Dari hasil penggalian tersebut ditemukan juga dompet, jam tangan, serta harmonika. Namun pihak Puspom ABRI belum dapat memastikan identitas korban.

Hasil visum sementara memperkirakan ketiga mayat tersebut berusia sekitar 28 tahun dan dilihat dari proses pembusukannya ketiga mayat tersebut telah dikubur antara dua atau tiga bulan.

Sementara itu koordinator Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir mengatakan, pihaknya telah pula mengidentifikasi ketiga mayat tersebut namun karena kondisi fisik mayat tersebut sulit dikenali maka pihaknya belum dapat memastikan identitas korban.

"Kami telah menghubungi para keluarga aktivis yang merasa kehilangan anggotanya. Orang tua Noval telah melihat langsung ketiga mayat itu, namun mereka tidak dapat mengenali mayat tanpa identitas itu mengingat kondisinya sudah rusak," ujar Munir. Dia menambahkan pihaknya akan terus mengusut hingga tuntas ketiga mayat tersebut.

Siap bertemu

Sementara itu korban penculikan Hendrik Sirait menyatakan siap bertemu Danpuspom ABRI Mayjen TNI Syamsu dalam waktu dekat.

"Kalau kepentingannya untuk pengusutan atas kasus penculikan, Hendrik siap untuk bertemu Danpuspom," ujar Direktur Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Hendardi selaku kuasa hukum Hendrik Sirait ketika dihubungi *Media* di kantornya, kemarin. Sebelumnya Hendrik menceritakan tentang kasus penculikan dirinya yang melibatkan oknum-oknum Kodam Jaya.

Hendardi mengakui kasus penculikan yang melibatkan oknum ABRI ini harus diselesaikan melalui jalur polisi militer sebagai lembaga yang berwenang dalam proses hukumnya.

"Kita tidak keberatan untuk datang memenuhi undangan Danpuspom dan mengungkap kasus ini secara tuntas agar oknum-oknum Kodam Jaya yang terlibat dapat ditindak," tegasnya.

Sehari sebelumnya Danpuspom Mayjen Syamsu meminta agar Hendrik Sirait yang mengaku telah diculik oknum Intel Kodam Jaya datang ke Puspom bersilaturahmi.

(Was/LK/Wdh/D-12)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA		1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA		2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA		3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA		4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN		5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Hasil Pemeriksaan Sementara

Tiga Mayat di Kepulauan Seribu dari Ras Mongoloid

Jakarta, Kompas

Tim khusus yang dibentuk Bagian Forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Kamis (6/8), mulai memeriksa ketiga mayat tak dikenal yang diambil dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui identitas, penyebab kematian dan lama kematian. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tiga jenazah itu adalah dari ras Mongoloid, berusia 20-23 tahun (dua jenazah) dan satu lagi berusia 23-27 tahun.

Ketua tim, dr Herkutanto, Spf SH kepada pers, Kamis (6/8), di Jakarta menjelaskan ras Mongoloid merupakan ciri orang Asia pada umumnya, bisa berasal dari etnik Cina, Melayu atau bangsa di Asia lainnya. Hal tersebut dapat diketahui dengan meneliti ukuran tengkorak dan struktur kerangka. "Kami belum sampai mengetahui subetnis lebih rinci jenazah," kata Herkutanto.

Tim khusus yang dibentuk RSCM tersebut bersifat tidak berpihak dan untuk kepentingan umum. Para dokter yang tergabung dalam tim tersebut terdiri dari Abdul Mun'im Idries, Djaja Surya Atmadja, Sidhi, Zulhasmar Syamsu, Tjejep DS, Darby Tombokan, dan Andreas AE Lala.

Sementara Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) ABRI Mayjen TNI Syamsu Djaladin mengatakan, pihaknya akan terus menyelidiki apakah penemuan tiga mayat di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, itu ada kaitannya dengan korban penculikan. Untuk itu, Puspom akan mencari keterangan dari para saksi lebih lanjut dan minta bantuan tim forensik RSCM untuk melakukan pemeriksaan dan identifikasi, termasuk pemeriksaan DNA.

Dijelaskan, Puspom ABRI memiliki kewajiban untuk mencari aktivis yang masih hilang. Ketika ditanya apakah usaha Puspom ABRI meneliti mayat tak dikenal tersebut ada kaitannya dengan kesaksian para tersangka kasus penculikan, Syamsu mengatakan, hasil pemeriksaan terhadap para tersangka merupakan konsumsi untuk pemeriksaan, bukan untuk media massa.

Pemeriksaan visual

Pemeriksaan visual dari tim dokter menunjukkan jenazah pertama berasal dari pria berusia 20-23 tahun dan memiliki tinggi badan 160-165 cm. Jenazah mengenakan kaos lengan pendek putih berkerah hijau merah dengan merek "Karen", celana dalam pola jaring-jaring biru tua merek "Sony", celana jeans yang warna tidak lagi dikenali karena telah menghitam.

Kerangka kedua memiliki tinggi badan 165-170 cm dengan usia 23-27 tahun. Celana pendek jenazah yang telah compang-camping bermerek "Bossini" dan ditemukan pula potongan celana bermerek "Gionina" ukuran 28 serta karet pinggang yang diduga dari celana dalam merek "Kimtong". Sementara kerangka ketiga dengan tinggi badan 155-160 cm berusia 20-23 tahun. Pada jenazah ditemukan celana pendek yang telah compang-camping berwarna cokelat muda.

Untuk menentukan identitas jenazah, selanjutnya tim forensik akan memeriksa golongan darah, melakukan Chepalometri, dan jika diperlukan, untuk penentuan final akan dilakukan pemeriksaan struktur DNA (*Deoxyribonucleic Acid*). Chepalometri merupakan metode membandingkan data dari ukuran kepala jenazah. Tim forensik akan memfoto tengkorak jenazah dan membandingkannya dengan foto dari para korban penculikan.

Sementara itu, Munir, Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) setelah bertemu dengan tim forensik RSCM, mengatakan, pihaknya akan memberikan data dari pihak korban penculikan yang belum kembali kepada tim forensik RSCM agar dapat dicocokkan dengan hasil identifikasi mayat. Data yang akan disampaikan tersebut mencakup foto, *medical record*, dan data-data lainnya, seperti tinggi dan berat badan serta tanda-tanda khusus foto mereka.

Nipam

Sementara itu Lurah Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara Haman Sudjana menuturkan kepada *Kompas* Kamis, ketiga mayat itu ditemukan di Pulau Rambut. Pulau Rambut tidak dihuni manusia karena pulau di sebelah barat Pulau Untung Jawa itu selama ini ditetapkan menjadi cagar alam. "Ular berbisa banyak sekali di situ," kata Haman Sudjana.

Satu di antara mayat itu ditemukan patroli Kamla (Keamanan Laut) dalam keadaan terapung di sebelah barat pulau itu, tanggal 17 Mei sekitar pukul 11.05 WIB. Oleh petugas Kamla, mayat tersebut dibawa ke Pulau Untung.

Sekitar pukul 11.30 WIB pada hari yang sama, warga melaporkan menemukan dua mayat terdampar di pantai timur Pulau Rambut. Kedua mayat itu juga dibawa ke Pulau Untung. Ciri-ciri, keduanya jenis kelamin laki-laki. Salah satu mengenakan celana pendek warna abu-abu tanpa baju. Mayat kedua, mengenakan kaos warna putih celana jins warna biru. Masing-masing mengenakan cincin warna putih di ibu jari kanan.

Setelah diperiksa dengan cermat oleh aparat keamanan Pulau Untung Jawa, maka dari ketiga mayat itu ditemukan sejumlah barang yang kemudian dibungkus dalam satu plastik dan ikut ditanam bersama ketiga mayat tersebut. Yakni, tiga buah jam tangan kecil. "Seperti yang lumrah dipakai wanita," kata Haman Sudjana.

Barang lainnya, obat nipam setengah strip, lampu mainan anak kecil dan satu mantel nujan warna kuning. Ketiga mayat itu kemudian dikuburkan dalam satu lubang besar di tepi pantai, sebelah selatan Pulau Untung Jawa.

Temuan dan semua upaya yang sudah dilakukan aparat kelurahan terhadap ketiga mayat tersebut langsung dilaporkan ke atasan masing-masing. Lurah melapor ke kecamatan, polisi ke Perwakilan Polsek Kepulauan Seribu di Cilincing, Jakarta Utara. "Jadi, setelah dua setengah bulan baru ada perhatian dari Jakarta," kata Haman Sudjana.

Menjawab pertanyaan, Haman Sudjana mengatakan tidak ditemukan identitas apa pun bersama ketiga mayat tersebut. "Kondisinya sudah membengkak, sehingga sudah sulit dikenali," tambahnya.

Apakah mungkin ketiganya mayat nelayan?

"Bisa saja, hanya selama ini tak ada warga Kepulauan Seribu yang melaporkan ada nelayan tidak pulang dari laut," kata Haman Sudjana.

(bb/nn//msh/ssd/lom)

Hal. 1/ .....
Kelas: .....

LSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

dia:			Tanggal	Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Tiga Mayat Misterius Berkelamin Laki-Laki

Belum Bisa Dipastikan Korban Penculikan Aktivis

Jakarta, JP.-

Benarkah tiga kerangka manusia yang ditemukan di Kepulauan Seribu adalah korban penculikan aktivis yang sampai kini belum kembali? Belum ada jawaban pasti. Tim Forensik FK UI baru berhasil mengidentifikasi bahwa mayat tersebut berkelamim laki-laki dan berusia 20 hingga 27 tahun.

"Dari identifikasi awal yang dilakukan pada tulang panggul dan tengkorak ketiga kerangka, dapat diketahui jenis kelamin ketiganya adalah laki-laki. Dari gigi geligi, kami dapat mengidentifikasi usianya," ujar Ketua Tim Forensik FK UI Dr Herkutanto SpF SH setelah melakukan identifikasi awal, kemarin siang.

Lebih rinci lagi, dia juga menjelaskan perbedaan usia ketiga jenazah yang diketahui memiliki ras Mongoloid itu. Pada jenazah pertama, usianya berkisar 20 hingga 23 tahun, jenazah kedua berkisar 23 hingga 27 tahun, dan jenazah ketiga berkisar 20 hingga 23 tahun.

Tentang tinggi badan, kerangka kedua menjadi kerangka yang paling tinggi daripada dua kerangka lain, yaitu berkisar 165 hingga 170 sentimeter.

"Tinggi kerangka pertama berkisar 160 sampai 165 sentimeter. Sedangkan kerangka ketiga adalah kerangka yang paling pendek. Tingginya hanya sekitar 155 sampai 160 sentimeter," ujar Dr Herkutanto.

Tim Forensik juga melakukan identifikasi visual terhadap sisa-sisa pakaian yang masih tertinggal saat ketiga kerangka ditemukan. Hasilnya akan menjadi bahan perbandingan, barangkali ada keluarga korban penculikan yang mengenali sebagai milik salah satu korban yang belum kembali.

Dari identifikasi visual ini, diketahui jenazah pertama mengenakan kaus lengan pendek dengan kerah berwarna hijau merah, bermerek *Karen*. Dia juga mengenakan celana dalam biru tua terbuat dari bahan kaus berjaring-jaring dengan merek *Sony*.

"Dari jenazah pertama ini, kami juga menemukan potongan-potongan celana jins yang telah hancur. Diperkirakan jins yang dikenakannya bukan berwarna biru, tapi berwarna gelap atau hitam dan sudah bercampur dengan lumpur," ujarnya.

Dari kerangka kedua, diperoleh celana pendek yang sudah compang-camping bermerek *Bossini*, potongan celana dengan ukuran 28 bermerek *Gionino L'Uomo*, dan karet celana bermerek *Kim Tong*.

"Sementara, pada kerangka ketiga, hanya ditemukan celana pendek compang-camping yang terbuat dari bahan *drill* berwarna cokelat muda, tanpa merek," ujar Dr Herkutanto, menjelaskan.

Menurut dia, pemeriksaan *chepalometri* (pengukuran kepala) mungkin juga akan dilakukan setelah diperoleh data pembanding dari keluarga korban, seperti foto wajah para *korban*.

Secara teknis, ketiga kerangka ini berhasil dievakuasi pada 5 Agustus lalu dan tiba di RSCM sekitar pukul 17.00. Tim forensik yang diketuai Dr Herkutanto ini beranggota empat dokter ahli forensik dari FK UI, antara lain Dr Abdul Mun'im Idries SpF dan ahli biologi molekuler/DNA Dr Djaja Surya Atmadja SpF PhD. Mereka langsung menyemayamkan ketiganya di RSCM.

"Tim ini terbentuk secara otomatis, bukan atas permintaan Puspom ABRI," katanya.

Menurut Dr Herkutanto, pemeriksaan forensik akan dilakukan dalam dua tahap, yaitu mengidentifikasi apakah benar kerangka itu kerangka manusia dan mengidentifikasi penyebab kematian, saat kematian, dan kemungkinan adanya tindak kekerasan yang dilakukan pada jenazah.

"Dalam proses autopsi, hanya keluarga korban yang kami izinkan melihat dan mendampingi kami. Sebab, para keluarga korbanlah yang dapat benar-benar mengenali ciri-ciri yang mungkin ditemukan pada kerangka itu," ujar Dr Mun'im Idris SpF yang juga menjadi anggota inti tim pengusutan kerangka misterius itu.**(mik)**



Anggota Kontras Heappy Hendrawan (kanan) saat mengidentifikasi jenazah tak dikenal di RSCM kemarin.

LSAM P
L
T

edia:

BISNIS INDO
JAKARTA P
JAWA POS
KOMPAS
KD. RAKYA
MEDIA IND

Mu

Prabowo

Jakarta, JP.-
Sidang kedua
(DKP) kemarin
sebelumnya, me
Kopassus yang
bulan Mayjen
terhadap Mucho
09.00–14.10 WI
Mabesad, Jalan
Sidang itu dip
TNI Subagyo H
lain juga hadir.
Letjen TNI Sus
ABRI Letjen TN
Letjen TNI Yusu
hanas Letjen T
Letjen TNI D.
Laksdya Sucip
Yang menarik
selesai, tiba-til

yang tidak dij
hadir. Prabowo
dengan meng
101 warna hij
Penampilan
ini sudah bert
dinyatakan
penculikan p
Mabesad tar
militer juga
Yang masih
bintang di p
Prabowo n
menuju ter
yang meny
tampak sig
mempersil
lain hanya
Entah ap
DKP ini.

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Keluarga Korban Penculikan tak Kenali Mayat

Jakarta, Kompas

Lima anggota keluarga korban penculikan tidak dapat mengenali tiga mayat yang ditemukan di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, di utara Jakarta. Oleh karena itu, tim Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) masih menunggu hasil identifikasi lebih rinci dari tim forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Demikian dikatakan Koordinator Kontras Munir kepada pers menanggapi perkembangan pemeriksaan tim forensik RSCM dan kunjungan keluarga korban ke RSCM, Jumat (7/8). Kelima anggota keluarga yang berkunjung ke RSCM, Jumat siang adalah keluarga Noval Alkatiri, Herman Hendrawan, Yadin Muhidin, Ucok Munandar Siahaan, dan Hendra Hambali.

Munir mengatakan, dari keluarga yang hadir, mereka sudah tidak dapat mengenali fisik mayat dan pakaian yang ada. "Jadi, bisa saja mayat ini tidak terkait dengan kasus penculikan, atau memang perlu identifikasi lebih jauh dan rinci," katanya. Oleh karena itu, pihak Kontras masih menunggu hasil penyamaan informasi dari data yang diajukan Kontras dan keluarga Korban tentang kondisi mereka dengan identifikasi tim forensik.

Sementara Kepala Bagian Forensik RSCM/UI Dr Budi Sampurna seperti dikutip *Antara* mengemukakan, hasil pemeriksaan sementara Tim Forensik RSCM terhadap tiga mayat tak dikenal yang ditemukan di Kepulauan Seribu, menunjukkan, tidak adanya unsur penganiayaan pada tiga jenazah itu. "Tim forensik RSCM yang memeriksa tulang ketiga mayat itu tidak menemukan adanya unsur penganiayaan," katanya.

Identifikasi visual

Sementara itu, Ketua tim Forensik RSCM dr Herkutanto yang dihubungi *Kompas* Jumat malam mengatakan, pada waktu anggota keluarga korban melihat ketiga mayat tersebut, diterapkan identifikasi visual langsung. Artinya, keluarga korban langsung melihat tengkorak dan pakaian saja dan kemudian menentukan apakah mayat tersebut merupakan anggota keluarganya. "Jawabannya hanya ya atau tidak," katanya sambil menambahkan, keputusan tersebut tidak bersifat konklusif.

Herkutanto menjelaskan, tim forensik sedang menjalankan pemeriksaan gigi untuk melihat kelengkapan dan struktur gigi. Dari pemeriksaan dapat juga diketahui kebiasaan korban pada waktu masih hidup misalnya kebiasaan merokok.

Menurut Herkutanto, tim forensik lebih diperluas dengan mengikutsertakan tim dari Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Indonesia. Ia menilai, data yang diberikan anggota korban yang hilang akan membantu identifikasi mayat tersebut.

Ia menambahkan, foto-foto yang sangat membantu itu tidak hanya dari foto wajah, melainkan juga foto korban yang hilang dari segala sisi, misalnya dari samping. Foto tersebut dapat juga membantu tim forensik untuk merekonstruksi mayat yang ditemukan dan membuat perbandingan.

Saksi takut

Sementara sehubungan dengan kasus penemuan 14 mayat di Sungai Way Umpu, Lampung Utara, Munir mengungkapkan, para saksi yang melihat mayat merasa takut untuk memberikan keterangan setelah polisi memeriksa tempat tersebut. "Kontras melihat langkah polisi yang dilakukan di sana tidak memberi ruang bagi upaya penyelidikan kasus mayat tersebut," katanya seraya menambahkan para saksi tersebut justru diperiksa dan sempat distatuskan sebagai tersangka.

Dijelaskannya, setelah diprotes baru ada perubahan tindakan aparat terhadap para saksi. Menurut Munir, bagaimanapun sikap kepolisian tersebut menjadi persoalan bagi Kontras karena polisi di sana tidak menunjukkan suatu langkah yang akomodatif untuk menyelidiki keberadaan dan menyulitkan penyelidikan mayat tersebut. Kontras akan tetap meneliti dan menelusuri sungai sampai ditemukan mayat-mayat lain.

Tetap menolak

Sementara aktivis mahasiswa korban penculikan, Andi Arief tetap menolak memenuhi panggilan kedua Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI. Ia baru memenuhi panggilan itu kalau sudah ada penjelasan dari Mabes ABRI tentang nasib 14 aktivis korban penculikan yang belum jelas keberadaannya.

Demikian Kepala Operasional Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung Iberahim Bastari, Jumat di Bandarlampung. Surat panggilan kedua Puspom ABRI itu ditandatangani Kolonel (CPM) Sudirman Panigoro dan disampaikan melalui Kontras, 3 Agustus 1998.

Andi dipanggil menghadap Komandan Puspom ABRI pada 5 Agustus, untuk menjadi saksi dalam kasus orang hilang. Ia baru akan memenuhi panggilan Puspom ABRI jika 14 aktivis korban penculikan lainnya dilepas.

Andi juga meminta Puspom ABRI tidak terlalu cepat mengajukan tersangka ke pengadilan. "Sebab tidak tertutup pula kemungkinan, korbannya ada yang sudah meninggal. Jika ada yang meninggal, maka perlu ada institusi atau person yang bertanggung jawab," kata Iberahim mengutip Andi Arief. **(bb/cal)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA		1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA		2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA		3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA		4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☑ SUARA PEMBARUAN		5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Penyebab Kematian Belum Diketahui

Jakarta, 8 Agustus

Pemeriksaan terhadap tiga mayat yang ditemukan di Pulau Untungjawa, Kepulauan Seribu tetap dilanjutkan kendati Jumat (7/8) siang, lima keluarga korban orang hilang tidak dapat mengidentifikasi tiga mayat itu.

Anggota tim forensik, dr Zulhasmar Syamsu kepada *Pembaruan* Sabtu (8/8) pagi mengatakan, penelitian untuk mengungkap identitas ketiga mayat akan dilakukan tuntas, artinya sampai data-data dari mayat tersebut secara maksimal dapat dicocokkan dengan data dari keluarga orang hilang.

Sementara itu, kelima keluarga korban orang hilang tidak mengenali ketiga mayat. Mereka yang datang ke RSCM, Jumat (7/8) siang adalah keluarga Noval Alkatiri, Yidin Muhidin, Hendra Hambali, Herman Hendrawan dan Ucok Siahaan.

Selain ciri-ciri yang sudah diidentifikasi dokter tim forensik, keluarga korban juga mencoba mengenali ketiga mayat dari barang yang ditemukan dalam penggalian.

Salah seorang ahli Forensik, dr Budi Sampurna mengatakan dalam pemeriksaan lanjutan, belum diketahui penyebab kematian ketiga mayat itu. Sedangkan ciri-ciri lain dari korban kedua diperkirakan berumur sekitar 25 hinga 35 th. Pada gigi kedelapan terdapat *caries* (gigi berlobang) dan gigi geraham bawah urutan ke 6 dan 7 tanggal atau rusak. Sedangkan pada korban ketiga gigi seri bagian atas tumpang tindih tidak rapi

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Untungjawa, Setelah Penemuan Tiga Mayat...

ADA perasaan takut menggapai warga setelah penemuan tiga mayat laki-laki muda di Pulau Rambut, yang kemudian dikebumikan dalam satu lubang besar di Pulau Untungjawa, Kecamatan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, pertengahan Mei lalu.

Mengapa? Bukankah mayat sudah dikubur dan ihwal mayat terdampar ke pantai sesungguhnya bukanlah sesuatu yang terlalu istimewa? "Betul," kata Lurah Pulau Untungjawa, Haman Sudjana saat ditemui *Kompas*, Kamis (6/8). Betul bahwa ihwal temuan sejenis bisa dibilang "risiko" sebuah pulau. Perahu nelayan atau pesiar yang dipukul badai dan tenggelam, sering menjadi malapetaka. Ada manusia yang tewas, dan mayatnya —suatu saat— pasti terdampar ke pantai.

Tetapi, lanjut Haman, penemuan tiga mayat — yang hingga akhir minggu pertama Agustus belum bisa diidentifikasi tim forensik RSCM, kecuali bahwa ketiga mayat itu dinyatakan tergolong ras Mongolid — terjadi 3-4 hari sesudah kerusuhan 13-15 Mei 1998 di Jakarta. "Tanggal 12 Mei malam, kita sudah melihat langit Jakarta merah oleh api. Itu berlanjut hingga 13 Mei," kata Haman, senada dengan sejumlah warga pulau yang sebagian besar adalah nelayan.

"Awalnya, kita *nggak* tahu apa yang terjadi. Malah kita duga, ada kebakaran," kata seorang warga. "Tetapi, malamnya kita nonton teve, dan dari situ baru kita tahu ada kerusuhan di Angke," tambahnya. Sejak itu pula setiap malam warga rajin berdiri di tepi pantai memperhatikan langit Jakarta.

"Tetapi, di pulau ini amanaman saja. Sepertinya kita tidak punya kaitan dengan kerusuhan itu," lanjut Haman. Baru setelah penemuan tiga mayat pada 17 Mei di Pulau Rambut terjadi perubahan. Muncul perasaan was-was, jangan-jangan imbas kerusuhan dan dampak ketakutan yang ditimbulkan pada warga DKI Jakarta, merasuk pula ke pulau. "Itu menimbulkan rasa takut pada warga," tutur Haman yang dibenarkan beberapa Hansip (pertahanan sipil) dan aparat keamanan Pos Polisi Pulau Untungjawa.

Malam-malam yang cerah diterangi bulan, selama ini tak pernah dilewatkan warga. Mereka bercengkerama di pantai atau di atas dermaga. Malam bersantai sekalian istirahat. Soalnya, bila bulan bersinar, nelayan tidak melaut. Justru, di saat bulan tak muncul, mereka berjuang di dalam kegelapan.

Tetapi, sejak penemuan tiga mayat itu, "Warga tak mau lagi melewatkan malam di luar rumah," kata Haman. Selepas mahgrib dan ketika mesin listrik disel mulai dihidupkan, warga sudah mengurung diri di rumah masing-masing. "Satu-satunya hiburan adalah teve," tambahnya.

***

PULAU Rambut tidak dihuni manusia karena pulau di sebelah barat Pulau Untungjawa itu selama ini ditetapkan menjadi cagar alam. Berbagai jenis binatang ada di situ. "Terutama ular berbisa, banyak sekali," kata Edi Bajauri, warga Pulau Untungjawa. Jarak terdekat Pulau Untungjawa yang dihuni 1.341 jiwa dan luasnya 42 hektar, adalah dari Tanjung Pasir, sekitar 10 mil laut. Tetapi, Pulau Untungjawa bisa juga dicapai dari Kamal dan Ancol.

Pada 17 Mei 1998, ditemukan tiga mayat di Pulau Rambut itu. Satu di antaranya oleh patroli Kamla (Keamanan Laut) dalam keadaan terapung di sebelah barat pulau itu, sekitar pukul 11.05 WIB. Petugas Kamla lalu membawanya ke Pulau Untungjawa. Ciri-cirinya, jenis kelamin laki-laki, mengenakan pakaian kaos warna putih, celana panjang hitam dirangkap celana pendek warna putih. "Yang mencolok, di kepalanya tidak ada sehelai rambut pun, alias plontos," kata seorang warga yang mengaku melihatnya dari jarak sangat dekat.

Sekitar pukul 11.30 WIB pada hari sama, warga melaporkan menemukan lagi dua mayat laki-laki, terdampar di pantai timur Pulau Rambut. Kedua mayat itu juga dibawa ke Pulau Untungjawa. Salah satunya mengenakan celana pendek warna abu-abu tanpa baju. Mayat kedua, mengenakan kaos warna putih, celana jins biru. Masing-masing mengenakan cincin warna putih di ibu jari kanan. Kepala masih ditumbuhi rambut.

Disaksikan warga, aparat kelurahan lalu memeriksa mayat secara seksama. Dari ketiga mayat itu ditemukan sejumlah barang yang kemudian disatukan dalam satu bungkusan plastik. Plastik itu dikuburkan bersama ketiga mayat. Isinya, kata Haman, tiga jam tangan kecil sejenis jam tangan perempuan. Lainnya, obat nipam setengah strip, lampu mainan anak kecil dan satu mantel hujan warna kuning. Usai pemeriksaan, aparat kelurahan memutuskan, ketiga mayat itu dikuburkan dalam satu lubang besar di tepi pantai. Lokasinya ditetapkan di tepi pantai yang menghadap ke selatan.

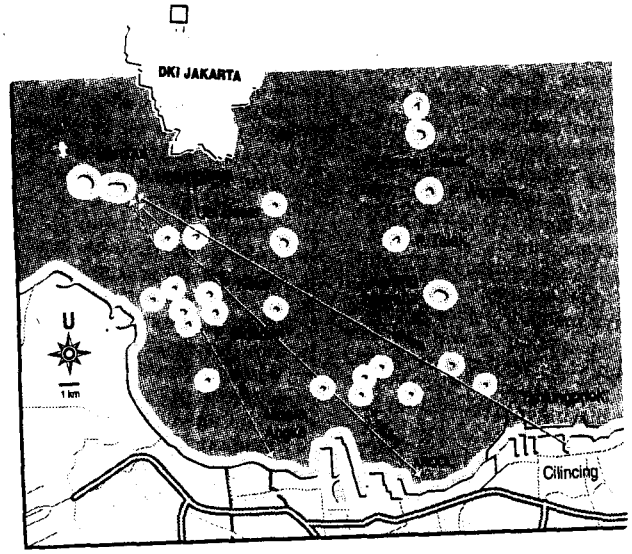
Usai penguburan yang disaksikan hampir seluruh warga, ihwal temuan dan semua upaya yang sudah dilakukan terhadap ketiga mayat itu, lalu dilaporkan secara tertulis ke atasan masing-masing. Misalnya, lurah melapor ke kecamatan, dan polisi ke Perwakilan Polsek Kepulauan Seribu di Cilincing, Jakarta Utara.

"Tugas sudah kami laksanakan. Sisanya menjadi urusan yang lebih atas," kata Haman. Tetapi, lama tak ada respon dari atasan, sampai suatu hari minggu pertama Agustus, sejumlah anggota Puspom (Pusat Polisi Militer) ABRI muncul di pulau itu dan menggali kuburan ketiga mayat itu. "Jadi, setelah dua setengah bulan dan ketika warga nyaris sudah melupakannya, baru ada kelanjutan dari laporan kami," kata Haman lagi.

Dan itu membuat warga bertanya-tanya. Ada apa? Mengapa polisi militer dan bukan polisi yang datang? Apakah mayat itu anggota ABRI? Orang pentingkah mayat-mayat itu? "Soalnya, tak ada identitas apa pun saat kami temukan," demikian Haman mengisahkan. Seperti umumnya warga desa, walau di hati ada sejumlah pertanyaan, warga Pulau Untungjawa juga tak berani menanyakan masalah itu kepada petugas-petugas yang datang.

Apakah pertanyaan-pertanyaan serupa pernah muncul di benak saat mayat ditemukan? Haman dan sejumlah aparat kelurahan serta warga yang ditanya, tegas menyatakan: tidak! "Kita menganggap mayat terdampar di pulau sebagai hal yang biasa. Karena itu, sesuai kebiasaan, langsung kita kubur. Tanpa tanya-tanya. Tetapi laporan, tentu saja kita buat," kata Haman.

Menurut Haman, kondisi ketiga mayat itu sudah membengkak, sehingga segera harus di-



bestari

kubur. Apakah mereka itu mayat nelayan? "Bisa saja, hanya selama ini tak ada warga Kepulauan Seribu melaporkan ada kecelakaan dan nelayan yang tidak pulang dari laut."

Sementara menurut sejumlah nelayan yang ditemui di dermaga Pulau Untungjawa, saat ketiga mayat itu ditemukan, arus laut adalah arus timur. Artinya, kalau mayat-mayat itu dihanyutkan arus, maka kemungkinan besar datang dari pantai Angke, Ancol, dan Cilincing. Cuma, kata para nelayan itu, kalaupun "datangnya" dari Angke atau Ancol, atau Cilincing, minimal setelah 10 hari baru tiba di pantai Pulau Rambut.

Dan biasanya, kondisi mayat sudah hancur bila selama itu diombang-ambingkan ombak. "Maka, kita menepis kemungkinan itu karena kondisi mayat' saat ditemukan cuma bengkak dan belum hancur," kata para nelayan itu. Atau, usia mayat baru sekitar tiga hari.

(msh/ssd/lom)

ELSAM

Media:

- BISNIS IN
- JAKARTA
- JAWA POS
- KOMPAS
- KD. RAK
- MEDIA IN

BARANGKA
di takdir L
mereka s
gai organisa
(ornop) — tetap
sehari-hari tak p
paskan dari "
merintah. LS
karitatif da
harus sering b
ngan pemerinta
sanaan pro
"mewajibkan
bungan deng
Paling tidak, s
ritahukan,
bangan masy
rian bantuan
Sebaliknya,
orientasi pada k
maupun tra
dapat melep
bungan deng
tika mereka
juangkan kli
pasti akan
merintah, m
rintah yakni ja
Namun hubun
merintah" y
ngenakan te
mereka din
Seperti yang
cara Lembaga
(LBH) Jaka
Jusuf (27).
kecil menerp
pertengahan t
"Sebenar
merasa sa
man-teman,
yang ditinggal
kena temba
mungkin te
harus saya
kepada *Komp*
Jakarta, bebe
Bukan k
ma teror.
LBH Jakarta,
pat pertemuan
tivis di Tana
menerima

APA yang
mungkin belu

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Diduga Diculik, Lima Orang Raib di Irja

Tidak Cocok, Ciri-Ciri Tiga Mayat RSCM dengan Korban Hilang

Jakarta, JP.-

Mungkinkah aksi penculikan belum berhenti? Yang jelas, hingga saat ini lima orang yang hilang di Irja pada 1 – 6 Juli lalu belum ditemukan.

Menurut Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir SH di Jakarta kemarin hilangnya orang-orang tersebut diduga kuat berkait dengan aktivitas di sekitar aksi masyarakat yang berakhir bentrok dengan aparat di Biak Numfor.

Dia mengatakan, bentuk kekerasan tersebut tidak dapat dilepas dari penempatan wilayah Irian Jaya sebagai daerah operasi militer (DOM). "Tindakan kekerasan, penghilangan orang, penganiayaan, bahkan pembunuhan menjadi ancaman terbesar bagi kehidupan masyarakat Irian," katanya.

Lima orang yang dilaporkan hilang oleh keluarga korban kepada Kontras itu adalah Franciscus Delton Gerson Gawe, 29 tahun, sopir taksi; Wehelmus Rumpaisum, 63 tahun, yang pernah menjadi mantri kesehatan; Yuslin Sroyer, 19 tahun, pelajar SMU Yapis Samofa; Irene Sroyer, 27 tahun, karyawati PT Wapoga Mutiara Timber; dan Lewi Krey, 45 tahun, karyawan PT Wapoga Mutiara Timber.

Franciscus Delton dinyatakan hilang pada 6 Juli sekitar pukul 06.00 WIT. Seorang saksi mengatakan melihat Franciscus ditarik oleh tiga orang berpakaian loreng dengan senjata laras panjang. Namun, identitas dan kesatuannya tidak dikenali. Franciscus diambil di samping rumahnya dan dimasukkan ke mobil kontainer tanpa plat nomor polisi.

Sementara itu, Wehelmus Rumpaisum dinyatakan hilang pada 5 Juli sekitar pukul 16.00 WIT, ketika berangkat dari rumah hendak ke Biak kota untuk membeli obat. Saat itu, dia pergi mengenakan kaus Hammer merah, celana abu-abu, dan mengenakan topi. Sedangkan, Yuslin, Irene, dan Lewi dinyatakan hilang pada 6 Juli lalu.

"ABRI harus bertanggung jawab atas terjadinya penculikan serta berbagai bentuk tindak kekerasan di Irian Jaya. Pemerintah juga segera melakukan tindakan yang efektif guna menghentikan berbagai bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran HAM," kata Munir.

TAK COCOK

Sementara itu, beberapa keluarga korban yang dinyatakan hilang kemarin berdatangan ke ruang forensik RSCM, Jakarta. Kedatangan mereka itu untuk mencocokkan ciri-ciri tiga kerangka manusia yang ditemukan di Kepulauan Seribu.

Yang datang ke RSCM itu, antara lain, istri pertama Noval, adik kandung Hendra Hambali, keluarga Ucok, Yadin Muhidin, dan keluarga Herman Hendrawan. Mereka diterima oleh dr Budi Sampurna, dr Wibisana, dr Andriani, dan dr Herkutanto.

Laporan ciri-ciri korban yang hilang itu disampaikan para keluarganya kepada tim dokter ahli forensik itu sekitar dua setengah jam. Bahkan, adik Hendra Hambali datang ke situ dengan membawa hasil foto rontgen kaki Hendra.

Setelah melaporkan ciri-ciri korban yang hilang, mereka meneliti satu per satu ketiga kerangka yang sudah ditata rapi itu. Namun, sementara disimpulkan bahwa ciri-ciri pada ketiga kerangka itu tak ada yang cocok dengan mereka yang kini masih raib. **(jpnn/aw)**

JP Jakarta Nomor 1 Juli 1998



Koordinator Kontras Munir SH kemarin mengungkapkan lagi dugaan penculikan lima orang di Irian Jaya.

ELSAM

Media:

- BISNIS IN
- JAKARTA
- JAWA PO
- KOMPAS
- KD. RAK
- MEDIA IN

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☑ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Masyarakat Irja Minta Kontras Ungkap Kasus Orang Hilang

Jakarta, Kompas

Komite Pemuda Pro Hak-hak Rakyat Papua (KP2HARAP) minta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) membentuk tim pencari fakta di daerahnya untuk mengungkap korban pelanggaran hak asasi manusia sesudah aksi unjuk rasa di Irian Jaya awal Juli lalu.

Dalam pertemuan antara 10 perwakilan KP2HARAP dengan Kontras di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jumat (7/8), Sekretaris KP2HARAP Jimmy Demianus Ijie mengemukakan, setelah terjadinya unjuk rasa di Biak, Sorong, dan Jayapura, 1-4 Juli 1998, ditemukan mayat di perairan Biak, Irja. Mereka diterima Koordinator Munir dan Wakil Koordinator Dadang Trisasongko.

Kalau pemerintah mengatakan korban tersebut merupakan mayat dari bencana tsunami di Vanimo, Papua Niugini, lanjutnya, hal itu tidak mendasar sebab jaraknya jauh. "Munculnya mayat tersebut tidak lain akibat adanya kekerasan yang dilakukan aparat di Irja," tuturnya

Sementara Rika Warinusi selaku wakil masyarakat Irian, mengemukakan, unjuk rasa dan pengibaran bendera Papua Merdeka di Irja awal Juli lalu merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat setempat, terhadap kebijakan pemerintah.

Lima orang

Menanggapi pengaduan itu, Munir dan Dadang Trisasongko mengemukakan, penculikan sejumlah warganegara yang dianggap mempunyai pandangan yang berseberangan dengan pemerintah, ternyata masih terus berjalan di Irja. Setidaknya ada lima penduduk setempat yang sampai saat ini masih belum diketahui keberadaannya, menyusul kerusuhan di Biak Numfor 6 Juli 1998 lalu. Mereka itu adalah Franciscus Delton, Gerson Gawe (29), Wilhelmus Rumpaisum (63), Yuslin Sroyer (19), Irene Sroyer (27), dan Lewi Krey (45).

Khusus soal penculikan sejumlah warga Irja ini, Kontras menyampaikan tiga pokok pikiran yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Pertama, Irian Jaya sampai saat ini masih termasuk wilayah yang tingkat pelanggaran hak asasinya tinggi, karena Irja masih dimasukkan sebagai daerah operasi militer (DOM). Untuk itu pemerintah harus mencabut status DOM Irja.

Kedua, Pemerintah, termasuk ABRI, harus bertanggung jawab atas terjadinya berbagai bentuk tindak kekerasan, termasuk praktek penghilangan orang serta bentuk kekerasan lainnya di Irja. Pemerintah harus mengusut tuntas kejadian ini serta mengungkapkan kasus orang hilang itu.

Ketiga, pemerintah harus melakukan tindakan yang efektif guna menghentikan berbagai bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran HAM di Irja.

(bw/bb)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KEDAULATAN RAKYAT	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

▲ "Munir Salah Faham"

Puspom Anggap Andi Cs Hambat Penyelesaian Kasus Penculikan

Jakarta, Jumat, Merdeka

Pernyataan Munir berbuntut bantahan. Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) itu mengaku telah bertemu dengan aparat penyidik Puspom ABRI Lettu Gatot Firmanullah yang menyatakan tetap akan menyidangkan 11 tersangka oknum Kopassus pelaku penculikan walau tanpa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari saksi korban.

"Dengan begitu mudah-mudahan nantinya bisa mengungkap nasib 14 korban penculikan yang belum jelas nasibnya hingga kini," tutur Munir.(*Mdk*, 1/10)

Untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut, kemarin, Puspom ABRI melalui juru bicaranya Kepala Penyidik Kolonel Sudirman Panigoro langsung menggelar konferensi pers. Isinya, membantah sinyalemen Munir itu.

"Tanpa adanya BAP tak mungkin perkara ini diajukan ke mahkamah militer. Ini harus diluruskan, sebab kami tetap berada di koridor hukum. Saya sendiri menyesalkan sinyalemen tersebut," papar Sudirman.

Gatot sendiri ikut hadir menemani Sudirman. Dalam kesempatan itu dia mengaku tak pernah memberikan keterangan sebagaimana yang dikutip Munir. Dia menganggap mungkin ada salah paham, karena berbicara cukup lama dengan Munir soal beberapa korban penculikan yang belum menandatangani BAP.

Pada acara yang direncanakan akan dipimpin langsung oleh Dan Puspom Mayjen Syamsu Djalaluddin itu juga Sudirman mengatakan, bahwa BAP sebenarnya sudah disiapkan. Jadi tinggal mengajukan perkara. Tapi selalu terhambat, karena beberapa korban penculikan tak bersedia menandatangani BAP.

"Penyidikan perkara ini dibuat main-main. Padahal kami bekerja serius. Perkara ini agak terhambat karena saksi-saksi tidak mau menandatangani BAP," tuturnya.

Seperti diketahui, korban yang belum menandatangani BAP itu hingga saat adalah Andi Arief, Waluyo Jati, Desmon J Mahesa, Feisol Reza, Haryanto Taslam, Nezar Patria, Aan Rusdianto dan Mugianto. Yang baru tandatangan hanya Pius Lustrilanang. Mereka tak bersedia menandatangi BAP karena menuntut kejelasan nasib ke-14 korban penculikan lain.

Menurut Sudirman, bila korban penculikan bisa segera menandatangani BAP, maka dalam waktu dua sampai tiga hari ini sudah bisa diajukan ke pengadilan. "Sebab tersangkanya sudah ada, saksi sudah ada, barang bukti juga," paparnya.

Dia juga mengakui, bahwa dengan pengajuan langsung para tersangka ke pengadilan bisa mengungkap 14 korban penculikan yang tak jelas nasibnya hingga kini. Tapi, kata dia, keinginan itu tak bisa disamakan seperti anak kecil yang tukar menukar permen.

Dia mengungkapkan, selama ini surat panggilan yang ditujukan kepada korban penculikan itu tak pernah digubris sama sekali. Sebab berapa kali Puspom ABRI mengajukan surat panggilan kepada para korban untuk diperiksa sebagai saksi.

"Sedangkan menurut aturan UU, tiga kali tidak diindahkan kami bisa jemput secara paksa. Tapi kami tetap persuasif, selalu pengertian, tapi belum *nyambung-nyambung* seperti yang kami harapkan," kata Sudirman.

Sudirman mengatakan para korban penculikan lainnya sebenarnya bisa bersikap kooperatif sebagaimana dilakukan Pius Lustrilanang yang telah membubuhkan tanda tangannya di BAP.

"Bila nanti di pengadilan terkuak pula siapa penculik 14 aktivis yang nasibnya tak jelas hingga saat ini — dan tak tertutup kemungkinan pelakunya sama, maka pasti akan kita seret lagi ke pengadilan dengan tuduhan lain," tandasnya.(YUG/EKA)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Letjen Prabowo Subianto Sudah Diperiksa POM ABRI

"Dia Harus Tahu Menahan Andi Arief Itu Salah"

DI tengah hingar bingar pembentukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP), peranan Komandan Pusat Polisi Militer (Dan Puspom) ABRI Mayjen Syamsu Djalaludin, sulit dipisahkan. Sebab, para perwira yang diajukan ke DKP ternyata sudah lebih dahulu diperiksa Tim Pencari Fakta (TPF) ABRI yang dipimpin Mayjen Syamsu. Hanya tidak dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

Banyak hal menarik dari keterangan jenderal berbintang dua ini. Misalnya, ketika Syamsu mengatakan bahwa bekas Danjen Kopassus Mayjen Muchdi PR seharusnya berbuat sesuat begitu mengetahui bahwa aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) Andi Arief ditahan di markas Kopassus Cijantung, Jakarta Timur. Berikut petikan wawancara dengan alumni AMN 1965 itu; *Apa benar nama-nama yang masuk DKP atas rekomendasi Dan Puspom ABRI?*

Memang ada kaitannya dengan kasus ini, tetapi nanti *kan* itu lebih menyangkut dari sisi disiplin prajurit. Sehingga Menhankam/Pangab mengatakan tidak menutup kemungkinan untuk pidana. Kalau memang mereka terbukti dan ada kaitannya, ya tetap.

Apa tugas TPF sudah selesai?

Kan masih ada tugasnya, pokoknya kita beritahu nanti. Tapi saya belum berani menyampaikannya dan masih terus menindaklanjuti.

Bagaimana dengan tuntutan masyarakat agar Puspom bisa memeriksa perwira berbintang?

Makanya itu tolong dipertegas bahwa dalam ABRI sudah ada ketentuannya. Dalam penyidikan untuk tindak pidana yang dilakukan oknum ABRI adalah POM dan Oditur Militer. Pangkatnya itu tidak terbatas karena kita melaksanakan perintah Menhankam/Pangab. Kalau saya memeriksa seorang jenderal atas perintah Menhankam/Pangab, itu artinya saya juga sebagai Menhankam/Pangab melakukan pemeriksaan.

Kalau memeriksa jenderal bintang lima bagaimana?

Negara kita *kan* negara hukum, bisa saja. Tidak harus bintang empat itu diperiksa oleh bintang empat. Bintang tiga harus oleh bintang tiga. Kecuali kalau di DKP. Tapi kalau sudah mengusut dan penyidikan, seorang perwira bisa diperiksa oleh seorang kopral. Seperti kalau para perwira di DKP dibawa ke Mahmil, cukup kolonel saja yang meriksa karena mengatasnamakan Menhankam/Pangab.

Kenapa perintah pemeriksaan belum turun juga kepada para jenderal?

Siapa bilang? Tapi saya tidak mungkin mengatakan, saya sudah memeriksa Prabowo.

Tapi sudah ya?

Ya jelas *dong*. Kalau tidak bagaimana dan bahan DKP itu dari mana?

Dari hasil keterangan Prabowo bagaimana?

Wah itu bukan untuk konsumsi mass media.

Tapi apa perintah tertinggi itu dari Prabowo?

Nanti kita dengar saja hasilnya bagaimana. Kalau itu pidana dan diperintahkan untuk diusut, kita usut.

Waktu Muchdi menjabat sebagai Danjen kan sudah tidak ada penculikan?

Tapi pada waktu itu *kan* Andi Arief ada ditahan di sana (Kopassus, red). Seharusnya dia tahu bahwa itu ada perbuatan yang tidak benar dan sebagai seorang perwira harus melakukan sesuatu.

Artinya dia tidak terlibat langsung?

Mungkin begitu, kalian lebih hebat ya.

Kasus 27 Juli bagaimana?

Saya masih pelajari terus. Kita koordinasikan dan akan saya laporkan kepada Menhankam/Pangab dan meminta petunjuk kepada beliau.

Apa Puspom bisa periksa purnawirawan?

Purnawirawan itu dilihat lagi. Apa tindak pidana itu dilakukan pada waktu dia masih aktif atau bukan? Kalau dilakukan sesudah purnawiran, itu wewenang polisi. Tapi kalau dilakukan pada waktu aktif, itu polisi militer.

Kalau Pangti termasuk yang purnawirawan?

Oh ya, itu purnawirawan.(PN)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Benar, Pelaku Dulu Baru Otaknya

"11 Anggota Kopassus Bisa Bebas"

APABILA ada komandan yang menyatakan berani bertanggung jawab sepenuhnya akan perbuatan anak buahnya karena dia yang memberi perintah, menurut pengacara Luhut MP Pangaribuan SH LLM, pelaksana perintah itu bisa dilepas dari tuntutan hukum.

Pasal 51 KUHP menyebutkan, barang siapa melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh yang berwenang tidak dipidana. "Jadi berdasarkan Pasal 51 KUHP ini pelaku bisa dilepas," tutur Luhut. Ini berarti, 11 anggota Kopassus yang kini diproses pun ada kemungkinan dibebaskan dari tuntutan hukum.

Akan tetapi Pasal 51 KUHP tersebut tidak akan berlaku apabila perintahnya dilaksanakan secara menyimpang di lapangan. Misalnya perintah yang harus dilaksankan hanya untuk menginterogasi aktivis. Tetapi dalam pelaksanaan melakukan perampasan kemerdekaan, menganiaya bahkan membuat meninggalnya orang maka baik pelaksana perintah maupun yang memberikan perintah semua harus bertanggung jawab.

Tentang penyidikannya, papar Luhut, berdasarkan teori pembuktian hukum pidana, untuk mengetahui persis kasus yang sesungguhnya, bisa diterima pola tersangka/terdakwa pelaksana perbuatan yang disidik dan diajukan ke persidangan terlebih dahulu. Selanjutnya baru yang memberi perintah.

Menurut Luhut, memang ada baiknya pimpinan ABRI melakukan pengusutan kasus ini dari bawah (yang melaksanakan perintah atasan). "Sistem demikian cukup baik agar diketahui tersangka pelaku penculikan itu dapat perintah dari siapa dan isi perintahnya bagaimana," kata Luhut yang juga dosen tetap Universitas Indonesia ini.

"Urutannya memang pelaku dulu baru otak (dalang). Ini berdasarkan teori pembuktian yang benar," tambahnya. Kendati begitu, pengacara kondang dan bekas Direktur LBH Jakarta tersebut, meminta agar semua pihak tetap menjunjung tinggi dan mempertahankan asas praduga tak bersalah.

Sedangkan, praktisi hukum Amir Syamsudin menyatakan, 11 anggota Kopassus itu tetap tidak bisa dibebaskan. Walaupun dalam militer ada sistem komando.

"Bagaimanapun juga perbuatan pelaksana dan yang mengkomandokan itu sudah merupakan perbuatan pidana dan harus dijatuhui hukuman setimpal. Ini menyangkut nyawa manusia," kata Amir saat berbincang-bincang dengan *Merdeka*, kemarin.

"Kalau itu dalam situasi perang boleh lah. Ini kan rakyat jelata yang mereka culik. Terlepas apakah yang diculik itu meninggal atau tidak. Jadi baik yang melaksanakan atau yang menyuruh harus dikenakan hukuman pidana," tambahnya.

Jika mereka terbukti melakukan tindak kejahatan pembunuhan, maka akan dikenakan tindak pidana pembunuhan pula. "Mereka terkena KUHP pasal 338," tandas Amir lagi. Dalam kasus seperti ini, dikatakan Amir, mungkin saja tersangka ini diadili tanpa terdakwa penyuruh dengan menggunakan pasal 56 KUHP. Hal itu menurutnya, tergantung dari oditurnya.

"Bisa saja terjadi, karena hal ini bisa saja direkayasa oleh pihak-pihak tertentu. Tapi alangkah baiknya, jika 11 tersangka dan terdakwa penyuruhnya disidangkan semuannya. Ini akan lebih baik,"ujarnya. Maka dalam proses peradilan ini, ABRI seharusnnya tidak lagi menutup-nutupi.

"Atau menjalankan tugasnnya dengan setengah-setengah. Setidaknnya ABRI sudah menampilkan wajah-wajah yang diharapkan rakyat Indonesia, dengan bekerja sepenuhnnya,"tambahnnya.

Sementara itu pakar hukum, Loebby Loeqman mengatakan, banyak tindak pidana yang bisa diancamkan kepada para tersangka kasus ini. "Menghilangkan kemerdekaan seseorang itu sudah merupakan tindak kejahatan. Para tersangka juga bisa saja dikenakan pidana pembunuhan, penganiayaan, penculikan atau tindakan pidana lainnya. Ini semua sudah merupakan gabungan tindakan kejahatan," ujarnya.

"Bisa saja pelaku melakukan kejahatan secara fisik. hal itu mesti diungkapkan dari bawah baru ke atas. Tidak mungkin jika dari atas ke bawah," cetusnya.

Dalam kasus ini, katanya, bisa saja tersangka diadili tanpa ada tersangka penyuruh. "Karena bisa saja tersangka tidak ada yang menyuruh. Jadi melihat sejauh mana hubungan penyuruh dan yang disuruh itu. Yang

Mayjen Syamsu Djalal:
Saya Serahkan ke DKP



KETUA Tim Pencari Fakta ABRI, Mayjen Syamsu Djalal di kantornya, Jumat lalu, ketika ditanya mengenai perkembangan hasil pencarian TPF menjelaskan bahwa semua hasil yang sudah diperoleh sudah diserahkan ke Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

Apakah termasuk di dalamnya data dan fakta mengenai keterlibatan bekas Pangkostrad, Letjen Prabowo?

"Yah, pokoknya semua sudah saya serahkan ke DKP. Tugas saya hanya berusaha untuk mengumpulkan data dan fakta-fakta. Mengenai tindakan-tindakan apa yang nanti akan diberikan, silahkan saudara cek di DKP sana," katanya yang juga didesak tentang sanksi apa yang akan diberikan pada Prabowo Subianto nanti.

Mengenai seberapa jauh keterlibatan anggota-anggota Kopassus dalam aksi teror massa itu, Syamsu menegaskan bahwa ia akan tetap melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Termasuk, ditemukannya sekitar 40 anggota Kopassus di salah satu pulau di Kepulauan Seribu.

Berarti, adanya organisasi elite ditubuh Kopassus dalam aksi penculikan dan teror massa ini akan semakin kuat, karena penemuan anggota Kopassus di Pulau itu?

"Yah, itu kan masih katanya koran. Kita masih belum chek, dan yang pihak yang terkait, seperti polisi belum lapor. Jadi, jangan ambil kesimpulan dululah," katanya.

Lantas, bagaimana dengan para keluarga korban yang terus menerus menanti harap? "Pokoknya kami akan berbuat semaksimal dan secepat mungkin. Yah, keluarga bersabar dulu, kami akan secepatnya memberi kabar kalau memang ada perkembangan," katanya.(IMS)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☑	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Prabowo Agar Hadap Puspom ABRI untuk Diperiksa

Jakarta, Rabu, Merdeka

Komandan Puspom ABRI Mayjen Syamsu Djalaludin menegaskan, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil dan memeriksa Prabowo Subianto berkaitan dengan penculikan sembilan orang aktivis. Hasil pemeriksaan itu nantinya akan dijadikan bahan untuk disampaikan ke Mahkamah Militer.

Hal itu diungkapkan Syamsu yang juga Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) ABRI di ruang kerjanya, kemarin. Sehari sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal Subagyo HS mengatakan, dalam pemeriksaan Prabowo mengakui telah menculik sembilan orang aktivis.(*Merdeka*, 25/8)

Menanggapi pernyataan Kasad Jenderal Subagyo itu, Syamsu mengatakan, tentunya Puspom ABRI tidak akan tinggal diam. "Berarti *kan* dia (Prabowo-*red*) telah melakukan tindak pidana. Tentu dengan sendirinya kita akan memanggil dan memeriksa dia," ujar jenderal berbintang dua itu.

Kapan? "Sebentar lagi lah, saat ini kita *kan* tengah memeriksa anak buahnya dan itu masih terus berjalan. Nanti dia segera kita panggil. Sebelumnya Prabowo juga sudah kita panggil ke sini *kan*. Yang ini bukan kita panggil lagi, tapi sudah diperintahkan Menhankam/Pangab, agar Prabowo menghadap Danpuspom untuk diperiksa," jawab Syamsu.

Ketika ditanya apa Prabowo dalam pemeriksaan oleh Puspom ABRI sebelumnya sudah mengakui penculikan tersebut, dia hanya mengatakan, hal itu sudah pernah terungkap di sini. Tapi Syamsu tidak menyatakan siapa yang mengungkapkan hal tersebut.

"Namun demikian pengakuannya masih belum kita dapatkan. Makanya kita lengkapi dengan bukti-bukti. Kalau maling semua mengaku, gampang polisi menangkapnya. Di sini sama juga, apalagi ini yang sudah prajurit, yang sudah didoktrin dan diperintahkan macam-macam, *kan* pengakuannya sangat susah," tuturnya.

Lebih jauh, dia mengatakan bahwa saat diperiksa di Puspom, hasil pemeriksaan terhadap Prabowo diberikan untuk kebutuhan DKP. Begitu juga dengan hasil pemeriksaan terhadap Mayjen Muchdi PR dan Kolonel Chairawan. "Kalau sekarang, apabila nanti ada keterangan baru lagi, baru itu akan menjadi konsumsi pengadilan militer," tambahnya.

Ketika dikonfirmasi apa benar perkara kasus orang hilang belum diajukan ke Mahmil karena menunggu hasil pemeriksaan dari tiga orang terperiksa, Syamsu mengatakan, itu merupakan salah satu faktornya.

Apa ada permintaan cekal terhadap Prabowo? "Tidak perlu. Prabowo itu ksatria. Biarpun dia lepas dari prajurit, dia tetap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Saya kira bisa dipertanggungjawabkan itu," jawabnya.

Disinggung tentang kemungkinan adanya perintah baru dari Pangab Jenderal Wiranto setelah mengumumkan sanksi untuk ketiga perwira tersebut, Syamsu mengatakan, perintah Pangab tidak diberikan secara berulang-ulang. "Perintahnya satu kali, yaitu usut tuntas, sudah!" katanya singkat.

Tadi bertemu Pangab, mungkin ada perintah baru? "Tidak. Beliau hanya mengatakan, eh selesaikan yang cepat. Saya jawab, siap!" jawabnya sambil tersenyum.

Prabowo Di Bandung

Sementara itu beberapa wartawan yang mencoba menemui Prabowo yang tinggal di Jalan Cendana, Jakarta Pusat tidak menghasilkan apa-apa. Pasalnya, bekas Pangkostrad dan Danjen Kopassus itu sudah meninggalkan rumahnya sejak pukul 10.00 WIB.

Menurut informasi salah seorang penjaga, menantu bekas Presiden Soeharto itu berangkat bersama seorang sopir dan ajudan. Namun dia tidak mengetahui kemana Prabowo pergi.

Suasana di Jalan Cendana sepi-sepi saja. Namun penjagaan tetap ketat. Setiap mobil yang ingin melintas di jalan tersebut ditanyai tujuannya. Bahkan di depan setiap jalan masuk itu ada tanda dilarang masuk dan para penjaga umumnya mengenakan baju batik.

Ketika para wartawan mencoba kembali menemui Prabowo pada sore hari, ternyata yang bersangkutan dikabarkan sudah meninggalkan Jakarta menuju ke Bandung. Menurut sumber, sekitar pukul 12.00 WIB, Prabowo dengan jip Mercynya sempat kembali. Tapi hanya beberapa saat dan kemudian dia pergi lagi, yaitu kemungkinan ke Bandung.(PN)



Prabowo Subianto

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☑ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Mahmil bagi Prabowo Bukan Basa-basi

Jakarta, Kompas

Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalaludin mengutarakan, kemungkinan diajukannya Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR dan Kolonel (Inf) Chairawan ke Mahkamah Militer (Mahmil) bukan sekadar basa-basi politik. Tertundanya pengajuan 11 orang tersangka prajurit Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) ke Mahmil saat ini justru menunggu pemeriksaan lanjutan terhadap ketiga perwira tinggi tersebut.

Dikatakan, hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) selanjutnya akan menjadi bahan bagi Puspom untuk melaksanakan kelanjutan penyidikan. Namun, Syamsu membantah isu yang muncul bahwa 11 orang tersangka kasus penculikan ini menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP). "Yang bilang itu siapa. BAP itu belum selesai karena masih harus dilengkapi dengan berbagai faktor. BAP belum selesai *kok* sudah menolak menandatangani," kata Syamsu kepada wartawan, Selasa (25/8), di Markas Puspom ABRI Jakarta.

"Puspom ABRI sebenarnya telah melakukan pemeriksaan tahap pertama terhadap ketiga perwira tersebut, tetapi itu untuk masukan bagi DKP. Kami akan mengadakan pemeriksaan lanjutan terhadap ketiga perwira ini untuk melengkapi berkas yang akan diajukan ke Mahmil nantinya," tuturnya.

Dikatakan, kemungkinan untuk mengajukan Prabowo, Muchdi dan Chairawan ke Mahmil tidak tertutup selama kasus ini masih terus disidik oleh Puspom ABRI. "Adanya sanksi administratif bagi mereka bertiga oleh Menhankam/Pangab dapat dijadikan indikasi bahwa ada tindakan pidana yang dilakukan, entah itu berupa penculikan, penyekapan, atau penganiayaan. Tapi penyidikan terhadap itu 'kan perlu dilaksanakan secara bertahap, proporsional, dengan tetap menghargai dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," ujarnya.

Menurut Syamsu, sekarang ini Puspom sedang melakukan pemeriksaan lebih cermat terhadap 11 orang tersangka dari Kopassus, yang hingga kini diduga kuat sebagai pelaku penculikan dan penganiayaan terhadap sejumlah aktivis. "Untuk itu saya minta semua pihak yang terlibat dalam masalah ini, baik itu Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) maupun para korban penculikan untuk memberikan masukan yang terperinci kepada Puspom. Ini akan sangat membantu Puspom untuk segera melengkapkan berkas pemeriksaan untuk selanjutnya diajukan ke Mahmil," katanya.

Saat ini, kata Syamsu, yang masih dikategorikan sebagai orang hilang ada 12 orang, dengan rincian tiga orang yang hilang karena kasus kerusuhan dan sembilan lainnya hingga kini masih diduga sebagai korban penculikan. "Saya tidak berani mengatakan bahwa mereka masih ada atau bagaimana. Sampai sekarang kita masih mengusut dan menyelidikinya. Yang pasti, di tempat kejadian perkara (TKP), terutama di Cijantung (Markas Kopassus —**Red**) sudah kosong. Ini tentunya menjadi pekerjaan berat bagi kami," katanya.

Informasi baru

Menurut Syamsu, pengakuan Prabowo bahwa jumlah orang yang telah diculik sebanyak sembilan orang, merupakan informasi baru bagi Puspom ABRI karena sebelumnya ke-11 prajurit Kopassus yang diperiksa dan ditahan Puspom ABRI hanya mengakui penculikan terhadap empat orang. Puspom akan terus mengembangkan hasil DKP dan mencari tahu apakah ada unsur pidana dalam keterlibatan Prabowo pada kasus penculikan sejumlah aktivis tersebut.

"Sekarang 'kan Prabowo mengakui sembilan, makanya kita perlu mendalami lagi. Kita minta kalau ada masukan lain segeralah berikan, misalnya dari saksi-saksi korban," ungkap Prabowo.

Sementara itu, Koordinator Badan Pekerja Kontras Munir meminta, agar Puspom ABRI mengumumkan hasil penyelidikannya sendiri, dengan tidak berpegang pada hasil keterangan dari para tersangka semata, tetapi juga mendalami keterangan saksi-saksi.

"Sampai saat ini terkesan Puspom hanya mengungkapkan apa-apa yang diperolehnya dari tersangka, misalnya pengakuan bahwa telah menculik empat orang saja atau pengakuan Prabowo yang menculik sembilan orang. Padahal, saksi-saksi korban jelas-jelas mengatakan bertemu dengan Herman Hendrawan, Yani Afri, Sonny, dan lainnya. Artinya, jumlah yang diculik itu bukan hanya sembilan orang yang sudah dilepas itu," tegas Munir.

Menurut Munir, Puspom sebagai lembaga penyidik tidak boleh mengambil posisi tidak mempercayai keterangan saksi-saksi korban, padahal jelas keterangan saksi-saksi korban itu bisa menjelaskan banyak hal dalam kasus penculikan yang kemungkinan juga tidak "dibuka" oleh para tersangka penculiknya.

Disidik polisi

Sementara itu pakar hukum pidana Prof Dr Loebby Loqman mengatakan, karena Prabowo sekarang sudah berstatus sipil, dengan sendirinya aparat penyidik Kepolisian RI dapat melakukan tindakan lanjutan, yaitu dengan melakukan penyidikan terhadap Prabowo untuk selanjutnya diteruskan ke pengadilan.

"Yang ditunggu masyarakat 'kan memang terwujudnya penegakan hukum. Jadi, dalam kasus penculikan sejumlah aktivis yang diduga melibatkan Prabowo, ada baiknya aparat kepolisian bekerja sama dengan pihak kejaksaan mengambil tindakan konkret. Yakni memanggil dan memeriksa Prabowo serta mencari alat-alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana dimaksud. Selanjutnya, kalau memang mungkin ajukan segera Prabowo ke pengadilan," tandasnya.

Loebby menilai, bukan mustahil kebijakan Menhankam Pangab memberhentikan Prabowo, yang juga mantan Danjen Kopassus tersebut, dalam rangka memberi keleluasaan kepada pengadilan nonmiliter membuktikan keterlibatan jenderal berbintang tiga itu dalam kasus penculikan aktivis. "Sebab itu aparat kepolisian sepatutnya proaktif menanggapi harapan masyarakat," tegasnya.

(ama/oki/fa)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☑ Suara Merdeka	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Puspom ABRI Akan Panggil Prabowo

JAKARTA - Komandan Puspom ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalal mengatakan, dalam waktu dekat Puspom akan memeriksa Prabowo Subianto berkaitan dengan kasus penculikan para aktivis. Hasil pemeriksaan kelak dijadikan bahan ke Mahkamah Militer.

"Sebelumnya kami telah memeriksa tahap pertama terhadap Prabowo, Muchdi PR dan Chairawan. Tetapi itu untuk masukan Dewan Kehormatan Militer (DKM). Kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk melengkapi berkas yang akan diajukan ke Mahmil," katanya Rabu kemarin.

Dalam pemeriksaan DKP, ketiga perwira tersebut telah diberi sanksi administratif. Prabowo diberhentikan dari ABRI dan dua lainya dibebaskan dari jabatannya. Untuk selanjutnya, tidak tertutup kemungkinan mereka bertiga dibawa ke Mahmil.

Menurut ketentuan yang berlaku, meski sudah berstatus purnawirawan, sampai dua tahun sesudah menjadi warga negara biasa, seseorang anggota ABRI masih bisa diajukan ke Mahmil.

"Kapan Prabowo akan dipanggil dan diperiksa Puspom ABRI? "Sebentar lagi. Sebab saat ini kita sedang memeriksa anak buahnya, dan itu masih terus berjalan. Nanti dia segera kami panggil," kata Syamsu.

Ketika ditanya apakah Prabowo ketika diperiksa Puspom ABRI telah mengaku melakukan penculikan terhadap sejumlah aktivis, ia mengatakan, itu pernah terungkap, tanpa menjelaskan siapa yang mengungkapkan hal tersebut.

Dia mengatakan, hasil pemeriksaan DKP selanjutnya akan menjadi bahan bagi Puspom ABRI untuk melaksanakan kelanjutan penyidikan.

Syamsu mengemukakan, pengakuan Prabowo bahwa jumlah aktivis yang diculik sembilan orang merupakan informasi baru bagi Puspom. Sebelumnya diperoleh pengakuan dari para tersangka yang ditahan di Puspom, aktivis yang diculik empat orang.

"Sekarang kan Prabowo mengakui sembilan. Maka kami perlu mendalami lagi. Kami minta kalau ada masukan lain segera diberikan, misalnya dari para saksi korban."

Menkeh Muladi menyatakan tidak tertutup kemungkinan Prabowo dibawa ke Pengadilan Militer jika terbukti melakukan tindak pidana. Menurutnya, penculikan adalah kejahatan yang sangat berat dari segi HAM dan hukum. Orang tidak berani berspekulasi dalam masalah-masalah seperti itu.

"Yang dihadapi rakyat, sehingga harus transparan. Hal yang sama juga akan dilakukan terhadap penyelewengan di bidang perbankan. Harus ada tindakan keras."(am-29g)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☑ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Mayjen TNI (Purn) Samsudin:

Pengakuan Menculik Cukup untuk Periksa Prabowo di Mahmil

Jakarta, Kompas

Pengakuan Prabowo bahwa dia sudah menculik sembilan orang seperti yang disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo, seharusnya sudah cukup untuk menjadi bahan pemeriksaan di Mahkamah Militer (Mahmil) dan tidak perlu menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap 11 prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) lainnya. Kasus penculikan itu harus dituntaskan secara hukum dan ABRI harus berani menegakkan supremasi hukum, tidak bersikap defensif, tetapi akomodatif.

Hal itu disampaikan anggota Komnas HAM, Mayjen TNI (Purn) Samsudin, ketika berbicara pada diskusi sekitar "DKP dan Operasi Intelijen dalam Perspektif Hukum Indonesia", Jumat (28/8), di LBH Jakarta. Selain Samsudin, tampil sebagai pembicara anggota Dewan Penasihat Kontras Bambang Widjojanto.

Samsudin yang juga anggota keluarga besar Kopassus, menambahkan, pengakuan beberapa saksi korban yang menyatakan bertemu dengan beberapa korban lain di tempat penyekapan harus dijadikan pegangan Tim Pencari Fakta (TPF) ABRI untuk mengungkap, bahwa korban penculikan adalah lebih dari sembilan orang sebagaimana yang diakui Prabowo.

Menurut dia, hukuman yang dijatuhkan terhadap Prabowo oleh Pangab melalui hasil rekomendasi DKP adalah tingkat hukuman yang paling memungkinkan karena DKP memang hanya melihat soal pelanggaran kode etika jabatan. Dalam sanksi DKP ada empat katagori hukuman yang bisa dijatuhkan, yaitu teguran, skorsing, berhenti dengan hormat, atau diberhentikan dengan tidak hormat.

BKO

Mengenai adanya perintah Bawah Kendali Operasi (BKO), Samsudin misalnya menjelaskan, BKO bukan merupakan komando operasional melainkan petunjuk status suatu kesatuan. BKO diberikan Pangab kepada sebuah kesatuan atas permintaan komando teritorial.

"Isinya kira-kira, kepada Danjen Kopassus dari Pangab. Isi Berita, kebutuhan Pangdam Jaya untuk Kopassus dengan ini memerintahkan supaya saudara mem-BKO-kan beberapa orang kepada Kodam Jaya," jelasnya.

Selanjutnya, prajurit yang di-BKO-kan ke Kodam Jaya itu diberikan tugas oleh Kodam Jaya. Berdasarkan prosedur, jika sudah di BKO-kan maka komandan Kopassus tidak boleh lagi ikut campur atas anggotanya yang di BKO-kan tersebut. "Prabowo pun tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan kesatuan itu, kalau Prabowo tidak ikut campur maka Kodam Jaya yang bertanggung jawab. Yang jadi masalah, kebetulan ini Prabowo yang memerintahkan," jelasnya.

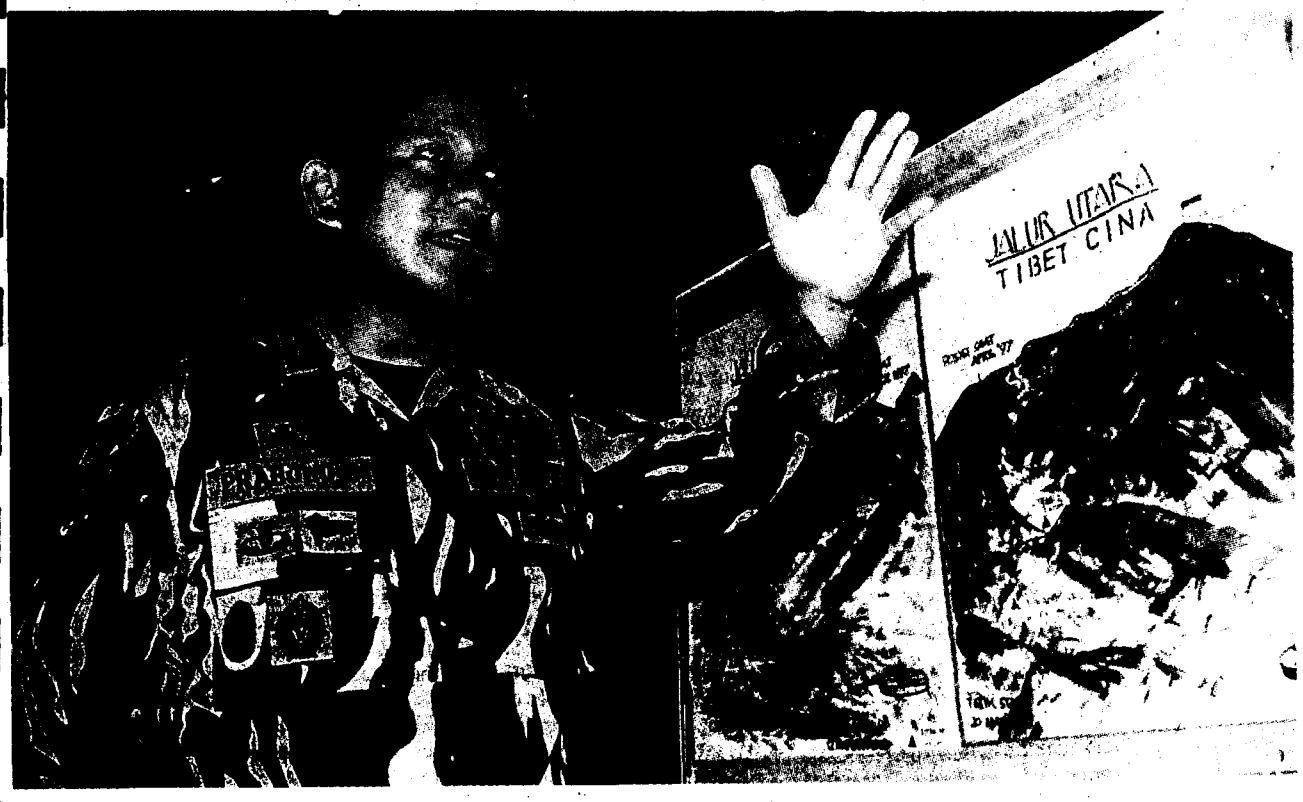
Oleh karena sifatnya yang demikian, Samsudin menyatakan bingung dengan penjelasan DKP bahwa ada kesalahan analisis terhadap BKO. "Apa yang harus dianalisis, perintahnya cuma begitu *kok*. Serahkan 10 orang anggota ke Kodam, misalnya. Yang mungkin ada kesalahan analisis itu di perintah operasi. Itu yang dari Pangdam sebagai komandan teritorial," tambahnya.

Oleh karena itu, menurut Samsudin, perlu juga diteliti apakah Pangdam Jaya ketika itu tahu apa yang dilakukan pasukan yang di BKO-kan itu, adakah instruksi dari Pangdam, atau apakah dia juga tahu ada instruksi langsung dari Prabowo.

Berdasarkan pengalaman, lanjut Samsudin, dalam operasi intelijen memang seringkali orang intelijen bergerak sendiri tanpa perintah komandan teritorial. "Sering intel kita lepas kendali dari pimpinan. Itu terjadi karena intel seolah-olah punya suatu badan sendiri yang dikenal dengan *inteligent community*, sehingga intel lebih mendengarkan perintah dari orang intelijen di atasnya. Ini ketidakbenaran tabiat intel kita yang harus ditertibkan. Intel pusat punya kontak langsung ke daerah-daerah. Itu yang sering membuat pusing panglima," ungkapnya. **(oki)**



PRABOWO SUBIANTO: Karir militernya berakhir setelah dipecat dari ABRI.



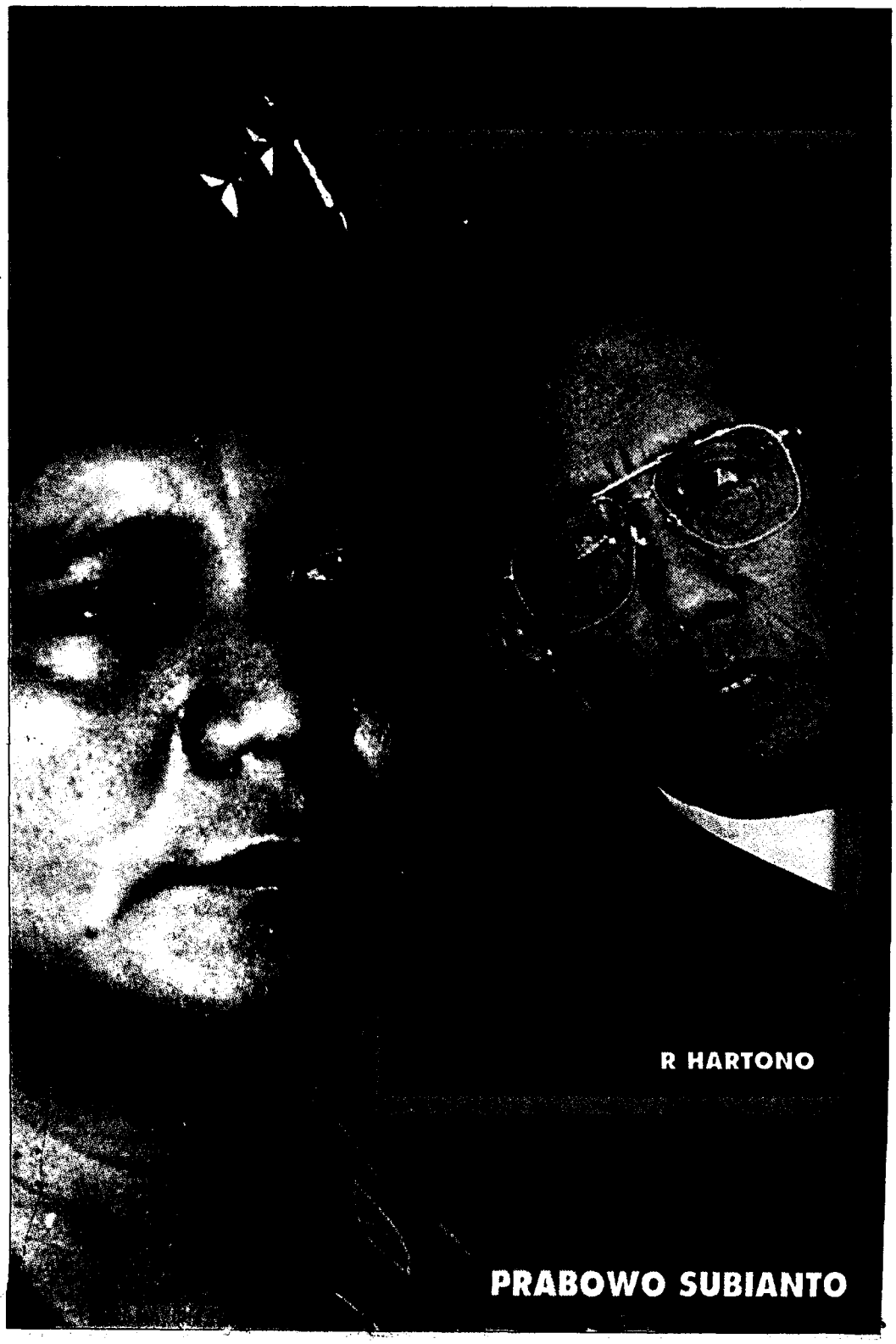
Prabowo Subianto saat menjabat Danjen Kopassus.

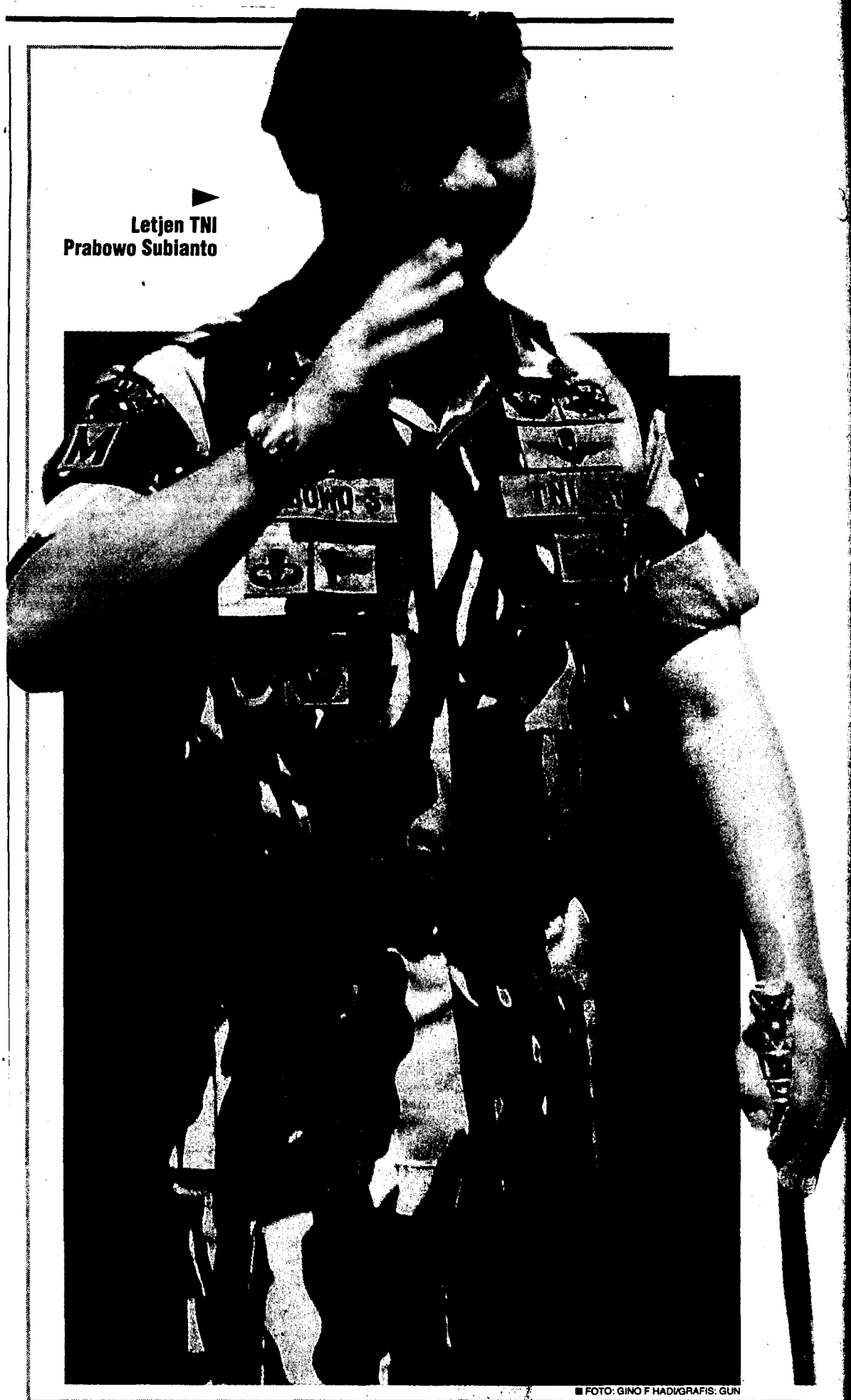


Dua terdakwa anggota Brimob dalam kasus peristiwa di Kampus Trisakti.



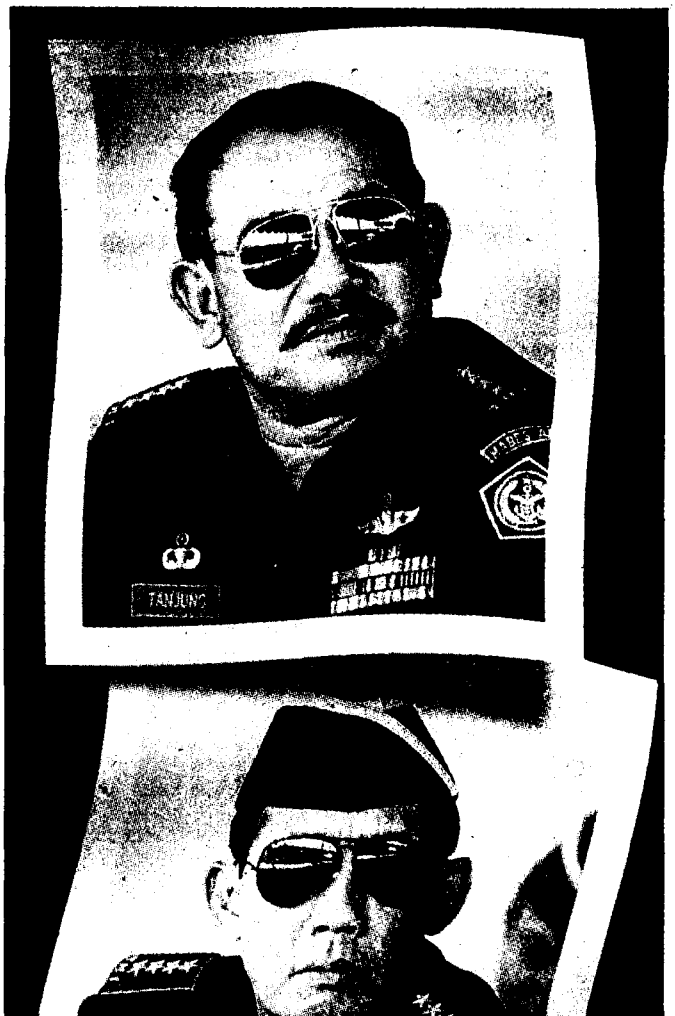
■ FOTO: GINO F HADI/GRAFIS: GUN


R HARTONO
PRABOWO SUBIANTO



Letjen TNI Prabowo Subianto

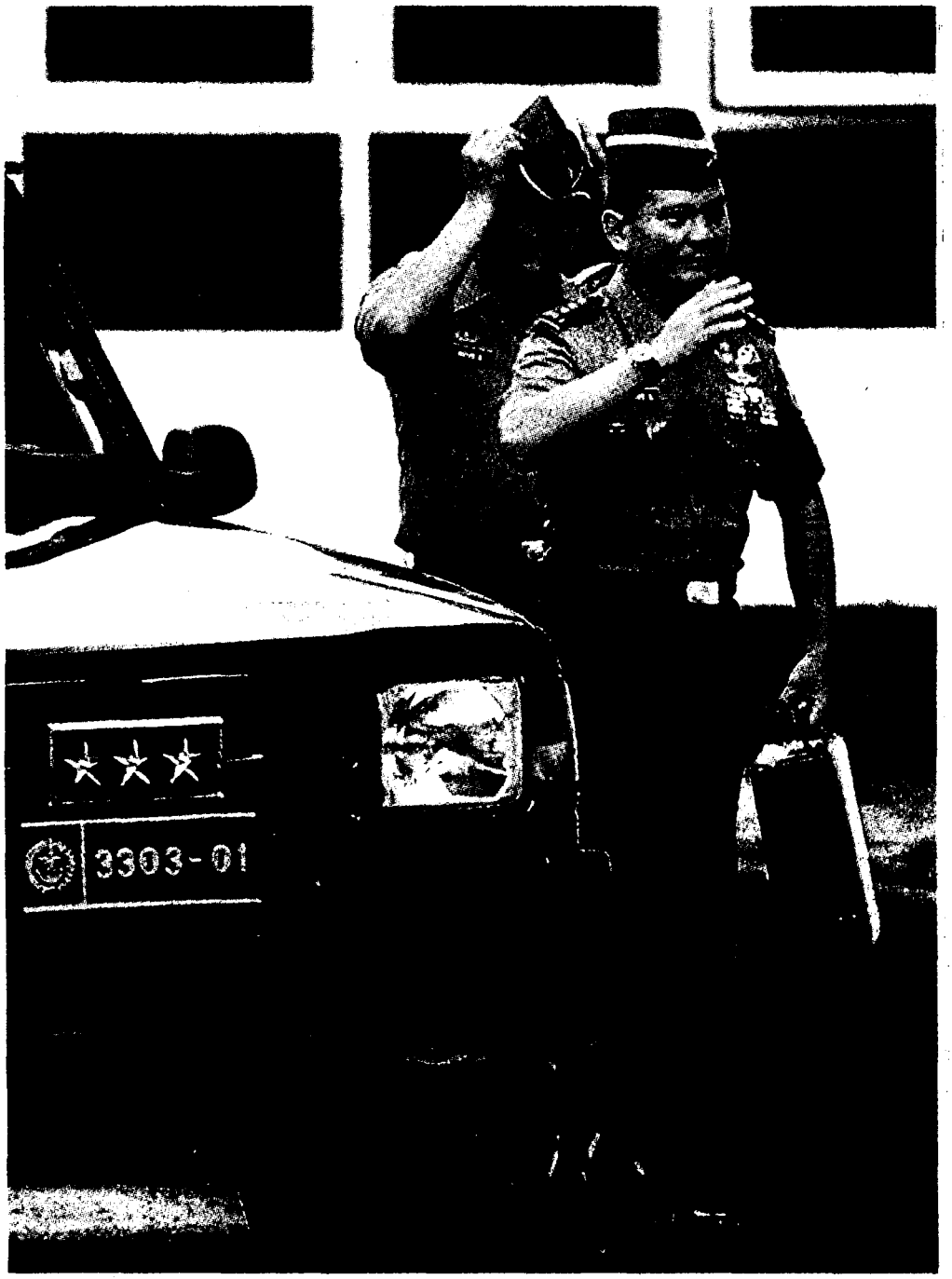
■ FOTO: GINO F HADI/GRAFIS: GUN



■ FOTO-FOTO: DOK MEDIA/GRAFIS: GUN

■ DARI ATAS: Jenderal Feisal Tanjung, Jenderal Hartono, dan Mayjen (ketika itu) Prabowo Subianto.

Media:
BISNIS INDONES
JAKARTA POST
JAWA POS
KOMPAS
KEDAULATAN R
MEDIA INDONES



TANPA PENGAWALAN: Mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto datang ke Mabes TNI AD dengan mobil dinas Land Rover. Prabowo memenuhi panggilan DKP tanpa pengawalan, hanya didampingi seorang stafnya berpangkat bintara. (Foto:*Sutra Merdeka*/rtr-55b)

Dewan Kehormatan Perwira yang dibentuk untuk menangani kasus penculikan, langsung memeriksa tiga perwira tinggi ABRI; Letjen TNI Prabowo, Mayjen TNI Muchdi dan Kol Inf Chairawan. Tapi ada pendapat, seharusnya mereka diadili di Mahmil dahulu, baru diperiksa DKP.



Kepanasan kehormatannya lengah diuji.

Pusat
LEM
THE

S INDONESI
RTA POST
A POS
PAS
RAKYAT
A INDONESI

T

da kesan deng
RI setengah hat
culikan ini?
ebagai ketua DK
atu hal yang bail
ga melakukan
ewati Dewan Ke
dijelaskan bahv
ya kode etik per
a Utama artinya
rwiraan yang uta
u seorang perwir
rwiraannya ma
KP. Demikianla
mengangkat bah
ABRI ini mau me
ai proses yang d
an pertimbangar
masuk keperwi

lu mengapa ac
antara perwira
yang langsung d
dak. Tidak ada pe
esnya, itu berlaku
etulan sekarang i
lumnya kan perw
melanggar di b
P. Tetapi tidak diu
sifatnya. DKP itu
egitulah, pada pri
rangka memperti
-baiknya, setepat
ira khususnya ya
n-pelanggaran.
akan diambil na
mbangan yang te
pkan dengan pro
tepat. Apakah k
dinasnya dengan
n-struktural itu m

rja DKP menda
nal. Apakah in
KP berusaha sem
ungkin untuk bis
ik kepada Panga
tusan. Terbaik di
ataupun kesalaha
disampaikan kep

telah dibentuk D
an, banyak tunt
buka kasus lan
k dan Lampung
gini deh. Anda ka

JAKARTA POS
JAWA POS
KOMPAS
KD. RAKYAT
MEDIA INDO



Dok/Pembaruan

Letjen TNI Prabowo Subianto

Kasus
Dew
perang
Yogyakarta. Ka
keras eks-ten
ral dengan pa
laskar gerilya n
bentukan Belar
kendati itu m
katan Konfe
DK kedua te
Kolonel Bamb
tak percaya
Nasution ter
hanan Sri S
membentuk D
Pusat Ikatan P
dan mengup
militer. Nar
perwira senior
berkembang n
1952. Istan
dan Preside
membubarkar
berakhir tiga t
'Piagam Y
berziarah k
Jenderal Soed
Kasus yang
adalah ket
mencuat. I
yang dianggu
di pusat menc
membentu
banyak m
kepada para p
pemberontak
Kasus

FIRMAN WIBOWO

"Nah, ini kesempatan bagi ABRI untuk menunjukkan betul-betul sebagai pelopor dalam menegakkan supremasi hukum di Tanah Air."



■ DOK MEDIA

ELSAM Pu
L
TI

Media:

- BISNIS INDO
- JAKARTA PO
- JAWA POS
- KOMPAS
- KD. RAKYA
- MEDIA INDO



Subagyo HS bersama wartawan dalam suatu kesempatan.

Pe

Jakarta, S
Dalam kas
Pencari Fak
kan penyeli
dam) Jaya.
ua TPF Ma
akan mend
son Sirait s
Kedatang
menurut M
puspom A
Hendrik se
culikan ini
formasi ke
melalui me
"Kami ge
yatakan ak
genai pencu
dan keteran
berguna unt
kasus oran
kepada *Me*
Fokus per
kan yang n
1996 lalu i



Munir (paling kanan) bersama orang tua korban penculikan.



DEWAN KEHORMATAN PERWIRA: (A) Jenderal Subagyo HS (Ketua), (B) Letjen Fachrul Razi (Wakil Ketua), (C) Letjen S Bambang Yudhoyono, (D) Letjen Agum Gumelar, (E) Letjen Djamari Chaniago, (F) Laksdya Achmad Sutjipto, (G) Laksdya Soeratmin, (H) Letjen Sugiono. Foto dua anggota lainnya, Letjen Yusuf Kartanegara dan Letjen Arie Kumaat, tidak tersedia.

■ FOTO-FOTO: GINO F HADI/GRAFIS & IMPRESI FOTO: IY & GUN

Hal: 1/ .....
Kelas: .....

LSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	Berita Buana	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Rakyat Bicara:

Tangkap Mereka!

■ Eka Widowo, *pemegang saham publik BBO*
Jl. Cik Ditiro, RT 08/09, No.53, Jakarta Pusat

SELAMA ini dalam kasus pembobolan bank publik, pemegang saham publik selalu dirugikan oleh pemerintah. Jika deposan atau pemegang obligasi dijamin penuh oleh pemerintah, pemegang saham publik justru dibiarkan. Padahal Bl Syahril Sabirin atau Menkeu Boediono sendiri tidak memberikan penjelasan secara jujur mengenai nasib pemegang saham publik dari ketiga bank yang dibekukan.

Sepantasnya, pemerintah ikut memberikan jaminan kepada pemegang saham publik. Nasib mereka jangan disamakan dengan pemilik saham mayoritas bagi bank yang dibekukan, penyebab bank itu dibekukan. Jangan sampai seperti kasus bank Sunya, di mana pemilik saham publik tidak jelas nasibnya.

■ Tati Wulandari, *penabung di BUN*
Jl. Abdurjani, Rawabokor No. 9, Jakarta Pusat

DANA yang saya tabungkan ke bank memang tidak terlalu besar, hanya sangat menentukan untuk kelanjutan kuliah saya. Untuk itu dalam kasus pengambilan dana tabungan di bank-bank yang ditutup pemerintah, saya harap prosedurnya jangan berbelit-belit.

Bagi saya, jaminan yang diberikan pemerintah terhadap dana tabungan atau deposito yang ada di bank-bank yang dibekukan, merupakan suatu hal yang baik. Tapi, saya minta agar pemerintah tidak mempersulit pengambilan dana tabungan atau deposito (hanya) tersebut yang dalam kasus-kasus pembekuan bank sebelumnya.

■ Agus [illegible], *pemegang saham Bank Yakin (Yakin)*
[illegible]

[illegible] pemerintah [illegible] bank [illegible] pemerintah [illegible] bank [illegible] pemerintah [illegible] bank [

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

DPRD Minta Danrem Ungkap Kasus Penculikan Kosasih

TEGAL — Hingga kemarin pihak yang "menculik" Ketua DPRD Kodya Tegal yang juga Ketua DPD II Golkar Kol Laut Kosasih belum terungkap. Sementara Kosasih sendiri menurut Jubir FKP, Eka Hardiyanto SE, enggan menyebutkan kelompok maupun lokasi penyekapannya. Bahkan apa yang ditanyakan para penculik selama penyekapan itu, ia tidak mau membeberkan.

Beberapa anggota dewan mengharapkan Komandan Korem 071/Wijayakusuma Kol Inf Muhammad Nur Muis segera membeberkan oknum yang melakukan 'penculikan' terhadap Ketua DPRD itu.

Syarif Hafawi SH, anggota DPRD kepada wartawan menyatakan hendaknya Danrem segera memenuhi janjinya saat menerima pengaduan dari jubir FKP Eka Hardiyatna. "Kita mengharapkan Pak Muis segera membeberkan siapa pelaku penculikan, kalau perlu dilakukan dialog dengan anggota dewan," pinta Syarif yang juga anggota FKP.

Menurut pemantauan *Republika*, kegiatan perkantoran di lingkungan Sekretariat Wilayah Daerah (Setwilda) Kodya Tegal Jateng kemarin sebagian tampak lumpuh. Para pegawainya kebanyakan menghabiskan waktunya dengan main *gaple*, mengobrol atau berjalan-jalan di seputaran Balai Kota. Tindakan ini dilakukan sebagai wujud protes atas instruksi Walikota yang meminta pegawai tidak ikut dalam demo duduk di Balai Kota.

Suasana perkantoran yang lumpuh terlihat di Kantor PMD, Humas, Sospol, Dipenda, RSPD, Itwil dan lain-lain. Banyak pegawai di kantor itu yang asyik main catur, gaple, baca koran, dan sebagainya. Meski demikian untuk kantor pelayanan ada satu atau dua pegawainya yang masih tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Tapi yang banyak main catur dan gaple, mau kerja bagaimana karena suasananya sudah tidak enak sebab tiap hari didemo terus," ujar seorang pegawai.

Demo duduk di kantor Balai Kota sampai kemarin masih terus berlangsung. Aksi yang dimotori anggota DPRD dari FKP dan FPP telah memasuki hari ketiga. Suasana pendopo Balai Kota sendiri penuh dengan spanduk yang berisi permintaan agar Walikota Tegal Kol Inf H Zakir mundur dari jabatannya.

Tak hanya itu sekitar 5.000 pamplet bertuliskan Zakir Mundur terpampang di berbagai sudut kota serta kaca mobil.

■ wab

Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Ketua DPRD Tegal Diduga Diculik

TEGAL (Media): Ketua DPRD Kodya Tegal (Jawa Tengah) Kosasih, diduga menjadi korban penculikan kelompok tak dikenal, dan dikaitkan dengan *gonjang-ganjing* tuntutan penurunan Wali Kota HM Zakir. Mungkin karena merasa ditekan, Kosasih hingga kini Kamis (20/8) belum buka mulut.

Aksi yang menghebohkan masyarakat Tegal tersebut terungkap dari laporan juru bicara F-KP DPRD Kodya Tegal Eka Hardiyanto yang mengadukannya kepada Komandan Korem 071/Wijayakusuma Kol Inf Muhammad Nur Muis Eka. Dalam laporannya disebutkan korban yang juga Ketua Golkar Kodya Tegal itu 'dijemput' dari rumahnya sekitar pukul 03.00 dini hari, pekan lalu. Empat hari kemudian (Senin, 17/08) ia dibebaskan para penculik.

"Sampai saat apa yang diinginkan para penculik belum diketahui karena Pak Kosasih tidak mau bercerita. Dia lebih suka diam dan mengaku ditekan kelompok tertentu," ujar Eka menirukan korban.

Kosasih, menurut Eka, dibawa ke sebuah tempat di Semarang. Tak jelas apakah selama empat hari korban dalam sekapan mengalami ancaman fisik. "Saya sendiri yang dekat dengan dia tidak banyak mendapatkan keterangan yang berarti," tegas Eka kepada Danrem.

Ketika dikonfirmasi *Media*, Kamis (20/8) di ruang kerjanya, Danrem tidak setuju kalau peristiwa itu disebut sebagai penculikan. "Itu mungkin panggilan dari atasan yang mendadak. Hanya saja, memang kalau mengingat waktunya (pukul 03.00—Red) memang kurang etis," katanya.

Sementara itu ketika beberapa hari lalu ditemui *Media*, dan *Kompas*, Kosasih tidak terkesan jadi korban penculikan. Hanya saja, penampilannya memang terkesan *kalem*. Menurut Kosasih, Wali Kota HM Zakir belum mau turun, sebab surat dari Depdagri yang menyatakan dirinya harus *lengser* belum juga turun. "Ya, terus kita mau apa," katanya.

Kalangan reformis di Tegal menduga, SK DPRD No 03/1998 yang dikirim ke Mendagri beberapa waktu lalu (soal pengusulan pencopotan wali kota) sebagai pemicu adanya aksi penculikan. "Logikanya memang begitu," papar Ki Enthus Susmono, salah seorang tokoh reformis dari Kesatuan Aksi Reformasi Tegal (Kiret).

Menurut dalang *mbeling* itu, Zakir seharusnya tahu diri. "Kurang apa lagi, rakyat melalui DPRD sudah tidak menghendaki dia tetap menjabat. Dia memang *ndableg*," ujarnya.

Usaha menurunkan HM Zakir oleh kaum reformis mendapat dukungan luas masyarakat. Misalnya sejumlah mahasiswa melakukan aksi mogok makan. (JI/N-2)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari		1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 24 30	Juni	Desember	2003

"Saya tidak Pernah Bermimpi Bisa Bebas..."

"SENIN malam tanggal 17 Agustus 1998, *lamat-lamat* saya mendengar berita di televisi, bahwa Presiden memberikan grasi kepada tiga napol (narapidana politik— **Red**) PKI, salah satunya adalah saya. Saya langsung tertunduk. Dalam diri saya waktu itu hanya ada perasaan haru, bingung, kaget, dan syukur kepada Allah SWT," kata Manan Effendi (80) dengan tegas dan sorot mata tajam, ketika berbincang di ruang tunggu Poliklinik LP Kalisosok, Surabaya, Selasa (18/8).

Ia melanjutkan: "Seketika itu pula, dari kursi roda yang menopang kelumpuhan kaki saya di balik terali besi (sambil menunjuk sel), saya tundukkan kepala, seraya mengucap *Alhamdulillah Hirobbilalamin....*"

Selain Manan Effendi, dua napol lain yang juga mendapat grasi dari Presiden BJ Habibie adalah Alexander Warrouw (81) dan Pudjo Prasetyo (72). Mereka sama-sama dihukum seumur hidup, dan belakangan menghabiskan sisa hukuman di LP Kalisosok (Surabaya), Balikpapan (Kaltim) dan LP Kedungpani, Semarang (Jateng). Dari tiga napol *sepuh* tersebut, Manan masih menunggu jemputan keluarga, Warrouw baru meninggalkan LP hari Rabu ini, sedang Pudjo telah dibopong anaknya Selasa kemarin.

***

MANAN Effendi — lelaki kelahiran Turen, Malang, Jatim — masih cukup *trengginas* menjawab pertanyaan soal perjalanan hidupnya selama ini. Tokoh PKI di Kaltim yang kini selalu menggunakan kursi roda tersebut juga dikenal sebagai mantan redaktur dan penanggung jawab Harian *Suara Kalimantan Timur* (SKT).

"Saya tidak pernah mimpi bisa bebas. Tetapi dalam benak saya selalu terlintas kata-kata, ada waktu untuk datang dan ada waktu untuk pergi," kata rekan dekat Alexander Warrouw ini. Hari itu Manan memakai kaos biru bertuliskan Bennetton.

Mengaku sebagai Arema *ndeso* (anak Malang dari desa Turen), ditangkap aparat keamanan pada 9 Oktober 1965, di Balikpapan. Ketika itu, dirinya sedang berada di kantor Redaksi SKT. Tuduhan yang dikenakan kepada dirinya selain sebagai salah satu tokoh PKI di Kaltim, juga karena berita-beritanya yang begitu memihak kepada perjuangan PKI.

Dari situlah ia mulai menjalani hidup di terali besi, di LP Samarinda, Kaltim. Pada tanggal 9 April 1987, dirinya dikembalikan ke LP Kalisosok Surabaya.

Sebelum terjun menjadi wartawan, kata Wakil Sekretaris Comite Daerah Besar (CDB) PKI Kaltim, Manan pernah bekerja sebagai arsitek perusahaan minyak asing, Batavia Petroleum Maskapai.

Namun tak lama kemudian, ayah dari satu putri dan dua cucu tak betah kerja di situ. Ia kemudian memilih menjadi wartawan dan bergabung di SKT.

Ia mengaku, mengikuti perkembangan di luar penjara, termasuk *lengsernya* Soeharto dari kekuasaannya selama 32 tahun dari TV dan koran yang dibawa pengunjung ke penjara.

Maka, kata Manan yang akan kembali ke Grobogan (Jateng) itu, setelah keluar dari LP ia ingin hidup sebagai orang biasa. Tetapi ia bertekad akan masuk ke partai yang bernapaskan demokrasi.

***

ALEXANDER Warrouw mengharapkan pemerintah memberikan keadilan dengan cara membebaskan seluruh napol/ tapol di seluruh Tanah Air. Bagaimanapun mereka sudah cukup merasakan pahit getirnya kehidupan LP selama puluhan tahun di bawah rezim Soeharto.

Ia mengungkapkan hal itu saat ditemui di LP Kelas II A Balikpapan. Kepala LP, JA Takasiliang yang mendampingi Warrouw, mengatakan, kendati Keppres No 42/G Tahun 1998 sudah keluar 15 Agustus, namun pembebasan baru dilakukan Rabu ini, sambil menunggu penyelesaian administrasi.

Dalam perbincangan, Warrouw menyatakan, dirinya merasa bersyukur kepada Tuhan karena dalam era reformasi sekarang ini dapat menghirup udara bebas. Padahal, selama 33 tahun menjalani hukuman, dirinya selalu meminta keringanan hukuman, namun pemerintahan rezim Soeharto tidak pernah memperhatikan.

"Saya sudah sadar selama menjadi pengurus di Dewan Harian CDB PKI Kaltim di Balikpapan meninggalkan agama yang saya peluk. Sisa hidup saya ini sekarang saya abdikan untuk melayani Tuhan....," kata Warrouw, yang merantau bersama istrinya dari tanah kelahirannya di Manado tahun 1952.

Suami Yuliana Laurina (83) ini ditangkap dan dihukum pada tahun 1965. Ia masuk ke LP Kelas II A Balikpapan bersama enam tapol lain, termasuk Manan Effendi, yang belakangan berada di LP Kalisosok, Surabaya. Oleh pengadilan setempat menjadi orang baik. "Tuhan telah memberikan ketenangan selama saya dipenjara," tutur pria yang memiliki dua anak, tiga cucu dan enam cicit tersebut. Ia kini sering sakit-sakitan karena mengidap diabetes, asam urat, dan darah tinggi, meski penglihatan dan pendengarannya masih awas.

***

NAPOL lain, Pudjo Prasetyo keluar dari sel LP Kedungpani, Semarang, Selasa. Satu jam kemudian, setelah putri sulungnya datang menjemput, menggunakan kursi roda Pudjo dibopong pulang ke Tegalsari, Semarang.

Tak ada wajah kegembiraan, karena fisiknya yang cacat dan menderita parkinson sejak 13 tahun silam. Meski demikian, pendengarannya masih cukup baik dan bisa menjawab beberapa pertanyaan, walau terbata-bata. "Tangan saya sudah tidak bisa digunakan. Untuk menulis saja gemetar....," ujarnya lirih.

Pudjo Prasetyo alias Sujahmin alias Gunadi, dilahirkan di Pati, 2 Juli 1926 terlibat PKI setelah membentuk sebuah Perguruan Tinggi di Denpasar, Bali, dan bergabung dengan sebuah organisasi perusahaan swasta yang menjadi mantel PKI.

Setelah G-30-S/PKI meletus, Pudjo ditangkap Pomdam VII/ Diponegoro di Semarang, November 1967, dan dibawa ke Denpasar untuk disidang. Berdasar keputusan PN Denpasar 9 April 1979 ia dihukum seumur hidup. Atas putusan itu ia pernah mengajukan grasi dan pada tanggal 21 Desember 1990 grasinya ditolak.

Bagi Pudjo, pengalaman 32 tahun lebih berada dalam sel termasuk paling lama di Denpasar (25 tahun) memberi hikmah yang tidak sedikit. "Hikmahnya banyak, saya jadi sabar, terutama melakukan introspeksi dan belajar. Saya belajar bahasa Perancis, akupunktur, dan banyak membaca buku...," tuturnya.

Ia berharap, kini waktunya kemerdekaan berpikir diperoleh bangsa Indonesia, dan ti-

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Polisi Culik 97 Petani Penggarap Lahan Tidur

MEDAN (Media): Sedikitnya 97 masyarakat penggarap lahan tidur hutan penggunaan lain (HPL) di sekitar kaki bukit Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Besitang Langkat, dinyatakan hilang sejak Minggu (9/8). Mereka diculik puluhan oknum berpakaian polisi.

Suarti dan Umi Kalsum, dua anggota keluarga korban penculikan, bersama 50 rekannya mengadukan hal itu ke DPRD Sumut, kemarin. Mereka mengatakan penculikan dilakukan puluhan oknum polisi bersenjata lengkap saat para petani itu sedang mengerjakan lahan tidur.

"Para petani tersebut dikejar-kejar bagai harimau menangkap kambing. Yang tertangkap entah dibawa ke mana. Kini kami tidak tahu di mana mereka," kata Suarti yang juga dibenarkan Umi Kalsum.

Sejak peristiwa tersebut, para petani yang ditangkap tidak ada yang pulang ke rumah masing-masing. Umumnya mereka yang ditangkap masih satu keluarga. Bahkan ada satu keluarga yang sampai lima orang. Keluarganya juga tidak berani menanyakan penculikan tersebut ke Polres Langkat.

Menurut Suarti, mereka diculik karena dituduh sebagai penjarah liar. Padahal, penggarapan lahan di sekitar kaki TNGL berdasarkan keputusan Tim-18 Pemda Langkat, sebagai upaya memberdayakan kehidupan masyarakat di saat krisis ekonomi saat ini. Usul masyarakat agar diizinkan menggarap lahan disetujui Pemda Langkat, melalui surat perintah No. 590-160/SP/1998 tanggal 9 Juli 1998 yang ditandatangani Sekda Langkat, Untung Z Margono.

Namun Wakapolda Sumut Kolonel Pol IW Madja, yang dikonfirmasi *Media* menolak anggapan aparatnya melakukan penculikan atau penangkapan. Menurut dia, para petani tersebut hanya dimintai keterangan. Tapi dia tidak bisa menjelaskan alasan petani ditangkap dan kenapa pula penangkapan itu tidak disertai surat penangkapan. "Tanyakan saja ke Polres Langkat," tukasnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Langkat, Burhanuddin Siregar, menyesalkan penangkapan tersebut. Mestinya, sebelum melakukan penangkapan polisi mengkonfirmasikan lebih dahulu kepada tim Pemda Langkat yang sedang menanganinya.

Siregar berpendapat para petani menggarap lahan tidur HPL itu bukan mencari kekayaan, tapi hanya sekadar mengolah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi pada dasarnya lahan tersebut memang sudah puluhan tahun mereka olah berdasarkan asas pemanfaatan areal telantar.

"Kami dengar mereka juga sempat disiksa. Tindakan ini jelas melanggar hak asasi manusia. Karena itu, Polres Langkat harus membebaskan para petani tersebut dalam waktu satu kali 24 jam. Kalau tidak, kami segera melaporkannya ke Komnas HAM," ancam Siregar. (CS/U-4)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Kapolda Jatim Bertekad Temukan Hilangnya Wilogo Di Surabaya

Surabaya, 11 Agustus

Kapolda Jawa Timur (Jatim) Mayjen Pol Drs M Dayat SH, MBA,MM mengatakan, penyelidikan kasus hilangnya Drs R Wilogo, Pembantu Wali Kota Madya Surabaya wilayah Surabaya Selatan, hingga kini tetap dilanjutkan. "Target kita menemukan Wilogo dulu. Baru kemudian mengungkap, siapa pelakunya dan apa modus operandi penculikan terhadapnya," tegasnya menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri pertemuan dengan para WNI etnis Tionghoa di Balai Kartika Kodam-V Brawijaya, Senin (10/8).

Dikatakan, pihak kepolisian banyak menerima informasi dari masyarakat, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Mana yang paling relevan, masih sedang dalam pengkajian intensif, kata mantan Staf Ahli Kapolri itu. Bamun ia mengingatkan, segala langkah Polisi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Disinggung tentang kemungkinan adanya rekayasa pihak tertentu atas raibnya R Wilogo, Kapolda Jatim berjanji akan membongkarnya dan menangkap semua yang terlibat tanpa pandang bulu. Ia membenarkan, dari olah tempat kejadian perkara hingga barang bukti mobil sedan Timor serta sepatu kiri R Wilogo, hingga kini belum bisa memberikan petunjuk yang berarti.

"Kita tidak patah semangat. Terus kita lakukan penyelidikan hingga kasusnya dapat kita tuntaskan," tegas Dayat sambil membenarkan, kasus ini sudah dilaporkan Wali Kota Surabaya, Kolonel Inf Sunarto Sumoprawiro ke Bakorstanasda Jatim.

Wali Kota Pasif

Kapolda tidak memberikan komentar tentang pernyataan Ketua Komisi-B DPRD Kodya Surabaya, Drs Ali Yacub yang menilai Wali Kota Sunarto Sumoprawiro pasif menanggapi hilangnya salah seorang pembantu terdekatnya, yang diisukan sangat terkait dengan masalah jual-beli tanah ganjaran Kelurahan Wiyung beberapa waktu lalu. Ali Yacub bahkan menyayangkan tindak Sunarto Sumoprawiro melapor, tidak dilanjutkan dengan membantu menemukan Wilogo.

Kapolda Jatim hanya tersenyum menanggapi usul salah seorang anggota DPRD Kodya Surabaya, agar Pemda Kodya Surabaya membuka sayembara dengan hadiah uang untuk bisa menemukan kembali pejabat daerah yang hilang itu.

Kasus hilangnya Drs Wilogo menjadi misteri bahkan beberapa tokoh warga Kelurahan/Kecamatan Wiyung, Kodya Surabaya menduga keras, akibat diculik orang yang profesional. Otak utama penculikan diyakini seseorang yang menghendaki Wilogo tidak bisa memberikan jalan (sebagai saksi kunci) dalam rencana pembatalan proses jual-beli tanah ganjaran seluas 9,5 ha kepada investor PT ST yang ditengarai cacat hukum.

Laporan warga menyebutkan, tanda tangan mereka yang digunakan oknum Lurah Wiyung di tahun 1990 lalu untuk mengabsahkan jual beli tanah itu, sebenarnya bukan tanda persetujuan para warga. Bahkan kemudian terbukti, tanda tangan tersebut adalah daftar hadir dalam rapat KB dan Kader PKK, tanggal 5 Februari 1990.

Wilogo sebelum lenyap, sempat mengadakan pertemuan dengan warga Wiyung dan menjelaskan, proses jual-beli tanah ganjaran desa itu sebagai tidak sah. Namun pada malam harinya Rabu, 29 Juli ia dilaporkan hilang ketika hendak menghadiri rapat di rumah dinas wali kota. Sedan Timor kendaraan dinas yang dikemudikan sendiri ditemukan di dekat rumah dinas Wali KMS Sunarto Sumoprawiro.

(070/029)

Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

a:		Tanggal						Bulan		Tahun
ISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
AKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
AWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
OMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
D. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
EDIA INDONESIA	☐	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Ungkap 'Penculikan' Pembantu Walikota Surabaya

Walikota Minta Bantuan Bakorstanasda Jatim

SURABAYA — Upaya Walikotamadya Surabaya, Sunarto Sumoprawiro, untuk secepatnya menemukan R Wilogo, pembantu Walikota Surabaya Selatan yang hilang 'diculik' sejak Rabu pekan lalu, terus dilakukan. Selain menyerahkan perkara itu kepada Kepolisian, Walikota juga minta bantuan Bakorstanasda setempat.

Menurut Kabag Humas Pemda Kotamadya Surabaya, H Bambang Sugiharto, permintaan bantuan pada Bakorstanasda itu semata-mata agar Wilogo cepat ditemukan. "Jadi, selain ditangani Kepolisian, pencarian Pak Wilogo juga di *back up* Bakorstanasda Jatim. Pak Walikota sudah minta bantuan ke sana," ujar Bambang, kemarin.

Dijelaskan, kendati hilangnya Wilogo secara resmi telah ditangani polisi dan Bakorstanasda, pemda tetap berusaha mencari dengan cara lain. Misalnya, Walikota memerintahkan pejabat di lingkungan Pemda Surabaya ikut melakukan pencarian dan melaporkan jika memperoleh informasi tentang Wilogo.

"Pak Wali juga mengimbau kepada seluruh pegawai pemda serta masyarakat Surabaya, apabila mengetahui, setidaknya mendapatkan informasi keberadaan Pak Wilogo, diminta untuk segera melaporkan kepada polisi. Pemda betul-betul kehilangan Pak Wilogo," papar Bambang.

Hilangnya Wilogo, sejak semula diragukan oleh banyak kalangan. Ini lantaran sejumlah saksi yang diperiksa oleh polisi belum ada yang menunjukkan adanya unsur penculikan terhadap diri Wilogo.

Sejak Wilogo hilang, rumahnya dijaga ketat oleh aparat pemda yang ditugaskan secara khusus oleh Walikota. Penjagaan itu, menurut Bambang Sugiharto, bukan untuk mengisolasi istri Wilogo dari kejaran wartawan. "Tapi, sekadar untuk membatasi jumlah tamu yang datang ke sana. Istri Pak Wilogo *kan* sedih, bingung, dan sempat *shock*. Kasihan dia," tutur Bambang.

Sementara itu, Kapolda Jatim Mayjen Pol Drs M Dayat secara terpisah menjelaskan, bahwa kasus 'raib'-nya Wilogo tetap menjadi target khusus bagi aparat Kepolisian untuk mengungkapnya. "Kami telah menurunkan empat tim untuk menangani kasus hilangnya Pak Wilogo," papar Kapolda.

Ketika ditanya apakah hilangnya Wilogo itu ada unsur rekayasa dari kelompok tertentu, kapolda balik bertanya, "Kalau hilangnya ada rekayasa atau tidak, ya tanyakan pada istrinya (Ny Wilogo —red). Yang jelas, aparat Kepolisian tetap melakukan pengusutan."

Namun, jika dicermati dari kronologi peristiwa hilangnya Wilogo, Kapolda menilai kemungkinan raibnya pembantu walikota tersebut ada unsur pemaksaan. "Artinya, indikasi tersebut bisa dilihat dari sebuah sepatu milik korban yang tertinggal di dalam mobil. Barangkali dari situ patut diduga, korban ditarik paksa dari dalam mobil oleh kelompok orang," tukas Dayat.

■ esa/afa

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Setelah Diculik, Ketua DPRD Kodya Tegal tak Mau Cerita

TEGAL — Kasus penculikan bukan hanya menimpa kalangan aktifis. Seorang perwira menengah (pamen) ABRI bernama Kol Laut Kosasih yang juga Ketua DPRD Kodya Tegal Jateng pun mengalami peristiwa serupa.

Juru bicara FKP DPRD Kodya Tegal Eka Hardiyanto SE mengadukan kasus 'penculikan' yang menimpa pimpinan dewan itu kepada Komandan Korem 071/Wijayakusuma Kol Inf Muhammad Nur Muis, kemarin.

Menurut Eka, Kosasih yang juga Ketua DPD II Golkar diambil kelompok penculik dari rumahnya di Perumahan Taman Sejahtera sekitar pukul 03.00 WIB Jumat lalu. Ia baru dibebaskan para 'penculik' empat hari kemudian atau pada hari Senin lalu (17/8).

Eka mengatakan, akibat penculikan itu Kosasih bersama keluarganya kini dalam keadaan tercekam dan selalu diteror kelompok yang menculiknya.

"Sampai saat ini, apa yang diinginkan para penculik itu, Pak Kosasih tidak mau bercerita. Dia lebih suka diam dan mengaku dalam tekanan kelompok tertentu," kata Eka mengutip pernyataan Kosasih.

Hanya saja, Kosasih menjelaskan bahwa ia dibawa ke sebuah tempat di Semarang. Selama empat hari ia diinterogasi. Tak dijelaskan apakah selama dalam penyekapan itu Ketua DPRD itu juga mengalami ancaman fisik. "Saya sendiri yang begitu dekat dengan dia, tidak banyak mendapat keterangan yang berarti," jelas Eka kepada Danrem.

Danrem Kol Inf Muhammad Nur Muis kemarin pagi sebenarnya berencana mengadakan pertemuan dengan seluruh RT/RW se-Kodya Tegal. Tapi rencana tersebut ditunda. Danrem kemudian menemui anggota FKP dan FPP bersama ormas pemuda yang mengadakan aksi duduk di kantor Balai Kota sejak pagi hari. Aksi tersebut sebenarnya sudah berlangsung dua hari ini. Muis yang belum genap sebulan jadi Danrem itu, lalu mengajak dialog para pengunjuk rasa.

Dalam dialog itulah, Eka lalu memaparkan peristiwa yang dialami Kosasih. Dalam jawabannya, Danrem berjanji akan segera mengusut kasus 'penculikan' tersebut termasuk mencari kelompok yang melakukannya. Muis belum bisa memastikan siapa kelompok yang berani menculik pamen ABRI tersebut. Untuk itu, Danrem hari Kamis ini akan berangkat ke Semarang untuk mencari keterangan.

"Sebenarnya besok Kamis saya sudah ada rencana ke Kodim dan Batalyon di pantura. Tetapi karena kasus ini sangat penting, rencana itu saya batalkan dulu," kata Muis.

Berbagai pihak di Tegal menduga kasus 'penculikan' itu erat kaitannya dengan rekomendasi DPRD Tegal lewat SK No 03/-1998 ke Mendagri yang meminta Walikota Kol H Zakir mundur dari jabatannya. Alasan dewan meminta Zakir mundur adalah merupakan aspirasi sebagian besar masyarakat, mahasiswa dan ormas pemuda. Tapi SK tersebut belum mendapat persetujuan Mendagri lantaran keputusannya belum bulat. Ada satu fraksi yaitu F-ABRI yang belum mau menandatangani SK tersebut. ■ wab

AMIN MADANI/REP

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KEDAULATAN RAKYAT	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	Berita Buana	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

PT WM Culik Petambak Udang Tradisional

Bandar Lampung, Buana

PT Wahyuni Mandira (WM), perusahaan tambak udang windu di Kecamatan Perwakilan Sungai Menang, Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan, diduga sering melakukan penculikan dan penganiayaan terhadap petambak tradisional di empat desa sekitar lokasi. Hal ini dilakukan karena para petambak itu menolak menjadi plasma anak perusahaan PT WM.

Ratusan petambak tradisional itu, awal Oktober lalu, mendatangi pos PT WM di Desa Bumi Pratama Mandira Sungai Mesuji. Mereka menyampaikan aspirasi penolakan menjadi plasma, sekaligus memprotes kesewenang-wenangan perusahaan itu.

Menurut beberapa tokoh petambak tradisionial, seperti KH Yahya Lubis dan A Hasibuan, penculikan terhadap lima warga pada 8 September silam, yang dilakukan oknum aparat keamanan PT WM, telah dilaporkan ke Komnas HAM di Jakarta.

Kelima warga yang diculik tersebut ialah H Zakar, Dayat, Didi, Ramli, dan Untung Suroto. Menurut pengakuan korban, mereka diambil aparat keamanan PT WM dari rumah mereka pada tengah malam.

Para penculik lalu membawa mereka ke perairan Laut Jawa. Mereka mengintimidasi petambak tradisional itu. Selain itu, aparat keamanan, yang bersenjatakan pistol dan senapan laras panjang, juga memukuli korban.

Menurut KH Yahya Lubis, Sabtu (3/10), aparat keamanan PT WM juga sering merusak rumah para petambak. Para petambak tradisional mulai menggarap lahan tambak sejak 1986.

Para petambak tradisional itu melakukan panen perdana sejak 1994 lalu. PT WM baru mendapat izin penggarapan lahan tambak udang windu pada Oktober 1995. Ternyata, lahan perusahaan PT WM berdekatan dengan milik warga. Pihak perusahaan yang telah diberi izin seluas 20.000 ha dari areal cadangan 35.000 ha itu berusaha mencaplok lahan petambak tradisional 15.200 ha. ❑ **dbm**

Kelas: .....

SAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

e:		Tanggal						Bulan		Tahun
ISNIS INDONESIA	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
AKARTA POST	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
AWA POS	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
OMPAS	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
D. RAKYAT	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
EDIA INDONESIA		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Kasus Pengeroyokan Massa di Menganti, Gresik

Keluarga Korban Siapkan Tuntutan

ABAYA — Keluarga korban oyokan dari Jalan Banyu Urip Surabaya akhirnya menunjuk ra Ny Chusnul Khotimah, SH di, SH untuk mewakili kepen-nya. Mereka mendesak aparat nan Gresik untuk mengungkap pelaku pengeroyokan yang me-kan tewasnya sembilan orang amis (30/7) malam. (*Republika*, tus).

ga Banyu Urip Kidul, melalui aranya, Drs. H.M. Slamet, me-an delapan korban tewas warga Urip Kidul selama ini diakui kuan baik. "Kepergian mereka nganti membawa misi kemanu-yaitu mengantar Nono pulang anya karena Nono sakit," kata et yang juga mantan anggota D Kotamadya Surabaya saat di-ngi *Republika*, kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya (Sabtu, 1/8), warga Kecamatan Menganti pada Jumat malam membantai sembilan orang yang dicurigai sebagai komplotan pencuri sepeda motor. mereka, delapan di antaranya warga Banyu Urip Kidul dan seorang lagi dari Karangpilang, Surabaya.

Semula, penduduk Menganti menangkap Agus Effendi — warga Karangpilang — yang saat itu kedapatan mencuri sepeda motor. Kepada penduduk setempat, dia mengakui ditemani oleh delapan kawannya berkendaraan Suzuki Carry L-1587-AD.

Atas informasi tersebut, massa kemudian menemukan ciri-ciri kendaraan yang ditumpangi delapan orang. Dengan membabi buta, warga Menganti bertindak brutal mengeroyok penumpangnya hingga semuanya tewas di lokasi kejadian.

Menurut Slamet, tersangka Agus Effendi pernah bertempat tinggal di Banyu Urip Kidul X D. "Namun, sejak enam tahun lalu dia pindah ke Karangpilang. Sesekali dia juga masih datang ke kampung sini. Bisa saja, saat itu Agus "menggigit" teman-temannya yang berada di mobil, tapi teman-temannya tidak tahu kalau Agus sendiri bertindak jahat," lanjut juru bicara yang bermukim di Banyu Urip Kidul X B sejak tahun 1976.

Salah satu tuntutan yang diajukan keluarga korban, adalah terungkapnya dalang pelaku pengeroyokan. "Nyawa sembilan orang itu tidak sedikit. Seharusnya pemda Gresik, menyampaikan permintaan maaf kepada warga Banyu Urip Kidul, jika mungkin ada kesalahan yang dilakukan warganya. Apalagi, Kades Gading Watu, Sukiwi, saat itu ikut menyaksikan pengeroyokan," kata Slamet yang juga bertugas sebagai pengawas di kantor Depdikbud Kecamatan Wonokromo.

Di mata hukum, lanjut Slamet, kepala desa Gading Watu bisa dimintai kesaksiannya mengenai warganya yang bertindak brutal. "Karena warga Banyu Urip berkeyakinan bahwa keberangkatan ke Menganti itu membawa missi kemanusiaan. Bukan misi jahat mencuri sepeda motor," tegas nya.

Misi kemanusiannya adalah mengantar Nono yang sakit, pulang ke desa Domas, Kecamatan Menganti, Gresik. Sehari-hari, Nono bekerja sebagai tukang becak yang mangkal di kawasan Banyu Urip Kidul X. Dengan Suzuky Carry milik Dodi Ernawan (34), staff DPD Golkar Jatim, Nono diantar warga Banyu Urip pulang ke desanya.

Belum sampai di rumah Nono, Agus sendiri turun di desa Boteng, sedang mobil yang dikemudikan Dodi melanjutkan perjalanan ke rumah Nono. Setelah Agus tertangkap warga karena mencuri sepeda motor, kendaraan Dodi kemudian diburu warga. Jarak tertangkapnya Agus dengan lokasi berhentinya kendaraan Dodi sejauh 2 km. Tidak diketahui mengapa kendaraan Dodi berhenti di situ, karena seluruh korban tewas dihajar massa, sehingga tak ada korban selamat yang bisa dimintai keterangan. Kondisi Nono selamat, karena telah dipulangkan lebih awal dari kejadian.

Kapolwil Surabaya Taman, Kol. Pol. Drs. Aminudin Zain, saat dikonfirmasi mengaku pihaknya sudah memeriksa empat warga Menganti. Pemeriksaan terbatas pada kesaksian peristiwanya dan status mereka hanya sebagai saksi sehingga tidak dilakukan penahanan. ■ tok/esa

Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Setelah Pembantu Walikota Surabaya 'Diculik'

Lurah dan Camat Wiyung Disandera Warga

SURABAYA — Pemda Kodya Surabaya kembali berurusan dengan warganya. Belum tuntas kasus 'penculikan' Pembantu Walikotamadya Surabaya Selatan, R Wilogo, dua aparat pemda lainnya, disandera warga di Kelurahan Wiyung.

Kedua aparat yang disandera adalah Camat Wiyung, Nasirin, dan Lurah Wiyung, Kambali. Penyanderaan berlangsung mulai Kamis (30/7) pukul 12.00 WIB. Sekitar pukul 14.25 WIB kemarin, kedua sandera berhasil dibebaskan oleh aparat keamanan tanpa menimbulkan bentrok dengan warga.

Operasi pembebasan dipimpin langsung oleh Kapolwiltabes Surabaya, Kol Pol Alfian Anwari, dan Kapolresta Surabaya Selatan, Letkol Pol Arief Sumarwoto. Dua perwira ini berusaha meyakinkan bahwa segalanya akan berjalan lancar. Alfian bersama Arief, sekitar pukul 14.00, berhasil menemui kedua korban di ruang penyekapan.

Meski begitu, pembebasan kedua aparat pemerintah daerah tersebut berlangsung menegangkan. Sekitar 400 warga Wiyung berusaha menahan dengan melakukan penjagaan ketat di dekat ruang tempat korban berada. Menurut korban, yang ditemui *Republika* sesaat sebelum bebas, keduanya merasa karena kurang tidur dan tidak diberi makan. Sewaktu minta izin untuk salat Jumat juga dilarang. Mandi dan ganti baju pun tidak diberi kesempatan.

Warga melakukan penyanderaan ini lantaran kepada dua aparat pemda ini adalah orang yang bertanggungjawab soal penjualan atas pelepasan tanah ganjaran kelurahan Wiyung. "Warga sama sekali tidak pernah diajak rembukan soal penjualan tanah ganjaran. Tapi, tiba-tiba di tanah kelurahan itu dibangun perumahan Taman Pondok Indah milik PT Setia Tamara," ujar salah seorang warga.

Sementara itu mengenai nasib Pembantu Walikota Wilayah Surabaya Selatan, R Wilogo, hingga kemarin belum diketahui. Mapolresta Surabaya Selatan sedikitnya telah memeriksa tujuh orang untuk dimintai keterangan. Ketujuh orang tersebut, antara lain, saksi mata ketika menyaksikan kejar-kejaran antara mobil yang dikemudikan Wilogo dengan penculik.

Walikotamadya Surabaya Sunarto Sumoprawiro, menyesalkan adanya masyarakat atau oknum yang melakukan tindakan penculikan terhadap aparat pemerintah. Ia mengimbau kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) dan masyarakat kota Surabaya, supaya hati-hati menghadapi situasi saat ini. Walikota juga minta kepada warga supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan masing-masing. "Semua ikut menyelidiki penculikan Pak Wilogo," tegas walikota.

■ esa/tok

Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA		1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA		2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA		3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA		4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN		5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Kades Bitungjaya diduga culik karyawan

TANGERANG (Bisnis): Tim Pemda Kabupaten Tangerang kemarin memeriksa Kades Bitungjaya Kec. Cikupa, M. Dedi karena diduga terlibat dalam penculikan 23 karyawan PT Ekamitra Jayatama (EJ).

Tim yang diketuai Asisten Tata Praja Pemda Kab. Tangerang, Obun Burhanudin dan beranggotakan Kepala Itwilkab, Kakansospol serta Kabag Pemerintahan hampir sehari penuh memeriksa Dedi di Kantor Desa Bitungjaya. Pemeriksaan tersebut merupakan perintah langsung Bupati Tangerang.

Dedi diperiksa tim Pemda menyusul pengaduan 23 dari 65 karyawan EJ kepada LBH Yastek karena pada Rabu malam mereka diculik dari rumah masing-masing oleh sekelompok pemuda atas perintah Kades.

Keterangan yang diperoleh *Bisnis* menyebutkan, setiba di rumah Kades Bitungjaya para karyawan malam itu diintimidasi agar mau mencabut surat kuasa yang disampaikan kepada LBH Yastek berkaitan adanya upaya hukum untuk menyelesaikan masalah status 65 pekerja EJ yang dirumahkan dalam waktu tak terbatas dengan gaji sebesar 50%.

"Mereka juga dipaksa menandatangani pernyataan bersedia mendapat upah 65% tiap bulan selama dirumahkan dengan alasan Kades telah membantu mengupayakan kenaikan dari nilai awal 50%," ujar Hamid, kuasa hukum karyawan.

Dihadapan tim pemeriksa itu Kades Bitungjaya membenarkan pihaknya telah memerintahkan para pemuda setempat mengangkut 23 karyawan menggunakan minibus untuk dibawa ke rumahnya.

"Tapi bukan diculik melainkan dijemput sebab hari semakin malam, sementara mereka belum datang juga untuk memenuhi panggilan saya." (s2)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Kades Culik Karyawan Diperiksa

TANGERANG (Media): Dedy, Kepala Desa Bitung Jaya yang menculik 23 karyawan PT Ekamitra Jayatama, diperiksa tim dari Kabupaten Tangerang, Jum'at (31/7). Di hadapan tim yang terdiri dari Asisten Tata Praja Obun Baharudin, Kepala Itiwilkab Sudirman, dan petugas dari Kantor Sosial Politik, dia membantah telah melakukan penculikan.

Namun kepada wartawan, Dedy mengakui kalau dia telah menjemput 23 karyawan perusahaan suku cadang berbagai jenis kendaraan itu menggunakan kendaraan dengan mengerahkan para pemuda.

Menurut dia, para karyawan terpaksa dijemput karena mereka sudah ditunggu 30 menit di Balai Desa Bitung Jaya namun tidak datang. "Saya kesal, sehingga memerintahkan pemuda untuk menjemput mereka dari rumahnya masing-masing dengan menggunakan Daihatsu Espass warna biru milik saya. Dalam menjemput mereka, saya memang agak menekan. Tapi tidak menculik karyawan. Buktinya, sampai sekarang mereka masih ada," paparnya di hadapan Direktur PT Ekamitra Jayatama, Benny Winata, dan Babinsa Kecamatan Cikupa, Ramelan.

Dia menjelaskan penggunaan kendaraan untuk menjemput karyawan dimaksudkan untuk mempercepat perjalanan. Dia mengaku ingin menuntaskan masalahnya setelah dalam perundingan, Rabu siang, di kantor perusahaan tidak membuahkan hasil.

Kades tersebut juga mengakui berkata bahwa wilayah itu kekuasaannya, bukan wilayah Depnaker. Alasannya, banyak saudaranya yang bekerja di pabrik itu. Jika mereka dirumahkan, dari mana mereka cari makan.

Sementara itu, A Hamid, pengacara 64 (bukan 65) dari LBH Yastek Tangerang, tetap akan melaporkan masalah penculikan kliennya ke pihak yang berwajib. Dia menilai Kades hanya bermain istilah guna menghindari penggunaan kata 'menculik'. LBH Yastek juga mengaku telah mempunyai beberapa bukti kuat.

Dia juga tidak mempersoalkan jika Sulaeman dan 23 kawannya mencabut surat kuasa. Sebab, selain mereka masih terdapat 41 karyawan lainnya yang masih belum mencabut surat kuasanya.

Kepala Depnaker Tangerang, Apon Suryana, dengan tegas mengatakan surat pernyataan yang dibuat mereka secara hukum tidak sah, dan harus dibatalkan. Apa pun alasannya, sesuai dengan Permenaker, lanjut Apon, sepanjang tidak melibatkan Depnaker, perundingan itu tidak sah. Untuk itu, dia akan memanggil Benny Winata Direktur PT. Ekamitra Jayatama dalam waktu dekat.

(TR/U-4)

Hal. 17 .....
Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☑ Berita Buana	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Edi Sudrajat: Adili Prabowo

Jakarta, Buana

Meskipun Letjen (Purn) Prabowo Subianto sudah diberhentikan dari ABRI, pemeriksaan mantan Danjen Kopassus itu bersama dua perwira Kopassus lainnya harus dilanjutkan ke pengadilan. Tujuannya, agar penyelesaian kasus penculikan terhadap sejumlah aktivis prodemokrasi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Hal ini ditegaskan mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI (Menhankam/Pangab) Jenderal (Purn) Edi Sudrajat usai acara peluncuran buku *Indonesia Memasuki Millenium III: Gagasan dan Pemikiran Edi Sudrajat* di Jakarta, Selasa (25/8) malam. Pada acara itu tampak hadir Kasad Jenderal TNI Subagyo HS, mantan Wapres Try Sutrisno, Megawati, Ny Rahmi Hatta, dan tokoh-tokoh lainnya.

Menurut Edi, kendati diberhentikan dari kedinasan militer, Prabowo tetap dapat diseret ke mahkamah militer. Sebab, kasus penculikan yang membuatnya diperiksa DKP terjadi ketika ia masih dalam status dinas militer.

"Tetapi, jika ternyata sesuai ketentuan ia lebih tepat diadili di pengadilan negeri, karena statusnya kini sebagai sipil, saya kira tak soal. Yang penting, diadili. Sebab, dengan diadili, akan kelihatan secara objektif siapa yang salah dan siapa yang benar. Apakah ada pihak lain yang bersalah juga dapat dilihat dari proses pengadilan nanti," ujar mantan Pangab ini.

Sedangkan, soal kasus Aceh, sesuai laporan Komnas HAM, menurut Edi Sudrajat, perlu diusut lebih lanjut. Sebab, belum tentu semua informasi benar. Kenyataannya, tak hanya GPK (Gerakan Pengacau Keamanan) yang tewas. Dari aparat keamanan, seperti Babinsa, Koramil, dan lain-lain juga banyak yang tewas, begitu pula warga sipil yang sering dituduh mata-mata.

Berbeda dengan mantan Pangdam Jaya Hendropriyono. Bagi jenderal berbintang tiga ini, dalam kasus penculikan aktivis prodemokrasi yang melibatkan perwira tinggi Kopassus, masyarakat hendaknya jangan hanya menyalahkan satu pihak. "Harus disadari, ini bukan hanya kesalahan ABRI atau Kopassus. Ini merupakan kesalahan kita semua," ujar Hendropriyono di Jakarta, Selasa (25/8).

Melihat perkembangan kasus penculikan tersebut, Menteri Transmigrasi dan Perambah Hutan ini berharap, semua pihak, sebagai bangsa, harus prihatin dan malu kepada dunia luar. Kasus ini, baginya, penting untuk direnungkan. Pasalnya, jika dilihat dari konteks disiplin militer, apa yang dilakukan para prajurit itu sekadar menjalankan tugas. Apa yang mereka lakukan pun sesuai dengan sumpah prajurit.

"Yang namanya menjalankan sumpah prajurit, ia hanya menjalankan sistem dan aturan yang disepakati bersama. Jadi, jika mau bicara mengapa tidak dari dulu? Kita ini sudah 53 tahun merdeka, seluruh prajurit kita juga menjalankan tugas selama itu pula. Toh, semua tidak pernah bicara. Kini ketika ada kasus, semua orang menyoroti sistem di ABRI. Ini tidak adil. Harusnya kita arif dalam melihat permasalahan," ujarnya.

Berbeda dengan Sekjen PPP Tosari Wijaya. Baginya, keputusan Menhankam/Pangab Wiranto masih kurang. Wiranto harus merekomendasikan agar Prabowo dibawa ke mahkamah militer, jangan terkesan mengambang. Pembebastugasan dari ABRI tentunya karena ada kesalahan. Tetapi, kesalahan itu tidak bisa dimaafkan begitu saja.

Karena bagaimanapun, Pangab harus melimpahkan ke mahkamah militer, tidak perlu menunggu ada tidaknya saksi yang memberatkan dari pemeriksaan ke-11 anggota Kopassus. Dengan diseretnya Prabowo ke mahkamah militer, hal ini juga membuka kemungkinan terungkapnya 14 aktivis yang masih belum jelas nasibnya. Mahkamah militer bisa memaksa Prabowo mengungkap keberadaan para aktivis yang belum jelas itu.

Pada hari yang sama, 50 anggota Komite Pendukung Megawati (KPM) menggelar aksi demonstrasi di depan Mabes ABRI di Jalan Merdeka Barat, Selasa (25/8). Para demonstran yang mengenakan ikat kepala merah dan berpakaian hitam ini menuntut agar Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto segera membebaskan para aktivis korban penculikan dan mengusut tuntas kasus penculikan. ❑ **tri/pul/rad**

LSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

▲ Prabowo Sudah Mengaku Bersalah

Drama Penculikannya Tetap Belum Jelas

Jakarta, Kamis, Merdeka

Ada yang sudah mulai jelas dan ada yang tetap belum jelas dalam pengusutan kasus penculikan aktivis yang kini ditangani DKP.

Yang sudah mulai jelas, "Prabowo mengakui kesalahannya menganalisa BKO," kata Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal Subagyo Hadisiswoyo seusai memeriksa bekas Danjen Kopassus Letjen Prabowo Subianto selama tiga jam di Mabesad, kemarin.

Yang belum jelas, perintah apa yang dianalisis salah oleh Prabowo, dan dari siapa perintah itu berasal.

Yang juga belum jelas ialah sebagai berikut:

1. Perintah BKO itu dari mana ke mana?
2. Yang di-BKO-kan itu pasukan mana dan dimasukkan ke pasukan mana?
3. Kesalahan Prabowo menganalisa BKO apa? Bagaimana perintah atasannya, dan bagaimana pula isi analisa Prabowo.

Hebatnya, Prabowo sendiri langsung menyatakan bertanggung jawab atas kesalahannya menganalisa BKO.

Berikut ini wawancara wartawan dengan Subagyo.

Siapa sebenarnya yang memberikan perintah itu?

Menurut Subagyo, orang yang menjabat sebagai Pangti (Soeharto-*red*) dan Pangab (Feisal Tanjung-*red*) waktu itu tidak bersalah dan tidak pernah mengeluarkan perintah penculikan.

Apakah perintah itu dari Kasad waktu itu?

Subagyo tidak menjawab. Ia hanya mengatakan, sebaiknya itu dilihat setelah DKP mengadakan sidang evaluasi (Kamis, 13/8) guna menyusun hasil penelitian sementara yang akan disampaikan kepada Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto. "Jangan gampang menyalahkan," tambahnya.

Subagyo dan anggota DKP lainnya yang terdiri dari delapan orang jenderal berbintang tiga, kemarin bukan hanya memeriksa Prabowo yang juga menantu bekas Presiden Soeharto itu. Mereka juga meminta keterangan dari bekas Danjen Kopassus Mayjen Muchdi PR. Sementara itu hari Selasa (11/8) lalu DKP telah mendapatkan keterangan dari dua orang saksi yang berpangkat Kapten.

Ketika ditanya lagi kesalahan apa yang diperbuat oleh Prabowo, Subagyo mengatakan, kesalahannya adalah menganalisa pelaksanaan BKO.

Apakah pasukan Kopassus yang di-BKO-kan membawa misi tertentu sehingga mereka melakukan kesalahan?

Yang salah itu *kan* Prabowo.

Maksudnya apakah pasukan itu sudah dibebani misi tertentu?

Beginilah. Salahnya itu, mestinya dia tidak mengeluarkan surat perintah BKO yang menjadikannya salah.

Siapa yang memerintah Prabowo?

Sudah saya katakan, yang jelas bukan dari Pangti dan bukan dari Pangab.

Apa DKP bisa memeriksa perwira yang lebih tinggi dari Prabowo?

Kalau salah dan ada keterkaitan bisa saja. Sudah saya katakan Pangab tidak salah dan tidak mengeluarkan.

Kalau Kasad waktu itu bagaimana?

Nanti kita lihat, jangan gampang menyalahkan. Karena ini bukan hakim. Tadi *kan* saya katakan, supaya tidak salah paham. Ini ada kesalahan di analisa tersebut. Kalau dalam analisa ada kesalahan, penuangannya *kan* jadi salah.

Fokus pertanyaan kepada Prabowo dan Muchdi tadi apa?

Itu berkisar pada disiplin dan prosedur serta kejujuran, tabiat maupun keperwiraan dari mereka. Dia *kan* ditanya dan diuji untuk dimintai pertanggungjawaban.

Selain itu apa lagi?

Sekarang *kan* lagi proses. Sedang dilihat mana yang salah, di mana letak ketidakdisplinan, di mana penjabaran atau analisa tugas yang salah. Kalau tidak tuntas, bisa berkembang pemikiran, apa DKP ini jujur atau tidak. Kalau tiap hari kalian menyampaikan perkembangan yang tidak tuntas, kurang menguntungkan. Besok kami adakan rapat untuk bisa menentukan langkah berikutnya.

Apa sidang DKP akan selesai besok?

Besok saya akan sidang dengan tim. Setelah pengakuan dan hasil sementara ini, yaitu pelanggaran apa yang telah dilakukan dan mana saja yang dilakuan serta apa saja yang memberatkan dan meringankan, sehingga nanti mempertajam saran DKP kepada Pangab.

Artinya besok sidang terakhir?

Kalau nanti masih memerlukan sidang, akan sidang. Saya tidak katakan itu terakhir. Besok saya akan rapat dengan anggota dewan. Jangan paksa saya *dong*.

Kehadiran Danpuspom dan Danjen Kopassus untuk apa?

Yang ke sini *kan* bukan hanya Danpuspom, tapi seluruh Pangdam juga hadir. Saya di samping ketua DKP *kan* masih tetap Kasad, sebagai pembina Angkatan Darat. Pangkotama hadir semua, itu tiap bulan secara rutin dikumpulkan untuk pembinaan.(PN)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☑ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

anksi untuk Prabowo Sangat Ringan

■ Muladi: Bisa Disidangkan di Pengadilan Negeri

TA (Media): Pemberhentian Prabowo dari keanggotaan ABRI dinilai sejumgan terlalu ringan.

TNI (Purn) Saiful Sulun, salah seorang ilai sanksi itu terlalu ringan. Alasannya dibawa ke Dewan Kehormatan Perwira u selain menyangkut kode etik perwira yangkut tindak pidana penculikan.

k pidana tersebut tidaklah ringan. Apatukan oleh seorang perwira. Dengan deanksi yang dijatuhkan kepada Prabowo emannya itu terlalu ringan," kata Sulun kemarin.

n Wakil Ketua MPR/DPR itu menilai kePangab itu aneh dan membingungkan. o dikenai sanksi administratif, tapi 10 wahannya dimahmilkan. Terkesan ada asi hukum."

(Purn) Hasnan Habib berpendapat senaPrabowo sudah mengakui terlibat tindakilikan, menurut Hasnan seharusnya Pra- langsung diajukan ke mahkamah mipalagi tindakan pidana itu dilakukan oleh n pasukan berkualifikasi khusus."

ut Hasnan, seorang komandan yang meanak buahnya melakukan tindakan pen pidana dan didiamkan saja, itu merusalahan besar.

un demikian, mantan Dubes Indonesia a itu menilai tindakan penundaan pengmahmil merupakan salah satu hak preMenhankam Pangab.

Kehakiman Muladi setuju, kasus pening melibatkan Prabowo harus diseleil-adilnya. Tapi dia berpendapat lain. ia memang sudah dipensiun maka yang engadilinya adalah peradilan umum n negeri), tapi kalau statusnya masih militer maka yang berhak mengadilinya Mahkamah Militer (Mahmil)," kata Muladi kepada wartawan di Jakarta malam tadi.

Menkeh menjelaskan jika seseorang pensiunan militer, maka statusnya adalah orang sipil. Jika yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana harus diadili di peradilan umum.

"Saya setuju tindakan Pangab Jenderal TNI Wiranto memberhentikan Letjen TNI Prabowo. Saya mengimbau agar Prabowo juga diadili dengan seadil-adilnya," tegas Muladi seraya mengingatkan bahwa yang dilakukan Wiranto itu baru tindakan administratif, tapi soal dugaan adanya penculikan sejumlah aktivis belum menyentuh peradilannya.

Denny Kailimang tidak setuju Prabowo diadili di peradilan umum. Menurut dia Pangab Wiranto seharusnya merekomendasi kepada mahkamah militer untuk segera mengadili Prabowo tanpa harus menunggu hasil pemeriksaan 10 anggota Kopassus yang kini masih diperiksa Puspom ABRI dalam kaitan penculikan sejumlah aktivis.

Feisal lepas tangan

Mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI (Purn) Sahala Radjaguguk menilai mantan Pangab Jenderal TNI (Purn) Feisal Tanjung lepas dari tanggung jawab dalam kasus penculikan para aktivis hingga menyebabkan Letjen TNI Prabowo diberhentikan dalam tugas ABRI.

"Saya salut terhadap Pangab Jenderal TNI Wiranto yang sudah memikul tanggung jawab dalan kasus Prabowo dengan secara terbuka meminta maaf kepada rakyat. Padahal sewaktu peristiwa tanggung jawab berada di Pangab sebelumnya," ujar mantan Pangkostrad ini kepada *Media* d Jakarta, kemarin.

Menurut Sahala, dari satu segi sebagai keputusan intern di ABRI sudah tepat. tetapi dari segi hukumnya kasus penculikan tersebut harus segera dapat disidangkan di mahmil. Oleh sebab itu dia menilai putusan Pangab terhadap Prabowo masih berbau politis sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap kasus tersebut.

Ketua Umum Partai Amanah Bangsa Amien Rais menilai keputusan Pangab sangat tidak mendidik dan mengecewakan. "Karena sekarang ini kita tidak tahu keseluruhan dari cerita yang terjadi. Kita hanya tahu sepenggal-sepenggal cerita saja. Sebab itu Amien masih menuntut nantinya Prabowo akan menceritakan seluruh cerita. "Jangan sampai ada sepotong informasi yang disembunyikan."

Pengamat politik Muhammad AS Hikam menilai tindakan Pangab Wiranto sudah tepat. "Kita harus mengapresiasinya. Itu langkah yang tepat Selain memenuhi aspirasi masyarakat juga sebagai bukti Pangab berani melakukan pembersihan dan konsolidasi di dalam tubuh ABRI," katanya.

Sementara itu Prof Dr Sri Sumantri saat ditanya wartawan apakah korban penculikan atau keluarganya bisa menuntut, dirinya tidak melihat kemungkinan itu. "Paling-paling hanya bisa menggugat secara perdata dengan meminta ganti rugi Sebab aspek pidananya sudah ditangani pemerintah."

(Sub/Was/Wdh/Edi/Awi/Nin
Hry/Edi/N-1)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☑ Berita Buana	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Prabowo dari Taruna hingga Pangkostrad (3)

Tersingkirnya Orang-orang Dekat Prabowo



PERJALANAN karier Prabowo memang bagai meteor. Prabowo memang fenomena tersendiri dalam sejarah kekuasaan politik-militer Indonesia. Bagi Soeharto, perkawinan antara Prabowo dan anaknya memang membanggakan. Soeharto sendiri yang menangani detail-detail kecil dari pernikahan anaknya dengan Prabowo. Meski tak satu pun anaknya menjadi perwira ABRI, keberadaan Prabowo dalam keluarga Soeharto telah mewakili obsesinya.

Prabowo memang bukan jenderal termuda dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Eddy Soedrajat dan Benny Moerdani pun meraih bintang di pundaknya dalam usia lebih muda. Namun, pangkat mayor jenderal diraih dalam waktu setahun setelah ia menyandang bintang satu. Lantas, tak lama kemudian, pangkatnya naik lagi dengan bintang tiga di pundaknya.

Melejitnya Prabowo menjadi lokomotif bagi alumnus Akabri generasi 1970-an. Kolonel Susilo Bambang Yudhoyono, angkatan Akabri Darat 73, kemudian naik pangkat menjadi brigjen. Akhirnya, dalam usia 48 tahun, ia sudah menyamai pangkat Prabowo, serta sekaligus menduduki jabatan sebagai Kassospol ABRI.

Hampir bersamaan dengan itu, Kolonel Syafrie Syamsuddin (alumnus Akabri Darat 1974) mendapat promosi menjadi brigjen, dan kemudian menjadi Kasdam Jaya. Lalu, hampir bersamaan dengan naiknya Prabowo menjadi Danjen Kopassus, Syafrie dipromosikan sebagai Pangdam Jaya dengan pangkat mayjen. Beberapa perwira lulusan 70-an lainnya segera menyandang bintang di pundaknya.

Namun, karena dianggap dekat dengan Prabowo dan beberapa kalangan menganggap ia terlambat mengatasi kerusuhan Mei lalu, ia pun disingkirkan. Beberapa perwira yang dianggap orang Prabowo lainnya, seperti Mayjen TNI Muchdi, Kolonel Chairawan, dan beberapa orang penting di Kostrad dan Kopassus, saat ini harus merelakan diri berdinas tanpa jabatan.

Ada dua legenda menarik dalam kebudayaan Jawa mengenai apa yang akan terjadi jika ada orang menikahi seorang putri raja. Ia bisa menjadi Jaka Tingkir. Dipelihara dan dibesarkan sang mertua, namun kemudian membunuh mertuanya sendiri, lalu akhirnya mendirikan kerajaan baru. Atau, ia bisa jadi seorang Ageng Mangir, yang berusaha merebut kekuasaan mertuanya, tapi berakhir di dalam sebuah peti mati. Saat rezim Soeharto, Indonesia tampaknya nyaris memiliki cerita serupa, dan berkait dengan hubungan antara Soeharto dan menantunya, Letjen Prabowo Subianto.

Bahkan, ketika Hashim Wahid, sahabat Prabowo sejak semasa kecil dan kini menjadi seorang seorang pengusaha, menuturkan legenda itu, ia bertanya dengan nada bercanda kepada Prabowo, "Mana yang ingin kamu pilih? Jaka Tingkir atau Ageng Mangir?" Jawaban Prabowo malah justru mengagetkan Hashim Wahid sendiri. Saat itu, tutur Hashim Wahid, Prabowo langsung mengusirnya dari ruang kerjanya. "Lalu, ia langsung membanting pintu tepat di muka saya. Sejak itu, ia tidak pernah berbicara lagi dengan saya selama 12 tahun," katanya, seperti yang dikutip *Harian Nusa*.

Beberapa rekan di sebuah perkumpulan anak muda yang dekat dengan Prabowo menuturkan, meski terkesan ambisius, Prabowo adalah sosok yang bisa lembut dan baik hati terhadap orang lain, terutama orang-orang sipil. Namun, di sisi lain, ia tak segan bertindak keras pada seorang kolonel di depan anak buah dan prajuritnya yang lain.

Keberaniannya menembus sesuatu yang tidak lazim itu merupakan ciri lain dari Prabowo. Salah satunya adalah langkahnya dalam menangani beberapa kasus, seperti peledakan di Tanah Tinggi dan Sofyan Wanandi. Belakangan ini, Soeharto sendiri dikabarkan kurang sreg dengan langkah-langkah yang diambil Prabowo. Ketika kerusuhan 27 Juli meledak di Jakarta, sekeliling Cendana dipagari pasukan anak buah Prabowo. Kabarnya, Soeharto sempat mempertanyakan pengamanan yang dianggapnya berlebihan tersebut.

Amien Rais sendiri konon berkali-kali mendapat telepon dari Prabowo langsung.

❑ **machsus thamrin**,
dari berbagai sumber

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐ Berita Buana	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Prabowo dari Taruna hingga Pangkostrad (5-Habis)

Amerika Serikat Sangat Terpukul



LOBI Letjen TNI (Purn) Prabowo di dunia internasional memang kuat. Hal ini terbukti dari banyaknya bantuan yang diterima ABRI lewat lobi-lobi internasionalnya. *Washington Post* menulis, Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) William Cohen sendiri pernah menyatakan bahwa AS sangat berkepentingan mendidik para perwira Indonesia, dengan tujuan agar mereka mampu mempraktikkan demokratisasi dan penegakkan HAM (hak asasi manusia) di Indonesia, sesuai kaca mata Barat.

Itulah sebabnya, selama Prabowo menjabat Danjen Kopassus, AS meningkatkan bantuan pendidikan militernya untuk Indonesia. Setidaknya, 50 instruktur pasukan elite khusus AS pernah ditugaskan untuk melatih anggota Kopassus.

Setiap tahun, AS menganggarkan 3,5 juta dolar AS untuk melatih anggota Kopassus tersebut.

Tentu saja, bantuan yang diberikan kepada Prabowo ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi AS di kawasan ini. Memang, bukan hanya Indonesia yang menerima bantuan dan pelatihan seperti ini. Hasilnya memang terlihat. Militer AS memiliki lebih banyak kontak dengan angkatan bersenjata Indonesia dibanding negara lain di Asia sendiri, kecuali Korea Selatan. Walaupun ada larangan dari Kongres AS atas beberapa bantuan militer, tahun ini Pasukan Khusus AS dijadwalkan melakukan serangkaian latihan bulanan dengan unit-unit militer Indonesia.

Namun, tragedi Mei lalu memporakporandakan semuanya. AS sangat terpukul, ketika beberapa perwira ABRI ternyata terlibat dalam penculikan aktivis dan kisah-kisah pelanggaran HAM lainnya. Negara-negara Barat sangat terpukul ketika menemukan kenyataan bahwa perwira tinggi Indonesia yang diandalkan sebagai agen penyebar demokratisasi dan penegakan HAM justru berbuat yang mengecewakan.

Harian *Washington Post* bahkan menulis pendapat seorang analis pertahanan di negeri ini. "Dugaan yang saya dengar adalah bahwa Prabowo akan mencoba untuk datang berderap dengan seekor kuda putih dan menyebarkan ketenangan, ketentraman, dan keamanan sambil mengumpulkan kekuatan untuk bangkit," ujar analis itu.

Kini, Prabowo telah *lengser*. Pertanyaannya saat ini, mampukah Wiranto membangun kembali lobi yang telah dibangun Prabowo di kalangan militer AS? Pertanyaan ini tentu tetap menarik. Kekecewaan AS terhadap langkah yang dilakukan oknum Kopassus, bagaimanapun akan mempengaruhi kelanjutan hubungan ini.

Namun, tampaknya, AS akan mengambil sikap, Prabowo boleh *lengser*, tapi hubungan militer kedua negara harus terus berlangsung. Kabarnya, Wiranto juga telah mendapatkan dukungan penuh dari Pentagon dan Duta Besar (Dubes) AS untuk Indonesia.

Sikap Wiranto yang dinilai dingin, ketika di saat-saat sulit sebelum mengambil keputusan memberhentikan Prabowo, banyak mendapatkan simpatik kalangan militer AS. Apalagi, banyak kalangan berpendapat, Wiranto sebenarnya mampu mengambil kesempatan lebih besar atas kemelut yang terjadi pada Mei lalu itu.

Pertemuan antara Wiranto dengan Dubes AS di Jakarta, yang dilangsir beberapa media AS, pekan lalu, memperkuat asumsi ini. Artinya, ABRI bakal tetap mendapatkan bantuan penuh dari sahabatnya yang satu ini.

"Adalah hal yang penting untuk menjaga hubungan baik antara kedua militer negara ini," ujar Laksamana Joseph Prueher, Panglima Pasukan AS di Pasifik, dalam suatu wawancara, pekan lalu. "Indonesia sangat penting bagi AS, dan adalah tujuan kami agar Indonesia mampu selamat dari keadaan ini," tambahnya.

❑ **machsus thamrin,** *dari berbagai sumber*

Hal. 1/ .....
Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	⑤ Berita Buana	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Prabowo dari Taruna hingga Pangkostrad (2)

Sempat Lolos dari Tawanan Fretelin



SUARA TENGKU FAZLI REDWAN

LULUS sebagai letnan satu, Prabowo merintis karir di Kopasandha (sekarang Kopassus). Namun, dalam pendidikan dasar di Batujajar dan Cilacap, perwira muda ini sempat menjadi bahan perdebatan di kalangan pelatihnya. Dari aspek intelektual dan kemampuan manajemen, ia memang berada di atas rata-rata. Namun, dari aspek fisik, nilainya hanya berkisar 60. Yang menjadi perdebatan adalah kecenderungan pada dirinya untuk bertindak menurut kemauan dan instingnya sendiri.

Tapi, toh akhirnya semua sepakat, Prabowo lulus dalam pendidikan yang menentukan itu. Penugasan tempurnya yang pertama saat bergabung dalam misi Nenggala X tidaklah istimewa.

Baru setelah ia menyandang pangkat letnan satu, prestasi besar ditorehkan dalam riwayat hidupnya. Saat memimpin tim Neggala 28, tim ini berhasil menembak mati Presiden Fretelin, Nicolao Davies Lobato. Karena inilah, Menhankam/ Pangab (waktu itu), M Yusuf, datang langsung ke Timtim dan menyematkan pangkat baru untuknya.

Belakangan, kontroversi sempat muncul, karena Letjen M Yunus Yosfiah (sekarang menteri penerangan) mengungkapkan fakta baru. Yakni, yang menembak mati gembong fretelin itu adalah anggota Yon 744. Kebetulan, Prabowo waktu itu berada dalam koordinasi Yunus.

Pulang dari Timtim, Prabowo memperoleh kesempatan menambah ilmu di US Army Special Forces, Fort Bragg, Amerika Serikat. Dalam kesempatan ini, Prabowo berhasil menjadi lulusan terbaik. Tak lama setelah itu, ia pun mengikuti pendidikan lagi di pusat latihan antiteroris di Jerman. Kembali ke Cijantung, dibentuklah unit antiteroris, Detasemen 81. Tim yang dipimpin Prabowo berhasil menewaskan tokoh Fretelin Colimau.

Peristiwa penting dalam hidup Prabowo terjadi 1983, ia mempersunting putri keempat HM Soeharto (waktu itu Presiden RI), Siti Hediati Hariadi (Titiek). Dari Titiek, lahir anak tunggalnya yang diberi nama Ragowo Hedi Prasetio.

Dengan posisinya sebagai menantu presiden, wajar saja jika banyak orang menilai percepatan karirnya dihubungkan dengan statusnya tersebut. Namun, Prabowo mengatakan, "Status sebagai menantu presiden tidak menjadikan saya diistimewakan. Sebaliknya, juga tidak menjadi beban dalam saya kerkiprah. Itikad saya baik. Saya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa saya, untuk angkatan bersenjata saya. Sedangkan mengenai penilaian, saya serahkan kepada orang lain," ujar Prabowo.

Tiga bulan setelah pernikahannya, ia meninggalkan Titiek untuk bertugas di Timtim. Dalam sebuah operasi, ia dikabarkan sempat terkepung pasukan Fretelin. Waktu itu, ia berhasil lolos dari kepungan di sebuah padang ilalang yang dibakar, karena sempat bersembunyi dalam sebuah lubang. Versi lain menyebutkan, waktu itu, Prabowo sempat ditawan dan dihajar habis-habisan. Ia pun berhasil keluar setelah diadakan tawar menawar. Bapaknya, Prof Soemitro Djojohadikusumo, pun menebusnya Rp 50 juta.

Namun, mantan Pangkostrad Leo Lopulisa membantah hilangnya Prabowo. Menurut Leo, Prabowo memang disimpan atasannya, supaya tidak diketahui posisinya oleh musuh. Maklum, sebagai menantu presiden dan perwira yang menewaskan banyak tokoh Fretelin, ia diincar musuh.

Versi mana yang benar, tak pernah ada klarifikasi resmi. Namun yang jelas, Gubernur Timtim sekarang, Abilio Jose Soares, disebut-sebut sebagai orang yang berperan besar dalam pembebasan dan penyelamatan Prabowo, waktu itu.

❑ **Machsus Thamrin** (dari berbagai sumber)

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Prabowo dari Taruna hingga Pangkostrad (4)

Prabowo: *I'm Down in The Gutter*



DALAM sebuah kesempatan, Prabowo pernah menyatakan kekecewaannya tentang sikap orang-orang yang pernah berada di dekatnya. Mereka dinilai merasa sok suci dan terkesan cuci tangan." "*I'm down in the gutter*," katanya kepada sumber *Buana*.

Prabowo memang layak merasa kecewa dan merasa dicemplungkan dalam sebuah selokan. Karena, sebagai bagian dari sebuah angkatan bersenjata, hanya dirinya yang dicemplungkan dalam kondisi yang sulit. Sementara, yang lain, yang dulu menjadi alat kekuasaan, justru ramai-ramai menyorakinya.

Seperti yang terjadi Mei lalu. Saat itu, Dubes AS Stapleton Roy memanggil langsung Prabowo dan menyatakan kekecewaannya atas perbuatannya menculik beberapa aktivis. Saat itu, Prabowo membantah dirinya terlibat langsung penculikan tersebut. Sayangnya, sampai saat ini, tak terungkap siapa lagi yang sebenarnya menjadi dalang dari penculikan itu. Pentagon sendiri yakin, Prabowo bukan satu-satunya yang terlibat kasus-kasus yang menggegerkan tersebut.

Sebelum kasus penculikan sejumlah aktivis terungkap, Prabowo memang populer di kalangan perwira militer AS dan Eropa Barat. "Ia memang gampang berkawan," kata perwira militer AS yang pernah mendidik Prabowo di pendidikan militer AS di Fort Benning, Ga (Georgia), dan Fort Bragg, NC (North Carolina).

Lobinya yang luas di kalangan militer internasional menjadikan ia dengan mudah mendapatkan akses dan bantuan bagi operasi Kopassus.

Waktu itu, beberapa negara memberikan bantuan langsung terhadap suksesnya operasi tersebut. Seperti ditulis kantor berita *Associated Press*, pemerintah AS diam-diam pernah meminta bantuan pasukan elite Israel untuk mengerahkan peralatan elektronik militernya pada saat Kopassus sedang berusaha membebaskan sejumlah peneliti Barat yang disandera GPK Irian Jaya. Suksesnya operasi tersebut menjadikan Kopassus disejajarkan dengan pasukan elite terbaik dunia lain, SAS, dari Inggris.

Pamor Kopassus dan Prabowo memang makin terangkat ketika pasukannya berhasil membebaskan sandera di Mapaduma. Padahal, waktu itu, beberapa pimpinan satuan khusus negara lain pernah berkata bahwa sandera tersebut hanya bisa dibebaskan oleh James Bond, mengingat tingginya tingkat kesulitan operasi itu.

Tak hanya itu, ketika negara lain sulit mendapatkan peralatan persenjataan mutakhir, Kopassus lewat lobi Prabowo berhasil membeli enam land rover bersenjata atas izin yang diberikan Kementerian Pertahanan Inggris.

Lobinya yang luas ini terlihat dari banyaknya bantuan datang ketika Prabowo berusaha meningkatkan kualitas Kopassus. Kebanyakan program latihan Amerika dilaksanakan oleh anggota Pasukan Khusus, unit tempur paling elite dalam angkatan bersenjata AS, dengan rekannya dalam unit elite Indonesia yang dikenal sebagai Kopassus, yang sampai Maret lalu masih dikomandani Prabowo.

Program latihan itu, yang dikenal sebagai J-CET (Joint Combined Exchange and Training) atau Latihan dan Pertukaran Keahlian Gabungan, sebenarnya dirancang khusus untuk melatih para prajurit AS. Pejabat Pasukan Khusus mengatakan, program yang dijalankan di Indonesia telah memberi kesempatan kepada para prajurit Amerika yang tergabung dalam Grup 1 Pasukan Khusus AS, yang ditempatkan di Okinawa, Jepang, untuk melatih kemampuan yang secara politis terlalu sensitif untuk dilaksanakan di markasnya di Jepang, seperti penyusupan dan penghancuran oleh helikopter.

Latihan itu, seperti halnya keinginan calon-calon jenderal Indonesia yang telah mengikuti sekolah militer di AS sebelum dikeluarkannya larangan oleh Kongres, telah menciptakan pengikut-pengikut Amerika di antara prajurit Indonesia. Untuk mempertahankan standar Amerika dalam pembentukan perwira-perwira muda, Prabowo mengirim 25 letnan muda setiap tahunnya ke Institut Militer Virginia dan The Citadel dengan biaya dari kas negara. ❑ **machsus thamrin**, *dari wawancara dan berbagai sumber*

Hal. 1/ .....
Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal	Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐	Tempo Interaktif	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

KRONOLOGI RAIBNYA KORBAN DAN MASA JABATAN PETINGGI

NO.	NAMA KORBAN	KETERANGAN	TGL. MUNCUL	LOKASI HILANG	TGL. HILANG	FEISAL TANJUNG	R. HARTONO	WIRANTO	PRA
1	Wiji Thukul	Penyair Aktivis Jaker Affiliasi PRD	Belum	Solo	27 Juli 1996				
2	Yani Avri (Rian)	Sopir; Tersangka Kasus Bom Kelapa Gading	Belum	Jakarta	25-Apr-97				
3	Sonny	Sopir; Tersangka Kasus Bom Kelapa Gading	Belum	Jakarta	25-Apr-97				
4	M. Yusuf	Guru; Diculik orang berbaju di depan rumah	Belum	Jakarta	7-Mei-97				
5	Daddy Umar Hamdun	Pengusaha;	Belum	Jakarta	28-Mei-97				
6	Noval Alkadri	Pengusaha; Teman Daddy	Belum	Jakarta	28-Mei-97				
7	Ismail	Bapk Daddy Hamdun	Belum	Jakarta	28-Mei-97				
8	Pius Lustrilanang	Ketua Aldera	3-Apr-96	Jakarta	14-Feb-96				
9	Desmond J. Mahesa	Direktur LBH Nusantara	3-Apr-96	Jakarta	4-Feb-96				
10	Herry Wirawan	Pengurus PDP PDI Megawati	18-Apr-96	Jakarta	2-Mar-96				
11	Herman Hendrawan	Mahasiswa; Hilang usai 'Konferensi Pers YLBHI	Belum	Jakarta	12-Mar-98				
12	Faisal Reza	Mahasiswa; Hilang usai 'Konferensi Pers YLBHI	25-Apr-98	Jakarta	12-Mar-98				
13	Raharjdjo Waluyo Djati	Mahasiswa; Hilang usai 'Konferensi Pers YLBHI	28-Apr-98	Jakarta	12-Mar-98				
14	Noza Feria	Aktivis SMID	7-Jun-96	Jakarta	13-Mar-98				
15	Mugiyanto	Aktivis SMID	7-Jun-96	Jakarta	13-Mar-98				
16	Aan Rusdianto	Aktivis SMID	7-Jun-96	Jakarta	13-Mar-98				
17	Andi Gempol	Mahasiswa Unila; Hilang 'usai bentrokan dengan aparat	Belum	Lampung	19-Mar-98				
18	Ari Wibowo	Idem	Belum	Lampung	19-Mar-98				
19	Handri	Idem	Belum	Lampung	19-Mar-98				
20	Diah Utarina	Idem	Belum	Lampung	19-Mar-98				
21	Yudi S.	Idem	Belum	Lampung	19-Mar-98				
22	Wenie	Idem	Belum	Lampung	19-Mar-98				
23	Okbyarti	Idem	Belum	Lampung	19-Mar-98				
24	Umi	Idem	Belum	Lampung	19-Mar-98				
25	Utami AP	Idem	Belum	Lampung	19-Mar-98				
26	Habibah	Idem	Belum	Lampung	19-Mar-98				
27	Ananda B.	Idem	Belum	Lampung	19-Mar-98				
28	Badiono	Idem	Belum	Lampung	19-Mar-98				
29	Bahrul Alam	Idem	Belum	Lampung	19-Mar-98				
30	Purwito Agus	Idem	Belum	Lampung	19-Mar-98				
31	Alex	Idem	Belum	Lampung	19-Mar-98				
32	Wahyu	Idem	Belum	Lampung	19-Mar-98				
33	Andi Arief	SMID; Tersangka Kasus Bom Tanah Tinggi	15-Jul-96	Lampung	19-Mar-98				
34	Petrus Bimo Anugrah	SMID; Tersangka Kasus Bom Tanah Tinggi	Belum	Jakarta	29-Mar-98				
35	Suyat	SMID; Tersangka Kasus Bom Tanah Tinggi	Belum	Solo	31-Mar-98				
36	Mukbul Hafim	Mahasiswa Fisip Unbraii	14-Apr-98	Ujungpandang	12-Apr-98				
37	Triyono	Ibunya ditelepon bahwa ia diculik	Belum	Jakarta	9-Apr-98				
38	Ucok Bisman	Mahasiswa Perbanas Rafi terkonsentrasi massa bentrokan	Belum	Jakarta	14-Mei-98				
39	Yudin Muhidin	Alumni Setiabhi Pelayar en; Sempat ditahan Polres Jakarta Utara	Belum	Jakarta	14-Mei-98				
40	Hendra Hambali	Siswa SMU; Raib di Glodok saat kerusuhan	Belum	Jakarta	14-Mei-98				
41	Anto	Mahasiswa Unair; Raib usai bentrokan mahasiswa	Belum	Surabaya	29-Mei-98				
42	Leonardus Nugroho Iskandar (Gilang)	Pengamen aktivis SMPR Raib usai demo	29-Mei-98 (perasi)	Solo	27-Mei-98				





ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	(25)	31	Januari	Juli	(1998)
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	(☐) SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

mal Idris: Ajukan Prabowo Ke Mahkamah Militer

Jakarta, 25 Agustus

Berbagai tanggapan yang dikumpulkan mengenai keputusan yang dijatuhkan oleh Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto atas diri Letjen TNI Prabowo Subianto umumnya mengharapkan agar nanti ia dan dua perwira lain yaitu Mayjen TNI Muchdi PR dan Kol. Inf. Chairawan diajukan ke Mahkamah Militer (Mahmil) karena mereka mengaku telah melakukan penculikan terhadap 9 aktivis.

Mantan Pangkostrad Letjen TNI (Purn) Kemal Idris mengatakan, Letjen Prabowo Subianto seharusnya diajukan ke Mahkamah Militer sebab dalam penyelidikan dia sudah mengaku salah menganalisa perintah BKO (Bawah Kendali Operasi) dan mengaku telah menculik sejumlah aktivis.

Dalam putusan yang dibacakan Jenderal TNI Wiranto Senin (24/8) siang, Letjen Prabowo diberhentikan dari jabatannya; sedangkan Mayjen Muchdi dan Kol. Chairawan tidak boleh menduduki jabatan struktural ABRI, tetapi masih menjadi anggota ABRI.

"Itu saya tidak bisa mengerti *kok* enak saja. Kalau jadi perwira berbuat salah *kok* cuma diberhentikan. Buat saya itu menjadi tanda tanya besar kenapa begitu," kata Kemal Idris kepada *Pembaruan* di Jakarta, Selasa (25/8) pagi.

"Saya tidak tahu bagaimana jalan pikirannya. Saya menganggap itu keputusan gila. Saya tidak bisa setuju dengan keputusan itu. Ini menunjukkan keraguan-raguan pimpinan, apakah karena dia mantu mantan presiden. *Kok* begitu," tandas Kemal.

Lebih jauh purnawirawan jenderal berbintang tiga ini mengatakan, mereka menjalani ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan harus di-Mahmilkan. Apalagi sudah mengaku salah kok pimpinan masih ragu ragu bertindak, Ini kan aneh.

Kalau begitu, tambah Kemal, seolah-olah perwira-perwira ABRI tidak tersentuh hukum, boleh berbuat semau-maunya. Kan tidak begitu seharusnya. Mereka khan juga pejabat sehingga mereka harus tunduk kepada hukum. Kelihatannya hukum hanya berlaku untuk orang rendah, orang berpangkat tinggi tidak perlu adâ hukum, cuma di Indonesia yang begitu.

Tidak Sejalan

Sementara itu, di tempat terpisah Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Munir kepada wartawan di Jakarta Senin (24/8) menyatakan sanksi administratif terhadap ketiga perwira itu tidak sejalan dengan komitmen pimpinan ABRI yang menyatakan akan mengusut tuntas kasus penculikan. "Rekomendasi DKP sekaligus membuktikan bahwa ABRI mengedepankan strategi defensif dengan melindungi para penculik aktivis dari bentuk-bentuk pertanggung-jawaban," kata Munir.

Kontras yang sejak awal berulangkali menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pembentukan DKP kembali menegaskan, DKP menempatkan posisi hukum berada di tempat yang tidak selayaknya. Scharusnya semua tersangka yang patut diduga terlibat dalam kasus penculikan segera diperiksa dan dibawa ke pengadilan.

Dalam kesempatan itu Kontras kembali mendesak pemerintah dan pimpinan ABRI untuk memeriksa Kepala Badan Intelijen ABRI (BIA) Mayjen Jacky Anwar Makarim, Polda Metro Jaya, Koramil Duren Sawit, Kodim Jakarta Timur dan pihak-pihak lainnya yang patut diduga terlibat penculikan.

"Kita akan terus mendesak agar semua pihak yang terlibat penculikan diadili dan para aktivis yang masih hilang harus segera dikembalikan ke rumahnya masing-masing," tandas Munir.

Ajukan ke Mahmil

Dalam pada itu, Ketua Badan Pekerja Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Hendardi mengatakan, Keputusan Menhankam/ Pangab itu membuktikan persepsi masyarakat beberapa waktu lalu yang mengatakan ABRI tidak sungguh-sungguh mengusut kasus penculikan memang benar. "Sejak awal saya sudah mendesak agar para penculik diperiksa secara pidana oleh Puspom ABRI dan diadili di Mahmil. Mahmil lepas dari berbagai ketidakpercayaan masyarakat diharapkan dapat membuka latar belakang politik kasus penculikan, setidaknya pemeriksaan akan dilakukan secara terbuka, "tegas Hendardi kepeda *Pembaruan* Selasa pagi.

Di DPR beberapa suara juga menyatakan ketidakpuasnanya. Sekretaris FPP MPR, Bachtiar Chamsyah SE dan Ketua FPP MPR, Faisal Baasir SH ketika ditanya Selasa pagi tentang keputusan Menhankam Pangab terhadap kasus penculikan aktivis.

Keputusan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto yang tidak meneruskan hasil pemeriksaan DKP atas 3 Perwira ABRI yang terlibat penculikan aktivis akan membuat orang memperkirakan ada hal yang disembunyikan dalam kasus tersebut. Bachtiar menyatakan, rakyat jelas tidak akan puas dengan keputusan itu, karena mereka menginginkan kasus itu dituntaskan dan diungkapkan secara *fair* dan terbuka lewat proses peradilan militer. "Sekarang rakyat 'kan tidak tahu apa iya Prabowo bersalah atau tidak," katanya.

Dikatakannya, bila penculikan itu dilakukan sebagai operasi intelijen yang berkaitan dengan antisipasi gangguan stabiltas nasional, tentu perlu dijelaskan, bahaya apa yang akan ditimbulkan aktivis itu siapa jaringannya. Ini akan bisa diketahui rakyat dalam proses pemeriksaan di pengadilan militer yang terbuka, katanya.

Sedangkan Faisal menyatakan, pengadilan militer tentu bukan hanya akan mendengar keterangan Prabowo, tetapi juga pejabat yang mem-BKO-kan, para saksi ahli dan aktivis yang diculik.

Sedangkan Golkar sepenuhnya memberikan dukungan atas sikap dan keputusan jajaran pimpinan ABRI, terhadap para anggotanya, dalam rangka menuntaskan berbagai masalah di tengah-tengah masyarakat.

Hal itu dikemukakan Ketua Umum DPP Golkar Akbar Tandjung, Senin petang, di DPP Golkar, Jakarta, yang diminta komentarnya atas keputusan Panglima ABRI Jendral TNI Wiranto.

"Itu adalah suatu sikap yang tegas dari pimpinan ABRI, dan sepenuhnya kita akan memberikan dukungan atas sikap tersebut," kata Akbar. Sebab, lanjutnya, sikap itu menurut Golkar tentu setelah dipelajari secara seksama, dan sudah barang tentu pimpinan ABRI memutuskan sikap seperti itu, sesudah mendengar pula dari anggota-anggota DKP.

Kepada *Pembaruan* Senin (24/8) sore di Yogyakarta ia lebih jauh berpendapat, akan lebih *fair* jika pernyataan DKP memvonis Prabowo dkk bersalah itu dibuktikan melalui mahkamah militer, sehingga jalannya peradilan memperoleh kontrol dari masyarakat. Apalagi DKP selama ini ada kesan tertutup, sehingga masyarakat tidak pernah tahu kesalahan yang sebenarnya dilakukan oleh para perwira tinggi itu apa.

(STH/101/037/W-5/W-7/A-14/-11)

Hal. 17 .....
Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1	7	13	19	(25)	31	Januari	Juli	(1998)
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	(Agustus)	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	(☑) Berita Buana	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Prabowo dari Taruna hingga Pangkosrad (1)

Guide Taruna yang Pernah Tinggal Kelas



KUALITAS buah memang tergantung kualitas pohonnya. Perumpamaan ini tepat untuk keluarga besar Sumitro ini. Sang kakek, Margono Djojohadikusumo, adalah bankir terkemuka di masa awal kemerdekaan. Di tangan kakeknya ini, Bank BNI lahir. Lantas siapa yang tak kenal Sumitro Djojohadikusumo? Begawan ekonomi inilah yang melahirkan banyak ekonom menjadi menteri yang kemudian menjadi arsitek pembangunan ekonomi.

Dalam iklim intelektual yang kental inilah, Prabowo Subianto lahir dan dibesarkan.

Ketika dirinya lahir 17 Oktober 1951, suasana negeri belumlah stabil. Bahkan, sang ayah, Sumitro, terpaksa harus menjadi 'pelarian', karena dituduh terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta.

Tak heran jika masa kecil Prabowo dihabiskan di berbagai negeri. Belanda, Inggris, dan beberapa negara lainnya dirambahnya. Di kemudian hari, masa kecil dan remaja di luar negeri inilah yang kemudian mengasah Prabowo hingga fasih berbahasa Jerman, Inggris, dan Prancis.

Lulus sekolah menengah setingkat SMA. Tiga universitas besar di Amerika memanggilnya. Namun, keinginan masa kecilnya untuk menjadi seorang tentara mengalahkan semuanya. Obsesi yang dipacu kematian sang paman yang bertempur melawan Jepang dalam peristiwa bentrokan taruna AMN di Tangerang membuat Prabowo mengambil keputusan pergi ke Magelang.

Iklim disiplin di barak taruna ternyata tak mampu meredam intelektual dan pemikirannya yang kerap keluar dari tatanan yang ada di Akabri waktu itu. Dalam pelajaran di kelas, Prabowo tak segan-segan mendebat dosennya. Kegemaran berdebat itu menjadikan Prabowo kerap dihukum instrukturnya, karena waktu itu bahasa Indonesianya kurang lancar hingga sering salah menangkap perintah.

Soal bahasa memang jadi kelemahan Prabowo. Namun, bahasa pula yang menjadi keunggulannya. Kefasihannya berbicara beberapa bahasa asing membuatnya sering ditunjuk menjadi *guide* saat taruna negara lain atau tamu negara berkunjung ke Akabri.

Kegemarannya membaca tak pernah henti, meski waktunya di Magelang sangat terbatas. Dalam latihan di hutan atau *survival* di atas pohon, dalam ranselnya selalu ada buku."Bahkan, di atas pohon, ia membaca *Time*," kata teman seangkatannya, Mayjen TNI Zaki Anwar Makarim, seperti pernah dikutip *Gatra*.

'Nakal'-nya Prabowo memang kerap membuat pelatihnya geleng-geleng kepala. Ketika para taruna diberi kesempatan berakhir pekan ke Yogyakarta, ia malah pergi ke Jakarta. Tak heran jika kemudian telat lulus satu tahun.

Dilantik menjadi Letda oleh Presiden Suharto 1974, maka karir cemerlangnya di dunia militer dimulai. Sejak lulus Akabri, Prabowo ditempatkan di pasukan baret merah Kopassus. Ketika Timtim bergolak dan sebagian penduduknya meminta bergabung dengan Indonesia, Letda Prabowo diturunkan ke sana dan bergabung dalam tim Nenggala 10.

Di provinsi ke-27 inilah yang kemudian mengasahnya menjadi seorang prajurit sejati. Di sana, ia menemukan arti persahabatan. Bahkan, dari tempat inilah, karir militernya justru melesat cepat. Namun, sejak itu pula, jantung orang-orang di sekitarnya akan berdegup keras melihat semua sepak terjangnya.

❑ **machsus thamrin**

Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

dia:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐	Berita Buana	6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Keluarga Korban: Jasadnya di Mana?

■ **Ny Damheris Hutabarat, orangtua Ucok Siahaan:**

SEJAK ia menghilang, kami sekeluarga sudah pasrah. Kalau memang garis nasibnya sudah begitu, mau diapakan lagi. Tapi, kami masih berharap agar mereka dapat menunjukkan di mana jasad anak saya. Sehingga, kami dapat mengubur[kannya] secara layak. Mohon bejas kasihan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto, untuk mengusahakan agar kami bisa menemukan jasad anak kami itu.

Sampai saat ini, saya masih tidak percaya mengapa orang-orang itu tega berbuat kasar kepada anak saya yang tidak punya salah apa-apa. Saya hanya berharap, agar pemerintah mau menindak tegas pelakunya. Jangan sampai rakyat tak percaya hukum bisa ditegakkan di negeri ini. Apa pun yang terjadi, saya yakin, jika memang mereka lolos dari hukuman di dunia, yang pasti mereka tidak bisa lolos dari hukuman terakhir kelak.

■ **Ny Tuty orangtua Yanni Afri:**

SEANDAINYA anak saya sudah meninggal dunia, tolong dijelaskan di mana keberadaan jenazahnya. Kalau anak saya masih hidup tolong segera dibebaskan. Saya tidak akan pernah berhenti berusaha untuk menemukan keberadaan anak saya. Berbagai usaha sudah saya tempuh untuk menemukan anak saya, tapi sampai saat ini masih tetap misterius.

Keberadaan anak saya hidup atau mati adalah menyangkut nyawa manusia. Seharusnya, pemerintah jangan main-main dengan nyawa manusia. Apalagi Indonesia kan negara hukum. Kalau memang anak saya bersalah, hukumlah sesuai dengan kesalahannya. Tapi, jangan diculik dan nasibnya tidak jelas sampai saat ini.

Saya sudah minta bantuan YLBHI untuk mencari informasi keberadaan anak saya. Saya juga sudah menemui beberapa pejabat, seperti Komandan Puspom ABRI, Pak Syamsu, atau Menhankam/Pangilma ABRI Jenderal TNI Wiranto. Namun, sampai saat ini hasilnya belum ada. Saya dapat informasi bahwa setelah tanggal 17 Agustus, akan ada pembebasan korban penculikan. Saya berharap, anak saya juga ikut dibebaskan. Mudah-mudahan informasi bahwa ke-14 aktivis sudah meninggal itu tak benar.

■ **Haryanto Taslam, korban penculikan:**

PENYELESAIAN kasus ini tidak ada artinya tanpa kejelasan nasib korban penculikan yang sampai saat ini masih misterius. Kalau mereka sudah meninggal dunia, pemerintah dan ABRI harus membuktikan dan menjelaskan keberadaannya. Sebab, keberadaan para korban penculikan ini adalah menyangkut nyawa manusia. Keluarga korban sudah lama menderita dan mencari-cari di mana keberadaan anggota keluarganya. Keluarga korban perlu kepastian dari pemerintah. ❑ riz/ami

Hal. 17 .....
Kelas: .....

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

edia:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☑	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

TAJUK RENCANA

Kepastian Nasib 14 Aktivis Yang Hilang

MENHANKAM/Pangab Jenderal TNI Wiranto menegaskan, ABRI bertekad untuk menata kembali pranata etika keprajuritan dan kepemimpinan agar tidak terulang berbagai penyimpangan prosedur dalam beberapa peristiwa belakangan ini (21/8/98) merupakan hal yang menggembirakan kita semua. Walaupun masih merupakan tekad yang harus ditunggu pembuktiannya, namun melihat beberapa janji yang diucapkan serta ditepatinya seperti pembentukan DKP serta penghapusan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, maka kita percaya ABRI bersungguh-sungguh dengan tekadnya itu.

Berbicara kepada pers setelah Rapat Pimpinan (Rapim) ABRI yang berlangsung di Mabes ABRI Cilangkap Jumat (21/8/1998) siang, Jenderal Wiranto juga menyatakan permintaan maaf ABRI atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka sebagai akibat pelanggaran hukum dan hak asasi manusia di dalam beberapa peristiwa di atas. Kebetulan sekali satu hari sebelumnya, keluarga dari 14 orang yang diduga diculik dan sampai sekarang belum jelas nasibnya telah mendatangi Markas Besar TNI-AD dan antara lain meminta agar aparat keamanan mengadakan semacam "barter" antara keluarga untuk dijadikan pengganti agar sanak keluarga mereka yang hilang bisa dikembalikan. Malah ada yang mengatakan, mereka rela para perwira yang diperiksa DKP tidak diajukan ke pengadilan (Mahmil) asalkan mereka yang hilang bisa dibebaskan kembali.

Peristiwa di atas mengingatkan kita kepada tiga "pekerjaan rumah" besar yang belum dituntaskan oleh ABRI yaitu kasus penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti 12 Mei 1998, kasus penculikan dan penghilangan tokoh/aktivis pro-demokrasi serta kerusuhan 13 dan 14 Mei 1998. Meskipun ada dua perwira polisi yang berkait dengan peristiwa Usakti sudah dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Militer (Mahmil), tapi itu ternyata belum menjawab pertanyaan siapakah pelaku penembakan. Sedangkan khusus mengenai peristiwa kerusuhan 13 dan 14 Mei, telah dibentuk tim pencari fakta gabungan yang mudah-mudahan mampu memberikan temuan yang lebih terarah mengenai kasus pembakaran, penjarahan dan pemerkosaan itu.

PENJELASAN yang diberikan kepada pers yang menyatakan, hari Senin (24/8/1998) besok, Panglima ABRI akan mengumumkan hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terhadap tiga terperiksa yaitu Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR dan Kol. Inf. Chairawan menunjukkan bahwa akhirnya titik terang mengenai masalah penculikan dan orang hilang makin tampak. Kita tentu mengharapkan, keputusan yang diambil oleh Menhankam/Pangab nantinya akan mencerminkan keinginan kuat ABRI untuk membersihkan dirinya sendiri dan mampu pula mencerminkan hati nurani masyarakat.

Masalahnya, arus kuat opini publik telah terbentuk saat ini yang umumnya mengharapkan agar para perwira di atas dibawa ke Mahmil, bukan karena mereka sudah pasti bersalah, tapi justru agar mampu memberi kejelasan kepada semua pihak siapa yang salah dan siapa yang hanya menjalankan perintah. Bila menurut hukum memang merekalah pihak yang bertanggung jawab atas penculikan, penyekapan dan malah pembunuhan maka tentu harus dihukum. Sebaliknya mereka bisa direhabilitasi bila benar-benar terbukti tidak bersalah dalam kasus ini.

Seperti diketahui, Jenderal Wiranto hari Jumat (21/8/1998) telah mengakui bahwa telah terjadi korban yang meninggal dan luka-luka dalam tiga peristiwa yang kita sebutkan di atas sebagai akibat pelanggaran hukum dan HAM oleh oknum ABRI. Dan ini kita tangkap sebagai isyarat betapa ABRI kini berhasil bercermin diri dan melihat kelemahan intern. Pada sisi lain, kita juga tahu, banyak tindakan ABRI sebagai suatu institusi dilakukan karena merupakan bagian dari kebijakan yang ditentukan oleh pimpinan Orde Baru yaitu Soeharto dan pada waktu itu tidak bisa ditolak begitu saja. Jadi sudah benar langkah Pangab untuk menarik suatu garis (*drawing the line*) antara masa Orba dan era reformasi.

Langkah kedua yang perlu diambil oleh ABRI menurut kita adalah implementasi dari semua yang dijanjikan itu secara transparan sehingga masyarakat bisa mengetahui seberapa jauh komitmen yang diucapkan itu telah dilaksanakan atau tidak. Langkah untuk mewujudkan janji, tidak bisa dilakukan dalam sekejap, tapi bila tidak dilakukan mulai sekarang, posisi ABRI bisa makin sulit lagi.

WALAUPUN kita menaruh rasa optimis bahwa siapa pun yang bersalah akan diajukan ke pengadilan, namun perlu kita "titipkan" masalah nasib 14 orang yang hilang itu. Kita belum bisa memperkirakan apakah soal ke 14 orang yang statusnya belum jelas itu akan masuk dalam "paket" penyelesaian yang terdapat dalam usulan yang disampaikan DKP di atas atau tidak. Mungkin kita harus sabar sampai suatu Mahmil bisa mengungkapkan atau paling tidak memberikan indikasi bagaimana kondisi mereka pada saat paling akhir, dan siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab atas nasib ke 14 orang itu.

Tetapi dari segi kemanusiaan, pimpinan ABRI harus pula mampu memberikan penjelasan kepada setiap sanak keluarga yang masih hilang itu suatu jawaban mengenai hidup atau tidaknya mereka. Ini terlepas dari nantinya jawaban pahit yang harus diberikan atau bisa juga berita yang menggembirakan mengenai keselamatan sanak saudara mereka. Kita tahu, ini merupakan pilihan yang tidak mudah karena bila jawaban pahit harus diberikan, pihak ABRI harus mampu menyeret orang-orang yang bertanggung jawab atas nasib mereka itu ke pengadilan. Kita juga tahu, jawaban atas nasib ke-14 aktivis itu, akan menjadi preseden kepada saudara-saudara kita dari Aceh, Timtim atau Irian Jaya yang banyak di antaranya kehilangan sanak saudara untuk menuntut penjelasan yang serupa.

Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	☐	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	☐	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	☐	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	☐	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KD. RAKYAT	☐	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Lagi, Keluarga Orang Hilang Mengadu ke Gus Dur

Jakarta, JP.-

Merasa berbagai upaya mereka tak menemui hasil, keluarga para korban penculikan mengadu ke KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Mereka hadir di rumah ketua umum PB NU itu didampingi tim Kontras (Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan).

Keluarga korban yang mengadu ke Gus Dur itu, antara lain, orang tua Noval; orang tua Yanni Afri; dan keluarga Herman Hendrawan, Hendra Hambali, Ismail, dan M Yusuf. Mereka diantar Faisol Reza dan Waluyo Jati yang pernah diculik. ''Kami datang kemari untuk minta bantuan Gus Dur sebagai upaya kami agar bisa bertemu kembali dengan anak saya dan keluarga lain yang diculik,'' kata Said Al Katiri, orang tua Noval, sambil menahan isak tangisnya.

Menurut Said, sampai sejauh ini, keluarga korban penculikan sudah mengadu ke berbagai instansi militer dan lembaga pemerintah lain. Namun, tidak ada jawaban memuaskan dari pertemuan dengan para pimpinan institusi tersebut.

Mendengar pernyataan-pernyataan masing-masing keluarga dan orang tua korban, Gus Dur tampaknya cukup larut dalam kesedihan. Apalagi, suasana yang semula hening itu berubah menjadi isak tangis yang tertahan. ''Saya sendiri sangat tergetar mendengar anak-anak terbaik kita disembunyikan orang atau dibuat tidak bisa bertemu dengan kita. Namun demikian, harus diingat, semua itu dalam perjuangan untuk menegakkan prinsip-prinsip kehidupan kita yang baik untuk rakyat semua,'' tutupnya.

Menurut Gus Dur, yang saat itu menerima mereka di ruang tamu, tidak selayaknya mereka menjadi korban penculikan, apalagi disembunyikan sekian lama. **(mik)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:			Tanggal						Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA		1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA		2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA		3	9	15	21	27		Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA		4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN		5	11	17	23	29		Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

Penculikan Sudah Jadi Kebiasaan Era Orde Baru

Hari Ini Hendrik Sirait Ceritakan Penderitaan saat Disekap

Jakarta, JP.-

Hendrik Sirait, salah seorang korban penculikan, hari ini akan membeberkan kasus penculikan yang dia alami. Keterangan tersebut akan diberikan di kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dengan disaksikan Komnas HAM dan para wartawan.

"Dia akan menceritakan hal-hal yang dialami saat menjalani siksaan dalam sekapan para penculik. Ia tahu persis dari kesatuan mana para penculik itu. Mereka dari ABRI di luar Kopassus," kata Direktur PBHI Hendardi kepada *Jawa Pos* di Jakarta tadi malam.

Seperti korban-korban penculikan lainnya, Hendrik juga mengalami berbagai siksaan saat berada dalam sekapan penculik. Namun, kondisinya kini sudah pulih sehingga sebagian besar bukti penyiksaan itu sudah tak begitu kelihatan.

Hendrik diculik oknum ABRI dengan tuduhan terlibat dalam kerusuhan 27 Juli 1996. Dalam "tragedi berdarah" pada saat terjadi perebutan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58 Jakarta itu, Hendrik didakwa sebagai salah seorang dalangnya.

Sementara itu, meski sudah tahu banyak tentang pengalaman Hendrik selama dalam sekapan penculik, Hendardi belum bersedia mengungkapkan kepada wartawan. Pasalnya, dia sudah menyerahkan agar kejadian tersebut diceritakan korbannya sendiri. "Kalau yang bercerita korbannya sendiri, *kan* semua bisa lebih jelas," ujarnya.

Namun, dari pengalaman yang bakal dipaparkan korban itu, katanya, dapat disimpulkan bahwa aksi penculikan ternyata sudah menjadi kebiasaan di era Orde Baru.

Sejak dilepas penculiknya, Hendrik memang langsung mengungsi ke luar negeri. Dalam pelariannya itu ia bertemu dengan Pius Lustrilanang. Lalu, kedua koban tersebut bersatu dan melakukan berbagai kegiatan unjuk rasa di luar negeri.

Pada pertengahan Februari lalu, Hendrik ikut hadir dalam sidang hak-hak asasi manusia PBB di Jenewa dan dia juga diberi kesempatan untuk menceritakan pengalaman pribadinya selama berada dalam sekapan penculik.**(ado)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
ISNIS INDONESIA	MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
AKARTA POST	REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
AWA POS	SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
OMPAS	SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
EDAULATAN RAKYAT	SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
EDIA INDONESIA		6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Keluarga Korban Penculikan Menagih Janji Sampai Ke Pangti

Jakarta, Sabtu, Merdeka

Keluarga korban penculikan tetap menagih janji ABRI untuk menuntaskan kasus penculikan aktivis dan orang hilang. Bahkan mereka akan menyampaikan tuntutan ini langsung ke Presiden Habibie selaku Pangti ABRI.

Mereka juga menyesalkan sikap Pangab Jenderal Wiranto yang tidak menunjukkan keseriusan dan kejujuran dalam menangani kasus ini, sehingga menimbulkan kebingungan masyarakat.

"Dulu ABRI pernah menyatakan bahwa dengan proses pengadilan terhadap 11 tersangka diharapkan nasib 14 orang aktivis yang belum kembali ini akan jelas. Tetapi melihat proses peradilan yang akan dilakukan saat ini kami jadi pesimis kalau ada keseriusan ABRI untuk mengungkapkan kasus ini," kata Nezar Patria, salah seorang korban penculikan yang sudah kembali, di kantor YLBHI Jakarta, kemarin.

Didampingi Rahardjo Waluyo Jati (juga korban penculikan yang telah kembali), Nezar berbicara mewakili Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi). Dalam kesempatan itu hadir pula Munir, Koordinator Kontras (Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan).

Padahal sebelumnya Danpuspom ABRI waktu itu, Mayjen Syamsu D, pernah menyatakan bahwa akan melakukan proses peradilan dengan memberikan berkas-berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang hanya ditandatangi oleh satu orang dari sembilan orang korban penculikan yang telah kembali 20 Oktober lalu.

Namun sampai saat ini hal tersebut belum dilakukan karena menurut Danpuspom masih harus dipelajari kembali. "Bagi kami yang terpenting saat ini adalah kejelasan nasib ke-13 korban penculikan yang belum kembali karena mereka ini kunci dari penyelesaian persolan penculikan secara tuntas," tuturnya.

Dia menambahkan, jika sampai sekrang belum jelas juga maka korban penculikan dan Ikohi akan terus mengejar janji-janji yang dikeluarkan Pangab. "Kalau perlu kami akan menghadap Presiden BJ Habibie," kata Nezar yang saat itu didampingi oleh koordinator Kontras Munir dan korban penculikan Rahardjo Waluyo Jati.

Sementara itu, Rahardjo Waluyo Jati menyatakan bahwa proses peradilan atas 11 tersangka yang akan dilakukan pihak ABRI bukanlah ukuran dan jaminan dari proses pengungkapan kasus penculikan aktivis prodemokrasi.

"Hal itu dilakukan hanya untuk konsumsi atau propaganda politik ABRI sebagai institusi. Kita telah mempelajari hal itu, dan ada sedikit keyakinan kalau penyelesaian kasus penculikan ini akan berakhir seperti kasus-kasus serupa, Marsinah, Udin dan penembakan mahasiswa Trisakti," katanya.

Melalui proses peradilan, Jati menilai tetap tidak memenuhi rasa keadilan rakyat. Berkaitan dengan hal itu mereka tetap menggunakan ukuran komitmen politik ABRI yang hanya bisa ditunjukkan dengan ketegasan sikap.

"Omong kosong saja kalau ABRI tidak tahu keberadaan ke-13 korban lainnya. Karena saya sempat berada di salah satu sel dengan mereka," kata Jati.

Sementara itu tentang keinginan Kontras untuk bertemu dengan Soemitro Djojohadikusumo — ayah kandung bekas Danjen Kopassus Prabowo Subianto — sepertinya belum bisa terlaksana.

Menurut Munir, sampai kemarin jawaban yang Kontras terima dari pihak Soemitro korban bersifat teknis yaitu berkaitan dengan kesibukan pakar ekonomi tersebut.**(WR)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
JAWA POS	SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
KOMPAS	SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
KEDAULATAN RAKYAT	SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA		6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Keluarga Orang Hilang Bertemu Komisi HAM PBB

Jakarta, Kompas

Korban penculikan, orangtua korban penculikan, dan aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jumat (2/10), diterima Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (United Nations High Commissioner for Human Rights/UNHCHR) di Geneva, Swiss. Sehari sebelumnya, wakil Indonesia itu bertemu dengan Kelompok Kerja (Pokja) Penghilangan Paksa (Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances) dan diterima selama sekitar dua jam dari waktu 15 menit yang biasanya disediakan.

Demikian disampaikan Bambang Widjojanto dari Dewan Penasihat Kontras, ketika dihubungi *Kompas* dari Jakarta, Jumat (2/10). Bambang berada di Geneva bersama-sama ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi) DT Utomo Raharjo dan korban orang hilang Mugiyanto.

Ketika berita ini dibuat, belum diketahui hasil pertemuan dengan UNHCHR tersebut, namun dalam pertemuan dengan Pokja Penghilangan Paksa, wakil Indonesia itu diterima oleh Ketua Rapporteur Pokja Ivan Tosevski.

Khusus untuk di Indonesia, Bambang mengatakan, Pokja Penghilangan Paksa meminta laporan terbaru orang hilang di Indonesia, karena data orang hilang yang mereka miliki terakhir adalah data orang hilang di Timor Timur tahun 1996 yang dilaporkan tahun 1997. "Saya menyampaikan, setelah jatuhnya Soeharto laporan orang hilang banyak muncul dari Aceh dan Irian Jaya, selain hilangnya sejumlah aktivis di Jawa," jelas Bambang.

"Sejauh ini belum ada langkah konkret dari *working group* tersebut, namun *working group* itu bisa menuntut pemerintah untuk segera mengadili pelakunya," ungkap wakil Kontras itu. **(oki)**

Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
SNIS INDONESIA	MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
KARTA POST	REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
WA POS	SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
OMPAS	SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
EDAULATAN RAKYAT	SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
EDIA INDONESIA		6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Munir: Penculik Masih Berkeliaran

Jakarta, Kompas

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Munir mengemukakan, lima korban penculikan mengaku pernah bertemu dengan para penculiknya baik secara sengaja atau tidak disengaja. Peristiwa itu menunjukkan bahwa ada penculik yang masih berkeliaran.

"Kita juga boleh curiga 11 tersangka (yang disebut-sebut) itu apakah benar-benar pelakunya atau yang lain, dan apakah betul mereka juga selama ini ditahan Puspom. Oleh karena, beberapa minggu belakangan ini paling tidak lima korban yang pernah diculik, bertemu dengan orang yang menculik mereka. Artinya, pelaku penculikan itu ada yang masih berkeliaran," kata Munir ketika berbicara di depan mahasiswa IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Jumat (9/10).

Munir menjelaskan, pertemuan korban penculikan dengan penculiknya itu ada yang terjadi secara tak sengaja ketika menggunakan kendaraan umum, tetapi ada juga yang terjadi disengaja di mana pelaku penculikan justru menguntit korban sehingga korban penculikan yang sudah kembali itu lari ketakutan.

Munir mengatakan, pernyataan Komandan Puspom ABRI Mayjen Syamsu Djalaluddin bahwa nasib ke-13 korban penculikan akan diketahui setelah digelar pengadilan militer terhadap 11 tersangka, menunjukkan lemahnya kapasitas institusi Puspom. Bisa jadi, Puspom sama sekali tidak bisa memeriksa mereka karena adanya kekuatan lebih besar yang tidak bisa ditembus Puspom.

Kenyataan itu, tambah Munir, juga menguatkan dugaan bahwa sejumlah korban penculikan yang belum dibebaskan hingga sekarang ini memang masih disekap oleh kelompok yang Puspom sendiri tidak punya akses untuk menembusnya.

Akan temui Sumitro

Munir menilai, Puspom ABRI tidak punya kapasitas untuk menyelesaikan kasus penculikan aktivis. Itu tampak dari belum jelasnya keberadaan 13 korban penculikan yang masih hilang. Secara terbuka, Puspom juga belum pernah menyampaikan hasil pemeriksaan mereka terhadap para pelaku penculikan dari beberapa kesatuan.

Munir menyebutkan, pekan depan Kontras akan bertemu dengan Sumitro Djojohadikusumo, ayah Prabowo Subianto (mantan Komandan Komando Pasukan Khusus), untuk mendapatkan informasi lebih jauh mengenai keterangan yang diberikannya di tabloid *DeTak* bahwa Prabowo mendapatkan perintah dari "orang atas". "Pada prinsipnya Pak Sumitro tidak keberatan untuk bertemu, namun masih akan dirundingkan soal waktu dan tempatnya," jelas Munir. **(oki)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
JAWA POS	SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
KOMPAS	SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
KEDAULATAN RAKYAT	SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA		6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

ABRI didesak tuntaskan kasus penculikan

JAKARTA (Bisnis): Komisi Untuk orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (Kontras) mendesak Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI menggunakan prosedur konfrontasi untuk mengetahui keberadaan 14 korban penculikan.

"Lebih baik memkonfrontasikan keterangan tersangka dengan saksi korban daripada terjadi tarik ulur dalam penyelesaian masalah ini," kata koordinator Kontras Munir kepada wartawan, kemarin.

Selama ini, lanjutnya, keterangan yang diberikan Puspom hanya berdasarkan informasi dari tersangka. Keterangan korban penculikan yang telah kembali tidak dinyatakan sebagai fakta yang mendukung proses dakwaan, ujar Munir.

Dia menjelaskan prosedur atau metode konfrontasi akan menghadapkan tersangka dan saksi korban yang mengaku bertemu beberapa orang korban yang masih belum kembali. Dalam pertemuan itu Puspom akan dapat memperoleh informasi dari satu pihak yang langsung dapat dikonfirmasikan ke pihak lain, kata Munir.

Menurut dia, sejauh ini tidak ada upaya mengkonfrontasikan keterangan korban penculikan Andi Arief dengan pelaku. Padahal, kata Munir, Andi bertemu dengan Suyat dan Deddy Hamdun.

Dalam kesempatan itu Munir menjelaskan keberngkatan tiga delegasi Kontras untuk mengikuti sidang ke-55 Kelompok Kerja Penghilangan Paksa PBB dan menghadiri konferensi Asean Federation for Fictims Disappearances (Afad) dengan Federasi Orang Hilang Amerika Latin.

Delegasi yang terdiri dari Bambang Widjojanto (anggota Badan Penasehat Kontras), Utomo Rahardjo (ayah korban Bimo Petrus), dan Mugiyanto (korban penculikan) berangkat 29 September malam.

"Melalui acara itu Kontras berharap mendapat masukan mengenai cara penanganan masalah orang hilang dan memperluas jaringan kerjasama internasional," kata Munir. **(rah)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	~~MERDEKA~~	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	~~1999~~
JAWA POS	~~SERAMBI~~ INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	~~September~~	2000
KOMPAS	SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
KEDAULATAN RAKYAT	SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	~~November~~	2002
MEDIA INDONESIA		6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

Koordinator Kontras: Ini Indikasi tak Baik

sus Penculikan Aktivis Diajukan ke Mahmil 20 Oktober 1998

JAKARTA — Meski sejumlah korban penculikan belum jelas nasibnya dan banyak yang enggan memberikan kesaksian, Puspom ABRI tetap berniat memahmilkan 11 nggota ABRI yang diduga merupakan pelaku penculikan. Komandan Puspom Komandan Puspom ABRI Mayjen TNI Syamsu D menegaskan, berita acara pemeriksaan (BAP) 11 anggota ABRI yang diduga terlibat kasus penculikan aktivis, akan diajukan ke Oditur Militer dan Mahkamah Militer pada 20 Oktober. ''Agar persidangan Mahmil/-Mahmilti bisa segera dilaksanakan,'' kata Syamsu menanggapi pertanyaan wartawan, di Jakarta, kemarin.

Danpuspom yang juga Jaksa Agung Muda bidang Inteligen itu mengatakan, proses pengajuan BAP kasus penculikan itu ke Mahmil memang mengalami hambatan. Ini karena baru satu dari sembilan saksi utama yang bersedia menandatangani berita acara pemeriksaannya.

Meskipun demikian, Puspom ABRI akan menggunakan hasil pemeriksaan yang ada, termasuk hasil pemeriksaan pihak kepolisian, untuk melengkapi hasil pemeriksaan yang dilakukan Puspom ABRI.

Sebelumnya, Kepala Penyidik Puspom ABRI Kolonel CPM Sudirman P mengatakan bahwa delapan dari sembilan aktivis korban penculikan masih terlihat kurang serius mempercepat pengajuan berita acara pemeriksaan (BAP) sebelas tersangka penculik ke Oditur Militer dan Mahmil.

''Korban penculikan itu semestinya bersedia menandatangani BAP sebelas oknum ABRI yang diduga terlibat dalam kasus penculikan aktivis itu, agar perkaranya segera bisa diajukan ke Mahmil,'' katanya.

Menurut Kolonel Sudirman, hanya Pius Lustrilanang yang sudah menyatakan kesediaannya membantu agar perkara itu bisa secepatnya diajukan ke Mahmil, misalnya dengan menandatangani BAP.

Dalam menanggapi permintaan Andi Arief — korban penculikan lainnya — agar bisa bertemu terlebih dahulu dengan tersangka penculiknya baru BAP-nya ditandatangani, Sudirman menyatakan, permintaan itu tidak bisa dipenuhi, karena tersangka baru bisa ditemui di persidangan.

Rencana Danpuspom ABRI tersebut, dinilai Kordinator Komite Solidaritas untuk Orang Hilang dan Tindak kekerasan (Kontras) Munir SH, sebagai sebuah indikasi yang tak baik. Sebab, katanya, seharusnya sebelum tindakan itu diambil maka pihak Danpuspom harus terlebih dahulu menyatakan mengenai kepastian nasib 14 korban penculikan yang kini masih tidak dapat diketahui keberadaannya.

''Bagi kami ini bisa berarti dua kemungkinan. *Pertama*, tindakan ini jelas perbuatan yang sangat prematur dan sebagai bagian politik cuci tangan pihak ABRI. Dan *Kedua*, kenyataan ini juga dapat dipakai sebagai pertanda betapa masih tidak transparannya segala tindakan yang diambil oleh aparat keamanan,'' kata Munir SH.

Menurut Munir, dengan rencana itu maka pihaknya juga semakin bertanya-tanya mengenai i'tikad baik dari pihak Danpuspom yang selama ini sering dikemukakan. Sebab, bagaiamanapun Danpuspom sendiri sama sekali tidak boleh melepas tanggungjawab atas tindakan para aparat ABRI tersebut.

''Lagi pula tindakan para penculik itu jelas tidak merupakan hal sepele. Mereka sudah melakukan tindakan kejahatan dalam kategori berat. Dan inilah yang harus dipahami oleh pihak Danpuspom. Sekali lagi kami tegaskan, kasus ini bukanlah kasus main-main yang bisa dibelak-belokan dengan begitu saja,'' kata Munir lagi.

Sementara itu, keberadaan nasib 14 orang yang hilang hingga sekarang tetap saja diliputi misteri. Berbagai kabar burung mengenai keberadaan mereka terus saja timbul-tenggelam. Namun, dari sumber *Republika* mengatakan, konon pihak Puspom ABRI sebenarnya sudah tahu mengenai keberadaan nasib dari para korban. ■ ant/uba

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal						Bulan		Tahun
BISNIS INDONESIA	MERDEKA	1	7	13	19	25	31	Januari	Juli	1998
JAKARTA POST	REPUBLIKA	2	8	14	20	26		Februari	Agustus	1999
JAWA POS	SERAMBI INDONESIA	3	9	15	21	27		Maret	September	2000
KOMPAS	SUARA MERDEKA	4	10	16	22	28		April	Oktober	2001
KEDAULATAN RAKYAT	SUARA PEMBARUAN	5	11	17	23	29		Mei	November	2002
MEDIA INDONESIA		6	12	18	24	30		Juni	Desember	2003

11 Oknum Kopassus Tetap Disidangkan

Jakarta, Kamis, Merdeka

Sebanyak 11 oknum Kopassus yang jadi tersangka penculikan aktivis pro demokrasi, tetap akan disidangkan tanpa menunggu BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari saksi korban. Bahkan pihak Puspom ABRI yang diwakili oleh Lettu Gatot Hermawan telah menghubungi Koordinator Kontras, Munir, guna menjelaskan perihal tersebut.

Menurut Munir, pihak Puspom ABRI berharap dari persidangan tersebut nantinya bisa terungkap 14 orang korban penculikan yang kini nasibnya masih belum jelas.

"Padahal kami menganggap bahwa jika persidangan dilakukan sebelum ada kejelasan 14 korban penculikan justru untuk menyelamatkan para tersangka maupun institusi lain yang terlibat dalam kasus penculikan tersebut," tutur Munir di kantor YLBHI Jakarta, kemarin.

Menurutnya, berdasarkan prinsip hukum jika ada tindakan yang bersifat berantai itu maka tersangka akan dituntut pada tindakan terberat yang muncul akibat tindak pidananya.

"Kalau ada orang yang menculik, lalu yang diculik meninggal maka tindak pidananya adalah pembunuhan. Dan kalau nanti di persidangan mereka didakwa hanya menghilangkan kemerdekaan dan penganiayaan maka hilang kemungkinan tuntutan terhadap tersangka untuk bertanggungjawab jika di antara 14 orang tersebut dihilangkan atau dibunuh," katanya.

Sehingga, menurut Munir, terlihat ada upaya untuk melindungi proses-proses besar pertanggungjawaban yang maksimal akibat tindak pidananya. Jangan sampai proses peradilan itu hanya untuk melepaskan tanggung jawab untuk pencarian ke-14 korban penculikan. "Sementara prosesi pengadilan bukan prosesi penyelidikan yang bisa mengungkap nasib 14 orang itu," katanya.

Sementara itu Munir juga mengkritik pihak Puspom ABRI yang hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat hanya berdasarkan keterangan tersangka semata. Sementara keterangan dari saksi mata tidak pernah diungkapkan dan tidak mendukung proses dan tujuan pelaku.

"Sebenarnya dari keterangan saksi, kesimpulan Puspom bias mengenai nasib ke-14 korban itu. Contohnya, kasus Yani Afri dari keterangan-keterangan yang harusnya didapat kesimpulan kalau mereka satu paket penculikan karena berada di satu sel bawah tanah bersama korban penculikan yang sudah kembali. Tetapi Puspom sampai hari ini belum menyatakan hal itu," paparnya.

Bahkan ada prosedur yang seharusnya bisa dilakukan oleh Puspom ABRI yaitu cara konfrontasi. Misalnya Desmon, Pius, Feisol Reza dan Raharjo Waluyo Jati mengaku bertemu dengan Sonny dan Yanny Afri maka itu seharusnya dikonfrontir kalau pelakunya tidak mengaku dan metode itu tidak dilakukan oleh Puspom.

Selain itu informasi yang diutarakan Andi Arief juga tidak dikonfrontir. Padahal Andi mengaku melihat wajah para penculik dan dari penculik Andi juga mendapat informasi dari pelaku penculikan tentang nasib Suyat, Deddy Hamdun, Noval dan yang lainnya.

"Kalau memang memakai prosedur konfrontasi sebenarnya tidak perlu ada persetujuan dengan kuasa hukum para tersangka tersebut," tambahnya.**(WR)**

ELSAM Pusat Informasi dan Dokumentasi
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
THE INSTITUTE FOR POLICY RESEARCH AND ADVOCACY

Media:		Tanggal	Bulan		Tahun
☐ BISNIS INDONESIA	☐ MERDEKA	1 7 13 19 25 31	Januari	Juli	1999
☐ JAKARTA POST	☐ REPUBLIKA	2 8 14 20 26	Februari	Agustus	1999
☐ JAWA POS	☐ SERAMBI INDONESIA	3 9 15 21 27	Maret	September	2000
☐ KOMPAS	☐ SUARA MERDEKA	4 10 16 22 28	April	Oktober	2001
☐ KD. RAKYAT	☐ SUARA PEMBARUAN	5 11 17 23 29	Mei	November	2002
☐ MEDIA INDONESIA	☐	6 12 18 24 30	Juni	Desember	2003

"MOBILITAS" KORBAN PENCULIKAN DI TEMPAT "X"

(?): Di tempat "X" yang kemudian di identifikasi Puspom ABRI adalah sel di Markas Kopassus Cijantung disekap Lucas da Costa.

26 Maret 1997: Yani Afri (Rian) dan Sonny diculik masuk ke tempat yang sama.

29 April 1997: Deddy Hamdun, Noval dan Ismail diculik dan masuk ke tempat yang sama.

(?): Lucas di lepaskan dengan dipulangkan-- ke rumah orangtuanya, sekarang masih hidup.

Juli-Agustus 1997: Deddy Hamdun, Noval dan Ismail dikeluarkan dari sel, tidak pernah kembali ke sel, dan tidak dipulangkan ke rumah orangtuanya. Hingga sekarang, tidak diketahui keberadaannya.

4 Februari 1998: Pius dan Desmond diculik dari dua tempat yang berbeda dan masuk ke sel di tempat yang sama.

2 Maret 1998: Haryanto Taslam diculik dan masuk ke sel di tempat yang sama.

12 Maret 1998: Herman Hendrawan, Raharjo Waluyo Jati dan Feisol Reza di culik. Herman dimasukkan ke sel di tempat yang sama dengan Pius dan Desmond. Sementara Reza dan Jati diinterogasi dan istirahat dikursi tempat dia diinterogasi.

13 Maret 1998: Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugiyanto diculik, diinterogasi di suatu tempat yang sama dengan Jati dan Reza, tempat "X" yang kemudian diidentifikasi sebagai Markas Kopassus Cijantung, dan tidak pernah dimasukkan ke sel di mana Pius dkk berada.

13 Maret 1998: Pada tengah malam Herman dikeluarkan dari sel, tidak pernah kembali lagi ke sel, tidak dikembalikan ke rumah orangtuanya. Sampai sekarang keberadaannya tak diketahui.

14 Maret 1998: Dini hari sekitar pukul 02.00 WIB Reza dimasukkan ke sel tempat sebelumnya Herman berada.

15 Maret 1998: Nezar, Aan dan Mugiyanto dibawa dari tempat mereka diinterogasi, dipindah ke Polda Metro Jaya.

15 Maret 1998: Sonny dan Yani Afri dikeluarkan dari sel tengah malam, tidak pernah kembali ke sel, tidak dikembalikan ke rumah orangtuanya. Keberadaannya sampai sekarang tak diketahui.

16 Maret 1998: Jati dimasukkan ke sel tempat Sonny sebelumnya disekap.

28 Maret 1998: Andi Arief diculik dari Lampung, di interogasi di tempat interogasi yang sama dengan Jati dkk.

2 April 1998: Pius dikeluarkan dari sel, dikembalikan ke rumah orangtuanya.

3 April 1998: Desmond dikeluarkan dari sel, dikembalikan ke rumah orangtuanya.

6 April 1998: Andi Arief dimasukkan ke sel tempat di mana Reza Jati, dan Taslam masih disekap.

15 April 1998: Taslam dikeluarkan dari sel, tidak pernah kembali ke sel, dikembalikan ke rumah orangtuanya.

16 April 1998: Andi Arief dikeluarkan dari sel, tidak pernah kembali ke sel, dipindah ke Mabes Polri.

25 April 1998: Jati dan Reza dikeluarkan dari sel, tidak pernah kembali ke sel, dipulangkan ke rumah orangtuanya.

Sumber: *Kesaksian-kesaksian Korban di Kontras dan PBHI.*

Korban yang berdasarkan keterangan korban lain tidak pernah diketahui berada di lokasi "X" adalah Suyat, Petrus Bima Anugerah, dan korban yang hilang pada tanggal 14 Mei (Hendra Hambalie, Yadin Muhidin, M Yusuf, Ucok Munandar S). Keterangan bahwa Suyat diculik dari Solo diperoleh Jati dari orang yang menginterogasinya. Keterangan mengenai Petrus Bimo disampaikan Pius bahwa Jati beberapa kali diminta interogatornya untuk mengidentifikasi Petrus Bimo dan di mana keberadaannya. **(oki)**